



CM Rien Kuntari

TIMOR TIMUR

SATU MENIT TERAKHIR

catatan seorang wartawan

Pengantar oleh

Alli Alatas | Xanana Gusmão | Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo

TIMOR TIMUR

Satu Menit Terakhir

Catatan Seorang Wartawan

CM Rien Kuntari

Pengantar:

Ali Alatas

Kay Rala Xanana Gusmão

Agus Widjojo

Editor:

August Parengkuan

Kay Rala Xanana Gusmão

Tim Editor Rien Kuntari

“Sebuah kesaksian menarik berdasarkan pengalaman pribadi yang unik dan dikisahkan secara tulus, gamblang, rinci, dan sarat dengan perkembangan dramatis.”

- **Ali Alatas**

“Kemampuan Mbak Rien yang secara luwes bergerak dari tataran formal hingga informal, memberikan detail dan artikulasi tentang kejadian di Timor Timur pada waktu itu.”

- **Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**

“Yang tersaji dalam buku ini bukan isapan jempol dan bukan pula kepiawaian seorang wartawan oportunistis, melainkan pengalaman nyata seorang pejuang pers dan patriot bangsa, terdorong oleh kecintaannya kepada dua bangsa yang bersaudara, Indonesia dan Timor Leste.”

- **Xanana Gusmão**

“Rien Kuntari adalah wartawan yang rajin menjelajahi medan kekerasan dan peperangan. Namun ia juga seorang perempuan. Betapapun bengis dan kejam medan konflik yang dihadapinya, ia selalu bisa melihat dan menangkapnya dengan mata hati seorang perempuan yang penuh dengan kelembutan, kejujuran, dan bela rasa terhadap kemanusiaan. Konflik kekerasan di medan perang menjadi jeritan dan air mata di medan hatinya yang mudah tergores oleh penderitaan.

Itulah yang membuat tulisan jurnalistiknya tentang peristiwa dramatis di sekitar jajak pendapat di Timor Timur 1999 ini menjadi begitu indah dan mengharukan tapi juga menegangkan. Membaca buku ini kita seakan diajak untuk masuk ke dalam relung terdalam kemanusiaan, yang mendambakan cinta, kesetiaan, perdamaian, dan ketentraman justru di tengah konflik yang bengis dan kejam.

- **Sindhunata, wartawan, Pemimpin Redaksi Majalah Basis**

“Meliput adalah tugas sehari-hari Rien Kuntari, wartawan *Kompas*. Dia telah memasuki medan-medan perang paling berbahaya, termasuk Rwanda, Irak, dan Kamboja. Tapi, di antara semua wilayah konflik yang pernah dia liput, Timor Timur adalah yang paling sulit, paling membahayakan, dan sekaligus paling mengesankan.

Sebagai seorang wartawan, yang dituntut bersikap obyektif dan *cover both sides*, Rien menghadapi dilema. Sebagai seorang wartawan asal Indonesia, dia bisa dicurigai sebagai pro-otonomi oleh kelompok pro-kemerdekaan. Sebaliknya, lantaran dapat mengakses beberapa tokoh kunci CNRT, dia juga dituduh pro-kemerdekaan. Dan kecurigaan di medan konflik berarti berada di tubir kematian.

Inilah catatan seorang wartawan atas peristiwa-peristiwa dramatis menjelang, selama, dan setelah jejak pendapat di Timor Timur tahun 1999 - sebuah segmen amat penting dalam garis sejarah bangsa Indonesia. Ditulis dengan keberanian seorang “syahid”, kejujuran seorang jurnalis tulen, dan ketulusan seorang “manusia” - *a true human being*. Tak berlebihan jika buku ini layak dicatat sebagai sebuah dokumen kemanusiaan (*humane documentary*).

- Mizan

TIMOR TIMUR SATU MENIT TERAKHIR

CATATAN SEORANG WARTAWAN

Copyright © CM Rien Kuntari, 2008

Editor:

August Parengkuan, Editor Senior

Kay Rala Xanana Gusmão, Perdana Menteri Timor Leste

Tim Editor Rien Kuntari

Desain sampul dan tata letak: JC Elang Perkasa

Diterbitkan sendiri

(Self published)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

*To those who think for all . . .
who offer others seats of honour and respect . . .
who venerate others, instead of waiting to be venerated –
to them I dedicate this book with humble esteem and deepest salutations.*

– Prabhat Ranjan Sarkar

1981, Published in: The Liberation of Intellect: Neohumanism

Kupersembahkan buku ini untuk Bapak Ali Alatas SH,
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 1988-1999;
guruku, ayahku, pembimbingku, dan sahabatku

“Rien, jii jangan pergi sendiri..”

“Rien, *jii* jangan pergi sendiri. Kalau mau ke Timtim lagi, nanti bersama saya saja...”
Kalimat itu diucapkan Menteri Luar Negeri Ali Alatas saat kami bertemu di Bina Graha,
Jakarta, tak lama setelah saya kembali dengan selamat dari Timtim awal September 1999
lalu. Seperti hari-hari sebelumnya, setelah di Jakarta, saya kembali bertugas di lingkungan
Istana Kepresidenan RI.

Pagi itu, Pak Ali Alatas tampak cerah. Ia sedang bersiap-siap mengikuti sidang Kabinet
yang langsung dipimpin oleh Presiden. Tentu kalimat itu diucapkan bukan tanpa maksud.
Pada waktu itu, Pak Ali Alatas dengan tegas mengatakan, Timtim memang terlalu
berbahaya untuk saya.

Di sela-sela waktu yang begitu sempit itu, Pak Alatas bercerita, setelah mendapat
telepon dari Mas August Parengkuan, atasan saya di Harian *Kompas*, tentang bahaya yang
kami hadapi di Timtim, Pak Alatas lalu membawa masalah itu dalam salah satu sidang
Kabinet.

Seperti diceritakan sendiri oleh Pak Ali, intinya dalam sidang tersebut Pak Alatas mengatakan, jika saya dan teman-teman yang bertugas di Timtim benar-benar terbunuh, Pak Alatas tidak bersedia lagi membela atau menangkis serangan internasional yang ditujukan kepada militer Indonesia, khususnya dalam berbagai kasus pelanggaran HAM.

Saya terdiam mendengar cerita itu. Takjub sekaligus haru. Hati pun semakin bergolak ketika Pak Alatas yang dikenal selalu berbicara dengan sangat santun itu secara implisit mengatakan siap mempertaruhkan kedudukannya sebagai Menteri Luar Negeri, atas sikapnya itu. “Kalau *jij* benar-benar dibunuh dan mati di Timtim, kita mau bagaimana lagi,” katanya. “*Jij*, jangan ke sana sendiri ya,” kata Pak Alatas mengulangi pesannya sebelum saya keluar dari ruangan karena sesaat lagi sidang kabinet akan dimulai.

Kamis, 11 Desember 2008, sungguh menjadi hari yang sangat memilukan. Di tengah gerimis pagi hari itu, terkirim kabar duka yang begitu dalam dan mengejutkan. “Rien, Pak Alatas wafat tadi pagi di Singapura..” Begitu bunyi sms yang muncul di layar telepon genggam saya. Saya terduduk lesu membaca sms itu. Lemas. Seluruh tulang terasa copot. Ada kesedihan dan rasa kehilangan yang luar biasa. Satu persatu butir-butir air mata mulai membasahi pipi. Semakin lama, air mata itu semakin deras. Bagi saya, Pak Alatas, sosok yang selalu tersenyum itu bukan saja seorang Menteri, melainkan juga seorang guru, pembimbing, ayah, sekaligus sahabat.

Awal keterlibatan saya di bidang diplomasi dan politik luar negeri ibarat dimasukkan begitu saja di hutan belantara gelap. Tanpa persiapan sedikit pun. Dan Pak Alatas adalah lentera. Dengan penuh kesabaran Pak Alatas tak pernah henti membimbing. Ia bahkan memberi kepercayaan begitu luas. Tak jarang Pak Alatas memperlakukan saya sebagai delegasi, bukan wartawan. Ia tak hirau ketika saya duduk di antara para delegasi, dalam pertemuan tertutup sekali pun.

“*Jij* ikut ya Rien,” kata Pak Alatas setiap kali akan melawat ke luar negeri. Karena itu, kemana pun Pak Ali pergi, hampir bisa dipastikan saya diajak serta. Kesempatan ini membuat saya bisa merasakan secara langsung getaran dan denyut perundingan dua pihak bertikai. Dalam proses perdamaian Kamboja, misalnya. Dari sini saya memperoleh pemahaman yang sesungguhnya akan makna dari kata *impartial* (tidak berpihak). Termasuk, bagaimana menerapkan makna itu dalam sikap. Modal itulah yang menjadi bekal utama dalam meliput lepasnya Timor Timur dari pangkuan Bumi Pertiwi.

Lebih dari itu, Pak Alatas sepertinya terus mendampingi proses lahirnya buku ini. Sosok yang lebih dikenal dengan sebutan Alex atau Pak Ali dalam bahasa saya itu, mengembuskan nafas terakhir setelah buku tentang lepasnya Timtim ini benar-benar diterbitkan. Pak Ali wafat setelah pada tanggal 20 November diminta beristirahat total di sebuah rumah sakit di Jakarta yang kemudian dilanjutkan perawatan di Singapura.

Masih jelas terbayang, betapa Pak Alatas tak pernah henti mengingatkan pentingnya menulis pengalaman meliputi lepasnya Timtim dari NKRI. “Kapan bukunya jadi diterbitkan, Rien. Tapi *jjj* harus ekstra hati-hati,” begitu ujarnya setiap saat kami bertemu.

Hati semakin tersanjung ketika Pak Alatas pun tak berkeberatan menuliskan kata pengantar. “*What do you want me to do? Do you want me to write a long long introduction or just short introduction?*” kata Pak Alatas saat kami bertemu di Gedung Pancasila, Pejambon, Jakarta, awal Juli lalu. “*But, there is a problem, Rien. I am now a very very slow reader.* Entah kenapa saya tidak lagi bisa membaca dengan cepat,” lanjutnya.

Tanpa terasa dan tanpa pernah terduga, ucapan itu menjadi kalimat terakhirnya. Dan pengantar yang ditulis Pak Alatas pun menjadi karya tulis terakhir yang diberikan kepada saya. Rasa haru, duka dan kehilangan yang mendalam terukir dalam tiap butir air mata yang terus mengalir. Namun, semua itu takkan pernah mengurangi rasa hormat, cinta kasih, dan penghargaan kami yang begitu tinggi. Selamat jalan Pak Ali...***



*Menu Ali Alatas dalam busana tradisional Timtim ketika berkunjung ke Dili
foto: CM Rien Kuntari*



*Mantan Menlu Ali Alatas berbincang dengan penerusnya, Hassan Wirajuda dan penulis saat bersilaturahmi di kediaman Menlu, Kompleks Widyachandra, 23 November 2003
foto: Rasta/Humas Departemen Luar Negeri*



*Menteri Luar Negeri Ali Alatas berbincang dengan penulis dalam perjalanan khusus dari Phnom Penh ke Jakarta, usai memimpin perundingan perdamaian Kamboja, tahun 1997
foto: Dok. Pribadi*



"Hara me pita, gaori mata, svadesha bhuvanrayam"
The Lord is my father, Prakrti is my mother, the universe is my homeland.

- PR Sarkar -

ISI BUKU

PRAKATA PENULIS - Edisi E-Book

Tiga Tahun Kemudian

Amerika

Fransisco Carvalho

PRAKATA PENULIS - Edisi Cetak

Kebenaran Faktual

PRAKATA Ali Alatas

PENGANTAR Kay Rala Xanana Gusmão

PENGANTAR Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo

PROLOG

Senja di Istana Merdeka

“Beri Kemerdekaan”

Sarat Intrik dan Permainan Politik

Posisi Barat

Bab I - Yang tersingkir, Pro-Integrasi

Kelompok Milisi

Timtim Runyam

Dokumen Garnadi dan Propaganda Hitam

Mengenal Nazario Vital S Corte Real, Pelaku Sejarah Integrasi
Jika Otonomi Terpilih
Kalah, ... Perang!

Bab II - Mengenal Pro-Kemerdekaan

Jalan Panjang Menuju Falintil
Taur Matan Ruak, Wakil Panglima/Kepala Staf Falintil
Tentang CNRT
Antara Timor Timur dan Timor Leste
HUT-24 Falintil

Bab III - Agustus!

Kriiinggg ..., Domingus Martiins
Aitarak Jawa
Dor! Wartawan pun Tertembak
Mahasiswa Itu Tersungkur, Bersimbah Darah
Upaya Damai dan Ketegangan di Bekora
Terlaksana dengan Sukses

Bab IV - September Kelabu

Genderang Perang
“*Sweeping*” Wartawan
Luluh Lantak
Senin, 6 September 1999
Saksi Mata, Suster Monica
Milisi dan TNI
Kecaman Internasional

Bab V - Darurat Militer

“Londo” INTERFET

“Eksodus” Lagi

Ikan Asin Terlezat

Semrawut, Darurat Militer Dicabut

Detik Terakhir Pasukan TNI di Timor Timur

Rp 15.000 untuk Istri

Kodal Diserahkan

Bab VI - Tahanan Kota

Living with Killers

Rekanku Agus Mulyawan

Kembali ke Jakarta

Terus “Salah Lirik” dan Kontak Tembak

Kembali ke Timtim

Lunturnya Simpati kepada Australia

Salah Lirik a la Mayjen Peter Cosgrove

Soal Peta

Prajurit TNI vs INTERFET

Lourenco, Metha, dan Manuel Gueterres

Angin Perdamaian

Bab VII - Viva Timor Leste

Berbahasa Indonesia

Duka Mauhudu, Suka Kapten Artawan

Menolak Pulang ke Indonesia

Bab VIII - Bendera Merah Putih Tak Lagi Berkibar

Diusir ...???!!!

Terpaksa Tulis Tangan

Rasis dan Diskriminatif

Bendera itu Turun dalam Sunyi

Buffer Zone

Akhirnya Datang Juga!

Selamat Jalan ...!!

Bab IX - Xanana, Saudaraku

Tim Alfa. "PR" INTERFET

Xanana, Saudaraku

Epilog

Kronologi Lepasnya Timor Timur

LAMPIRAN I - Dokumen Rahasia yang Bocor

LAMPIRAN II - Menu Ransum Tentara INTERFET

LAMPIRAN III - Ringkasan Kasus Tuntutan Fransisco Carvalho

LAMPIRAN IV - Surat Tuntutan dari Fransisco Carvalho

DAFTAR SINGKATAN

KEPUSTAKAAN

PROFIL PENULIS

PRAKATA PENULIS - Edisi E-Book

Tiga Tahun Kemudian

Manusia memang hanya mampu merencanakan. Dan Tuhanlah yang menentukan. Sejauh kemampuan kita berpikir dan mengantisipasi, tetap saja ada celah kosong yang memungkinkan terjadinya hal-hal tak terduga.

Saat menerima tantangan untuk menuliskan pengalaman meliput lepasnya Timor Timur dari pangkuan Bumi Pertiwi, tentu segala hal telah dipertimbangkan masak-masak. Tak hanya nyali yang memang harus besar tetapi sekaligus kesediaan untuk menerima resiko terburuk dalam bentuk apapun.

Faktor keamanan tentu menjadi pertimbangan utama. Baik keamanan penulis narasumber, terlebih penerbit, yaitu *Kompas*. Berbagai pertimbangan pun lalu dilakukan. Diawali dengan pemilihan bentuk dan sistem penulisan hingga penyebutan narasumber seaman mungkin dan pemilihan sosok untuk menuliskan pengantar. Pilihan jatuh pada mantan Menlu Ali Alatas, Letjen TNI Agus Widjojo, dan PM Timor Leste Xanana Gusmão.

Ada perasaan lega ketika Mas August Parengkuan, mantan *Chief Editor Kompas* selaku Editor Utama buku itu menyatakan aman. Mas August lalu menyerahkan draft buku itu kepada Mas St. Sularto, Wakil Pemimpin Umum *Kompas*. Sekitar dua minggu kemudian Mas Larto mendatang meja saya untuk mendiskusikan beberapa hal. Beberapa hari kemudian beliau membawa surat resmi yang megatakan *Kompas* menolak menerbitkan buku itu dengan pertimbangan faktor keamanan. Ternyata segi pengamanan yang telah kami lakukan belum cukup untuk mengamankan *Kompas*. Ketidakberanian *Kompas* untuk menerbitkan pun lalu dipertanyakan banyak pihak.

“*The show must go on, Rien, with or without Kompas,*” kata Mas August Parengkuan begitu membaca surat penolakan dari Mas Larto. “Buku ini harus terbit karena merupakan fakta sejarah lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ujarnya. Akhirnya buku itu diterima oleh Penerbit *Mizan*. Dan di luar dugaan, buku berjudul “*Timor Timur Satu Menit Terakhir, Catatan Seorang Wartawan*” itu laris manis. Dalam waktu sebulan buku itu telah cetak ulang.

Amerika

Namun, kegembiraan itu tak pernah sempat saya rasakan. Meski sudah dengan upaya pengamanan yang luar biasa termasuk keterlibatan unsur militer aktif di dalam penulisan buku ini, namun siapa sangka ada bau minyak tanah yang menyengat di seluruh rumah saya usai peluncuran buku pada 4 Desember 2008.

Sejak hari itu, pulang ke rumah menjadi hal yang mustahil. Selama hampir sebulan, atau tepatnya 28 hari, saya terpaksa terus berpindah-pindah tempat. Repotnya, ketika terasa aman dan akan mencoba kembali hidup normal di Jakarta, justru saya mendapatkan SP 3 atau Surat Peringatan Terakhir dari Harian Kompas. Kompas menilai saya telah melanggar aturan karena “kabur” selama 28 hari tanpa pemberitahuan. Apa boleh buat, ini salah satu resiko yang harus saya terima. SP3 itu berbuntut pada pemecatan oleh Kompas, Februari 2009, tepat di saat buku Timtim itu cetak ulang.

Situasi yang tidak kondusif di Indonesia membuat saya akhirnya menerima saran untuk pergi ke Amerika. Juli 2009 saya terbang ke Washington DC, beberapa saat kemudian pindah ke New York. Saya bergabung dengan para penulis dari seluruh dunia melakukan residensi di *Ledig House*, wisma bagi para penulis internasional di Ghent, Upstate New York. Ghent adalah kota kecil di bukit Catskills dengan pemandangan luar biasa indah, sekitar dua jam dari New York dengan kereta. Di sini kami berbagi cerita termasuk mendiskusikam berbagai hal, hingga dipertemukan dengan berbagai penerbit besar AS.

Pada tanggal 1 November 2009, para penulis dari Kenya, Jerman, Amerika, India dan Indonesia mendapat kesempatan membacakan karyanya dalam acara “*Reading Night*” di KGB Bar, Manhattan. KGB Bar yang dulu sering digunakan sebagai tempat pertemuan oleh Stalin *es*, kini menjadi bar yang mengkhususkan diri pada penghargaan karya tulis. Bisa dikatakan, belum dianggap sebagai karya tulis jika tulisan kita belum dibacakan di KGB Bar Manhattan. Saya beruntung, bahwa ringkasan buku saya telah dibacakan di KGB Bar Manhattan. Lebih dari itu, ringkasan buku yang saya bacakan adalah hasil terjemahan bersama Linda Gaboriau, salah satu penterjemah terbaik dunia.

Usai mengikuti program ini, saya bergabung dengan *New York Foundation for the Arts* (NYFA), tempat berkumpulnya para seniman dari seluruh dunia. Saya seangkatan dengan *Eileen Lin* (pelukis Taiwan), *Doris Neidl* (pelukis Austria), dan *Cece Carpio*, pakar mural dari Filipina, *Jessica Kaire*, pematung dari Guatemala, *Nung-Hsin Hu* (pematung dari Taiwan), dan *Jihoee Koo* (pelukis dari Korea).

Juga *Visakh Menon*, seniman India bidang olah seni digital, *Yasmine Soiffer*, seniman bidang fotografi dari Israel, *Xin Song*, seorang seniman “*paper cut*” dari negeri Cina, *Volker Goetze*, musisi dan komposer jazz yang sangat berbakat dari Jerman, *Vivian Yang*, penulis fiksi dari Cina, dan *Valentina Medda*, pakar olah seni video dari Italia. Kami sempat ikut meramaikan DUMBO ARTS FESTIVAL 2010, salah satu pameran seni terbesar di New York.

Fransisco Carvalho

Tak seorang pun menduga, bermukim di Amerika tak menyelesaikan masalah. Pertengahan April 2011, saya menerima *e-mail* dari Mizan. Intinya menceritakan, Mizan menerima ancaman dari seorang milisi yang tersebut dalam buku “*Timor Timur Satu Menit Terakhir, Catatan Seorang Wartawan*”. Sang penuntut merasa nama baiknya telah tercemarkan. Karena itu, ia akan menuntut CM Rien Kuntari sebagai penulis buku atas kasus pencemaran nama baik. Ia juga meminta Mizan menarik kembali buku itu dari peredaran.

Kekhawatiran Mizan bisa dimengerti. “Baru pertama kali ini kami menerbitkan buku yang tiga tahun kemudian masih bermasalah,” kata Ahmad Baquini, Editor buku *Timtim* dari Mizan. Kepada Mizan, Carvalho mengatakan jika saya tidak menjawab suratnya hingga akhir Mei, maka pada tanggal 1 Juni ia akan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Beberapa saat kemudian saya menerima surat pengembalian hak terbit buku *Timor Timur Satu Menit Terakhir* dari Mizan. Masalah ini pun lalu saya serahkan kepada pengacara saya, Johnson Panjaitan SH.

Johnson lalu mengundang sang milisi yang ternyata Fransisco Lopes de Carvalho untuk bertemu di Jakarta. Fransisco adalah kakak kandung Cansio Carvalho, Komandan Mahidi, kelompok milisi di Ainaro dan Covalima. Kepada Johnson, Carvalho meminta saya mencabut bagian yang menyebut namanya di halaman 177 atau menarik buku dari peredaran. Ia berkeberatan dengan penyebutan namanya terutama dalam kalimat: “Di tempat ini, Wiranto mengadakan peremuan tertutup yang antara lain dihadiri oleh Gubernur Abilio Jose Osorio Soares, Armindo Mariano, Tito Baptista, Herminio, Mateus Maia, Joao Tavares, Eurico Guterres, dan Fransisco Carvalho”. Ia juga menuntut ganti rugi materiil. Jika tuntutannya tidak terpenuhi, Carvalho akan membawa kasus ini ke jalur hukum ([lihat lampiran](#)).

Tentu saya kaget ketika mendengar penjelasan dari Bang Johnson. Menurut Bang Johnson, ancaman ini serius. Saya meyakinkan Bang Johnson bahwa saya tidak pernah

main-main dengan informasi. Artinya, saya mempunyai *back-up* tertulis untuk setiap informasi yang saya sampaikan. Johnson menjadi percaya diri sepenuhnya ketika saya tunjukkan bahwa informasi yang tertulis di halaman 177 tersebut saya ambil dari bahan tertulis resmi. Bahkan yang saya dapatkan dari narasumber tangan pertama, bukan sembarang narasumber.

Modal itu dipakai Johnson untuk menemui Carvalho secara baik-baik. Saya pun diminta kembali ke Indonesia untuk menuntaskan persoalan tersebut. Kami lalu bertemu di Hotel Sheraton, Yogyakarta, Jumat, 29 Juli 2011. Dalam pertemuan itu, saya tegaskan, tidak bisa memenuhi tuntutan Fransisco Carvalho karena akan merusak fakta sejarah lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Pertemuan tersebut merupakan salah satu pertemuan tertutup yang cukup penting dalam menentukan nasib dan perjalanan politik Timor Timur selanjutnya. Selain itu, informasi tersebut didapat dari sumber resmi baik lisan maupun tertulis.

Beruntung, akhirnya persoalan itu bisa dituntaskan dengan baik. Pertengahan September, Bang Johnson memberi kabar bahwa kelompok yang akan menuntut tersebut telah membubarkan diri. Kembali saya hanya bisa bersyukur atas semua yang terjadi.

Berakhir

Tak pernah terbayangkan persoalan ini pada akhirnya menemukan muara penyelesaian. Tujuh belas tahun kemudian, akhirnya muncul satu kata yang selama ini dinantikan; "bebas".

Diawali dengan rasa ingin tahu luar biasa yang mendorong untuk mencari apa sebenarnya yang terjadi. Awal September 2025, jawaban itu baru didapat. Bahwa permintaan pengawasan khusus kepada RK, CMK, atau CMRK yang dikeluarkan pada tahun 1999, 2004, 2008, 2009, dan 2018 telah dihentikan. Dengan kata lain perintah pengawasan itu telah 100 persen dihapus atau berakhir.

Dengan begitu per September 2025, bisa dikatakan penulis tidak lagi diawasi atau dalam pemantauan. Setelah 17 tahun dalam kondisi "limbo", pada akhirnya penulis bebas.

Seluruh kondisi dan situasi itu justru membawa pada lahirnya, "*Timor Timur Satu Menit Terakhir, Catatan Seorang Wartawan*" dalam bentuk *e-book*. Puji Tuhan. *Alleluja!*

Salam homat saya,

CM Rien Kuntari

New York, 14 Januari 2012

PRAKATA PENULIS - Edisi Cetak

Kebenaran Faktual

Ada kekecewaan luar biasa ketika buku tentang lepasnya Timor Timur (Timtim) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini akhirnya bisa terbit. Di akhir masa tugas meliput proses lepasnya Timtim, Mas August Parengkuan meminta saya menuliskan pengalaman itu ke dalam sebuah buku. “Kompas adalah saksi mata sejarah lepasnya Timtim dari Indonesia, Rien,” katanya waktu itu.

Ngebut! Saya kerjakan tugas itu. Maklum, permintaan menulis saya terima awal Maret 2000. Semula, buku itu akan diterbitkan seiring dengan HUT Harian Kompas ke-35, 28 Juni 2000. Sayang, rencana tinggallah rencana. Tepat tanggal 28 Maret 2000, saya jatuh sakit. Cukup serius dan berkepanjangan. Sempat saya khawatir tidak diberi kesempatan menyelesaikan tugas tersebut. Namun, rencana Tuhan memang selalu yang terindah. Perlahan tetapi pasti, buku itu pun selesai. Masa sakit bahkan memberi kelonggaran waktu lebih dari cukup untuk mencapai saat terbaik.

Harus diakui, ini bukanlah sembarang tugas. Meliput lepasnya Timtim, provinsi ke-27 RI, dari pangkuan Bumi Pertiwi, kenyataannya jauh lebih sulit dibanding meliput Perang Teluk di Irak atau perang tersadis abad 20, Rwanda. Mungkin karena saya adalah orang Indonesia yang harus meliput konflik di tanah sendiri.

Pekerjaan pun semakin pelik dan berliku. Secara implisit tetapi tegas dan pasti, Kompas meminta saya meliput secara adil. Yaitu, menerapkan diktum dasar kewartawanan, cover both sides, secara nyata di lapangan. Artinya, saya tidak hanya harus berada di kedua pihak, yaitu pro-otonomi dan pro-kemerdekaan, melainkan harus pula memberi porsi seimbang dalam pemberitaan.

Tentu tugas itu membawa konsekuensi yang tidak kecil. Terutama untuk kondisi waktu itu. Apalagi situasi kewartawanan di Timtim telah terbelah menjadi dua kelompok, yaitu wartawan pro-otonomi dan wartawan pro-kemerdekaan. Bisa dipastikan, wartawan di satu kelompok tidak akan pernah memiliki akses di kelompok lain. Bukan faktor ketidakmampuan personal, namun semata-mata karena menghadapi serentetan ancaman cukup serius dari penculikan hingga pembunuhan. Suka tidak suka harus diakui, netralitas wartawan benar-benar telah terpasung.

Namun, tugas adalah tugas. Perlahan tetapi pasti, saya membuka akses kepada kedua pihak, yaitu pro-otonomi dan pro-kemerdekaan. Dan memang, serentetan ancaman pun bermunculan. Diawali dengan teror-teror kecil lewat telepon hingga todongan pistol di kepala dan rencana penculikan serta pembunuhan.

Seluruh resiko itu saya tempuh demi mempertahankan profesionalisme dan tanggung jawab profesional seorang wartawan. Bagaimana pun, wartawan adalah makhluk dengan tugas utama menyampaikan fakta atas realita di lapangan. Fakta dari realita itu harus disampaikan secara jujur, apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi, dan seimbang mungkin.

Jujur dan apa adanya menjadi tuntutan utama. Karena, satu laporan peristiwa baru bisa disebut faktual jika fakta yang disajikan dalam laporan itu benar-benar ada dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh siapa pun secara langsung di tempat kejadian. (Ashadi Siregar dkk, *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*, LP3Yogya, 2007, hal. 34). Sementara seimbang menjadi tuntutan selanjutnya, karena peristiwa ini melibatkan dua pihak, yaitu pro-otonomi dan pro-kemerdekaan. Tidak ada pilihan lain bagi seorang wartawan ketika berada di tengah konflik antara dua pihak, kecuali bersikap netral dan menjaga ketidakberpihakan atau impartial.

Bang Adi atau Ashadi Siregar, guru saya, menekankan, “kebenaran dalam jurnalistik adalah kebenaran faktual. Artinya, yang dianggap ada hanyalah fakta”. (Ashadi Siregar, Hal. 37). Meski masih jauh dari sempurna, namun, buku ini mencoba menggambarkan rangkaian fakta yang didapat, didengar, disaksikan, dan dirasakan penulis selama meliput proses pelepasan Timtim dari NKRI, periode Juli hingga November 1999. Tak ada pretensi apa pun kecuali keinginan menyampaikan kebenaran faktual itu secara jujur dan apa adanya.

Tentu Kompas punya alasan khusus dan pertimbangan sendiri ketika pada akhirnya menolak menerbitkan buku ini. Namun, saya yakin, semua itu adalah untuk yang terbaik.

Yang pasti, buku ini tidak akan pernah ada tanpa permintaan, dukungan, dan dorongan dari Mas August Parengkuan, atasan saya di Harian Kompas. Juga, warna dan cerita buku tidak akan menjadi seperti ini tanpa keterlibatan penuh Kay Rala Xanana Gusmão. Di tengah kesibukannya sebagai Perdana Menteri Timor Leste, Xanana tak hanya bersedia menggoreskan tinta untuk prakata, tetapi masih meluangkan waktu untuk mengoreksi prolog buku ini dengan suka rela. Semua itu membuat saya merasa tersanjung dan terhormat. Sehingga, mengucapkan terima kasih saja serasa tak cukup.

Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, namun saya tidak akan mampu menceritakan substansi dalam buku ini secara detil dan rinci tanpa bantuan Letjen TNI J. Suryo Prabowo, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas SH, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, serta berbagai pihak lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Dari lubuk hati yang terdalam harus saya akui, buku ini semakin bermakna dengan kesediaan mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang juga dengan suka rela meluangkan waktu untuk menuliskan kata pengantar. Sungguh, semua itu merupakan penghargaan yang luar biasa.

Namun, di atas semua itu, buku ini bahkan tidak akan pernah terbit dengan sentuhan langsung dari berbagai pihak di Timor Leste tanpa keterlibatan Mas Arkand BZ, Guru dalam pengertian sesungguhnya, bersama dua sejoli, Nono Barreto dan Nina Gusmão. Dan, seluruh makna itu dipertegas oleh Eddy Hasby, sahabat sejati saya, dengan karya-karya fotonya yang memang indah, cantik, dan sarat makna.

Karena itu, tak ada kata lain yang bisa saya gunakan untuk mengungkapkan kegembiraan, kebahagiaan, rasa syukur, dan kekaguman saya kepada mereka semua, kecuali terima kasih, *gracias, obrigado...*

Salam hormat saya,

CM Rien Kuntari

Jakarta, akhir September '08



DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

PRAKATA

Buku ini memang sudah lama ditunggu-tunggu. Akhirnya menjadi kenyataan juga: buku tentang Timor Timur – sekarang Timor Leste – yang ditulis bukan sebagai analisa politik semata, bukan pula sebagai paparan sejarah diplomasi, tapi sebagai penuturan berdasarkan pengalaman langsung seorang wartawan Indonesia.

“Timor Timur Satu Menit Terakhir” karya Rien Kuntari, wartawan senior Harian “KOMPAS”, sungguh merupakan suatu kesaksian yang sangat menarik berdasarkan pengalaman pribadi yang unik dan yang dikisahkan secara tulus dan gamblang, secara rinci dan kadang-kadang sarat dengan perkembangan dramatis.

Sebagai wartawan profesional yang dalam tugasnya sehari-hari terkenal sebagai seorang yang selalu ingin mendapatkan kebenaran faktual, Rien Kuntari telah menerapkan secara konsekuen diktum dasar kewartawanan, yaitu, “cover both sides”, kelompok pro-integrasi maupun kelompok pro-kemerdekaan. Pendekatan semacam ini, dalam suasana yang berlangsung di Timor Timur waktu itu, jelas berbahaya bagi keselamatan pribadi, seperti terungkap dalam buku ini.

Kepada Rien Kuntari, saya sampaikan hormat saya serta selamat atas karyanya ini dan atas keberhasilannya menyajikan sebagian sejarah mengenai Timor Timur yang tidak banyak diketahui orang. Mudah-mudahan kedua bangsa dan negara tetangga, Indonesia dan Timor Leste, dapat memetik pelajaran-pelajaran berharga dari pengalaman masa lalu ini, khususnya dalam menatap masa depan bersama.



PENGANTAR

Kay Rala Xanana Gusmão

Saya merasa tersanjung karena diberi kehormatan untuk ikut menyambut penulisan buku bernilai sejarah ini dengan menorehkan kesan singkat lewat prakata.

Hati ingin membaca dan menelaah dengan tenang buku setebal ratusan halaman ini, ketika sekilas membaca judulnya, *Timor Timur Satu Menit Terakhir*, tapi apalah daya... Seakan 20 tahun lebih, bergerilya di gunung dan hutan belantara Timor-Leste, disambung dengan beberapa tahun mendekam di penjara demi mengejar cita-cita kebebasan dan kemerdekaan, tidaklah cukup, dan kini harus mengawali perjuangan baru yang sungguh teramat dahsyat. Memang jauh lebih berat mengisi kemerdekaan ketimbang berjuang untuk merebutnya... Maka ironisnya hampir tak tersisa waktu untuk segalanya termasuk membaca dengan seksama buku-buku berharga semacam ini yang tentu, sarat dengan fakta-fakta historis, diselingi dengan pengalaman dramatis dan epis terkadang bernuansa romantis yang disajikan dengan baik oleh penulis sendiri, seorang wartawati kawakan dari harian nasional terkemuka Indonesia yaitu *KOMPAS*, yang pernah saya kenal.

Tetapi di tengah kesibukan keseharian, karena rasa penasaran, masih sempat saya bolak-balik ratusan halaman ini dan jujur saya katakan bahwa yang tersaji dalam buku ini, bukan “isapan jempol” dan bukan pula kepiawain seorang wartawan oportunis untuk merangkai berbagai ceritera fiktif dan kepahlawanan, melainkan pengalaman nyata seorang pejuang pers dan patriot bangsa, yang ingin dibagikan kepada kita semua, terdorong oleh kecintaannya kepada dua Bangsa bersaudara yakni Indonesia dan Timor-Leste.

Sekalipun di sana-sini terdapat beberapa kekurangan ortografis dan kutipan fakta sejarah, khususnya tentang latar-belakang sejarah Timor-Leste, mulai dari zaman kolonial Portugis sampai pada masa pendudukan, mungkin karena persoalan bahasa, sama sekali tidak mengurangi substansi buku ini terutama dari segi kebenaran fakta, berkat pengalaman pribadi dan unik yang diungkapkan dengan kejujuran serta keberanian khas seorang wartawati profesional sejati.



PM Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão ketika mengoreksi buku Timor Timur bersama penulis di kantor PM, Dili, akhir Mei 2008. - foto: Nono BARETO

Maka tidaklah berlebihan saya, selaku pribadi, ingin menyampaikan terima kasih atas kontribusi Mbak Rien Kuntari yang telah mempersembahkan sebuah buku historis untuk menambah khasanah perpustakaan kami dan sebagai bahan referensi bagi kedua Negara sahabat dan tetangga abadi untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan bersama-sama menatap masa depan yang jauh lebih cerah.

Akhir kata, saya pribadi merasa tertantang dan mengajak pula sesama patriot bangsa Timor-Leste yang kelak dapat membaca buku ini, untuk mengambil hikmah dari kata-kata bijak Mbak Rien Kuntari, pada alinea terakhir Epilog buku ini, yang berbunyi:

“ Karena itu, sebelum Timtim bisa bersepakat untuk menjunjung langit yang sama di mana bumi dipijak, menepis dan meletakkan kepentingan pribadi jauh di bawah kepentingan bersama, siapa pun yang akan memimpin, ia tak akan pernah mampu membuat Timor Loro Sa’e benar-benar menjadi tempat terbitnya matahari.”

Thank you because you think for us...

PENGANTAR

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo

MENGAMBIL PELAJARAN DARI SEJARAH

Permintaan untuk memberi kata pengantar kepada saya bagi buku mbak Rien, datang dalam kurun waktu sesaat setelah berakhirnya masa mandat saya selaku komisioner dalam Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia - Timor Leste dalam bulan Juni 2008. Banyak relevansi dari materi yang ditulis oleh mbak Rien dengan tugas saya dalam komisi tersebut di atas, karena memang karya mbak Rien dan tugas Komisi sejalan. Yaitu, membahas hubungan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya seputar masa jajak pendapat yang diselenggarakan di Timor-Timur dalam bulan Agustus 1999.

Indonesia dan Timor Leste dapat menimba banyak pelajaran dari hubungan bilateral antara kedua bangsa, justru karena hubungan yang unik dan mungkin tidak dapat disamakan dengan hubungan bilateral mana pun yang dialami Indonesia maupun Timor Leste. Hubungan tersebut diawali dengan cara berbeda. Bekas jajahan Portugis tersebut menjadi propinsi ke – 27 Republik Indonesia, yang bukan merupakan bekas wilayah Hindia Belanda, seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dengan proses yang berbeda tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian yang khusus melalui kebijakannya dalam berbagai fungsi pemerintahan terhadap propinsi Timor Timur.

Dengan semua pro-kontra, untuk manfaat atau mudaratnya, masa pemerintahan Indonesia di Timor Timur ditentukan oleh perjalanan sejarah untuk menghadapi proses demokratisasi di Indonesia dalam bentuk reformasi nasional. Proses demokratisasi yang berpuncak pada reformasi politik mengakibatkan pengunduran diri Presiden Soeharto dan membuka jalan bagi terselenggaranya jajak pendapat bagi rakyat Timor Timur. Yaitu, untuk memilih otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menolak otonomi khusus, menjadi negara merdeka dan berdaulat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dituturkan oleh mbak Rien, semua perubahan tersebut berlangsung dalam waktu relatif singkat, dalam kecepatan melebihi kecepatan penyesuaian kultur maupun kelembagaan. Implikasi dari perubahan yang terlalu cepat

itulah yang menjadi keadaan yang melatarbelakangi terjadinya instabilitas dan berbagai tindak kekerasan di Timor Timur pada waktu itu.



*Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
foto: Dok. pribadi*

Refleksi pengalaman mbak Rien seolah sejalan dengan pengalaman yang saya dapatkan dalam tugas komisi, yaitu bahwa mempelajari sejarah, khususnya mendalami sebuah peristiwa sejarah, tidak dapat bersikap “hitam-putih”. Hal ini menjadi penting agar kita tidak terjebak pada keberpihakan dan dapat mengambil pelajaran secara utuh betapa pun kita akui sulit bagi penulis siapa pun untuk melepaskan diri dari pengaruh subyektivitas. Setidaknya, kesadaran tersebut harus datang dari dalam diri kita sendiri. Subyektivitas inilah yang disebut oleh mbak Rien dengan menyitir ucapan Letjen TNI Suryo Prabowo menjadi penyebab kesenjangan antara “versi” dan kebenaran sejarah.

Saya mendapat kesan mbak Rien menyadari bahaya jebakan subyektivitas tersebut dan ingin menggambarkan pengalamannya sefaktual dan seseimbang mungkin. Bukankah kesenjangan seperti itu dapat diatasi dengan tiga kemungkinan metode sehingga tidak bersifat mutlak? Semakin tinggi kesadaran akan ancaman jebakan tersebut, semakin kita mendekatkan “versi” sejarah dengan kebenaran, karena dalam mencari kebenaran, musuh utama kita bukanlah pihak yang berlawanan, seperti anggapan pendapat umum, tetapi adalah hati nurani yang berada dalam diri kita masing-masing. Atau bahwa masih ada harapan untuk menyatukan versi sejarah dengan kebenaran sejarah, yaitu bahwa ,semakin lemah kepentingan yang membangun karakteristik ”versi” berarti semakin kuat kedekatan

“versi” dengan kebenaran sejarah? Atau masih ada kemungkinan bentuk ketiga, yaitu biarkan berbagai “versi” diberi kesempatan untuk sampai kepada publik, sehingga melalui waktu dan kearifan publik, berbagai “versi” tersebut akan membentuk mosaik kebenaran.

Di sinilah nilai sumbangan refleksi pengalaman mbak Rien yang disusun dalam buku ini. Kemampuan mbak Rien yang secara luwes dapat bergerak dari tataran formal hingga tataran informal, memberikan detail dan artikulasi tentang keadaan di Timor Timur pada waktu itu, serta memberi pengayaan kepada kita semua bahwa kebenaran sejarah dibentuk oleh pelaku manusia, yang pada gilirannya memberikan gambaran kepada kita tentang tidak “hitam-putih”-nya sejarah.

Di samping itu, nilai sumbangan yang diberikan mbak Rien melalui buku ini menjadi terasa karena peran, status mbak Rien ketika itu dan integritas pribadi Mbak Rien yang telah membuka akses terhadap pengumpulan informasi dan kemampuan terhadap pengolahan informasi, bisa membangun sebuah harapan, agar kita dapat mengambil pelajaran secara utuh dari sebuah peristiwa sejarah yang telah berakibat sebuah keadaan yang kita semua yakin tidak kita inginkan, untuk dapat menjamin agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan. Kebenaran terkadang menyakitkan tetapi sesungguhnya kebenaran itu menyembuhkan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari hasil karya mbak Rien, untuk menyiapkan keadaan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa di masa depan.

PROLOG

TAK seorang pun menyangka, Presiden BJ Habibie yang baru mendapat limpahan kewenangan dari Presiden Soeharto setelah lengser dari kursi kepresidenan RI tanggal 21 Mei 1998 itu, mengawali tahun 1999 dengan “melepaskan” Timor Timur (Timentim).

Harus diakui, segala usaha pemerintah RI di bawah kepemimpinan Soeharto selama 24 tahun, memang tidak mampu menuntaskan Timentim. Bekas provinsi ke-27 RI itu tetap membuat Indonesia menjadi bulan-bulanan dunia. Banyak pihak yang menggunakan isu Timentim sebagai salah satu sarana "memukul" dan "memalukan" bangsa Indonesia di percaturan politik internasional.

Tak jarang pula, masalah Timentim digunakan sebagai sarana mensukseskan kepentingan domestik sebuah negara di fora internasional. Katakanlah, Portugal, misalnya. Bekas kolonial Timentim itu selalu menggunakan isu pelanggaran hak asasi manusia di Timentim untuk menarik simpati komunitas internasional, khususnya Eropa.

Namun, sering pula, Indonesia, negeri berpenduduk lebih dari 200 juta rakyat ini terpuruk malu oleh ulahnya sendiri. Di saat, ada yang sedang berjuang keras membuktikan tuduhan pelanggaran HAM di Timentim tidak seluruhnya benar, justru di Timentim sendiri terjadi peristiwa yang benar-benar membuat orang percaya bahwa bangsa Indonesia gemar melanggar HAM. Walau begitu, di era itu, tak ada keinginan sedikit pun untuk membuat keutuhan dan kesatuan negara RI terkoyak.

TAK banyak yang tahu persis latar belakang atau motivasi Presiden BJ Habibie mengeluarkan opsi kedua tersebut. Pemerintah akan melepaskan Timentim, bila pada akhirnya, provinsi ke-27 RI itu menolak uluran tangan Indonesia, untuk memberi Timentim status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas.

Namun, ada satu hal yang selalu terngiang dan tersimpan dalam ingatan. Presiden BJ Habibie dan seluruh kerabat dekatnya, selalu melihat segala persoalan lebih dari segi kuantitatif. Kepiawaian Habibie di sektor pesawat terbang yang seluruhnya serba matematis dan pasti itu pun tak jarang lalu diterapkan dalam memandang persoalan lain, seperti kasus Timentim.

Di mata Habibie, tidak akan ada pengaruhnya, bila Indonesia harus kehilangan provinsi yang berpenduduk tak lebih banyak dari wilayah Tanah Abang, Jakarta itu. Dengan kata lain, Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta ini, tidak akan rugi bila hanya kehilangan warga yang tidak sampai setengah persen dari jumlah penduduknya.

Karena itu, hari Rabu (27/1/99), sidang kabinet bidang politik dan keamanan (polkam) di ruang kerja Presiden, Bina Graha, Jakarta, khusus mematangkan masalah Timtim. Sangat mengherankan, bila dalam sidang itu tak banyak terjadi perdebatan seru. Terutama mengingat, persoalan yang sedang dibahas bukan sekadar putus hubungan keluarga atau tetangga dalam satu RT, melainkan satu kedaulatan negara dan nasib sekitar 800 ribu warga Timtim. Lebih dari itu, kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia dipertaruhkan.

Lebih mengherankan lagi, dalam sidang kabinet itu, sebagian besar peserta sidang sama sekali tidak keberatan dengan usulan itu. "Apa untungnya kalau kita pertahankan Timor Timur?" begitu kata salah satu menteri di bidang ekonomi waktu itu. Merah telinga ini mendengar kalimat itu. Benarkah tidak ada untungnya bila kita mempertahankan keutuhan satu kedaulatan?

Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) sekaligus Panglima TNI Jenderal Wiranto termasuk pihak yang sama sekali tidak keberatan dan sepenuhnya menyetujui usulan pelepasan Timor Timur. Ia hanya mengajukan satu syarat, RI boleh melepas Timtim dengan syarat masuknya TNI ke Timtim tanggal 7 Desember 1975 dulu bukan dianggap sebagai satu kesalahan, melainkan kebijakan paling tepat untuk ukuran waktu itu. Mungkin hanya Mensesneg Akbar Tandjung dan Menlu Ali Alatas yang waktu itu keberatan.

Bisa jadi karena sikap keberatan tersebut Menlu Ali Alatas yang sudah begitu lama berkecimpung dalam masalah Timtim, justru tak banyak terlibat atau dilibatkan dalam rencana pelepasan Timtim. Ia mengakui, masalah Timtim disinggung dalam Rapat Koordinasi Politik dan Keamanan (Rakor Polkam) pada hari Senin siang, 25 Januari 1999 di kantor Menko Polkam. Namun, ia tidak tahu ada pertemuan lanjut.

Artinya, Alatas tidak diundang dalam pertemuan untuk mematangkan cetak biru pelepasan Timtim dari Negara Kesatuan RI, Senin malam di kediaman Presiden Habibie, Jalan Patra Kuningan, Jakarta. Pertemuan terbatas itu antara lain dihadiri Mensesneg Muladi, dan tiga penasihat utama Presiden, Dr Jimly Asshidhique, Dr Watik Pratiknya, dan Dr Dewi Fortuna Anwar.

Meski sudah disinggung dalam Rakor Polkam, namun, Alatas sendiri baru benar-benar merasa pasti bahwa Indonesia akan *hands-off* dari Timtim, ketika menghadiri sidang kabinet bidang polkam di Bina Graha, Jakarta, Rabu, 27 Januari 1999, yang langsung dipimpin Presiden BJ Habibie. "Ya memang saya sempat terkejut, karena saya tidak pernah berpikir untuk melakukan langkah itu. *Kok* tiba-tiba Presiden waktu itu mengeluarkan opsi melepaskan Timtim," kata Alatas dalam perbincangan satu sore di kediamannya yang baru, daerah Kemang, Jakarta, awal Maret 2000. Saat mengucapkan itu, ia tak lagi seorang menteri luar negeri.

Setelah tak lagi menjadi menteri, Alatas pun bercerita, waktu itu ia meminta dengan sangat kepada Presiden BJ Habibie untuk menunda sejenak keputusan itu. "Karena di New York sedang terjadi perundingan tentang tawaran otonomi khusus itu. Tapi Presiden menolak. Karena itu, saya meminta kepada Presiden untuk diberi kewenangan menyampaikan keputusan itu kepada wartawan, Presiden menyetujui dengan catatan, saya tetap didampingi Menteri Penerangan, Pak Yunus (Mohammad Yunus Yosfiah). Saya ingin mengatakan, bahwa tawaran pertama itu tetap berlaku," jelas Alatas.

Dalam jumpa pers usai sidang di Bina Graha Rabu, 27 Januari 1999 itu, Alatas menjelaskan, keputusan melepas Timtim diawali dari disposisi Presiden BJ Habibie saat menanggapi surat PM Australia John Howard, bulan puasa lalu. Disposisi itu lalu dibahas dalam Rakor Polkam, Senin (25 Januari 1999) dan hasilnya dimatangkan dalam sidang kabinet bidang polkam, Rabu, 27 Januari 1999.

"Setelah 22 tahun kita mengalami sejarah kebersamaan dengan rakyat kita di Timtim, ternyata tetap tidak mencukupi bagi rakyat Timtim untuk menyatu dengan kita, maka kiranya, adalah wajar dan bijaksana, bahkan demokratis dan konstitusional, bila kepada wakil-wakil rakyat kita yang kelak akan terpilih, diusulkan untuk mempertimbangkan, agar dapat kiranya Timtim secara terhormat, secara baik-baik berpisah dengan Negara Kesatuan RI," papar Alatas waktu itu. (*Kompas*, 28/1/1999).

Senja Di Istana Merdeka

SUATU sore di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta. Udara begitu sejuk. Angin semilir sepoi-sepoi basa. Seperti biasa, selama menunggu pertemuan Presiden BJ Habibie dengan para menterinya, saya duduk-duduk di tepi koridor istana, sambil menikmati hamparan pemandangan rumput hijau yang tertanam rapi. Pohon besar di tengah halaman

sedang memamerkan bunga kuningnya yang sangat indah dan seolah tercurah langsung dari batangnya.

"Hai, apa kabar?" Tiba-tiba terdengar suara renyah yang membuyarkan lamunan saya.

"Oh, hai Mbak Dewi.. Baik,.. apa kabar?"

Ternyata sapaan ramah itu datang dari Dr Dewi Fortuna Anwar, Asisten Menteri Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri atau Aslugri. Sebelumnya, Mbak Dewi aktif sebagai pengamat politik luar negeri di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Di pemerintahan Habibie, ia bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh kunci, khususnya dalam masalah luar negeri RI. Nama Dewi di era ini banyak disebut sebagai calon Menteri Luar Negeri. Kabar itu tidak hanya beredar di kalangan elit politik dalam negeri, namun telah menyebar di kalangan ASEAN. Sore itu, ia tampak cerah, mengenakan rok berpadu blazer berlatar warna biru tua, dengan bunga-bunga.

"Sibuk, Mbak?"

"Ah, biasa saja."

"When will you be a minister, Mbak? I heard that you're going to be our Foreign Minister."

Mendengar pertanyaan itu, Dewi tertawa renyah, memamerkan deretan giginya yang putih bersih.

"Well, saya baru mau menjadi Menlu kalau soal Timor Timur sudah selesai," jawab Dewi sambil tertawa dan melangkah meninggalkan halaman Istana Merdeka.

"How?"

"Kita lihat saja nanti."

Dan, tak disangka, tak lama setelah obrolan kecil itu, dalam sekejap, persoalan Timtim mengemuka. Hingga tiba-tiba Presiden BJ Habibie membuat kejutan tanggal 27 Januari 1999 itu. Indonesia akan melepas Timtim, bila Timtim menolak tawaran status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas itu.

"Daripada susah-susah, langsung saja kita beri talak III," kata Dewi Fortuna Anwar waktu itu (*Kompas*, 12/9/99). Kalimat itu ia ucapkan sambil tertawa ringan.

Kepada Majalah Tempo, secara panjang lebar Dewi memaparkan latar belakang perubahan kebijakan Timtim yang agak radikal itu. "Siapa sih yang bertahan mati-matian untuk mempertahankan Timtim selama ini? Itu sebenarnya sikap para elite politik yang memang selama ini terlibat langsung dalam integrasi, seperti Pak Harto dan jenderal-

jenderal senior. Mereka memang merasakan bahwa Timtim adalah output dari politik kepentingan waktu itu." (Tempo, 8/2/1999).

Ia melanjutkan, "Kebetulan Pak Habibie ini *kan* tidak punya trauma soal Timtim, tidak ada beban sejarah, sehingga bisa melihat masalahnya dengan lebih jernih. Dia bukan orang militer, dan tidak pernah ada keperluan dengan masalah Timtim. Beliau itu orang yang sangat ekspos ke dunia luar. Dia sadar betul bagaimana image Indonesia di luar negeri. Dia ingin menyelesaikan masalah Timtim ini sebelum milenium baru, sebagai salah satu raihan yang dianggap penting dan sangat spektakuler, walaupun nanti pemerintahnya hanya 18 bulan dan tidak akan terpilih lagi", ujarnya.

"Paling kurang ada *achievement* yang bisa kita banggakan, yaitu masalah Timtim yang membebani kita lebih dari 20 tahun ini akan selesai. Generasi berikutnya tidak perlu lagi dibebani hal ini. Selama masalah Timtim ini tidak selesai, selama itu Indonesia tetap akan dipermasalahkan dalam HAM (Hak Asasi Manusia)," tegas Dewi.

Ia mengakui, keputusan Habibie itu diilhami surat PM Australia John Howard. Surat yang dikirim pada bulan puasa itu mengatakan, Australia mendukung Timtim sebagai bagian dari Indonesia, melalui status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas. Namun, begitu melihat kecilnya kemungkinan itu, kata Dewi, Australia mengubah posisinya. Howard usul untuk meninjau ulang, yang memungkinkan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri atau *right to self-determination*.

Sikap Australia yang tidak konsisten ini diakui Dewi Fortuna Anwar sebagai pemicu (*trigger*). "Beliau kembali mengambil surat Howard itu dan menyebarkan kepada menteri bidang polkam," katanya. Surat itu lengkap dengan disposisi, 'tolong dipelajari, apakah setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Timtim masih merasa belum cukup bersatu dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melalui Sidang Umum MPR.'

Disposisi Habibie itu lalu dibawa dalam rakor polkam, Senin 25 Januari 1999. Kesimpulannya, pemerintah tetap berpendapat opsi pertama, yaitu memberi status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas, sebagai yang terbaik. Timtim boleh melakukan apa saja, kecuali di bidang politik luar negeri, hankam (pertahanan dan keamanan), dan moneter. Jika, opsi ini tidak disambut baik, sesuai disposisi Presiden, ada kemungkinan Timtim berpisah baik-baik, melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SUMPR). Disposisi itu kemudian dimatangkan dalam sidang kabinet bidang polkam di Bina Graha, Jakarta, Rabu 27 Januari 1999 itu.

"Beri" Kemerdekaan

PRESIDEN BJ Habibie sendiri seolah memang tidak ingin "diganggu" oleh kasus Timtim di masa pemerintahannya yang cukup singkat. Bisa dimengerti, sebagai Presiden ketiga RI, ia pun ingin memberikan "kenang-kenangan" kepada RI. Habibie ingin menggoreskan tinta emas pada penyelesaian Timtim, dengan memberi kesempatan provinsi termuda Indonesia itu melaksanakan hak menentukan nasib sendiri.

Hanya, sikap Habibie sempat menjadi rancu. Pada saat Australia berubah sikap dan meminta Indonesia memberi kesempatan Timtim melakukan self-determination, seperti kasus Kaledonia Baru yang mendapat kemerdekaan dari Perancis, dengan kepercayaan penuh Habibie menolak. Singkatnya, ia mengatakan, Timtim bukan Kaledonia Baru dan Indonesia bukan Perancis. Artinya, selama ini Indonesia tidak pernah menjajah Timtim, karena itu tidak bisa "memberi" kemerdekaan.

Namun, dalam perkembangannya, pernyataan itu bergulir berbeda. Ketika Presiden Habibie menerima peserta Musyawarah Nasional Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 11 Februari 1999, Presiden Habibie menyatakan akan "memberikan" kemerdekaan Timtim. Mulai 1 Januari 2000, Timtim tak lagi menjadi beban bagi Indonesia.

"Kalau ditanya apa saran pemerintah, maka saran saya, berikan kemerdekaannya, dan kita konsentrasikan pada 26 provinsi yang sudah banyak masalah. *Kan wajar dan fair,*" kata Presiden. Ia pun bicara lebih jauh tanpa teks tentang Timtim.

"Mengenai Timtim, Insya Allah, pokoknya, mulai 1 Januari 2000, kita tidak mengenal masalah Timtim lagi,... *nggak* mau dipersukar oleh masalah yang sebenarnya tak perlu ada. Bila rakyat Timtim tidak menerima tawaran otonomi yang diperluas, maka lebih baik wilayah itu berpisah sebagai kawan. Jadi, selamat jalan, *you* tentukanlah sendiri, saya tidak mau ikut campur. Saya minta saudara-saudara kita di Indonesia tidak turut campur," tegasnya.

Bila pada akhirnya Timtim menolak tawaran otonomi, Presiden Habibie pun merasa sudah bukan tanggung jawabnya lagi. "Karena yang memasukkan Anda sebagai provinsi adalah wakil rakyat pada MPR, maka saya kembalikanlah,... *the next president has to do it,*" kata Presiden Habibie. (*Kompas*, 12/2/99).

Hanya, tak semuanya sependapat. Yang pasti, Badan Pengawas Pelaksanaan Reformasi Total (Bappertal) menilai, kebijakan Presiden BJ Habibie tentang Timtim sebagai kebijakan dadakan yang tidak tepat waktu, *fait accompli* terhadap MPR, tanpa prosedur dan tanpa mekanisme yang jelas. Padahal, lanjut Bappertal, masalah Timtim bukan hal yang sangat mendesak. Pada akhirnya, kebijakan itu hanya cenderung menaikkan rating pribadi Presiden di mata dunia internasional (*Kompas*, 9/3/99). "Kemarahan" Bappertal bisa diterima, karena keputusan melepas Timtim itu pun belum sempat dikonsultasikan secara lebih dalam dan terbuka dengan pihak DPR/MPR.

Walau begitu, nasi telah jadi bubur. Palu telah diketokkan. Suka atau tidak suka, pelepasan Timtim sebagai salah satu alternatif telah menjadi keputusan yang tak lain tak bukan harus segera ditindaklanjuti. Alas pun berjanji segera mengabarkan keputusan mengejutkan itu ke New York.

Semula, keputusan itu sempat dianggap hanya sebagai *shock therapy* kepada Portugal. Langkah ini penting, karena dalam sejarah perjuangan diplomasi Timtim yang begitu alot, Portugal sama sekali tidak bergerak dari posisinya. Perundingan tentang Timtim, mulai "dilepas" dari agenda PBB, tahun 1986. Sejak itu, PBB menyerahkan upaya penyelesaian Timtim kepada kedua negara, melalui sebuah dialog. Istilahnya, dialog segitiga antara Indonesia-Portugal di bawah naungan Sekjen PBB.

Dialog itu sendiri hampir mencapai hasil. Tahun 1991, muncul kesepakatan kedua negara. Parlemen Portugal setuju berkunjung ke Timtim. Sebaliknya, Portugal pun membuka peluang bagi sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke negerinya. Mereka antara lain diwakili August Perangkuan, Aristides Katoppo, dan Desi Anwar. Hanya, tanpa penjelasan pasti, Portugal membatalkan kunjungan. Di Timtim sendiri, tepatnya tanggal 12 November 1991, meletus insiden Santa Cruz, yang membuat Indonesia kembali terpukul. Penyelesaian Timtim *set-back* jauh ke belakang. "*Back to the square one*", begitu kadang diistilahkan.

Kembali Indonesia merangkak lagi. Muka pun harus ditutup rapat-rapat, setelah muncul berbagai serangan. Dan kembali, dialog harus dimulai dari nol. Melalui sekian kali dialog, kedua negara berhasil membangun *confidence building measures*. RI-Portugal sepakat mengadakan program pertukaran, termasuk pertukaran wartawan. Langkah ini terlaksana, beberapa wartawan Portugal sempat beberapa saat berada di Indonesia. Namun, tak satu pun wartawan Indonesia yang diterima di Portugal. Adilkah?

Upaya lalu berkisar dari dialog yang satu ke dialog yang lain. Namun, sejauh ini belum memberi hasil berarti, hingga Indonesia memberikan tawaran status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas kepada Timtim. Melalui status itu, Timtim mempunyai kewenangan jauh lebih banyak dibanding sebuah daerah istimewa seperti Aceh dan Yogyakarta. Timtim berhak memutuskan apa saja yang terbaik baik wilayahnya, kecuali di bidang politik luar negeri, keamanan, dan moneter. Bahkan Timtim pun berhak menciptakan lambang daerahnya sendiri.

Seorang diplomat muda yang enggan disebutkan namanya, namun jelas terlibat dalam perundingan di New York menceritakan, perundingan itu tinggal selangkah lagi. Terutama karena PBB pun lebih serius mengupayakan. Ketiga pihak, Indonesia, Portugal, maupun PBB sudah sepakat pada kandungan dalam terminologi "status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas" itu. Sekarang, perjuangan tinggal meyakinkan Portugal bahwa tawaran ini sebagai usulan terbaik dan kompromistis.

Kelompok Jose Ramos-Horta menawar usulan itu. Ia meminta melaksanakan otonomi khusus untuk masa lima atau 10 tahun, kemudian referendum. Sudah pasti, Indonesia menolak usulan ini. Karena berarti, Indonesia harus tetap memberi perhatian yang sama, sementara mungkin lima atau 10 tahun lagi, Timtim akhirnya memisahkan diri.

Selain itu, pelaksanaan referendum pada akhirnya dinilai lebih membahayakan Timtim sendiri. Alasannya, referendum hanya bisa dilaksanakan di satu tempat. Itu berarti, seluruh warga yang mengaku "*oan*" (cara warga Timtim untuk menyebut orang) Timtim, meski berada di belahan dunia manapun harus segera kembali ke Timtim untuk melaksanakan referendum. Indonesia khawatir, bertemunya seluruh tokoh politik di Timtim dalam waktu bersamaan ini justru membawa persoalan baru, yang berpangkal pada luka lama. Karena itu, Indonesia lebih memilih jajak pendapat, karena bisa dilakukan di tempat masing-masing.

Ternyata, Presiden Habibie serius dengan keputusannya. Karena itu, siasat pun diganti. Setelah keputusan itu, Alatas langsung berunding dengan Sekjen PBB Kofi Annan dan Menlu Portugal Jaime Gama di New York. Tanggal 5 Mei 1999, muncul kesepakatan melaksanakan jajak pendapat di Timtim. Tujuan utamanya adalah mengetahui minat sebenarnya rakyat Timtim terhadap tawaran Indonesia tersebut. Selain itu, juga memberi kesempatan kepada seluruh warga Timtim untuk menentukan sendiri nasibnya.

Semula, jajak pendapat akan dilaksanakan tanggal 8 Agustus 1999. Tetapi, di halaman Istana Merdeka, Menteri Sekretaris Negara/Menteri Kehakiman Muladi tiba-tiba mengumumkan, Indonesia keberatan dengan tanggal pelaksanaan itu, karena pas hari Minggu. Mengingat mayoritas Timtim adalah pemeluk Katolik, maka pemerintah meminta pelaksanaan itu diajukan hari Sabtu (7/8) untuk menghormati umat Katolik. Karena, hari Minggu adalah sakral.

Namun, alasan *off the record*-nya, Indonesia khawatir, misa di gereja digunakan sebagai salah satu ajang kampanye, mengingat pastor harus memberi kotbah. Indonesia risau, kotbah pastor ini akan memenangkan salah satu kelompok. Alas sendiri waktu hal itu diumumkan mengaku belum mendapat kabar. Terlepas dari itu semua, yang pasti, Sekjen PBB sendiri akhirnya sempat menunda dua kali. Pertama, tanggal 21 Agustus. Namun, ditunda lagi hingga baru dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999.

Sarat Intrik dan Permainan Politik

BISA jadi, Habibie memang tidak mempunyai ikatan sejarah dengan Timtim, seperti dikatakan Dewi Fortuna Anwar. Dan juga memungkinkan, bila Habibie pun tidak mempunyai "kedekatan" dengan Timtim. Ia tidak pernah terlibat langsung dalam "perjuangan" Timtim, baik dengan senjata maupun melalui diplomasi. Karena itu tidak terlalu mengherankan bila ia dengan mudah mengeluarkan keputusan itu.

Indonesia memasuki Timtim, tepatnya ibu kota Dili, tanggal 7 Desember 1975, melalui Operasi Seroja. James Dunn, Konsul Australia di Timtim 1962-1964, melukiskan awal mula keterlibatan RI di Timtim, bertepatan dengan peringatan 34 tahun serangan Jepang terhadap Pearl Harbour (Dunn, James, *Timor: A People Betrayed*, ABC Book, 1996, hal. 250).

Indonesia menunda serangan beberapa saat. Serangan baru dimulai pukul 02.00 dini hari waktu setempat. Atau, kurang dari 24 jam, setelah kunjungan singkat Presiden AS Gerald Ford dan Menlu Henry Kissinger ke Indonesia. Penundaan itu dilakukan setelah ada "persetujuan penundaan" RI-AS, untuk memberi kesempatan kepada para pejabat AS itu, setidaknya untuk tidak merasa dipermalukan.

Meski Mayjen LB Moerdani memegang peran kunci dalam operasi itu, namun secara operasional, komando berada di tangan Mayjen Soeweno, Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkowilhan) II. Diakui, operasi di Timtim ini sebagai yang terbesar setelah kemerdekaan Indonesia. Operasi itu menurunkan sekitar 10.000 personel, dari

Kopassandha (Komando Pasukan Sandhi Yudha), Kopasgat (Komando Pasukan Gerak Cepat), Korps Marinir, serta batalyon dari divisi Siliwangi dan Brawijaya. Saat Indonesia memutuskan memasuki Timtim, kawasan yang masih sering disebut Timor Portugis itu dalam kondisi porak-poranda, imbas dari keadaan domestik Portugal.

Sejak awal, Timtim tidak pernah lepas dari intrik dan permainan politik tingkat tinggi. Bahkan tak jarang pula Timtim dijadikan ajang latihan berpolitik para petinggi Portugal yang terpaksa dibuang ke Timtim. Di tempat pembuangan ini, umumnya para Portugal putih itu justru memupuk karir setinggi langit.

Portugal secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Republik tahun 1910. Namun, keputusan itu belum membebaskannya dari belitan ekonomi dan konflik politik. Intrik dan permainan politik terus berlangsung. Ketika sistem monarki jatuh, lalu lahir *Estado Novo* atau *New State* tahun 1926, Dr Antonio Oliveira de Salazar justru menerapkan sistem diktator. Bulan September 1968, Salazar terpaksa mengundurkan diri dari tampuk kepemimpinan karena *stroke*.

Salazar digantikan Dr Marcello Caetano yang telah menjabat Deputy Perdana Menteri di tahun 1955-1958. Di satu sisi, Caetano tetap mempertahankan sistem diktator Salazar. Namun, di sisi lain, ia pun mencoba ber"evolusi". Ia melahirkan apa yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Ketiga (*Third Development Plan*). Namun, kebijakan itu justru memicu inflasi yang lebih besar. Liberalisasi moderat yang dilakukan Caetano juga memecah belah para pendukungnya dan membuka peluang bagi oposisi Sosialis maupun Komunis.

Buruknya kondisi ekonomi dan politik Portugal waktu itu membuat Jenderal António Ribeiro de Spínola menyingkirkan Caetano dalam sebuah kudeta militer yang nyaris tanpa setitik darah pun. Gerakan tanggal 25 April 1974 itu kemudian dikenal sebagai Revolusi Bunga atau *Revolução dos Cravos*. Dalam kudeta itu, militer mengganti peluru dengan bunga Anyelir (*Carnation/Dianthus caryophyllus*) yang sedang musim dan banyak dijual di pasar-pasar.

Dengan penghasilan perkapita 23,464 dollar AS pertahun pada tahun 2007, Portugal adalah salah satu negara berpenghasilan terendah di Eropa Barat. Masalah kemiskinan itu membuat Spínola memberikan tiga pilihan pada negara-negara jajahan Portugal, yaitu perang, revolusi, atau melakukan *self-determination*. Bulan September 1974, Portugal mengakui kemerdekaan Guinea-Bissau (sebelumnya Guinea Portugis) yang memproklamasikan diri pada bulan September 1973.

Langkah itu semata-mata untuk menghentikan peperangan yang memerlukan anggaran besar uang negara. Setidaknya, subsidi Portugal kepada Timor Portugis waktu itu, tak kurang dari 10 juta dollar AS per tahun. Angka cukup besar untuk ukuran waktu itu. Selain itu, Portugal yang tak juga mampu keluar dari kesulitan ekonomi membuat Spínola tidak mampu “membayar” dampak dari peperangan, seperti korban perang, para janda korban perang, dan kemiskinan.

Sudah pasti, kesempatan itu langsung disambar tiga partai besar di Timtim, yaitu UDT (União Democrática de Timorenses/Uni Demokrasi Rakyat Timor), Fretilin (Frente Revolucionário de Timor Leste Independente / Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Rakyat Timor Timur), dan Apodeti (Associação Popular Democrática de Timorenses/Asosiasi Rakyat Timor Demokrat).

Para pejabat tinggi Timor Portugis, beberapa kelompok masyarakat pada level menengah ke atas, dan para *liurai* (ketua adat), berpandangan Timor Portugis akan lebih baik bila tetap mengibarkan bendera Portugal. Atas dasar pandangan itu, mereka lalu bersatu dalam partai UDT, yang dibentuk tanggal 11 Mei 1974, di bawah pimpinan Ir Mario Carrascalao, kemudian oleh Lopes da Cruz.

Fretilin yang dimotori Xavier do Amaral dan Jose Ramos-Horta, saat dilahirkan tanggal 14 Mei 1974, bernama Associação Social Democrata Timorenses atau Partai Sosial Demokrat Rakyat Timor. Namun, pada tanggal 11 September 1975, nama itu diubah menjadi Fretilin. Perubahan itu terjadi setelah kedatangan para mahasiswa-mahasiswi yang baru menyelesaikan pendidikan tentang ideologi revolusioner di Portugal.

Sedang Apodeti, pada prinsipnya merupakan partai yang menekankan pentingnya berintegrasi dengan Indonesia. Sebelumnya, partai itu bernama União do Povo de Timor, lalu berubah lagi menjadi Associação para Integração de Timor a Indonesia (AITI). Namun, rupanya pemerintah Indonesia merasa kurang "*sreg*" dengan nama itu, sehingga mereka mengganti menjadi Apodeti. Apodeti diciptakan sebagai wujud nyata atau terusan dari pemberontakan di Viqueque tahun 1959. Apodeti diketuai Arnaldo dos Reis Araujo yang lalu menjadi Gubernur Timtim pertama, dengan Sekjen Jose Fernando Osorio Soares. Karena itu, Apodeti lekat juga dengan sebutan partai "Osorio/Arnaldo".

Selain ketiga partai itu, sebenarnya, masih ada partai KOTA (*Klibur Oan Timor Asua'in*/Liga Pejuang Timor Timur) yang menghendaki monarkhi dan dibentuk pada tanggal 5 September 1974, partai buruh Trabalhista yang muncul tanggal 9 Juli 1974, serta Aditla

(Associação Democrática da Integração de Timor Leste a Austrália/Asosiasi Integrasi Demokratis Rakyat Timor Timur ke Australia).

Joao Mariano de Sousa Saldanha, dalam buku *Ekonomi Politik, Pembangunan Timor Timur*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, 1994, menuliskan, partai Trãbalhista dan KOTA tidak banyak berpengaruh, dan hanya underbow salah satu partai (UDT). Sedang Aditla, karena tidak mendapat dukungan dari Australia dan masyarakatnya sendiri, lalu segera membubarkan diri.

Intrik dan permainan politik pun dimulai. Revolusi di Timor Portugis, pecah tanggal 11 Agustus 1975. Xanana Gusmão mencatat, partai UDT melancarkan gerakan besar-besaran, bahkan nyaris kudeta. EM Tomodok, Konsul Jenderal RI di Timor Portugis, 1972-1976, dalam *Hari-hari Akhir Timor Portugis*, terbitan Pustaka Jaya, 1996, mencatat, menjelang pukul 03.00 waktu setempat, sekelompok kecil orang sipil UDT tanpa sengaja merebut markas besar kepolisian lengkap dengan senjatanya, dan tanpa mendapat perlawanan.

Tomodok sempat mempertanyakan kejadian aneh itu. Ia berpikir, tidak mungkin sebuah markas kepolisian direbut tanpa perlawanan bila tidak ada perintah. Belakangan, baru ia menemukan jawaban, kejadian itu atas dasar perintah Letnan Kolonel Maggiolo Gouveia, Komandan Markas Besar Polisi yang juga anggota UDT. Lebih jauh lagi, perebutan itu pun dilakukan atas restu Gubernur Timor Portugis Kolonel Lemos Pires. Pires tiba di Dili, 18 November 1974. Lima hari kemudian, tepatnya 25 November 1974, Pires secara resmi diangkat sebagai Gubernur Timor Portugis. Markas itu lalu dijadikan markas revolusi UDT.

Akibatnya, lanjut Tomodok, semua jalan dalam kota dijaga ketat anggota UDT, lengkap dengan senjata api baru yang dirampas, dibantu beberapa perwira Portugis. UDT juga menuntut pengusiran orang komunis. Mereka menggeledah dan menjarah rumah-rumah aktivis dan simpatisan Fretilin. Bahkan mereka menangkap dan menyiksa anggota Fretilin. Lebih jauh lagi, sebagian demonstran kadang membunuh orang-orang Fretilin itu begitu saja. Sebaliknya, UDT tidak memberi tindakan apapun kepada anggota Apodeti.

Namun, kudeta UDT ini tidak berlangsung lama. Fretilin yang selama ini tertindas, tiba-tiba bangkit dan balik menyerang. Itu terjadi setelah Fretilin melakukan konsolidasi ke dalam di saat pemerintah Portugis melemah. Tanggal 20 Agustus 1975, Fretilin melakukan serangan balik dan secara resmi membentuk Falintil (Forças Armadas de Libertação

Nacional de Timor Leste/Armada Pembebasan Nasional Rakyat Timor Timur), sebagai sayap militer.

Di bawah kepemimpinan Nicolau Lobato, Fretilin berhasil mengambil alih markas tentara dalam bentrokan senjata di Aileu. Fretilin terus meningkatkan serangan hingga Dili. Karena terdesak dan merasa terkepung, UDT melarikan diri ke Timor barat. Sedang, Gubernur Portugis Lemos Pires dilarikan ke pulau Atauro.

Keberhasilan itu membuat Fretilin mampu secara sepihak memproklamasikan negara Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL), pada tanggal 28 November 1975. Dua hari kemudian, 30 November 1975, Fretilin membentuk pemerintahan pertama, dengan mengangkat Xavier do Amaral sebagai Presiden, Nicolao Lobato (Perdana Menteri), dan Mari Alkatiri (Menteri bidang Politik).

Ada dua aliran dalam pemerintahan Portugis di Timtim waktu itu, yaitu duet Kolonel Maggiolo Gouveia dan Kolonel Lemos Pires yang sejalan dengan UDT, serta pasangan Mayor Francisco Fernandes da Mota dan Mayor Jonathas yang berada di belakang Fretilin. Kedua tokoh ini kemudian berusaha membelokkan arah Fretilin ke haluan Komunis.

Tak jauh dari gaya sebelumnya, Fretilin pun pada waktu itu, memimpin dengan gaya keras, yaitu teror dan pembunuhan massal. Tindakan Fretilin bahkan cenderung kejam. Mereka menahan seluruh lawan politik dan militer Fretilin dalam sebuah rumah. Terutama tokoh-tokoh Apodeti, seperti Jose Fernando Osorio Soares (Sekjen) dan saudara-saudaranya, seperti, Francisco Orlando de Fatima Soares dan Domingos Osorio, juga Hermenegildo de Jesus Martins (Wakil Ketua). Ada yang langsung dibunuh.

Kekejaman Fretilin itu diungkapkan tokoh pro-integrasi Nazario Vital S Corte Real, Ketua Umum ABLAI (Aku Berjuang Lestirikan Amanat Integrasi), Kabupaten Manufahi, saat saya temui di Same, ibukota Manufahi, Juli 1999.

"Saya, salah satu dari empat orang yang luput dari tembakan Fretilin," kata Nazario. Hal itu terjadi dalam peristiwa berdarah, perang saudara di Timtim tahun 1976. Katanya, waktu itu, Fretilin merencanakan membinasakan sekitar 78 orang yang dianggap sebagai pembangkang, di sungai Karau Ulun, Same, Manufahi. Dari 78 orang itu masih ada 68 orang lagi yang belum berhasil "dibersihkan".

"Kami lalu dibawa masuk ke suatu tempat, disuruh berbaris, kemudian disiram dengan senjata otomatis," kata Nazario. "Sebelum peluru itu sampai ke giliran saya, saya menjatuhkan diri dan pura-pura mati. Saya kejatuhan empat mayat di atas tubuh saya," lanjutnya.

Dari jumlah itu, ada sekitar delapan orang yang berhasil melarikan diri, namun tertembak sebelum lolos. Dan, di antara mereka hanya empat orang yang benar-benar berhasil lolos dan selamat hingga kini. Yaitu, Bento Fernandez, kini Grup 8 di kaki gunung Kablaki, Thomas de Aquino Kalla, pimpinan Morok, kelompok pro-integrasi Manatuto, Joao da Costa, anggota DPRD Tingkat II Manatuto, dan Nazario sendiri. Kemana mereka sekarang? Setelah jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 lalu, belum ada kabar pasti.

Kondisi itu otomatis menghentikan proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Karena itu, Fretilin berupaya melanjutkan upaya tersebut dengan berbicara kepada pihak pemerintah Portugal yang melarikan diri ke Pulau Atauro. Agar proses demokratisasi bisa dilanjutkan, Portugal mengajukan syarat untuk melibatkan seluruh partai, termasuk UDT.

Sesuai dengan perkembangan keadaan, antara akhir 1977-1979, Fretilin terpaksa mengubah strategi, untuk menghadapi militer Indonesia. Namun, pada 31 Desember 1978, Nicolao Lobato yang waktu itu menjabat Presiden Fretilin menggantikan Xavier Amaral tertembak oleh militer Indonesia. Kondisi itu membawa Fretilin mengadakan Konferensi Pemuda Pertama. Bulan Maret 1981, Fretilin membentuk CRRN (Conselho Revolucionário da Resistência Nacional).

Desember 1987, CRRN pun berubah menjadi CNRM (Conselho Nacional da Resistancia Maubere/Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Maubere), seiring munculnya pemimpin baru, Kay Rala Xanana atau Jose Alexandro Gusmão, yang lebih dikenal dengan Xanana Gusmão. Tahun 1981, Xanana resmi diangkat sebagai pemimpin baru. Xanana lalu memutuskan keluar dari Fretilin demi membentuk Persatuan Nasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui Konvensi Peniche di Lisabon, Portugal, 23-27 April 1998, CNRM berubah menjadi CNRT (Conselho Nacional da Resistancia Timorese/Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timor Timor), karena UDT menolak kata "Maubere". CNRT mengangkat Xanana sebagai Presiden CNRT. Pada prinsipnya, CNRT berusaha merangkul semua pihak. Kini, CNRT menjadi partai mayoritas di Timtim. Sejak di bawah Xanana, pendekatan CNRT tidak lagi kekerasan, melainkan lebih mengembangkan upaya persuasif, dialog, kasih, keterbukaan, dan perlindungan.

PROKLAMASI Republik Demokrasi Timor Fretilin yang dilakukan secara sepihak itu, ditolak oleh empat partai lain. Tomodok mencatat, sebagian masyarakat justru menilai proses itu bukan dekolonisasi. Karena itu, mereka bersepakat melahirkan Deklarasi Balibo, tanggal 30 November 1975.

Intinya, Deklarasi Balibo adalah pernyataan kesepakatan mereka atas nama rakyat Timor Timur (sebelumnya Timor Portugis), memproklamasikan pengintegrasian bekas Timor Portugis ke negara kesatuan RI sebagai provinsi ke-27, Timor Timur. Secara lebih gamblang, Tomodok menggambarkan deklarasi itu sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami, rakyat dan jajahan Timor Portugis, dalam hal ini diwakili oleh Apodeti, UDT, KOTA, dan Partido Trabalhista, setelah mengadakan analisis yang seksama sesudah aksi sepihak Fretilin yang diwujudkan melalui 'proklamasi kemerdekaan' wilayah Timor Portugis, yang menempatkan diri di bawah kekuasaan Pemerintah Portugal, dan yang dalam segala hal bertentangan dengan kepentingan nyata rakyat Timor Portugis.

Mengingat bahwa kondisi untuk pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor Portugis tidaklah disiapkan secara sah;

Mempertimbangkan fakta bahwa sejumlah prakarsa sudah diusahakan sebagai bukti adanya kehendak untuk memperoleh penyelesaian politik yang adil dan damai sesuai dengan tuntutan orang Timor, misalnya;

Pertemuan Macao yang tidak dihadiri oleh Fretilin meskipun Pemerintah Portugal sudah mengundang mereka untuk hadir.

Kesiapsediaan pemerintah Australia menyiapkan kondisi untuk menyelenggarakan dialog tentang masalah Timor di wilayahnya sendiri.

Pertemuan Roma untuk konsultasi-konsultasi timbal balik antara Menteri Luar Negeri Portugal dan Indonesia, yang kesimpulan akhirnya adalah Memorandum of Understanding antara kedua negara.

Usaha-usaha yang diupayakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia di dalam mengosongkan daerah perbatasan untuk mengimplementasikan semangat Pertemuan Roma.

Secara bertanggung jawab mengambil kesimpulan bahwa Fretilin dengan sengaja mengabaikan semua upaya yang diuraikan di atas;

Lagipula fakta menunjukkan bahwa cara-cara perjuangan Fretilin yang keliru dan bersifat kriminal, menjauhkan rakyat Timor Portugis dari perjuangannya untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi yang sah;

Memperhatikan situasi yang dipaksakan oleh Fretilin ketika memaklumkan secara sepihak kemerdekaan Timor Portugis yang menutup semua kemungkinan ke arah penyelesaian secara damai permasalahan yang berkaitan dengan keinginan rakyat;

Merasakan bahwa warisan kolonialis Portugal dan Belanda yang selama hampir 500 tahun memisahkan hubungan-hubungan darah, afintities etnis, nilai-nilai moral dan kebudayaan rakyat Indonesia di Pulau Timor;

Memperhatikan bahwa pada saat ini dapat diharapkan satu kesempatan untuk memantapkan kembali hubungan-hubungan tradisional yang kuat dengan bangsa Indonesia;

Dengan nama Allah dan demi alasan-alasan yang telah dikemukakan, kami memproklamasikan dengan sesungguhnya integrasi seluruh wilayah bekas koloni Timor Portugis dengan bangsa Indonesia; pernyataan ini merupakan perwujudan nilai-nilai paling dalam rakyat Timor Portugis.

Berkenaan dengan isi Proklamasi Integrasi ini, pemerintah dan rakyat Indonesia, diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan akan melindungi kehidupan rakyat yang sekarang menempatkan dirinya sebagai bagian dari rakyat Indonesia, namun yang masih hidup di bawah teror dan praktek-praktek fasis Fretilin yang dibenarkan oleh pemerintah Portugal.

Dibuat di Balibo, 30 November 1975

A.n Apodeti,

ttd

Guilherme Maria Concalves
Anggota Presidium

ttd

Alexandrino Borromeu
Anggota Presidium

A.n KOTA,

ttd

Jose Martins
Presiden

A.n UDT,

ttd

Fransisco X Lopez da Cruz
Presiden

ttd

Domingos de Oliveira
Sekretaris Jenderal

A.n Partindo Trabalhista,

ttd

Domingos C Pareira
Anggota Presidium

Setelah proklamasi itu, mereka lalu membentuk pemerintahan sementara Timor Timur (PSTI), yang terdiri dari Arnaldo dos Reis Araujo (Gubernur/Apodeti), Fransisco Lopez da Cruz (Wakil Gubernur/UDT), Zeca Araujo (Sekretaris/Apodeti), Domingos Oliveira (Anggota/UDT), Dr Concalves (anggota/Fretilin), Thomas Ximenes (Anggota/KOTA), dan Albano da Costa (anggota/Trabalhista). Dewan pertimbangan diperkuat oleh Guilherme Concalves (Ketua/Apodeti) dan Mario Carrascalao (anggota/UDT).

Bersamaan dengan itu, tanggal 12 Desember 1975, enklave Timor Portugis, Oe Cusse yang kemudian disebut Ambeno, menyatakan bergabung dengan Indonesia. Seiring dengan itu, tanggal 18 Desember 1975, diadakan upacara penurunan bendera Portugal dan pengibaran sang saka Merah Putih di Oe Cusse, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tomodok mencatat, tak sedikit hadirin yang menitikkan air mata dalam upacara yang penuh khidmat dan mengharukan tersebut. Terutama karena pengibaran dan penurunan bendera dilakukan tentara Timor Portugis.

Namun, dalam pertemuan pertama tanggal 19 November 1975, di New York, PBB memutuskan menolak upaya integrasi itu, dan tetap menganggap Timtim belum melakukan *self-determination*. Keputusan itu mendapat dukungan 75 suara, dengan 20 suara menolak, dan 52 abstain. Setidaknya itu diungkapkan John G Taylor, melalui East Timor: Contemporary History, A Chronology of the Main Events since 1974, yang dirangkum dalam buku East Timor at the Crossroads: The Forging of a Nation, halaman 238.

Namun, Indonesia kemudian mensahkan keinginan berintegrasi itu dengan UU No. 7 Tahun 1976, tanggal 17 Juli 1976. MPR mengukuhkannya dengan Tap No VI/MPR/1978, tanggal 22 Maret 1978.

Posisi Barat

WALAU begitu, Timor Portugis tetap dalam keadaan porak poranda. Setelah terjadi kudeta yang disusul kontra kudeta, tepatnya dari UDT, kemudian berpindah ke Fretilin, pemerintah Portugal sendiri tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Gubernur Timor Portugis Kolonel Lemos Pires justru melarikan diri ke Atauro yang sering disebut juga pulau Kambing, tepat di seberang kota Dili.

Kepergian Pires itu pada akhirnya ditafsirkan sebagai sikap tidak bertanggung jawab Portugal alias colong playu. Portugal lari tunggang langgang dalam kondisi Timtim masih

sangat porak poranda. Sebagai perwakilan pemerintah Portugal di Timor, Pires tidak berbuat apa-apa.

Dalam kondisi Timtim seperti itulah RI masuk. Operasi militer di sana, mereka sebut dengan sandi Operasi Seroja. Pada awalnya, keputusan Indonesia itu didukung pihak barat dan Jepang. Hal itu setidaknya dipastikan Noam Chomsky, dalam *The Guardian*, London, 7 Mei 1994.

Ia menggambarkan persoalan Timtim mengutip ucapan Menlu Ali Alatas yang sangat terkenal sekitar tahun 1992. Waktu itu, Alatas mengatakan, bagi pemerintah, masalah Timor Timur telah menjadi "seperti sebuah kerikil tajam di dalam sepatu." Chomsky mengakui, pihak barat memang tidak mempertajam kerikil itu. Tetapi sebaliknya, barat dan Jepang justru berada di pihak Indonesia saat memutuskan memasuki Timtim.

Tidak hanya berhenti di situ, Chomsky juga mengutip laporan Kedutaan Inggris di Jakarta. "Jelas terlihat dari sini, sebenarnya niat Inggris, bahwa Indonesia harus secepat mungkin menyerap (absorb) wilayah itu tanpa harus menonjolkan diri; dan jika menjadi genting dalam jajaran masalah di PBB, kita harus tetap menundukkan kepala, menghindari perbenturan dengan pemerintah Indonesia."

Begitu juga Australia. Menurut Chomsky, Agustus 1975, Dubes Australia untuk RI, Richard Woolcott mengirim kawat, menyatakan, "Australia harus lebih bersikap pragmatis dari pada setia pada prinsip." Dalam pandangan Woolcott, urusan Celah Timor akan lebih mudah dirundingkan dengan Indonesia dari pada dengan Portugal atau Timor Portugis yang merdeka.

Sedang Amerika, negara Paman Sam ini tidak bisa dikatakan lepas, karena hampir 90 persen senjata RI pasokan AS. Tulisan Chomsky itu kemudian dijadikan kata pengantar karya Matthew Jardine yang berjudul *East Timor: Genocide in Paradise*, Odian Press, Tucson, Arizona, 1995.

Jardine memperjelas tulisan itu dengan mengemukakan, "lima hari setelah invasi (sebutan Jardine untuk masuknya Indonesia ke Timtim), Majelis Umum (MU) PBB mengeluarkan resolusi yang menyesalkan invasi itu, meminta Indonesia segera menarik pasukannya, serta membenarkan hak rakyat Timor Timur untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri (*self-determination*)."

Keputusan itu didukung dengan 72 suara. Sepuluh suara di antaranya menentang, dan 43 abstain. Dari yang 43 itu, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa barat. Hingga tahun 1982, MU PBB setidaknya telah mengeluarkan tujuh resolusi tentang Timtim.

Namun, Perancis, Jerman, dan Inggris selalu abstain, sedang Amerika, Australia, dan Jepang lebih banyak mengatakan "tidak".

Sebenarnya, dari awal, posisi Amerika sudah lebih jelas. Tidak sampai 24 jam, sebelum Indonesia memasuki Timtim, Presiden AS Gerald Ford dan Menlu Henri Kissinger bertemu Presiden Soeharto dalam kunjungan singkat ke Jakarta. Seiring dengan kunjungan itu, Indonesia pun lalu menunda serangan hingga pukul 02.00 dini hari, sambil menunggu kedua pejabat tinggi AS itu pergi.

Bisa dipastikan dengan adanya persetujuan penundaan penyerangan, Amerika memberi lampu hijau pada upaya Indonesia itu. "Amerika memahami posisi Indonesia dalam kasus Timor Timur," kata Henry Kissinger di Jakarta. Sedang Presiden Ford mengatakan, bila harus memilih antara Timor Timur atau Indonesia, Amerika harus berada di sisi Indonesia.

Hal itu diperkuat Arnold S Kohen dalam *From the Place of the Dead; Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, terbitan Lion, Australia, 1999. Ia menuliskan, "jelas, tidak akan ada invasi besar-besaran oleh Indonesia tanpa dukungan senjata Amerika." (Hal. 33). Dalam salah satu testimoninya, tahun 1977 Amerika mengatakan sekitar 90 persen persenjataan di Angkatan Bersenjata Indonesia tahun 1975, merupakan pasokan dari Amerika.

Sedang Jepang, negara ini selalu menolak kedelapan resolusi tentang Timtim yang dikeluarkan PBB. Menurut Jardine, itu semata-mata karena hubungannya yang sangat dekat di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tahun 1975 itu, Jepang merupakan salah satu investor asing terbesar. Data dari Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan, tahun 1992 Jepang menerima 37 persen dari ekspor Indonesia tahun 1991 yang sebagian besar berupa minyak dan gas alam.

Begitu juga Kanada, yang memilih mendukung Indonesia untuk mempertahankan investasinya yang waktu itu mencapai 5 milyar dollar Kanada. Posisi abstain Inggris, antara lain disebabkan oleh keinginannya meneruskan penjualan Black Hawk ke Indonesia.

Persoalannya, negara-negara itu pada akhirnya justru berbalik dan sebagian mengingkari pernyataannya. Apa sebabnya? Tak ada jawaban pasti. Yang pasti, Timor Timur telah menjadi seperti ini. Tak ada kata lain yang bisa saya tuliskan, kecuali "angan Presiden RI BJ Habibie untuk meraih golden achievement dalam kasus Timor Timur seperti dicita-citakan Ibu Dewi Fortuna Anwar, hanyalah mimpi di siang hari". ***

BAB I

Yang Tersingkir, Pro-Integrasi

KAMIS, 15 Juli 1999, pukul 12.00 waktu setempat (pukul 11.00 WIB), pesawat Merpati yang membawa penumpang dari Jakarta, mendarat di bandara Komoro, Dili, Timor Timur (Timtim). Jadi juga saya berangkat ke Timtim. Sebelumnya, *Kompas* meminta saya berangkat bulan Februari. Namun saya menolak. Dengan alasan, Timtim baru akan "seru" sekitar bulan April, selaras dengan perundingan yang sedang berjalan di PBB New York.

Dan, hanya sekitar dua hari setelah penolakan itu, saya jatuh sakit. Rabu, 10 Februari 1999, tiba-tiba saya terkena panas tinggi. Tepat bersamaan dengan wafatnya Romo YB Mangunwijaya, salah satu guru dan pembimbing saya. Saya kira flu biasa, ternyata serius dan harus dirawat di rumah sakit. Dengan tenaga yang tersisa, saya nekat memutuskan pulang ke kampung halaman Yogyakarta. Maklum, waktu itu saya masih kos.

Setelah mendekam cukup lama di rumah sakit Panti Rapih, Yogyakarta, dokter masih memvonis saya untuk istirahat total selama tiga bulan. Rasanya aneh ketika harus hidup dalam kondisi tidak boleh capai atau berpikir berat. Sebuah virus bersarang di otak saya. Saya pun harus menjalani program pengobatan rutin hingga bulan November 1999.

Bulan Juni 1999, saya baru kembali aktif ke kantor. Itupun belum 100 persen. Sebulan sekali saya masih harus kontrol rutin. Tetapi, kuat dorongan dari dalam diri saya untuk segera menunaikan tugas. Karena itu, saya langsung menerima dengan suka cita ketika *Kompas* menugaskan saya ke Timtim. Dan saya pun berangkat dengan modal nekat.

Saya beruntung, beberapa hari sebelumnya, *Kompas* mengirimkan wartawan yang andal dan gigih, Mohammad Adam Nasir, di samping wartawan setempat, Kornelis Kewa Ama Kayam. Karena itu pekerjaan menjadi ringan. Peliputan Timtim dilakukan bertiga. Sayang, Nasir hanya bersedia bertugas selama sekitar dua minggu dan kembali ke Jakarta. Maklum, Nasir baru memiliki bayi yang berumur dua minggu. Sepertinya, ia tak mampu membendung rasa rindunya yang begitu dalam.

KOTA Dili begitu panas menyengat. Langsung menggigit kulit. Hari itu, banyak tamu penting lain yang juga mendarat di bandara Komoro. Antara lain, rombongan anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur atau Satgas P3TT, Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) Eurico Guterres, yang baru saya kenal saat boarding di Jakarta, serta dua wartawan Kantor Berita Antara, Bigwanto dan Jaka, fotografer.

Timtim waktu itu sedang mempersiapkan diri menyongsong datangnya masa penentuan pendapat atau jajak pendapat yang akan dilaksanakan Agustus 1999. Melalui forum ini, rakyat Timtim akan diminta memilih tetap bergabung dengan RI dan mendapatkan status otonomi khusus yang sangat diperluas, atau menolak usulan itu dan menjadi negara sendiri, setelah statusnya terlebih dulu kembali ke PBB.

Sesampai di Dili, untuk sesaat saya risau, tak punya tempat tujuan. Seluruh hotel penuh, berisi staf UNAMET (United Nations Mission in East Timor), Misi PBB untuk Timtim yang akan menjalankan pelaksanaan penentuan pendapat nanti. "Hei, Mbak, apa kabar. Aduh...sampeyan balik lagi, *kok nggak* ngomong-ngomong," sapa seseorang. Terkejut juga saya masih dikenali di sini.

Memang sejak tahun 1992, hampir setiap tahun saya ditugaskan ke Timtim. Kecuali tahun 1998. Sama sekali saya tidak mampir ke provinsi termuda itu, setelah Indonesia terlanda krisis moneter.

"Eh, Wayan, apa kabar?"

Wayan adalah seorang anggota Polri yang dulu sering bertugas sebagai front office Hotel Turismo, langganan saya di Timtim. Jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, lelaki yang dulu kurus itu kini berbadan tambun. Mungkin sudah mulai mapan dan sejahtera. Wayan pula yang mencarikan saya taksi dan berpesan kepada sopir taksi untuk menjamin keselamatan sampai tempat tujuan.

Malam itu, saya menginap di Santa Cruz, rumah Kornelis, wartawan *Kompas* setempat. Pagi harinya, bersama Nasir dan Kornelis, kami mengurus akreditasi di markas UNAMET. Sesaat terasa agak aneh, ada sekelompok wartawan yang kelihatan kurang suka dengan kehadiran kami dari Jakarta. "Mau apa mereka ini, apa kami di sini tidak cukup?" kata salah satu dari mereka. Tak heran, bila kelompok itu lalu sama sekali tidak kooperatif.

Usai mengurus akreditasi, kami menuju kompleks elit Delta Komoro, memastikan rumah sewa yang akan kami jadikan rumah maupun kantor resmi *Kompas* di Dili selama

masa jajak pendapat. Dalam hal ini, kami mendapat kebaikan hati dari Satgas P3TT. Mereka menyerahkan kepada kami, salah satu rumah yang telah mereka incar untuk disewa.

Kami sepakat menerima rumah itu dengan harga sewa Rp 4 juta perbulan. Di Jakarta, harga itu pasti sudah untuk sebuah rumah mewah. Namun, untuk Dili, saat itu, harga Rp 4 juta hanya cukup untuk satu rumah "biasa", tidak terlalu besar, dua kamar, dan sedikit bagus, di kompleks perumahan Delta Komoro, Jalan Saboria II, Blok I/24, Dili. Meski harga tinggi, kenyataannya, persewaan rumah menjadi bisnis yang diperebutkan. Kehadiran UNAMET memang merusak segala harga. Maklum mereka langsung bermain dengan dollar.

SENJA telah berganti malam ketika kami resmi pindah ke perumahan Delta, Komoro, Dili. Sebuah rumah yang cukup nyaman, bersih, dan rapi. Beruntung, di rumah itu masih tersisa meja makan untuk enam orang, satu tempat tidur di kamar utama, dan satu kasur tanpa tempat tidur di kamar kedua. Juga, satu televisi, almari es, dan peralatan dapur yang cukup lengkap hingga berasnya.

Lingkungannya pun cukup nyaman. Rapi dan bersih. Meskipun agak jauh dari pusat kota. Bisa dikatakan, kompleks Delta ini termasuk kawasan elit-nya Dili. Kami satu kompleks dengan Satgas P3TT serta bertetangga dengan CNN, The Jakarta Post, dan Fuji TV (Jepang).

"Pokoknya silakan dipakai, karena saya akan kembali ke Medan," begitu kata Nyonya rumah sore itu. Nyonya muda berusia 28 tahun itu bernama Elfira, istri pegawai Jamsostek cabang Dili, Haris Sabri Sinar. Seperti layaknya pendatang lain, Keluarga Haris pun waktu itu terpaksa sudah harus mengosongkan rumahnya di Delta yang sebenarnya ia kontrak untuk masa sekitar tiga tahun.

Banyak rumah di Timtim yang sudah kosong ditinggalkan para penghuninya. Mereka telah lari entah ke mana. Kondisi di Timtim sudah tidak aman bagi para pendatang. "Wah, saya sempat tidak berani pergi ke pasar, begitu melihat kami, kami langsung diusir, disuruh pergi. Pokoknya menakutkan. Terus saya pernah bilang kepada para pedagang sayur itu, kalau kami pergi siapa yang harus membeli sayurmu?" cerita Nyonya Elfira. "Mereka malah pernah mengusir langsung dari rumah kami sendiri. Katanya, hei! pergi kamu, tanah ini milik kami," lanjutnya.

Timtim terkena imbas reformasi di Jakarta. Di saat Indonesia mengalami krisis dalam segala krisis, termasuk krisis kepemimpinan, suasana Timtim semakin tidak menentu.

Seluruh pihak dan organisasi pemerintahan pun melemah. Situasi ini langsung dimanfaatkan pihak pro-kemerdekaan. Mereka merasa mendapatkan angin untuk "merebut" tanahnya kembali.

Melalui berbagai mimbar bebas yang digelar di Universitas Timor Timur, pihak pro-kemerdekaan, terutama yang sangat mengagungkan Fretilin, mematangkan rencana menuntut pelaksanaan referendum. Tidak hanya sampai di situ, mereka lalu leluasa menggalang massa. Karena itu, mereka juga bisa dengan leluasa meneror dan mengintimidasi warga Timtim yang kebetulan pro-integrasi. Bahkan langsung dari pintu ke pintu.

Suasana Timtim semakin kacau. Nazario Vital S Corte Real, tokoh dan pelaku sejarah integrasi, di Same, ibukota Kabupaten Manufahi, menceritakan, Timtim mendapatkan bias dari reformasi di Jakarta tanggal 20 Mei 1998 lalu. Terutama pada bulan Juli hingga Oktober. Menurut dia, pada bulan-bulan itu terjadi intimidasi dan teror terhadap kelompok pro-integrasi. Ia pun merasa sangat dipojokkan oleh suasana itu. "Kondisi itu sangat memojokkan, sehingga kami tidak bisa bergerak. Karena itu kami langsung dianggap kalah. Jadi, ada semacam psy-war," ujarnya.

Teror dan intimidasi terhadap pendukung pro-integrasi memuncak tanggal 29 Oktober 1998, di daerah Weberek, kecamatan Alas, sekitar 150 kilometer dari Dili ke arah Timur. Saat itu terjadi pembunuhan terhadap tiga pendukung integrasi, yaitu Ir Prabowo, seorang konsultan, Abdul Latief (anggota Polisi Militer), dan Zainuddin, anggota Kopassus (Komando Pasukan Khusus) TNI-AD. Menurut Nazario, mereka disiksa. Sebelum dibunuh, mereka diikat, lalu ditarik sekitar 500 meter. Mereka seluruhnya dihabisi di sungai Weberek. Namun, ada seorang anggota Kopassus bernama Suyanto yang berhasil meloloskan diri setelah ditusuk.

Ketika mendengar cerita Nazario itu, pikiran saya melayang jauh ke salah satu negara kecil di Afrika tengah, Rwanda. Kebetulan *Kompas* mengirim saya untuk meliput perang tersadis abad 20 itu saat terjadi pergolakan besar dalam perang saudara tahun 1994. Terasa benar, cara pembunuhan seperti itu serupa dengan apa yang terjadi di sana. Yaitu, saat suku Hutu "membersihkan" etnis Tutsi. Rata-rata cara yang mereka tempuh seperti itu. Dan saya pun merinding. Mungkinkah kejadian itu saya temui lagi dan justru di negeri sendiri? Ah..!

JAKARTA memang tidak tanggap. Hal itu bisa dimengerti. Sosok pemerintahan negeri berpenduduk lebih 200 juta jiwa ini, pada waktu itu sangat lemah. Sedang terjadi

gelombang besar demonstrasi mahasiswa. Mereka berusaha menggulingkan kepemimpinan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun dalam pemerintahan Orde Baru.

Angin reformasi begitu keras bertiup di mana-mana, di bulan Mei 1998 itu. Sudah pasti, kondisi ini membuat Jakarta "tidak sempat" memikirkan Timtim. Dan sedikit di luar dugaan ketika kemudian Presiden Soeharto lengser, lalu menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Presiden BJ Habibie, yang waktu itu menjabat Wakil Presiden.

Sayang seribu sayang, Habibie justru mengawali kepemimpinannya dengan niat melepas Timtim. Bukan berusaha mempertahankan keutuhan satu kedaulatan negara. Ibarat sebuah keluarga, sang ayah dan ibu, tepatnya si orangtua, langsung mengusir si adik bungsu dari rumah, karena sangat bandel, tanpa meminta pertimbangan seluruh keluarga dan saudara, terutama kakak-kakaknya.

Banyak pihak khawatir, keputusan ini akan menjadi preseden, tepatnya bibit separatisme yang merembet pada disintegrasi bangsa. Apalagi ditambah "keramahan" Presiden Habibie pada kasus serupa, yaitu Gerakan Papua Merdeka. Kekhawatiran disintegrasi pun memuncak.

Bagi kelompok pro-integrasi, yang tetap setia dan berjuang mempertahankan kebersamaan dengan Indonesia, kebijakan itu membuat mereka merasa dilepaskan begitu saja. Setelah mendapat perhatian penuh dari Indonesia, kini mereka merasa ditinggalkan, bahkan tidak dipedulikan.

"Kewenangan menentukan nasib Timtim dalam wilayah Indonesia itu terletak di tangan MPR, bukan di tangan eksekutif. Namun, kenapa kami seakan dilepaskan dengan tawaran dua opsi itu. Nasib kami tidak dapat ditentukan begitu saja oleh Jakarta," kata Panglima Pejuang Integrasi (PPI) Joao Tavares kepada Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, di sela-sela kunjungannya ke Dili, Senin (23/8/99).

"Kalau kami dianggap saudara, mengapa kami ditinggalkan. Kami juga belum pernah mendengar seruan dukungan dari pemerintah," lanjut Tito Baptista, aktivis pro-integrasi Timtim di New York.

Seolah bisa ditebak, keputusan Habibie itu benar-benar membawa angin segar bagi kelompok pro-kemerdekaan, yang memperjuangkan pemisahan Timtim dari Indonesia. Habibie telah membawa mereka pada satu euforia. Reformasi di Jakarta, telah membuka jalan lapang bagi mereka. Tak heran bila pada akhirnya UNAMET pun sering mengatakan, bukan PBB yang ingin melepas Timtim dari Indonesia, tetapi Indonesia sendiri.

Di sisi lain, kelompok pro-integrasi, termasuk para pejuangnya pun semakin terjepit ke tepi. Kondisi tidak seimbang ini akhirnya membuahkan teror, intimidasi, saling tuduh, bahkan saling bunuh. Anehnya, baik pro-otonomi maupun pro-kemerdekaan sama-sama merasa terteror dan terintimidasi. Kedua pihak merasa menjadi korban pihak lain. Karena itu, pertikaian kedua kelompok semakin sengit. Sempat selintas saya berpikir, siapa sih sebenarnya yang membikin onar?

Nazario Vital S Corte Real pun bercerita lagi. Kali ini, ia menunjuk kejadian tanggal 5 April 1999. "Dua anggota saya dibunuh di Dili, saat mau kirim uang untuk anaknya di Hera (Dili timur). Kepalanya dibelah, alat vitalnya dipotong, dan dimasukkan ke mulut," katanya. "Tanggal 15 (April) kami turun ke Dili, saya bawa kembali mayat jenazah anak buah saya, Mansyur dan Ali Akbar. Mereka kami makamkan pukul 18.30 malam," lanjutnya. Menurut dia, kejadian itu membuat orang-orang yang merasa bersalah kemudian melarikan diri.

Sebaliknya, sumber dari pihak pro-kemerdekaan mengatakan, tanggal 5 April itu, kelompok pro-integrasi dibantu tentara menewaskan 17 orang sipil. Karena itu, Xanana Gusmão yang masih ditahan di Jakarta, memerintahkan para gerilyawan dan rakyat Timtim melawan milisi pro-Jakarta tersebut.

Osorio Soares (36) mantan pegawai Deppen Kovalima menceritakan, tanggal 12 April 1999 tiba-tiba para pegawai Departemen Penerangan (Deppen) diserang. "Kepala saya mau dibacok, tapi tidak kena, saya lari," ujarinya. Sejak itu, ia melarikan diri ke gunung. Saat ditemui, Juli 1999, ia sudah berada di kamp pengungsian halaman Gereja Nosaceniore de Rosario de Fatima, Suai, Kovalima.

Osorio Soares mengakui, sebelum menjadi pegawai Deppen, ia anggota Falintil dengan anak buah sekitar 200 orang. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, ia lalu berpindah haluan dan melamar sebagai pegawai Deppen. Tentang penyerangan itu, ia mengatakan, "barangkali mereka mencurigai saya masih aktivis pro-kemerdekaan."

Hal senada juga diungkapkan Fransisco Mendosa da Costa (40), pegawai Pemda Tk II Kovalima. Menurut cerita para pengungsi di Kovalima itu, mereka tidak bisa kembali ke rumah, karena terus diteror dan diintimidasi oleh kelompok Laksaur, wadah pemuda pro-integrasi di Suai, Kovalima.

Sebaliknya, suasana di kota Dili, ibukota Timtim, mereda justru setelah muncul Besi Merah Putih (BMP). "Suasana baru mulai reda dan kami agak aman setelah muncul Besi Merah Putih," kata Nyonya Elfira di Dili. Besi Merah Putih adalah kelompok pemuda pro-integrasi dari Liquica.

Kelompok Milisi

PERASAAN ditinggalkan, terjepit, terdesak, dan tersingkir itu membuat kelompok pro-integrasi unjuk kekuatan. Akhir Januari 1999, mereka mengadakan pertemuan besar di Hotel Mahkota, Dili. Pertemuan itu melahirkan organisasi pemuda bersenjata, baik senjata api maupun senjata tajam. Mulai April 1999, seluruh kelompok itu lalu disebut kelompok milisi.

Dari alasan yang "terlihat", harus diakui, kelahiran itu didasarkan pada keberhasilan kelompok Besi Merah Putih (BMP) mempertahankan Liquica, Maret 1999. Keberhasilan itu lalu membakar semangat para pemuda pro-integrasi di tiap kabupaten untuk berbuat hal serupa. Terutama karena mereka punya senjata dan merasa mendapatkan "legitimasi" dengan posisi aparat keamanan yang melemah.

Ketika opsi dua diumumkan, mulai dideklarasikan organisasi pasukan pro-integrasi di berbagai daerah kabupaten, sebagai pasukan pengamanan swakarsa (Pamswakarsa). Pasukan pertama dibentuk di Ainaro, 17 Desember 1998, disebut Mahidi (mati hidup integrasi dengan Indonesia) dipimpin Cancio de Carvalho. Lalu, Februari 1999 lahir pasukan Besi Merah Putih (BMP) dengan markas utama di Maubara, Liquica, pimpinan Domingus Sousa, anggota DPRD II, F-PDI.

Berturut-turut dideklarasikan pasukan Dadurus Merah Putih di Maliana (Bobonaro), pimpinan Domingus alias Kofi Annan. Lalu, pasukan Laksaur di Kovalima, pimpinan Olivia Mendosa Moruk, pasukan Aitarak pimpinan Eurico Guterres di Dili, Ablai (Aku Berjuang Lestarikan Amanat Integrasi) di Manufahi (di bawah komando Nazario Vital S Corte Real), dan AHI (Aileu Haburas Integrasi/Aileu Mengembangkan Integrasi) di Aileu, pimpinan Thomas Mendoza.

Juga, Sakunar di Ambeno dipimpin Simao Lopez, Pasukan Pejuang Junior (PPJ) merah putih atau Bebu Junior 59 di Viqueque, pimpinan Bupati Martinho Fernandez, lalu Hadomi Merah Putih di Manatuto oleh Bupati Manatuto Vidal Doutel Sarmiento dan Morok juga di Manatuto, pimpinan Thomas de Aquino Kalla, Darah Merah di Ermera, dan Darah Integrasi di Lautem.

Pasukan ini terbentuk, karena terdesak oleh semakin gencarnya kampanye kelompok pro-kemerdekaan, terutama dengan terbentuknya pemerintahan versi CNRT seperti kepala desa dan ketua RT/RW yang terbentuk sampai ke daerah-daerah. Pasukan BMP di Maubara, misalnya, merupakan pasukan pertama yang melakukan perlawanan berdarah di

daerah itu, sampai merebut seluruh kota Liquica. Padahal, Liquica dikenal sebagai basis CNRT, yang disosialisasikan oleh Manuel Carrascalao (putra Liquica) sebagai Humas CNRT Pusat.

Boleh dibilang, sejak Maret sampai kedatangan UNAMET pada bulan Mei 1999, ke Timtim, situasi dikuasai pro-integrasi dengan milisi sebagai ujung tombak. Masa-masa sebelumnya, kondisi dan suasana kebebasan bergerak dikuasai pro-kemerdekaan. Dan, pro-integrasi bangkit setelah pemerintah mengeluarkan dua opsi ini.

MASALAH milisi tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pembentukannya di masa lalu. Sebenarnya, tujuan utama pembentukan itu bisa dikatakan positif, karena untuk mempertahankan integrasi. Awalnya, mereka hanyalah sekelompok pemuda yang diberi keterampilan tambahan, untuk mempertahankan integrasi.

Tahun 1978, pimpinan TNI di Timtim membentuk perkumpulan pemuda yang disebut Wanra atau perlawanan rakyat. Anggota Wanra dibina Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Selama 23 tahun, Wanra berperan membantu TNI dalam upaya mengejar kelompok yang disebut gerakan pengacau keamanan (GPK). Karena itu, mereka dilengkapi dengan senjata api.

Setidaknya ada empat organisasi awal Wanra yakni Halilintar (Bobonaro) pimpinan Joao Tavares, Makikit (1986/Viqueque) dengan Komandan Lafaek, yang bernama asli Afonso Henriques Pinto, Saka (1970-an/Baucau), waktu itu dipimpin almarhum Juliau Fraga, kemudian digantikan Joanico da Costa yang berpangkat Sersan Kepala (Serka) Kopassus, lalu muncul Sera (1990-an) pimpinan Sera Malik alias Agustino Baavida. Kemudian Alfa (Lautem) dipimpin Edmundo da Concencao E Silva.

Sebelum muncul Makikit di Viqueque, terlebih dulu lahir Tim Ratih (Rakyat Terlatih) yang tetap dipimpin Lafaek. Salah satu anak buahnya, Falur Rate Laec, justru menjadi Komandan Region III Falintil.

Tahun 1989, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Prabowo Subianto membentuk organisasi baru, bernama Garda Muda Penegak Integrasi atau Gadapaksi, beranggotakan sekitar 2.000 orang. Cita-cita dan tujuan utama pembentukan ini sebenarnya cukup mulia.

Di organisasi ini, Prabowo membekali mereka dengan berbagai keterampilan. Dari latihan perang ala Kopassus, membuka bengkel mobil/motor, membuat batako, hingga

menjahit. Hanya, dalam perkembangannya, Gadapaksi bukannya andil besar dalam mempertahankan integrasi, melainkan justru banyak menciptakan kekacauan.

Sebagian besar anggota Gadapaksi yang memiliki senjata api, sering over acting terhadap pemuda-pemuda di luar kelompok Gadapaksi. Dengan berat hati harus diakui, di masa keberadaan Gadapaksi, tidak sedikit pertikaian berdarah yang terjadi antara anggota Gadapaksi dan kelompok pemuda pro-kemerdekaan. Sebut saja, misalnya, kejadian di Uatu Lari (1996). Dua pemuda tewas tertembak. Dan, sepekan kemudian, pimpinan Gadapaksi yang juga anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) Viqueque bersama enam anak buahnya ditembak Falintil dalam perjalanan antara Uatu Lari-Viqueque.

Walau begitu, opsi dua juga melahirkan berbagai organisasi untuk menggalang opini pro-otonomi. Sebut saja, Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK), lahir tanggal 27 Januari 1999, pukul 09.00 waktu setempat atau beberapa jam sebelum pemerintah mengumumkan dua opsi. FPDK, perkumpulan kaum intelektual Timtim yang dicituskan Domingos MD Soares SH, Bupati Dili itu, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan visi seluruh rakyat Timtim. Keanggotaan organisasi ini sebagian besar sarjana.

Lalu, pada 10 Maret 1999 lahir *Klibur Oan Timor Ba Dame* (KOTBD), atau Kelompok Orang Timor Menuju Perdamaian. Organisasi ini disponsori drs Gil da Costa AN Alves, ipar Gubernur Abilio Soares. KOTBD merekrut semua pihak, dari CNRT, FPDK, unsur Pemda, TNI, Polri dan tokoh gereja.

Mei 1999, Tarcisio Amaral, Kepala Bagian Hukum Pemda Timtim, mengusulkan organisasi baru setingkat CNRT dan dipimpin langsung oleh orang yang setingkat Xanana Gusmão. Maka, lahirlah Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT) 20 Mei 1999, dengan Ketua Umum FX Lopez da Crus, yang kemudian diangkat sebagai Dubes Keliling dengan tugas khusus masalah Timtim.

BRTT dimaksudkan sebagai payung pro-integrasi, seperti halnya CNRT yang menjadi naungan seluruh organisasi pro-kemerdekaan. Juni 1999, FPDK dan BRTT bersama Panglima Pasukan Pro-Integrasi Joao Tavares mendeklarasikan Front bersama FPDK, BRTT dan Pasukan Pejuang Integrasi (PPI), pimpinan FX Lopez da Crus dan Domingos Soares.

Menjelang masa penentuan pendapat, kelompok pro-otonomi menggabungkan diri dalam UNIF atau United Front for East Timor Autonomy, yang artinya, Front Bersama untuk Otonomi Timtim, dengan juru bicara Basilio Diaz Araujo.

Timtim Runyam

SAYANG, seluruh perkembangan itu justru membuat Timtim semakin runyam. Senjata yang mereka miliki pada akhirnya justru memperuncing persoalan. Timtim tidak pernah lepas dari cengkeraman serentetan kerusuhan yang terus berlanjut hingga pelaksanaan penentuan pendapat.

Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya, Timor Timur tidak pernah sepi dari keributan. Awal Maret, warga Timtim mulai gelisah dan resah. Mereka pun mulai membawa barang dan hak milik keluar Timtim. Satu persatu warga Timtim pun mulai meninggalkan wilayah itu. Meski belum terjadi eksodus besar-besaran seperti yang pernah diberitakan.

Bentrokan memuncak di Liquica, sekitar satu jam dari Dili ke arah barat, tanggal 6 April 1999. Massa yang mengamuk membantai sekumpulan orang yang berlindung di Gereja. Tak jelas siapa yang memulai serangan. Namun, Uskup Belo memperkirakan ada 25 warga tewas. Sementara sumber lain memperkirakan, antara lima hingga 57 orang tewas dalam bentrokan tersebut.

Seiring dengan itu, kelompok-kelompok milisi pun melakukan konsolidasi dan memperkuat pertahanan diri. Tepat tanggal 17 Mei 1999, mereka mendeklarasikan pembentukan kelompok milisi Aitarak untuk wilayah Dili. Aitarak yang berarti duri besar dan runcing itu secara resmi dipimpin Eurico Guterres.

Beberapa saat setelah Aitarak terbentuk, satu pasukan tentara mendrop ratusan granat manggis dan senjata lain di markasnya, Hotel Tropical, Dili. "Setidaknya itu yang saya lihat waktu itu," kata seorang kawan dari Jakarta. Lebih dari itu, mereka juga dibekali biaya operasional, berupa uang tunai. Sayangnya, uang tunai itu tidak bisa disimpan secara resmi, karena ditolak oleh pihak bank. Bank menyatakan uang tersebut palsu.

Suasana Timtim semakin panas. Kerusuhan tak juga mereda. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang bersenjata menyerang kediaman tokoh pro-kemerdekaan Manuel Carrascalao yang tak jauh dari Markas Aitarak, Hotel Tropical, Dili.

Kelompok milisi ini kemudian sering dilekatkan dengan segala jenis keributan di Timtim. Walau begitu, harus diakui, kesan sebagai "biang" kerusuhan kadang justru datang dari mereka sendiri. Misalnya, salah satu yang tercatat adalah, mereka datang ke tempat pendaftaran jajak pendapat sambil membawa senjata.

Kerusuhan dan kekerasan pun terus berlanjut. Dan seiring dengan itu, peta kekuatan pun berbalik. Kelompok pro-integrasi yang awalnya tertepikan, kini kembali ke tengah arena. Namun, sayang, kesempatan itu tak mereka gunakan dengan secantik mungkin. Akibatnya timbul kesan mereka hanya mau bicara dengan senjata. Seperti tidak ada cara lain.

Upaya perdamaian memang sudah berkali-kali dilakukan. Dari sumpah darah a la adat setempat, hingga sumpah dalam kesepakatan. Puncak upaya perdamaian terjadi tanggal 21 April 1999, di Dili. Kedua pihak bertikai, kelompok pro-kemerdekaan yang diwakili Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timor Timur (CNRT) dengan armada bersenjata, Falintil, dan kelompok pro-integrasi, dicoba dipertemukan dan dibawa ke meja perundingan.

Pihak pro-integrasi diwakili Domingos Soares (FPDK) dan Joao Tavares, Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI). CNRT waktu itu menghadirkan Presiden CNRT Xanana Gusmão dan Koordinator CNRT untuk Dili, Leandro Isaac. Selain itu, hadir pula Gubernur Timtim Abilio Jose Osorio Soares, Ketua DPRD Tk I Armindo Soares Mariano, Komandan Korem 164/Wira Dharma Kol (inf) FX Tono Suratman, dan Kapolda Timtim Kol (Pol) Drs Timbul Silaen.

Penandatanganan disaksikan Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto, Uskup Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo SDB dan Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento, serta perwakilan Komisi Nasional HAM, Djoko Soegianto SH. Kedua pihak sama-sama merasa prihatin dengan terus meningkatnya kekerasan, termasuk intimidasi, teror, dan pembunuhan di Timtim. Karena itu mereka bertekad menciptakan suasana aman dan damai di Timtim.

Hal itu antara lain diwujudkan dalam upaya menghentikan segala bentuk permusuhan, intimidasi, teror, dan kekerasan untuk menciptakan suasana damai di Timtim, serta mendukung keinginan pemerintah, Komnas HAM, dan Gereja Katolik dalam mewujudkan rekonsiliasi di Timtim. Diharapkan rekonsiliasi itu mampu menegakkan kehormatan dan hukum, serta memberi perlindungan HAM. Kedua pihak pun sepakat membentuk Komite Perdamaian dan Stabilitas (KPS) yang beranggotakan kedua pihak.

Niat damai tidak berhenti sampai di situ. Tanggal 18 Juni 1999, mereka sepakat menyerahkan segala bentuk senjata, baik senjata api, granat, bahan peledak, senjata api rakitan, dan senjata tradisional seperti tombak, panah, serta parang kepada aparat yang berwenang.

Setelah muncul berbagai kesepakatan itu, suhu ketegangan menurun. Suasana kota Dili, dan Timtim pada umumnya, mulai terasa aman. Landai, begitu kadang diistilahkan. Kehidupan berjalan normal. Bahkan di waktu malam, masih bisa berkaraoke atau makan ikan bakar di pinggir pantai.

Walau begitu, di beberapa tempat masih tetap terjadi kerusuhan. Kali ini serangan tidak hanya ditargetkan kepada kedua kelompok, melainkan sudah merembet ke sektor lain, termasuk UNAMET (United Nations Mission in East Timor) atau Misi PBB di Timtim yang akan melaksanakan jajak pendapat di Timtim.

Jumat (2/7/99), massa pro-integrasi berdemonstrasi di kantor UNAMET di Viqueque dan merusak kantor UNAMET di Maliana. Mereka marah karena memandang UNAMET tidak netral dan selalu membela kelompok pro-kemerdekaan. Keesokan harinya, staf UNAMET di Liquica terpaksa diamankan di Dili.

Kerusuhan yang melanda UNAMET pun terus berlanjut. Hari Minggu (4/7/99), kelompok milisi Besi Merah Putih (BMP) menyerang misi kemanusiaan untuk Timor Loro Sa'e, di Liquica, yang baru saja mengirim bantuan makanan dan obat-obatan ke kamp pengungsian di Sare, kecamatan Hatolia, kabupaten Ermera, tepat di perbatasan Ermera-Liquica. Seperti serangan dan kerusuhan sebelumnya, penyebab yang pasti sulit diketahui. Namun, serangan yang diawali dengan baku tembak itu, konon, dilakukan karena pihak BMP mensinyalir adanya anggota Falintil yang bersenjata dalam rombongan itu.

Dalam perjalanan selanjutnya, semakin banyak kecaman dan tuduhan pada ketidaknetralan pihak UNAMET. Tanpa diketahui alasannya, PBB menyerahkan sepenuhnya penanganan ini kepada Australia yang dari awal cukup anti dengan Indonesia. PM Australia John Howard sering sekali memberikan kecaman pedas kepada Presiden BJ Habibie.

Tak mengherankan bila rekrutmen anggota UNAMET pun dilakukan di Darwin, Australia. Karena itu bisa dipastikan sebagian besar pasti warga Australia yang terlibat di dalam UNAMET. Namun, saat merekrut staf lokal, kenyataannya banyak pemuda pro-kemerdekaan yang justru dilibatkan. Pada waktu itu, Juru Bicara (Jubir) UNAMET David Wilmhurst mengatakan, sebenarnya pihak UNAMET membuka kesempatan itu untuk umum. Namun, peserta yang lulus tes pada akhirnya lebih banyak yang pro-kemerdekaan.

Ini bisa dimaklumi. Di samping sikap John Howard yang "sok" anti-Indonesia, sejak kebangkitan kembali kelompok pro-kemerdekaan sebagai imbas reformasi di Jakarta, sebagian besar mahasiswa yang umumnya menguasai bahasa Inggris secara aktif, adalah

pendukung pro-kemerdekaan. Harus diakui, sejak Jakarta memberikan opsi melepas Timtim yang kemudian dibawa ke arah kemerdekaan, menjadi pendukung kemerdekaan seolah menjadi semacam "tren aspirasi" atau "mode" baru yang digandrungi pemuda Timtim.

Di Dili, hari berjalan seperti biasa. Kegiatan peliputan pun berjalan rutin. Pagi ke markas bekas UNAMET di Balide, mengikuti briefing Jubir David Wimbhurst atau wakilnya Yasuhiro Ueki, cek ke lapangan, lalu pulang menulis berita. Setelah terkumpul dari tiga teman, berita pun dikirim ke Jakarta. Karena itu, tak seperti di Jakarta, selama itu, tiap sore, saya masih sempat menyiram bunga di halaman.

Sabtu, 17 Juli 1999, pendaftaran hari pertama dimulai. Rata-rata pendaftaran berjalan mulus, aman, kecuali di Zumalai, Kovalima. Di wilayah perbatasan Kovalima-Ainaro itu, terjadi kerusuhan yang menewaskan satu korban dan lima luka-luka. Untuk menenangkan keadaan, UNAMET menunda waktu pendaftaran.

Meski tidak menyulut kerusuhan, banyak kejadian yang menarik selama masa pendaftaran itu. Karena melaksanakan peraturan dengan seksama, banyak warga yang harus ditolak saat mau mendaftarkan diri ke UNAMET. Hal itu terjadi, karena masyarakat belum benar-benar memahami persyaratan pendaftaran yang ditentukan UNAMET.

Dalam penjelasan tertulisnya, UNAMET menyebutkan, warga boleh mendaftar bila sudah berusia 17 tahun dan bisa membuktikan identitas diri kepada staf pemilihan UNAMET di tempat pendaftaran, atau kepada siapa saja yang lahir di Timtim atau mempunyai orangtua asal Timtim, atau juga menikah dengan warga Timtim, sejauh bisa menunjukkan bukti identitas dan pendukung lain.

Untuk memperjelas, UNAMET mengumumkan, bukti identitas diri bisa dalam bentuk KTP, paspor, kartu pengungsi Portugis, daftar penduduk, kartu pelajar, atau kartu mahasiswa. Untuk menunjukkan identitas itu benar-benar miliknya, UNAMET masih meminta satu dokumen lagi yang bisa mendukung dokumen tentang identitas diri tersebut, berupa akte permandian, akte kelahiran, akte nikah, akte kelahiran orang tua, cedula da vida crista, atau cedula pessoal. Dan, bila itu tak bisa terpenuhi pula, UNAMET menyediakan affidavit.

Namun, tidak semua warga memahami maksud UNAMET tersebut. Maklum, penyebaran informasi ini lebih banyak menggunakan media tulis. Sementara banyak warga yang masih buta huruf. Seandainya disiarkan melalui televisi sekalipun, itu hanya berupa

butir-butir syarat pendaftaran, tanpa penjelasan lebih gamblang, hubungan dokumen satu dengan yang lain dan alasan mengapa harus dilengkapi dua dokumen.

Sudah pasti, banyak warga yang kesal dengan peraturan ini. Mereka sudah antre dari pagi, pas sampai di tempat giliran ditolak. "Apa kurangnya? Apakah KTP saja tidak cukup?" kata Apolinario Alves Lopes, Kepala Desa Santa Cruz, Dili Timur. Di tengah terik matahari siang itu, wajahnya menegang. Hanya mengenakan kaos dan training pak seadanya, tergoop-gopoh ia mendatangi KPS (Komisi Perdamaian dan Stabilitas) untuk melaporkan masalah ini.

Di KPS, Apolinario diterima Koordinator KPS, Marbun. Dan, sempat terjadi perdebatan cukup seru. Menurut Marbun, KTP saja mestinya cukup, karena ia mengacu pada perjanjian New York, tepatnya klausul yang mengatakan, jajak pendapat bisa diikuti semua warga Timtim. Namun, sepertinya Marbun lupa, perjanjian di New York merupakan perjanjian payung atau perjanjian pokok yang masih memerlukan perincian di lapangan.

Saat masalah itu dipersoalkan kepada David Wimhurst di Markas Unamet, alasan UNAMET tidak percaya KTP cukup masuk akal. Ia menjelaskan, dalam hal ini UNAMET ingin bermain secara fair. "Kalau misalnya, kamu punya KTP, kami masih memerlukan satu bukti lain yang memastikan bahwa KTP itu benar-benar milikmu, bukan palsu. Kalau kami hanya meminta satu syarat, akan terlalu mudah bagi semua orang untuk ikut," jelasnya.

Walau begitu, tidak seluruh panitia UNAMET sekaku di Dili. Di desa Holorua, Manufahi misalnya, sebagai ganti dokumen penunjang, mereka mengizinkan menggunakan affidavit atau cap jempol. "Di sini cap jempol bisa digunakan, karena banyak di antara mereka yang tidak bisa membaca dan menulis," kata Sarestha Bitay, petugas UNAMET asal Nepal.

Hal itu diperkuat David Pape, Polisi Sipil PBB dari Inggris. "Di sini semua berjalan lancar. Kalau mereka tidak mempunyai identitas, kita gunakan affidavit. Kalau tidak bisa tanda tangan, ya cap jempol, tidak ada masalah," jelasnya sambil tertawa. Pada akhirnya, semua tergantung pribadi petugas UNAMET. Biasanya, petugas yang tidak berasal dari Australia, umumnya terkesan lebih ramah, helpful, dan fleksibel. Jauh dari kesan sombong dan angkuh.

Dokumen Garnadi dan Propaganda Hitam

PERTENGAHAN Juli 1999. Sekitar pukul 05.00 pagi, seorang teman sudah menelepon. Ia menanyakan apakah saya sudah memiliki sebuah dokumen penting yang bocor di Timtim.

"Dokumen apa?"

"Itu tentang rencana pembumihangusan Timor Timur kalau opsi otonomi ditolak," lanjutnya.

"Ha! Masak?"

Saya terkejut setengah mati. Memang saya mendengar rencana itu secara lisan, tetapi tidak pernah terpikir bahwa rencana itu didokumentasikan secara tertulis. Walau begitu, berita itu pun tidak sayaanggapi dengan serius. Waktu itu saya berpikir, rencana itu hanyalah bagian dari psy-war yang sedang dilancarkan kedua pihak. "Dokumen itu sudah beredar ke mana-mana dan sudah diserahkan ke pemda setempat. Tolong hubungi salah seorang di Pemda," tambahnya.

Tanpa banyak membuang waktu, hari itu saya mengontak seluruh jaringan untuk mengetahui keberadaan dokumen tersebut. Setelah "berjuang" cukup lama, siang hari saya mendapatkan kepastian keberadaan kopian dokumen tersebut. Saya pun semakin terkejut. Dalam kopian dokumen itu jelas tertera lambang Garuda Pancasila dengan kop Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, tertanggal 3 Juli 1999.

Setelah ditulis dalam berita, dokumen yang berisi rencana lengkap yang akan dilakukan bila otonomi kalah itu tiba-tiba "raib". Padahal, seperti biasa, seluruh bahan Timtim saya kumpulkan di satu tempat. Dari semua bahan yang ada, hanya dokumen itu yang tiba-tiba menghilang. Nasir, rekan serumah saya pun hanya mengangkat bahu ketika menyadari dokumen itu tiba-tiba raib secara mengejutkan.

Saya pun semakin bingung ketika bertemu Komandan Korem Kol Tono Suratman siang harinya. "Halo apa kabar, Rien, saya dengar kamu kehilangan dokumen....," ujarnya sambil tersenyum.

"Lho, Bapak sudah tahu? Iya, Pak.." Mendengar pertanyaan dan melihat kebingungan saya, kembali Pak Tono tertawa.

Saya akui, Pak Tono memang ramah dan penuh perhatian pada setiap wartawan. Tetapi, sungguh saya bingung bagaimana dan dari mana beliau tahu. Karena berita soal hilangnya dokumen itu baru beredar di kalangan orang serumah dan hanya orang

serumahlah yang tahu di mana dokumen itu saya simpan. Lho, memang ada “intel” di dalam rumah? Setahu saya memang ada “intel”, tetapi “indomie telur”.

Dan entah mengapa, sejak itu Pak Tono tidak begitu ramah lagi. Bahkan ia tidak menepati janji untuk datang ke rumah kontrakan kami di Delta, Komoro, dan berbicara panjang lebar tentang Timtim dengan seluruh tim *Kompas*. “Maaf saya tidak bisa,” begitu kata Pak Tono setiap kali kami menagih janjinya. Saya menduga, mungkin Pak Tono benar-benar mengira kami adalah aktivis pro-kemerdekaan. Mungkin... Entahlah..!

SUDAH pasti, pemerintah Indonesia membantah habis perihal dokumen Garnadi itu. "Satgas P3TT sangat prihatin terhadap berita yang sekarang beredar di media massa, mengenai bocoran surat yang diduga dikirim oleh Satgas P3TT kepada Polkam yang menyampaikan suatu "rencana darurat" dramatis jikalau usulan otonomi ditolak dalam penentuan pendapat bulan Agustus," kata Jubir Satgas P3TT Dino Patti Djalal dalam jumpa pers di Dili, Rabu (21/7/99).

Dino menegaskan, surat yang beredar itu 100 persen palsu. Terutama dilihat dari format, file, dan nomor surat. "Seluruhnya ditulis dengan tidak benar," tegas Dino. Untuk memperjelas, ia mengambil contoh penulisan "memo" dalam surat tersebut yang menggunakan mesin ketik. "Umumnya, surat yang bersifat "memo" ditulis dengan tangan. Saya tidak pernah melihat surat dengan format seperti itu," katanya.

"Satgas telah melihat surat tersebut dan dengan sekilas pandang dapat segera menyimpulkan bahwa format, logo, gaya, bahasa, dan tanda tangan yang tertera pada surat tersebut tidak cocok dengan yang biasanya digunakan oleh Satgas dalam surat-menyurat," lanjut Dino. Ia juga meminta masyarakat Timtim tidak perlu gelisah dengan suburnya propaganda seperti itu, yang ia sebut sebagai "propaganda hitam".

Untuk lebih memastikan, siang itu, saya berusaha menemui Mayjen (Purn) HR Garnadi yang namanya disebut-sebut dalam dokumen tersebut. "Maaf, Bapak sedang istirahat siang, silakah kembali nanti sore saja," kata salah satu staf di rumahnya.

Saat ditemui, sore harinya, Asisten Menko Polkam Mayjen (Purn) HR Garnadi yang namanya jelas-jelas tertera dalam dokumen itu pun, memberi bantahan yang tidak kalah seru. "Itu bukan dari saya. Di sini, saya tidak berhak membuat analisa seperti itu. Tugas saya di sini hanya melaporkan kejadian, terserah bagaimana Jakarta nanti. Dan itu sama sekali bukan dokumen yang saya bikin, termasuk isi-isinya," tegas HR Garnadi yang ditemui di kediamannya, kompleks Delta Komoro, Dili.

Setelah dokumen HR Garnadi reda, muncul lagi surat lain yang berlogo Garuda Pancasila. Kali ini surat seolah-olah dikeluarkan Bupati Aileu Suprpto Tarman dan ditujukan kepada seluruh warga pro-integrasi. Paragraf pertama surat itu berbunyi, "menindaklanjuti surat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Cq Mabes ABRI Nomor: X/A/MB/VII/1999 tentang memantapkan dan mempertahankan integrasi di Timor Timur, saya mengimbau kepada seluruh unsur terkait agar segera melaksanakan kegiatan rutin sebagai berikut."

Kegiatan rutin yang dimaksudkan berupa enam perintah, yaitu menggunakan kekerasan fisik dan nonfisik terhadap orang-orang PBB yang tidak netral menjalankan tugasnya, demi memenangkan otonomi di Timtim. Seluruh anggota ABRI, Polri, Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK), AHI (milisi), dan Pam Swakarsa, diminta memantau keberadaan staf UNAMET, serta menangkap anggota klandestin dan Falintil yang memasuki desa Aileu. Disebutkan pula, "apabila ada orang UNAMET yang dalam menjalankan tugasnya tidak melapor kepada polisi dan ABRI atau di atas pukul 18.00, agar diperiksa. Bila perlu dipukul, dilempar, dan dirusak mobilnya."

Bupati Aileu Suprpto Tarman langsung melaporkan kejadian itu kepada Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Timtim Kolonel (Pol) Timbul Silaen. Kepada polisi, Tarman menegaskan pihaknya tidak pernah membuat surat tersebut. Ia mensinyalir, surat-surat itu dibuat untuk mengadu domba pemerintah daerah dengan UNAMET.

"Sekarang ini sudah perang opini. Karena itu jangan buru-buru menganggap surat seperti itu sah. Mana mungkin seorang bupati membuat surat edaran pakai cap begitu, dengan seruan supaya tidak menerima UNAMET. Pelakunya terus kami cari," kata Kolonel (kini menjadi Kombes Pol) Timbul Silaen.

Dalam jumpa pers pada hari yang sama, Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) Eurico Guterres mensinyalir, surat itu dibuat para sarjana Timtim yang dilahirkan selama masa integrasi 23 tahun. "Tetapi sebagian sarjana itu kembali menyerang pemerintah Indonesia dan merusak integrasi dengan mengeluarkan berbagai surat palsu dan politik murahan," katanya.

Mengenal Nazario Vital S Corte Real, Pelaku Sejarah Integrasi

DARAH integrasi begitu kental mengalir di dalam tubuh Nazario Vital S Corte Real (68). Ia salah satu korban yang hidup dalam peristiwa berdarah, perang saudara di Timor

Timur, tahun 1976. "Saya salah satu dari empat orang yang luput dari tembakan Fretilin," tegas Nazario.

Di tengah pergolakan perang saudara waktu itu, Fretilin merencanakan membinasakan sekitar 78 orang yang dianggap sebagai pembangkang, di sungai Karau Ulun, Same, Manufahi. Dari 78 orang itu masih ada 68 orang lagi yang belum berhasil "dibersihkan". "Kami lalu dibawa masuk ke suatu tempat, disuruh berbaris, kemudian disiram dengan senjata otomatis," kata Nazario.

Dari jumlah itu, ada sekitar delapan orang yang berhasil melarikan diri, namun tertembak sebelum lolos. Dan, di antara mereka hanya empat orang yang benar-benar berhasil lolos dan selamat hingga kini. Yaitu, Bento Fernandez, yang bergabung dengan Grup 8 di kaki gunung Kablaki, Thomas de Aquino Kalla, pimpinan Morok, kelompok pro-integrasi Manatuto, Joao da Costa, anggota DPRD Tingkat II Manatuto, dan Nazario sendiri.

"Sebelum peluru itu sampai ke giliran saya, saya menjatuhkan diri dan pura-pura mati. Saya kejatuhan empat mayat di atas tubuh saya," kata Nazario. Bola matanya yang hitam bulat itu, tampak semakin bulat.



Nazario Vital S Corte Real
Ketua ABLAI (Aku Berjuang Lestarikan Amanat Integrasi)
foto: dok. pribadi

Saat umur 24 tahun, ia bertemu Felomena Maria da Costa, bunga desa Same, ibukota Manufahi. Dalam perkawinannya, Asisten I Tatapraja di Sekwilda Manufahi itu dikaruniai enam putera. Si sulung mengambil pendidikan Akabri di Magelang. Dua putera lain, kuliah di UPN dan UGM Yogyakarta. Sedang putera-puteri lain berkumpul di Same. Namun, satu di antara mereka sekolah di Ambeno.

"Darah integrasi tumbuh dari hati nurani saya sendiri, karena saya sebagai salah satu pelaku sejarah. Jadi tidak akan tergoyahkan. Jadi, ini bukan rekayasa pemerintah. Saya tidak berani membalas air susu yang sudah saya terima selama ini dengan air tuba. Dan, haruskah saya lari dari ideologi saya. Integrasi, itulah ideologi saya," tegas Nazario di rumahnya, Same, ibukota Manufahi, akhir bulan Juli 1999 lalu.

Dengan semangat dan aspirasi itu, ia kemudian ditunjuk sebagai Ketua Umum ABLAI (Aku Berjuang Lestarian Amanat Integrasi), Kabupaten Manufahi. Nazario pun menerima *Kompas* dengan penuh keramahan, keterbukaan, dan persahabatan. Berikut disampaikan petikan wawancara dengan tokoh integrasi tersebut.

Bagaimana persiapan Anda menghadapi jajak pendapat ini?

Kami berusaha sekeras mungkin. Dari data pemilu lalu, di empat kecamatan Manufahi ini ada 26.000 pemilih. Untuk jajak pendapat ini, kita perkirakan hanya ada sekitar 20.000 orang yang berhak. Jumlah itu memang masih memungkinkan untuk turun lagi menjadi 19.000. Jadi, kita hitung kira-kira ada sekitar 1000 orang yang tidak ikut ...

Apakah ada usaha untuk memenangkan otonomi?

Ya, setiap anggota Ablai, kita minta untuk menggalang lima orang di dalam keluarganya. Jadi, hanya di dalam keluarganya saja, tidak keluar ke orang lain. Misalnya, satu keluarga itu *kan* ada beberapa orang, kalau misalnya mereka semua bersuara yang sama, itu saja sudah sangat bagus.

Sebenarnya seberapa besar kekuatan Ablai?

Kekuatan intinya, kurang lebih hanya 5000 orang, terutama di kecamatan Alas, Turisca, dan Same. Kita masih punya massa yang mengambang di Fatuberliu. Kita punya 14 kompi dengan dua cadangan. Dari jumlah itu, 15 kompi terdiri dari pria dan satu kompi khusus wanita, yang jumlah anggotanya sekitar 267 orang. (Saat *Kompas* berada di rumahnya, komunikasi radio terus berjalan. Dan setiap hari Ablai rutin mengadakan apel).

Bagaimana perkembangan hubungan pro-otonomi dan pro-kemerdekaan sebenarnya?

Semenjak ada reformasi di Jakarta, dari bulan Juli sampai Oktober, terus ada teror dan intimidasi kepada kami, pendukung pro-integrasi. Kami terus dipojokkan sampai-sampai tidak bisa bergerak. Kami sudah 100 persen dianggap kalah. Jadi, ada semacam psy war. Pembunuhan terus berlangsung. Banyak anggota kami yang akhirnya sangat ketakutan. Puncaknya, terjadi tanggal 29 Oktober 1998 di Weberik, Manufahi, Alas. Selain menteror, mereka juga memungut iuran untuk perjuangan dengan kuitansi CNRT, tiap orang RP 10.000, dengan janji kalau menang akan diganti satu juta (rupiah). Tidak ada yang berani tidak membayar, karena mereka dipaksa. Ini saya mendapatkan banyak sekali laporan dan bukti kuitansi yang ditandatangani Falur Rate Laec.

Apakah kondisi seperti itu yang mendorong berdirinya kelompok pro-integrasi seperti Ablai ini?

Ya. Kondisi itu membangkitkan Ablai.

Apa arti Ablai sebenarnya?

Itu kepanjangan dari Aku Berjuang Lestarkan Amanat Integrasi. Nama itu diambil dari nama gunung kebanggaan kami, gunung Kablaki. Nama Kablaki itu dalam bahasa Tetum. Di Same, kabupaten Manufahi ini, kami menyebutnya Ablai, karena bahasa daerah kami bukan Tetum, tetapi Mambai. Tetapi Ablai baru secara resmi dikukuhkan tanggal 11 Maret 1999 di Same.

Tetapi sebenarnya ini sudah sejak Portugal keluar dari Indonesia. Sekitar tahun 1975 sampai 1980, kami mempunyai senjata. Waktu itu Portugal meninggalkan sekitar 25.000 pucuk senjata, yang kemudian dibagi ke kelompok yang pro dan anti-integrasi. Tahun 1980, kami meletakkan senjata dan menjadi Wisesa yang artinya waspada. Kami ingin meningkatkan kewaspadaan dan kami juga ingin lebih berkiprah, dalam arti membangun bersama pemerintah.

Apa misi utamanya?

Mempertahankan integrasi sampai titik darah penghabisan. Siapa pun dia, dari mana pun dia, kami siap membela Merah Putih sampai titik darah yang penghabisan. Kalau Merah Putih sampai bisa diturunkan, berarti Ablai pun baru bisa dihabiskan.

Karena sudah banyak yang gugur dalam perjuangan itu. Jangan sampai mereka yang gugur ini sia-sia. Setelah berdiri Ablai, memang intimidasi dan teror yang kami alami mereda. Mereka akhirnya banyak yang kabur. Ada yang mengungsi hingga ke Dili. Tetapi sekitar tanggal 29 hingga 9 November, terutama di kecamatan Alas, sudah banyak yang kembali, tetapi masih banyak juga yang berlindung di gereja.

Selain Ablai, adakah kelompok lain?

Ya, kita mempunyai Makikit di Viqueque, Alfa di Los Palos, Saka/Sera di Baucau, Morok di Manatuto, Aitarak di Dili, Besi Merah Putih di Liquica, Darah Integrasi di Ermera, Halilintar di Maliana, Dadurus Merah Putih juga di Maliana, Sakunar di Ambeno, AHI atau Aileu Haburas Integrasi di Aileu.

Itu artinya?

Aileu mengembangkan integrasi. Lalu, di Ainaro itu ada Mahidi yang artinya Mati Hidup tetap dengan Integrasi, Laksaur di Kovalima, dan Sakunar di Ambeno.

Apakah Anda yakin otonomi akan memenangkan jajak pendapat ini?

Ya. Setidaknya, di kabupaten ini kami telah mendapatkan 90 persen suara.

Jika Otonomi Terpilih

JIKA menolak otonomi, berarti status Timtim kembali ke PBB. Dan, PBB yang akan "membawa" Timtim memasuki masa transisi, hingga mungkin kawasan itu bisa membentuk pemerintahan sendiri. Sudah pasti hal ini akan memerlukan waktu cukup lama.

Sebaliknya, bila menerima otonomi, berarti Timtim akan tetap menjadi bagian dari Indonesia dan mempunyai kewenangan lebih luas dibanding provinsi lain. Dalam arti, Timtim bisa membuat kebijakan apa saja yang sesuai dengan daerahnya, kecuali dalam hal hubungan luar negeri, pertahanan, ekonomi dan keuangan, serta kesinambungan hukum Indonesia.

Sedang pemerintah daerah otonomi khusus (DOK) Timtim berhak mengatur semua masalah, di luar urusan di atas. Namun, seluruh kewenangan itu harus sesuai dengan

ketentuan persetujuan ini dan UUD RI. DOK Timtim sama sekali tidak diperbolehkan membatasi hak-hak pekerja sebagaimana diakui Undang-Undang (UU) dan memberikan pekerjaan apa saja atau jabatan pemerintahan, hanya kepada orang-orang yang beridentitas Timtim.

Pemerintahan DOK Timtim memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di DOK Timtim, kecuali kejahatan yang berhubungan dengan makar dan terorisme, narkoba, dan kejahatan internasional, sesuai UU dan yurisdiksi Indonesia yang berlaku.

Identitas atau jatidiri orang Timtim didefinisikan sebagai setiap orang yang menjadi penduduk Timtim secara sah sebelum atau pada bulan Desember 1975. Selain itu, yang memiliki ayah, ibu, kakek, nenek penduduk Timtim yang sah sebelum atau sesudah bulan Desember 1975, atau yang sudah bertempat tinggal secara tetap di Timtim untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun pada saat berlakunya persetujuan ini.

Timtim memiliki hak eksklusif untuk menetapkan peraturan dan prosedur dalam memberikan identitas bagi seseorang yang sama sekali tidak memiliki identitas Timtim. Dalam hal ini, pemerintah pusat berhak mengawasi bidang imigrasi atas orang-orang yang masuk atau keluar DOK Timtim yang bukan warga negara Indonesia atau yang tidak memiliki identitas Timtim. Hal itu sesuai dengan wewenang yang berdasarkan pasal 1 persetujuan ini.

Bahkan Timtim pun berhak menentukan lambang daerahnya sendiri, meskipun tetap mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Dalam urusan pengiriman misi kebudayaan dan olah raga internasional, yang tidak mewakili antarnegara, DOK Timtim bisa mengirimkan tim atas namanya, dengan persetujuan pemerintah pusat.

Menyangkut kekuasaan legislatif, DOK Timtim mencakup wewenang menyusun kebijaksanaan politik, ekonomi dan sosial. Sedang untuk masalah pendidikan dan kebudayaan, penentuan bahasa kedua atau bahasa tambahan lain, di luar bahasa Indonesia, serta pembentukan pengadilan tingkat pertama sesuai dengan pasal 40, ketentuan hukum keluarga dan warisan, ketertiban umum, termasuk pembentukan angkatan kepolisian di Timtim yang bertanggung jawab atas penegakkan semua peraturan perundangan DOK Timtim, dibentuk sesuai dengan hukum dan peraturan RI.

Wewenang Timtim adalah dalam menetapkan peraturan daerah untuk mengatur atau membatasi kepemilikan atas orang-orang yang tidak memiliki identitas Timtim. Namun hal

itu harus dilakukan dengan tanpa melanggar hak-hak yang diperoleh secara sah. DOK Timtim berwenang membentuk Komisi Pengaduan masalah Tanah.

DPRD DOK Timtim dipilih oleh orang-orang yang beridentitas Timtim secara universal, tanpa perlu bersamaan waktunya dengan pemilu nasional. Anggota DPRD harus memenuhi syarat, tanpa mempertimbangkan masalah rasial, etnis, agama, bangsa, atau hal lain yang tidak berhubungan dengan fungsi seorang anggota dewan.

Anggota DPRD DOK Timtim memiliki kekebalan hukum terhadap tindakan hukum yang berkaitan dengan pernyataan lisan atau tulisan, atau tindakan yang berhubungan dengan tugas-tugas dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan.

SEPERTI halnya di daerah lain, kekuasaan eksekutif akan dilaksanakan oleh seorang gubernur dibantu satu dewan penasihat yang anggotanya diangkat gubernur dengan rekomendasi DPRD DOK Timtim. Gubernur Timtim dipilih oleh mayoritas anggota dewan dan harus disetujui dan dikukuhkan oleh Presiden RI.

Pemerintah DOK (PDOK) Timtim berwenang untuk merancang, memandu, dan melaksanakan kebijakan dan program, serta mengeluarkan keputusan dan peraturan eksekutif di dalam ruang lingkup hukum DOK Timtim. PDOK juga bertanggung jawab menjamin semua peraturan perundangan dijalankan dan ditegakkan di Timtim dengan sungguh-sungguh.

Dalam hal ketertiban umum, DOK Timtim berhak membentuk dan mengatur Angkatan Kepolisian berdasarkan peraturan daerah. Karena itu, meskipun anggotanya direkrut tanpa membedakan ras, etnis, atau agama, angkatan kepolisian itu tetap berada di bawah kekuasaan dan pengawasan DOK Timtim.

Fungsi utama kepolisian adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban Timtim, serta menegakkan hukum secara adil dan obyektif. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Angkatan Kepolisian DOK Timtim berkonsultasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam rangka menegakkan hukum nasional Indonesia di DOK Timtim.

Bila ada permintaan dari Kepolisian RI, Angkatan Kepolisian DOK Timtim akan mengambil tindakan yang diperlukan, terutama untuk menangkap orang di DOK Timtim yang dituduh melakukan kejahatan di luar DOK Timtim.

Sebaliknya, Kepolisian RI akan bekerja sama dengan Angkatan Kepolisian DOK Timtim untuk menangkap orang di luar DOK Timtim yang dituduh telah melakukan

kejahatan di DOK Timtim. Sedang dalam hal yang luar biasa, Kepolisian RI akan membantu Angkatan Kepolisian DOK Timtim dalam melaksanakan tugasnya.

Kekuasaan dan kelembagaan peradilan di Timtim, diberikan dan dilaksanakan oleh peradilan independen, yang memiliki yurisdiksi atas semua masalah perdata, pidana, administratif dan masalah lain yang berada di dalam kewenangan DOK Timtim.

Dalam tuntutan perdata, pengadilan DOK Timtim bisa menerapkan hukum adat yang berlaku bagi semua pihak dan diakui oleh peradilan DOK Timtim. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan bila telah ada kesepakatan di antara semua pihak yang terlibat. Sistem peradilannya terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, serta Pengadilan Tingkat Kasasi dan Penuntut Umum.

Dalam kaitan dengan peningkatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan ditekankan, PDOK Timtim wajib meningkatkan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana terurai dalam Deklarasi Universal tentang HAM, Deklarasi Wina 1993, dan TAP MPR No XVII/MPR/1998.

Hal itu mencakup, kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Juga, bebas dari penyiksaan, tindak kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, penahanan, atau pembuangan. Ditekankan pula adanya hak untuk didengar secara penuh dan adil oleh badan peradilan yang independen dan tidak memihak.

DOK Timtim juga menjamin kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul, dan berserikat secara damai. Termasuk hak mendirikan parpol yang spesifik untuk Timtim tanpa pembatasan dalam bentuk apa pun, sejauh tidak lepas dari pasal 57, yaitu tetap dalam kerangka UUD RI.

Tidak hanya itu, DOK Timtim juga menjamin orang bebas bergerak di seluruh RI, hak untuk menikmati dan berpartisipasi dalam kebudayaan masing-masing, hak memiliki harta kekayaan dan perlindungan kekayaan, hak atas perlindungan kehidupan keluarga, kebebasan pribadi, tempat tinggal dan surat-menyurat.

Juga, hak atas pendidikan, minimal pendidikan dasar secara cuma-cuma untuk semua orang, serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sesuai kemampuan. DOK Timtim juga menjamin hak wanita dalam berpartisipasi secara penuh di bidang politik, sipil, ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta menjamin hak hidup anak sesuai Konvensi PBB.

Dalam hubungan dengan pemerintah pusat, DOK Timtim tetap meminta pertimbangan pusat dalam menyusun peraturan perundangan dan kebijakan yang masih

dalam kewenangan pemerintah pusat, yang mungkin berakibat langsung terhadap DOK Timtim. Untuk itu, pemerintah pusat akan menunjuk seorang pejabat senior yang akan ditempatkan di Dili, untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di Timtim, mengkoordinasikan, dan mengawasi pejabat pemerintah pusat di Timtim.

Pemerintah pusat dan daerah bisa membentuk badan atau pengaturan lain untuk memperlancar konsultasi, kerja sama, dan koordinasi dalam masalah kepolisian, pariwisata, transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Sedang dalam hubungan dengan badan lain, disebutkan, tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, PDOK Timtim boleh mengusahakan dan menerima bantuan pembangunan internasional dengan persetujuan pemerintah pusat. Selain itu, tetap dengan persetujuan pemerintah pusat, pemerintah negara asing boleh membuka kantor perwakilan non-diplomatik di DOK Timtim.

Dalam kaitan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sekjen PBB bertanggung jawab dan berwenang memantau serta memverifikasi pelaksanaan persetujuan ini, termasuk memantau pemilihan anggota DPRD DOK Timtim, dan memverifikasi bahwa pemilihan berlangsung secara bebas dan adil. Untuk tujuan itu, Sekjen PBB bisa membuka kantor yang dianggap perlu di DOK Timtim, dan akan menjalankan tugas dalam jangka waktu tertentu, sesuai kesepakatan dengan pemerintah RI.

DOK sepenuhnya diatur dengan peraturan pokok yang ditetapkan DPRD DOK Timtim yang pertama kali. Untuk itu, akan dibentuk Dewan Peralihan yang terdiri dari tidak lebih dari 25 orang dengan identitas Timtim, dengan anggota yang diangkat langsung oleh Sekjen PBB, setelah berkonsultasi dengan individu, kelompok yang relevan, serta pemerintah RI.

Dewan Peralihan berwenang menetapkan peraturan wilayah mengenai pemilihan DPRD DOK Timtim yang pertama kali. Sekjen PBB, Pemerintah RI, dan Dewan Peralihan akan terus berkonsultasi dalam menjamin terlaksananya persetujuan tersebut, sehingga proses peralihan di Timtim berlangsung dengan lancar dan damai. Untuk itu, Sekjen PBB, Pemerintah RI, dan Dewan Peralihan akan membentuk kelompok kerja sama untuk membahas pengaturan peralihan tentang keamanan.

Kalah,... Perang!

Suasana yang landai di Dili dan Timtim pada umumnya, membuat saya agak leluasa berjalan-jalan ke kabupaten lain. Di bulan Juli itu, saya memang lebih memusatkan perhatian pada pihak otonomi. Lebih jelasnya, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan dan peluang mereka di bulan Agustus nanti, sehingga arah peliputan pun menjadi lebih jelas.

Kebetulan P3TT memberi tawaran tumpangan untuk ke Same, Kabupaten Manufahi. Dengan senang hati saya terima tawaran itu, karena sudah mulai sulit mencari kendaraan di Timtim. Perjalanan ke Same memerlukan waktu sekitar empat jam jalan darat. Lamanya perjalanan bukan karena jarak tempuh yang memang jauh, atau karena banyak hambatan dari kelompok tertentu. Bukan! Sama sekali bukan.

Mulai memasuki Aileu hingga Maubisse, jalan tak ubahnya sebuah mie keriting yang ditarik ke atas di pinggiran bukit. Berkelok-kelok dengan jarak sangat dekat. Perut bagai dikocok-kocok habis. Sedang dari Maubisse hingga Same, selain berliku, jalan itu hampir tak bisa dibedakan antara jalan kendaraan, sungai kering, atau bukit longsor. Semua sama bentuknya.

Beruntung, Antonio, sang sopir sangat lihai. Ia sangat menguasai medan dan tahu persis yang mana jalan, yang mana sungai kering, dan yang mana tanah longsor, bukan jalan yang merayapi bukit. Sebenarnya, Dili-Same hanya memerlukan waktu 10 menit dengan helikopter.

Antonio yang pegawai Pemda ini benar-benar berdarah integrasi. Seluruh saudaranya habis di masa Fretilin. "Mereka semua dibunuh sama Fretilin, sekarang tinggal saya sendiri," katanya. Siang itu, saya ke Same mengantar Pak Hidayat, Observer Deplu. Hanya sesaat saya berada di kota itu. Petang harinya saya langsung pulang ke Dili.

Banyak pihak mengatakan, tidak aman jalan di waktu malam. Apalagi antarkota. Persoalannya, saya justru ingin mengetahui sampai sejauh mana ketidakamanan tersebut. Bersama Antonio, saya meninggalkan Same sekitar pukul 18.30 waktu setempat. Sekitar pukul 22.00 waktu setempat, kami, memasuki Dili, dalam kondisi aman, kecuali saya sempat muntah-muntah di Aileu.

Beberapa hari kemudian, saya kembali ke Same, menggunakan helikopter, bersama Pak Yamashita Lahay dari Satgas P3TT. Waktu itu, P3TT ingin melihat pelaksanaan pendaftaran dan permasalahan yang ada di Manufahi. Kami menginap di Wisma Kablaki, di lereng gunung Kablaki yang begitu indah.

Dan alangkah terkejut, wisma itu hanya dihuni kaum lelaki. Seluruhnya petugas RI untuk keperluan jajak pendapat. Rata-rata mereka adalah Liaison Officer (LO) Militer atau penghubung militer RI dengan UNAMET dan staf Satgas P3TT. Sebagai satu-satunya perempuan, saya terpaksa "menggusur" kamar M Kurniadi Koba, staf Satgas P3TT setempat. Harus diakui, di tempat ini tercipta kerja sama yang begitu rukun di antara semua pihak. Bisa jadi, hal itu disebabkan oleh udara Same yang sejuk dan pemandangan gunung Kablaki yang begitu menawan.

Sore itu, langit begitu bersih. Seolah ada seribu romantika yang bisa tercipta di sana. Ketika temaram mulai tiba, seorang lelaki bertubuh tambun namun kekar muncul. Rambutnya pirang dan panjang bergelombang, lengkap dengan kumis dan jenggot yang juga bergelombang. Walau terlihat lusuh, namun jelas kulitnya tidak sawo matang, bahkan cenderung terang, hidung mancung, dengan bola mata bulat kecoklatan. Dia adalah Kapela, Wakil Ketua Umum Ablai, kelompok pemuda pro-integrasi kabupaten Manufahi.

Udara integrasi begitu terasa ketika dia berada di antara kami. Setelah bicara panjang lebar, tiba-tiba, "pokoknya saya jamin, Pak, kita dapat 90 persen," kata Kapela. Sering sekali ia berkunjung ke Wisma Kablaki. Setiap kali membicarakan persiapan jajak pendapat, Kapela tidak pernah tidak bersemangat. "Semua langkah dan cara mereka sudah kami ketahui," ujarnya yakin.

"Saya yakin menang. (Kalau) Merdeka (menang), hidup di hutan. Siapa sekarang yang mau tinggal di hutan, kalau hujan harus begini," kata Kapela sambil menelangkupkan kaosnya untuk membungkus kepala dan melipat badan. "Atau kalau tidak berteduh di bawah daun pisang. Saya tidak mau begitu lagi. Pokoknya, kalau kalah kita perang!" ujarnya berapi-api. "Jangan khawatir, Non, kita pasti menang," tegasnya sekali lagi, ketika melihat saya sedikit kaget mendengar penjelasannya.

Sore itu, Kapela terus berusaha meyakinkan semua pihak akan kesiapan Ablai menghadapi jajak pendapat. Ia lalu menceritakan berbagai upaya yang ditempuh, termasuk persiapan perang. Seperti misalnya, titik-titik lokasi simpanan senjata, baik senjata milik kelompoknya maupun senjata yang diperkirakan milik kelompok pro-kemerdekaan. "Kita sudah tahu itu semua," ujarnya.

Ia sangat teguh dengan keyakinannya. Namun, keteguhan itu justru membuat saya merasa sedikit khawatir, Kapela dan kelompoknya tidak bisa menerima kenyataan, bila pada akhirnya nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu berarti perang berkobar.

Usai mengatakan itu, ia melesat pergi. Di saat pikiran saya masih penuh dengan kekhawatiran yang muncul setelah mendengar obrolannya, tiba-tiba ia sudah kembali ke Wisma Kablaki. Kali ini ia membawakan kaos hijau dengan simbol merah putih kecil di dada, dengan tulisan besar "A B L A I", lengkap dengan dasar lukisan gunung Kablaki di punggung.

"Ini untuk Nona. Dengan kaos ini, Nona telah menjadi bagian dari kami," katanya. Sore itu, hanya dua orang yang mendapat jatah kaos, selain saya, juga Bapak Yamashita Lahay, dari Satgas P3TT.

"Terima kasih, Kapela."

Pagi hari, usai melihat sang LO militer Mayor Bambang Eko Suharyanto lari pagi mendampingi "bule" militer, saya bersama Pak Yamshita bersiap melanjutkan perjalanan. Namun, untung memang tak bisa diraih, dan malang pun tak dapat ditampik. Helikopter yang harusnya menjemput kami, terjebak kabut di Ainaro.

Karena itu, kami harus tinggal untuk beberapa saat lagi. Dan akhirnya kami pulang dengan jalan darat. Di sepanjang jalan yang rusak, berbatu, dan penuh liku itu, pikiran saya tak henti terpusat pada sosok Kapela yang mengagumkan. ***

Bab II

Mengenal Pro Kemerdekaan

SETELAH memahami seluk-beluk di kelompok pro-otonomi, saya mulai mengalihkan perhatian ke pihak pro-kemerdekaan. Langkah ini penting karena selama ini *Kompas* selalu mendapat sorotan tidak netral, berpihak, dan berdiri di belakang kelompok pro-otonomi. Istilah yang sering dipakai adalah "beritanya sangat otonomi".

Sebagai sesama warga negara Indonesia, hal itu mungkin masih bisa "dimaafkan". Namun, di bidang kewartawanan, sikap itu sudah pasti tidak bisa diterima. Bagaimana pun posisi wartawan tetap harus berada di antara keduanya, siapa pun itu orangnya. Apalagi, sebelum muncul hasil jajak pendapat, bagaimana pun juga, Timtim tetaplah Indonesia, termasuk orang-orangnya.

Membuka jaringan dengan mereka bisa dikatakan gampang-gampang susah. Di awalnya, sebagian mengatakan, menemui mereka, harus dengan sistem seolah-olah diculik, untuk mengalihkan perhatian dan melindungi tempat persembunyian Falintil. Seluruh gerakan harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Terutama, setelah terjadi kontra kekuatan dari pro-kemerdekaan, imbas keputusan Jakarta memberikan opsi kedua, hingga posisi kembali ke kelompok pro-integrasi.

Pengawasan terhadap setiap gerak di Timtim memang sangat terasa. Belum ditambah kabar yang disampaikan secara lisan tentang adanya penculikan, penangkapan, atau pembunuhan. Entah siapa yang begitu tega meniupkan isu ini, yang pasti kondisinya justru memberi gambaran bahwa kedua kelompok itu "mengerikan".

Pihak pro-otonomi menggambarkan kelompok pro-kemerdekaan sebagai kelompok sangat membahayakan dan bisa berbuat apa saja. Sebaliknya, kelompok pro-kemerdekaan pun mengatakan hal yang sama terhadap kelompok pro-otonomi. Isu-isu tidak bertanggung jawab ini juga ikut andil dalam menciptakan suasana yang mencekam di Timtim. Biasanya, yang sudah berada di satu kelompok, akan sulit menyeberang ke kelompok lain. Kondisi ini justru "mematikan" netralitas wartawan, karena secara otomatis menutup fleksibilitas dan akses wartawan pada kedua kelompok.

UNTUK mencapai ke sana, jaringan diawali dengan menjalin hubungan sebaik mungkin dengan kelompok CNRT yang waktu itu masih bermarkas di Audian. Hal yang sudah mulai dirintis oleh rekan sesama *Kompas*, HM Nasir yang lebih dulu berangkat ke Dili. Setelah mereka mempunyai markas resmi di Lecidere, Dili timur, tempat itu dikembalikan sebagai kantor FPI (Frente Politica Internal), semacam urusan kementerian dalam negeri CNRT. Sekretaris FPI dijabat Lu Olo dengan Wakil Sekretaris David Diaz Ximenes.

Melihat keindonesiaan dan tempat kerja saya, yaitu koran nasional terbesar di Indonesia, tampak keraguan di wajah David. Saya pun bisa memaklumi. "Selama ini *Kompas* sangat otonomi, apa mungkin koranmu memberi porsi ke kelompok pro-kemerdekaan?" ungkapnya. Ia begitu skeptis. "Kalau tidak untuk keperluan itu, mana mungkin mereka mengirim tambahan pasukan dari Jakarta. Untuk apa kami ada di sini?," jawab saya ringan.

Walau begitu, masih diperlukan beberapa waktu untuk meyakinkan orang yang memegang banyak peran itu. Untuk meyakinkan itu, hampir tiap hari saya bersama M. Nasir, nongkrong di markas CNRT, sambil menambah volume pemberitaan kegiatan kelompok pro-kemerdekaan di *Kompas*. Nasir pula yang memperkenalkan saya tentang markas baru CNRT itu.

"Nah, gitu, dong, masak selama ini berita hanya otonomi melulu." Begitu komentar yang pernah saya terima melalui telepon dari Jakarta, ketika mulai muncul kontinuitas pemberitaan tentang kegiatan kelompok pro-kemerdekaan. Upaya itu tidak sia-sia, hubungan dengan pihak CNRT pun membaik. Sedikit demi sedikit kepercayaan mereka mulai tumbuh.

Hubungan menjadi semakin lancar, ketika datang Metha Guterres, warga Timtim yang berdomisili di Jakarta dan bekerja di Radio 68H. Setidaknya, Metha mampu menghilangkan keraguan pihak pro-kemerdekaan dan jajarannya akan niat *Kompas* memberi perhatian yang sama kepada kedua kelompok. Dan urusan menjadi semakin mudah ketika Leandro Isaac, Koordinator CNRT untuk wilayah Dili pun mulai memberi kepercayaan yang cukup besar. Kesempatan ini segera saya manfaatkan untuk membuka jalur ke Falintil, sayap bersenjata CNRT.

Jalan Panjang Menuju Falintil

Seluruh upaya itu akhirnya membuahkan hasil. Diawali satu keinginan murni untuk lebih memahami persoalan yang kini justru meretakkan hubungan dua saudara sekandung di Timor Timur (Timtim), selaku wartawan *Kompas*, saya berusaha mencari celah hubungan dengan semua pihak, termasuk Falintil atau Forcas Armadas da Libertacao Nacional de Timor Leste. Mulai April 1998, Falintil secara resmi berada di bawah bendera Conselho Nacional da Resistancia Timorese (CNRT/Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timor Timur).

Medio akhir Juli 1999, mereka meminta saya mengirimkan surat permohonan kepada Falur Rate Laec, Komandan Falintil untuk Region III. Dari Dili, surat disampaikan secara estafet. Sebelum mendapat jawaban dari Falur, muncul berita dari Koordinator CNRT untuk Dili, Leandro Isaac. "Jadi wawancara Matan Ruak, besok saya jemput jam 04.00 pagi," kata Leandro melalui telepon. Itu terjadi Rabu (4/8/99) sore.

Namun, tiba-tiba, malam harinya, sekitar pukul 20.00 waktu setempat, telepon berdering. "*I'm calling from the Head Quarter.*" Begitu suara asing yang muncul dari seberang. Tanpa diduga, suara asing itu milik Komandan Taur Matan Ruak, Wakil Panglima Falintil yang sedang didekati banyak pihak, termasuk wartawan lokal, nasional, maupun luar negeri. Suaranya terdengar renyah dan ramah.

"Saya sudah membaca dan menerima surat permohonanmu, dan saya memutuskan untuk menerima. Jadi, silakan Anda datang ke markas kami. Tapi untuk itu, bisakah Anda terus di rumah besok pagi, sampai sebelum makan siang saja, saya akan menelpon kembali, memastikan cara keberangkatan Anda," kata Taur Matan Ruak dalam Bahasa Inggris.

Tepat pukul 12.00, hari Kamis (5/8/99), telepon kembali berdering. Tanpa bicara panjang, Taur Matan Ruak langsung memastikan waktu keberangkatan dan orang-orang yang harus dihubungi untuk membimbing serta mendampingi kami menuju Markas Besar Falintil di salah satu wilayah, di daerah Viqueque. Dengan tegas ia meminta saya menghubungi David Diaz Ximenes. "*You have to contact him,*" kata Matan Ruak.

Saya segera mengontak David Ximenes melalui telepon. Dan saya pun langsung menyusul ke Audian, ketika dia mengatakan sedang berada di markas CNRT itu. David sendiri tidak banyak memberi instruksi. Ia hanya memberi langkah awal. Yaitu, perjalanan harus dilakukan melalui Baucau. Dan ia pun mengontak Baucau setelah memastikan keberangkatan saya.

Tanpa buang waktu lebih banyak, didampingi Metha Guterres, saya langsung menuju Baucau, Sabtu (7/8/99), setelah sebelumnya meminjam kamera saku milik Odo Manuhutu, tetangga sebelah yang juga staf Satgas P3TT. "Selamat jalan, ya! Hati-hati," kata Odo. "*Thanks*, Do, saya pinjam tiga hari, ya."

Perjalanan Dili-Baucau memerlukan waktu tiga jam jalan darat. Ketika matahari tak lagi memancarkan sinar ganasnya, kami baru mencapai Baucau. Dari Dili, kami berangkat agak siang, karena kesulitan mencari kendaraan sewaan. Langkanya kendaraan sewa di Dili, membuat saya terpaksa minta bantuan Felis da Silva, dari toko buku Gramedia setempat. Beruntung, ia bersedia menyewakan mobil operasional Gramedia itu, meskipun hanya sampai Baucau.

Sesampai di Baucau, kami langsung menuju markas CNRT, menemui Koordinator CNRT Baucau, Marito Reis. Ia baru bebas dari LP Cipinang tahun 1995, setelah ditahan selama 15 tahun. Marito Reis pula yang menunjuk orang-orang yang harus mengantar kami menemui Matan Ruak dan memastikan keberangkatan kami.

Karena sudah mendekati malam, kami tidak bisa langsung berangkat. Mereka meminta kami bermalam di Baucau. Keesokan harinya, pagi-pagi kami sudah berada di markas CNRT, untuk memastikan kelanjutan perjalanan kami. Keberangkatan pun tertunda lagi, karena orang yang mestinya mengantar kami masih berada di Laga, bertemu Komandan Region I Lere Anan Timur.

Minggu sore, baru kami mendapat kepastian. Waktu keberangkatan dipastikan Senin 9 Agustus 1999, pukul 05.00 pagi waktu setempat, dengan pendamping dua orang kepercayaan mereka yang menggunakan nama sandi "Gamla" dan "Kopatin". Namun, lagi-lagi, di Baucau pun ternyata sulit mendapatkan mobil sewaan. Karena itu, pukul 10.00 waktu setempat kami berangkat dengan mikrolet sewaan.

JALAN panjang pun dimulai. Gamla dan Kopatin adalah dua sosok Falintil yang tak banyak bicara, hanya bekerja, namun menyenangkan dan helpful. Harus diakui, perjalanan itu sendiri memang tidak mudah. Setelah meliuk dan merayapi bukit, jalan mulai kehabisan aspal, ketika memasuki wilayah Cai Rui, Kecamatan Laleia, Manatuto. Di tempat ini pula, terdapat satu-satunya check-point Falintil di sepanjang perjalanan itu.

Walau begitu, suasana terasa aman. Saling sapa dan sambutan ramah dari penduduk sekitar hampir tak henti sepanjang perjalanan itu. Mereka tahu persis, hanya ada satu tujuan tempat bagi setiap kendaraan yang melalui wilayah itu. Sebelum benar-benar memasuki

wilayah kantonisasi Falintil, kami melewati sebuah bangunan rumah tua berbendera Merah Putih. Hampir bisa dipastikan, seluruh penghuni bangunan itu terdiri dari pemuda kekar, berambut cepak dan berseragam hijau.

"Permisi, Mas," begitu sapa ramah Gamla, estafet yang memandu kami hingga ke markas Matan Ruak. "Ya, silakan," begitu balas akrab para penghuni rumah tua yang terdiri dari para pemuda gagah perkasa itu ramah. Mereka pun saling melambaikan tangan. Perjalanan menuju markas Falintil, setidaknya harus melewati dua pos dengan pandangan serupa, bendera merah putih dan para penghuni muda yang kekar dan berseragam.

Mobil terus meluncur. Sekitar tiga jam, mobil menelusuri sungai Laleia yang cukup lebar, berpasir, dan berbatu. Kembali merayapi bukit, dan sesaat kemudian menelusuri sungai lagi. Namun, "petualangan" itu belum cukup. Pada titik ini, mobil tak mampu lagi melanjutkan. Kendaraan sewaan itu pun harus berhenti di tengah sungai. Di tempat itu sudah terdapat dua truk. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, juga di sepanjang sungai yang airnya sangat jernih dengan bebatuan putih yang sangat indah.



Perjalanan menuju Markas Falintil di Uai Mori, Viqueque, yang harus dengan menyeberangi dan merayapi sungai dalam arti yang sesungguhnya. Metha Gueterres dibantu beberapa orang terpaksa mendorong mobil agar bisa lolos melewati sungai tersebut.- foto: CM Rien Kuntari

Setelah berjalan kaki sekitar satu jam di sepanjang sungai, sambutan yang begitu ramah dan akrab langsung kami terima, saat bertemu rombongan pasukan di salah satu sudut

sungai. Sebagian dari mereka sedang mengawasi pembukaan jalan menuju markas besar Falintil dengan peralatan berat excavator. Bayangan tentang kelompok Falintil yang ngeri dan menyeramkan segera sirna.

Sebagian lain, dalam seragam lengkap plus senjata laras panjang, siap siaga di sepanjang sungai tersebut. Seragam mereka bermacam-macam, dari yang bertuliskan TNI-AD, AL, hingga seragam Resimen Mahasiswa dan Hansip. Bahkan tak jarang yang nama aslinya pun masih tertempel. Baretnya pun warna-warni. Karena itu, jangan heran bila bertemu seseorang bernama Wisnu, misalnya, namun berpenampilan "serem", rambut panjang ikal, lengkap dengan kumis dan tidak bisa berbahasa Indonesia.

Di antara mereka, ada seseorang yang disebut-sebut sebagai Sespri Wakil Panglima/Kepala Staf Falintil Taur Matan Ruak. Ia tampak terus berkomunikasi dari pinggir sungai menggunakan telepon satelit, sambil makan siang. Meski tak menyebutkan nama, namun ia sangat ramah. Komunikasi dengan kami pun terputus, karena ia tidak bisa berbahasa Indonesia atau Inggris, melainkan hanya bahasa Tetun. Namun jelas ia menerima kehadiran kami di sana dengan sangat ramah.

Dan alangkah terkejut ketika saya menemukan seorang frater yang sedang menjalankan tugas orientasinya di sana. Karena frater yang berasal dari Los Palos inilah komunikasi kami tersambung. "Jadi, kami kerja di mana saja, tetapi komunikasi tidak terputus," kata salah satu dari mereka, setelah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, di antara mereka, terdapat juga teknisi Falintil di bidang komunikasi yang secara khusus disekolahkan di Jepang.

Seluruh kesibukan mereka itu dilakukan untuk menyambut ulang tahun Falintil ke-24 tanggal 20 Agustus 1999. Rencananya, upacara ini akan dirayakan secara besar-besaran. Dengan cara itu, semua kendaraan yang menghadiri upacara tersebut bisa langsung mencapai markas, tanpa harus berjalan kaki lebih jauh berjam-jam.

Di tempat itu, kami berhenti sesaat untuk makan siang. Dan betapa saya heran, di pinggir sungai di tengah hutan itu, kami tidak disugahi dengan makanan seadanya, melainkan makanan yang cukup mewah. Sepiring nasi dan daging rebus. Boleh percaya boleh tidak, ini adalah daging rebus paling nikmat yang pernah dirasakan.

Setelah beristirahat sejenak dan menghabiskan waktu dengan penuh canda, perjalanan dilanjutkan. "Jaga dia baik-baik," pesan Komandan setempat kepada Gamla dan Kopatin. Kedua orang ini berjalan seolah tanpa rintangan. Padahal, waktu tu, kami sedang berusaha keras menyeberang sungai yang agak dalam dan penuh batu licin. "Hampir setiap hari saya

ke sini," kata Gamla. Kopatin lalu bercerita, sebelum menjadi aktivis Falintil, ia adalah seorang guru. Seperti cerita pada umumnya, beberapa waktu sebelumnya ia dikejar-kejar hingga lari ke hutan dan menjadi seperti sekarang.

Perjalanan kaki lanjutan ini masih memerlukan waktu sekitar 1,5 hingga dua jam. Kembali kami menelusuri sungai dan mendaki bukit. Setelah berjalan beberapa saat, matahari telah condong ke barat. Ia menyorotkan sinar jingga yang begitu indah saat kami menembus padang ilalang di lereng bukit yang begitu menawan. Sangat indah. Di tepian bukit di batas padang ilalang itu, tergambar pepohonan dengan dedaunan berwarna-warni pantulan sinar mentari yang sedang menyongsong datangnya senja. Sungguh, sebuah siluet yang begitu indah dan menawan.

LANGIT telah sepenuhnya berwarna jingga, ketika kami mencapai markas Falintil di hutan Uai Mori, Viqueque, setelah berjalan kaki hampir empat jam. Kembali suasana akrab dan penuh persaudaraan terasa. Kami diterima di Region II. Markas komandan setempat, sebuah gubuk bambu berdinding dan beratap daun lontar.

Sore yang segera berubah menjadi malam itu ditutup dengan makan bersama dan ngobrol beberapa saat. Menu yang dihidangkan berupa nasi, sayur kol, sawi putih dan sardin, serta air putih setengah gelas. Nikmat sekali. "Kediaman" Pak Komandan itu menggunakan penerangan lampu neon.

Seluruh hidangan itu disajikan kelompok Falintil putri yang datang dengan suka rela untuk mengikuti perjuangan Falintil. "Kak, saya merasa lebih aman di sini," kata Detty, wanita hitam manis dari Ossu, Viqueque. Malam itu, saya lewatkan dengan bergabung bersama kelompok Detty. Dari Detty pula berbagai cerita pun muncul.

Di mata saya, Detty, yang bernama sandi Bi-Malik itu, seorang pro-kemerdekaan murni. Ketika kecil, ia harus berhadapan dengan kondisi setengah hidup, setengah mati. Si balita Detty, harus memperjuangkan hidup dalam jajahan Portugal. Saat ia mulai paham bahasa dan mulai bisa sedikit "mengerti" persoalan, tahun 1975, ia kembali dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan bagi seorang anak yang baru mulai menginjak remaja.

Perang tak bisa dihindari ketika tentara Indonesia pada akhirnya menyerbu Timtim. Jiwanya yang masih kanak-kanak waktu itu belum cukup untuk memahami persoalan yang sebenarnya. Yang ia tahu, banyak saudaranya yang lalu dibunuh oleh tentara dalam pertempuran tahun 1975 itu. Belum sempat ia membersihkan pikiran itu, tiba-tiba Timtim

terkena imbas reformasi. Arah politik pun berganti. Kembali ia berhadapan dengan kenyataan, dikejar-kejar tentara, yang ia kenal hanya dari seragamnya.

Itu cerita tentang Detty. Di tempat itu, muncul juga cerita tentang Maria, salah satu Komandan Perempuan Falintil yang cukup tangguh. Maria akhirnya memutuskan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk perjuangan kemerdekaan Timtim, setelah mengalami kejadian yang sangat memilukan.

Sebelum bergabung dengan Falintil, ia adalah seorang perempuan biasa. Menjalani hidup seperti umumnya wanita Indonesia. Namun, ia mempunyai kelebihan dalam kecerdasan. Di masa SMA, perempuan bertubuh kekar ini mendapat kehormatan sebagai salah satu pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka, Jakarta. Sayang, usai melaksanakan tugas, saat kembali ke Timtim, ia mendapati kedua orangtuanya telah tewas terbunuh.

Kondisi seperti itu pula yang membuat Bileza, seorang ibu, memilih tetap tinggal di markas seadanya itu bersama Azildo, anaknya yang baru berumur tujuh bulan. Ayah si bayi, Linicai, pejuang Timtim sejak tahun 1975. Azildo lahir di Culuzaka, Viqueque, saat markas Falintil masih berpindah-pindah.

"Kami merasa lebih aman di sini," katanya. Untuk merawat bayinya, Bileza yang hanya tahu bahasa Tetum itu, terpaksa memberi makan seadanya. "Kalau kebetulan kami mendapat kiriman bantuan dari luar. Tapi kalau tidak ada ya, dia minum air biasa," jelasnya. Dan, mungkin ini salah satu bentuk keadilan Tuhan, Azildo tumbuh dengan sehat.

ALANGKAH mengherankan. Dalam obrolan yang muncul, mereka sama sekali tidak ketinggalan informasi, terutama tentang perkembangan proses jajak pendapat. Misalnya, mereka pula yang menginformasikan bahwa pelaksanaan periode kampanye diundur, dari tanggal 11 menjadi tanggal 14 Agustus. "Sudah ada keputusan masa kampanye diundur, kami baru saja menonton RTP (Radio Televisao Portugal)," kata Pak Komandan itu.

Berbeda dengan yang lain, markas Falintil ini tak sepenuhnya gelap. Untuk penerangan, mereka menggunakan generator. Tempat itu juga dilengkapi dengan dua parabola cukup besar. Karena itu, di siang hari mereka pun tak ketinggalan dengan acara goyang India yang banyak ditayangkan di televisi Indonesia. Selain dari televisi, mereka pun mengikuti berita dan mendapatkan segala informasi dari internet.

Hal itu diperjelas dengan pengakuan Wakil Panglima/Kepala Staf Falintil Taur Matan Ruak. Untuk urusan komunikasi, mereka membeli tujuh telepon satelit dari Australia dan

Jepang. Tak hanya itu, mereka pun dilengkapi dengan mobile radio station yang menggunakan jalur FM.



*Memasang parabola di markas Falintil
foto: Eddy Hasby*

Gaya militer diakui tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Hanya bedanya, mereka terkesan lebih santai, walau tetap menerapkan disiplin tinggi. Di awal pagi, pekerjaan sudah terbagi. Dari membersihkan tempat, menyiram tanah, berpakaian rapi, hingga sarapan pagi. Semua harus siap sebelum pukul 07.00 pagi waktu setempat.

Pukul 08.00, mereka mengawali hari dengan upacara pengibaran bendera Falintil, yang dihadiri seluruh pasukan, lengkap dengan drum band Falintil. Tak seperti di jajaran militer lain, drum band Falintil adalah kelompok seadanya dengan peralatan yang juga seadanya. Tak jarang suara gendang terasa sumbang akibat terkena air hujan. Sore hari, ditutup dengan upacara penurunan bendera Falintil.

Di region II dan III itu terdapat sekitar 500-600 pasukan. Pasukan mereka bermacam-macam. Umumnya para pemuda berumur sekitar 20 tahun-an, tetapi ada pula pasukan senior. Walau begitu, hanya beberapa di antara mereka yang benar-benar bergabung dengan Falintil dari tahun 1975.

Banyak di antara mereka yang baru bergabung sebulan, dua bulan hingga sembilan bulan lalu. Latar belakang mereka pun bermacam-macam. Ada petani, pekerja biasa, mantan pegawai negeri, guru, hingga mantan Danramil (Komandan Rayon Militer), Wadanramil (Wakil Komandan Rayon Militer), Babinsa (Bintara Pembinaan Desa), dan Kopasgat (Komando Pasukan Gerak Cepat).

Di saat pikiran masih melayang-layang tak percaya, tiba-tiba muncul seorang tentara bule. Ia terlihat begitu akrab dengan seluruh pasukan. Belakangan baru diketahui, bule berjambang dan jenggot panjang bak seorang Syeh dari Timur Tengah itu biasa disebut "Anthony". Di tempat itu, ia dinyatakan sebagai desertir tentara Australia.

Seluruh kekuatan Falintil disebar dalam empat region. Region I dengan Komandan Lere Anan Timur, merupakan kekuatan di sektor timur, bermarkas di Los Palos. Region II, dengan Komandan Sabika dan Region III yang berkomandan Falur Rate Laec. Keduanya berlokasi di Uai Mori, serta Region IV dengan Komandan Ular Ryhyk untuk wilayah Ermera.

Sebelum tercetus kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Portugal di bawah naungan Sekjen PBB di New York tanggal 5 Mei 1999 lalu, tentang pelaksanaan jajak pendapat di Timtim, kehidupan pasukan Falintil tidak terkonsentrasi. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun sejak muncul kesepakatan itu, tepatnya tanggal 15 Juli 1999, mereka menetap di areal cukup luas, sekitar lima hektar dengan lapangan sepak bola dan lapangan voli di kawasan Uai Mori, Viqueque.

Di situ pula untuk pertama kalinya setelah 24 tahun, mereka mendirikan barak-barak bambu seadanya. Mereka pun melengkapi dengan sebuah kapel yang juga terbuat dari bambu. Karena itu, kamp Falintil sekarang ini tidak lagi selayaknya barak militer yang penuh rahasia, tetapi lebih mirip sebuah kampung. Hanya, kampung sederhana ini memiliki senjata dan alat komunikasi canggih serta lengkap.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah pelaksanaan jajak pendapat, markas Falintil, khususnya untuk Region II dan III dipindah ke wilayah Remixio. Namun, baru sekitar akhir Oktober 1999, mereka pindah ke arena yang lebih luas di Aileu.

Usai makan pagi, Selasa (10 Agustus 1999), Gamla menginformasikan, Wakil Panglima Matan Ruak meminta kami datang pukul 10.00 waktu setempat ke markasnya.

"*Are you Commander Matan Ruak?*" tanya saya tidak percaya.

"*Yes. I am.*"

Alangkah berbedanya. Selama ini gambaran tentang Matan Ruak bukanlah seperti lelaki di depan saya ini. Matan Ruak adalah lelaki berambut dan berjenggot panjang bergelombang, dekil, dan "serem". Namun, yang saya temui adalah seorang lelaki berkulit sawo matang, berwajah bersih, tanpa kumis dan jenggot, serta ramah, meski tetap berambut panjang dan bergelombang. Sama sekali tanpa kesan "serem".

Taur Matan Ruak, Wakil Panglima/Kepala Staf Falintil

TAUR Matan Ruak. Bila diterjemahkan secara bebas, nama itu bisa diartikan sebagai Taur "Si Mata Bengis". Namun, kenyataannya, Wakil Panglima Falintil, Angkatan Bersenjata Conselho Nacional Resistancia de Timorence (CNRT/Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timtim) itu, justru menyiratkan sinar keteduhan dan keramahan yang tulus.

Tak heran, bila akhir-akhir ini, kamp perjuangan Falintil menjadi tujuan bagi sebagian rakyat Timtim yang ingin mencari perlindungan dan kedamaian. Meski mereka berada di hutan dan tinggal di barak bambu, berdinding dan beratap daun lontar, sekadar tempat untuk berteduh.

"Di sini saya merasa aman dan tidak dikejar-kejar," kata Detty yang selepas SMA, memilih meninggalkan desanya, Ossu, Viqueque dan tinggal di kamp perjuangan Falintil. Mungkin semua itu karena motto Falintil, *Patria Povo Orda* yang berarti Patriot Pembela Bangsa.

Taur Matan Ruak, pemuda desa Baquia, wilayah Baucau itu bergabung dengan Falintil sejak umur 20 tahun. Meski hanya sempat mengenyam pendidikan hingga kelas IV SD, namun karena jiwa kepemimpinannya yang tinggi membuat Matan Ruak, diangkat sebagai Wakil Kepala Staf Falintil tahun 1984, disusul menjadi Kepala Staf (1993). Tahun 1997, Dewan Politik Militer (CPM/Conselho Politica Militar) Falintil mengangkatnya sebagai Wakil Panglima Falintil merangkap Kepala Staf. Setelah Timtim merdeka, Matan Ruak menggantikan Xanana Gusmão sebagai Panglima Falintil. Xanana mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Presiden.

Berikut disampaikan petikan wawancara yang dilakukan di Markas Besar Falintil, Uai Mori, Viqueque, Selasa (10/8/99) pagi, dalam suasana santai, ceria, serta penuh persahabatan. Meski fasih berbahasa Inggris, namun wawancara dilakukan dalam bahasa Tetun yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh tangan kanan Matan Ruak yang sebelumnya bergabung dalam keanggotaan Kopasgat.

Bagaimana persiapan Falintil menghadapi jajak pendapat?

E..., persiapan untuk jajak pendapat itu sebenarnya oleh UNAMET, pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal. Kami hanya memberikan kontribusi dengan mendirikan kamp-kamp seperti ini.

Maksudnya, kantonisasi?

Ya. Tapi, sebenarnya kantonisasi itu tidak perlu dilakukan, karena alternatifnya hanya satu, pasukan militer Indonesia harus ditarik keluar dari Timor Timur. Kalau tidak, perang akan terus berlanjut. Kita tidak akan meletakkan senjata, selama militer masih ada.

Bukankah pemerintah sudah menarik mereka dan diganti dengan polisi?

Saya Jenderal Falintil, saya lebih tahu. Saya lebih kenal mereka dari pada Anda. Ha..ha..

Kalau begitu, menurut Anda, masih berapa persen TNI di Timor Timur?

Tanyakan saja kepada Pangdam IX Udayana Mayjen Adam Damiri dan Danrem (Komandan Resor Militer) Tono Suratman, berapa tentara yang masih ada di Timtim.

Siapa sebenarnya yang dilawan Falintil?

Kami tidak berperang melawan rakyat Timtim. Kami hanya berperang melawan militer. Sampai saat ini belum satu butir peluru pun dari milisia yang ditembakkan ke Falintil. Mereka hanya membunuh masyarakat yang ada di kota. Sampai saat ini belum pernah sama sekali.

Tetapi yang terdengar, Falintil sering membuat keributan

Memang. Tetapi, setelah perang usai, kami siap membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kami dan Indonesia. Kami juga bersedia kalau Mahkamah Internasional memeriksa kami. Kalau saya mengatakan bahwa Falintil tidak pernah berbuat salah, berarti saya berbohong.

Sudah ada tanda-tanda ke arah sana?

Ramos Horta sudah mengajukan tuntutan atas para jenderal Indonesia. Tentara Indonesia juga mempunyai kesempatan untuk mengajukan tuntutan kepada Falintil ke Mahkamah Internasional, dan kami pasti menanggapi. Saya mengenal Indonesia, lebih-lebih militernya. Saya mulai berperang umur 20 tahun. Sekarang saya kira-kira sudah berumur 40 tahun. Saya bertemu dengan banyak tentara Indonesia. Tahun 1983, selama tiga bulan di Dili, dalam kontak damai, saya bertemu Zacky Anwar, William da Costa, dan dalam periode lain. Saya mengenal mereka dengan tiga kategori, yaitu pembunuh, pencuri, dan pembohong.

Maksudnya?

Anda bisa langsung bertanya kepada masyarakat tentang perlakuan militer Indonesia dengan tiga kategori itu. Kalau saya ceritakan akan terlalu lama. Mengapa mereka bohong, dan mengapa mereka membunuh, dan mengapa mereka mencuri, tanyakan itu kepada masyarakat Timtim. Saya minta maaf, saya hanya bisa bicara seperti ini, karena kalau saya ceritakan semuanya akan memakan waktu terlalu lama. Kalau ingin tahu sejarah militer, datanglah ke seluruh tempat di Timtim, masyarakat akan menceritakan yang sebenarnya.

Andai pro-kemerdekaan menang, bagaimana sikap dan program Falintil?

Kalau program untuk membentuk pemerintah sendiri, itu hak pemerintahan yang baru terbentuk. Saya tidak berkompeten untuk membuat program soal pemerintahan. Pemerintahan transisilah yang akan membicarakan dan menetapkan bentuk pemerintahan Timtim seperti apa nantinya.

Apakah Falintil lalu akan turun dan menjadi rakyat biasa?

Kalau nanti pemerintahan Timtim terbentuk, kami siap meletakkan senjata dan turun ke kota, untuk bergabung dengan masyarakat dan menjadi petani, menggarap sawah dan kebun. (sambil ketawa) Kami tidak ingin mempertahankan militer di Timtim, kami ingin demiliterisasi. Kami ini menjadi militer karena Indonesia. Kami akan mempertahankan sebuah negara tanpa militer. Tetapi, demiliterisasi hanya akan terjadi kalau perang ini selesai, dan kita akan membangun satu negara yang hanya mempunyai polisi.

Bagaimana hubungan Timtim dengan RI, nantinya?

Kami mempertahankan sebuah negara yang demokratis. Dan, demokrasi yang sekarang bergulir di Indonesia itu, secara tidak langsung, karena kami yang mengajarkan. Karena mereka dulu itu menganut sistem atau di bawah rezim diktator. Adik saya dua orang menikah dengan orang Indonesia dari Manado. Jadi saya punya saudara orang Indonesia. (ha..ha..ha.) Jadi antara rakyat Indonesia dengan rakyat Timtim itu sama sekali tidak ada masalah. Saya juga sedang memikirkan kemungkinan menikah dengan orang Indonesia. Mereka lebih halus dan lembut.

Bagian mana dari Indonesia yang Anda inginkan?

Dari Jawa barangkali. (ha..ha..ha..)

Sekarang kalau otonomi yang menang, apa yang akan dilakukan Falintil?

Kalau misalnya masyarakat Timtim memang memilih otonomi secara demokratis, kami akan turun, meletakkan senjata dan menjadi rakyat biasa. Tetapi, saya tidak percaya, masyarakat Timtim akan memilih otonomi. (ha..ha..ha..)

Mengapa Anda begitu yakin?

Selama 24 tahun ini saya mengenal betul rakyat Timtim. Masyarakat Timtim menginginkan kemerdekaan, mereka tidak ingin integrasi. Kalau masyarakat Timtim menerima otonomi atau integrasi, kami tidak akan hidup sampai hari ini, karena persediaan logistik yang ada pada kami itu justru dari masyarakat kota.

(Terdengar ayam berkokok). Tapi saya pernah melihat adanya kuitansi iuran yang ditandatangani Komandan Falur Rate Laec, yang konon dilakukan dengan paksaan?

Tanyakan saja langsung kepada rakyat, apakah Falintil memaksa atau tidak.

Mengapa Falintil tidak mendaftar untuk jajak pendapat?

Kami semua tidak ada yang mendaftarkan diri. Saya juga tidak ikut. Semua region tidak ada yang ikut mendaftar. Karena yang mendaftar itu sudah terlalu banyak, dan kami yakin sudah menang. Kenapa kami harus turun dan mendaftar. (Ha..ha..ha..) Kami tidak perlu lagi mendaftar.

Berarti Anda tidak menggunakan hak?

Hak kita itu, kalau misalnya masyarakat sudah memilih, ya sudah. Itu sama-sama hak kita. Kalau kita mendaftar, dan kalau misalnya tidak memilih integrasi, ya berarti kita kalah *kan*. Jadi sama saja, kenapa kita harus turun lagi untuk mendaftar. (ha..ha..ha) Tapi, kami tidak mau mendaftar karena takut milisi mengatakan kami yang memaksa masyarakat untuk menolak otonomi. Sehingga, lebih baik kalau masyarakat yang memilih. Saya memberikan perintah kepada semua Falintil, tidak usah ikut mendaftar.

Dikatakan kalau otonomi kalah, mereka siap perang. Bagaimana komentar Anda?

Kami tidak mau perang. Tapi mereka harus berpikir bahwa selama 23 tahun, kami di sini, kami tidak melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Jadi kalau milisi ingin berperang, maka mereka harus berpikir lebih dewasa lagi tentang keuntungan dari perang itu.

Berarti Falintil tidak akan merespon?

Kalau mereka mau berperang, kami akan meminta PBB menghadapi mereka. Kami akan naik di atas gunung dan cukup menyaksikan saja. Karena proses sekarang sudah di bawah kendali PBB.

Apakah Falintil akan mengusir milisi?

Dua orang Danramil yang sekarang masih ada di sini itu dulu banyak membunuh keluarga Falintil. Tapi ketika mereka datang, kami menerima dengan baik.

Berapa kekuatan Falintil sekarang, kalau keberatan ya off the record?

Tidak ada rahasia bagi kami, tapi yang pasti kekuatannya lebih dari 50 orang seperti yang diperkirakan TNI. Di sini saja ada sekitar 500-600 personil, di region II dan III. Kalau mau tahu semuanya, Anda bisa keliling ke region lain dan melihat sendiri. (Falintil mempunyai empat region-Red)

Seberapa kekuatan senjata Falintil?

Soal jumlah senjata, tentara Indonesia pasti tahu. Berapa pucuk senjata mereka yang hilang, pasti ada di sini (ha..ha..ha..)

Kalau ada TNI yang tertangkap, lalu mereka diapakan?

Ada juga yang terbunuh dan kita ambil senjatanya, ada yang kami tangkap, kita ambil senjatanya dan kita lepaskan lagi. Dulu ada dua orang dari Marinir VIII yang tinggal bersama kami, satu namanya Eddy dari Surabaya, dan satu dari Ambon, namanya Pardaus. Mereka berdua tinggal bersama saya tahun 1979 dan baru saya suruh mereka pergi menyerahkan diri. Mereka sampai sekarang masih hidup dan mereka terus mengirim salam kepada saya.

Saya dengar ada anggota Kopassus di sini?

Tidak ada Kopassus, tetapi di sini ada dua sersan. Mereka, Danramil Manatuto, satu sersan dari Viqueque dan satu lagi Wakil Danramil dari Alas, mereka bertiga masih ada di sini. Kalau yang dari Viqueque dan Manatuto, mereka lari dan menyerahkan diri kepada Falintil karena diancam oleh TNI.

Lalu, kalau Sudirman itu siapa?

Itu seorang pemuda dari Timtim. Itu nama sandinya.

Dengan konsentrasi tempat seperti ini tidak berbahaya?

TNI diberi wewenang oleh PBB untuk menjaga perdamaian. Kalau mereka sampai menyerang kami di sini, bagaimana tanggung jawab mereka?

Sepertinya, Anda mempunyai sistem komunikasi yang cukup lancar

Ya, kami punya tujuh telepon satelit, dan kami juga selalu mendapat berita atau berkomunikasi lewat internet.

Dari mana telepon satelitnya?

Kami beli dari Jepang dan Australia. Sekarang Indonesia sudah mulai menjual tahun ini, tapi kami sudah mempunyai satelit tahun lalu.

Anda sangat kaya, ya. Dari mana dananya?

Ha..ha..ha..

Hubungan dengan Presiden Xanana?

Kami kontak setiap hari melalui telepon. Kami menunggu komando dari Xanana. Kami menyayangkan belum dibebaskannya Xanana. Dan kami juga menunggu keputusan Indonesia untuk membebaskan Xanana.

Apakah Anda juga mengikuti perkembangan TNI dari Internet?

Tidak terlalu penting bagi saya untuk mengikuti perkembangan TNI. Yang penting untuk kita ikuti adalah proses Timtim ke depan.

Termasuk operasi TNI?

Kalau soal operasi TNI, itu memang terus kami ikuti. Mereka di mana saja beroperasi, kami sudah tahu.

Kekerasan di dalam kota, selalu dikatakan Falintil yang mendalangi...

Saya tidak akan berkomentar tentang ini, karena nanti dikatakan saya menuduh. Maka Anda tanyakan langsung kepada masyarakat dan mereka akan menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah. Karena kalau saya bicara, nanti dikira membela diri.

Kalan selesai, mau kembali ke Baucau?

Saya akan "melayang-layang" di udara dulu.

Di seluruh Timtim?

Ya, ha..ha..ha..



Wakil Panglima Falintil Taur Matan Ruak (kiri) dan Metha Gueterres (kanan) di Markas Falintil Uai Mori, Viqueque. - foto: CM Rien Kuntari

USAI wawancara resmi, Matan Ruak yang ramah itu masih mengajak “ngobrol” cukup panjang. Ia bercerita banyak hal tentang Timor Timur. Termasuk “kedekatannya” dengan beberapa tokoh kunci pihak pro-otonomi. Karena itu, Matan Ruak meyakinkan kami bahwa permusuhan atau kekerasan ini tidak pernah dilakukan oleh sesama warga Timtim, baik pro-otonomi atau pro-kemerdekaan.

Untuk itu, ia menunjukkan selebar surat jaminan dari tokoh kunci pro-otonomi. Melalui surat itu, ia menegaskan jaminannya bahwa tidak ada satu pun anak buahnya yang pernah mengeluarkan satu butir peluru ke pihak pro-kemerdekaan. Selain itu, surat tersebut juga sekaligus berisi ungkapan yang bernada meminta perlindungan.

“Jadi, kami sesama warga Timtim sebenarnya tidak pernah terlibat kerusuhan. Kami saling melindungi. Karena itu kalau ada seorang pengikut pro-otonomi tertembak, saya berani menjamin itu bukan dari peluru kami, begitu juga sebaliknya,” kata Matan Ruak ringan sambil tertawa. “Kami hanya ‘berperang’ melawan militer,” lanjutnya.



*Makan Malam di Markas Falintil, Uai Mori, Viqueque, Agustus 1999.
foto: CM Rien Kuntari*

Saya semakin tertegun ketika pembicaraan sampai pada aspirasi pribadi Matan Ruak yang sesungguhnya. Baginya, yang terpenting adalah hidup di alam damai. Tanpa permusuhan, tanpa kecurigaan, dan tanpa ancaman. “Saya hanya ingin hidup merdeka. Bebas bercocok tanam, bebas mencari kehidupan dengan aman tanpa ada ancaman,” ujarnya.

“Jadi, Anda hanya ingin hidup merdeka? Bukan negara merdeka?”

“Yah..., yang penting saya bisa hidup di tanah merdeka yang damai,... bebas intimidasi dan ancaman.”

Hampir tak berkedip saya mendengar kalimat itu. Tentu saja konsep “hidup merdeka” sangat berbeda dengan “negara merdeka”. Sambil lekat-lekat menatap Matan Ruak, saya

berpikir keras mencoba memahami pemikirannya. Jadi, kemerdekaan baginya adalah keamanan, kebebasan, dan kedamaian... Hidup di sebuah negara damai. Mencari nafkah dengan damai dan tenang. Bisa bercocok tanam dengan tenang. Tak ada intimidasi. Tak ada teror. Tak ada ancaman penculikan.. Dan, aspirasi itu sebenarnya yang juga diinginkan para pengikutnya.

Di tengah kesunyian malam, tak sepingin pun mata ini terpejam. Ketika Detty dan seluruh rekan yang berada di samping kiri saya, telah terpejam dalam lelapnya malam, pikiran saya justru melayang nan jauh. Kepada sinar rembulan yang tersembul di balik atap daun kelapa kering itu saya bertanya,.. apa yang terjadi selama 24 tahun ini?

Tentang CNRT

KELOMPOK pro-kemerdekaan rata-rata bernaung di bawah Conselho Nacional da Resistencia Timorese (Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timor Timur) atau CNRT. CNRT dideklarasikan melalui konvensi Peniche di Lisabon, Portugal, tanggal 23-27 April tahun 1998.

Dalam konvensi itu dipilih Xanana Gusmão sebagai Presiden CNRT, Dr Jose Ramos Horta sebagai Wakil Presiden CNRT di luar negeri dan salah seorang lagi yang sampai saat ini belum juga diumumkan namanya yang berdomisili di Timtim, juga sebagai Wakil Presiden CNRT.

Ketika CNRT resmi dideklarasikan, banyak pihak yang menaruh harapan bahwa CNRT akan menjadi payung dari semua organisasi di Timtim, bukan hanya organisasi perlawanan, tetapi juga menjadi wadah untuk menampung kepentingan politik dari pro-integrasi. Di dalam CNRT bergabung seluruh tokoh-tokoh politik dari lima partai.

Dalam konvensi yang melahirkan CNRT itu disepakati agar organisasi kepemudaan dan organisasi wanita yang ada di Timtim dan luar Timtim diwajibkan menjadi anggota CNRT. Dan semua organisasi itu justru didomisili oleh kelompok pro-kemerdekaan, seperti, Objetil Pimpinan Jose da Costa alias Mauhudu, Objelatil dipimpin Mauhunu, Fitun (Bintang) dipimpin Armando da Silva, Sagrada Famila dipimpin Andre Eli Quatro, Renetil pimpinan Fernando Araujo, dan Impettu pimpinan Mariano Sabino Lopez.

Sedangkan Dewan Solidaritas Mahasiswa Pelajar dan Pemuda Timor Timur (DSMPPTT), merupakan wadah dari perkumpulan kaum intelektual muda Timtim. DSMPPTT ini merupakan suatu gerakan moral force yang meletakkan dasar-dasar

perdamaian dan rekonsiliasi menjadi isu sentral gerakannya. DSMPPTT dipimpin Antero Bendito da Silva, dibentuk akhir Mei 1998 setelah rezim Orde Baru di Jakarta tumbang.

Konvensi menjadi dasar tertinggi, lalu CNRT, kemudian badan-badan atau komisi lain seperti, Comissao Politica Nacional (CPN/Komisi Politik Nasional), Comissao Executive (Komisi Eksekutif), serta Falintil atau Forcas Armadas da Libertacao de Timor Leste (Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat Timtim).

Selain itu, dalam struktur CNRT juga terdapat beberapa departemen yaitu, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Ekonomi, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Informasi. Sedangkan Departemen Pemuda sudah berada dalam Organisaao Nacional Juventude Timorenses atau Organisasi Nasional Pemuda Timor.

Di luar CNRT, masih ada kelompok aktivis pro-kemerdekaan yang merupakan sempalan. Misalnya, Republica Democratica Timor Leste (RDTL) dan Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Timur (DSMTT) yang keduanya beraliran garis keras.

Antara Timor Timur dan Timor Leste

SIANG itu, bersama Metha Guterres, kami sengaja menghabiskan waktu makan siang di rumah makan padang Puti Bungsu, Dili. Restoran ini mempunyai menu ayam pop yang sangat lezat. Hari belum terlalu melelahkan, kecuali panas yang sangat terik.

"Halo *Kompas*, apa kabar?"

"Baik, wah rupanya penggemar ayam pop juga."

Siang itu ada beberapa pegawai Pemda yang juga sedang menghabiskan waktu di tempat itu. Karena mereka sudah lebih lama, beberapa saat kemudian mereka berpamitan.

"Ini yang dari *Kompas*." Seorang wanita yang juga berseragam Pemda menegur.

"Iya, betul. Apa kabar?" kata saya basa-basi tanpa tahu siapa sebenarnya ibu yang satu ini. Anahnya, ia tak banyak bicara, namun terus tersenyum ramah. Dan, setelah pergi, baru saya terbelalak, ketika tahu, si ibu yang pegawai Pemda itu adalah kakak kandung salah satu aktivis kemerdekaan yang membantu saya bertemu Taur Matan Ruak.

Setelah pertemuan itu dan saya benar-benar berusaha memasuki "sarang bawah tanah" pro-kemerdekaan, ternyata di tempat itu tersimpan cukup banyak seragam Pemda. Dan kelompok ini bisa dikatakan menjadi salah satu kekuatan pro-kemerdekaan dalam bentuk lain.

Banyak pegawai Pemda dari segala jajaran yang pada pagi hingga sore hari, adalah pegawai pemerintahan yang patuh dan disiplin. Tak jarang mereka pun aktif mempersiapkan perolehan untuk kemenangan otonomi. Bahkan hingga berkampanye. Namun, jauh, dan sangat jauh di lubuk hatinya yang terdalam di sana, hanya tersimpan satu kata, "Merdeka!"

Di mata saya, mereka adalah kekuatan dan tulang punggung pihak pro-kemerdekaan. Di pundak merekalah awal dan akhir permainan ini bergantung. Mereka pula yang menyusun seluruh laporan baik berupa angka maupun data pihak pro-otonomi untuk disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Repotnya, angka dan data inilah yang kemudian dijadikan pijakan dan rujukan strategi kemenangan pro-otonomi.

Sulit untuk mengatakan bahwa data itu tidak benar, tetapi sukar pula mengakui bahwa data itu akurat dan sesuai realita. Sistem yang berlaku waktu itu, menjebak mereka pada kondisi untuk membuat laporan yang "asal" menyenangkan pihak atasan. Dalam arti, mereka dituntut menyampaikan laporan yang bernuansa memenangkan kelompok pro-otonomi.

Karena, membuat laporan yang sesuai dengan realita dan kondisi riil di lapangan, kadang justru berbuntut cukup panjang. Misalnya, tuduhan mendukung pro-kemerdekaan. Karena itu, jangan berharap bahwa angka dan data yang waktu itu tersimpan adalah faktual. Dengan pemahaman itu, jauh sebelum jajak pendapat benar-benar dilaksanakan, kepada kantor *Kompas* di Jakarta, saya sudah melaporkan prediksi bahwa pro-otonomi akan kalah sekitar 70 persen.

Harus diakui, kekuatan pro-kemerdekaan yang tersimpan di balik seragam Pemda ini menjadi faktor yang sulit diperhitungkan. Pada akhirnya, faktor itu terkesan kurang diperhitungkan oleh kubu otonomi. Namun, hal itu bisa dimengerti, tanpa pernah memasuki kubu kemerdekaan hingga ke relungnya, kekuatan itu sama sekali tidak tampak di permukaan.

Karena itu bila dilihat selintas, tak banyak perbedaan antara Timor Timur dan Timor Leste. Timor Timur berarti Timor Leste, sebaliknya pun Timor Leste berarti Timor Timur (Tintim). Namun, dalam nuansa politis dan mengingat kondisi Tintim sekarang ini, kedua kata menyiratkan arti yang berbeda. Timor Timur lebih bernuansa keindonesiaan. Sedang Timor Leste, pasti lebih menyiratkan identitas Timor.

Lebih-lebih setelah Indonesia mengeluarkan opsi dua. Yaitu, memberikan status Timtim daerah otonomi khusus dengan kewenangan yang diperluas atau menolak otonomi yang berarti status Timtim kembali ke PBB, yang kemudian akan menjadi transisi bentuk pemerintahan baru Timtim nantinya. Seolah, istilah itu pun telah mewakili aspirasi masyarakat Timtim yang kini secara otomatis terbagi dalam dua kelompok. Pro-otonomi dan pro-kemerdekaan.

Kelompok pro-otonomi identik dengan kelompok yang menerima atau dalam bahasa Tetum diistilahkan simu otonomi. Dengan kata lain, kelompok yang akan mempertahankan kesetiiaannya kepada Indonesia. Karena pilihan otonomi membawa konsekuensi Timtim tetap menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedang kelompok pro-kemerdekaan didekatkan pada kelompok yang menolak atau la simu otonomi. Yaitu, kelompok yang ingin melepaskan ikatannya dengan negara kesatuan RI dan mengharapkan suatu saat terjadi kemerdekaan di tanah Timor Timur atau Timor Leste.

Tarik-ulur Timtim seolah tak henti. Indonesia tetap bersikeras menganggap persoalan Timtim selesai, sementara PBB pun ngotot mengatakan, Timtim sebagai wilayah yang belum berpemerintahan sendiri atau *non-self governing teritorry* dan belum melaksanakan hak menentukan nasib sendiri atau *self-determination*.

Upaya para pejuang yang melahirkan Deklarasi Balibo tidak diakui. Entah apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, namun Xanana Gusmão dalam pidato rekaman yang diperdengarkan saat pengibaran bendera CNRT atau Conselho Nacional da Resistencia Timorese (Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timtim), Minggu (15/8/99) di Markas CNRT Lecidere, Dili timur, menekankan, pendeklarasian itu tidak melibatkan seluruh rakyat Timtim. Ia menilai Deklarasi itu belum mewakili rakyat Timtim seluruhnya.

Persoalan pun terus bergulir. Timtim yang dirasa sudah berintegrasi ke Indonesia sejak tahun 1975 itu tiba-tiba mengemuka. Persoalan Timtim yang selama ini seolah terpendam, kini muncul di permukaan. Terutama setelah angin pun berganti, dari masa kepemimpinan Orde Baru ke Orde Reformasi. Dari tangan Presiden Soeharto ke tangan Presiden Habibie. Orde Baru yang sama sekali menolak usulan referendum dan Orde Reformasi yang tiba-tiba dan dengan cepat menelorkan opsi kedua tersebut.

DENGAN formasi itu, di tengah iklim jajak pendapat ini, kedua kelompok merasa yakin akan menjadi pemenang. Bila kelompok pro-integrasi menggunakan cara menjaring

lima orang dalam keluarga, sebaliknya kelompok pro-kemerdekaan berusaha menjaring 25 orang.

Agak sulit mengatakannya, namun apa yang terjadi, antara pro-otonomi dan pro-kemerdekaan, kadang juga terlihat menjadi semacam lapisan kelompok elit politik yang berhadapan dengan kelompok masyarakat bawah atau grass-root. Di masa Orde Baru dulu, pemandangan itu seperti lebih merupakan gambaran antara Golongan Karya dengan Partai Demokrasi Indonesia yang kini menambah kata Perjuangan di belakangnya menjadi PDI P.

Di setiap kampanye, mungkin sama berduyun-duyunnya, mungkin sama goyang dan ramainya, mungkin juga sama penyanyinya, namun ada kesan ungkapan kegembiraan murni dari masyarakat saat berada di tengah massa PDI P, karena mungkin ada ikatan rasa senasib, setelah terus ditekan. Hal itu juga terasa di saat berada di tengah massa pro-kemerdekaan.

Persoalannya, siapa yang akan tampil menjadi pemenang susah untuk ditebak. Masyarakat Timtim kadang terlalu pragmatis. Atau dalam bahasa gampangnya, tergantung angin. Bisa terjadi, hari ini ia mendukung otonomi, esok ia pun berubah kemerdekaan, dan sebaliknya. Namun, ada pula kelompok yang mendua, yang tidak peduli otonomi atau kemerdekaan. Yang lebih mereka cari adalah ketenangan hidup. Juga muncul keresahan di kalangan anak muda tentang bentuk negara selanjutnya bila lepas dari Indonesia.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh upaya Indonesia, kejadian terakhir, dengan segala kerusuhan yang tercipta antara Januari hingga sebelum UNAMET datang, bisa dikatakan menjadi titik balik kekuatan otonomi. Dalam gaya diamnya, mereka pun beralih dari otonomi dan melirik ke kemerdekaan. Mereka pun terbungkus dalam berbagai pakaian dari petani, mahasiswa, pegawai negeri, hingga bupati.

"Saya yakin pro-otonomi. Di sini 90 persen," tegas Kapela, Wakil Ketua Ablai. Hal senada pun diungkapkan Wakil Panglima Falintil Taur Matan Ruak. "Saya tidak yakin rakyat Timtim akan memilih otonomi, mereka ingin merdeka," katanya kalem. Nah.

HUT-24 Falintil

UNTUK pertama kalinya dalam sejarah, sayap bersenjata CNRT, Falintil merayakan hari jadinya secara terbuka. Itu terjadi pada peringatan HUT Falintil yang ke-24. Acara itu diselenggarakan secara besar-besaran di desa Uai Mori, Kabupaten Viqueque, Timtim, Jumat (20/8/99). Tempat itu merupakan wilayah kantonisasi Falintil yang mulai digunakan sejak tanggal 15 Juli 1999.

Puluhan ribu masyarakat Timtim secara khusus menghadiri acara yang diadakan di empat region Falintil. Sebagian besar dari mereka beberapa hari sebelumnya telah berkumpul di keempat wilayah tersebut.

Mereka datang secara perorangan, atau dalam bentuk rombongan, menggunakan truk sewaan. "Saya ke sini menyewa mikrolet Rp 120.000, tapi mereka itu ada yang menyewa truk sampai satu juta rupiah," kata Maria yang mengaku sudah berada di Region III, Uai Mori, beberapa hari sebelumnya. Ia bersama suaminya, seorang pegawai Pemda Baucau, sengaja berada di tempat itu untuk mempersiapkan acara yang baru pertama kali setelah 24 tahun tersebut.



*Bersiap-siap mengikuti perayaan HUT Falintil ke-24.
foto: Eddy Hasby*

Karena itu, Maria dan sebagian besar masyarakat Timtim itu selama sehari-hari seluruh masyarakat itu rela tinggal di hutan, tidur di tenda seadanya, mandi di sungai, bahkan makan seadanya, sesuai dengan bekal yang mereka bawa.

Tak bisa diketahui pasti jumlah masyarakat yang hadir di empat region itu, tetapi di wilayah Uai Mori sendiri, diperkirakan ada sekitar 20.000 orang yang ikut ambil bagian di tempat itu. Yang pasti, masyarakat dari segala lapisan tertumpah di tempat itu, termasuk beberapa mantan camat dan camat yang masih aktif tetapi melarikan diri.

Kali ini mereka memang membuat pesta besar. Di tengah lapangan seluas lima hektar itu didirikan panggung terbuka. Semalam suntuk mereka bernyanyi dan berdansa di arena itu, diiringi para penyanyi Gabungan Artis Timor, yang juga sering tampil di kelompok pro-otonomi. Penyanyi ini pula yang mempopulerkan lagu Oras To' O Ona Mak Ita Hili (Tiba saatnya kita memilih), lagu pemilu di Timtim. Di tengah hutan itu, lagu pemilihan itu pun didengarkan.



Bendera Falintil, "Patria Povo Orda".

foto: Eddy Hasby

Untuk mempersiapkannya, Falintil menyediakan sekitar 90 kerbau dan sapi potong. Jangan heran, bila di bawah salah satu pohon di hutan, tiba-tiba berdiri seekor sapi yang umum hanya dijumpai di Australia atau Selandia Baru. Mereka juga mendatangkan bertruk-truk beras dan sayuran, sumbangan dari seluruh kabupaten. Juga, berkaleng-kaleng dan berbotol-botol bir. Bila tidak menyumbang beras, umumnya para bupati menyumbang sapi atau kerbau.

Urusan dapur Falintil untuk persiapan pesta dilakukan hampir oleh semua Ibu dari desa Ossu, Viqueque. Mereka termasuk mempersiapkan sebuah taart berbentuk provinsi (maaf! waktu itu masih provinsi RI ke-27) cukup besar, dengan warna sesuai bendera Falintil, biru, putih, hijau. Biru melambangkan kedamaian, putih, kesucian, dan hijau kesejahteraan.

TEPAT pukul 08.00 waktu setempat, misa syukur di tengah lapangan antara region II dan III, dimulai. Tidak seperti misa harian biasa, untuk merayakan HUT ini, Falintil memilih Misa Raya yang dipimpin enam pastur, yaitu Mario Belo Pr, Fransisco Sequeira Pr, Eduardo Almeida Pr, Zermano Gusmão Pr, Jouvito Rego Pr, Julio Crispim Pr, dan Domingus Soares Pr.

Saat misa memasuki konsekrasi, unsur yang paling hakiki dalam upacara itu, keempat pemimpin Falintil, Taur Matan Ruak, Luolo, Falur Rate Laec, dan Sabika bersujud dengan khidmat di tanah lapang yang kini tak lagi berumput itu. Sebelumnya, mereka berpelukan penuh syukur, sambil mengucapkan "salam damai". Dan dengan khidmat, mereka menerima kehadiran "Yesus Kristus" yang terlambangkan dalam bentuk roti dan anggur. Mereka lalu menunduk sangat dalam. Di dalam keheningan itu, mereka khusuk berdoa.

Tak jarang acara itu pun diwarnai dengan linangan air mata. Secara otomatis, acara itu sekaligus menjadi ajang reuni keluarga yang sudah sekian lama tidak bertemu.

Usai misa kudus, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Falintil. Wakil Panglima Falintil Taur Matan Ruak, lalu menghubungi Panglima Falintil Xanana Gusmão yang saat ini masih di penjara Salemba, Jakarta, melalui telepon satelit. Hasil pembicaraan itu langsung disiarkan di empat region yang ada.

"Ini akan menjadi sejarah bagi kami," kata Falur Rate Laec, Komandan Region III yang bermarkas tak jauh dari Region II, pimpinan Komandan Sabika. Acara itu diadakan secara serentak di empat region, yaitu Region I di wilayah Laga, dengan Komandan Lere Anan Timur, Region II dan Region III di wilayah Uai Mori yang menempati kawasan sekitar lima hektar, dan Region IV dengan Komandan Ular Ryhyk di wilayah Ermera.

Wakil Panglima/Kepala Staf Taur Matan Ruak, dan Sekretaris Frente Politica Interna (FPI/Fron Politik Internal) Luolo, merayakan HUT ke-24 itu, di Region II dan Region III, didampingi Sabika, Komandan Region II, dan Falur Rate Laec, Komandan Region III.

Lebih dari 100 wartawan media cetak dan elektronik dari seluruh dunia, dan beberapa stasiun televisi Indonesia, termasuk TVRI, mengabadikan peristiwa tersebut. Harus diakui, peringatan ini menjadi salah satu ajang kampanye simpatik terbesar pro-kemerdekaan.

KPS yang diwakili BN Marbun, berniat hadir bersama Manuel Carrascalao (CNRT), wakil Polda Timtim, wakil Korem 164/Wira Dharma, dan Wakil Ketua DPRD Timtim Gabriel da Costa. Namun, setelah sekitar 10 menit terbang, mereka terpaksa kembali, ke Pangkalan Udara TNI-AU Dili. Helikopter milik KPS itu mengalami kerusakan mesin.

Usai mengikuti upacara perayaan Falintil di Uai Mori, di Dili, saya membahas pemikiran Matan Ruak bersama Pak Sudjadnan Parnohadiningrat, Koordinator, dan Pak Yamashita Lahay, anggota Satgas P3TT. Tak hanya saya yang terkejut, mereka pun terkejut ketika saya sampaikan aspirasi sejujurnya tokoh kunci pro-kemerdekaan tersebut. Dengan antusias mereka mendengarkan seluruh cerita saya tentang Matan Ruak dan Falintil yang jauh berbeda dengan citra yang ada selama ini. Tentu saja hanya pada batas tertentu.

Beberapa saat kemudian, Pak Djadnan bersama Pak Agus Tarmidzi, Ketua Satgas P3TT, menemui saya. Mereka menyampaikan rencana khusus dan meminta kesediaan saya kembali ke Uai Mori menemui Matan Ruak atas misi Satgas P3TT. Yaitu, mempertemukan Matan Ruak dengan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Satu-satunya alasan adalah pertemuan itu sebagai langkah pamungkas untuk menambah simpati pada otonomi.

Maklum, setelah berada di kubu pro-kemerdekaan, saya melihat dengan mata kepala sendiri tanda-tanda kekalahan di kubu otonomi yang sangat signifikan. Sebelum massa kampanye terbuka tiba, pihak pro-kemerdekaan melakukan kampanye dalam diam. Tanpa gegap gempita. Mereka hanya berkampanye dari pintu ke pintu. Kenyataannya, cara ini lebih efektif. Tak bisa dipungkiri, sistem ini pun membuat mereka menjadi kelihatan lebih simpatik. Terutama mengingat kelompok pro-otonomi waktu itu yang terkesan selalu bicara dengan kekerasan.

Tanpa membuang waktu lebih banyak, bersama Metha Guterres, putra Guilherme Guterres, *liurai* dari Viqueque, saya lalu menyusun rencana kembali ke Uai Mori. Skenario awal, pertemuan akan digelar di Denpasar. Ditemani Metha, saya pun bolak-balik ke Uai Mori untuk membicarakan tawaran tersebut dengan Matan Ruak.

Dalam salah satu perjalanan, kami “terjebak” di Manatuto. Tiba-tiba kami diminta ke tepi. Jantung kami berdetak dua kali lipat.

“Habis kita Mbak Rien.. Mbak Rien.., habis kita sudah,” kata Metha.

“Tenang, Met, kita *kan nggak* melakukan apa-apa.”

“Ya, tapi ini di Timtim, Mbak.”

Kami berpapasan dengan iring-iringan truk besar yang membawa kayu gelondongan. Mereka dikawal dengan ketat oleh para pemuda dengan model rambut sangat pendek alias cepak. Sebagian di antara mereka mengenakan kalung ber-‘liontin’ logam.

“Untung mereka *nggak* tangkep kita, Mbak,” ujar Metha. Ia tampak sangat lega ketika mereka membiarkan kami meneruskan perjalanan.

Namun, persoalan besar kemudian muncul. Mungkinkah membawa keluar Matan Ruak dari Uai Mori tanpa melibatkan militer? Terus terang, masalah ini sangat dilematis. Di satu sisi, melibatkan militer bisa diartikan sebagai ‘pembunuhan’ kepada Matan Ruak. Ia adalah ‘musuh’ utama militer. Dengan pertimbangan itu, waktu itu kami sepakat untuk memilih tidak melibatkan unsur militer. Karena itu, kami meragukan kemampuan kami menjamin keselamatan Matan Ruak begitu ia keluar dari markas besarnya.

Tetapi, kembali kami dihadapkan pada kenyataan, bagaimana cara membawa Matan Ruak ke Denpasar. Mungkinkah? Seperti bisa diduga sebelumnya, meski mulia, namun pekerjaan ini hampir tidak mungkin dilakukan. Bahkan, rencana itu berakhir dengan ‘todongan’ pistol tentara tepat ke jidat lebar saya beberapa saat kemudian. Saya dinilai tidak nasionalis dan pro-kemerdekaan. Situasi terasa semakin genting seiring dengan waktu pelaksanaan jajak pendapat yang juga semakin dekat.

“Bagaimana, Mbak?” tanya Pak Djadnan memecah keheningan.

“Kami belum tahu, Mas. Tetapi hari ini juga kami berangkat ke Uai Mori.”

Hari itu juga kami berangkat ke Uai Mori menemui Matan Ruak. Malam itu, Metha bicara panjang lebar dengan Matan Ruak dalam bahasa Tetun. Karena tidak menguasai bahasa Tetun, saya tidak banyak tahu apa yang mereka bahas.

Namun, secara garis besar, Matan Ruak menyetujui rencana tersebut. Hal itu bisa dimengerti. Bagaimana pun nama Megawati Soekarnoputri sangat harum dan mendapat tempat khusus di hati mereka. Hanya poster Mbak Mega yang tertempel di dinding dan pintu rumah di sepanjang jalan dari Baucau menuju Uai Mori, Viqueque.

Karena itu, Matan Ruak mengusulkan cara yang lebih memungkinkan dan sebenarnya lebih mudah. Yaitu membawa Megawati Soekarnoputri ke Uai Mori. Setidaknya, Matan Ruak berani menjamin keselamatan Bu Mega selama di Uai Mori.

“Saya kira, kalian pasti punya helikopter,” kata Matan Ruak.

“*I think yes.*”

“*So, it will be easier to bring Ibu Mega, here, than to take me out to Denpasar.*”

Kami terdiam mendengar usulan itu. “*Well, OK, I’ll tell Pak Djadnan,*” jawab saya.

Tak berapa lama kemudian kami pun kembali ke Dili. Tanpa banyak membuang waktu, usulan itu langsung saya sampaikan kepada Pak Djadnan. Pak Djadnan cukup kaget ketika mendengar Matan Ruak menyambut baik pemikiran tersebut. Namun cukup lama pula Pak Djadnan mencerna usulan Matan Ruak.

Setelah dikonsultasikan dengan berbagai pihak, akhirnya Pak Djadnan mengatakan bahwa tidak mungkin membawa Ibu Mega ke Uai Mori. Tentu dengan berbagai pertimbangan masak. Sementara itu, tidak mungkin pula membawa Matan Ruak keluar dari Uai Mori. Pada akhirnya, pertemuan itu memang tidak pernah terjadi. Selain karena kendala teknis, gagasan itu disampaikan kepada kami hanya sekitar 10 hari sebelum saat jajak pendapat tiba. ***

Bab III

Agustus!

MEMASUKI bulan Agustus, suhu politik Timtim meningkat. Suasana di wilayah itu pun menghangat. Seiring dengan meruncingnya persaingan kelompok pro-otonomi dengan pro-kemerdekaan, gerakan sebagai wartawan pun mulai terasa terbatas. Atau setidaknya mulai terasa ada unsur terawasi.

"Lu baru dari 'atas', ya."

Setelah sesaat "menghilang" dari *briefing* harian Unamet, pagi itu, Ezki dari Somet (Komite Perlindungan Wartawan di Timtim), langsung melemparkan pertanyaan konfirmatif tentang kepergian saya menemui kelompok Falintil. "Atas" adalah istilah yang umum digunakan untuk menyebut markas Falintil yang waktu itu masih di Uai Mori, Viqueque.

"Iya, kenapa?"

"*Nggak*, sih. *Gue* baru dikasih tahu pihak keamanan. Biasa, indomie telur. Kayaknya mereka sudah mencatat nama-nama yang ke atas," jelasnya.

"*Oh. Alright, thanks,*" jawab saya. Hambar, tanpa ekspresi.

Saya mulai heran. Sebelumnya banyak wartawan Indonesia yang terlebih dulu menemui pihak Falintil, bahkan bermalam berhari-hari di markasnya, tetapi tidak terlalu dipermasalahkan. Sekarang, kenapa semuanya menjadi sensitif? Benarkah saya lalu tidak mempunyai rasa nasionalisme bila berhubungan dengan Falintil, atau akankah saya lalu berpihak kepada mereka? Bagi saya, selama belum ada kepastian hasil jajak pendapat, mereka tetap bangsa Indonesia.

Atau karena saya bekerja di Harian *Kompas*, koran nasional terbesar di Indonesia? Kalau memang begitu, apakah *Kompas* harus selalu berada di belakang pihak otonomi? Bukankah pembaca mempunyai hak penuh untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi dari kedua sisi? Cover both side, katanya.

Apalagi, era sudah berganti. Angin Orde Baru telah diganti dengan semilirnya angin reformasi yang diharapkan lebih jujur dan terbuka. Berbagai pertanyaan konyol mulai merasuki otak saya, meski sesaat kemudian terlupakan. Selama belum menjadi tindakan, memang saya tidak terlalu memikirkan.

Hari berjalan seperti biasa. Hingga suatu sore, "dulu *Kompas* itu beritanya bagus, seimbang. Sekarang..., justru setelah Ibu hadir di sini, berita *Kompas* menjadi sama sekali tidak imbang!" Kalimat itu diucapkan Duta Besar Juwana, Wakil Ketua Satgas P3TT dengan cukup keras dan serius, ketika saya diperkenalkan oleh Kornelis, wartawan *Kompas* setempat.

Terkejut saya mendengar kalimat itu. Terus terang saya bingung dengan kata 'imbang' yang dimaksudkan Pak Juwana. Karena, sebelum saya dikirim ke Timtim, berita *Kompas* selama ini justru hanya dari sisi otonomi. Hampir bisa dipastikan tidak ada sedikit pun berita dari kubu pro-kemerdekaan. Dan berita dari sisi pro-komerdekaan mulai muncul di harian *Kompas* seiring dengan kehadiran M Nasir, teman saya yang juga dari *Kompas* Jakarta dan lebih dulu tiba di Timtim. Berita yang hanya dari satu sisi inilah yang dimaksudkan sebagai 'imbang'? Entahlah...

Sejak itu, saya dicap sebagai wartawan pro-kemerdekaan. Cap itu telah 'tertempel' di jidat saya jauh sebelum saya berhasil wawancara dengan Taur Matan Ruak. Jauh sebelum saya menulis dan menurunkan hasil wawancara tersebut. Dubes Juwana sendiri, sekitar seminggu sebelum pelaksanaan jajak pendapat, menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Koordinator Satgas P3TT dan kembali ke Jakarta.

Harus diakui, meliput Timtim adalah yang paling sulit. Bahkan lebih sulit dari perang Teluk, Irak, atau Rwanda. Bisa jadi karena saya adalah orang Indonesia dan harus meliput konflik di bumi Indonesia. Karena itu, kelompok pro-kemerdekaan pun kadang tidak menyambut kehadiran kami, semata-mata hanya karena orang Indonesia.

"Pokoknya begini, kalau ada dua kelompok, dan kedua-keduanya marah sama kita, berarti berita kita ballance, tapi kalau yang marah hanya satu kelompok, justru berita kita tidak ballance," kata Albert Kuhon, senior saya yang kemudian bergabung dengan SCTV 6. Kalimat itu bagai segelas air di musim panas yang sangat menyejukkan.

Kriiinggg..., Domingus Martins

"TEROR" pun mulai mengalir ke markas *Kompas* di Dili. Petang itu, bersama Kornelis dan Metha Guterres (Radio 68H, Jakarta), kami bercanda sambil membicarakan berita. Maklum, hari itu ada tambahan pasukan dari Jakarta, Eddy Hasby, fotografer *Kompas*. Ia datang bersama Bayu, fotografer *The Jakarta Post*. Karena bertetangga, kami sering saling kunjung atau saling pinjam.

Selain itu, Metha mulai menjadi penghuni tetap di rumah kami setelah Nasir memutuskan kembali ke Jakarta. Sepeninggal Nasir, saya terpaksa mendatangkan bala bantuan untuk menemani tinggal di rumah cukup besar tersebut. Maklum, Kornelis tidak mungkin bermalam di rumah itu, karena ia sendiri memiliki rumah di Dili. Karena itu, selain Metha ada beberapa kawan lain yang secara bergantian ikut menemani.

Tiba-tiba, kriiiiiingggg....., telepon berbunyi.

"Halo, selamat malam?"

"Selamat malam," muncul suara seorang lelaki dari seberang.

"Ada yang bernama Adi?"

"Ed, telepon." Telepon itu langsung saya serahkan ke Eddy.

"Dari siapa, Mbak?" Saya hanya mengangkat bahu.

"Halo, Eddy di sini."

"Saya dengar Anda itu pro-kemerdekaan."

"Lho,.. Bapak tahu dari mana, saya orang Indonesia, *kek*. Saya tidak ada urusan sama pro-kemerdekaan atau pro-integrasi, saya wartawan, yang sikapnya harus tetap netral."

"Saya tidak suka dengan pihak pro-kemerdekaan. Dari dulu Anda katanya pendukung pro-kemerdekaan."

"Saya wartawan, Pak."

"Lho, *kek* tiba-tiba saya ditelepon orang. Nama saya saja dia *nggak* tahu persis." Begitu komentar spontan Eddy waktu itu. Saya pun heran, ia belum lagi sehari berada di Dili. Malam itu, ia baru berada di rumah sekitar 10 menit setelah mencari makanan yang sudah mulai sulit di kota Dili.

"Siapa Ed?"

"Biasa, siapa lagi kalau bukan...." Eddy tidak meneruskan kata-katanya. Ia hanya tertawa. Yang pasti ia sama sekali tidak tahu menahu penelepon dari seberang.

Kriiiiingggg...

Kembali telepon berdering. "Halo. Ya, di sini tidak ada aktivis, kami semua wartawan!" Kali ini dijawab Metha Guterres, karena tidak lagi mencari "Adi". Tak jauh berbeda, Metha pun menjawab, "kami ini orang Indonesia, saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, dan akan tetap menjadi orang Indonesia. Bagaimana Anda menuduh kami aktivis pro-kemerdekaan, kami ini wartawan dan orang Indonesia."

Kriiiiingggg....

Tak sampai lima menit kemudian, telepon pun berdering lagi, diterima oleh Bayu.

Kriiiiinggggg.....

Karena berada di dekatnya, kali ini telepon langsung saya angkat.

"Halo, dengan siapa saya bicara?"

"Saya, Domingus Martins. Kami minta supaya kalian datang ke Korem, besok jam 08.00 pagi."

"Sebentar, Anda ini siapa, kenapa dan ada masalah apa, *kok* kami diminta datang ke Korem?"

"Kami mendapatkan informasi rumah ini dihuni aktivis pro-kemerdekaan."

"Oh,.. boleh kami tahu dari mana informasinya, karena mungkin informasi itu keliru. Tetapi, seandainya rumah ini memang milik aktivis pro-kemerdekaan, kenapa harus dipanggil ke Korem? Bukankah itu hak setiap warga Timtim. Kita *kan* sudah memberi dua opsi kepada rakyat Timtim. Bapak bukannya sedang melanggar HAM, kalau begini caranya."

".... Tidak mungkin kami keliru. Kalau kami keliru, mana mungkin kami mendapat alamat dan nomor telepon rumah ini secara lengkap."

"Bisa saja *kan*, Pak."

"....." Tak ada jawaban dari seberang.

"Kalau Bapak yakin, kenapa cuma menelepon? Yang curiga *kan* Bapak, *kok* kami yang diminta datang ke sana. Bapak dong yang datang ke sini. Pak, sebenarnya kami belum genap sebulan menyewa rumah ini, dan belum genap sebulan berada di Timor Timur, dengan waktu sependek itu, menurut Bapak, apa mungkin kami aktivis pro-kemerdekaan, *kok* baru sekarang munculnya."

"Pokoknya, kalau kalian memang bukan aktivis pro-kemerdekaan, kami tidak akan mendapat informasi alamat lengkap dengan nomor telepon..."

"Lho,... *kok* itu lagi. *Kan* gampang sekali untuk mendapatkan alamat rumah dan nomor telepon seseorang."

"Siapa saja yang berada di rumah itu, dan apa hubungan kalian satu dengan yang lain!"
Suara di seberang terdengar mulai menaikkan volume.

"Oh..., itu. Baik, kalau Bapak ingin mengetahui siapa kami, di rumah ini, saat ini ada tiga lelaki dan satu perempuan. Kami semua wartawan, dan rumah ini disewa oleh Harian *Kompas* Jakarta, selama jajak pendapat ini. Kami di sini hanya untuk urusan jajak pendapat. Kalau Bapak tidak percaya, silakan datang dan melihat langsung kondisi dan segala isi rumah ini."

"Oh, ... jadi kamu tinggal bersama suamimu? Jadi kamu sudah menikah?"

"Maaf, Anda sudah melanggar batas hak-hak pribadi saya. Apa hubungan kami, itu bukan urusan Bapak. Sekali lagi saya jelaskan, kami semua adalah wartawan *Kompas*. Selamat malam."

Telepon langsung saya letakkan. Dan kringgg.....

Kembali si penelepon memaksakan pendapatnya bahwa informasi yang mereka miliki itu benar. Tetapi sekali lagi mereka menolak untuk datang dan melihat langsung ke rumah. Ia tidak bisa menerima saat kami katakan bahwa mendapatkan alamat dan nomor telepon seseorang sangatlah mudah, terutama dengan kemajuan teknologi sekarang. Karena itu, bagi kami, kesimpulan atau menyatakan seseorang begini, begitu, yang hanya didasarkan pada informasi sepihak dan kebetulan nomor telepon serta alamat rumahnya cocok, sama sekali tidak valid, kecuali didukung bukti lain.

"Kalau begitu, dari mana Anda memastikan kalau kami ini aktivis pro-kemerdekaan?"

"Ya, kalau informasi ini tidak benar, tidak mungkin kami mendapatkan alamat dan nomor telepon lengkap."

"Lho, *kan* tadi sudah dibilang, mencari alamat rumah dan nomor telepon seseorang itu sangat gampang. Kalau begitu, begini deh, telepon saya 10 menit lagi, dan saya akan tahu siapa Anda, dari mana Anda, dari kesatuan apa dan siapa atasan Anda. Dan silakan Anda datang ke sini, kami tunggu." Telepon kami tidak pernah berdering lagi. Tetapi, beberapa hari kemudian, *The Jakarta Post* pun menerima telepon senada.

ANTUSIASME dan animo warga Timtim untuk mengikuti jajak pendapat, di luar dugaan, sangat tinggi. Ketua UNAMET Ian Martin menjelaskan, hingga hari ke-18 masa pendaftaran, masih ada ribuan warga Timtim yang belum terdaftar. Misalnya, enklave Ambeno, yang ia kunjungi Selasa (3/8).

Mengutip penjelasan Luis Bittencourt, Ketua UNAMET setempat, banyak warga Ambeno yang belum terdaftar, karena wilayah itu harus menampung pendatang sekitar 6.000 hingga 7.000 orang dari Timor barat yang tersebar di Desa Baokanana, Bobometo, dan Oekusi. Sementara, Ambeno sendiri mempunyai 30.776 warga yang mempunyai hak pilih.



*Mendata peserta jajak pendapat di wilayah Betano.
foto: Yamashita Lahay*

Melihat kondisi itu, UNAMET merekomendasikan Sekjen PBB Kofi Annan untuk memperpanjang masa pendaftaran. Rekomendasi diterima. Sekjen PBB memutuskan memperpanjang pendaftaran selama dua hari untuk wilayah Timtim dan empat hari untuk wilayah di luar Timtim. Masa pendaftaran semula direncanakan selama 20 hari, dari tanggal 16 Juli 1999 hingga 4 Agustus 1999. Dengan perpanjangan ini, berarti masa pendaftaran untuk wilayah Timtim baru akan ditutup tanggal 6 Agustus 1999, pukul 16.00.

Sedang untuk wilayah di luar Timtim, pendaftaran ditutup tanggal 8 Agustus 1999. Di luar Timtim, ada 13 lokasi pendaftaran, yaitu di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Ujungpandang, Sydney, Darwin, Perth, Melbourne, Lisabon, Maputo, Macao, dan New York.

Walau begitu, keputusan ini terasa janggal. Sekjen PBB justru memberi kesempatan waktu dua kali lebih panjang untuk wilayah di luar Timtim yang jumlah pesertanya lebih sedikit, dibanding perpanjangan waktu untuk wilayah Timtim sendiri yang pesertanya jauh lebih banyak. Kenyataannya, jumlah total warga yang berhak memilih mencapai 451.792. Sebanyak 438.513 di antaranya memilih di Timtim. Di luar Timtim, jumlah pemilih hanya mencapai 13.279 orang.

Minggu (8/8/99), Megawati Soekarnoputri berkunjung ke Timtim, tepatnya di Kovalima, Ermera, Luquica, Bobonaro, Baucau, Manatuto, Viqueque, Lautem, dan Aileu. Kepada seluruh warga Timtim, ia menyerukan untuk memberikan suara dengan penuh keyakinan dan harga diri, serta menghindari kekerasan.

Secara tidak langsung ia mengatakan, ketidakberesan masalah Timtim juga disebabkan oleh pemimpin yang tidak beres. "Kalau pemimpin *nggak* beres, keadaan juga jadi *nggak* beres. Namun, kalau pemimpinnya beres, saya yakin, sangat yakin, apa yang dicita-citakan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Pemimpin yang baik, pasti akan dapat mendengar dan memahami suara rakyat. Seorang pemimpin akan dicintai rakyat bila memiliki keyakinan dan perasaan yang sama dengan rakyat," katanya.

Usai kunjungannya ke Timtim, gambar Megawati yang mengenakan rok merah digunakan sebagai simbol dan daya tarik pihak pro-otonomi. Gambar itu lalu dibuat dalam poster, baliho, dan stiker otonomi yang ditempelkan di hampir tiap pelosok Timtim. Sebelum Megawati, banyak pula tokoh elit politik nasional yang menyempatkan diri berkunjung ke Timtim.

Sebut saja, sekitar bulan Juli hadir Mendagri Syarwan Hamid, Menhankam Jenderal Wiranto, Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Menteri Kehakiman Muladi, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra/Taskin) Haryono Suyono, Menteri Agama Malik Fajar, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, dan Menteri Pertanian Solahuddin.

Juga, Menteri Sosial Justika Sjarifudin Baharsjah, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan AM Hendropriyono, Menteri Perumahan Rakyat Theo L Sambuaga, Menteri Pekerjaan Umum Rachmadi Bambang Sumadhijo, Menteri Pangan dan

Hortikultura AM Sa'efuddin, Menko Polkam Feisal Tanjung, dan Kapolri Jenderal (Pol) Roesmanhadi, Ketua PBNU Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Ketua DPP Golkar Akbar Tanjung, sekitar akhir Agustus.

Timor Timur makin sibuk. Kampanye penentuan pendapat dari kedua pihak dimulai. UNAMET menentukan masa kampanye tanggal 14-27 Agustus 1999. Sabtu (14/8/99), kedua kelompok sepakat mengadakan kampanye bersama secara dialogis di Auditorium Markas Besar UNAMET, Balide, Dili, dimulai pukul 16.15 waktu setempat.

Kelompok pro-otonomi diwakili Domingos Soares, Salvador Ximenes Soares, Basilio Diaz Araujo, dan Francisco Lopez de Carvalho. Kelompok pro-kemerdekaan menghadirkan Leandro Isaac, Agio Alves, David Ximenes, dan Joao Alves. Dari perwakilan itu, mereka menunjuk Domingos Soares dan Salvador Ximenes sebagai pembicara pro-otonomi serta Leandro Isaac dan Algio Alves sebagai pembicara pro-kemerdekaan. Pada dasarnya, kedua pihak menyadari pentingnya arti persaudaraan. Mereka juga sadar pentingnya upaya menghindari bentrok dan kekerasan.

Mulai Sabtu siang, bendera Merah Putih sudah berkibar di seluruh Timtim. Keesokan harinya, Minggu (15/8/99), pro-kemerdekaan mulai mengibarkan bendera CNRT, sekaligus meresmikan kantor CNRT di Lecidere, Dili timur.

Sehari menjelang putaran kampanye ini, atau hanya beberapa hari sebelum pelaksanaan jajak pendapat, Pemerintah memutuskan mengganti Komandan Korem 164/Wiradharma (Danrem 164/WD) Kolonel (Inf) Tono Suratman dengan Kol (Inf) Muhammad Noer Muis. Serah terima dilakukan Jumat (13/8/99). Kol (Inf) Tono Suratman sebelumnya menggantikan Kol (Inf) Slamet Sidabutar yang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter di Liaruqa, Timtim, Juni 1998.

Penggantian ini agak mengherankan. Danrem (Komandan Korem) justru diganti pada saat pelaksanaan jajak pendapat Timtim tinggal beberapa hari lagi. Dugaan akan keterkaitan Pak Tono dengan para milisi dan banyaknya kekerasan yang terjadi selama setahun di bawah kepemimpinannya, menjadi alasan terkuat penggantian tersebut. Dan kenyataannya, kondisi Timtim semakin semrawut dengan tingkat keamanan yang menurun drastis. Walau begitu, usai menunaikan tugas, pangkat Pak Tono dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen).

Tiga hari sebelum penutupan masa kampanye, Senin (23/8/99) siang, KRI Teluk Cirebon yang membawa 306 penumpang, merapat di Pelabuhan Dili. Tepatnya, seminggu sebelum pelaksanaan jajak pendapat ini, tiba-tiba pihak Indonesia, mengirimkan 306

observer alias pemantau. Mereka terdiri dari 31 kelompok, dari kelompok yang ternama hingga status "terdengar".

Kolonel (Czi) J Suryo Prabowo, mantan Wakil Komandan Indonesian Task Force in East Timor (ITFET) mencatat, kelompok itu terdiri dari Forum Rektor (30 orang), Credible (63), Lintas Informasi dan Pengkajian (19), PPAPRI (13), LIPPI (3), Fortidamor (8), Gema Gakari (7), Al Inaba (5), Persis (3), Humanika (8), GAMKI (1), AMPI (6), GM Kosgoro (8), Bikari (3), LPSEMD (5), PPIMNU (8), Pemuda Pancasila (8), YBMI (3), UADS (8), Pemuda Islam (9), BKPRMI (3), Gema Matlul Anwar (3), GP Ansor (8), FKP-4 (8), HPPI (9), GMPI (9), Mapelu (3), Gema Kosgoro (1), Ika Pasmis (6), HMI (8), dan IMM (27).

Pihak UNAMET sempat mempersoalkan kasus observer dadakan ini. UNAMET khususnya mempertanyakan independensi dan ketidakberpihakan mereka, bila nanti menjadi observer. Dalam hal ini UNAMET heran, mengaku independen, tetapi *kok* akreditasi pun harus diuruskan oleh pihak pemerintah. Dengan kata lain, UNAMET meragukan kredibilitas mereka.

Kali ini, kecurigaan dan keberatan UNAMET masuk akal. Sebelum turun dari kapal, ke-306 pemuda itu meminta disediakan tranpostasi, jaminan asuransi, akreditasi UNAMET, uang saku, dan tiket pesawat terbang untuk kembali ke Jakarta. Repotnya, permintaan itu salah satunya ditujukan kepada Satgas P3TT.

"Lha, dari mana kita dapat duitnya. Masak mereka minta uang saku Rp 2 juta per orang, plus tiket pesawat terbang lagi. Kita yang sudah di sini berbulan-bulan saja, hitungannya cuma ratusan ribu. Pusing saya," kata staf Satgas P3TT. Mendengar keluhan itu dalam hati saya berpikir, yang *ngirim kok* tidak bertanggung jawab.

Aitarak Jawa

Begitu menurunkan kami di rumah, Metha Guterres pamit untuk pergi sebentar. Waktu itu kami baru pulang dari Uai Mori, menghadiri perayaan HUT Falintil. Karena mengejar tenggat waktu, dengan hati sedikit cemas dan was-was, usai upacara, sore itu juga kami meluncur ke Dili. Kami tiba dengan selamat di Dili, saat lembayung senja telah sirna. Dili dalam suasana hening, diam, dan mencekam.

"Aduh, mobilnya ditahan di markas Aitarak," kata Metha tergopoh-gopoh. Ia kembali ke rumah dengan wajah sangat pucat dan berjalan kaki. Melihat kondisi Metha, kontan

kami: Eddy, saya, dan dibantu Kreshna Astraatmadja juga dari Radio 68H, meluncur ke tempat kejadian, markas Aitarak, di Fatuhada, Dili barat.

Sebuah markas yang sama sekali tidak jauh dari markas Batalyon Infantri 303. Sesampai di tempat itu, ternyata, mereka tidak menahan mobil. Mereka justru membantu menyelamatkan mobil kami yang pecah ban. Namun, karena panik, Metha, rekan yang membawa mobil itu pun lalu merasa dalam kondisi tertawan.

Hal itu bisa dimengerti. Tanggal 20 Agustus 1999 itu, kota Dili benar-benar mencekam. Hari itu puncak peringatan HUT Falintil (Forças Armadas da Libertação Nacional de Timorese/Armada Bersenjata Nasional untuk Pembebasan Rakyat Timor Timur) ke-24, sayap militer Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timor Timur (CNRT/ Conselho Nacional da Resistência Timorese).

Puluhan ribu rakyat Timtim secara suka rela merayakan hari Falintil di markas besar mereka, di hutan Uai Mori, Viqueque. Suasana semakin terasa ngeri seiring dengan meningkatnya isu atau rumor akan adanya penculikan dan penangkapan kepada beberapa pihak yang dianggap penting dan terlibat dalam peringatan tersebut. Dalam hal ini, wartawan termasuk salah satu kelompok yang dianggap penting.

Seiring dengan meruncingnya persaingan antara kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan, hadir dalam perayaan HUT Falintil menjadi tidak aman. Di Uai Mori sendiri muncul beberapa tamu dalam keadaan terluka, karena mendapat halangan di perjalanan. Kondisi itu diperburuk dengan isu, pihak pro-otonomi akan menghadang seluruh kendaraan yang baru turun dari Uai Mori, tepatnya di wilayah Hera, Dili timur.

Selain itu, ada pula berita, pihak keamanan telah mencatat semua wartawan yang berangkat ke Uai Mori. Bahkan konon memasukkan mereka dalam daftar hitam. Lebih dari itu, (sekali lagi ini juga konon), seluruh wartawan yang dipandang "dekat" dengan kelompok pro-kemerdekaan, terutama Falintil, telah dimasukkan dalam daftar watch, mungkin juga wanted.

"Kalian dari mana?" tanya salah satu anggota Aitarak saat kami tiba di Fatuhada untuk mengurus mobil. Nadanya agak tinggi. Ia mengaku bernama Hamid. Kulitnya sawo matang, tidak hitam, dan tidak tinggi. Di balik peci yang selalu dikenakan, tersembul rambutnya yang lurus.

Sesaat kemudian datang Marzuki bersama beberapa rekan lain yang tidak menyebutkan nama. Seluruhnya berpenampilan bak seorang santri. Berpeci putih atau hitam, mengenakan baju koko, berselempang sarung, dan berceklana sepenggal atau di atas mata

kaki. Hanya, para 'santri' ini mengenakan tali di paha yang digantungi parang panjang hingga menyentuh pangkal betis.

Untuk sesaat, suasana hening dan kaku. Kami pun was-was. Namun, suasana yang kaku segera cair, setelah berkenalan dan saling sapa, khususnya setelah mereka tahu kami berasal dari Jawa. Karena itu, lima menit kemudian, dialog dengan para anggota Aitarak ini tidak lagi dalam bahasa Indonesia, melainkan beralih ke bahasa Jawa dengan logat Jawatimuran. Sebenarnya mereka ramah dan helpful.

"Aku seko Suroboyo. Nembe sewulan ndok kene (Saya dari Surabaya dan baru sebulan di sini)," kata Hamid saat ditanya sudah berapa lama menjadi anggota Aitarak. Di wajahnya yang tegang mulai tersungging senyuman, walau sangat tipis dan mahal.

"Akeh sing dikirim mrene (Banyak yang dikirim ke sini) dan diperbantukan di sini. Soalnya di sini banyak teror dan intimidasi," lanjutnya sambil terus menggoyang-goyangkan parang di kaki kirinya.

Secara singkat, Hamid bercerita, ia bersama kawan-kawannya sekitar sebulan lalu diminta bantuan untuk meredakan kerusuhan di Timtim. Karena itu, ia pun dibekali pengetahuan yang cukup. Namun, menurut pengakuannya, mereka tidak diberi gambaran sebenarnya apa yang terjadi, kecuali bahwa di Timtim banyak teror dan intimidasi.

Pembicaraan itu memang terlalu singkat. Sebelum sempat menanyakan siapa yang mendatangkan atau siapa yang berada di belakang kelompok mereka, seseorang berbadan lebih gelap, lebih tinggi, lebih kekar dan tegap, segera memanggil Hamid kembali ke markas. Hamid pun segera melangkah balik.

Bahkan ia pun tak sempat menggambarkan bentuk teror dan intimidasi yang dimaksudkan. Sambil melangkah dan bergegas kembali ke markasnya, Hamid mengatakan, "Pokoknya di sini banyak teror dan Intimidasi. Hati-hati saja." Seiring dengan itu, kami pun dibiarkannya pergi..

Kejadian itu meyakinkan saya tentang pelibatan para pemuda yang mirip santri itu, yang konon ribuan untuk menjadi milisi. Semua itu dengan satu dalih membela, menyelamatkan, dan mempertahankan integrasi.

SEIRING dengan itu, kota Dili terus "bergolak". Persaingan kelompok pro-otonomi dengan pro-kemerdekaan semakin nyata. Rasa takut mulai terasa mencekam. Makin hari, suasana semakin panas. Puncaknya di putaran terakhir masa kampanye kedua kelompok.

Setidaknya dua tewas pada putaran terakhir kampanye pro-kemerdekaan tanggal 25 Agustus. Suasana semakin mencekam keesokan harinya, dalam kampanye putaran terakhir pro-otonomi.

"Mangane opo, Mas? (Makan apa, Mas)," kata salah satu peserta kampanye pro-otonomi, sambil "meletakkan" rambutnya yang panjang dan bergelombang di meja makan. Lelaki berambut sangat pendek itu, mengenakan kaus hitam lengan panjang dengan tulisan Aitarak berwarna putih, berukuran besar di punggung. Sebelum berkumpul di lapangan, sebagian dari mereka menyempatkan diri bersantap siang di warung coto Makassar, persis di pinggir pantai Dili. Belakangan, warung itu hangus, terbakar habis.

Usai makan, kami meneruskan perjalanan. Ketika hendak mengarah ke Hotel Tropical, markas Aitarak, mobil kami terhalang sebuah truk dengan warna khas polisi dan di dalamnya berisi perkakas dan personel berseragam persis seperti polisi. "Nis, itu semua temanmu?"

Mendengar pertanyaan itu, Anis hanya tertawa. Anis yang bernama lengkap Johanis C Jawa itu adalah anggota Polisi yang bersedia menjadi sopir harian kami. Awalnya, dia bertugas memantau kami. Namun seiring dengan waktu, hubungan kami pun semakin baik. Hingga akhirnya justru kami berteman dekat, sangat terbuka, dan saling melindungi.

Kami pun mengikuti truk yang berjalan dengan sangat perlahan tersebut. Sesaat kemudian, mereka mulai membagikan kaos dengan melempar-lemparkan kaos berwarna hitam tersebut kepada anggota Aitarak yang berdiri di sepanjang jalan.

Tak kalah dengan kampanye pro-kemerdekaan sehari sebelumnya, kampanye pro-otonomi pun dihadiri puluhan ribu massa yang terhimpun dalam ratusan kendaraan besar dan kecil. Kampanye putaran terakhir tanggal 26 Agustus 1999 itu, diwarnai riak-riak kecil yang akhirnya berubah menjadi gelombang besar.

Diawali dengan "percikan" di markas CNRT Lecidere, Dili timur. Tak diketahui pasti siapa yang memulai, baik pro-otonomi maupun pro-kemerdekaan sama-sama mengaku sebagai korban. Keributan memuncak di jembatan Kuluhun, yang menghubungkan wilayah Bekora dengan Audian.

Massa peserta kampanye menghancurkan rumah Nyonya Gelarmina Gracia, seorang janda dengan tujuh anak. Seluruh kaca di rumah janda itu hancur, tempat tidur dan isi almari berantakan, diobrak-abrik, bahkan botol kecap pun ikut dipecah. Sepeda motor GL Pro bernomor DF 2474 HH, milik Elezio Vidigar yang kebetulan berada di rumah itu pun dibawa lari.

Mereka juga merusak satu rumah lain, milik keluarga Lai Nee Cho, yang berada di seberang jalan, tepat di depan rumah Nyonya Gracia. Keduanya berada di pinggir jalan ke Bekora, tepat di samping jembatan. "Saya baru pulang pukul 11.30. Selesai makan siang, kami baru beristirahat bersama empat anak saya, tiba-tiba semuanya sudah terjadi," katanya. Selain merusak rumah, mereka juga membakar satu mobil yang sama-sama terletak persis di samping jembatan Kuluhun.

Seorang sumber dari pemerintah RI yang berada di lokasi menceritakan, peristiwa diawali dengan adanya rombongan peserta kampanye yang melalui wilayah itu. Masih menurut Bapak yang menolak disebut nama itu, mereka menyalahi aturan karena wilayah itu tidak masuk dalam rute kampanye yang sudah disepakati.

Persoalan pun berkembang. Tak lagi sekadar salah paham, tetapi sudah menjadi perseteruan. Muncul berbagai versi. Menurut masyarakat setempat, mereka marah karena peserta kampanye menembaki gambar Presiden Xanana Gusmão dan lambang CNRT yang berjajar di sepanjang wilayah tersebut. Masyarakat tersinggung, lalu mereka mulai melempar batu. Sebaliknya, menurut para peserta kampanye, saat melintas wilayah itu, mereka terlebih dulu dilempar batu.

Mana yang benar? Entahlah. Yang pasti, masyarakat di sekitar Bekora dan Kuluhun itu terus melemparkan batu kepada siapa pun peserta kampanye yang melintas. Mendapat serangan itu, beberapa peserta kampanye menghindari wilayah tersebut. Para petugas Brimob (Brigade Mobil) pun berdatangan. Namun, mereka disambut dengan teriakan "tidak adil" dari masyarakat setempat.

"Bubarkan saja Brimob, kalian tidak adil. Kalian hanya berani menangkapi kami. Kalau mereka (massa pro-integrasi) yang berbuat kalian diamankan, tak ada satu pun yang ditangkap. Ayo, kalau berani tangkap mereka. Kalian tidak adil." Mendapat teriakan itu, para petugas Brimob tak bergerak sedikit pun dan tetap diam.

Suasana mendingin. Seluruh petugas Brimob yang tergabung dalam Kontingen Loro Sa'e pun meninggalkan tempat. Namun, sekitar setengah jam kemudian, suasana kembali panas. Sebuah mikrolet kecil melintas menuju Bekora dari arah Audian. Seluruh penumpangnya mengenakan kaos merah bertuliskan otonomi.

Masyarakat setempat semakin histeris. Mereka meneriaki dan mengancam siapa saja, khususnya wartawan Indonesia. "Kalau biking (bikin) berita yang benar, ya. Jangan putar balikkan fakta. Kalian tidak pernah biking berita dengan benar," kata mereka sambil mengacung-acungkan parang pada wartawan Indonesia yang berada di sana.

Melihat kendaraan 'nyelonong' itu, mereka menyongsongnya dengan lemparan batu. Tepat di depan biara Santo Paulus dari Chartres di Audian, kendaraan itu balik arah. Seorang penumpang yang kelihatannya panik langsung turun dan melarikan diri. Namun tak berapa jauh ia tertangkap, dan ditusuk.

"He was bleeding, (dia berlumuran darah)," kata Suster Bernadette SPc dari Filipina yang bertugas di biara tersebut. Tangan kiri suster tampak berdarah. Ia pun menggenggam sebuah jam tangan yang juga berlumuran darah.

"Suster, apa yang terjadi pada Anda dan itu jam tangan siapa?"

"Tidak terjadi apa-apa pada saya, saya hanya membantu korban tadi. Jam tangan ini miliknya. Sekarang dia dibawa ke RS Motael oleh Suster Carmen," jelasnya.

Setelah kejadian itu, masyarakat terus berjaga-jaga dan siaga di tempat, lengkap dengan batu dan panah beracun. "Kami tidak punya senjata api," kata salah satu dari mereka. Joao da Silva, ketua pemuda setempat, bahkan melepas baju. Sambil bertelanjang dada, ia berlari ke "medan pertempuran", lengkap dengan anak panah di punggung dan busur di tangan. Menurut para tetua di wilayah itu, ia kebal peluru, setelah berguru pada lulik, tetua setempat yang dianggap sebagai orang pintar.

Dor! Wartawan Pun Tertembak

Serentak seluruh massa di Kuluhun memukul segala sesuatu. Kayu, besi jembatan, atau pun poster yang terbuat dari logam, sekadar menyebar bunyi tanda bahaya. Serombongan peserta kampanye melintas. Masyarakat yang marah itu pun berlari dan melempar batu. Mereka membakar satu sepeda motor, yang dikira milik peserta. Hanya, kebetulan bukan milik peserta kampanye, namun milik Kornelis, wartawan *Kompas* setempat.

Sesaat kemudian, datang peserta kampanye dalam jumlah besar. Seluruhnya mengenakan seragam hitam-hitam, bertuliskan Aitarak di punggung. Aitarak, kelompok pemuda pro-integrasi untuk wilayah Dili, di bawah komando Eurico Guterres. Sambil berjalan ke wilayah sasaran, tepatnya Bekora, mereka melempar batu dan menghamburkan peluru.

Kornelis yang masih menyesali motornya yang dibakar, tidak menyadari bahaya lebih besar di hadapannya. Ketika tersadar, ia pun berteriak sambil menunjukkan kartu identitas. "Wartawan, wartawan, saya wartawan."

Tanpa mempedulikan teriakan itu, dor! dor! dor!. Ia diserbu rentetan tembakan. Lima peluru bersarang di tubuhnya dan satu di kaki. Beruntung, kelima peluru itu tak menembus rompi yang dikenakannya. Meski sebenarnya jaket itu lebih untuk antibacok. Kebetulan senjata yang digunakan untuk menembak Kornelis adalah senjata rakitan.

Kornelis langsung menjatuhkan diri ke sungai. Setelah berlari sekitar satu kilometer, ia diselamatkan warga pro-kemerdekaan dan dibawa ke RS Dili oleh Domingus Freitas. Ia mendapatkan tiga jahitan.

Pada waktu hampir bersamaan, mereka juga menembak Bea Wiharta, fotografer kantor berita Reuter. Tak jauh berbeda dengan Kornelis, Bea sibuk mengabadikan seluruh peristiwa, termasuk penembakan pasukan Aitarak terhadap Kornelis. Saking asyiknya, Bea hanya memantau situasi dari balik kameranya. Dan tiba-tiba, dor!. Sebuah peluru bersarang di pahanya. Beruntung, ia segera mendapat pertolongan masyarakat setempat. Bea dibawa ke RS Motael. Selain menembak, pada saat yang hampir bersamaan, mereka juga menghancurkan mobil kijang sewaan milik Harijan berbahasa Inggris *The Jakarta Post*.

Seluruh pasukan Aitarak yang berbadan tegap, berotot, dan kekar itu semakin mengganas. Sambil berjalan ke arah Bekora, mereka tak henti menghamburkan peluru dan menghujani dengan batu. Sebuah peluru sempat berdesing hanya beberapa milimeter dari telinga kiri Eddy Hasby, fotografer *Kompas*, saat mengabadikan peristiwa tersebut. Beruntung, ia selamat. Mereka juga berusaha "menyapu" seluruh kamera wartawan, baik asing maupun lokal.

Ribuan batu dan peluru melayang bersama-sama ke wilayah Bekora. Sebagian besar masyarakat langsung melompat ke sungai kering dan siaga dengan panah masing-masing. Massa kampanye itu terus berjalan ke arah sasaran.

Malang, ada lima wartawan, dua perempuan dan tiga lelaki, terjebak. Mereka 'terkepung' di antara ratusan batu dan peluru, di pinggir jembatan sungai kering tersebut. Dua dari RCTI, reporter Dicky Wahyudi dengan kameramen Tony Cahyono, Mas German dari televisi Eropa EBU, satu lagi wartawan perempuan asing yang tidak saya lihat dengan jelas, dan saya sendiri dari *Kompas*.

Begitu melihat kami, pasukan Aitarak itu langsung mendekat. "Journalista, journalist! (Wartawan, wartawan)," teriak kami. Tanpa menghiraukan teriakan itu, seorang lelaki kekar dan berkulit gelap, mengenakan seragam polos hijau tentara, bertuliskan Aitarak kuning di atas saku kirinya, lengkap dengan baret hijau yang juga polos, langsung mengambil granat

nanas. Ia memutar-mutarkan granat itu dengan tangan kanannya dan didekatkan pada kami berlima.

"Journalista!" salah seorang dari kami mencoba kembali berteriak memberi tahu. Sialnya, mendengar teriakan itu, ia justru memainkan pemantek granat tersebut. Jantung pun terasa berhenti berdetak. Sesaat saya sadar, kami berteriak dengan bahasa yang salah. Tentu kepada pihak pro-otonomi bukan kata "journalista" yang seharusnya kami teriakkan, tetapi "wartawan."

Puji syukur, ia hanya menakut-nakuti dan pergi. Namun, datang rombongan lain, tetap dengan seragam hitam. Kali ini seluruhnya membawa senjata api. Di seberang jalan, seseorang yang mengenakan seragam hitam, lengkap dengan topi dengan model rambut panjang, menghamburkan peluru dari senjata laras panjang hitam.

Saat melihat kami, mereka berhenti. Salah satu di antaranya mengokang senjata yang juga laras panjang, berwarna hitam, mirip M-16. Ia langsung mengarahkannya kepada kami. Disusul beberapa orang lain. Seseorang berkaos oblong putih, bercelana biru, mencabut senjata genggam dari pinggang, kemudian ikut mengokang. Di luar dugaan, ia mengarahkan senjata itu tepat di dahi saya. Mungkin ia melihat badge "*Kompas*" yang terselip di antara lipatan tangan saya.

"Ya Tuhan, bila inilah saatku, ampunilah aku." Hanya doa sepenggal itulah yang sempat kupanjatkan di depan senjata yang sudah terkokang dan larasnya ditempelkan tepat di dahi saya. Entah mengapa, waktu itu justru saya lekat-lekat memandang orang yang sedang mengokang senjata tersebut. Meski ia berkacamata hitam pekat, namun saya yakin, mata kami beradu. Tanpa sedetik pun berkedip, saya telek memandang langsung ke bola matanya.

Di sisi lubuk hati yang lain, saya yakin, hanya Tuhanlah yang berhak menentukan kematian saya. Bukan lelaki dekil di hadapan saya yang berkulit hitam, berambut lurus, bermata kecil tajam, dengan kaos oblong putih dan bercelana biru itu.

Bersamaan dengan itu, sebagian menendangi wartawan lain, termasuk kameramen RCTI. Serasa tak ada hal lain yang bisa kami lakukan, kecuali pasrah sepenuhnya. Namun, sebelum senjata meledak, rombongan Brimob mendekati kami dan membuat pagar betis. Mereka lalu membawa kami ke wilayah aman, Audian. Meski sudah dipagar betis, beberapa peserta kampanye yang bermotor, tetap mengejar, menendang, dan berusaha merebut kaset kameramen RCTI.

Sementara itu, di bagian lain, dua kameramen TVRI Sabianus Bambang Ekosroyo dan Sus Irianto, serta presenter TVRI Angela Carvalho sedang menelusuri Dili. Sesampai di depan kantor Gubernur, mereka melihat rombongan pasukan Aitarak. "Berdoa dulu, Mas, ini berbahaya sekali," teriak Angela saat melihat kedua kameramen itu turun dari mobil.

Tanpa menyadari bahaya yang menghadang, mereka berdua asyik mengabadikan penembakan-penembakan yang dilakukan pasukan Aitarak. Mereka mengikuti mulai dari markas Komando Distrik Militer (Kodim) di samping kantor Gubernur. Suara dar, der, dor, yang ditimbulkan justru mendorong kedua kameramen itu semakin dalam mengikuti perjalanan Aitarak menuju Kuluhan yang mengambil jalur menyisir pantai. Semangat mereka bertambah ketika melihat dua truk Brigadir Mobil melintas wilayah itu menuju Kuluhun.

Baik Eko maupun Sus Irianto memilih menyisir jalur pinggir yang berpasir. Untuk menyamarkan kehadiran mereka berdua, kedua kameramen itu berjalan di antara pohon yang satu dengan yang lain. Dan, di luar dugaan, saat mencapai wilayah Audian, pasukan Aitarak itu langsung memberikan serangan bertubi-tubi dan menghancurkan kantor FPI (Frente Politica Interna), semacam kantor urusan dalam negeri CNRT.

Melihat kejadian itu, baik Eko maupun Sus Irianto semakin maju ke depan. "Dari pohon kelapa yang satu ke pohon kelapa yang lain, saya semakin maju, dan mendekat. Tapi pas saya mau lebih dekat lagi, mereka melihat," kata Eko. Begitu, terlihat, serentak, pasukan itu pun berteriak, bunuh! bunuh! bunuh!

Pasukan Aitarak itu langsung merebut kamera milik Sus Irianto. Saat kameranya terebut, Sus kontan melarikan diri. Lalu, mereka membacok Eko. Namun terkena kamera. Kemudian mereka pun berusaha merebut kamera Eko. Eko bertahan. Karena itu, mereka lalu bertubi-tubi menendang, hingga kamera Eko pecah menjadi dua. Eko yang tak mampu berlari karena berada di tanah berpasir, kemudian jatuh tersungkur di sebuah got berpasir. Sementara di belakangnya, sebagian pasukan Aitarak itu terus berteriak, "bunuh! bunuh! bunuh!"

Dalam posisi tak berdaya ini, seorang pasukan langsung menempelkan sebuah pistol rakitan tepat di kepala. "Tiba-tiba ada orang menubruk saya sambil mengatakan, jangan! jangan! jangan!. Bawa dia ke markas. Tapi saya tidak mengenali wajah orang yang menubruk saya," ujarnya. Eko lalu diseret ke markas Aitarak, di belakang Hotel Dili yang juga tak jauh dari Pangkalan TNI-AL (Lanal). Namun, begitu sampai Lanal, Eko pun melepaskan diri

dan lari masuk ke Lanal yang sudah dijaga marinir. Sekali lagi puji syukur, semuanya selamat.

Mahasiswa Itu Tersungkur, Bersimbah Darah

DOR, dor, dor!

Secepat kilat, dua peluru bersarang di leher Bernadino Guterres. Mahasiswa Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah itu jatuh tersungkur dan bersimbah darah di Jalan 15 Oktober, Audian, tepat di depan biara Santo Paulus dari Chartres.

Hari itu, Kamis, 26 Agustus 1999. Matahari telah condong ke barat. Bernadino ikut bergabung bersama seluruh temannya di Kuluhun. Usai melempar batu kepada peserta kampanye, ia melarikan diri. Sayang, ia terpisah dari kelompoknya. "Provokator!" Tiba-tiba seseorang berteriak keras, sambil menunjuk ke arah Bernadino. Mendengar teriakan itu pasukan Brimob ikut mengejar.

Bagai kijang, Bernadino lari tunggang langgang ke arah Audian. Joao da Silva, ketua pemuda setempat, berusaha memegang dan memeluk, menenangkan Bernadino. Namun ia meronta dan lolos. Bernadino kembali berlari. Seorang berseragam Brimob mencoba menendang, namun, ia tetap berlari. Anggota lain yang masih berada di mobil, mencoba menghadang dengan pintu mobil. Gagal. Bernadino terus berlari dan berlari.

Untuk menghentikan, seorang petugas mengenakan kaos oblong putih dan celana biru memberi tembakan peringatan ke atas. "Sudah, sudah, tidak perlu," kata seorang lain lagi sambil menurunkan tangan penembak yang masih mengarahkan senjata ke udara. Namun, selang beberapa detik kemudian, seorang petugas berseragam Brimob, maju dua langkah. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Sambil tetap meletakkan senjata laras panjangnya di dada, tiba-tiba dor, dor....!

Di luar dugaan, anggota Brimob berwajah putih dan bermata bulat itu menembak pemuda yang ketakutan tersebut. Dalam sedetik, dua peluru bersarang tepat di leher samping, tak jauh dari telinga kiri. Dan Bernadino pun jatuh tersungkur. Darah mengalir dari tubuhnya. Segera jalan beraspal itu tertutup warna merah darah Bernadino.

Untuk sesaat, semua diam. Saya yang tanpa sengaja mengikuti kejadian itu dari awal, pun hanya terpaku. Tak mampu berkata sepatah pun. Semua mata berpaling ke tubuh kurus, berkulit gelap dengan topi merah, dan berbalut celana jeans kumal itu. Si penembak

sendiri, langsung berbalik arah. Dengan tenang ia melangkah ke belakang, kembali berjejer dengan seluruh rekan kesatuannya.

Nyawa Bernadino melayang bersama kerabatnya Marcus Nunes yang juga meninggal dalam peristiwa berdarah itu. Dalam peristiwa itu pula, Virgelio Martin Pinto, mantan anggota DPRD Tk II Viqueque dan Apolinario Pio, keduanya pendukung pro-otonomi, menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Petang itu, kota Dili dipenuhi kesunyian yang mencekam. Hening. Yang tersisa hanyalah raungan tangis pilu seorang ibu yang menyaksikan anaknya ditembak mati. Si ibu lalu diselamatkan dan ditenangkan para suster dari Biara Santo Paulus dari Chartres tersebut.

Beberapa saat kemudian, jenazah Bernadino dibawa ke rumah sakit. Warga lalu mengambil pasir dan batu memberi tanda dan memagari lokasi peristiwa. Mereka pun menempatkan sebuah tong berisi batu. Di tong itu, mereka menempelkan tulisan "Mati Ditembak Brimob"

LANGIT seolah ikut berkabung di petang itu. Temaram. Tak sedikit pun ada semburat warna jingga. Mendung yang menggelantung semakin membuat suasana muram. Senja begitu cepat berganti malam.

Setelah sedikit reda, saya dan Eddy Hasby, kemudian berbalik dan membaur ke masyarakat, mencari keberadaan Kornelis yang hingga petang itu belum terdengar kabarnya. "Oh ya, tadi ada satu wartawan tertembak, tetapi dari koran asing dan sudah dibawa ke RS Motael."

Dan, kami pun panik. Tanpa sadar, kami berdua melangkah ke arah yang berbeda. Tiba-tiba terdengar teriakan begitu keras. "Dangerous. It's too dangerous. Go, go, go!" dari Letkol (Pol) JJ Sitompul. Ia lalu mengusir seluruh wartawan yang masih tetap di lokasi. Seluruh wartawan lalu dinaikkan sebuah kijang terbuka warna biru milik salah satu media terbitan Jepang. Saya panik, saat itu Eddy tak terlihat. Tak ada seorang pun tahu atau melihat posisi terakhir Eddy.

Kami semua langsung menuju RS Motael. Diperoleh informasi Bea sudah dirawat dan selamat. Namun, hingga malam itu, saya belum mengetahui keberadaan Kornelis dan Eddy Hasby. Seluruh badan terasa lunglai. Tanpa sadar, saya tersandar di dinding RS Motael, tepat di samping keranda.

Untuk pertama kalinya selama di Timtim, saya dicekam kekhawatiran yang begitu mendalam akan nasib kedua rekan kerja yang setiap hari bersama-sama itu. Tiba-tiba, setitik air hangat meleleh dan membasahi pipi. Air mataku menetes satu satu dan semakin deras tak terbendung. Pikiran buntu. Setidaknya sudah empat kali ambulans bolak-balik membawa korban Kuluhun. Namun, Kornelis tak tampak juga. Air mata saya semakin deras mengalir.

"Sudah, sudah, mbak yang kuat ya, kita bantu mencari," kata Maria dari Fuji TV.

"Mbak, dikuatkan, ya," sambung Pipit juga dari Fuji TV.

Petang itu, Ezki dari Somet (Lembaga Perlindungan Wartawan di Timtim), Maria, Pipit, dan Kiki (Fuji TV), juga Mindo, dan seluruh wartawan yang ada, mengerahkan tenaga mencari kedua wartawan yang hilang tersebut. Mereka menghubungi berbagai pihak. Dan air mataku semakin deras mengalir.

Dengan suara lirih namun tegas, Pipit mengatakan, "mbak, dikuatkan ya, sudah ada berita, Kornelis diculik, tetapi Eddy belum diketahui."

Mendengar cerita itu, dengan terbata-bata, saya melapor ke Jakarta, setelah mendapat pinjaman telepon genggam dari Fuji TV. Jakarta mengabarkan, Kornelis sudah selamat dan sudah kembali ke rumah dengan beberapa jahitan. Begitu juga Eddy Hasby. Ia pun sudah tiba di rumah Delta Komoro.

Ceritanya, petang itu, dalam suasana yang sudah sangat genting, Anis, anggota polisi yang rela menjadi sopir kami itu nekat kembali ke tempat kejadian dan menjemput kami. Ia kemudian bertemu Eddy, namun tanpa saya. Sedang Kornelis, pagi harinya langsung diterbangkan ke Semarang. Untuk sementara ia bertugas di wilayah aman. Kabar gembira itu segera saya sampaikan kepada seluruh rekan.

Lepas dari RS Motael, kami tidak bisa segera pulang. Kekhawatiran begitu tinggi mencekam. Kami lalu ke Hotel Mahkota, berjaga-jaga bila tidak bisa pulang. Kebetulan, kami semua tinggal di Delta Komoro yang sepenuhnya dikuasai Aitarak.

Pukul 19.00 waktu setempat, muncul informasi Aitarak melakukan operasi di sekitar Komoro. Dan itu semakin memperkecil kemungkinan kami untuk bisa pulang. Kami pun semakin khawatir ketika mendapat kabar, Aitarak pun akan "menghabisi" seluruh wartawan yang ke Uai Mori. "Mereka sudah punya catatannya," kata pembawa informasi itu.

Namun, setelah mengontak ke sana kemari, akhirnya malam itu kami nekat memutuskan pulang. Dengan catatan tidak boleh ke mana-mana dan harus tetap berkumpul, karena dikhawatirkan, malam itu ada gerakan penculikan.

"Biasanya kalau sudah begini lalu disusul penculikan. Dan biasanya mereka beroperasi selepas petang, langsung ke rumah-rumah yang dicurigai," kata seorang putra Timor yang sudah hafal benar dengan pola kekacauan yang terjadi. Yah, kita semua bukan lagi wartawan, yang berada di luar arena, tetapi sudah dianggap sebagai salah satu pemain di tengah gelanggang.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh petugas, entah mengapa, dalam peristiwa di Kuluhun, para anggota Kontingen Loro Sa'e itu sangat terlihat masygul untuk bergerak. Seolah menghadapi satu hambatan yang begitu besar untuk segera menangkap pelaku, misalnya. Atau minimal meredakan suasana, umpamanya dengan melarang pasukan Aitarak itu menghamburkan pelurunya.

Bagaimana pun juga, peristiwa itu tepat terjadi di depan mereka. Mengapa? Ada apa sebenarnya? Pertanyaan itu terus mengganggu benak saya. Sikap dan ketidakberdayaan Kontingen Loro Sa'e itu membuat saya percaya pada keberangan teriakan massa pro-kemerdekaan yang selalu merasa diperlakukan tidak adil oleh para aparat tersebut.

Dalam sekejap, Dili telah menjadi kota mati. Ketegangan mencekam di mana-mana. Roda ekonomi terhenti. Sebagian besar perkantoran dan pertokoan tutup. Tak ada satu pun kendaraan yang melintas. Tak ada pula warung yang buka. Hingga tengah malam, kota itu belum terbebas dari deru tembakan. Gelombang pengungsian mulai terjadi.

Suasana semakin mencekam ketika diperoleh kabar, pasukan Aitarak akan mengulang kembali serangannya. Kabar itu membuyarkan seluruh warga yang tinggal di pusat bentrokan, yaitu Kuluhun, Bekora, dan Santa Cruz. Warga ketiga desa itu terpaksa melarikan diri ke kamp pengungsian sementara di SMU Kolese St Josef, di Balide. Walau begitu, banyak pula warga yang bertahan, dan mengunci pintu karena tidak berani keluar rumah.

Belum kasus Dili terselesaikan, Sabtu (28/8/99), kerusuhan meletus di Oekusi, Ambeno, enklave Timtim. Kubu pro-otonomi dan pro-kemerdekaan terlibat baku tembak yang diikuti dengan pembakaran, di sekitar bundaran kota Oekusi, sekitar pukul 06.30.

Ketegangan di wilayah Ambeno itu mulai dirasa Jumat (27/8/99). Diperkirakan, Jumat malam, kelompok milisi Liquica, Besi Merah Putih (BMP) mengkoordinasikan kunjungan

sekitar 4.000 simpatisan pro-otonomi dari Bobonaro dan Maliana, ke wilayah itu. Mereka menggunakan sekitar 90 kendaraan truk dan bus. Sebanyak 42 kendaraan memasuki Ambeno dari pintu Kefamenanu dan 48 kendaraan lain masuk dari Wini atau arah timur.

Upaya Damai dan Ketegangan Di Bekora

Kamis (26/8/1999). Hari itu tidak seperti biasa, tiba-tiba Markas Besar UNAMET di Dili, dijaga ekstra ketat. Wartawan yang biasanya bebas lalu lalang, cukup hanya menunjukkan tanda akreditasi, hari itu harus melalui pemeriksaan lengkap. Khusus antara pukul 08.00 hingga pukul 09.30, pagar kawat berduri ditambah, panser dan tank pun disiapkan. Helikopter putih bertuliskan UN (United Nations) atau milik PBB, juga terus lalu lalang.

Ada apa gerangan? Tak ada penjelasan pasti. Namun diperoleh informasi, pagi itu Danrem 164/WD Kolonel (Inf) M Noer Muis bertemu Wakil Panglima/Kepala Staf Falintil Taur Matan Ruak. Memang, berbagai pihak, terus mengupayakan perdamaian. Terutama beberapa hari menjelang berakhirnya masa kampanye.

Tak henti mereka berusaha mempertemukan sayap keamanan kedua kelompok, yaitu Pasukan Pejuang Integrasi (PPI), pimpinan Joao Tavares dan Eurico Guterres dengan Falintil. Lebih dari sekali Wakil Panglima/Kepala Staf Falintil Taur Matan Ruak atau pun Komandan Region III Falur Rate Laec turun ke Dili untuk keperluan tersebut.

Diakui, tidak semua pertemuan berhasil. Menurut Danrem Noer Muis, pertemuan pertama hari Rabu, 25 Agustus di Dili, gagal (Hari-Hari Terakhir Timor Timur, hal. 352). Penyebab kegagalan itu pun simpang siur. Tepatnya tidak terjadi komunikasi sepadan di kedua pihak. Panglima PPI Joao Tavares mengatakan, sangat kecewa karena Taur Matan Ruak tidak bersedia hadir. Sebaliknya, melalui pembicaraan via telepon satelit inmarsat dengan saya, Matan Ruak malah mengatakan tidak tahu-menahu tentang rencana tersebut.

Mungkin untuk mengatasi kebuntuan itu, keesokan harinya, Kamis (26/8), Mayjen TNI Sjafrie Samsuddin, Mayjen TNI Kiki Syahnakri, Brigjen TNI Glenny Kairupan, Laksamana Muda Yoost Mengko, Danrem Noer Muis, didampingi Koordinator CNRT untuk Dili Leandro Isaac, menemui Falintil di markasnya Uai Mori, Viqueque. "Maaf, kali ini saya tidak bisa mengajak wartawan," kata Leandro sesaat sebelum pergi. Usai pertemuan, kedua Jenderal kembali ke Jakarta.

Jumat (27/8/99), kembali Markas UNAMET di Balide, Dili, dijaga dengan sangat ketat. Usut punya usut, hari itu dilaksanakan pertemuan rahasia antara kelompok pro-kemerdekaan dengan pro-otonomi. Hadir antara lain Taur Matan Ruak, Leandro Isaac, Danrem Noer Muis, Ketua UNAMET Ian Martin, Brigjen Hayder dan staf.

Namun, entah apa dan mengapa, pertemuan itu terjadi dengan sangat singkat. Matan Ruak yang biasanya ramah, kali ini bahkan sama sekali tak hendak menyapa para wartawan yang menunggu jauh di luar pagar. Ia langsung menuju kendaraan PBB yang tertutup rapat. Konon, telah terjadi perselisihan paham dengan pihak PPI.

Untuk mengatasi kondisi itu, atas prakarsa Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS), UNAMET, dan TNI, termasuk Mayjen TNI Sjafrie Samsuoddin, Mayjen TNI Kiki Syahnakri, Laksamana Muda Yoost Mengko, dan Danrem Noer Muis, hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 1999, disepakati pertemuan di Baucau. Pertemuan itu melahirkan Deklarasi Baucau yang pada dasarnya, kedua kelompok sepakat mengutamakan perdamaian.

Selepas dari perjalanan ke Baucau itu, Eddy Hasby, saya, dan Anis, anggota polisi yang selalu setia mengantar kami ke mana saja itu, berhenti di Faroul, satu-satunya kompleks warung makan yang masih buka di malam itu.

"Apa kabar? Kapan-kapan kita ngobrol, ya."

Tanpa diduga, tanpa disangka, kami mendapat sapaan ramah dari Ruhut Sitompul SH, pengacara berkucir yang belakangan berperan sebagai si Poltak dalam serial televisi Gerhana. Saat itu, ia sedang menyantap hidangan Trenggalek Fried Chicken yang bersebelahan dengan Tulung Agung Fried Chicken dengan beberapa wartawan.

Upaya perdamaian tidak berhenti di situ. Lebih jauh, KPS berupaya melanjutkan dengan rekonsiliasi kelompok pro-kemerdekaan dengan pro-otonomi. Minggu (29/8/99), kelompok pro-otonomi yang diwakili Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) bertemu sayap militer pro-kemerdekaan, Falintil, di Markas Besar UNAMET, Dili. PPI diwakili Wakil Panglima PPI Eurico Guterres dan Fransisco de Carvalho. Sedang Falintil, diwakili Falur Rate Laec (Komandan Region III), Aluc (Wakil Komandan Region I), dan Dikker (Wakil Komandan Region II).

Hari itu seluruh wakil duduk berdampingan dan berselang-seling. Acara itu dihadiri pula Ketua Unamet Ian Martin, Wakil KPS Djoko Soegijanto, Kapolda Timtim Kol (Pol) Timbul Silaen, dan Kepala Polisi Sipil (Civpol) Allan Mile. Melalui pertemuan itu, kedua pihak sepakat melakukan rekonsiliasi, demi terciptanya perdamaian di Timtim.

NAMUN, sebelum perjanjian damai itu terlaksana, sekitar pukul 11.00, Minggu (29/8/99), wilayah Bekora, Dili timur, persis di samping jembatan Kuluhun, sudah terlebih dulu tegang. Sekelompok massa dalam keadaan siap siaga berkumpul di satu tempat sambil membawa batu, parang, pedang, belati, atau panah beracun.

"Dari mana kamu?"

"Dari Jakarta."

"Wartawang?"

"Ya."

"Kami tidak suka kaliang, wartawang Indonesia. Kalian tidak pernah memberitakan dengan benar. Kalian selalu memutarbalikkan fakta. Kami di sini tidak apa-apa, kami tidak bersenjata, tetapi tidak tahu mereka yang di sana, mereka semua bersenjata dan tidak suka wartawang Indonesia."

"Boleh kami ke sana?"

"Tanya dulu pada ketua di sana. Hati-hati, dia bersenjata."

Serentetan ancaman itu kami terima saat memasuki Bekora. Rekan Tri Agung, tambahan tim *Kompas* yang datang bersama rombongan Golkar beberapa waktu lalu, langsung memasang Rosario dan dikalungkan di dada. Sementara, saya dan Kreshna dari Radio 68H tak berani bicara dan langsung jalan ke arah yang ditunjukkan.

"Kita penggal saja kepala tiga orang itu."

Samar-samar masih terdengar umpatan itu saat kami lebih mendekati Bekora. Namun, aneh, tiba-tiba mereka tidak lagi mengumpat. Belakangan kami baru tahu, setelah menurunkan di tempat terdekat, Anis, anggota polisi yang selalu mengantar kami ke mana-mana, mendekati warga Bekora tersebut.

"Jangan dipenggal, mereka orang baik-baik, mereka orang kita juga," kata Anis yang tidak pernah mengenakan seragam polisi itu, dalam bahasa Tetun.

Sesampai di Bekora, tak seorang pun menyapa kami. Bahkan semuanya memandang dengan penuh curiga. Antipati pada Indonesia begitu tinggi di wilayah itu. Selama di tempat itu, kami sama sekali tidak berani menggunakan bahasa Indonesia.

"Don't go far from me," kata Kreshna memperingatkan saat melihat situasi semakin tidak bersahabat. Kami terpaksa menggunakan Bahasa Inggris untuk sedikit mengurangi ancaman yang kami terima. Secara provokatif warga Bekora menunjukkan simpatinya kepada para wartawan yang berbahasa asing, khususnya Portugis.

Walau begitu upaya itu tidak berhasil. Wajah Indonesia kami tetap dikenali. Karena itu, tak ada kata lain dari mereka kecuali bunuh dan penggal kepala, begitu mengetahui asal kami dari Jakarta. Teror serta intimidasi kepada wartawan pun sudah menjadi hal yang bersifat massal. Dalam arti, tiap orang bisa melakukan hal yang sama tanpa pernah tahu masalah, apalagi tahu bentuk korannya.

Dalam kondisi carut-marut itu, kami pun saling terpisah. Saya terbawa arus kerumunan ke arah lain. Entah bagaimana, tiba-tiba saya sudah berada di sebuah ruang penuh dengan kesan mistis. Sebuah kamar berdinding bambu tak terlalu besar, berukuran sekitar 2x3 meter, penuh dengan lilin dan bau dupa. Orang mengatakan, ruang itu adalah kediaman seorang 'lulik' atau 'orang pintar' setempat.

Di tengah kondisi saya yang sendirian dan "tak berdaya" itu, mereka lalu memunculkan cerita pembunuhan a la Bekora yang sangat mengerikan. Biasanya mereka akan menghabisi lawan dengan memenggal leher menggunakan parang atau pedang. Tak hanya sampai di situ, pada kondisi tertentu mereka akan memotong kuping, mencongkel biji mata, dan menguliti korban. Lebih jauh lagi, sesuai dengan tingkat kesalahan atau kebencian yang dirasakan, mereka sampai pada titik mengambil hati atau jantung, lalu menggigitnya.

Hati saya "meradang". Bulu kuduk berdiri tegak. Wajah pun pucat pasi. Cerita itu disampaikan di saat saya berada di ruangan sang lulik, di tengah acungan panah beracun dan parang. Dengan sangat terbata-bata, dalam hati saya hanya mampu memanjatkan sepotong doa, memohon ampun dan keselamatan.

Di Bekora, ada seorang lelaki berbadan kekar, tinggi besar, berambut panjang dengan belahan tengah bak Wiro Sableng dan selalu membawa pedang. Konon, tokoh yang sering dipanggil Amiku ini, tak lagi bisa bicara dengan kata, melainkan hanya dengan pedang. Rata-rata penduduk Bekora adalah pro-kemerdekaan di bawah partai Republica Democratica Timor Leste atau RDTL yang bergaris keras.

Bagai merangkak di bukit terjal, perlahan dan sedikit demi sedikit kami meyakinkan mereka, agar kami bertiga bisa diterima. Perlu waktu hampir satu jam untuk melakukan itu. Beruntung, waktu itu, kami bertemu Afonso Isaac, adik kandung Leandro Isaac yang akhirnya membantu kami untuk bisa lebih diterima di wilayah itu.

KETEGANGAN itu diawali dengan laporan pasukan Aitarak kepada KPS, tentang penculikan dua anggotanya. Aitarak mensinyalir, salah satu anggotanya sudah dibunuh. Menurut Kapolda Timtim Kol (Pol) Timbul Silaen, penculikan dilakukan Joao da Silva,

ketua pemuda setempat. Sekitar seratus anggota polisi bersenjata lengkap berjaga-jaga di sekitar Bekora.

Seperti biasa, persoalan menjadi semakin runcing dengan munculnya berbagai isu yang provokatif. Pada saat itu, muncul isu di kalangan pemuda Bekora, Aitarak mengkhianati janji. Konon, mereka sudah berjanji untuk bertemu secara damai, namun Eurico Guterres mengkhianati janji.

Kata pemuda setempat, pihak Aitarak tidak bersedia berbicara dengan mereka. Namun, sebaliknya, versi Aitarak, merekalah yang terkena kekejaman pemuda Bekora. Sekitar pukul 14.00, massa Bekora sempat bergerak. Namun tidak terjadi bentrokan. Joao da Silva yang tidak pernah meninggalkan panah beracunnya, berkali-kali meyakinkan kami, tidak melakukan semua yang dituduhkan itu.

"Saya tidak melakukan. Dia tidak apa-apa, sekarang ada di rumah sakit," kata Joao. Hal itu diperkuat Afonso Isaac. "Malah dia yang mengangkatnya ke taksi dan membawanya ke rumah sakit," katanya.

Seiring teriknya sinar matahari, suasana semakin panas. Pada saat yang bersamaan diperoleh kabar, sekitar 250 massa Aitarak sudah bersiap-siap di kampung Alor untuk membalas. Diperkirakan, pasukan itu akan menyerang melalui sungai kering di samping Bekora, begitu matahari sudah meredupkan sinarnya. Mereka akan segera melaksanakan serangan bila pihak kepolisian tidak segera menangkap Joao da Silva yang di masa integrasi bekerja sebagai Humas Departemen Penerangan.

Sementara Bekora sendiri melindungi penuh Joao. Mereka siap perang untuk mengamankan Joao. Seluruh pemuda setempat tidak pernah lepas dari parang, pedang, belati, atau panah beracun, dan bom molotov yang sudah disiapkan. "Kostum" itu masih dilengkapi dengan pandangan mata yang mematikan. "Dia (Joao) pasti mati kalau tertangkap," ujar Domingus C da Silva Carvalho, ayah Joao. Domingus yang telah kelihatan renta adalah penerima Satyalencana "Seroja" dari Menhankam LB Moerdani pada tanggal 6 November 1992, dan pernah menjabat Kepala Desa periode 1976-1984.

Untuk mendekati kedua pihak, KPS mengirimkan Riak Leo Laku (Sekretaris Komandan Region IV Falintil) dan Mauhunu (anggota KPS pro-kemerdekaan), serta pihak UNAMET untuk bernegosiasi. Negosiasi berlangsung alot. Namun, sebelum matahari terbenam, Joao da Silva berhasil "diamankan" dan dibawa dalam mobil UNAMET. Setelah Joao dibawa, massa membubarkan diri.

Kami pun kembali ke rumah. Sesaat kemudian, telepon genggam saya berdering.

“Mbak, dengan sangat diminta datang ke kantor Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah).”

“Ada apa?”

“Pak Kapolda ingin bicara.”

“Baik, Pak.”

Begitu selesai mengirim berita, saya bergegas ke kantor Kapolda. Ini kali pertama Pak Timbul Silaen memanggil saya secara khusus.

“Silakan duduk, Mbak,” kata Pak Timbul Silaen begitu saya sampai ke ruang kerjanya.

“Terima kasih, Pak.”

Tanpa banyak basa-basi, Pak Timbul Silaen meminta saya mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap Bernadino Guterres dalam kerusuhan di Kuluhun, Kamis lalu. Pak Timbul mendapat informasi bahwa saya tahu persis pelaku penembakan tersebut.

“Orangnya seperti apa?”

“Orangnya putih, Pak, bermata bulat. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Sangat tenang dan sangat pandai membidik.”

“Mbak masih ingat orangnya?”

“Masih, Pak, saya tidak akan pernah melupakan wajahnya.”

“Dia pakai seragam apa?”

“Brimbob, sepertinya dia juga anggota Kontingen Loro Sa’e.”

Tiba-tiba telepon di meja Pak Timbul Silaen berdering. Ternyata dari Pangdam IX/ Udaya Mayjen TNI Adam Damiri. Dari pembicaraan yang saya dengar hanya dari sisi Pak Timbul Silaen, kelihatannya mereka membahas kasus pembunuhan Placidio Meneses, salah satu Komandan Aitarak. Tak berapa lama, nada suara Pak Timbul Silaen meninggi. Wajahnya tegang.

“Kalau Bapak tidak bisa mengendalikan anak buah di lapangan, kita yang akan saling tembak,” tegasnya.

Kaget saya mendengar ucapan Kapolda itu. Ternyata terdapat perbedaan hasil dari penyidikan TNI dan polisi terhadap kasus pembunuhan salah satu komandan Aitarak tersebut. Dalam arti, TNI lebih cenderung mempercayai seluruh laporan Aitarak.

Sementara saat meninjau ke lapangan, pihak kepolisian menemukan hasil yang berbeda. "Pusing saya kalau begini terus," lanjutnya.

Sesaat kemudian, Pak Timbul Silaen berusaha kembali ke pokok persoalan, yaitu kasus penembakan Bernadino Guterres. Walau tidak secara eksplisit, namun perlahan akhirnya terungkap, meski berseragam Brimob, Pak Timbul sendiri tidak yakin bahwa si penembak Bernadino adalah anggota Brimob.

Saya sendiri tidak tahu persis asal muasal dan alasan di balik keraguan Pak Timbul Silaen. Yang pasti, setelah PBB memutuskan melakukan demiliterisasi di Timtim, PBB menyerahkan seluruh persoalan keamanan Timtim kepada Polisi. Dan memang seluruh anggota Kontingen Loro Sa'e lalu berseragam Brimob.

Namun, anehnya, sering kali para pasukan Brimob itu tidak mengenali diri mereka sendiri. Artinya, ketika saya sapa, sesuai dengan nama yang tertera di dada, mereka diam, tidak secara refleks menyahut. "Maaf, Mbak saya lupa kalau nama saya ini," kata salah satu Mas-mas yang berseragam Brimob, sambil menunjuk nama yang tertera di dada.

Kemarahan Kapolda dipicu oleh tidak ditaatinya aturan yang ia terapkan di Timtim. Waktu itu, dengan tegas Kapolda meminta semua pihak menghindari segala bentuk kekerasan. Dalam hal ini, tampak jelas kekecewaan di wajah Kapolda ketika aturan itu tak diindahkan. Terutama dengan masih banyaknya anggota milisi bersenjata yang berkeliaran.

Masalah Timtim memang tidak hanya memusingkan para perwira tinggi. Bahkan untuk kalangan bintangara, persoalan ini membuat mereka stress cukup berat yang bisa membawa ke aksi saling bunuh di antara sesama. Suatu saat, Leandro Isaac bercerita, di sekitar tempat tinggalnya, Lahane, beberapa waktu lalu terdengar rentetan tembakan. Tetapi, tidak satu pun melukai rakyat. "Tentara yang menembak-nembak," katanya.

Tak jauh dari tempat itu, tepatnya Taibesi, berdiri markas Batalyon Infantri (Yonif) 301/PS. Hari Rabu, 25 Agustus 1999 itu, seorang bintangara menembakkan senjatanya kepada sesama bintangara. Akibatnya, dua perwira terluka dan seorang prajurit tewas seketika.

Terlaksana dengan Sukses

Di tengah segala ketegangan itu, bulan Agustus ditutup dengan keberhasilan pelaksanaan penentuan pendapat di Timtim, Senin 30 Agustus 1999. Sebanyak 98,60 persen pemilih menggunakan haknya dengan baik. Ian Martin, Ketua UNAMET mengatakan, jumlah peserta mencapai 451.792 orang. Dengan perincian, sebanyak 438.513

pemilih menggunakan hak di Timtim dan 13.279 menggunakan hak pilihnya di 13 tempat lain di luar Timtim.

"Proses pemungutan di Timor Timur sudah selesai. Seluruh pos pemilihan yang dibuka pukul 08.00, sudah ditutup dan yang terakhir ditutup adalah di Casa, yang baru ditutup pukul 18.30," kata Jeff Fischer, Ketua Komisi Pemilihan. Menurut Fischer, penghitungan suara memerlukan waktu sekitar satu minggu.



*Menari dan bernyanyi menyambut hari referendum.
foto: Eddy Hasby*

Secara keseluruhan, proses pemungutan suara berjalan lancar, aman dan tertib. Warga datang ke tempat pemungutan yang tersebar di 200 tempat di seluruh Timtim dengan antusiasme tinggi. Mereka pun datang dengan pakaian rapi, bak akan pergi ke gereja. "Hari ini sangat penting karena akan menentukan masa depan kami. Saya senang sekali," kata Fransisca Barros yang berusaha tampil sebagus mungkin. Warga asli Dili namun sehari-hari tinggal di Ermera itu menggunakan hak pilih di SDN IV Bemori. Sejak pukul 05.30 ia sudah mulai antre.

Hal senada diungkapkan Julio Carvalho dari Santa Cruz. Warga tuna netra itu dengan antusias mendatangi tempat pemilihan bersama adiknya, Alfredo Fraga. "Waktu masuk ke bilik, saya dibantu dan ditanya petugas, kemudian saya mencoblos sendiri. Saya orang Timor, jadi harus merdeka," katanya.

Namun, di Ermera, keamanan terganggu dengan insiden di SDN 24 Baboe Leten, Kecamatan Atsabe, sekitar pukul 17.00. Kadispen (Kepala Dinas Penerangan) Polda Timtim Kapten (Pol) Widodo DS menjelaskan, saat akan kembali ke kampungnya, Mattalata, seorang guru SD, Joao Lopes (50), yang menjadi staf lokal UNAMET, dianiaya sekelompok pemuda.

Salah satu dari pemuda itu menikam punggung korban. Korban tewas saat akan dibawa ke rumah sakit. "Sambil berteriak, mereka mengatakan jajak pendapat tidak jujur. Yang dipekerjakan di UNAMET adalah orang-orang CNRT. Orang pro-otonomi tidak ada yang diterima menjadi stafnya," kata Kapten Widodo menirukan para pemuda tersebut.

Selain itu, di TPS Maumetta terjadi keresahan. Di tempat itu, ada empat orang asing yang selalu menanyai setiap warga yang akan menggunakan hak pilihnya. Karena tindakan yang meresahkan masyarakat itu, petugas keamanan lalu menangkap keempat orang yang diketahui tiga orang berkebangsaan Australia dan seorang bekebangsaan Selandia Baru itu.

Keempat orang asing yang terdiri dari Mark Llewella, Richard Charlon, David Nortorn Smith, dan Paul Boocok (Selandia Baru) itu datang ke TPS tanpa disertai identitas apa pun. Petugas juga mengamankan pendamping mereka, Gatrin Suhartono yang juga menjadi penerjemah.

Hari itu, Eurico Guterres yang biasanya bicara keras dan lebih mengisyaratkan "perang", selama pemilihan justru berpendapat lain. Wakil Panglima PPI itu menghembuskan angin perdamaian. Sedikit mengejutkan memang. Waktu itu ia mengatakan, "apapun hasilnya akan diterima. Kita sudah sepakat pada waktu Dare II itu, tetapi bukan berarti yang menerima anti atau pro. Rakyatlah yang menerima."

Pada saat pemilihan, Eurico datang tepat pukul 09.00 dan sama sekali tak terlihat membawa senjata. Ia didampingi dua anak dan isterinya, serta beberapa anak buahnya. Eurico memilih di tempat pendaftaran SDN Formosa, Bairo Central, Dili timur. Komandan Aitarak itu bernomor pendaftaran 024 1 445 dengan nama Eurico Barros Gomes Guterres.

Tak berapa lama kemudian, terlihat massa berduyun-duyun mengelilingi sebuah mobil. Mereka menyambut kehadiran Uskup Belo yang juga menggunakan hak pilihnya di tempat yang sama. Karena kerumunan itu, Uskup yang antara lain didampingi Fransisco Kalbuadi, terpaksa menggunakan mobilnya hingga ke bilik pendaftaran.

"Saya tidak khawatir tentang hasil penentuan pendapat pada hari ini sampai saat diumumkan, karena hari ini yang datang ke sini untuk menentukan pilihan, bukan masyarakat pro-integrasi dan bukan juga masyarakat pro-kemerdekaan, tetapi yang datang hari ini adalah masyarakat Timor Timur yang ingin menentukan pilihan." Eurico bicara hanya dalam bahasa Indonesia dan menolak pertanyaan dalam Bahasa Portugis.

Bahkan Eurico tidak hanya bersedia menerima hasil penentuan pendapat, melainkan termasuk menerima Xanana Gusmão sebagai pemimpin bila pada akhirnya dimenangkan pro-kemerdekaan. "Sekarang tinggal bagaimana elit politik mempertanggungjawabkan semuanya. Jangan hanya dia berbuat, setelah itu pergi," ujarnya. Kehadiran mereka di Timtim untuk bersama-sama rakyat menentukan pilihan, oleh Eurico Guterres sebenarnya sudah dinilai sebagai salah satu bentuk tanggung jawab.

"Sekarang Anda bisa lihat, elit politik mana yang di sini, mereka semua hanya bisa mengikuti jajak pendapat di Jakarta dan di Bali, di Australia dan Lisabon, seharusnya *kan* datang ke sini bersama-sama rakyat," tegasnya. "Apapun yang nanti terjadi, rakyat Timtim tidak akan percaya pada elit politik yang menentukan pilihan di Australia sana. Tidak mungkin, bahkan dia datang ke sini juga tidak akan diterima," kata Eurico.

Ia menekankan, pihaknya sudah membuat daftar orang yang ia maksudkan sebagai kelompok elit politik tersebut. Dubes Keliling Lopez da Cruz, banyak disebut sebagai orang pertama yang terdaftar, dari kelompok pro-otonomi. Sedang Leandro Isaac, mantan Sekretaris Wilayah Daerah Kovalima sebagai daftar pertama dari pihak pro-kemerdekaan.

Bab IV

September Kelabu

SELASA, 31 Agustus 1999 adalah hari sangat bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Telah sekian lama, negara berpenduduk lebih dari 200 juta ini terpuruk dan menjadi bulan-bulanan dunia oleh persoalan Timtim. Dan kini, untuk pertama kalinya, dunia mengangkat topi, memberi pujian kepada Indonesia dalam kasus Timtim.

Di tengah riak-riak kecil yang terjadi, dunia internasional tetap menganggap Indonesia berhasil melaksanakan dengan baik penentuan pendapat di Timtim. Sekjen PBB Kofi Annan dan negara-negara penting lain memuji keberanian rakyat Timtim untuk memberikan pendapatnya dalam menentukan masa depan provinsi ke-27 RI tersebut. Kofi Annan juga memuji Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai penanggung jawab keamanan selama pelaksanaan penentuan pendapat. Begitu pun Amerika.

Bahkan pujian itu mampu menarik minat Portugal untuk mencairkan kebekuan hubungan kedua negara. Lebih jelasnya, Portugal berharap bisa membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. "Jika penyelesaian Timtim ini tercapai, maka Portugal bermaksud memantapkan kembali hubungan diplomatik pada level tertinggi dengan Indonesia," kata PM Portugal Antonio Guterres di Lisabon (*Kompas*, 1/9/99).

Sayang, nyanyian pujian itu hanya bergaung seumur jagung. Kondisi semakin panas. Anehnya, perkembangan dan peristiwa yang terjadi justru selaras dengan dokumen HR Garnadi yang telah dibantah habis oleh pemerintah Indonesia, namun telanjur bocor ke mana-mana. Dokumen itu memang tidak lagi saya miliki. Namun, masih tercatat dengan rapi di kepala saya, rencana yang tertera dengan rinci tentang evakuasi, bahkan 'pembersihan' Timtim bila otonomi kalah.

Hanya belasan jam setelah penutupan jajak pendapat, meletus kerusuhan di Ermera. Di hari pertama September, Timtim kembali dicekam kesunyian, tak ubahnya kota yang sudah benar-benar mati. Sekelompok milisi menghadang dan mengepung sekitar 150 staf UNAMET di Ermera, tepatnya dari Atsabe dan Gleno, saat mereka sedang dalam

perjalanan menuju Dili. Informasi yang dihimpun menyebutkan, serangan itu antara lain karena mereka merasa UNAMET tidak netral dan curang.

Sesaat ketegangan terjadi di kedua pihak. Seluruh kelompok milisi itu sempat mengepung selama 10 jam. Namun, akhirnya, seluruhnya selamat, tak satu pun cedera. Sekitar pukul 19.00, mereka semua sudah tiba di Dili. Jubir UNAMET David Wimhurst menyebutkan, dari jumlah itu, 50 di antaranya adalah staf lokal, dan 100 lainnya staf internasional.

Genderang Perang

DAN, bila kemarin, Eurico Guterres, Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi yang juga Komandan pasukan Aitarak, masih menghembuskan angin perdamaian, hari ini, Rabu (1/9/99) ia menabuh genderang perang. Ia benar-benar melaksanakan niatnya memblokade seluruh akses keluar dari Timtim, baik darat, laut, maupun udara untuk mencegah orang yang dianggap elit politik, keluar dari Dili.

Pagi itu, mulai bersiaga sejumlah pasukan Aitarak, lengkap dengan pakaian "kebesarannya", celana hitam, kaos ketat lengan panjang yang juga hitam, dengan tulisan "AITARAK" besar di punggung, lengkap dengan topi, baret, topi berambut panjang.

Secara berseloroh, seorang kawan pernah meminta saya mengamati jenis dan model huruf yang digunakan untuk menuliskan AITARAK, dengan jenis dan model huruf yang digunakan untuk menuliskan salah satu kesatuan tentara. "Sama *kan*," ujarnya sambil tertawa. "Wong, bikinnya bareng," lanjutnya. Dan, saya pun tersenyum di kulum.

Mereka berjaga-jaga di jalan raya Komoro, satu-satunya jalan keluar dari Dili ke arah Liquica, bandara Komoro, pelabuhan Dili, serta di beberapa sudut kota. Hari itu, sebagian warga Timtim terlihat mulai bergerak meninggalkan Dili. Sebagian menumpang kapal Dobonsolo, sebagian lain terpaksa menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan umum sama sekali sudah tidak beroperasi. Bahkan tiket pesawat Merpati Nusantara, satu-satunya maskapai penerbangan komersial waktu itu, hingga tanggal 16 September 1999 sudah habis dipesan.

Jangankan kendaraan umum, mencari kendaraan sewaan pun sudah sangat sulit. Kalau pun ada, harus dengan harga sewa yang sangat tinggi, berkisar antara Rp 200.000 per hari untuk dalam kota dan Rp 500.000 hingga Rp 600.000 perhari untuk keluar kota jarak

terdekat. Seiring dengan itu, perekonomian Timtim pun mulai kacau. Perlahan rodanya terhenti.

"Saya boleh minta izin untuk tanggal 2 (September) nanti," kata Anis. "Suasana semakin tidak menentu, saya ingin mengungsikan keluarga saya ke Kupang, tanggal 2 nanti. Terus saya sendiri kembali ke sini," jelasnya. Dengan jujur Anis mengatakan, ingin memindahkan "Bule", anak lelakinya yang masih balita, ke tempat yang lebih aman. Memang, selama bersama kami, Anis tak pernah lupa bercerita tentang "Bule". Matanya selalu berbinar tiap kali mengucapkan "Bule" sebutan untuk anak lelakinya. "Karena putih, kami sebut saja bule," katanya.

Sesaat kemudian, eksodus warga Timtim mulai terjadi. Meski memblokir, pasukan Aitarak itu tidak menghalang-halangi kendaraan-kendaraan yang akan meninggalkan Dili. Mereka pun tidak menutup pintu bandara Komoro, atau pelabuhan Dili. Sebagian besar pasukan itu hanya mengawasi setiap kendaraan atau orang yang mendatangi bandara dan pelabuhan Dili. Mereka akan membiarkan seluruh orang itu pergi, bila memang bukan orang yang dicari.

Eurico Guterres mengakui, hari itu belum ada satu pun tokoh elit politik yang mencoba meninggalkan Dili. Ia menegaskan, hanya akan menghalangi tokoh elit politik, baik dari pro-kemerdekaan maupun pro-otonomi untuk keluar dari Timtim, bukan keluarganya.

"Mereka harus bertanggung jawab atas kehidupan rakyat Timtim setelah penentuan pendapat. Orang seperti Leandro Isaac (koordinator CNRT Dili), tidak boleh meninggalkan Timtim. Dia punya peran membuat rakyat seperti ini. Kalau anak dan isterinya mau meninggalkan Timtim, silakan, karena yang bermain politik bukan mereka," kata Eurico. Sementara di daerah perbatasan, kelompok Besi Merah Putih melakukan hal yang sama.

DILI kembali mencekam, tak ubahnya kota yang sudah benar-benar mati. Rabu (1/9/99) itu, jenazah Plasio Meneses (40) dimakamkan. Komandan Aitarak untuk Pos 15 Santa Cruz itu dibunuh kelompok pro-kemerdekaan, pimpinan Joao da Silva, ketua pemuda wilayah Bekora, Minggu lalu. Hari itu, Bekora sudah tak lagi berpenghuni.

Ratusan anggota milisi gabungan antara Aitarak dan Besi Merah Putih, dengan puluhan kendaraan, mengarak jenazah Plasio Meneses, setelah menjalani autopsi di RS

Wirahusada, ke Dili. Untuk sesaat, jenazah itu disemayamkan di markas Aitarak, Hotel Tropical, Dili.

Plasidio ditemukan sudah menjadi mayat, terpendam di tanah sedalam 60 sentimeter, di lereng bukit Fatuahi, Dili timur. Kadispem Polda Timtim Kapten (Pol) Widodo DS mengatakan, saat ditemukan, jenazah dalam kondisi terbungkus terpal. Widodo menjelaskan, penemuan itu didasarkan pada pengakuan awal, Domingus, tersangka pertama yang ikut menusuk korban. Domingus sendiri waktu itu langsung melarikan diri, namun segera tertangkap.

Pengakuan Domingus ini kemudian dikonfirmasi kepada Joao da Silva yang kemudian tidak bisa lagi mengelak, bahkan ia lalu menyebutkan lokasi korban. Setelah menemukan bukti ini, polisi akan segera memproses Joao yang saat itu masih berada di kantor UNAMET.

Begitu melihat jenazah Plasidio di Hotel Tropical, terbayang dengan jelas cerita pembunuhan a la Bekora yang saya dengar minggu lalu. Plasidio mengalami luka bacok di leher hingga hampir putus. Persis di tengah dadanya, terdapat lubang segi empat yang cukup dalam.

Kepercayaan saya pada Joao da Silva langsung sirna. Waktu itu Joao berkali-kali meyakinkan tidak terjadi pembunuhan di tempat itu. Menurut Joao, yang terjadi adalah perkelahian. Katanya, waktu itu, warga Bekora sedang mengadakan sweeping. Mereka menghentikan Plasidio yang melintas di wilayah itu dengan sepeda motor. Karena Plasidio menolak berhenti, perkelahian pun terjadi.

"Motornya nabrak tembok itu," kata Joao sambil menunjuk salah satu tembok yang rusak. Katanya lagi, Joao mengangkat korban dan memasukkan ke dalam taksi hijau menuju rumah sakit. Entah ini sudah cerita versi keberapa. Yang pasti, kasus ini benar-benar melunturkan kepercayaan saya kepada warga setempat.

Setelah sejenak disemayamkan, sekitar pukul 10.00, dalam arak-arakan panjang, jenazah Plasidio dibawa ke tempat pemakaman para Pejuang Integrasi, di Raikato. Ia dimakamkan dalam sebuah upacara selayaknya "militer", dan langsung dipimpin Komandan Aitarak, Eurico Guterres. Pemakaman itu dihadiri pula aktivis pro-kemerdekaan Mauhudu dan Mauhunu, serta Riak Leo Laku dari Falintil.

"Sweeping" Wartawan

Upacara pemakaman salah satu Komandan Aitarak itu terjadi hingga pukul 13.00. Entah mengapa, seluruh pandangan orang-orang yang saya temui di tempat itu sama sekali tidak bersahabat. Yang biasanya ramah, tiba-tiba tidak bertegur sapa. Bahkan Walikota Dili Mateus Maia yang biasanya akrab, hari itu seolah tak hendak kenal. Waktu itu saya pikir karena sedang dalam suasana duka. Tetapi sorot mata orang-orang itu sama sekali tidak menampakkan kedukaan, melainkan justru pandangan yang tajam, menerkam.

Rabu, 1 September 1999, aktivitas kota Dili berjalan seperti biasa. Tidak menentu. Kemarin mencekam, hari ini ramah, dan mungkin satu jam kemudian sudah kembali menakutkan. Siang itu, kota Dili agak ramah. Usai makan siang di tempat biasa, TFC (Trenggalek atau Tulung Agung Fried Chicken, yang menjadi langganan karena tidak ada yang lain), seperti biasa, kami semua kembali ke markas *Kompas*. Sore itu saya melangkah menemui Ketua Satgas P3TT Dubes Agus Tarmidzi.

Kami membicarakan seputar pelaksanaan jajak pendapat. Secara teori, sejak hari itu, sebenarnya tugas Satgas P3TT secara resmi berakhir. Saya mencari tahu bagaimana posisi wartawan dan warga Indonesia umumnya yang masih bertahan, setelah jajak pendapat nanti. Saya juga menanyakan masalah keamanan bagi wartawan yang akan tetap tinggal, hingga evakuasi terakhir.

Tiba-tiba, telepon di rumah Dubes Tarmidzi berdering, mengabarkan bahwa Pangdam dalam perjalanan menuju ke kediaman Ketua Satgas P3TT tersebut. Beberapa saat kemudian, sekitar pukul 14.45 waktu setempat, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Adam Damiri tiba di kediaman Pak Agus Tarmidzi.

Begitu Pangdam hadir, saya pamit pulang. Namun sebelum pamit, Dubes Agus Tarmidzi sempat menitipkan kepada Pangdam nasib para wartawan yang tetap akan tinggal di Timtim.

"Nantinya, keselamatan wartawan bukan lagi tanggung jawab Satgas P3TT, karena tugas mereka secara resmi berakhir, mungkin langsung akan kami ambil alih. Sudah pokoknya tidak usah khawatir," kata Pangdam. Ia sangat ramah.

Mendengar kalimat itu saya lega dan segera pulang. Di jalan, saya lihat Kiki dari Fuji TV sedang menyiram tanaman. Maklum rumah kami bersebelahan.

"Mampir.., dari mana?"

"Dari rumah Pak Agus Tarmidzi."

"Ada apa?"

"Ada Pangdam."

Kepada Kiki dan Pipit saya menyampaikan pesan Pangdam bahwa tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan, terutama bagi wartawan yang akan tetap tinggal di Timtim, minimal sampai evakuasi terakhir.

"Jadi tenang saja, ada jaminan dari Pangdam," kata saya sambil ngeloyor pulang. Sampai di rumah, saya mengambil selang untuk menyiram tanaman.

Wah seger sekali, lo, Mbak," sapa Pak Djadnan saat berjalan kaki lewat depan rumah. Pak Djadnan sedang menuju kantor Satgas P3TT yang terletak persis di depan rumah kontrakan *Kompas*.

"Ya, Mas, ini satu kemewahan.. Di Jakarta mana mungkin menulis berita sambil diselain nyiram tanaman di halaman.. Boro-boro taman di halaman, halamannya saja *nggak* ada,"

"Ya, betul.." kata Pak Djadnan sambil tertawa.

Tiba-tiba saya melihat Pipit tergopoh-gopoh lari ke arah kami. Ia memberi kabar, menjelang petang itu, kelompok milisi menyerang kantor UNAMET di Balide. Secepat kilat kami, Pipit, Kiki, Kreshna, Eddy, Joao Baretto, putera Timtim yang menjadi koresponden Fuji TV dan saya pun berlari ke Balide.

Dan, dor, dor, dor, dor, dor.....

Baru tujuh langkah kami berjalan, turun dari mobil sewaan Fuji TV itu, terdengar suara peluru yang dihamburkan dengan membabi buta. Di keremangan senja itu, kami disambut dengan berondongan peluru.

"Lariiii, cepat lariiii!!!"

"Ayo, lariiii!!," kata seseorang sambil menarik lengan saya. Tak jelas siapa yang menarik tangan saya waktu itu. Yang pasti ia melihat saya sempat terpaku sesaat di tempat. Kami semua lari tunggang langgang dan terpencar ke mana-mana.

Rentetan peluru terus berdesing dan terasa langsung diarahkan kepada kami. Masing-masing sibuk menyelamatkan diri. Waktu itu saya lihat Kreshna di depan saya, tetapi dia begitu cepat berlari, dan hilang entah ke mana.

Dalam kondisi genting seperti ini, biasanya Kreshnalah yang selalu berada tak jauh dari saya. Namun, saat itu tak mungkin saya mengejarnya. Akhirnya saya lihat Kiki berbelok ke arah Universitas Timor Timur (Untim). Tak ada pilihan lain, saya pun ikut berbelok, dan

melompat pagar Untim, kami bersembunyi di balik tembok Untim. Tembakan tak juga reda.

Sementara kami bersembunyi beberapa wartawan yang lebih dulu hadir, terjebak di kantor UNAMET Balide. Tiga anggota milisi memukuli koresponden BBC News untuk Indonesia Jonathan Head dengan popor senjata laras panjang dan menendang kepalanya. Beruntung, Jonathan bebas dari bacokan karena diselamatkan oleh rompi yang ia kenakan. Salah satu kekerasan oleh milisi itu bahkan terekam kamera CNN (*Kompas*, 3/9/99).

Masih dengan nafas terengah-engah, jantung berdebar kencang, dan peluh bercucuran, saya berusaha mengontak kediaman Pak Agus Tarmidzi, untuk mengabarkan kondisi ini. Saya yakin Pangdam masih di sana. Baru sekitar 15 menit lalu Pangdam menjamin keamanan kami dan sekarang kami semua diberondong puluhan peluru. Tetapi telepon selalu sibuk.

Beberapa saat kemudian, sebuah kendaraan parkir di depan pagar Untim. Nafas kami yang masih terengah-engah dengan jantung yang berdegup tak keruan, berdetak lebih kencang. Saat tembakan reda dan suasana mulai sepi, kami baru berani keluar dari tempat persembunyian.

Dan, kami dibantu orang yang memarkir kendaraan di depan pagar Untim. Ia seorang "bule". Ia lalu menggabungkan kami dengan rekan-rekan lain. Ternyata ia adalah orang Australia yang bertugas di Timtim, tak jelas apakah dari kedutaan atau intelijen. Tapi kelihatannya lebih mendekati intelijen.

Suasana waktu itu benar-benar kacau. Tak jelas mana kawan dan mana lawan. Kami semua berdiri agak jauh dari lokasi penyerangan, yang berbatas pagar pasukan Brimob. Hari semakin gelap. Suasana semakin tidak menentu. Tiba-tiba mobil milik Civpol PBB yang diparkir di sekitar kami, dua bannya mendadak pecah. Jelas terlihat ban mobil yang diparkir tepat di depan asrama polisi Balide itu pecah oleh senjata tajam. Padahal beberapa menit sebelumnya, ban mobil itu dalam keadaan utuh. Melihat kejadian itu, kami memutuskan meninggalkan tempat dan segera kabur. Semakin petang, keadaan semakin gawat. Batas kawan dan lawan semakin samar.

"Tolong, malam ini pindah dari rumah. Malam ini akan ada sweeping mencari wartawan *Kompas*. Maaf kami tidak bisa melindungi," kata seorang klandestin, melalui telepon genggam, saat kami meninggalkan Balide, menuju kompleks Delta Komoro. Diperoleh informasi, ada "instruksi" resmi untuk "menghabisi" wartawan *Kompas*. Entah

mengapa, telepon genggam saya seharian tidak bisa dihubungi. Karena menurut sang klandestin, ia berusaha mengontak saya dari tadi pagi dan baru tersambung petang itu.

Ia lalu bercerita, instruksi itu menyebutkan, saya akan diculik selepas Maghrib. Setelah dicomot dari rumah, konon, saya akan diinterogasi oleh seseorang tentang aktivitas saya di pihak pro-kemerdekaan. Reka pembunuhan terhadap saya akan dilaksanakan dengan cara mutilasi keesokan harinya. Potongan tubuh saya akan di buang di beberapa tempat. Dengan begitu, jasad saya tidak akan pernah ditemukan. Jika semua itu terlaksana, saya mungkin akan menjadi penghuni daftar panjang orang hilang di Timtim.

Sang klandestin menyampaikan informasi itu, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kepada pemimpin tertinggi Falintil, Taur Matan Ruak. Setelah mengenal lebih dekat dan memahami resiko cukup berat yang kami hadapi, Matan Ruak mengeluarkan perintah khusus kepada seluruh anak buahnya untuk melindungi dan menjaga keselamatan kami.

Sedang tentang rencana pembunuhan itu sendiri, entah benar atau tidak, menurut informasi yang saya terima, instruksi itu dikeluarkan dalam rapat tertutup pihak pro-otonomi yang antara lain melibatkan Aitarak dan beberapa anggota FPKD, Selasa, 31 Agustus 1999 malam. Beruntung banyak klandestin yang juga menjadi anggota Aitarak dan ikut dalam rapat tersebut.

Di mata mereka, saya telah melakukan dosa yang tak terampuni karena memberi porsi seimbang dalam pemberitaan kepada pihak pro-kemerdekaan. Jaringan hubungan yang saya ciptakan dengan kelompok pro-kemerdekaan dan Falintil juga memunculkan tuduhan bahwa saya tidak berjiwa nasionalis. Dosa semakin besar dan posisi saya bersama teman-teman semakin terancam ketika *Kompas* menurunkan laporan tentang Falintil berikut wawancara khusus dengan Matan Ruak dalam tiga halaman penuh di satu edisi, tepat di HUT Falintil ke-24.

Namun, dalam pengamatan saya, mereka marah karena sebagai wartawan harian nasional terbesar di Indonesia, saya telah menghapus “garis batas” yang digambarkan dengan begitu tegas dalam membelah antara pro-otonomi dan pro-kemerdekaan. Kondisi itu memaksa wartawan juga terpecah menjadi dua kelompok, yaitu wartawan pro-otonomi dan pro-kemerdekaan.

Bisa dipastikan, wartawan yang bertugas di sisi pro-otonomi tidak akan berani menyeberang ke pro-kemerdekaan dengan adanya serentetan ancaman dari penculikan hingga pembunuhan. Begitu juga, wartawan pro-kemerdekaan. Mereka tidak akan berani

coba-coba ke kelompok pro-otonomi. Dalam kasus ini, profesionalisme dan aspek netralitas wartawan benar-benar dipasung.

Keputusan saya mempertahankan profesionalisme, kredibilitas, dan netralitas dengan “menyeberang” ke kelompok pro-kemerdekaan dan menempuh segala resiko itu, telah memudahkan garis batas yang membelah wartawan menjadi dua kelompok tersebut. Karena, setelah itu, hampir seluruh wartawan harian nasional, bahkan TVRI pun meliput HUT Falintil di markas besar mereka, Uai Mori, Viqueque. Hal yang semula hampir tidak mungkin.

"Mbak, mereka akan menghabisi siapa saja, kalau *Kompas* tidak ditemukan," lanjut sang klandestin. Volume suaranya diperkeras dan dengan nada lebih tegas. Sesaat saya “tertegun”. Diam seribu bahasa.

“Ada apa, Mbak?” Pertanyaan Eddy membuyarkan lamunan saya.

“Telepon dari klandestin, Ed.”

“Apa katanya?”

“Malam ini saya akan diculik.”

Sontak Pipit, Kiki, Eddy, Kreshna, dan Bareto terdiam.

“Mereka akan menculik siapa saja, wartawan Indonesia, kalau saya tidak ditemukan.”

Setelah bisa menguasai diri dengan lebih baik, informasi itu langsung saya sebar kepada seluruh wartawan, khususnya wartawan Indonesia. “*To all Indonesian journalists, please stay where you are. Don't go anywhere and don't dare to be alone, even in your own house!*” Pengumuman singkat itu saya sampaikan melalui Ezki dari Somet. Secara singkat pula saya ceritakan kepadanya tentang rencana penculikan kepada saya atau wartawan mana pun jika saya tidak ditemukan.

Petang itu, saya melaporkan diri ke Koordinator Satgas P3T1, Pak Sudjadnan Parnohadiningrat yang didampingi Pak Yamashita Lahay. Suasana kembali mencekam. Saat berjalan kaki menuju rumah Pak Djadnan yang memang tak jauh dari rumah kontrakan kami, saya bertemu Pak JJ Sitompul, polisi yang paling sering kami “ganggu” dan benar-benar concern dengan keselamatan seluruh wartawan. Seiring dengan semakin gentingnya keadaan, malam itu ia secara khusus berkeliling memastikan keberadaan tiap wartawan.

“Mau kemana?” tanya Pak Sitompul.

“Ke rumah Koordinator Satgas P3T1,” jawab saya singkat.

“OK, hati-hati! Segera pulang dan jangan ke mana-mana lagi dan sampaikan kepada seluruh wartawan agar malam ini mereka diam di rumah, tidak berkeliaran sendiri,” pesan Pak Sitompul. Ia mengatakan kalimat itu dengan penekanan-penekanan yang sangat tegas. Seolah ia tahu persis dan benar-benar paham apa yang akan terjadi malam itu, tetapi tak kuasa mencegahnya.

“Baik, terima kasih, Pak!”

Begitu sampai di kediaman Pak Djadnan, tak lagi saya mampu berbasa-basi.

“Mas, saya minta tolong disampaikan kepada Pak August Parengkuan, atasan saya di *Kompas* Jakarta, jika mulai malam ini saya tidak lagi mengirim berita, berarti saya telah diculik dan untuk selanjutnya saya tidak tahu. Menurut rencana, malam ini saya diculik di rumah. Saya titip teman-teman.”

“Lho, ada apa ini. Terus Mbak Rien mau ke mana?” kata Pak Djadnan.

“Saya mau menunggu penculiknya di rumah. Saya tidak ingin teman-teman lain juga menjadi korban. Karena semua ini salah saya.”

“Tidak. Tidak. Tidak bisa begitu,” lanjut Pak Djadnan. Ia lalu berbicara dengan Pak Yama. Saya hanya terdiam. Hati saya berdegup sangat kencang.

“Sudah, sekarang begini saja,.. Rien pulang, siap-siap. Satu jam lagi Rien dan teman-teman saya jemput,” kata Pak Yama dengan sangat tenang dan sangat kebabakan.

“Pokoknya, keselamatan kalian masih tanggung jawab kami,” sambung Pak Djadnan.

“Baik, terima kasih.”

Saya pun kembali ke rumah. Dibantu Eddy, kami melaporkan seluruh kejadian kepada Pak August Parengkuan di Jakarta via Inmarsat. Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, kami berkemas-kemas, khususnya Eddy karena perangkat foto dia sangat banyak.

Beruntung, masih ada rekan Tri Agung Kristanto yang waktu itu tetap tinggal di rumah, sehingga justru bisa menuliskan berita. Hari itu ia dalam kondisi tidak sehat, sehingga saat kami menuju Balide, ia memilih beristirahat di rumah. Karena itu, saat kami diberondong peluru, ia tidur di rumah. Kondisi ini sangat menguntungkan, karena justru ada pihak yang bisa menuliskan kejadian yang kami alami.

Sesaat kemudian, terdengar suara klakson dari luar. Pak Yamashita Lahay sudah siap menjemput kami. Dan secepat kilat, kami semua; Eddy Hasby, Tri Agung Kristanto, Kreshna Astraatmadja (Radio 68H), dan saya langsung angkat kaki dari rumah. Alangkah

terkejut, di jalan, mobil bertuliskan "UN" berderet-deret dengan kawalan petugas. Ternyata, pasukan PBB pun mulai mengevakuasi diri.

Untuk sementara, kami “diamankan” oleh Pak Yama. Kami dibawa ke rumah sewaan Satgas yang lain. Sebuah rumah kayu yang sangat indah. Kami tidak sempat berpikir rumah itu sebenarnya milik siapa. Malam itu, tak sepingin pun kami mampu memejamkan mata. Nasib antara hidup dan mati, serasa tinggal sebatas rambut. Sambil menunggu pagi, malam itu kami merencanakan cara melarikan diri dengan aman. Namun, tak satu pun jalan ditemukan.

Kompas Jakarta mencoba mengontak Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, meminta bantuan. Atas instruksi dari *Kompas* Jakarta, kami disuruh meminta bantuan salah satu anggota TNI setempat, anak buah Pak Sjafrie, yang menurut Jakarta sangat bisa dipercaya. Maklum, kami memang menuntut syarat itu. Malam itu, kepercayaan kami kepada TNI telah luntur dan hilang musna. Kami meragukan kredibilitas pasukan yang telah ditunjuk.

Sesaat kemudian, telepon di rumah persembunyian kami berdering. Kontak pun dibuka. Pak Yamashita Lahay tidak begitu saja melepas kami berkomunikasi dengan anggota TNI tersebut. Ia khawatir si penelepon justru pihak lain yang mengaku anggota TNI yang telah ditunjuk, tetapi justru untuk “melenyapkan” saya dan teman-teman.

Karena itu, baik Pak Yama maupun kami sendiri sangat susah memastikan apakah anggota TNI itu benar-benar mau menyelamatkan kami atau justru menyengsarakan kami. Untuk beberapa saat Pak Yama terus menyembunyikan kami dengan mengatakan, kami tak lagi berada di sana dan sudah dipindah ke tempat lain.

“Maaf, Pak, mereka tidak ada di sini,” katanya.

“Tolonglah Pak, kami ini benar-benar ingin menyelamatkan mereka,” kata anggota TNI tersebut.

“Dari mana kami tahu bahwa Anda akan menyelamatkan mereka,” sambung Pak Yama.

Setelah bernegosiasi sesaat, akhirnya, Pak Yama mengizinkan kami berbicara melalui telepon dengan anggota TNI tersebut. Kisah pelarian pun digelar. Skenario pertama, kedua petugas akan menjemput kami di persembunyian, lalu dikawal hingga perbatasan Atambua, dan dilepas di sana.

"Kalau mau, besok jam lima pagi kami jemput. Maaf, kemampuan kami hanya mengawal sampai di Atambua, karena pasukan kami tidak banyak," jelasnya. Dari obrolan

itu, kami tersadar, betapa banyak “komandan” di Timtim, lengkap dengan ‘kavling’ wilayah dan anak buah masing-masing. Mereka pun memiliki “atasan” di Jakarta yang juga berbeda-beda.

Pak Yama akhirnya luluh ketika dialog sampai pada keseriusan kedua anggota TNI tersebut dalam melaksanakan perintah Pak Sjafrie untuk menyelamatkan kami. Mereka sendiri yang akan mengawal kami sampai Atambua. Mereka tidak bisa percaya kepada para personel lain di lapangan dalam radius di atas lima kilometer. Meski sama-sama tentara dan berada pada wilayah yang sama, namun kenyataannya mereka “mengabdikan” pada atasan yang berbeda.

Saya sampaikan usulan itu kepada Eddy Hasby dan Pak Yama. Kami bertiga saling berpandangan.

"Tidak, Mbak Rien. Kita harus menolak tawaran ini," tegas Eddy.

"Begitu dilepas di Atambua, habis kita di sana," lanjutnya.

"Jangan, kita cari alternatif lain saja," sambung Pak Yama kalem.

Dengan sifat kebapakannya, terasa sekali Pak Yama sangat tenang dan arif dalam menghadapi situasi genting seperti ini. Dengan serta merta, tawaran ini pun langsung kami tolak. Dengan alasan, Atambua belum akan menjamin keselamatan kami, karena di tempat itu justru menumpuk seluruh pasukan integrasi yang selama ini dikatakan selalu mencari-cari kami. Akhirnya, kami hanya termangu. Tak sepingin pun kami dapat memejamkan mata. Kontak dengan Jakarta terus berlanjut.

Setelah rapat ‘internal’ itu, Pak Yama menyampaikan kepada kedua personel tentara tersebut bahwa kami tidak siap berangkat ke Atambua. Walau begitu, Pak Yama berterima kasih pada ketulusan kedua personel tentara tersebut. Meski tidak pernah bertemu, pada akhirnya, justru mereka menjadi salah satu narasumber saya ketika berada di Jakarta. Dan saya percaya, waktu itu mereka benar-benar tulus ingin membantu.

Sesaat pikiran kami buntu. Tak mungkin kami melarikan diri dengan jalan darat. Semua sisi dan sektor sudah dipegang pasukan Aitarak. Entah dari mana datangnya, tetapi malam itu, kencang sekali angin meniupkan militer ada di balik semua ini. Kami pun hanya termangu.

Secercah harapan muncul ketika atasan kami, Pak August Parengkuan meminta kami untuk tidak mengkhawatirkan soal biaya. Termasuk bila harus sewa helikopter.

“Rien, usahakan yang terbaik.. berapa pun biayanya. Keselamatan kalian bertiga jauh lebih penting dibanding hal lain,” kata Mas August, dini hari itu. Betapa kami lega mendengar ungkapan itu.

“Terima kasih, Mas.”

KAMIS, 2 September 1999. Sekitar pukul 06.00 waktu Jakarta, Pak August Parengkuan menghubungi Menlu Ali Alatas di kediamannya, Jakarta. Dan saat itu juga, tepatnya sekitar pukul 07.00 pagi waktu Dili, Dubes Agus Tarmidzi sudah berada di depan kami.

"*Oh.. What heppened to you,*" kata Duta Besar Agus Tarmidzi, Ketua Satgas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (P3TT). Erat ia memeluk kami.

"Saya sudah mendapatkan instruksi resmi dari Pak Menlu (Ali Alatas) untuk menyelamatkan kalian," lanjutnya.

"Terima kasih, Pak." Ada rasa haru yang begitu besar. Air mata saya kembali mengalir satu persatu.

"Maafkan kami jadi merepotkan semua pihak, Pak."

"*No, no, no, don't mention it. This is a part of our job,*" kata Pak Agus Tarmidzi.

Pak Dubes yang sangat kebabakan itu lalu berbicara panjang dengan Pak Yamashita Lahay. Mereka semuanya kemudian pergi, dan membiarkan kami tetap berada di persembunyian. Dan, alangkah terkejut, pagi itu kami mendapat informasi, rumah lama yang kami tinggalkan dalam keadaan kosong dan terkunci rapat dan kuncinya pun masih kami bawa, tiba-tiba sudah berpenghuni.

Hal itu kami ketahui dari seorang rekan yang mencoba menelepon rumah kontrakan kami tersebut. "*Nggak* ada. Baru meliput, baru kembali nanti sore," jawab seorang laki-laki di rumah lama tersebut. Hingga saat ini kami tidak pernah tahu siapa orang itu. Yang kami tahu, rumah kontrakan kami di Delta Komoro itu sebenarnya bukan milik keluarga Haris Sabri Sinar. Keluarga Haris pun hanya mengontrak dari seseorang yang mengaku anggota Brimob.

Entah apa yang ada di benaknya, tiba-tiba pagi itu, rekan Tri Agung Kristanto mengatakan akan mencoba jalur biasa, dengan pesawat Merpati.

"Saya sudah punya tiket," ujarnya.

Tentu, Eddy, saya, maupun Kreshna langsung menentang rencana tersebut. Dengan tegas kami bertiga melarangnya untuk mengambil jalur tersebut. Tidak terbayang

bagaimana jika rekan yang menggunakan *code-name* “tra” itu keluar dari persembunyian dan masuk dalam perangkap pasukan Aitarak. Walau begitu, ia bersikeras untuk pulang.

Melihat keteguhan hatinya, akhirnya kami pun menyerah dan membiarkan dia mencoba. Yah, siapa tahu berhasil. Minimal ada salah satu dari kami yang selamat. Begitu harapan saya. Eddy dan saya tidak mungkin mengambil jalur itu, karena lebih lama berada di Timtim dan sudah banyak dikenali.

Untuk itu, kami mencoba mengontak Anis. Tak lama kemudian ia datang. Dia kaget dengan apa yang terjadi. Kami minta tolong Anis untuk mencek keamanan sekaligus tingkat bahaya seluruh jalur ke bandara. Sekitar satu jam kemudian, Anis datang. Wajahnya tegang dan pucat.

"Gimana, Nis. Ini minum dulu."

"Wah, jangan coba-coba, deh," katanya.

Kami saling berpandangan. Bengong sekaligus khawatir.

"Jangan deh, Mbak. Jangan coba-coba. Ini operasinya sudah gabungan, tidak hanya Aitarak. Kalau Aitarak saya punya banyak teman di sana. Ini sudah gabungan. Ada Besi Merah Putih, Halilintar. Jangan coba-coba, deh."

Anis lalu bercerita, saat memasuki jalan menuju bandara, mobilnya dihentikan. Ia lalu disuruh turun. Tidak hanya mobil yang digeledah, melainkan termasuk seluruh tubuhnya.

"Saya sampai disuruh buka baju," ceritanya.

Para petugas milisi itu lalu meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk). Bila nama dalam KTP itu bukan nama Timor, mereka akan menanyakan keperluan berada di Timtim.

"Saya khawatir, begitu ketahuan wartawan langsung ditangkap," sambung Anis lagi.

Masih menurut Anis, mereka akan langsung membawa pergi, bila kebetulan nama yang tertera dalam KTP itu sesuai dengan target. Repotnya, hari itu wartawan termasuk target. Pagi itu, mereka melakukan sweeping hingga ke pesawat yang sudah siap take off. Diperoleh informasi ada beberapa nama dalam pesawat itu yang dipaksa turun. Mendengar penuturan itu, rencana “Tra” pulang dengan pesawat Merpati resmi dibatalkan.

“Kita tetap di sini. Hidup bertiga, mati bertiga.”

“Ya, itu yang terbaik, Mbak,” timpal Eddy.

Tra hanya terdiam, tak banyak bicara. Ia yang semula masih ragu dan gelisah, pada akhirnya bisa menerima kondisi tidak menyenangkan tersebut. Kembali kami terpuruk dalam ketidakpastian.

KAMIS (2/9), siang, kami sama sekali tak bisa bergerak. Hingga sekitar pukul 12.00, Mas Sularjo dari Satgas P3TT menjemput kami.

"Ayo berangkat sekarang," ujarnya.

"Sudah aman?" tanya saya.

"Kita cobalah..."

Kami dimasukkan sebagai rombongan anggota Satgas P3TT yang sebagian juga terpaksa pulang ke Jakarta. Namun, Kreshna berubah pikiran. Ia memilih untuk tetap tinggal.

"*Take care*, Kris. Kamu harus super hati-hati."

"Ya, *don't worry I'll be fine*."

Di bandara, kami disambut Pak Yamashita Lahay dan Odo Manuhutu yang sudah berada di sana untuk mengurus kepulangan beberapa anggota Satgas P3TT. Sambil menunggu pesawat, kami bertiga disembunyikan di ruang barang, di antara tumpukan kardus. Kami sendiri tidak tahu bagaimana Satgas mempersiapkan perjalanan yang bisa membebaskan kami dari pasukan Aitarak yang berada di mana-mana. Suasana sama sekali tidak menyenangkan. Seluruh pihak tegang.

Beberapa saat kemudian, muncul lagi berita yang lebih menyeramkan. Katanya, Mayjen TNI Kiki Syahnakri menginstruksikan kami, khususnya Eddy dan saya untuk tidak keluar dari Timtim, karena berita di *Kompas* pagi itu. "Ya Tuhan, apa lagi ini," saya hanya mampu bergumam.

Saya berusaha mengontak Jakarta, menanyakan hari itu mereka menulis laporan apa. Karena berita yang kami kirimkan langsung dari Timtim sudah full of censorship. Bahkan kami pun tak lagi mampu menyebut nama kelompok milisi secara gamblang. Kami sendiri pun terkejut, hari itu mereka mengeluarkan tulisan besar berjudul Milisi Pro-Jakarta Serang Warga, mengutip kantor berita asing.

Suasana semakin tegang. Semuanya diam. Hanya berbicara sepatah-sepatah. Walau begitu, tak ada satu pun dari teman-teman Satgas P3TT itu yang meninggalkan kami. "Pak Menlu meminta kami menunggu kalian hingga pesawatnya benar-benar *take off*," kata Pak

Djadnan. Pihak Jakarta yang mengenal baik Pak Kiki meyakinkan, Mayjen Kiki tidak mungkin melakukan hal itu. (Belakangan baru saya percaya, setelah mengenal langsung Mayjen Kiki di masa darurat militer).

Namun, berita itu justru mengusik Brigjen Glenny Kairupan di Dili. Ia langsung menyelidiki asal informasi tersebut. Diperoleh hasil, menurut prajurit di lapangan, instruksi pembunuhan datang dari Jakarta, tepatnya dari Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Tanpa membuang waktu lebih panjang, Brigjen Glenny Kairupan langsung menghubungi Pak Sjafrie.

“Frie, benar lu menginstruksikan itu... mereka *kan* orang kita, masak harus dihabisi,” kata Brigjen Glenny Kairupan.

Pak Sjafrie menjawab tegas, “tidak, Bang”.

Entah bagaimana, waktu itu, tiba-tiba Pak Glenny sudah berada di salah satu ruang operasional bandara Komoro. Melalui Odo Manuhutu dari Satgas P3TT, Pak Glenny memanggil saya.

“*Don't worry. You are safe, now,*” kata Odo membesarkan hati saat mengantar ke ruang Pak Glenny. Di sepanjang jalan menuju ruang Pak Glenny, sama sekali saya tidak berani mengangkat wajah. Jantung berdetak kencang. Jarak ruang Pak Glenny mungkin tak sampai 50 meter, tetapi terasa amat jauh. Melihat kondisi saya yang lunglai tak berdaya seperti itu, Odo tak henti meyakinkan bahwa saya akan baik-baik saja.

“*Don't worry,*” kata Odo sekali lagi. Sesampai di ruang Pak Glenny, kembali saya terdiam dan terpaku di tempat. Saya hanya tertunduk, tak berani menatap Pak Glenny. Seluruh badan gemetar. Rasa takut, khawatir, cemas, bingung dan sebagainya bercampur aduk.

Melihat kegalauan saya, dengan sangat tenang dan penuh keapakan, Pak Glenny mengatakan, "Itu salah. Rien bukannya dicekal Kopassus. Tidak mungkin. Tetapi kami, Kopassus itu justru mau membantu memisahkan kalian dari pasukan Aitarak. Maksudnya supaya kalian tidak berpapasan dengan Aitarak."

Ketika mulai berani mengangkat wajah, saya lihat Pak Glenny tersenyum. Tulus sekali. Saya lega. Tanpa terasa, air mata saya mengalir perlahan. Menetes satu demi satu. “Terima kasih, Tuhan,” bisik saya dalam hati. Tak lupa, sebelum berangkat, Pak Glenny memberi saya buku bacaan renungan. Saya terima buku renungan itu dengan tangan yang bergetar hebat.

Dan memang, begitu Pak Glenny datang, suasana di bandara langsung aman. Pasukan Aitarak tak lagi melakukan sweeping hingga ke pesawat. Bahkan mereka hilang dari peredaran. Padahal, sebelumnya, menurut cerita Kadispem Polda Timtim Kapten Widodo DS, saat di bandara pagi hari, pasukan Aitarak sempat menanyakan keberadaan kami kepada Pak Widodo. Pagi itu, pasukan Aitarak bahkan menyisir hingga ke pesawat yang sudah siap landas.

Alangkah heran, hari itu seluruh wartawan Indonesia juga berada di bandara untuk kembali ke Jakarta. Eksodus. Lebih heran lagi, tak satu pun dari mereka yang bersedia tersenyum saat melihat kami. Bahkan kadang membuang muka dan pura-pura tidak kenal. Wajah mereka tegang. Pipit dan Kiki yang selama ini bertetangga dengan kami pun memilih membuang pandangan ke arah lain.

Tiba-tiba Yenni Wahid, koresponden Sydney Morning Herald di Jakarta yang juga puteri Gus Dur atau KH Abdurrahman Wahid, diam-diam menemui kami. "Kamu hati-hati, ya, dari tadi kamu dicari-cari pasukan Aitarak, dan kami mengatakan tidak tahu atau kamu sudah berangkat dengan pesawat pagi. Mereka bilang, awas, kalau yang namanya Rien Kuntari itu berani lagi menginjakkan kaki lagi di Dili, pasti mati," katanya.

Secepat kilat ia pergi dan pura-pura tidak mengenal kami lagi. Yenni sendiri waktu itu hampir terkena cekal dan diminta keluar dari bandara. Pihak Aitarak mengira Yenni Wahid adalah Yenni Rosa Damayanti, aktivis Solidamor.

Konon, kejadian ini lebih dimaksudkan sebagai teror kepada seluruh wartawan, baik asing maupun lokal, sehingga mereka tidak berani lagi berada di Timtim. Diharapkan, bila terjadi segala sesuatu, seperti bumi hangus, misalnya, tidak ada lagi saksi mata. Tapi itu semua konon, karena tidak ada pengakuan atau dokumentasi resmi, kecuali dokumen HR Garnadi yang sudah disangkal habis.

Pukul 15.00 waktu setempat, rombongan Satgas P3TT yang dipimpin Dino Patti Djalal dipanggil untuk boarding. Hari itu, Dino yang selama ini juga bertugas sebagai Juru Bicara Satgas P3TT, harus segera meninggalkan Dili. Konon, ia pun mendapat ancaman pembunuhan dari kelompok pro-kemerdekaan. Namun, informasi itu tak pernah sempat saya konfirmasi.

Wajah para petugas Satgas P3TT itu baru sedikit cair, setelah melihat kami bertiga berjalan memasuki pesawat Hercules. "Terima kasih, Mas," bisik saya dari kejauhan sambil memandang mereka semua, tak berani melambai. "Anda semua telah menyelamatkan nyawa kami bertiga."

Pesawat penuh sesak. Ada wartawan, anggota Satgas P3TT, pegawai Pemda. Ada pula sebagian dari observer, serta beberapa anggota TNI, yang berbadan tinggi, tegap, berkulit hitam, dan berambut ikal. Mereka mengenakan seragam loreng hijau dengan tulisan Kopassus.

Di sepanjang jalan, tak henti saya berterima kasih kepada Tuhan dan seluruh anggota Satgas P3TT itu. Pukul 21.00 waktu Jakarta, pesawat Hercules itu benar-benar mendarat di bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Betapa kami lega. Hati semakin lega ketika kami melihat Pemimpin Redaksi *Kompas* Mas August Parengkuan dan Sekretaris Redaksi *Kompas* Mas Bambang SP yang biasa kami sebut Mas BSP, telah menunggu di bandara. Sungguh, betapa kami merasa benar-benar diperhatikan dan dilindungi.

“*Congratulations. Thanks God..* Kalian semua selamat,” kata Mas August dan Mas BSP sambil memeluk erat kami bertiga.

Meski berada di Jakarta, kontak dengan Timtim tetap saya lakukan, walau hanya melalui telepon. Dan setelah di Jakarta, baru saya ketahui dari Mas Dudi Sudiby, wartawan *Kompas* senior saya, waktu itu, *Kompas* pun menyediakan pesawat G-4 untuk menjemput kami bila tidak mungkin dengan Hercules. Ah..., betapa nyawa kami sungguh dihargai.

Luluh Lantak

Ketegangan Timtim tak kunjung reda. Kamis (2/9), PBB mengungsikan 40 staf lokal dan 14 staf internasional dari Maliana. Mereka yang tiba di markas UNAMET Balide, sekitar pukul 14.00, membawa laporan Maliana sudah terbakar. Staf UNAMET juga sempat mencari perlindungan ke pos Polisi Maliana, setelah milisi membabi buta dan membunuh dua sopir PBB.

Di Jakarta, tiba-tiba telepon genggam saya berdering. Terkirim kabar duka dari Dili. Saya mendapat laporan tentang daftar panjang rencana pembunuhan tokoh-tokoh elit Timtim. Dari sekitar 14 nama yang ada, tertera dengan jelas nama Leandro Isaac dan David Diaz Ximenes. Rencananya, mereka hari itu akan dihabisi antara lain dengan serangan mematikan di rumah masing-masing.

Saat itu, saya berusaha keras mengontak Leandro dan David yang selama ini banyak memperlancar tugas saya. Dan betapa lega ketika mendengar suara Leandro. “Ya, saya sedang berada di markas UNAMET,” kata Leandro. Suaranya masih terdengar ceria. Ia

sama sekali tidak menduga bahwa hari itu adalah hari serangan yang telah ditentukan untuknya.

Secepat kilat saya berusaha mencegah Leandro untuk pulang atau meninggalkan markas UNAMET, sekaligus memintanya memindahkan seluruh keluarga dari rumah. Dan dengan sangat serius saya menekankan pentingnya pengawalan Polisi ke mana pun dia pergi. Beruntung, Leandro mempercayai kata-kata tersebut, sehingga setidaknya satu keluarga bisa terselamatkan. Sayang, hari itu David tak berhasil dihubungi.

Keesokan harinya, Jumat (3/9), kembali terjadi eksodus wartawan. Kali ini 75 wartawan dalam dan luar negeri, dipaksa meninggalkan Dili karena gencarnya ancaman fisik terhadap mereka. Eksodus ini untuk kedua kalinya. Eksodus pertama terjadi Kamis (2/9). Seiring dengan itu, sebagian masyarakat segera bergegas ke Mapolda (Markas Kepolisian Daerah) Timtim, bersamaan dengan puluhan kendaraan, dari truk, mobil pribadi, hingga sepeda motor. Mereka membawa serta seluruh harta milik, dari kasur, tempat tidur, hingga almari es. Mereka sudah siap untuk lari dan mengungsi.

SABTU, 4 September 1999, pukul 09.00 Wita, hasil jajak pendapat diumumkan secara bersama-sama di Dili dan New York. Pro-kemerdekaan dinyatakan menang telak, dengan mendapatkan 78,5 persen pemilih. Sedang otonomi, 21 persen. Dengan kata lain, dari 450.000 pemilih, 344.580 memilih pro-kemerdekaan, 94.388 menerima tawaran otonomi, dan 7.985 suara (1,8 persen) dinyatakan tidak sah.

Bisa dipastikan, para pendukung otonomi tidak bisa menerima kekalahan telak yang di luar dugaan itu. Front Bersama untuk Otonomi Timtim (UNIF) melancarkan protes keras dan menolak hasil jajak pendapat yang diumumkan Sekjen PBB Kofi Annan di New York, dan Ian Martin di Dili.

Mereka mengutuk keras gaya dan cara kerja UNAMET yang tidak netral, memihak, bahkan menurut mereka manipulatif. Karena itu, UNIF akan menuntut UNAMET ke Mahkamah Internasional, mendesak MPR dan pemerintah RI menolak hasil jajak pendapat, dan meminta pelaksanaan ulang. Protes keras itu mereka sampaikan melalui sebuah siaran pers yang ditandatangani Domingos Soares (FPDK), Armindo Soares Mariano, Francisco Lopes de Carvalho (BRIT), dan Vitorino dos Santos (PPI).

Namun, Presiden BJ Habibie menyatakan menerima hasil jajak pendapat tersebut. Ia menganggap penentuan pendapat sudah berlangsung dengan sukses. Dalam rentetan kata sambutan penerimaannya itu, Habibie tidak sepele pun menyebut atau sekadar berterima

kasih kepada ribuan pejuang yang kini terbaring di Taman Makam Pahlawan Seroja, tepat bersebelahan dengan pemakaman umum Santa Cruz, Dili.

Tak ada sorak-sorai kemenangan dan kegembiraan, siang itu. Dili justru berhiaskan serentetan tembakan yang terdengar di sekitar markas besar UNAMET dan di sekitar Hotel Mahkota. Ratusan anggota milisi pro-integrasi, sambil berkendara motor, menyerbu jalan-jalan di kota Dili. Ketegangan memuncak ketika UNAMET kembali melakukan evakuasi terhadap 140 stafnya dari lima kota yang dikuasai milisi pro-integrasi, Liquica, Aileu, Same, Maliana, dan Ainaro. Seorang Civpol (polisi sipil) dari AS terkena tembakan dan mengalami luka parah di bagian perut di Liquica.

Sejak pagi suasana kota Dili tegang dan mencekam. Tak satu pun toko berani membuka pintunya. Begitu juga pintu rumah-rumah penduduk, terkunci rapat. Beberapa truk yang dipenuhi anggota milisi pro-integrasi wilayah Liquica, Besi Merah Putih (BMP) berpatroli di Dili, bergabung dengan pasukan Aitarak, kelompok pemuda pro-integrasi wilayah Dili. Mereka rata-rata menyandang senjata laras panjang M-16.

Tak ada penjelasan pasti tentang alasan kegiatan itu. Namun diperkirakan, mereka berniat mencari dan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang dianggap "bermuka dua". Dalam arti, bertindak pro-integrasi, tetapi ternyata mendukung pro-kemerdekaan. Niat ini berhasil digagalkan oleh aparat keamanan. Mereka lalu dikembalikan ke Lesitolu dan Liquica. Beberapa hari sebelumnya, dilaporkan, milisi telah membakar sekitar 30 rumah di Liquica.

Kondisi itu mengusik Taur Matan Ruak, Wakil Panglima/Kepala Staf Falintil, sayap militer CNRT. Dengan tegas ia menyatakan siap membalas aksi kelompok milisi. "Jika situasi memburuk, akan terjadi kekacauan dan kami akan memberi respons pada tingkat nasional yang telah kami tunjukkan selama 24 tahun. Kami tidak akan pernah menerima penghinaan dari orang-orang Indonesia. Kesabaran kami habis," tegas Taur kepada Radio Renascenca, seperti dikutip kantor berita AFP (*Kompas*, 6/9/99).

Suasana semakin panas. Pasukan PPI balik mengeluarkan ancaman. "Pasukan PPI tidak akan gentar menghadapi orang-orang dari hutan. PPI tidak akan menyerah begitu saja, tanpa satu komitmen politik yang jelas," tegas Kepala Staf Angkatan Perang Pasukan Pejuang Integrasi Hermenio da Silva. "Sebagai pemenang mayoritas, mereka harus bertindak bijaksana, mencari jalan terbaik dan merangkul kelompok lain. Mengeluarkan ancaman dan informasi sepihak, sama sekali tidak menyelesaikan persoalan," tegasnya.

Rasa kecewa dan dendam yang membara di kubu pro-otonomi membuat mereka memperkeras ancaman dan tidak main-main. “Jika pihak pro-kemerdekaan tidak berubah, PPI juga akan bertindak brutal untuk membunuh hanguskan Timtim. Tetapi, langkah paling buruk ini tidak akan kami lakukan selama keamanan masih berada di bawah TNI dan Polri,” kata Hermenio.

Ia sekaligus menyesalkan banyaknya kebijakan Presiden BJ Habibie yang tidak menguntungkan perjuangan pro-integrasi. “Misalnya, dalam hal keberatan pro-integrasi mengenai ketidaknetralan dan pelanggaran Unamet selama penentuan pendapat. Seharusnya pemerintah membantu mengklarifikasi pengaduan-pengaduan itu sebelum UNAMET mengumumkan hasil penentuan pendapat,” ujarnya. Pada titik ini, secara pribadi saya setuju dengan pemikiran mereka. Entah apa alasan maupun desakannya sehingga Presiden Habibie begitu saja menerima hasil jajak pendapat, tanpa sedikit pun mengindahkan keberatan mereka.

Sabtu (4/9/99), menjadi awal pertempuran berdarah Timtim. Bentrok kedua kelompok tak bisa dihindarkan. Di Dili, kelompok milisi mengepung Hotel Mahkota yang banyak dihuni staf UNAMET dan wartawan dari seluruh dunia. Mereka sekaligus melancarkan serentetan tembakan, bahkan hingga melempar granat.

Salah satu saksi mata menyebutkan, granat manggis yang dibawa para milisi, secara sengaja didrop di bekas Hotel Tropical, yang kemudian dijadikan markas besar milisi Aitarak, sekitar pertengahan Mei 1999. Di bulan itu pula, beberapa tokoh kunci milisi, khususnya Eurico Guterres, memperoleh senjata laras panjang yang sekilas persis sama dengan M-16.

ANDI Riccardi, satu-satunya kameramen untuk media nasional dan internasional yang bersahabat dekat dengan Eurico Guterres, tergepoh-gepoh lari menyusup ke markas Aitarak, bekas Hotel Tropical.

“Co, ini akan berlangsung terus?” katanya kepada Eurico.

“Ya, terus berlangsung, kami tidak bisa mencegah,” jawab Eurico tegas.

Secepat kilat Andi meninggalkan lokasi dan langsung menuju rumah kontrakannya di wilayah Audian, Dili. Ia berusaha menyelamatkan serangkaian peralatan televisi yang seluruhnya masih berada di rumah kontrakan tersebut. Beruntung, sehari sebelumnya, ia telah memindahkan rekan-rekannya, para wartawan asing ke Hotel Mahkota. Di tempat itu, sebelumnya ia tinggal dengan sekitar lima wartawan asing.

Namun, dalam sekejap rumah Andi telah dikepung. Suara tembakan terdengar di seluruh penjuru rumah. Dalam kondisi terkepung dan tak berdaya, ia hanya mampu mengingat satu nama, yaitu sang Ibu. Sambil menitikkan air mata, secepat kilat ia menelepon sang Ibu di Jakarta, meminta dukungan doa. Hatinya pun sangat lega, ketika sang Ibu sepenuhnya mendukung dengan memintanya tabah dan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. "Mama bangga sekalipun kamu harus mati dalam tugas ini," kata sang Ibu.

Dan, bagai mendapat kekuatan baru yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba Andi bangkit dan keluar dari persembunyian. Sambil mengenakan topi Kopassus dan atribut Aitarak, dengan lantang ia berteriak, "Hei... primo, apa yang kau lakukan di sini? Kamu tidak tahu ini rumah siapa." Di luar dugaan, pasukan Aitarak yang sedang mengamuk itu langsung meminta maaf dan segera meninggalkan rumah kontrakan Andi yang sebenarnya milik seorang pengusaha yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Budiman.

Andi tak berhenti bersyukur ketika seorang Ibu tiba-tiba muncul dari halaman belakang rumah yang biasa digunakan sebagai lapangan badminton. Dengan terbata-bata, si Ibu yang hanya dipanggil dengan sebutan "Tia" yang berarti Bibi itu mengucapkan terima kasih tak terhingga. "Tindakan Bapak yang sangat berani tadi telah menyelamatkan kami. Tanpa Bapak, kami semua mungkin sudah mati," kata si Ibu. Mata Andi pun terbelalak. Ada ratusan ibu yang berkumpul di halaman belakang rumah tersebut.

Di tempat lain, Leandro Isaac, Koordinator CNRT untuk Dili, yang berada di hotel Mahkota menggambarkan kekacauan di Dili dengan kalimat "Sulit dilukiskan dengan kata-kata. Tidak bisa diceritakan lagi. Dengar! Anda dengar tembakan itu tidak," teriaknya. "Saya terima ucapan selamatnya, tetapi sekarang saya sedang dalam keadaan yang sangat menyedihkan, sejak pagi saya terkepung di Hotel Mahkota oleh pasukan Aitarak," katanya.

Hal senada juga diungkapkan David Diaz Ximenes, Wakil Sekretaris FPI. David yang biasa bicara garang, malam itu, ia berbisik sangat pelan, "terima kasih. Tapi tolong jangan hubungi saya lagi, saya sedang dalam keadaan sangat bahaya," katanya di telepon. "Kami di sini dijaga polisi satu truk. Di sini sudah dar-der-dor," sambung Pak Sudjadnan, Koordinator Satgas P3TT. Leandro berhasil dibebaskan setelah dijemput pihak kepolisian RI, sekitar pukul 17.15. Dengan pengawalan ketat, Leandro dibawa ke markas besar UNAMET.

Bersamaan dengan itu, secara serentak terjadi aksi pembakaran di Bekora, Komoro, Maskarinhas, dan Balide yang seluruhnya berada di Dili. Dalam sekejap, ibu kota Timor itu

sudah menjadi kota yang menakutkan. Kota yang biasa terang benderang itu, mendadak menjadi gelap gulita. Seluruh lampu, baik di jalan dan di rumah, mati. Sebagian lampu sengaja dimatikan oleh para penghuninya untuk menjaga keselamatan. Hanya sekedipan mata, kota Dili telah kosong. Tak lagi berpenghuni.

Dari hari ke hari, kerusuhan terus berlanjut. Rentetan tembakan yang terdengar mulai Sabtu (4/9/99) malam, masih terus berlanjut hingga Minggu. Kolompok pro-integrasi bentrok dengan pro-kemerdekaan di percetakan diosis Dili, saat mencari pemuda dan tokoh politik pro-kemerdekaan yang diperkirakan sembunyi di lokasi tersebut bersama pengungsi lain.

Sebelumnya mereka melakukan sweeping di pelabuhan Dili. Tetapi, karena banyak aktivis yang kemudian melarikan ke gedung percetakan Diosis Dili, mereka pun menyusul ke sana. Akibatnya, bentrokan tak bisa dihindari. Kelompok pro-kemerdekaan mencoba bertahan dan melancarkan serangan dari arah bangunan. Namun, itu semua tidak membantu.

Sumber-sumber militer yang sempat saya hubungi dari Jakarta waktu itu menceritakan, usai serangan, gedung percetakan lalu diobrak-abrik. Di saat semua orang sudah pergi dan kondisi kocar-kacir, tiba-tiba muncul percikan api yang kemudian membakar buku, kertas, dan akhirnya menghanguskan bangunan itu. Ia memperkirakan 10 orang tewas dalam bentrokan itu, namun sumber lain memperkirakan 25 orang tewas.

Sabtu malam, pasukan Aitarak yang tergabung dalam PPI (Pasukan Pejuang Integrasi) mulai berkumpul di markas mereka, bekas Hotel Tropical, Dili. Komandan Aitarak, Eurico Guterres, kemudian memeriksa barisan untuk menjamin kelengkapan seluruh anggota. Ia memastikan anggota yang absen hanyalah untuk keperluan mengungsikan keluarga.

Hari Minggu itu, bisa dikatakan benar-benar menjadi Minggu yang mengerikan. "Saya ditembak tapi tidak kena, karena bisa bersembunyi di balik tembok. Waktu itu, mereka menyerang asrama Balide," cerita Lourenco Vicente Martins. Mantan wartawan Suara Timor Timur itu termasuk yang dikejar-kejar karena dianggap aktivis pro-kemerdekaan. Lourenco sendiri mengaku lebih suka menggunakan bahasa dan budaya Indonesia, serta sama sekali tidak mengenal bahasa dan adat Portugis.

Untuk menghindari kejaran dan serangan yang bertubi-tubi itu, ia melarikan diri dan bergabung dengan ibu-ibu pengungsi. Dari Balide, ia selamat hingga sampai ke Mapolda, setelah berlindung di balik tumpukan barang para ibu pengungsi itu. Ia pun membawa

barang-barang itu di atas kepalanya, dan menutup kepalanya dengan selendang para ibu-ibu tersebut.

"Kamu ini *sakoan-sakoan* (baca: Jagoan), ya, kamu mau jadi *sakoan*," cerita Lourenco menirukan para pemuda pro-integrasi itu saat ia sampai di Mapolda. Mereka, mengucapkan kalimat itu sambil menempelkan sebilah parang di lehernya. "Saya banyak dilindungi ibu-ibu itu, entah bagaimana tiba-tiba mereka meninggalkan saya, mungkin setelah melihat ibu-ibu itu menangis," katanya.

Hari Minggu itu, eksodus besar warga Timtim terjadi. Kadispen Polda Timtim Kapten (Pol) Widodo DS mencatat, hari itu sekitar 10.000 warga Timtim "tertumpuk" di Mapolda. "Kami terpaksa memberi makan nasi, mie, dan air minum seadanya," kata Pak Widodo yang saya hubungi dari Jakarta.

Selain itu, mereka berusaha menyediakan air mandi, namun hanya mampu hingga dua tanki. Dari jumlah itu dicoba diberangkatkan dengan kendaraan seadanya. Gelombang pengungsi terus membesar. Hari itu masih ada sekitar 7.317 orang yang menunggu tiga kapal TNI AL. Untuk mengangkut pengungsi, Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) menyiapkan beberapa kapal jenis LST (*landing ship tank*) seperti KRI Teluk Mandar, KRI Multatuli, KRI Teluk Ratai, KRI Teluk Sabang, KRI Teluk Banten, KRI Teluk Penyu, KRI Sambu, dan KRI Dili.

Pada hari yang sama, sekitar pukul 11.00, para milisi membakar kantor bupati Aileu yang melumpuhkan sistem pemerintahan di sana. Hari itu juga, Komandan Aitarak yang sekaligus Wakil Panglima PPI, Eurico Guterres melakukan sweeping ke kamp pengungsian Mapolda, bersenjata lengkap dan lebih canggih dari milik polisi.

Prihatin dengan keadaan yang ada, hari Minggu, 5 September 1999, Menhamkam/Panglima TNI Jenderal Wiranto secara khusus berkunjung ke Timtim. Ia bersama rombongan yang terdiri dari Menko Polkam Feisal Tanjung, Menlu Ali Alatas, Mensesneg/Menkeh Muladi, dan Kapolri Jenderal (Pol) Roesmanhadi.

Mengingat kerusuhan yang terus meningkat, akhirnya kunjungan Wiranto terhenti di bandara Komoro. Di tempat ini, Wiranto mengadakan pertemuan tertutup yang antara lain dihadiri Gubernur Abilio Jose Osorio Soares, Armindo Mariano, Tito Baptista, Herminio, Mateus Maia, Joao Tavares, Eurico Guterres, dan Francisco Carvalho.

Wiranto sangat menyesalkan, tepatnya kecewa yang sangat dalam dengan kerusuhan di Timtim yang sudah bisa dikatakan sebagai tindakan brutal dan kriminal. Ia mengharapkan, kerusuhan itu segera bisa dihentikan, karena bisa mengganggu kepercayaan

internasional kepada Pemerintah RI, khususnya TNI dalam menjaga keamanan di Timtim. Selain itu, ia juga meminta upaya meredam kemarahan kelompok pro-integrasi secara persuasif. Tapi, tidak berhasil. Seolah tak mengindahkan imbauan Menhankam, kerusuhan di Dili terus berlanjut.

Senin, 6 September 1999

Senin, 6 September 1999, adalah hari yang benar-benar kelabu bagi Timor Timur. Sekitar pukul 10.20, massa yang mengamuk ini memperluas wilayah kekacauannya. Mereka menuju kediaman Uskup Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo SDB. Mereka kemudian membakar kediaman tersebut.

Uskup Belo selamat dan sama sekali tidak cidera. Jauh dari berita yang pernah beredar, bahwa Uskup ditembak dan terkena di bagian punggung kanan. Ia diselamatkan Polisi dan seorang perwira RI, kemudian diamankan di Mapolda.

Untuk menjaga keselamatannya, sekitar pukul 17.30, Uskup Belo dilarikan ke keuskupan Baucau, oleh seorang Perwira TNI, menggunakan helikopter Polri BO 105. Untuk sementara, Uskup Belo tinggal di kediaman Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento. Namun, tiba-tiba, kediaman Uskup Baucau itu diserang dengan serentetan tembakan.

"Tetapi tidak diarahkan ke saya," kata Uskup Nascimento. Bila sebagai gembala umat Katolik Timtim, Uskup Baucau memilih tinggal di tempat bersama para domba dengan segala resikonya, sebaliknya, Uskup Belo meneruskan perjalanan ke Darwin, Selasa (7/9/99). Pelarian Uskup Belo ke Darwin ini, dilakukan dengan diam-diam. Ia menumpang pesawat UNAMET yang akan ke Darwin, dalam balutan rompi biru bertuliskan UN. Ia pun menggunakan nama Luis Rouchette.

Dari Darwin, Uskup Belo melanjutkan perjalanan ke Lisabon dan berkeliling ke negara-negara lain. Sang gembala itu menyelamatkan dirinya sendiri. Ia meninggalkan domba-dombanya dalam keadaan tak menentu dan tanpa kepastian. Hari Senin itu, sejak pukul 05.00, sekitar 4.000 warga Timtim berbondong-bondong, mendaki perbukitan yang mengelilingi wilayah itu, sambil membawa bekal seadanya.

(Sempat pula muncul berita yang mengatakan di saat terjadi kerusuhan massal di Timtim, setelah pengumuman hasil penentuan pendapat, Uskup Nascimento terkena bacok

di tangan dan kemudian melarikan diri ke gunung. Untuk mengkonfirmasi masalah itu, serombongan wartawan, termasuk saya secara khusus berkunjung ke Baucau, 17/9/99)

"Saya berterima kasih atas perhatian Anda semua, saya tahu bahwa banyak orang sangat mengkhawatirkan keadaan saya, tetapi sama sekali tidak terjadi apa-apa pada saya. Saya tidak pernah pergi ke gunung. Itu semua tidak perlu, mungkin itu hanyalah publisitas politik, tetapi kenyataannya, tidak terjadi apa-apa pada saya.. sampai sekarang saya tetap di Baucau," tegas Mgr Nascimento.

Ketika kediamannya dijadikan sasaran tembak, tuturnya, "saya diam saja di rumah ini. Saya selalu berpikir secara filosofis. Untuk saya sendiri, akan sangat mudah meninggalkan Baucau. Tetapi, sebagai Uskup, bila saya pergi, akan banyak orang yang mengikuti, dan saya harus membawa mereka. Skenario terakhir, jika kita harus pergi, hanya pada kesempatan terakhir," tegasnya. "Selama situasinya masih ada di antara normal dan abnormal, saya akan tetap tinggal," kata Uskup Nascimento.

Bentrokan kedua kelompok juga terjadi di Keuskupan Diosis Dili. Setidaknya 25 orang tewas dan puluhan lain luka-luka dalam bentrokan tersebut. Menurut pemantauan Kantor Berita Antara dari Rumah Sakit Umum Dili, mereka tewas dan terluka akibat bacokan benda tajam dan tembakan. Puluhan korban luka masih dalam perawatan intensif.

Untuk mendapatkan gambaran secara langsung, dari Jakarta, saya menghubungi dua personel TNI yang diminta Pak Sjafrie menyelamatkan saya tersebut. Dikatakan, bentrokan diawali dengan keputusan kelompok pro-integrasi melakukan operasi mencari para elite politik, baik dari pro-integrasi maupun anti-integrasi. Sweeping tersebut sebenarnya dilakukan di pelabuhan Dili, saat ribuan pengungsi Timtim menunggu kapal yang akan membawa mereka keluar dari Timtim.

Mereka menemukan sejumlah pemuda yang dalam kaca mata mereka adalah anti-integrasi. Saat akan ditangkap, sebagian di antara mereka melarikan diri ke arah kantor Keuskupan Diosis Dili, yang di dalamnya juga terdapat puluhan pengungsi. Bentrok tak dapat dihindarkan. Usai serangan, gedung percetakan diobrak-abrik.

Masih menurut para personel tentara tersebut, saat diobrak-abrik, terjadi percikan listrik di gedung percetakan yang langsung membakar tumpukan buku, kertas, dan sebagian bangunan tersebut. Setidaknya ada 10 orang tewas dalam kejadian itu, namun belum diketahui secara pasti apakah mereka tewas karena terbakar atau tertembak.

Personel tentara itu juga bercerita adanya serangan lanjut. Namun, kata mereka, serangan lanjut itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mengenakan seragam mirip

Aitarak. Yaitu, stelan hitam-hitam namun tanpa tulisan “Aitarak” di punggung. Kelompok ini mengingatkan saya pada berbagai cerita tentang serangkaian serangan lain yang oleh warga setempat disebut sebagai serangan “ninja”.

Hal itu dibenarkan oleh Kapolri Jenderal (Pol) Roesmanhadi. “Ada beberapa kelompok tak terorganisir di Timtim yang membuat berbagai aksi. Kita mengamankan atau menjaga situasi ini dari bentrok bersenjata antar-kelompok. Dari kelompok-kelompok ini ada yang terorganisir dan ada yang tidak terorganisir,” kata Jenderal Roesmanhadi kepada kantor berita Antara di Dili, ketika menyertai kunjungan sejumlah menteri dan Panglima TNI Wiranto.

Pertempuran berdarah tak hanya terjadi di Dili, melainkan juga di Suai, Kovalima. Laksaur, kelompok pemuda pro-integrasi untuk Kovalima, menyerang massa yang mengungsi di Gereja Nosaceniore de Rosario de Fatima. Diperkirakan 27 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Tiga di antaranya adalah Romo Tarcisius Dewanto SJ, Pastor Hilario Mandeira Pr, dan Pastor Fransisco Tavares dos Reis Pr.

Sejak kerusuhan meningkat di Timtim, Gereja Maria Fatima, Suai, mulai menjadi tempat tujuan perlindungan bagi seluruhnya warga Timtim. Dalam arti, tidak hanya dari salah satu kelompok. Di tempat itu, berbaur pengungsi dari kelompok pro-kemerdekaan maupun pro-otonomi. Setidaknya itulah yang diceritakan Pastor Hilario ketika saya berkunjung ke Suai dan secara khusus menemuinya di Gereja Santa Maria dari Fatima.

Romo Hilario mensinyalir, warga mulai dicekam rasa takut ketika para pemuda pendukung integrasi bangkit dan mengelompokkan diri ke dalam Laksaur. Kebangkitan pemuda pro-integrasi di satu sisi sangat bisa dimengerti dan bisa diterima. Hal itu ditekankan pula oleh Romo Hilario. Hal itu merupakan hak setiap individu untuk mempertahankan aspirasi dan keyakinan mereka.

Satu-satunya yang tidak bisa diterima hanyalah tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Dalam catatan saya, Laksaur pimpinan Mendoza Moruk ini termasuk salah satu kelompok pemuda pro-integrasi yang cukup kejam. Karena itu, ketika Suai bergolak, sejujurnya hal itu sudah bisa diprediksi. Yang di luar dugaan adalah tingkat kekejaman dan volume ketegangan yang bisa mereka lakukan.

Kerusuhan di hari Senin diawali dengan suara tembakan di luar halaman Gereja. Romo Dewanto yang kebetulan ada di sekitar tempat itu tertarik untuk mencari tahu asal suara tembakan tersebut. Ia pun keluar. Dan, begitu keluar ia telah dihadang oleh segerombolan

pemuda. Entah apa yang terjadi. Romo Dewanto dibunuh secara keji hingga jasadnya tak lagi dikenali. Ia yang tergabung dalam LSM kemanusiaan "Caritas International" dibunuh bersama 40 staf lain, termasuk Ketua Caritas, Pastor Francisco Baretto.

Sungguh saya tidak mengerti, mengapa mereka harus ikut pula 'dihabisi'. Romo Hilario yang saya kenal adalah sosok yang sangat obyektif dalam menilai keadaan. Meski ia menolak kekejaman Laksaur di masa-masa menjelang pelaksanaan jajak pendapat, tetapi tetap saya tidak bisa mengatakan bahwa Romo Hilario adalah pendukung penuh kemerdekaan Timtim. Ia begitu berapi-api ketika bercerita tentang upaya perdamaian di kedua pihak. Ia sangat bersemangat kala menceritakan kedamaian yang mulai pulih, setelah kerusuhan April 1999. Dari obrolan dengan Romo Hilario, jelas ia berpandangan obyektif. Tidak membela salah satu kelompok.

Pembunuhan sadis ini jelas menghapus seluruh kenangan perayaan perdamaian akhir Juni lalu. Upaya perdamaian itu, tak lepas dari polesan tangan dingin semua pihak, dari Bupati Kovalima Rui Lopez yang kemudian digantikan Kol (Inf) Herman Sedyono hingga Danrem 164/WD Kol (Inf) FX Tono Suratman, dan Brigjen TNI Glenny Kairupan. Namun, bagaimana pun upaya itu tidak akan berhasil tanpa peran Gereja setempat yang berarti keterlibatan Romo Hilario.

Karena itu sulit menerima kenyataan bahwa Romo Hilario pun harus menjadi korban dalam kerusuhan tanggal 6 September tersebut. Dalam catatan yang saya miliki, Brigjen Glenny Kairupan pun memiliki perasaan yang sama. Karena itu, ia lalu mempertanyakan alasan Romo Hilario harus dijadikan korban kerusuhan Suai, kepada Kol (Inf) FX Tono Suratman.

"Dia pro-kemerdekaan, Bang," jawab Pak Tono

"Saya kaget mendengar jawaban itu," kata Pak Glenny ketika kami bertemu di Jakarta.

Belakangan baru saya paham mengapa Pak Glenny mempersoalkan hal tersebut. Pak Glenny memiliki jalinan hubungan pribadi yang sangat erat dengan Romo Hilario, sejak menjabat sebagai Wakil Komandan Korem (Wadanrem) 164/WD tahun 1994. Pemahaman ini saya dapat dari buku "Hari-hari Terakhir di Timor Timur", tulisan bersama Pak Glenny, Pak Zacky, Pak Andreas Sugiyanto, dan Pak Ibnu Fatah.

Selain Pak Glenny, di Jakarta, saya juga mencoba menemui Pak Tono Suratman. Tentu, saya pun ingin memberi porsi yang sama dalam pemberitaan, seandainya pun hal itu bisa saya beritakan. Pak Tono menyambut dengan antusias keinginan saya tersebut. Kami pun

sepakat bertemu dalam acara makan siang di rumah makan Jepang Hotel Le Meredien, Jakarta.

Siang itu, Pak Tono tidak mengenakan seragam loreng, melainkan sebuah pantalon rapi, lengkap dengan jas yang sewarna. Melihat penampilannya, di mata saya, Pak Tono siang itu lebih mirip pengusaha dibanding seorang tentara. Selain penampilan, sepertinya tak ada yang berbeda pada diri Pak Tono. Ia tetap ramah dan banyak senyum. Namun, ternyata pertemuan itu tak semulus yang saya duga. Meski tetap dengan sikap yang sangat ramah, tak banyak informasi yang diberikan oleh Pak Tono.

Dan harus saya bilang, di balik keramahan Pak Tono, sebetulnya pertemuan itu beku dan buntu. Karena itu, tak banyak pula hal yang bisa saya catat, kecuali satu kalimat dari Pak Tono, "saya orang Katolik, Rien. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu." Dan siang itu, untuk pertama kalinya, Chicken Katsu, makanan favorit saya, terasa hambar.

"MATIKAN, matikan, matikan," teriak beberapa anggota milisi Besi Merah Putih sambil melompat pagar dinding pastoran Loyola, Taibesi, Dili Timur. Dengan garang mereka meneriaki Romo Karl Albrecht Karim Arbie SJ (78) agar mematikan senter yang ia pegang dengan kuat.

Setelah mendengar ribut-ribut di hari Sabtu (11/9/99) malam sekitar pukul 21.15, Romo Albrecht mengambil senter dan keluar menuju halaman. Romo Albrecht yang sudah berkurang pendengarannya itu, tidak paham benar bahwa ia diminta mematikan lampu senternya. Romo Albrecht justru semakin mengarahkan lampunya ke depan untuk mengetahui apa yang terjadi. Ia bahkan balik bertanya. "Ada apa, maunya apa?" kata Romo Albrecht. Dan, dor! dor! dor!. Dalam sekejap Romo Albrecht, pastor berkebangsaan Jerman itu jatuh tersungkur tepat di halaman depan pastoran.

Romo Josef Ageng Marwata SJ yang waktu itu berada tepat di belakang Romo Albrecht, tak bisa berbuat banyak. Ia termangu dan tertegun. Kejadian itu terlalu singkat. Di balik kegelapan Taibesi yang mencekam, ia menyaksikan sendiri rekan seperjuangan dalam iman itu, jatuh tersungkur di halaman rumahnya sendiri. Romo Ageng mensinyalir, penembakan itu dilakukan karena banyak pihak yang menyangka para pastor berpihak kepada kelompok pro-kemerdekaan karena selalu berhubungan mereka.

Tempat penembakan Romo Albrecht, kini dijadikan semacam monumen peringatan. Jenazah Romo Albrecht disemayamkan di halaman belakang pastoran, bersebelahan dengan

kepingan-kepingan jenazah Romo Tarcisius Dewanto SJ yang sama sekali sudah tak berbentuk.

Sebelum penembakan itu, anggota milisi mengambil dan merampas harta benda masyarakat, seperti mobil, televisi, bahkan baju, meski sudah dibawa mengungsi sekalipun. Mereka langsung menembak atau membakar bila ternyata mobil yang mereka ambil mogok. Tak jarang pula, mereka membongkar kardus-kardus "kekayaan" para pengungsi.

Dalam perkembangan selanjutnya, begitu mengenakan kain merah putih di badan atau di kepala, mereka seolah merasa berhak melakukan apa saja. Mengambil segala barang yang diinginkan, meminta apa pun, termasuk menembak apa saja, baik orang maupun hewan.

Setidaknya itu pengamatan Romo Ageng dan Frater Bagus Laksono dari Seminari Balide, yang tidak pernah meninggalkan Timor Timur, hingga provinsi itu memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. "Jadi, seperti degradasi moral terhadap bendera Merah Putih," kata Romo Ageng. "Pokoknya kalau sudah pakai kain merah putih, wah .., sudah..., kita tidak berani melawan. Apapun yang mereka minta harus kita berikan," sambung Frater Bagus.

Baik Romo Ageng maupun Frater Bagus bercerita, sudah beberapa kali, seminari Balide mendapat ancaman untuk dibakar, mengingat di tempat itu juga "tersimpan" banyak pengungsi. Beruntung, upaya itu tidak terlaksana. "Saya kira, penembakan kepada Romo Albrecht itu sebenarnya salah alamat. Saya yakin, mereka sebenarnya mencari saya, karena sudah beberapa kali saya mendapat peringatan. Tetapi karena yang keluar duluan dan membawa senter Romo Albrecht, beliau yang menjadi korban," kata Romo Ageng. Romo Ageng dan Romo Tan Soe Ie SJ selama ini dikenal memiliki koneksi cukup strategis dengan kelompok pro-kemerdekaan. Karena itu, meski rohaniwan, mereka pun masuk dalam daftar "ancaman".

Romo Tan dari seminari Dare menuturkan, beberapa saat setelah pengumuman, kediamannya dikepung oleh aparat. Mereka meminta kesediaan Romo untuk pindah. Namun, Romo menolak dan memilih tetap tinggal di tempat. "Kalau saya pergi, barangkali sudah dibakar tempat ini," katanya. Pada akhirnya, seminari Dare menjadi salah satu tujuan pengungsian yang cukup besar.

Tak lebih dari satu minggu, bekas provinsi ke-27 RI itu hancur total. Luluh lantak. Korban berjatuhan. Dari penduduk sipil, tentara, milisi, atau misionaris. Jumlah korban belum ada ketentuan pasti. Uskup Baucau memperkirakan jumlah korban meninggal sekitar

200 hingga 300 orang. Dan ia pun menolak bila kejadian di Timtim dikatakan sebagai pembasmian etnis. "Ini belum bisa dikatakan seperti itu," tegasnya.

Saksi Mata, Suster Monica

SUSTER Monica, biarawati dari Natarbora, wilayah Manatuto bercerita, tanggal 5 September 1999, polisi sudah siap merapat di jalan-jalan besar. Tanggal 6 September, sejak pukul 08.00, TNI dan Polisi sudah berada di satu tempat. Ia kemudian didatangi Komandan KOMPI beserta Wakilnya. Mereka meminta kesediaan para suster untuk meninggalkan tempat dan diberangkatkan hari itu juga, karena keadaan sudah sangat gawat. Namun, Suster Monica menolak. Ia memilih untuk tetap tinggal.

Keesokan harinya, (7/9) sekitar pukul 07.30, ia diberitahukan hal yang sama. Pemberitahuan itu disertai embel-embel, harus berangkat pukul 09.00, keadaan semakin gawat bahkan sudah sangat gawat dan seluruh pastor dan suster di Timtim sudah dibawa ke perbatasan, Atambua. "Tapi jawaban kami sama, bahwa kami hanya bisa menunggu perintah dari atasan kami," kata Sr Monica yang didampingi Sr Helmi, Sr Veroni, Sr Ria, Sr Erika, Sr Filipe, Sr Gertrude, dan Sr Paula.

"Kami ditakut-takuti bahwa akan ada perang, dan sebagainya, tetapi kami tetap tidak mau ikuti perintah. Ketika keadaan sudah benar-benar gawat, kami memilih lari dan menyingkir ke hutan," ujarnya. "Wah saya takut dan panik sekali, kami hanya mengenakan pakaian yang nempel di badan dan beberapa potong lain kita bungkus pakai kain taplak," ceritanya.

Tanggal 9 September 1999, lanjut Suster Monica, muncul serombongan petugas dengan seragam tentara dalam tiga truk Hino. "Saya sempat panik. Mereka langsung ke SPP (Sekolah Pertanian) untuk membakar tempat itu. Tempat kami dilewati dan tidak dibakar." Menurut Suster Monica, ia mengenal betul seluruh pelakunya, yaitu tentara BTT (Batalyon Team Teritorial). "Kami semua kenal mereka dan setiap hari bertemu," jelasnya. "Rumah kami berdekatan dengan markas mereka, jadi kami kenal," lanjut Suster Monica. Di biara Natarbora itu, ia tinggal bersama empat biarawati lain.

Ia menekankan, seluruh anggota BTT itu hanya membakar aset negara, pasar, dan PLN. Diakui, dalam kerusuhan itu ada satu orang aktivis pro-kemerdekaan yang tertembak. "Tapi itu kesalahannya sendiri, orang sudah gawat begini, *kok* masih memikirkan harta milik," ujarnya. "Mereka itu kalau melihat kerbau, lalu ditembak, melihat sapi, juga nembak," cerita Suster Monica.

Sr Ria dari Welaluhu, kabupaten Manufahi, mengalami nasib sama. Sejak tanggal 5 September 1999, ia dan rekan-rekannya sudah mendapatkan peringatan oleh TNI akan gawatnya situasi. Peringatan ini berulang-ulang, sehingga ia merasakannya sebagai teror. Puncaknya, TNI memberi tembakan peringatan kepada seluruh warga untuk langsung pindah ke markas Koramil. "Saya teriak minta tolong, tetapi sudah tidak ada orang," katanya. "Mereka mengatakan, kami harus segera meninggalkan tempat karena akan segera disapu bersih. Aduuuh, waktu itu kami panik sekali," kata Suster Ria.

Tanggal 7, 8, dan 9 September, kelompok berseragam TNI itu membakar kantor kepolisian, rumah dinas, kapolsek, perumahan medis. Dikatakan, beberapa di antara mereka mengambil barang-barang yang diperlukan, sebelum akhirnya dibakar habis. Dimusnakan. Dalam penglihatannya, seluruh pembakaran, penjarahan, dan penghancuran di lingkungannya dilakukan oleh kelompok yang disebut milsas, di bawah "koordinasi" Danramil.

Tentang milsas itu, Mayjen Zacky Anwar Makarim dan Brigjen FX Tono Suratman menjelaskan, milsas kependekan dari militerisasi sosial. Mayjen Zacky memperjelas dengan mengatakan, milsas adalah anggota TNI yang direkrut dari putera daerah, dan rata-rata buta huruf. Dalam pergolakan di masa lalu, mereka bertugas sebagai 'tenaga bantuan operasi' (TBO). Untuk menghargai jasa-jasa mereka, seluruh tenaga TBO itu kemudian dimiliterkan, sehingga berhak menerima penghasilan sebagaimana layaknya prajurit bawahan.

Namun, sepengetahuan Sr Ria, milsas tersebut juga terdiri dari para pemuda Timtim yang 'disekolahkan' di Malang atau di Kupang selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan mantan Wakil Komandan Indonesian Task Force in East Timor (ITFET) Kol (Czi) J Suryo Prabowo. Menurut dia, jumlah milsas ada sekitar 3000 orang, sedang jumlah pasukan putra daerah mencapai 6.000 personel.

Suster Veroni menambahkan, penghancuran itu juga dilakukan pasukan Ablai, kelompok pemuda pro-integrasi kabupaten Manufahi. "Banyak di antara kami yang tidak mau ikut Ablai, karena cinta damai dan suasana aman. Sebenarnya misi awal pembentukan Ablai juga tidak seperti itu, tetapi perkembangannya *kok* jadi kasar dan penuh kekerasan. Kalau tidak seperti itu, pasti banyak yang bersedia menjadi anggota," jelasnya.

Tidak mengherankan, bila Kabupaten Manufahi merupakan wilayah yang pertama kali hancur. Kerusakan di wilayah itu sudah terjadi sehari sebelum pengumuman hasil

penentuan pendapat. Wilayah itu juga menjadi salah satu tempat yang mengalami kerusakan cukup parah.

Seperti dituturkan Suster Veroni, pasukan berseragam TNI dan juga pasukan Ablai, begitu pengumuman, langsung membakar segala rupa, termasuk, sekolah, perumahan medis, dan rumah penduduk. Menurut dia, pelaksanaan itu hanya memerlukan waktu setengah hari. "Beruntung, sekolah kami masih utuh," komentarnya.

Biasanya, sebelum membakar mereka menyiramkan minyak dan bensin. "Minyak yang masih ada, semula disuruh membeli, tetapi diminta lagi untuk membakar," kata Sr Monica. "Jadi, pagi hari itu, mereka pulang pergi membawa minyak dalam jirigen-jirigen, lalu sore harinya, semua gedung sudah terbakar," kata Suster Veroni. Pada saat kejadian itu, beberapa suster menyelamatkan diri ke hutan. Sebelumnya, mereka selalu mendapat peringatan untuk segera pergi, karena, katanya, para suster lain seluruhnya sudah dibunuh.

"Tetapi mereka memang hanya membakar aset-aset pemerintah. Hanya satu rumah penduduk aktivis pro-kemerdekaan yang dibakar," kata Suster Ria. Ia menambahkan, umumnya mereka membakar rumah dinas kepolisian, kapolsek, dan perum medis.

"Barang-barang sempat dibawa pergi, tetapi setelah Pak Danramil datang, seluruh anak buahnya disuruh mengembalikan. Sebelum dibakar, saya sempat diminta menyelamatkan barang-barang yang diperlukan, tetapi saya tidak mau. Untungnya tempat kami tidak jadi dibakar, meski beberapa sempat dijarah," jelas Sr Helmi, juga dari Natarbora, Manatuto.

Walau begitu, menurut Sr Helmi, tidak semua anggota TNI jahat. "Saya banyak diselamatkan oleh mereka. Mari Suster, mari Suster," katanya saat ia dalam kondisi terjepit di antara ratusan tentara tersebut. "Mereka menyelamatkan, bahkan memberi saya jalan aman untuk pulang," ceritanya

Baik Sr Monica, Sr Helmi, Sr Ria dan biarawati lain menolak anggapan terjadi pembantaian etnis. "Saya kira tidak, di Manatuto yang meninggal hanya satu, itu pun karena kesalahannya sendiri, keadaan sudah genting *kok* tidak mau menyelamatkan diri. Memang mereka sering menembak sapi atau kerbau yang lewat," kata Sr Monica. Ia juga membantah ditemukan pemakaman massal. "Kalau soal kuburan massal, saya kira itu tidak ada," katanya yang langsung diiyakan oleh para biarawati lain.

KERUSUHAN tak berujung itu memaksa Indonesia menerapkan sistem darurat militer. Namun, sistem itu baru diterapkan hari Selasa, 7 September 1999. Pasalnya, kondisi domestik Indonesia yang tercermin melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak

tegas penerapan sistem tersebut. Sejarah hitam keberadaan militer di Timtim membuat banyak pihak khawatir, sistem itu justru memberi peluang besar bagi pembunuhan dan pembumihangusan Timtim. Selain itu, gencarnya isu tentang TNI di balik milisi yang notabene menjadi pelaku kerusuhan di Timtim pasca jajak pendapat, memang semakin menciutkan nyali.

Senin (6/9/99), Presiden BJ Habibie didampingi Menko Polkam Feisal Tanjung, Menko Ekuin Ginandjar Karsasmita, Menko Kesra/Taskin Haryono Suyono, Menlu Ali Alatas, Menpen Muhammad Yunus Yosfiah, Menkeh/Mensesneg Muladi, Wakil Panglima TNI Laksamana Widodo AS, Kapolri Jenderal (Pol) Roesmanhadi, serta Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Depdagri Ryaas Rasyid mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Gedung MPR/DPR RI, selama 2,5 jam.

Namun, DPR, terutama Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP), tetap tidak bersahabat. "F-PP menentang keras penetapan darurat militer untuk Timtim. Pendekatan militer selama ini membuat rakyat trauma, dan tidak menyelesaikan masalah," tegas Ketua F-PP Zarkasih Nur. "Apa pun alasannya, penetapan situasi darurat militer tidak bisa dilakukan begitu saja," lanjut Zarkasih Nur yang juga Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Seiring dengan menguatnya aspirasi di masyarakat tentang perlunya persetujuan DPR pada penerapan darurat militer maupun darurat sipil, Zarkasih bahkan mengatakan, "kalau Presiden minta persetujuan DPR, F-PP takkan memberikan. Kalau eksekutif bersikeras melaksanakannya, terserah saja, tetapi DPR akan meminta pertanggungjawaban eksekutif," tegasnya.

Sesuai hasil yang tertulis, rapat konsultasi itu akhirnya hanya menyebutkan, Presiden BJ Habibie diminta mempertanggungjawabkan kebijakannya tentang Timtim di depan Sidang Umum MPR. Dengan alasan, integrasi Timtim ke Indonesia ditetapkan melalui Sidang Umum MPR. Sementara itu, opsi pelepasan Timtim bahkan tidak dikonsultasikan dengan DPR.

Tarik-ulur penerapan darurat militer, meneteskan "noda hitam" dalam performa kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Secara kasat mata, rezim ini jelas tidak kompak. Tidak hanya antara eksekutif dengan legislatif, namun di antara eksekutif sendiri. Meski DPR dengan tegas menolak, namun, Selasa, 7 September 1999, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mayjen TNI Sudradjat menyatakan darurat militer di Timtim. Pengumuman itu disampaikan melalui televisi tepat pukul 00.00.

Ketidakkompakan semakin nyata ketika pagi harinya para menteri beramai-ramai mengumumkan kembali keputusan tersebut. Padahal, rencana sebelumnya, pengumuman itu akan disampaikan Presiden Habibie, pada pukul 10.00 WIB, di Istana Merdeka. Namun, 1,5 jam kemudian rencana itu dibatalkan.

Usai bertemu Presiden Habibie di Istana Merdeka, Menko Polkam Feisal Tanjung, Menlu Ali Alatas, Mendagri Syarwan Hamid, Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto, dan Dirjen PUOD Ryaas Rasyid mengumumkan, mulai Selasa, 7 September 1999 pukul 00.00, pemerintah menerapkan keadaan darurat militer di Timtim, mengingat kondisi Timtim yang semakin mencekam. Mungkin karena sangat sibuk, Mensesneg/Menkeh Muladi tidak sempat bergabung dalam pengumuman yang bersifat “keroyokan” tersebut.

Feisal Tanjung menjelaskan, keputusan itu didasarkan pada Keppres No 107/Tahun 1999 dan Lembaran Negara No 152. Dinyatakan, “Terhitung mulai tanggal 7 September 1999, pukul 00.00, seluruh wilayah provinsi Timtim dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Untuk itu, Panglima TNI akan mengambil langkah pengamanan dan ketertiban masyarakat sesuai UU tersebut untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah Timtim.” Feisal Tanjung menambahkan, pengambilan keputusan itu telah disetujui Sekjen PBB dan Portugal. “Sehingga tidak bertentangan dengan perjanjian New York yang telah ditandatangani,” tegasnya.

Rupanya Jenderal Wiranto tanggap akan keresahan dan kekhawatiran seluruh bangsa Indonesia. “Darurat militer diumumkan agar bisa menangani lebih tegas semua upaya untuk mengacaukan situasi ini. Jadi, darurat militer untuk segera memulihkan keadaan, bukan untuk menjerumuskan keadaan ke yang lebih jelek lagi. Kalau keadaan sudah aman dan tertib, kita kembali ke keadaan biasa,” kata Jenderal Wiranto di Mabes TNI Cilangkap.

Menurut Wiranto, kondisi Timtim, khususnya Dili, sudah terlalu mencekam. Jumlah pengungsi terus bertambah, roda perekonomian macet, instalasi pelayanan umum seperti Depot Logistik (Dolog), bank, dan Telkom tidak berfungsi. Kondisi itu diperparah dengan pembakaran dan pembunuhan akibat emosi tak terbendung.

“Keadaan ini kalau dibiarkan atau diatasi dengan UU yang saat ini berlaku, yakni KUHP dengan status daerah tertib sipil, tidak akan membaik. Setelah diamati dua hari, ternyata keadaannya memburuk. Oleh karena itu, keputusannya darurat militer,” ujarnya. Alasan lain, RI masih bertanggung jawab atas keamanan di Timtim hingga wilayah itu diserahkan kepada pemerintahan perwakilan PBB.

Mayjen Kiki Syahnakri yang sangat fasih berbahasa Tetun, bahasa setempat, dipercaya sebagai Panglima Penguasa Darurat Militer atau Panglima PDM. Seiring dengan itu, Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen Suaidi Marasabessy melepaskan dua batalyon berkekuatan lebih dari 1.350 prajurit TNI, masing-masing dari batalyon Linud 432 Kostrad, Yonif Linud 700 BS, dan satu peleton Zipur 8 ke Timtim. Pelepasan dilakukan dengan upacara militer di Pangkalan Utama TNI AL Ujungpandang, Selasa (7/9/99).

Milisi dan TNI

TAK bisa dihindari, hancurnya bekas provinsi ke-27 RI secara serentak dan hanya dalam sekejap itu membuat setiap orang lalu mengaitkannya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terutama, dilihat dari cara penghancuran yang sistematis dan senjata yang sering dibawa-bawa oleh para milisi, membuat banyak pihak menduga, bahkan sebagian berusaha meyakinkan, TNI, lebih tepat lagi Kopassus, berada di balik semua kekacauan ini.

"Penghancuran ini dilakukan dengan sangat terorganisasi (well-organized)," komentar Letnan Nicholas Welch, Komandan Batalyon pasukan INTERFET di Maliana. Walau begitu, ia menolak anggapan penghancuran dan pembakaran itu oleh TNI. "Friksi antarkeluarga selalu ada di sini dan karena ada yang disebut milisi," jelasnya. Sebaliknya, koordinator CNRT Dili, Leandro Isaac, dengan tegas menyatakan, "Ini semua gara-gara Zacky Anwar (Mayjen Zacky Anwar Makarim, penasihat keamanan P3TI)."

Hal senada juga diungkapkan Presiden CNRT Xanana Gusmão. "Sekarang, ada dua orang yang sangat saya benci, Zacky Anwar Makarim dan Adam Damiri (Pangdam Udayana waktu itu), untuk apa yang telah mereka lakukan kepada rakyat kami," katanya. Sejak bertemu Mayjen Zacky Anwar di Salemba, kepercayaan Xanana kepada TNI luntur. "Waktu itu Pak Zacky meyakinkan saya kalau TNI sudah memasuki paradigma baru. Kita berteman, kita saling tahu, tetapi kenyataannya,..." kata Xanana sambil mengangkat bahu dan alisnya tinggi-tinggi, saat ditemui di markas besar Falintil di Remixio, Aileu.

DI satu sisi, anggapan itu mungkin tidak sepenuhnya salah. Harus diakui, banyak milisi yang berpenampilan mirip TNI. Sebaliknya, banyak pula anggota TNI yang bergaya milisi. Itu terlihat jelas, ketika batalyon 744/745 "pulang kandang" dari tempat tugasnya di Los Palos dan sempat istirahat di Markas Korem Dili.

Mungkin saking lamanya tugas, banyak dari mereka tak lagi sempat mencukur rambutnya yang panjang dan bergelombang. Selain itu, sengitnya "persaingan" dengan kelompok pro-kemerdekaan, membuat mereka pun terbawa untuk suka mengenakan atribut merah putih di badan, baik dikalungkan di leher atau diikatkan di kepala. Pada waktu itu, kadang dijumpai pula yang memakai kaos Aitarak, lengkap berkalung kain merah putih.

Hal itu masih ditambah dengan kenyataan, di setiap penampilannya, terutama di televisi (kecuali wawancara khusus), baik Eurico Guterres maupun Joao Tavares, hampir selalu dilatarbelakangi lelaki berbadan tegap mengenakan topi hitam dengan gambar belati putih di tengah, khas Kopassus.

Bisa jadi, mereka, lelaki bertopi Kopassus itu, sedang bertugas mengamankan kedua tokoh itu. Namun, tanpa disadari, pemandangan itu justru mempertebal keyakinan bahwa Kopassus berada di balik kelompok milisi tersebut. Dan kenyataannya, siapa pun yang mengenakan topi bergambar belati putih di tengah itu, akan tetap aman, meski berada di tengah keganasan kelompok milisi pro-integrasi tersebut.

Selain itu, entah sengaja atau memang satu selera, Eurico Guterres juga memilih warna baret yang sama dengan Kopassus, yaitu merah. Juga, entah karena ceroboh dan tidak rapi atau memang sengaja, banyak sekali beredar surat yang berisi rencana perusakan, pembakaran, dan sebagainya di kalangan wartawan, terutama wartawan asing. Surat-surat itu pun beredar pula di kalangan UNAMET. ([lihat lampiran](#)).

Memang, adanya milisi yang sebetulnya terdiri dari sekelompok pemuda yang setia mempertahankan integrasi, tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang awal pembentukannya. Harus diakui, militer atau TNI lah yang dulu membidani kelahiran pemuda pro-integrasi tersebut ([lihat Kelompok Milisi](#)).

Kelompok yang kemudian oleh media disebut milisi itu lahir sebagai jawaban atas munculnya opsi II dari Jakarta. Tidak bisa dipungkiri, imbas reformasi di Jakarta ditambah munculnya opsi II itu membuahakan euforia bagi kelompok pro-kemerdekaan. Kondisi itu akhirnya justru membuat mereka yang jelas-jelas mempertahankan integrasi menjadi tersisih dan terjepit, setelah hampir selama 24 tahun berada di atas angin.

Karena itu, himpunan pemuda pro-integrasi ke dalam kelompok bersenjata bisa dikatakan sebagai reaksi balik. Kolonel (Czi) J Suryo Prabowo, mantan Wakil Komandan ITFET dan Wakil Gubernur Timtim yang mengundurkan diri 27 Oktober 1998, mengatakan, senjata itu mereka peroleh melalui berbagai sarana. Yaitu, ada yang memang

milik sendiri, koleksi saat perang saudara tahun 1975, senjata rakitan, hasil rampasan Falintil, dan ada pula yang mereka peroleh dari TNI.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kol Suryo mengakui ada kelompok pro-integrasi yang diperkuat anggota TNI setempat, atau TNI putera daerah, yang ia istilahkan mbalelo atau disersi. Menurut Kol Suryo, mereka adalah anggota TNI yang umumnya sudah kehilangan anak, isteri, atau saudaranya karena ulah massa pro-kemerdekaan beberapa waktu lalu. Selain itu, lanjutnya, mereka terpaksa disersi karena merasa tidak mendapat jaminan keamanan dari kesatuan. Dalam arti, baik TNI maupun Polri kurang mampu menjaga keamanan diri dan keluarga.

Namun, apakah TNI, terlibat langsung dalam rencana pembumihangusan Timtim seperti yang selama ini diduga atau minimal mem-*back up* kelompok milisi atau milsas? Tidak ada jawaban pasti yang berani mengiyakan kasus ini. Jawaban itu hanyalah sebatas isu atau rumor.

"Saya tidak tahu," kata Mayjen Zacky Anwar Makarim setelah tiba kembali di Jakarta. Ia mengatakan sama sekali tidak mengetahui adanya kemungkinan anggota Aitarak yang berasal dan berbahasa Jawa, atau yang "kiriman" dari Surabaya. "Saya itu tugasnya justru mensukseskan penentuan pendapat di Timtim. Saya ini orang pertama yang bertemu Xanana, lho," katanya.

Ia juga menolak tuduhan berada di balik kerusuhan di Timtim. "Waktu kerusuhan saya sudah tidak ada di sana," tegasnya. Mayjen Zacky Anwar Makarim meninggalkan Timtim tanggal 30 Agustus 1999. Menurut dia, membakar sudah menjadi salah satu budaya dalam mengungkapkan satu kekecewaan. "Mereka itu biasa seperti itu," komentarnya.

Dalam pembicaraan suatu sore di Jakarta, Mayjen Zacky Anwar Makarim membantah keras tuduhan itu. Ia menekankan, Kopassus adalah sebuah organisasi yang sangat solid dan profesional. Hampir bisa dikatakan, Kopassus tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Mayjen Zacky lebih menyebut anggapan itu sebagai upaya mendiskreditkan Kopassus. Namun, ia tidak menyinggung alasan atau kemungkinan lain hingga terbukanya peluang mendiskreditkan Kopassus yang sangat solid tersebut.

Ia pun menolak keras bila dirinya dianggap berada di belakang seluruh kerusuhan dan kekacauan tersebut. Menurut dia, membakar sudah menjadi salah satu budaya dalam mengungkapkan satu kekecewaan. Hal itu juga berlaku di Timor Timur. "Mereka itu biasa seperti itu," ujarnya. "Waktu kerusuhan saya sudah tidak ada di sana," lanjutnya.

Dengan sangat terbuka, Mayjen Zacky Anwar Makarim kemudian menceritakan seluruh tindakannya selama berada di Timtim, menjelang jajak pendapat. Dikatakan, ia berada di Timtim selaku penasihat keamanan Satgas P3TT yang dibentuk hari Jumat, 4 Juni 1999. Ia meninggalkan Timtim dan kembali ke Jakarta, tanggal 30 Agustus 1999 dengan pesawat Merpati Nusantara.

Ia kemudian lebih menyoroti banyaknya ketidakseimbangan dalam soal kerusuhan dan kecurangan. "Kenapa selalu pihak pro-otonomi yang disorot, seolah-olah kelompok lain tidak pernah melakukan kesalahan," tegasnya. Misalnya, banyak pula pos Brimob yang diserang kelompok Falintil. Untuk membuktikan ucapan itu, Pak Zacky lalu memberi setumpuk data tentang penyerangan Falintil dan sederetan tentara yang gugur dalam tugas.

SECARA lebih gamblang, Menhamkam/Panglima TNI Jenderal Wiranto menegaskan, TNI dan polisi tidak mem-*back up* milisi di Timtim. TNI maupun polisi selalu netral. Usai menghadiri rapat Panitia Khusus (Pansus) DPR yang membahas RUU Keselamatan dan Keamanan Negara, ia menilai, kesan TNI berada di belakang milisi hanyalah komentar dari luar negeri. "Tidak mungkin TNI di belakang milisi. Tuduhan mengenai drop senjata, tuduhan kita membantu, itu komentar luar negeri yang justru kamu *back up*, *kan* salah," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/9/99).

Namun, di Istana Merdeka, setelah diterima Presiden BJ Habibie, Wiranto mengatakan, secara kelembagaan atau organisatoris, dalam arti TNI sebagai lembaga, TNI tidak pernah berada di belakang milisi. Namun, ia tidak menolak bila ada oknum atau personel TNI yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Wiranto pun menyinggung adanya "hambatan psikologis" yang dihadapi TNI dalam menuntaskan masalah tersebut, tanpa memperjelas maksudnya.

Bila secara organisatoris atau kelembagaan TNI tidak terlibat, bisa jadi memang seperti itu. Dan tentu Jenderal Wiranto tidak mengada-ada ketika mengatakan hal itu. Untuk mengetahui perkembangan Timtim, Jenderal Wiranto secara khusus mengadakan kunjungan kerja ke Dili, beberapa saat setelah pemerintah resmi menerapkan sistem darurat militer.

Pada kesempatan itu, Wiranto sebenarnya pun ingin bertatap muka langsung dengan para tokoh pro-kemerdekaan. Namun, karena kondisi dan situasi sudah tidak memungkinkan, mereka tidak berhasil menghubungi pihak pro-kemerdekaan. Karena itu, Wiranto lalu hanya bertemu dengan para tokoh pro-integrasi yaitu, Gubernur Timtim

Abilio Jose Osorio Soares, Armindo Mariano, Tito Baptista, Herminio, Mateus Maia, Joao Tavares, Eurico Guterres, Labut Mello, Francisco Carvalho, dan Nazario Corterreal.

Mereka berbicara dalam sebuah pertemuan tertutup di bandara Komoro, Dili. Jenderal Wiranto sempat menyesal dan sanga kecewa dengan kerusuhan di Timtim yang sudah sampai pada tindakan brutal dan kriminal. Ia mengharapkan, kerusuhan itu segera bisa dihentikan hari itu juga.

Wiranto menekankan, seluruh tindakan brutal yang bisa dikatakan sebagai kriminal itu bisa mengganggu kepercayaan internasional kepada Pemerintah RI, khususnya TNI dalam menjaga keamanan di Timtim. Wiranto juga sempat meminta upaya semua pihak untuk meredam kemarahan kelompok pro-integrasi secara persuatif. Tapi, tidak berhasil.

Sedang tentang oknum TNI yang terlibat, di tahun 1999 itu, aparat keamanan di Timtim mencapai lebih dari 15.000 personel. Jumlah itu antara lain terdiri dari kelompok 'milsas' yang mencapai 3.000 orang dan TNI putera daerah yang berjumlah sekitar 6.000 personel.

Diakui, beberapa di antara mereka lalu bergabung dengan kelompok bersenjata pemuda pro-integrasi. TNI menganggap kelompok ini disersi. Melihat komposisi ini, tidak tertutup kemungkinan mereka terlibat aksi kerusuhan dan kebrutalan yang terjadi.

Menyinggung tentang 'hambatan psikologis', seorang perwira mengatakan, hal itu terjadi karena ketidakberdayaan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, dalam menghadapi kekerasan pihak pro-kemerdekaan. Di saat mereka berada dalam suatu euforia, pro-kemerdekaan pun melakukan berbagai pelanggaran, ancaman, dan kekerasan kepada pro-integrasi. Namun, tak satu pun tindakan berarti yang diambil oleh pihak keamanan.

Karena itu, ketika terjadi titik balik, dan pihak pro-integrasi kembali menguasai keadaan, mereka menganggap wajar bila pihak keamanan pun juga harus menutup mata pada segala kebrutalan yang mereka lakukan, seperti pada saat kelompok pro-kemerdekaan mengungkapkan euforia mereka.

Mayjen Kiki Syahnakri, Panglima PDM mempunyai formulasi yang lebih baik. "Tidak benar kalau kita merangkul atau membantu para milisi. Tetapi kalau lalu secara moral kita lebih dekat, ya itu tidak bisa dibantah. Hipokrit nanti kalau kita membantah. Tetapi yang paling baik sekarang adalah mencari jalan damai yang terbaik untuk menyelesaikan Timtim."

Kecaman Internasional

BAK semudah membalikkan telapak tangan, hanya dalam semalam, kerusuhan dan kekacauan di Timtim telah mengubah penghargaan internasional menjadi kutukan dan kecaman pedas. Kecaman cukup keras datang dari PM Australia John Howard melalui telepon langsung kepada Presiden BJ Habibie, usai pengumuman hasil jajak pendapat.

Howard memperingatkan akan timbulnya konsekuensi serius jika ada warga Australia yang menjadi korban. Ia tidak bisa menerima kegagalan polisi dalam mengatasi kekerasan di Timtim. "Saya menyampaikan peringatan atas apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Lebih khusus lagi, saya menyampaikan kekhawatiran keselamatan polisi Australia dan warga Australia lainnya yang berada di Timtim dan keprihatinan tentang bagaimana akibatnya terhadap hubungan (kedua negara) jika mereka diganggu," kata Howard. (*Kompas*, 4/9/99)

Terhadap kritikan pedas itu, Habibie tidak memberi jawaban setimpal. Kecaman balik justru disampaikan KH Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kemudian menjadi Presiden IV RI. Gus Dur menganggap Australia tidak dewasa dalam membawa misi PBB di Timtim (UNAMET) karena berpihak pada kelompok pro-kemerdekaan. Gus Dur pun menilai keberadaan orang Australia dan Kanada telah membuat UNAMET tidak bisa benar-benar netral, terutama karena Australia menerapkan standar ganda. (*Kompas*, 4/9/99).

"Kami telah menyampaikan keprihatinan mendalam atas apa yang terjadi. Respons awal aparat Indonesia terhadap taktik intimidasi itu kurang memadai," kata Jubir Deplu AS Philip Reeker. "Kami mendesak aparat Indonesia sepenuhnya bertanggung jawab dan mengambil langkah segera mengakhiri secara tuntas kegiatan milisi pro-integrasi, menangkap mereka yang menciptakan kekacauan, yang melakukan teror terhadap warga dan yang mengganggu proses PBB," tegasnya.

"Bagaimanapun, kekerasan dalam beberapa hari ini tak bisa dimaafkan dan ngawur. Itu harus dihentikan. Penting bagi aparat Indonesia untuk mengamankan jalan-jalan di Timtim dan menghentikan mereka yang melakukan kekerasan," ujar Menlu Inggris Robin Cook di London.

Bahkan Australia, tidak sekadar berhenti pada kecaman, tetapi mereka langsung beraksi dan mempersiapkan diri untuk pengiriman pasukan multinasional dalam kerangka PBB. Menteri Pertahanan Australia John Moore berada di Darwin untuk mengawasi persiapan Australia. Meskipun, pasukan itu baru akan dikirim setelah ada lampu hijau dari

PBB dan mendapat persetujuan dari pemerintah RI. "Terus terang, kami terlibat secara mendalam pembahasan (pasukan penjaga perdamaian), dalam bentuk apa pun yang dianggap memadai," kata Menlu Alexander Downer.

Walau begitu, dari New York diberitakan, Amerika menolak usulan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB ke Timtim. Wakil Dubes AS di PBB New York, Peter Burleigh mengingatkan, Indonesia yang bertanggung jawab penuh untuk masalah keamanan di Timtim. "Kita percayakan kepada pihak Indonesia yang berwenang di Indonesia untuk menciptakan situasi aman dan damai di seluruh Timtim apa pun hasil penentuan pendapat itu," tegasnya.

Kekerasan di Timtim itu juga membuat Dewan Keamanan (DK) PBB mengadakan sidang darurat. Selain mengutuk sekeras-kerasnya, DK juga menuntut aparat keamanan menangkap dan mengadili para pelaku kekerasan tersebut. Kondisi ini, pada akhirnya membuat PBB memutuskan mengirimkan pasukan multinasional, sebelum menjadi pasukan perdamaian PBB. Hal itu sebelumnya diusulkan Ketua Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Mary Robinson.

Lebih dari itu, Mary Robinson pula yang ingin membawa Indonesia ke pengadilan internasional. Bahkan untuk itu, ia rela melakukan kecurangan dengan memalsu suara Rwanda dalam sidang Komisi HAM di PBB Geneva.

Tarik menarik Indonesia dengan dunia internasional pun cukup kencang. Di satu sisi, Indonesia bertahan untuk tetap memfungsikan sistem dan perangkat hukum nasional. Di sisi lain, dunia internasional pun bersikeras membawa pelaku ke Mahkamah Internasional, sejajar dengan Rwanda, Jepang (untuk kasus PD II), Yugoslavia (pembantaian etnis), dan Nurnberg (Jerman, dalam kasus Nazi). Sesaat melihat hancurnya Timtim, orang pun lalu berpikir Indonesia sekuualitas dengan Rwanda.

Beruntung, angin kekuasaan di Indonesia berganti. Presiden BJ Habibie digantikan KH Abdurrahman Wahid. Dan dengan gigih, Gus Dur berkeliling dunia untuk mencari dukungan internasional. Karena itu, Sekjen PBB Kofi Annan merekomendasikan DK PBB untuk memberi kesempatan Indonesia mengadili para pelakunya dalam kerangka hukum nasional. ***

BAB V

Darurat Militer

SETELAH “dipulangkan dengan paksa” awal September 1999 lalu, saya tidak pernah merasa tenang hidup di Jakarta. Hampir setiap hari saya bermimpi berada di gudang senjata. Bahkan kadang kamar kos saya pun terasa penuh dengan senjata yang seluruhnya berwarna hijau gelap. Karena itu, saya memberanikan diri meminta dikembalikan ke Timtim. Saya merasa tugas belum selesai. Karena ada ganjalan dengan pihak militer, saya minta dikembalikan ke Timtim dalam rombongan militer.

Beruntung, Mabes TNI Cilangkap bersedia mengawal wartawan yang ingin ke Timtim meliput darurat militer. Kamis, 16 September 1999 pagi, saya terbang kembali ke Timtim. Di tengah teriknya matahari, pesawat carter Pelita Air Service dengan tiket 3.000 dollar AS per penumpang untuk sekali terbang itu, mendarat di bandara Komoro, Dili. Rombongan wartawan dari Jakarta, yang mewakili Reuters, Time Magazine, Sydney Morning Herald, Kyodo, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, Tajuk, dan tentu saja saya dari *Kompas*, secara khusus dikawal Kolonel Panggih, Perwira dari bagian Penerangan Mabes TNI.

Dili sudah dalam kondisi luluh lantak dan hangus terbakar. Kota yang dulu semarak itu dalam sekejap telah mati, menyisakan puing dan abu, serta beberapa gelintir warga. Timtim telah "pergi". Tak menyisakan setitik pun tanda kehidupan. Masyarakat Timtim kocar-kacir. Anak terpisah dari bapak, bapak terpisah dari anak. Tak satu pun bangunan yang utuh, kecuali beberapa bangunan peninggalan Portugis, seperti kawasan Rumah Tinggal Panglima atau RT-Pang, Gereja Motael, gereja Katedral, dan gereja-gereja lain. Namun, banyak di antara bangunan itu yang rata dengan tanah.

Waktu itu, Indonesia sudah memutuskan menerapkan sistem darurat militer. Pemberlakuan sistem itu tak urung mengundang kecaman yang lebih pedas. Tekanan terhadap Indonesia pun semakin tinggi. Tidak hanya dari negara-negara barat, tetapi juga dari kalangan negara sahabat ASEAN. Mereka tak ketinggalan mendesak Indonesia menghentikan dan mencegah pertumpahan darah yang lebih dahsyat.

BANDARA Komoro, Dili, begitu terik. Kering kerontang. Daun dan bunga bougenville yang dulu tumbuh indah dan cantik, kini mengering dan layu. Aroma tanah dan rumput kering pun sirna sudah. Yang tertinggal hanyalah bau yang sama sekali tidak sedap.

Di bawah pohon-pohon di pinggir landasan, warga Timtim terlihat duduk-duduk. Memelas. Mereka berlindung di balik tenda terpal atau kain seadanya. Seluruh warga itu adalah pengungsi yang menunggu antrean kendaraan untuk bisa dibawa keluar dari Dili.

Dengan pandangan kosong, mereka memandangi kami yang baru turun dari pesawat dengan sedikit ceria, tawa, dan canda. Pesawat kami menjadi satu-satunya pesawat yang mendarat siang itu. Namun, beberapa saat kemudian, mendarat pesawat Hercules yang siap mengangkut mereka.

"Selamat datang, maaf beginilah keadaannya," sapa ramah Letkol Laut (P) Willem Rampangilei, Komandan Satgas Penerangan PDM, saat kami tiba di bandara. Jelas terlihat, ia berusaha seramah dan sebaik mungkin menerima kami. Kami langsung dibawa city tour, keliling kota Dili dalam mobil bercat hijau tentara.

Dili telah menjadi kota mati. Hampir seluruh bangunan terlalap api. Hangus. Sebagian rata dengan tanah. Kota yang pernah semarak itu kini tinggal menyisakan abu dan puing-puing yang hitam mengering, bekas terbakar.



*Dua anak bermain di depan bangunan yang hangus terbakar di kota Dili
foto: Eddy Hasby*

Hotel Mahkota Timor dalam kondisi porak-poranda, dan hangus. Sedang Hotel Turismo dalam kondisi kehitam-hitaman, hampir terbakar. Wilayah Kolmera, yang dulu menjadi pusat kehidupan, karena berderet toko segala keperluan, makanan, dan kebutuhan sehari-hari Dili, dalam kondisi hancur dan hitam terbakar.

Tak satu pun bangunan yang tersisa dalam kondisi utuh. Di antara reruntuhan dan puing-puing yang tersisa, muncul tulisan-tulisan "Merdeka Makan Batu" atau "Makan Batu itu". Seluruh bangunan di luar pagar taman Bunda Maria, Lecidere, Dili timur, rusak total.

Termasuk kediaman Uskup Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo SDB. Bangunan itu hancur, total, meski tidak rata dengan tanah. Patung Bunda Maria yang masih terletak di bekas ruang tamu, tidak lagi berhidung. Entah siapa yang tega "memotong" hidung patung Bunda Maria yang tak berdosa itu. "Satu, dua, tiga, angkat... Satu, dua, tiga, angkat, satu, dua, tiga, angkat..," sekelompok anggota TNI sedang berusaha mengangkat sebuah brankas yang cukup berat. Hari Kamis itu, sudah dua hari, mereka membersihkan kediaman Uskup Belo. Menurut rencana, kediaman itu akan segera dibangun dan dikembalikan seperti bentuk semula.

Dari kediaman Uskup Belo, kami keliling lagi. Kali ini menyisir tepi pantai. Wajah Faroul dan pasir putih, tempat kami biasa makan ikan bakar, sudah sama sekali habis. Hangus terbakar. Tak ada lagi Trenggalek maupun Tulung Agung Fried Chicken.

Halaman kantor gubernur, pelabuhan Dili, dan sepanjang pantai Dili dipenuhi ribuan orang yang hidup di bawah tenda-tenda terpal. Mereka hidup ala kadarnya dan membawa bekal seadanya. Sebagian dari mereka menunggu kendaraan untuk dibawa keluar dari Dili. Walau begitu, mereka mengaku tidak kekurangan makanan.

Usai keliling, kami langsung dibawa ke Makorem, Dili, dan tinggal di tempat itu. Kantor yang dulu terkesan serem, itu tiba-tiba kini begitu ramah menyambut kehadiran kami. Karena itu, tak jarang kami menyebutnya "Hotel Makorem Hilton".

Letkol Willem Rampangilei menempatkan kami di ruangan luas bagian belakang. Namun, tiba-tiba, Yenni Wahid, koresponden Sydney Morning Herald meminta kami yang perempuan, bergabung di ruang Sekum atau Sekretaris Umum. Ah, ternyata ruang itu ber-AC. Malam itu, kami semua terbuai di tempat tidur lipat dari bahan besi dan terpal. Dalam perkembangan selanjutnya, ruang yang sebenarnya cukup luas itu, menjadi terasa sempit dan sesak. Akhirnya hampir semua wartawan, tak hanya wartawan perempuan, ikut mendinginkan badan di satu-satunya ruang ber-AC tersebut.

SETELAH berebut kamar mandi, kami mengawali hari dengan briefing dari Mayjen TNI Kiki Syahnakri, Panglima PDM. Hari pertama di Makorem, saya masih takut bertemu atau berhadapan dengan Pak Kiki dan seluruh pasukan berseragam hijau itu. Maklum, berita pencekalan tanggal 2 September 1999 itu masih jelas terngiang di telinga. Karena itu, dalam setiap briefing saya lebih banyak diam. Untuk bertanya pun "tidak berani". Bahkan menyebut nama sendiri, pun saya tidak mampu. Jika terpaksa membuka identitas, saya hanya mengatakan dari "*Kompas*". Trauma akhir Agustus masih sangat saya rasakan.

Hari itu, Pak Kiki menekankan, kondisi Timtim, khususnya Dili secara umum masih rawan. Kehancuran kota Dili merupakan yang terparah, dibanding tempat lain di seluruh Timtim. Sebanyak 78-80 persen bangunan di Dili hancur, yang kemudian disusul Manatuto dan Los Palos.

Hampir tak ada kehidupan lain di Dili, kecuali pengungsi. Dalam kondisi kotor, lusuh, dan sedikit berantakan, para pengungsi terkesan bergerak sangat lamban. Sebagian besar dari mereka terkumpul di Pelabuhan Dili dan seluruh lokasi di sepanjang pantai, serta di halaman Kantor Gubernur. Sebagian besar dari mereka telah berada di pelabuhan Dili sejak tanggal 6 September 1999.

"Kami masih menunggu kemungkinan diberangkatkan ke Atambua," begitu rata-rata pendapat para pengungsi itu. Meski tampak lusuh dan lelah, namun tak satu pun dari mereka yang mengaku kekurangan pangan. "Stok beras kami cukup," kata salah satu dari mereka. Sambil tersenyum ia mengaku, sempat menjarah beras dan bahan pangan lain di pasar dan toko sebelum tempat itu dibakar habis.

Pak Kiki mensinyalir masih ada sekitar 138.000 pengungsi di seluruh Timtim yang menunggu diberangkatkan keluar dari Timtim. Sekitar 10.000 di antaranya berada di Dili. Aspirasi politik yang ada akhirnya "merembet" pada pola dan tempat pengungsian. Pengungsi di Dili, lanjut Pak Kiki, rata-rata berasal dari kelompok pro-otonomi. Sedang pengungsi pro-kemerdekaan lebih banyak yang melarikan diri ke gunung.

Diperkirakan ada sekitar 30.000 pengungsi yang berada di gunung dan sekitar 3.000 orang yang bermukim di Dare, di bawah perlindungan Romo Tan. Masih menurut Pak Kiki, TNI telah mengadakan kontak dengan para pengungsi di gunung. Dalam hal ini, TNI meminta para pengungsi tidak turun terlebih dulu untuk mencegah kemungkinan bentrok antarpengungsi. Walau begitu, tidak tertutup kemungkinan, pengungsi pro-kemerdekaan juga berada di Dili.

Pada kesempatan itu, Pak Kiki sekaligus membantah semua berita yang menyangkut nasib para pastor, seperti Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento dan Romo Tan. Misalnya, nasib Romo Tan yang tak jelas karena rumahnya dibakar, atau nasib Mgr Basilio yang tertembak bahkan tangannya dipenggal.

"Semua itu tidak benar," tegas Pak Kiki. "Romo Tan baru saja dari sini dan rumahnya sama sekali tidak terbakar. Kalau Pastur Basilio, nanti lihat sendiri saja, saya akan memberi fasilitas heli untuk ke Baucau, silakan bertemu langsung dengan Uskup, beliau tidak ke mana-mana, tetap di Baucau," lanjutnya.

Walau begitu, Pak Kiki Syahnakri mengakui, darurat militer yang telah diterapkan belum sepenuhnya mampu memulihkan stabilitas keamanan Timtim. "Kondisinya memang tidak porak-poranda, tetapi situasinya masih rawan," ujarnya. Kerawanan terutama disebabkan oleh belum sepenuhnya kondisi Timtim terkendalikan dengan baik. Dalam arti, masih banyak kantong-kantong "perlawanan" yang tersembunyi. Tolok ukur utama hal terlihat nyata pada ketidakberanian para wartawan untuk berjalan sendirian. Perasaan tidak aman benar-benar terasa. Suasana anti-Indonesia yang sangat tinggi membuat kami terus didera rawa was-was setiap kali bertemu warga Timtim.

Kondisi seperti ini memang jauh lebih baik dibanding sebelum penerapan darurat militer. Setidaknya sejak diterapkan darurat militer angka pembunuhan menurun. Yaitu, dari sekitar 23 orang yang terbunuh pada periode Mei-Agustus atau masa pra-jajak pendapat, lalu meningkat menjadi 30 di masa jajak pendapat periode 4-6 September, kemudian turun menjadi empat orang pada periode 7-10 September, tepatnya sejak penerapan darurat militer.

Sesuai janji yang telah diucapkan, Jumat (17/9/99), Pak Kiki mengirim kami ke Baucau dengan helikopter. Selain untuk melihat kondisi Baucau, perjalanan itu secara khusus dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento. Beredar kabar cukup santer bahwa Uskup Baucau pun terpaksa melarikan diri ke gunung setelah tangannya terbacok.

Dan alangkah lega ketika melihat Uskup Nascimento segar bugar. Seperti biasa, Uskup yang sangat kebabakan dan penuh kasih ini langsung memeluk dengan penuh syukur. "*Thanks God, you're alive,*" kata Uskup Nascimento. Sebaliknya saya pun bersyukur melihat kondisi Uskup yang segar bugar tanpa luka sedikit pun. Bahkan hari itu, Uskup Nascimento

sengaja mengenakan kemeja lengan pendek untuk menunjukkan tidak ada luka sedikit pun di tangannya.

“Saya berterima kasih karena banyak yang mengkhawatirkan saya, tetapi tidak terjadi apa-apa pada saya, dan saya tidak pernah pergi ke gunung. Itu semua tidak perlu, mungkin itu hanya publisitas politik. Tetapi kenyataannya tidak terjadi apa-apa pada saya dan saya tetap di Baucau,” tegas Uskup.

Tak seperti Dili yang hancur total, kerusakan di Baucau relatif kecil. Bahkan bisa dikatakan selamat. Hari Jumat 17 September 1999 itu, tanda-tanda kehidupan di Baucau bahkan mengarah ke normal. RS Baucau, misalnya sudah beroperasi seperti biasa. Dua dokter yang sedang bertugas, dr Joao Pedro dan dr Hilary sibuk mengurus Ipolito, bayi berumur lima bulan, anak dari Apelsonia Soares Belo, warga dari Kota Lama.



*Pusat Kota Baucau.
foto: Eddy Hasby*

Dokter Pedro maupun Hilary mengatakan, untuk menangani para pasien, mereka menggunakan obat-obatan stok lama. “Tetapi, jika kondisinya begini-begini terus dan tidak segera diperbaiki, rumah sakit itu hanya bisa bertahan tak lebih dari satu minggu,” ujarnya.

Seiring dengan itu, ‘hubungan’ saya dengan para pasukan TNI itu pun membaik. Jujur harus diakui, karakter TNI di masa darurat militer memang sangat berbeda. Unsur

kemanusiaan mereka sungguh terasa. Kenyataannya, tidak hanya saya yang merasakan perbedaan itu, tetapi termasuk Uskup Nascimento.

Uskup mengaku sangat dekat dengan Komandan Sektor Timur Kol Inf Irwan Kusnadi yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Brigade Infantri Lintas Udara (Dan Brigif Linud) 3 dan seluruh pasukannya. Kedekatan itu diwujudkan dalam kerja sama membangun kembali Baucau. *“I don't have problem with them. I think they're professional. We have a very good cooperation,”* kata Uskup tentang kehadiran TNI di Baucau.

Sikap seperti itu juga muncul dari masyarakat Baucau. Mereka menyambut baik kehadiran para tentara. Tak sedikit pun rasa takut membayang di wajah para pedagang pasar “tiban” di jalan utama Baucau. “Mereka baik *kok*, kami malah merasa sangat aman bersama mereka,” kata seorang pedagang sayur. “Sudah aman, saya yakin sekali. Saya senang dengan operasi ini, karena membuat kami merasa aman mulai minggu kemarin,” sambung Domingus Freitas, Albertino Gusmão, dan Agustino da Costa yang juga sedang berada di pasar “tiban” tersebut.

Kepercayaan saya kepada mereka pun tumbuh. Perlahan tetapi pasti, kekhawatiran dan ketakutan saya kepada tentara, sirna. Hari itu, mereka bahkan secara khusus mengawal saya untuk mengunjungi keluarga Kak Fatinha yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Rumah Kak Fati yang terletak di balik bukit karang terjal, khas Baucau, begitu sepi, seolah tak berpenghuni.

Namun, terlihat ada bekas kayu terbakar di dapur. Saya pun yakin, rumah itu ada yang menempati. “Mbak Riiiiinnnnnn,” pekik Kak Fati, begitu melihat saya. Ia keluar dari persembunyian dan memeluk sangat erat. Sungguh, terasa ada kerinduan sangat dalam pada pelukan itu. Sejak kerusuhan, Kak Fati hanya tinggal bersama sang Ayah. Sementara anggota keluarga lain mengungsi.

“Maaf, tadi saya sembunyi karena mendengar suara sepatu tentara,” katanya setengah berbisik.

“Mbaaaakkk, saya takut sekali,” lanjutnya tetap dengan suara tertahan. Trauma kepada tentara memang belum hilang dari hatinya. Butuh waktu beberapa saat untuk meyakinkan adanya perbedaan karakter tentara di era darurat militer sekarang ini.

Ia bercerita, ketika hasil jajak pendapat diumumkan, Baucau dicekam suasana menegangkan. Karena itu, semua anggota keluarga Kak Fati memutuskan ikut mengungsi. Maklum, keluarga ini memang dekat dengan kelompok pro-kemerdekaan. Hanya Kak Fati bersama ayahnya memilih tinggal dengan menghadapi segala resiko. Beruntung,

pertempuran di Baucau tidak sehebat di tempat lain. Bahkan bisa dikatakan, basis kelompok pro-kemerdekaan ini utuh, dengan kerusakan sangat kecil.

Setelah puas melihat Baucau, kami kembali ke Dili. Seperti sudah menjadi keharusan, sore itu Pak Kiki memberi briefing kepada seluruh wartawan. Banyak hal yang ia bahas sore itu. Seperti persiapan kedatangan INTERFET, pasukan multinasional yang akan menggantikan tugas TNI dalam mengamankan Timtim, hingga masalah Timtim ke depan.

Menyinggung rencana keamanan ke depan, Pak Kiki mengatakan, hari itu belum ada penarikan pasukan yang bertugas di Timtim. Namun rencananya, Indonesia akan menarik dua dari enam batalyon infantri dan lima batalyon dari tim teritorial. Seiring dengan itu, pemerintah akan pula melikuidasi Korem dan Polda. Dengan kata lain, Korem 164 Wiradharma akan menjadi embrio untuk Flores.

Usai jumpa pers, persoalan pun muncul. Tak ada line telepon yang bisa dipakai untuk mengirim berita. Satu-satunya line yang disediakan masih dipakai untuk kepentingan pengiriman foto. Berhubung hari semakin malam, dan dead-line semakin dekat, saya pun diantar oleh seorang mayor ke Telkom. Pagar kantor telkom terkunci rapat.

“Selamat malam,” kata sang mayor sambil mengetuk pagar Telkom.

“Malam,” jawab seorang penjaga.

“Saya mengantar wartawan *Kompas* untuk mengirim berita. Bisa minta tolong dibukakan pagarnya.”

Begitu mendengar nama “*Kompas*”, para penjaga Telkom yang semula tak terlihat, langsung bangkit dan berdiri dalam posisi siaga. Kembali saya dicekam rasa takut luar biasa, begitu melihat para penjaga Telkom itu. Mereka berbadan tegap dan berbandana Merah Putih di kepala. Bulu kuduk saya berdiri. Saya seperti dibawa kembali ke masa-masa ketika berhadapan dengan para milisi. Saya memutuskan tidak jadi mengirim berita dari kantor Telkom.

“Kita kembali ke Makorem saja, Mas.”

“Mbak merasa tidak aman? Ya, memang sepertinya tidak aman, kita kembali saja. Maaf, tidak jadi. Terima kasih.”

Karena didesak untuk segera mengirim berita, akhirnya malam itu saya menghubungi Pak Willem Rampangilei.

“Jangan kuatir, masih ada telepon yang bisa dipakai, di ruang operasi,” ujarnya.

Malam itu, untuk pertama kalinya saya memasuki ruang operasi militer di Makorem. Hal yang bahkan belum pernah melintas di kepala saya. Maklum, ruang ini sangat steril khususnya untuk kaum wartawan seperti kami. Dinding ruang itu berhias berbagai ukuran peta, sedang di meja penuh dengan alat komunikasi dan berbagai tumpukan kertas. Saya menduga kertas-kertas itu adalah file.

“Malam, Dan (singkatan dari Komandan), saya nitip kawan saya, wartawan *Kompas* yang kesulitan mengirim berita,” kata Pak Willem kepada seseorang yang duduk di salah satu di ruang itu. Melihat posisinya, saya memperkirakan sosok ini adalah pihak yang bertanggung jawab. Hati saya berdesir. Ia hanya berdehem sambil melirik dari balik kaca matanya. Tanpa sepatah kata pun. “Terima kasih, Dan,” kata Pak Willem yang kemudian meninggalkan saya sendirian.

Keringat dingin saya langsung mengucur. Jantung pun rasanya akan copot. Wajah sosok itu begitu dingin tanpa ekspresi. Apalagi ditambah dengan kumisnya yang melintang. “Mati aku!” pikir saya.

“Pakai telepon yang di meja sana,” ucapnya tiba-tiba. Masih tanpa ekspresi.

“Baik, Pak.” Jawab saya singkat. Dengan sedikit gemetar saya mencari line telepon. Harapan saya hanya satu, line teleponnya beres, sehingga bisa segera meninggalkan ruangan tersebut.

“Terima kasih, Pak,” ucap saya sambil bersiap untuk melarikan diri. Belakangan baru saya tahu, sosok itu adalah Letkol (Czi) Liliek Koeshadianto, Wasintel Kasdam IX/Udayana yang kali ini menjabat Asintel Komando Operasi PDM. Belakangan pula baru saya tahu bahwa ternyata Pak Liliek tidak seserem itu. Ia pun cukup ramah.

Malam itu, untuk pertama kalinya kami merasakan menu militer T-2, yaitu, nasi goreng dalam kaleng yang harus dipanaskan 100 derajat Celcius sebelum disantap. Untuk ukuran perut perempuan normal Indonesia, dua sendok makan nasi goreng T-2 sudah sangat mengenyangkan. Maklum, makanan itu khusus disediakan bagi pasukan tempur.

HARI-hari di Dili berjalan seperti biasa. Sesekali masih terdengar tembakan. Bahkan hari itu terjadi pembakaran cukup besar di wilayah antara Dare dengan Lahane. Karena itu tetap ada kecemasan, ada pula ketakutan. Ketakutan saya secara pribadi kepada para tentara yang belum benar-benar hilang, dan kecemasan pada kondisi Timtim secara keseluruhan.

Tak banyak wartawan Indonesia yang cukup berani untuk berjalan sendirian. Maklum, kondisi waktu itu sangat tidak kondusif. Kecuali untuk beberapa wartawan asing tentu saja. Pada masa ini, wartawan asing bisa lebih berleluasa karena sejak darurat militer diterapkan, ancaman 'bahaya' milisi yang selama ini selalu membayang, sudah teredam.

"Mereka semua sudah di Timbar (Timor Barat)," kata Pak Kiki. Ditegaskan, Aitarak dan Besi Merah Putih (BMP) sudah diamankan di Tasitolu.

"Mereka dikunci di sana, sama sekali tidak diizinkan turun ke kota," tegas Pak Kiki.

Ia mengakui, pekerjaan mengamankan Timtim dari unsur milisi, dirasakan hampir sebagai mustahil. Terutama karena kelompok tersebut tetap bersenjata dan semakin beringas. Hal itu diperkuat Kol (Inf) Geerhan Lantara, Komandan sektor Dili. Karena itu, tak jarang ia harus berhadapan langsung dan beradu senjata dengan para milisi yang sesama orang Indonesia. Beruntung, selama bertugas di masa darurat militer, ia masih bisa bertahan untuk tidak melepaskan satu butir peluru pun.

Melihat besarnya kerusakan, tingginya tingkat kekerasan, dan eksodus besar-besaran di Timtim, Menhankam/Panglima TNI Wiranto menugaskan beberapa perwira TNI untuk meredam kemarahan kelompok pro-integrasi. Tanggal 8 September 1999, para perwira TNI itu bertemu para tokoh PPI yang terdiri dari Gubernur Abilio Jose Osorio Soares, Domingoes Soares (FPDK), Armindo Mariano (DPRD-I), Martinho (Bupati Viqueque), dan Herminio (Kepala Staf PPI), di Kupang, pukul 21.00-23.00 WITA.

Diharapkan, pertemuan itu setidaknya bisa menyadarkan pentingnya sikap kesatria pihak otonomi dalam menerima kekalahan. Sayang, pesan mulia itu tidak pernah sampai ke lapangan. Upaya meredam kemarahan massa secara persuasif, gagal. Kendala komunikasi akhirnya membuat pesan 'mulia' Menhankam/Panglima TNI Wiranto tidak sampai sasaran. Dalam hal ini, sebenarnya upaya TNI dalam mengatasi masalah milisi, khususnya di masa darurat militer, pantas mendapat acungan jempol. Karena pada waktu itu, kata "milisi" hampir sudah tak terdengar.

Rakyat Timtim pun mulai 'kembali', meski masih bersifat sporadis. Walau begitu, kondisi ini belum sepenuhnya bisa dikatakan aman, terutama bagi wartawan Indonesia. Rasa cemas dan was-was kenyataannya tetap menghantui kami ketika melaksanakan tugas. Suasana peliputan di Timtim, tepatnya Dili waktu itu memang sulit diduga. Jelas sekali terasa adanya sikap curiga. Curiga kepada semua pihak termasuk para wartawan.

Pandangan sinis dan sikap tidak ramah dari warga Timtim hampir bisa dipastikan menjadi bagian dari santapan harian kami. Karena itu, Pak Kiki benar-benar wanti-wanti

agar kami tidak terlalu berani untuk berjalan sendirian. Waktu itu, sudah cukup sulit untuk membedakan mana kawan dan lawan. Melihat kondisi ini, Pak Kiki tidak tinggal diam. Ia menyediakan satu truk khusus untuk mendukung seluruh keperluan wartawan.

Anehnya, hanya wartawan yang dikenal memiliki hubungan dengan pro-kemerdekaan, khususnya, Falintil, yang cukup aman untuk bergerak. Falintil memang memiliki jaringan yang sangat solid. Komando atau instruksi dari atasan, baik Xanana maupun Matan Ruak, akan diterjemahkan dan dilaksanakan seperti aslinya hingga di lapangan.

Saya sendiri kurang memahami, bagaimana cara kerja mereka. Namun, ketika Matan Ruak memerintahkan untuk melindungi saya, hal itu benar-benar saya rasakan di seluruh pelosok Timtim. Rasa aman benar-benar saya rasakan ketika bertemu dengan anak buah Matan Ruak, meski mereka belum pernah bertemu saya. Entah bagaimana caranya, namun toh mereka tetap tahu bahwa saya termasuk salah satu yang harus mereka lindungi.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya lebih banyak berkeliling dengan Romo Ageng. Terutama untuk masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pro-kemerdekaan. Meski mereka tahu persis, saya teman baik Matan Ruak, tetapi kenyataan saya tinggal di Makorem bersama TNI, membuat mereka pun sedikit curiga. Dalam posisi seperti ini, Romo Ageng memang menjadi penengah yang sangat baik. Karena Romo Ageng diterima semua pihak.

SEIRING dengan itu, 'hubungan' saya dengan para tentara pun membaik. Harus saya akui, Romo Ageng pun berperan dalam hal ini. Mungkin dari Romolah para tentara itu akhirnya memahami siapa sebenarnya saya. Setidaknya, para tentara pun akhirnya bisa benar-benar mengerti antara tugas sebagai wartawan dengan aspirasi pribadi memang tidak selalu bisa satu garis. Bahwa nasionalisme dengan profesi tidak selalu bisa jalan seiring.

Romo Ageng adalah pastor senior yang telah bertugas di Timtim sejak tahun 1995. Setelah mengabdikan diri selama delapan tahun di Provincialat Sarekat Jesuit di Semarang, Jawa Tengah, tahun 1995, Romo Josef Ageng Marwata SJ dipindahkan ke Timtim. Pengalamannya sebagai Kepala Sekolah di SMA Kolese Loyola di Semarang menjadi salah satu alasan. Karena itu, di Timtim ia menggantikan Rm Markus Wanandi SJ sebagai Kepala Sekolah SMA Santo Yosef, Balide. Tahun 1996, ia juga menggantikan posisi Rm Albrecht Karim SJ sebagai Superior di Timtim.

Saat di bandara Komoro, Dili, tiba-tiba saya bertemu Mayor Bambang Eko Suharyanto. Ia saya kenal ketika masih menjadi Liaison Officer (LO) militer di Same,

Manufahi. Tepatnya, ketika saya bermalam di Wisma Kablaki untuk mengetahui lebih jauh tentang persiapan pro-otonomi di wilayah Same hingga bertemu Kapela, salah satu tokoh kunci pro-otonomi setempat.

Saya heran dengan sikap perwira menengah yang satu ini. Ia begitu terbuka. Karena itu, kami bisa berdiskusi dengan baik tentang berbagai hal dalam kaitan dengan jajak pendapat. Termasuk keberadaan, kekuatan, dan taktik kelompok pro-kemerdekaan. Saya semakin heran, ketika ia menawarkan bantuan untuk menemui kelompok pro-kemerdekaan. Walau ia mengaku hanya memiliki akses dan kemampuan yang sangat terbatas. Namun, saya sangat menghargai tawaran itu. Dalam hati saya berpikir, apakah keterbukaan ini karena ia dari Angkatan Udara? Mungkin...

“E.. Mbak Riiiiiiiiieeeeeen...,” pekik Mayor Bambang ketika kami bertemu. Saya tidak segera menjawab karena agak pangling. Selama ini saya tidak pernah melihat ia mengenakan baju loreng. Waktu itu ia berbaju loreng lengkap dengan peluh bercucuran.

Mendengar nama saya diteriakkan, puluhan pasang mata dari tentara lain yang juga berbaju loreng langsung mengarahkan pandangan kepada kami. Sorot mata mereka sangat tajam. Barangkali mereka terkejut tiba-tiba nama saya sudah ada di Timtim lagi, setelah ancaman bertubi-tubi di bulan sebelumnya.

Melihat sikap mereka, jantung saya berdetak sangat kencang. “Aduh, Mas Bambang jangan keras-keras dong manggilnya. Sampai hari ini saya belum berani mengaku bahwa saya inilah yang bernama Rien Kuntari. Yang dicekal dan akan dibunuh oleh para milisi karena dinilai sangat pro-kemerdekaan itu,” bisik saya dalam hati. Saya mencoba tersenyum, tetapi bibir ini sangat sulit digerakkan.

“Ini saudara saya, kami sama-sama berjuang di Same,” kata Mayor Bambang spontan ketika sadar ada puluhan pasang mata dari banyak orang lain yang juga berseragam loreng melihat ke arah kami. Sejak kejadian itu, banyak tentara yang kemudian sering menyapa saya dengan ramah. Kekakuan di antara kami pun mencair.

“Yuk, melok, Mbak. Sampeyan rak wis suwe gak mangan enak, tah,” ujarnya. Sore itu, Mayor Bambang menjemput di Makorem. Saya diajak ke tempat para mantan LO Militer di sekitar Faroul. Bisa dipastikan, hari pertama di tempat itu, hati penuh dengan rasa was-was.

“Mbak, ada yang pingin kenal,” kata Mayor Bambang.

“Waduh, habislah saya,” bisik saya dalam hati. Kembali jantung saya terguncang-guncang. Mayor Bambang lalu membimbing saya ke ruang makan. Di tempat itu, sudah menunggu Letkol Hari Guritno.

“Mati aku.”

“Silakan duduk, Mbak. Makan, yuk,” kata Letkol Hari Guritno.

Meski sapaan terdengar ramah, namun tetap membuat jantung saya semakin kencang berdegub. “Terima kasih, Mas.” Ah lega, sebuah fase menegangkan pun berlalu. Ternyata yang terjadi adalah ‘interogasi’ sangat bersahabat. Bahkan, di tempat ini saya selalu mendapat suguhan makan siang yang begitu nikmat, hasil karya para LO tersebut.

“The art of cooking,” kata Mayor Isdarmawan Gane Moeljo yang biasa disapa Mayor Gane, sambil membakar sate dengan caranya yang cukup unik, yaitu terlebih dulu dibungkus dengan aluminium foil. Mayor Gane adalah salah satu rekan Mayor Bambang yang memang suka memasak. Sejak itu, mereka lalu sering menjemput kami, di Makorem untuk diajak makan di Faroul atau disisipkan di sela-sela operasi mereka.

Jujur harus saya akui, sikap dan perangai para tentara di era darurat militer memang sangat berbeda dengan sebelumnya. Bukan bermaksud memuji, kenyataannya mereka mampu bertindak profesional namun tetap manusiawi.

Khususnya yang berada di Makorem Dili. Jelas mereka sangat kooperatif dan selalu siap membantu. Bahkan membantu dalam bentuk apa pun. Dari mencarikan makanan hingga mencarikan saluran telepon untuk kepentingan pengiriman berita. Maklum kota Dili sudah porak poranda. Karena itu, meski serba kekurangan, namun tinggal di Makorem sudah bak tinggal di sebuah hotel.

Ternyata, kesan seperti itu dirasakan pula oleh para wartawan asing. “I trust these guys,” kata Maria Reza dari CNN yang ikut bergabung di Hotel Makorem. Sayang, para wartawan asing yang telah ‘merasakan’ sentuhan manusiawi para tentara Indonesia di era darurat militer itu kemudian digantikan oleh para wartawan asing yang benar-benar masih asing dengan kondisi Timtim. Bahkan banyak pula yang baru pertama kali ke Timtim. Mungkin hal seperti inilah yang membuat perubahan sikap TNI menjadi lebih manusiawi itu tidak pernah masuk dalam pemberitaan media massa.

Belakangan baru saya ketahui, para personel dalam darurat militer ini memang mendapat pelatihan khusus dengan standar internasional. Tepatnya, lima batalyon TNI Angkatan Darat dan satu batalyon Marinir itu mendapat pelatihan berstandar pasukan perdamaian PBB (UN PKO/United Nation Peace Keeping Operation), dengan penekanan khusus pada aspek netralitas dan sisi manusiawi. Maka tidak mengherankan jika regu ini mampu bertindak lebih profesional dan tidak lagi menganggap Falintil sebagai musuh.



*Barikade di depan Gereja Motael, Pantai Faroul, Dili, 29 Oktober 1999
foto: Eddy Hasby*

Di kesempatan ini pula tanpa diduga, saya mendapat cerita yang berbau setengah pengakuan “dosa” dari seorang teman. Hari itu, ia mengatakan ingin berbicara dari hati ke hati. Tanpa curiga sedikit pun, dengan senang hati saya mengiyakan. Kami pun menuju ruang depan Makorem yang tidak terlalu padat.

Dengan sangat hati-hati, pria hitam manis dengan sorot mata tajam ini kemudian bercerita tentang asal-muasal kisah yang hampir menewaskan diri saya dan teman-teman di bulan Agustus itu.

“Saya minta maaf Rien, selama ini informasi tentang kamu simpang siur. Saya sempat yakin pada apa yang dikatakan orang-orang tentang kamu, bahwa kamu sangat pro-kemerdekaan, tidak setia kawan, tidak nasionalis, dan sebagainya....”

Sesaat ia terdiam....

“Tetapi, terus terang pandangan saya tentang kamu luntur dan berubah 180 derajat saat melihat kamu menitikkan air mata dan menangis tak henti ketika mendengar Kornelis hilang. Aku juga terharu ketika kamu pun memutuskan mencari sendirian keberadaan Kornelis, dengan menempuh segala resiko. Aku benar-benar terharu....” lanjutnya. Kornelis adalah wartawan *Kompas* di Timtim yang tertembak di Bekora, Dili timur.

Saya terdiam mendengar penuturan itu.

“Jadi, selama ini mereka mencap saya seperti itu? Dan, kau tahu persis rencana pembunuhan terhadapku dan kawan-kawan?”

“Ya...,” jawabnya lirih.

Saya semakin tak mampu berkata-kata ketika dia dengan detil menceritakan bagaimana rencana pembunuhan terhadap saya di akhir bulan Agustus itu. Termasuk siapa saja yang terlibat dalam rapat di malam sebelumnya. Mendengar semua itu, saya hanya termangu.

“Terima kasih, kawan, kau adalah sahabat sejatiku.”

“Londo” INTERFET

Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Indonesia secara resmi mengundang pasukan internasional PBB yang tergabung dalam INTERFET (International Force for East Timor). Keputusan itu kata Presiden BJ Habibie diambil setelah mengirim Menhankam/Panglima TNI Wiranto ke Timtim, meninjau pelaksanaan darurat militer. Selain itu, juga laporan dari Menko Polkam, Menko Kesra, Menlu, dan Mendagri. Seluruh laporan itu kemudian dibahas bersama dalam Tim Krisis Timtim yang akhirnya memutuskan menghadirkan pasukan internasional tersebut.

Selain di Jakarta, perdebatan panjang juga dilakukan di PBB New York. Khususnya tentang siapa yang harus memimpin misi tersebut dan negara mana saja yang bersedia mengirimkan pasukannya. PBB akhirnya menyerahkan misi ini kepada Australia. Negara Kanguru yang sejak awal ‘kemerdekaan’ Timtim sudah berada penuh di belakangnya. Australia sendiri kemudian menunjuk Mayjen Peter Cosgrove sebagai komandan INTERFET.

Seiring dengan semakin santernya pemberitaan tentang pasukan internasional INTERFET, suasana di Timtim kembali mencekam. Eforia kemerdekaan mulai terasa. Dengan begitu, intimidasi kepada rakyat Indonesia pun semakin meningkat. Saya pribadi mengalami kesulitan berhubungan dengan warga Timtim. Karena, bisa jadi, mereka yang di siang hari seolah menjadi teman yang tampak begitu akrab, tiba-tiba berubah menjadi lawan di waktu malam.

Kondisi itu membuat sikap saya dan para wartawan lain yang sudah cukup lama di Timtim sedikit berubah dalam menghadapi masyarakat setempat. Khususnya saat membicarakan angka kematian. Entah mungkin sudah terlalu lama tertekan dan terbelenggu dalam eskalasi politik Orde Baru selama 24 tahun atau sebab lain, saya melihat

masyarakat Timtim menjadi sangat bias ketika membahas angka kematian, pembunuhan, dan perkosaan.

Di sisi lain, mereka sangat sadar masalah-masalah itu adalah komoditas unggul bagi pemberitaan asing. Terlepas benar dan tidaknya. Yang pasti, mereka menjadi sangat mudah untuk bercerita tentang sebuah kematian. Misalnya, berita tentang kematian Manuel Gusmão, ayah kandung Xanana, yang ternyata isapan jempol belaka.

Begitu juga berita tentang kematian Leandro Isaac yang konon tubuhnya dipotong menjadi 13 bagian. Tentang ayah Xanana memang saya tidak tahu persis kondisi dan keberadaannya. Tetapi, tentang Leandro, saya tahu persis bahwa dia masih hidup. Kami masih saling kontak. Setidaknya saya sempat menghubungi Leandro dan memintanya menyelamatkan diri dan keluarga pada saat ia dijadwalkan untuk dihabisi.

Karena itu saya yakin Leandro dan keluarganya selamat. Dan akhirnya memang terbukti kedua tokoh penting itu selamat. Karena itu saya sangat berhati-hati dalam menuliskan berita kematian. Mungkin saya satu-satunya wartawan yang tidak pernah berani menuliskan jumlah korban, karena memang saya tidak pernah tahu pasti.

SABTU (18/9/1999), sehari menjelang kehadiran Mayjen Peter Cosgrove, Komandan INTERFET, kota Dili masih dalam kondisi belum normal. Kota itu masih sering diliputi kepulan asap dan sesekali terdengar suara tembakan. Entah berasal dari mana. Kadang suara tembakan itu terdengar satu-satu. Tetapi sering juga terdengar berentetan dan bersahut-sahutan. Walau begitu, suasananya sudah tidak terlalu mencekam.

Untuk memastikan kesiapan semua pihak menyambut kehadiran pasukan INTERFET, Sabtu siang itu, Pak Kiki secara khusus meninjau tempat-tempat yang sudah disiapkan untuk INTERFET di wilayah Bidau, Dili timur. Yaitu, Hotel Turismo, wisma pegawai Bank Indonesia dan bekas kediaman Danrem di Bidau. Hotel Turismo relatif dalam kondisi 'utuh' kecuali dinding-dindingnya yang hitam pekat bekas pembakaran yang gagal.

Pak Kiki yang sangat fasih berbahasa Tetun berkomunikasi dengan sangat ringan dan santai bersama para pekerja yang sedang membersihkan dan mempersiapkan tempat-tempat tersebut. Karena itu, suasana tercipta begitu akrab. Susah untuk membayangkan komunikasi antara dua 'anak' dari bangsa yang sama itu, kini berasal dari negara yang berbeda. Suasana serupa terjadi lagi saat Pak Kiki meninjau RS Wirahusada, Dili. Di tempat ini, ia mencoba berkomunikasi dengan sekitar 2.000 pengungsi yang ada di belakang RS tersebut. Kunjungan itu dilakukan untuk mencairkan suasana.

Menurut Pak Kiki, selama ini hanya ada sekitar 200-an pengungsi yang berani mengambil jatah beras. Karena itu, pihaknya sempat menduga, jumlah pengungsi hanya ratusan orang. “Ternyata ada sekitar 2.000 orang. Setelah dicek, ternyata mereka takut. Jadi, saya ke sana menemui mereka supaya tidak takut. Kemarin sudah dikirim beras empat ton,” ujarnya.

Hari itu, seluruh aparat keamanan RI berupaya keras mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kehadiran INTERFET, termasuk di pelabuhan Dili. Mayor Ahmad Susetya, Komandan Batalyon 521 mengatakan, setidaknya masih ada sekitar 25.000 pengungsi yang tertahan di pelabuhan Dili dan masih antre untuk diberangkatkan ke Kupang. Pagi hari, sebagian besar sudah diberangkatkan ke Atambua dan Kupang. Sebagian lain ke pulau Alor menggunakan perahu yang lebih kecil.

Ia mengakui, banyak pengungsi yang sudah cukup lama menunggu. “Kami sudah menunggu di sini 10 hari,” kata Aliza da Conha yang ditemani Azana de Jesus dan Jefrina, saudaranya. Sambil menunggu antrean, ia berjualan rokok, minuman ringan, dan gula pasir. Ia mengaku berada di tempat itu bersama seluruh kerabat dari RT Kaikoli. Seperti para pengungsi lain, Aliza dan seluruh kerabat hanyalah mengikuti arus.

Ia sama sekali tidak memahami apa yang terjadi dan tak tahu apa yang akan dilakukan ke depan. “Saya ikut karena ada yang suruh kami pindah. Katanya akan lebih baik kalau kami pindah,” katanya. “Kami tidak tahu apa yang bisa dilakukan di Kupang,” lanjut Aliza. “Kalau di Kupang, saya bisa sekolah lagi *nggak* ya?” sambung Jefrina. Sebelum jajak pendapat, Jefrina tercatat sebagai siswa kelas I SMP Komoro, Dili.

Menurut Mayor Susetya, rencananya, pemberangkatan pengungsi memang tidak hanya melalui pelabuhan, melainkan juga melalui jalan darat dan udara. Untuk itu, pemerintah berencana mendatangkan 100 truk tambahan. “Tetapi sampai saat ini truknya belum datang,” katanya waktu itu. Seiring dengan itu, sembilan kapal perang pasukan multinasional hari Sabtu itu menuju Timtim.

Seiring dengan itu, bala bantuan asing mulai mengirim ransum makanan kepada para pengungsi Timtim melalui udara. Namun hari Sabtu itu, Matt Francis, Juru Bicara Badan Bantuan Australia mengatakan, bantuan pangan untuk Bobonaro tidak bisa dijatuhkan karena cuaca buruk. Kalimat itu diungkapkan sesaat setelah dua pesawat Hercules C-130 milik Australia yang khusus digunakan untuk mengirim makanan itu kembali ke Darwin.

Kondisi Timtim, termasuk para pengungsi benar-benar telah terpuruk. Juru Bicara UNAMET David Wimhurst menekankan, dibutuhkan bantuan kemanusiaan yang sangat

besar. “Sejauh ini kami hanya menjangkau sebagian kecil dari mereka,” kata David Wimhurst menyinggung upaya PBB mengirimkan bantuan pangan melalui udara. Bantuan melalui udara terpaksa dilakukan karena kondisi Timtim, termasuk kondisi keamanan belum memungkinkan.

Penerbangan hari Sabtu itu dilakukan oleh Australia atas persetujuan Indonesia. Direncanakan, bantuan pangan tersebut akan dikirim untuk para pengungsi di Ermera dan Bobonaro. Wimhurst mengharapkan, Program Pangan Sedunia PBB, hari Minggu (19/9/99) membawa pesawat Hercules mereka sendiri yang diberi perlengkapan khusus untuk menyebarkan makanan dari ketinggian. Diharapkan, mereka segera bisa mengirimkan biscuit dengan protein tinggi yang langsung bisa dilemparkan tanpa harus mencederai seseorang.

Buruknya kondisi para pengungsi membuat Sadako Ogata, Ketua Badan PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) hari Sabtu itu secara khusus datang ke Jakarta. Ia meminta kesediaan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dalam mengatasi persoalan tersebut. Keprihatinan tentang kondisi para pengungsi juga disampaikan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dari Geneva. Pantauan ICRC menunjukkan ada sekitar 90.000 pengungsi yang masih tinggal di udara terbuka di Dili dan dalam kondisi memprihatinkan.

Hari itu, saya ikut Mayor Gane, salah satu LO, keliling Dili. “Wis mangan, nDuk? Kalau belum, aku nggowo mie rebus.. uenak lo, wong saya kasih tomat segala, makanlah,” kata Mayor Gane yang selalu menyediakan diri untuk diganggu wartawan tersebut. Ia seolah sangat paham bahwa kami, para wartawan, selalu makan “teratur”. Dalam arti, hari ini makan, besok libur.

Sesampai di bandara, saya mulai dijalar rasa risau. Bandara Komoro yang semula ramah, kini telah berubah menjadi sebuah medan perang. Di mana-mana penuh tumpukan karung pasir dan lubang-lubang persembunyian untuk menghadapi perang besar. “nDuk, kita ini *kok* seperti mau menghadapi perang dunia,” kata Mayor Gane.

Namun, di tengah kegalauan itu, saya kemudian tersenyum, bahkan tertawa terpingkal-pingkal. Hari itu, para perwira TNI pergi ke Kupang, untuk keperluan logistik. Tiba-tiba, saya lihat Letkol CH Aziz, Asisten Operasi PDM turun dari Helikopter yang baru saja mendarat.

“Siang, Pak.”

“Lho, masih kerasan di sini?”

“Ya, Pak.”

Tawa saya pun meledak. Tak lama kemudian, seekor kambing dituntun dengan “khidmad” turun dari heli yang sama.

“Lho, *kok* bersama kambing?” komentar saya spontan.

“Hush, jangan ditolis ya.. ini untuk makan nanti malam,” jawab Pak Aziz kalem.

“Ha..ha..ha...”

MINGGU (19/9/1999), sekitar pukul 13.00 akhirnya rombongan Mayjen Peter Cosgrove tiba di bandara Komoro, Dili, menggunakan pesawat Royal Australian Air Force, dari Darwin. Cosgrove, pria berkulit putih berkebangsaan Australia, untuk ukuran seorang tentara, ia termasuk sangat “subur”. Begitu tiba, Cosgrove yang mengenakan seragam coklat tanah terang itu langsung bersalaman dengan Pak Kiki. Rombongan lalu diajak mengelilingi Dili yang sudah menjadi abu, kemudian menuju Makorem.

Di Makorem, mereka bertemu secara tertutup selama sekitar 1,5 jam. Cosgrove antara lain didampingi Wakil INTERFET Mayjen Songkitti Jaggabatra dari Thailand dan Ketua UNAMET (Misi PBB di Timtim) Ian Martin. Usai berbicara, sekitar pukul 15.00 mereka langsung meninggalkan Dili. Namun, seperti biasa, kedua Mayjen, Pak Kiki dan Cosgrove mengadakan jumpa pers di Makorem. Usai jumpa pers, Pak Kiki terlihat masih berbicara santai meski tetap formal dengan Mayjen Songkitti, Wakil Cosgrove. Mungkin karena sesama Asia, Pak Kiki memang terlihat lebih akrab dan “comfortable” dengan Mayjen Songkitti.

Bisa dipastikan, jumpa pers itu dipenuhi wartawan dalam dan luar negeri. Dan seolah berada di dalam di gedung pengadilan, ada kecenderungan wartawan asing “menggodok” TNI sedang wartawan Indonesia “menyerang” Australia. Di mata wartawan Indonesia, Australia menjadi salah satu penyebab “lepas”nya Timtim serta ambisi besar Australia untuk ‘menduduki’ Timtim.

Karena itu, bagi wartawan asing pasti terasa agak sedikit aneh dan mengejutkan ketika Cosgrove memuji TNI. “Saya mewakili International Forces for East Timor (INTERFET) secara terbuka mengatakan sangat terkesan dengan kerja sama yang saya terima dari Komandan TNI di Timtim,” kata Cosgrove.

“Saya sangat berterima kasih dan saya akan membalas segala kebaikan itu sesuai dengan kewenangan saya. Bahwa kerja sama yang terjalin sekarang ini masuk dalam kategori first class cooperation (kerja sama kelas satu). Karena itu, bila saya membawa

pasukan saya masuk ke sini, akan tercipta kerja sama yang baik, sehingga bisa segera membawa rakyat Timtim pada kondisi yang memungkinkan mereka menentukan pilihannya sendiri,” lanjutnya.

Harus diakui, Cosgrove cukup piawai bermain kata-kata. Ia juga bukan tipe yang ‘asbun’ alias asal bunyi. Cosgrove telah mempertimbangkan masak-masak ketika memuji kerja samanya dengan TNI tersebut. Termasuk kemungkinan ia sendiri ditentang bahkan didemo oleh kelompok anti-Indonesia di Australia. Masalah itu telah ia antisipasi dengan baik. “Saya sudah mempertimbangkan masalah itu.. Pada akhirnya, orang akan mengatakan keberhasilan kerja sama ini akan membuka peluang untuk membangun kembali hubungan Indonesia-Australia yang sempat terganggu dalam beberapa saat ini,” katanya.

Selanjutnya, Cosgrove berjanji, selama di Timtim, INTERFET akan bekerja sama dengan penuh keterbukaan, kepekaan, dan berhati-hati dalam membuat penilaian. Lebih dari itu, INTERFET akan sangat menghargai kedaulatan seluruh masyarakat Timtim. Cosgrove menekankan, perhatian utama INTERFET adalah masyarakat Timtim yang telah lama berada dalam kondisi sangat tertekan.

Mengingat ambisi Australia pada Timtim, wartawan pun tak lupa menanyakan tentang obsesi Australia yang begitu besar tersebut. Menjawab pertanyaan itu, Cosgrove dengan diplomatis menjawab, Australia hanyalah bagian dari banyak negara yang berniat membantu Timtim dan bergabung di bawah bendera PBB. Menurut dia, lebih dari 10 negara di bawah bendera PBB yang tertarik membantu menyelesaikan persoalan Timtim.

Pak Kiki Syahnakri sendiri lebih banyak tersenyum. Tak sedikit pun gurat ketegangan di wajahnya. Ia bahkan dengan santai menjawab berbagai pertanyaan tentang citra TNI yang sudah “hancur” di mata dunia. Ia menekankan, tugas TNI dan INTERFET sangatlah mirip, bahkan tujuannya sama. Namun, lanjutnya, INTERFET tidak memiliki kewajiban pokok seperti merehabilitasi daerah hingga saat serah terima dengan INTERFET. Dikatakan, INTERFET bertugas memperbaiki aspek hukum, keamanan, dan stabilitas, termasuk membantu Misi PBB di Timtim (UNAMET) dan badan internasional lain.

“Adanya persamaan tujuan ini menjadikan adanya saling pengertian. Karena itu, pernyataan-pernyataan keras dari para pejabat di Australia tidak akan menyelesaikan apa-apa. Saya sudah sampaikan masalah ini kepada Mayjen Cosgrove. Karena yang harus kita cari sekarang adalah titik temu untuk menyelesaikan persoalan Timtim secara damai,” ujarnya. “Bila INTERFET memiliki pendekatan yang cukup bagus, akan terjalin saling pengertian di antara semua pihak,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan tentang kerelaan TNI meninggalkan Timtim, Pak Kiki mengatakan, TNI mengikuti kehendak rakyat. “Kalau SU MPR memutuskan untuk lepas, TNI akan ikut,” katanya.

Tanpa diduga, sore itu saya bertemu Florentino da Silva Pereira (38). Ia seorang Sersan Satu (Sertu) yang selama ini bertugas di Polres Dili. Warga asli Bairopite, Dili barat itu bercerita alasannya terpaksa desersi dari kesatuan.

Tanggal 5 September 1999, sehari setelah pengumuman hasil jajak pendapat, ia bertugas mengamankan para pengungsi di pelabuhan Dili. “Tetapi tiba-tiba saya diserang oleh para milisi. Saya diseret ke kapal. Pakaian dinas saya mereka buka di atas kapal. Di situ saya dihajar, kemudian dibawa ke rumah sakit. Saya tidak tahu mengapa saya diserang,” ujar ayah lima anak buah cintanya dengan Benderina Kolobunga yang keturunan Kupang-Jawa. Ini bukan kejadian pertama yang saya dengar selama bertugas di Timtim. Cerita semacam ini sangat sering terjadi.

Suasana Timtim kembali sedikit tidak menentu. Para pendukung kemerdekaan yang memang memenangkan pertarungan mulai beraksi. Berbagai isu miring yang terkait dengan TNI kembali bermunculan. Misalnya, TNI secara khusus mendaki gunung untuk menakut-nakuti Falintil, sayap militer pro-kemerdekaan. Karena tidak berada di gunung, saya memang tidak tahu persis masalah tersebut. Dari sisi Falintil, berita itu seolah-olah benar. Namun, dari sisi TNI, tentu saja berita itu tidak benar.

Mayjen Kiki Syahnakri mengatakan, yang terjadi adalah penarikan sebagian pasukan dari Same dan Viqueque. Pak Kiki menjamin, selain penarikan itu tidak ada kegiatan lain dari TNI. “Selain itu tidak ada gerakan TNI,” tegas Pak Kiki. Same, khususnya Viqueque memang sangat dekat dengan markas besar Falintil.

Masih menurut Pak Kiki, penarikan pasukan di dua tempat itu dilakukan karena mereka sudah berada di wilayah itu lebih dari enam bulan. Karena itu, harus ditarik. “Jadi, untuk mempermudah pelaksanaan pull out (penarikan), mereka lalu dikumpulkan di Laga (Los Palos) dan Dili,” ujarnya. Seperti dikatakan sebelumnya, di Timtim ada dua brigade dan lima batalyon teritorial. Kelima batalyon teritorial tersebut sudah cukup lama berada di Timtim karena itu akan ditarik. Sedang dua brigade akan dipertahankan hingga ada perintah penarikan dari Jakarta.

Senin (20/9/1999) pagi. Sirine di bandara Komoro, Dili, meraung-raung, menyambut kedatangan pesawat Hercules milik Royal Australian Air Force. Pesawat dengan nomor A97-011 itu, akhirnya mendarat dengan selamat di bandara Komoro, Dili, pukul 06.42 waktu setempat atau pukul 07.42 WIB. Ini adalah pesawat pertama yang membawa anggota pasukan internasional untuk Timtim (INTERFET) dari Darwin, Australia. Tepatnya, pesawat itu mengawali operasi “Australia” di bumi Timor Loro Sa’e yang oleh PM Australia John Howard disebut sebagai “Operation Stabilize”.

Pagi itu, saya termangu di pinggiran bandara Komoro, Dili. Walau sedikit, muncul juga rasa tidak rela ketika melihat para bule alias “londo-londo” INTERFET itu berdatangan. Terus terang, masih sulit menerima kenyataan Timtim tidak lagi bumi Indonesia. Adik kecil itu telah memilih memisahkan diri dari kakak-kakaknya.

Lamunan saya langsung buyar ketika pesawat Hercules Australia itu membuka ekornya. Saya terkesima melihat puluhan pasukan Australia itu turun sambil berlarian. Wajah mereka sangat tegang, seolah akan menghadapi perang dunia ketiga. Ditambah dengan pakaian seragam yang benar-benar terkesan dekil, penampilan seluruh pasukan itu sungguh-sungguh tidak enak dilihat. Tak ada sepatah kata pun yang terucap ketika berpapasan dengan kami. Mungkin, mereka pun mencurigai kami sebagai milisi.

“Wah, londo Ostrali teko (Wah.. ‘Belanda’ Australia datang),” begitu komentar teman-teman wartawan dan fotografer Indonesia yang berada di tepi bandara ketika mengabadikan peristiwa bersejarah tersebut.

“Be, berhubung Eddy tidak ikut, aku titip ya.” Eddy Hasby adalah fotografer *Kompas* yang selama ini selalu bersama-sama meliput Timtim.

“Beres...! Jangan kuatir, Mbak,” jawab Bea. Bea Wiharta adalah fotografer kantor berita Reuters. Di bulan Agustus lalu, ia ikut tertembak bersama Kornelis.

“Eddy *kok* gak melok nopo, Mbak?”

“Wah aku gak ngerti, mungkin dia akan datang pas penyerahan Kodal.”

Begitu tiba di daratan, pasukan Australia dengan senjata lengkap serba otomatis itu langsung melakukan stelling, dengan terlebih dulu membalikkan badan ke sana ke mari, untuk menempati posisi yang telah ditentukan. Mereka menyebar ke seluruh bandara, hingga menembus barisan ilalang yang tumbuh subur di luar landasan pacu.

Tugas utama hari itu adalah mengamankan bandara. Sungguh, tingkah laku mereka benar-benar seperti akan menghadapi perang multinasional. Namun, anehnya, tidak ada

sedikit pun identitas diri yang tertera pada baju seragam para tentara Australia itu. Jangankan pangkat, nama pun tak ada. Apakah memang begitu SOP mereka? Bertempur tanpa identitas diri?

Di tengah pemandangan yang penuh ketegangan itu, tiba-tiba kami semua tertawa ketika melihat salah satu dari mereka sibuk mengusir kambing dari arena bandara. Sekitar pukul 09.00, kurang lebih 40 personel pasukan INTERFET bergerak menuju pelabuhan Dili untuk mengamankan wilayah tersebut.

Hingga pukul 17.00 waktu setempat, tercatat sudah terjadi 28 sorti. Berarti sekitar 1.190 personel militer telah mendarat. Pesawat akan terus berdatangan dalam waktu 36 jam dari pendaratan pertama untuk mencapai jumlah 2.500 personel. "*Where are the militias...*," kata para pasukan yang berjaga di gerbang bandara sambil mengangkat senjata dalam posisi siaga.

Komandan INTERFET, Mayjen Peter Cosgrove, hari itu juga mendarat di Dili. Ia langsung menemui Panglima Darurat Militer Mayjen Kiki Syahnakri. Menurut Cosgrove, INTERFET dan TNI sudah mencapai saling pengertian yang lebih baik. "Dengan senang hati sekali saya katakan, kerja sama INTERFET dengan TNI tetap first class," tegasnya. Melalui siaran pers yang dikeluarkan Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Cosgrove waktu itu juga menyampaikan pesan pribadi PM John Howard, yaitu ucapan terima kasih atas segala upaya Indonesia sehingga kedatangan pasukan PBB itu bisa berlangsung dengan aman dan lancar.

Mayjen Kiki Syahnakri menambahkan, Cosgrove juga sekaligus minta izin pendaratan beberapa pesawatnya di Baucau, karena lalu lintas pesawat di Dili terlalu padat. Selain itu, juga mengingat apron Komoro yang hanya mampu menampung tiga pesawat. "Toh nantinya, mereka juga akan ke sana, jadi, saya setuju dengan itu," kata Pak Kiki. Pendaratan di Baucau baru dimulai Selasa.

Untuk itu, menurut Asintel Komando Operasi PDM Letkol (Czi) Liliek Koeshadianto, pukul 14.00, sekitar 48 staf INTERFET yang terdiri dari personel AS, Filipina, Thailand, dan Singapura melakukan orientasi medan di Baucau. Hasil penjajakan itu akan mereka laporkan ke Darwin untuk disebarkan ke seluruh negara yang akan bergabung dengan pasukan multinasional tersebut.

Tentang pendaratan di Dili, Liliek mengatakan, ke-28 sorti dilakukan dengan perincian 25 sorti pesawat Hercules, satu Falcon yang membawa Jenderal Cosgrove, satu helikopter, dan satu pesawat Grumen. Sedang kendaraan yang sudah diturunkan terdiri dari 10

landrover terbuka lengkap dengan senjata mesin, dan dua Armed Personnel Carrier (APC) M-113. Siaran pers Puspen TNI menambahkan, telah pula mendarat 10 helikopter Black Hawk dan satu heli Sea King.

Mungkin karena posisi Indonesia, komposisi pasukan multinasional itu bermacam-macam. Dalam arti, tidak seluruh negara mengirimkan pasukan tempur. Singapura, misalnya, mengirimkan 26 tim medis dan tujuh observer. Thailand mengirimkan satu brigade SQ dan satu batalyon, Filipina mengirimkan satu kompi pasukan khusus dan 1.000 teknisi, medis, sipil militer untuk mengurus masalah kemanusiaan, sedang Inggris mengirimkan 300 tentara Gurkha.

Seiring dengan itu, Indonesia membentuk ITFET atau Indonesian Task Force in East Timor. Biasanya, ITFET juga disebut Satgas Indonesia untuk Timtim. Selaras dengan kesepakatan PBB, Komandan ITFET adalah seorang perwira Polisi, Brigjen (Pol) JD Sitorus dengan Wakil Komandan Kol (Czi) J Suryo Prabowo yang biasa saya sebut Pak Suryo. PBB lalu menciptakan Joint Security Consultative Group (JSCG) sebagai wadah koordinasi antara INTERFET dengan ITFET.

DI hari Senin itu, Dili telah berubah menjadi “medan perang”. Terutama setelah 10 helikopter Sikorsky S-70A-9 Black Hawk lengkap dengan persenjataan, secara resmi mendarat di Dili. Bahkan sebagian dirakit khusus untuk terbang malam. Helikopter yang seluruhnya berwarna loreng itu semakin menambah suasana ‘mencekam’. Dili seolah akan menghadapi perang besar.

Seribu pertanyaan berkecamuk di benak saya. Siapa yang akan mereka lawan? TNI-kah? Wah berarti perang dingin RI-Australia telah menjadi nyata. Tetapi rasanya tidak mungkin karena Cosgrove sangat terkesan pada Pak Kiki. Lalu, apakah seluruh kekuatan itu hanya untuk menghadapi milisi? Sepadankah? Bukankah milisi hanya bersenjata rakitan dan hanya sebagian yang senjata otomatis. Yang pasti, para milisi tidak memiliki kendaraan dan pesawat tempur. Yang lebih penting lagi, darurat militer telah berhasil mengirimkan seluruh pihak yang disebut milisi ke Timor Barat. Karena itu, sulit rasanya menerima kenyataan bahwa seluruh perangkat itu untuk sebuah misi perdamaian.

Konon, helikopter serbu milik Australia ini sejenis dengan milik AS yang digunakan untuk Perang Teluk. Sedang Sikorsky S-70B-2 Seahawk AL Australia pernah pula diterjunkan dalam Operasi Badai Gurun (Desert Storm), Agustus 1990 (*Kompas*, 21 September 1999).

Sore harinya, kapal perang berdatangan. Tepat pukul 18.45 waktu setempat, kapal jenis catamaran bernama Jarvis Bay merapat di pelabuhan Dili. Pada saat yang sama, dua fregat masih berada di tengah laut. Selain mengangkut personel dan logistik, kapal-kapal perang itu membawa 13 APC (armed personel carrier), satu kendaraan amfibi, tujuh truk, dan sepeda motor.

Dan lengkaplah. Timtim seakan menjadi teater peperangan cukup dahsyat. Sebelum gelar kekuatan dimulai, pasukan INTERFET yang tersebar di seluruh pelosok Dili, menyusur seluruh tempat, terutama sterilisasi pelabuhan. Siang-malam Helikopter meraung-raung di udara, seolah siap melumat siapa pun. Di beberapa tempat, khususnya bandara, mereka memasang berbagai jenis barikade. Dari drum kosong hingga kawat berduri. Mereka juga membuat semacam tempat pengamanan dari tanah dan tumpukan karung pasir.

Tepi pantai yang biasanya sejuk oleh semilir angin dan romantis dengan alunan ombak yang menderu, kini penuh dengan deretan APC dan peralatan berat lain. Bahkan di Balide, dekat markas besar UNAMET, meski telah berpagar kawat berduri, mereka masih menempatkan empat APC dengan personel penuh. Hari Jumatnya, INTERFET mendatangkan rumah sakit terapung.

PASUKAN MULTINASIONAL (INTERFET) DI TIMTIM

Komandan: Mayjen Peter Cosgrove (Australia)

Wakil Komandan: Mayjen Songkitti Jaggabatra (Thailand)

Australia

- 4.500 pasukan
- 6 fregat
- 3 destroyer

Korea Selatan

- 400 tentara

Cina

- polisi sipil

Thailand

- 1.000 pasukan

Inggris

- 270 pasukan
- dana 5 juta dollar AS
- destroyer
- 3 pesawat terbang

Fiji

- 180 pasukan

Selandia Baru

- 800 pasukan
- 1 tanker, 1 fregat
- 2 pesawat C-130
- 4 helikopter

Amerika Serikat

- 200 pasukan
- pesawat C- 170, C- 5, C- 130
- logistik dari Armada Pasifik
- komunikasi intelijen

Finlandia

- dana 1 juta dollar AS

Kanada

- 600 pasukan
- 2 hercules
- 1 kapal pendukung

Argentina

- 50 pasukan

Jepang

- dana 2 juta dollar AS untuk kemanusiaan
- pengangkutan pasukan

Italia

- 600 pasukan
- 1 kapal perang
- 1 kapal medis

Brasil

- 30 - 50 pasukan

Malaysia

- 1.500 pasukan

Perancis

- 500 pasukan
- 1 fregat

- 1 kapal transport
- 12 ahli medis

Norwegia

- 5 personel

Singapura

- 250 pasukan
- kapal untuk mendarat pasukan

Bangladesh

- sejumlah pasukan

Filipina

- 1.440 pasukan non-tempur

Swedia

- 10 polisi
- dana 1,2 juta dollar AS

Sumber: PBB/*Reuters/Kompas*

Walau cukup mencekam dan mencengangkan, kehadiran INTERFET memang membuat suasana Dili terasa berbeda. Warga yang selama ini bersembunyi di gunung, berbondong-bondong pulang ke kota. Sebagian besar berjalan sambil meneriakkan yel-yel "Viva Xanana, Viva Timor Leste" atau pekikan khas "Merdeka!". Seolah baru lepas dari penderitaan berkepanjangan, mereka menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Ada yang berjingkrak-jingkrak, melepas kemudian melempar baju ke atas, dan ada pula yang tertawa-tawa gembira. "Kita sudah menaaaang... Ini kemenangan kita," teriak mereka sambil

mengacungkan jari membentuk tanda “V” atau victory yang berarti kemenangan. Sekalompok pemuda lalu menyebar dan menghambur-amburkan bendera Merah Putih di Jalan Matrines de Patria, Dili.

“Sekarang saya sudah merasa aman. Memang waktu kita diawasi KKO (Marinir), kita sudah merasa aman. Tetapi lebih aman lagi sekarang,” kata Andre da Silva (40). “Yang penting, saya hidup dan tidak ditembak. Saya tidak pusing memikirkan kerja, karena makan ubi pun jadi,” sambung Luis da Costa (43) yang sebelumnya bekerja sebagai supir truk. Mereka akan segera kembali ke gunung untuk menjemput keluarga begitu suasana lebih aman.

Warga di Bekora dan Bairopite mulai membersihkan rumah yang hangus dan kadang hanya tinggal puing. Bahkan tidak sedikit yang hanya tinggal abu. Namun, di wilayah Fatuhada dan Komoro tetap bagai kampung mati. Hampir bisa dipastikan, kedua wilayah di Dili barat itu sama sekali tak berpenghuni. Sebelumnya, kedua lokasi ini dikenal sebagai basis utama kelompok pro-otonomi.

Walau begitu, sikap anti-Indonesia jelas terasa. Sulit saya menggambarkan suasana ini. Tetapi jelas, saya sendiri merasa was-was. Bak membalik telapak tangan, warga Timtim yang semula saya anggap sebagai saudara, tiba-tiba menjadi bukan lagi saudara. Mereka yang semula teman, kini tak lagi berteman.

Hari itu, tiba-tiba ada berita seru. Gudang beras di Dolog dijarah habis. Berbondong-bondonglah kami ke sana. Karena tidak punya kendaraan pribadi, saya ikut Despen Oposunggu agar bisa nebeng mobil RCTI. Sampai di tempat saya bingung. Pertama, tempat yang dijaga begitu ketat *kok* bisa dijarah. Kedua, saya lebih bingung lagi ketika melihat pasukan INTERFET yang begitu hebat, tidak melakukan apa pun ketika menghadapi kondisi seperti itu.

Yah..., mungkin mereka tidak menduga akan menghadapi masalah di luar pertempuran seperti itu. Mereka mungkin juga serba salah. Kerumunan massa tidak bisa dihentikan kecuali dengan jalan tegas a la militer. Tetapi, kalau mereka menggunakan senjata, di hadapan warga sipil pula, pasti akan terkena ancaman setidaknya tuduhan melanggar HAM.

Melihat kondisi itu, pasukan TNI melemparkan granat tetapi sengaja tidak membuka pemanteknya. “Buat menakut-nakuti saja *kok*, mbak,” begitu kilah salah satu petugas tentara Indonesia. Dan, memang cara ini cukup efektif. Meski granat tidak meledak, namun kerumunan massa bubar. Tetapi lagi-lagi, mereka mendapat sorotan...

Kebencian warga kepada tentara Indonesia memang sudah terlalu tinggi. Karena itu, meski berbuat baik, warga setempat tidak akan pernah melihat kebaikan itu. Mereka dengan mudah mengkambinghitamkan tentara setiap kali terjadi kekacauan. Misalnya, saat terjadi penjarahan di gudang beras, seorang pria paruh baya mendekati para wartawan. “Ini saya terkena ledakan granat yang dilempar oleh tentara Indonesia,” katanya sambil menunjukkan luka kecil yang bahkan sudah mengering di jari telunjuknya.

Sesaat kemudian.. “Hei, kalian wartawan. Kamu dari RCTI, ya, kalian selalu menyiarkan berita bohong!” Tiba-tiba seorang pria muda sudah berdiri di belakang saya. Karena saya nebeng mobil RCTI, lalu saya dikira wartawan RCTI. Ia tampak begitu marah. Entah karena apa dan kepada siapa, yang pasti, dari atas motornya, ia terus berteriak-teriak kepada kami para wartawan, sambil bertelanjang dada dan mengacung-acungkan pedang.

Suasana Dili semakin tidak menentu. Antara teman dan lawan semakin sulit dibedakan. Siang teman, sore bisa berubah menjadi lawan. Karena itu, saya sangat membatasi gerak. Maklum tidak ada kendaraan. Truk yang disediakan Pak Kiki Syahnakri hanya khusus untuk meliput acara bersama. Satu-satunya alat transportasi hanyalah ojek yang sudah sangat mahal. Bukan bermaksud mencari “excuse”, tetapi kondisi itu membuat saya tidak berani keluar sendirian begitu mata hari merangkak ke peraduan.

Hari itu, pasukan Indonesia mulai banyak yang ditarik. Diawali dengan pasukan yang paling lama bertugas. Menurut Pak Kiki, tinggal 10 persen BTT yang belum ditarik. Penarikan itu akan dilakukan untuk lima batalyon yang terdiri dari 7.000 personel. Untuk selanjutnya, tugas pengamanan diserahkan sepenuhnya kepada INTERFET. Karena itu, Indonesia hanya menyisakan dua brigade infantri.

Usai ngobrol, mumpung belum gelap, saya kemudian berjalan-jalan ke luar, mencari ojek, untuk berkeliling Dili. Sampai di wilayah Bekora, saya berpapasan dengan truk-truk militer besar yang melaju sangat cepat, membawa para personel militer Indonesia dari berbagai tempat di Timtim. Mereka semua dikumpulkan di halaman belakang Makorem untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Kupang.

Ketika kembali, saya melihat para prajurit dari batalyon 744-745 sudah berada di halaman belakang Makorem. Waduh! Wajah mereka sangat sangar. Dengan rambut keriting panjang, mengenakan ikat kepala Merah Putih, mereka tampak sangat tidak ramah. Melihat gelagat saya dan beberapa teman wartawan Indonesia lain akan mendekati mereka, Pak Kiki langsung melarang. “Ini yang terakhir, kalau bisa tidak usah wawancara dengan mereka,” kata Pak Kiki.

Asisten Operasi PDM Letkol CH Aziz mengatakan, dalam perjalanan pulang itu, batalyon 745 terlibat kontak tembak dengan Falintil di Bukoli, Femase, dan Laleia. Satu personel TNI terluka dan empat anggota Falintil tewas. Hal senada dijelaskan pula oleh pihak Falintil. Ketika bergerak di wilayah Femase dan Laleia, mereka berpapasan dengan sekitar 17 truk batalyon 744-745. Saat itu, Falintil sedang mengawal keluarga untuk relokasi di Baucau dan Los Palos. Dalam kerusuhan itu dua personel tertangkap dan empat tewas.

Di tengah isu yang sangat tidak menyenangkan bagi seluruh wartawan, malam itu suasana semakin mencekam ketika salah satu rekan kami, Tatap Loebis, koresponden Majalah Time biro Jakarta, tidak terlihat kembali di tempat. Hingga petang hari, ia belum pulang juga. Repotnya, tak satu orang pun tahu di mana perempuan ini berada. Kekhawatiran semakin memuncak.

“Mas, Tatap hilang. Sampai petang ini ia satu-satunya yang belum kelihatan. Ini tidak seperti biasanya. Dia selalu pamit kalau pergi, tapi kali ini tidak. Mas, dia tadi ndak pergi sama sampeyan?” tanya saya kepada Mayor Gane lewat telepon yang tersedia di kamar Sekum.

“Ora, Nduk. Hari ini aku malah tidak ketemu satu wartawan pun,” jawabnya. Hilangnya Tatap kemudian saya laporkan kepada Pak Willem Rampangilei dan Pak Kiki Syahnakri. “Kita tunggu sampai besok, deh Rien,” kata Pak Kiki.

“Eksodus” Lagi

RABU, 22 September 1999. Suasana penuh duka menyelimuti seluruh pojok Makorem. Pagi itu, kami dikejutkan dengan kabar tentang kematian rekan kami, Sander Robert Thoenes (30), wartawan Financial Times biro Jakarta. Suasana semakin pilu ketika kami mengetahui cara kematian Thoenes yang begitu menyayat hati. Sebagai bule, ia termasuk yang baik hati. Miris hati ini kala mengetahui rekan kami telah disayat-sayat di wilayah Bekora.

Pikiran saya pun melayang kembali pada peristiwa sebulan lalu ketika ‘tersandera’ di wilayah tersebut. Bekora dikenal sebagai basis kelompok RDTL (Republica Democratica Timor Leste), sempalan CNRT. Di tengah acungan parang dan panah, waktu itu, saya sempat mendengar cerita bagaimana cara mereka membunuh musuh. Sayatan demi sayatan dari mata kemudian bibir, diteruskan dengan memotong kuping. Seandainya tingkat kebencian kepada korban begitu tinggi, mereka tidak enggan untuk membuka dada dan mengambil jantungnya.

Cerita itu awalnya saya peroleh ketika mendengar kabar tentang pembunuhan terhadap Plasidio Meneses, Komandan Aitarak untuk Dili barat. Joao da Silva, ketua karang taruna setempat meyakinkan bahwa Plasidio bukan mati karena dibunuh melainkan menabrak tembok. “Orangnya sudah dibawa ke rumah sakit. Saya sendiri yang menggendong dan memasukkannya ke taksi,” begitu katanya waktu itu.

Sebagian dari mereka lalu bercerita tentang pembunuhan a la Bekora tersebut. Karena itu sekali lagi mereka meyakinkan bahwa tidak ada pembunuhan terhadap Plasidio. Namun, dua hari kemudian, betapa saya terkejut dan kecewa ketika melihat dengan mata kepala sendiri luka menganga di dada Plasidio yang tepat berbentuk persegi empat.

Tanpa saya sadari, ketika beberapa hari kemudian situasi Bekora semakin menegang, saya pun kembali berhadapan dengan cerita pembunuhan khas Bekora itu, dalam kasus Sander Thoenes. “Dia sangat baik.. dia sangat baik,” kata Yenni Wahid, koresponden Sydney Morning Herald, sambil sesenggukan di pojok ruang depan Makorem. Air matanya terus berlinang.

Hari itu, ancaman pembunuhan kepada wartawan Indonesia mulai bertiup kencang. Hampir seluruh wartawan Indonesia yang bekerja sebagai koresponden asing berkumpul di ruang depan Makorem. Hari itu, seluruh wartawan Indonesia maupun asing yang selama ini berpencar-pencar mulai berlindung di Makorem.

Kecuali mereka yang datang bersama pasukan INTERFET. Tentu saja mereka mendapat perlakuan sangat khusus dan jaminan keamanan penuh di hotel Turismo. INTERFET secara khusus membawa wartawan yang seluruhnya berkulit putih dari Darwin. Sebaliknya, mereka yang tidak ada dalam daftar INTERFET apalagi dengan kulit berwarna, bahkan sama sekali tidak diizinkan menginjakkan kaki di halaman hotel Turismo. Meski hanya untuk menemui rekan sesama koresponden.

Hal itu setidaknya dialami Tatap Loebis, koresponden Majalah Time biro Jakarta, ketika mencoba menemui Jackson Tedjasukmana, sesama wartawan Time yang datang dari Darwin. Tetapi, apa yang didapat? Tatap justru diusir. “Wah mentang-mentang kulitku coklat, mendekat saja kagak boleh deh,” keluhnya. “Jangan coba-coba mendekati gerbang Turismo deh, begitu melihat kulit kita yang coklat, senjata otomatis mereka langsung disiagakan,” lanjut Tatap sambil menahan amarah.

Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba..

“Halo, halo..” Tatap Loebis secara mengejutkan sudah berada di tengah kami.

“Kamu dari mana, kami pikir kau sudah hilang.”

“Lho, aku *kan* sudah pamit bahwa aku ikut mereka ke Kupang.”

“Pamit sama siapa????”

“Pak Aziz.. Wah, beliau tidak cerita ya..”



*Dari kiri: Eddy Hidayat (Media Indonesia), Tatap Loebis (Time Magazine),
Kol. Geerhan Lantara, penulis, Mayor Isdarmawan Gane Moeljo.
foto: Eddy Hasby*

SORE harinya, Panglima PDM Mayjen Kiki Syahnakri langsung mengumpulkan seluruh wartawan. Kali ini, Pak Kiki didampingi Wakil Kepala Kepolisian Resor Dili Kolonel Muafi Sahudji, Koordinator LO (Penasihat Polda Timtim) Brigjen JD Sitorus, dan Komandan Resor Militer Kolonel M Nur Moeis. Wajah para perwira itu tampak sedikit tegang. Maklum, waktu itu beredar cukup kencang berita yang mengatakan, Thoenes dibunuh oleh anggota batalyon infanteri 745.

Hari itu, mereka menjelaskan dua hal utama, yaitu evaluasi situasi dan kejadian menonjol. Kejadian yang menonjol termasuk hilangnya tiga wartawan secara hampir bersamaan, yaitu seorang wartawan Inggris dan Belanda, serta Tatap Loebis. “Kami semua sangat menyesalkan terjadinya kasus itu. Apabila menyangkut anggota TNI, sudah pasti akan diambil tindakan hukum. Tetapi untuk wartawan Tatap Loebis yang sempat diberitakan hilang, ternyata dia sudah kembali,” tegasnya.

Seperti biasa, Pak Kiki yang tidak alergi terhadap kritikan meski ditujukan langsung kepada TNI, tidak begitu saja menolak adanya kemungkinan keterlibatan TNI dalam kasus tersebut. Sikap Pak Kiki ini memang jelas berbeda dibanding perwira lain, bahkan sesama perwira di kalangan darurat militer. Sejak mengikuti operasi darurat militer dan mengenal lebih dekat dengan Pak Kiki, jujur saya akui, saya cukup kagum dengan kebesaran hati dan jiwa Pak Kiki.

Terutama dengan sikapnya yang tidak alergi pada penilaian negatif tentang TNI. Termasuk penerimaan Pak Kiki pada kenyataan adanya keterlibatan oknum TNI dalam kegiatan milisi. Jelas sikap seperti itu tidak dimiliki oleh setiap perwira. Sebagian besar perwira bahkan menolak atau alergi menyebut apalagi mengakui adanya milisi. Sepanjang pengenalan saya pada para perwira di masa darurat militer, mungkin tidak lebih dari lima perwira yang memiliki sikap terbuka seperti itu.

Seiring dengan itu, Rabu malam, di Markas Besar TNI Merdeka Barat, Jakarta, Kapuspen TNI Mayjen TNI Sudrajat mengatakan, tuduhan tentang keterlibatan personel TNI dalam pembunuhan Sander Thoenes adalah tidak adil, tendensius, tidak berdasar, dan merupakan tindakan provokatif.

“TNI sudah berulang kali mendapat tuduhan yang tendensius. Saya tegaskan, tuduhan itu adalah tidak etis dan tidak punya dasar. TNI sebagai tentara profesional tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalau TNI memang merencanakan tindakan seperti itu, kenapa tidak dilaksanakan bulan lalu saat ada 4.000 orang asing di Timtim?” tegas Kapuspen (*Kompas*, Kamis 23/9/99)

Pada saat itu, Kapuspen sekaligus menegaskan, tidak ada orang asing yang terbunuh, kecuali ada yang luka terserempet peluru. “Jadi, saya harap masyarakat internasional melihat kejadian itu secara obyektif,” katanya. Menyinggung tentang perlindungan kepada wartawan yang bertugas di Timtim, Kapuspen mengatakan, TNI memiliki komitmen untuk melindungi wartawan secara maksimal. Namun, TNI tidak bisa menjamin keselamatan wartawan hingga 100 persen. “Apalagi yang datang ke Timtim atas kemauan sendiri.” Hari itu, muncul berita di *Kompas* seperti di bawah ini.

Kamis, 23 September 1999

Wartawan Indonesia Mengungsi

Dili, *Kompas*

Sehubungan terbunuhnya wartawan Financial Times, Sander Thoenes, belasan wartawan Indonesia yang masih bertahan di Dili hingga Rabu (22/9) mulai mendapatkan ancaman pembunuhan. Karena itu, para wartawan Indonesia mulai mengungsi ke Markas Korem 164/Wiradharma. Menurut rencana, hari Kamis ini mereka akan diterbangkan ke Kupang, Nusatenggara Timur (NTT).

Menanggapi pembunuhan Thoenes yang juga bekerja untuk mingguan Belanda *Vrij Nederland* itu, Inggris kemarin menuntut agar mereka yang bertanggung jawab diadili. John Battle dari Deplu Inggris selain menyatakan rasa simpati yang mendalam, juga menyatakan peristiwa itu menunjukkan Timtim masih berbahaya, dan itu merupakan tantangan bagi pasukan Internasional untuk Timtim (INTERFET) untuk segera memulihkan keamanan Timtim.

Federasi Wartawan Internasional (IFJ) yang bermarkas di Brussels juga mengutuk pembunuhan itu serta menuntut PBB memberikan perlindungan lebih baik kepada wartawan yang membuat laporan jurnalistik dari Timtim.

Pernyataan protes serupa dan keprihatinan juga datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan PWI Reformasi.

Sander Thoenes ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di wilayah Bekora, Dili timur, Rabu. Ia dinyatakan meninggal karena dibunuh. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan pelaku pembunuhan belum bisa diidentifikasi.

Beberapa kalangan dekatnya menyebutkan, Thoenes (30), hari Selasa sore menyewa sepeda motor dan pergi menuju Bekora. Sebelum penentuan pendapat, wilayah itu dihuni kelompok pro-kemerdekaan.

Sumber-sumber di Conselho Nacional da Resistancia Timorese (CNRT/ Dewan Pertahanan Rakyat Timor Timur) mengatakan, wilayah Bekora banyak dihuni kelompok pro-kemerdekaan yang tergabung dalam Republica Demoratica Timor Leste (RDTL) yang terkenal beraliran garis keras. CNRT sendiri tidak mengakui berdirinya RDTL.

Sore itu, tak diketahui pasti tujuan utama Thoenes ke Bekora. Yang pasti, pemuda yang dikenal ramah itu hingga saat ini tidak pernah kembali lagi. Keesokan harinya, ia ditemukan tewas dan dalam kondisi sangat menyedihkan. Ia mengalami luka tersayat di seluruh bibir dan sebagian wajahnya. Bahkan telinga sebelah kiri dalam keadaan terpotong.

Peristiwa ini membuat seluruh wartawan yang bertugas di Dili terguncang, terutama karena Thoenes dikenal dekat dengan semua pihak, dan telah menjadi bagian kebersamaan seluruh wartawan yang bertugas di Timtim.

Disesalkan

Panglima Penguasa Darurat Militer Timtim, Mayjen Kiki Syahnakri sangat menyesalkan peristiwa itu. "Kami semua sangat menyesalkan terjadinya kasus itu. Apabila itu menyangkut anggota TNI, sudah pasti akan diambil tindakan hukum," katanya.

Kiki menyampaikan hal itu melalui briefing sore kepada wartawan di kantor Markas Korem, Dili. Ia didampingi Wakil Kepala Kepolisian Resor Dili, Kolonel Muafi Sahudji, Koordinator LO (Penasihat Polda Timtim) Brigjen Sitorus, dan Komandan Resor Militer Kolonel M Nur Moeis. Menurut Kiki, saat berada di Dili, Thoenes tercatat berkebangsaan Belanda, tetapi menggunakan paspor Inggris.

Kapuspen Hankam-TNI Mayjen Sudrajat mengatakan, tuduhan yang menyebutkan personel TNI terlibat dalam kasus terbunuhnya Sander Thoenes adalah suatu tuduhan yang tidak adil, tendensius, tidak punya dasar, dan suatu tindakan provokatif.

"TNI sudah berulang kali mendapatkan tuduhan tendensius. Saya tegaskan, tuduhan itu adalah tidak etis dan tidak punya dasar," kata Kapuspen, menanggapi pertanyaan wartawan, di Markas Besar TNI, Merdeka Barat, Jakarta, Rabu malam.

Kapuspen menegaskan, "TNI sebagai tentara profesional tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalau TNI memang merencanakan tindakan seperti itu, kenapa tidak dilaksanakan bulan lalu saat ada 4.000 orang asing di Timtim?"

Pada saat itu, katanya, tidak ada orang asing yang terbunuh, kecuali ada yang luka terserempet peluru. "Jadi, saya harap masyarakat internasional melihat kejadian itu secara obyektif," katanya.

Menanggapi pertanyaan tentang perlindungan kepada wartawan, dia mengatakan, TNI sudah berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Namun, TNI tidak bisa menjamin keselamatan setiap wartawan sampai 100 persen, apalagi datang ke Timtim atas kemauan sendiri.

Penjarahan

Situasi di Dili kemarin juga diwarnai penjarahan terhadap gudang beras yang dilakukan ratusan pengungsi. Para pengungsi yang mulai memenuhi kembali Kota Dili, dengan leluasa mengangkut karung-karung beras. Tidak terlihat pasukan INTERFET yang sejak kedatangannya selalu menampilkan kesan siap perang itu.

Sementara siaran pers Puspen TNI menyebutkan, di hari kedua kedatangan INTERFET, (Selasa 21/9), kelompok prokemerdekaan menganiaya pengungsi pro-integrasi di Dili serta menembakkan peluru ke anggota TNI Batalyon Infanteri (Yonif)-400 yang sedang melakukan embarkasi di Baucau, Kabupaten Viqueque.

Disebutkan, aksi serupa pada hari itu juga dilakukan Falintil (sayap militer CNRT) dengan menyerang konvoi Yonif-457, Kodim-1629/Lautem dan Brimob di Vemasse, yang mengakibatkan satu anggota Kodim 1629/Lautem menderita luka tembak.

Pencabutan Darurat Militer

Di Jakarta, Menko Polkam Feisal Tanjung menyatakan, dalam waktu dekat keadaan darurat militer di Timtim dicabut dan dikembalikan kepada tertib sipil, di mana polisi yang akan bertanggung jawab atas keamanan di wilayah itu.

Menjawab pers sebelum sidang kabinet terbatas bidang Ekuin di Bina Graha, Tanjung mengatakan, kelak setelah keadaan darurat militer dicabut, pihak Kepolisian RI akan menyerahkan tanggung jawab keamanan dan ketertiban di wilayah Timtim kepada pasukan INTERFET. Sedangkan pasukan TNI akan ditarik mundur.

(rie/osd/Reuters/Antara)

KEMATIAN Thoenes tidak hanya menyedihkan namun sekaligus memancing kontroversi. Sebagian merasa yakin, TNI berada di balik kematian wartawan yang baru memulai tugas di Dili tersebut. Entah apa yang ingin dikerjakan Thoenes Selasa (21/9/99) sore itu.

Kemungkinan besar ia justru ingin membuktikan omongan sebagian besar orang termasuk para teman wartawan tentang tidak amannya situasi di Dili. Setidaknya, itu menurut Seth Mydans, koresponden harian AS The New York Times untuk wilayah Asia tenggara. Hari itu, ia bertemu Sander Thoenes. Menurut wartawan yang biasa saya panggil Seth itu, banyak pihak telah berusaha mencegah agar Thoenes tidak ke tempat itu karena hari sudah sore.

Tapi, seolah tidak menggubris peringatan teman-temannya, Thoenes tetap keluar dengan naik ojek, satu-satunya kendaraan umum yang tersedia dan cukup praktis di Dili memang hanyalah ojek. Diperoleh kabar, Thoenes akhirnya pergi dengan Florindo da Conceacao Araujo, si tukang ojek. Versi Polisi setelah menginterogasi Florindo, ketika

sampai di daerah Bekora, mereka dikejar oleh sekelompok massa bersepeda motor. Informasi lain menambahkan, para pengendara sepeda motor itu sebagian mengenakan seragam loreng khas TNI.

Menurut Florindo, mereka menembaki ban motor yang sedang ia kendarai bersama Thoenes. Ketika sepeda motor akhirnya jatuh, Florindo langsung melarikan diri, meninggalkan Thoenes yang tergeletak di jalan. Sekitar pukul 17.00, Florindo tiba kembali di Hotel Turismo, dan memberitahukan kejadian itu kepada para wartawan asing yang berada di hotel tersebut. Florindo kemudian diantar kembali ke rumahnya oleh John Martinkus, seorang koresponden Australia. Sejak itu Florindo diungsikan ke Darwin.

Versi lain menyebutkan, dalam perjalanan menuju Makorem Dili, batalyon 745 yang umumnya beranggotakan putra asli Timtim, terlibat kontak senjata dengan kelompok Falintil di Bukoli, Vemase, dan Laleia. Satu anggota batalyon 745 terluka dan empat anggota Falintil tewas. Setelah seluruh persoalan itu beres, mereka melanjutkan perjalanan ke Dili. Ketika sampai di Bekora sekitar pukul 16.30, dalam kondisi lelah dan tegang, tiba-tiba truk paling depan berhenti ketika melihat dua wartawan asing merekam konvoi mereka.

Sebagian prajurit yang masih dalam kondisi emosi tinggi, meloncat dari truk kemudian merampas kamera dan seluruh peralatan kedua wartawan tersebut. Sedang pengemudi taksi yang membawa kedua wartawan itu sempat mereka pukul. Setelah insiden itu, konvoi melanjutkan perjalanan ke Makorem. Setelah beristirahat sejenak sambil menambah bekal, Komandan Yonif 745 Letkol Yacob melaporkan seluruh kejadian di perjalanan dan keberadaan pasukannya kepada Danrem. Setelah seluruh laporan dicatat dan diproses, sekitar pukul 18.45 waktu setempat, mereka melanjutkan perjalanan ke Kupang. Konvoi ini merupakan rombongan terakhir yang ditarik.

Sementara itu, menurut John Martinkus, hari itu ia menggunakan jasa ojek Florindo hingga sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Martinkus mencoba mencari tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal telepon genggam. Walau baru pukul empat sore, namun hari sudah mulai gelap. Karena itu, mereka memutuskan untuk segera turun. Sampai di Turismo, Martinkus langsung membayar ojek dan meminta Florindo pulang.

Namun sekitar satu jam kemudian, Florindo kembali ke hotel Turismo. Nafasnya terengah-engah dan bajunya compang-camping. Lengannya pun berdarah. (John Martinkus, *A Dirty Little War*, hal 361). Sambil terbata-bata, Florindo menceritakan apa yang terjadi kepada John Martinkus dan Joanna, temannya. Menurut Florindo, setelah berpisah dengan Martinkus, ia menerima tawaran seorang pria berambut pirang yang sangat fasih berbahasa

Indonesia di luar hotel. Belakangan, Florindo baru tahu pria berambut pirang itu seorang wartawan.

Sesuai keinginan pria itu, Florindo mengantarnya ke Bekora. Sampai di Bekora, mereka bertemu dengan beberapa pria berseragam militer lengkap dengan senjata, mengendarai sepeda motor. Para 'prajurit' itu meminta Florindo menepi dan meninggalkan tempat tersebut sambil menembaki ban motor Florindo. Karena ketakutan, Florindo berusaha balik arah. Namun, sial, motornya tertembak dan jatuh. Meski sudah terjatuh namun para prajurit itu tidak menghentikan tembakan. Karena itu Florindo lari tunggang langgang tanpa mempedulikan lagi nasib pria berambut pirang tersebut.

Karena belum diketahui identitasnya, Martinkus mencatat laporan Florindo dan melaporkannya kepada Mayor Rob Barnes, pasukan INTERFET yang bertanggung jawab pada media massa. Gwyn Robinson dari Financial Times akhirnya tertarik pada cerita tersebut dan ikut menginterview Florindo. Masalahnya, Sander Thoenes, rekannya yang koresponden di Jakarta, sudah dua jam belum menampakkan batang hidungnya.

Thoenes tiba di Dili hari itu juga menggunakan pesawat carter. Saat itu, ia bahkan belum sempat bertemu Robinson. Thoenes hanya meninggalkan barang bawaannya di kamar Robinson. Setelah itu, Florindo meminta Martinkus mengantarnya pulang ke daerah Villaverde, Dili barat. Keesokan harinya, diperoleh kepastian korban adalah Sander Thoenes. Mayat Thoenes ditemukan di samping Gereja Bekora.

Di sela-sela kabar menyeramkan itu, muncul cerita lain. John Swain dari Sunday Times, sore itu juga pergi ke Bekora. Ia pun 'terjebak' dalam konvoi militer di lokasi tersebut. Sopir taksi yang ia gunakan, terkena sabetan popor di kepalanya dan menyebabkan luka berat di matanya. Mereka 'menangkap' Antero, seorang mahasiswa yang saat itu menjadi penerjemah Swain.

Semenjak ditangkap, nasib Antero tidak diketahui. Swain sendiri bersama fotografernya langsung meloncat dan bersembunyi di semak-semak. Ia melaporkan kejadian tersebut ke kantor pusat Sunday Times di London. Mereka langsung mengirim Helikopter dan APC INTERFET guna menyelamatkan Swain dan rekannya. Sayangnya, Sander Thoenes tak seberuntung Swain.

Rabu pagi, ketika sekali lagi Florindo diminta menceritakan kejadian itu, dengan tegas ia mengatakan, "Di dekat Gereja Bekora, sekitar pukul 16.30, ada enam pria mengendarai tiga sepeda motor. Mereka semua mengenakan seragam (militer) Indonesia. Mereka berada sekitar 200 meter dari kami, lalu meminta saya berhenti. Ketika saya mencoba berbalik arah,

mereka mulai menembaki kami. Ada sekitar 20 kali tembakan. Saya melihat wartawan itu jatuh, tetapi saya terus lari karena saya khawatir mereka akan terus menembak.” (John Martinkus, *A Dirty Little War*, hal. 363)

Terlepas dari seluruh kontroversi itu, yang pasti hari Kamis (23/9/99) mayoritas wartawan yang mengungsi di Makorem terpaksa eksodus lagi. Mereka harus meninggalkan tempat tugas dan kembali ke Jakarta dengan pesawat Hercules C-130 TNI AU. Sejak itu, Makorem mulai sepi. Hanya ada beberapa gelintir wartawan asing dan lokal yang memutuskan untuk tetap tinggal. Perasaan tak terlindungi merata, hampir dirasakan oleh seluruh wartawan Indonesia. Tulisan di bawah memperkuat kenyataan tersebut.

INTERFET Hanya Lindungi Wartawan dari Darwin

DILI -- Semboyan RRI 'Sekali di Udara Tetap di Udara' akhirnya harus runtuh di Dili. Secara resmi, sejak pukul 15.00 Wita kemarin, RRI Dili undur diri dari udara Bumi LoroSa'e, sesuai bunyi pengumuman oleh Kepala Stasiun Dili, Parlin Tobing.

Pada hari yang sama, sekitar 80 wartawan dalam dan luar negeri juga telah meninggalkan Dili. Mereka kabur lantaran kegagalan INTERFET memberi jaminan keamanan. Sebelumnya, sekitar 100 wartawan juga eksodus dari Timtim.

Sejumlah wartawan Indonesia di Bandara El Tari Kupang setibanya dari Dili menjelaskan INTERFET yang dikomandani Australia hanya menjamin keamanan wartawan yang membonceng mereka dari Darwin. Para wartawan juga mengaku terpaksa meninggalkan Timtim karena intimidasi oleh kelompok-kelompok tak dikenal, menyusul terbunuhnya wartawan *Financial Times* Sander Thoenes, di Becora, Dili Timur, Selasa (21/9) malam.

Dengan turunnya RRI, mulai kemarin masyarakat Timtim tidak bisa lagi menikmati siaran yang dipancarkan dari Jl Kaikoli, Dili. Dalam pengumuman yang dibacanya, Parlin menyatakan bahwa kondisi di Dili telah memaksa RRI Dili mengakhiri tugasnya. Secara khusus Parlin juga pamit kepada pendengar RRI Dili setelah 23 tahun mengudara di Bumi LoroSa'e. Ilustrasi musik instrumen lagu *Rayuan Pulau Kelapa* membuat pengumuman yang di-relay secara nasional itu terdengar haru.

Salah seorang penyiar RRI yang baru-baru ini bertugas meliput di Dili, Fredy Ndolu, mengaku sangat terharu mendengar pengumuman itu. "Merinding bulu kuduk saya," ujarnya. Sebab sepanjang sejarah kemerdekaan RI, peristiwa tersebut merupakan yang pertama buat RRI. Dia mengaku hampir menangis ketika mendengar pengumuman yang disiarkan kira-kira tiga menit itu.

Menurut Fredy, sebelum didirikan di Dili, RRI awalnya hanya siaran di Atambua, Kab Belu, NTT. Siaran RRI Atambua itu didengar oleh orang Timtim yang kala itu masih dijajah Portugal. Siaran-siaran yang dipancarkan dari Atambua itu memikat hati warga Timtim pada masa itu untuk berintegrasi.

Begitu Timtim berintegrasi dengan Indonesia, RRI langsung masuk Dili dan membuat siaran berita. Makin lama siaran-siaran RRI dikembangkan menjadi interaktif. Awalnya, radio tersebut hanya memiliki satu gelombang. Tapi sampai penutupan kemarin RRI Dili memiliki tiga gelombang, dua gelombang FM dan satu AM.

Dibanding media elektronika yang lain, RRI Dili paling akhir mundur dari Dili. Saudara mudanya, TVRI sudah cabut lebih dulu. Dengan tenaga tujuh orang, RRI secara rutin menyiarkan perkembangan terakhir di Dili setiap jam ke RRI pusat. "Dan pada saat-saat terakhir, semua karyawan RRI Dili harus bisa menjadi reporter, sekaligus teknisi dan penyiar," tambah Fredy.

Saat ini, menurut Fredy, gedung dua lantai di Jl Kaikoli yang selama ini digunakan sebagai kantor RRI mulai dikosongkan. Sebagian karyawannya juga sudah mengungsi ke Atambua, dan sisanya pindah ke Kupang. Yang tertinggal di gedung tersebut hanyalah perangkat berat semacam pemancar yang menjulang dan sudah dibangun permanen itu.

Beberapa perangkat siaran yang penting kini sudah diangkut ke Kupang dan Atambua. Itu dilakukan dengan semangat Tri Prasetya RRI yang menegaskan kepada setiap karyawan untuk tidak membiarkan perangkat siarnya digunakan oleh musuh yang hendak menghancurkan bangsa.

Kepala Seksi Berita Ulasan dan Dokumentasi RRI Pusat, Joko Saksono, juga mengaku terharu dengan penutupan RRI Dili itu. "Saya menaruh hormat begitu tinggi kepada mereka yang setia siaran di Dili meski kondisinya bertambah sulit," ujarnya. Atas kegigihan para kru RRI di Dili dia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bersama surutnya RRI Dili, banjir wartawan ke luar Timtim terus terjadi kemarin. Sedikitnya 25 dari sekitar 80 wartawan Indonesia dan koresponden asing yang selama ini bertugas di Dili, sore kemarin tiba di Kupang dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI-AU.

"Sekarang ini sudah merebak isu pembunuhan terhadap wartawan Melayu sebagai pembalasan atas tewasnya wartawan Financial Times," kata salah seorang reporter RRI Dili, Poli Laiyan.

Rien Kuntari, wartawati sebuah harian Jakarta, mengatakan sarana angkutan darat, laut, dan udara dari Dili makin kurang. Hari ini, belasan wartawan Indonesia yang masih bertahan di Dili, akan meninggalkan Dili dengan pesawat Hercules menuju Jakarta.

Angkutan udara menggunakan Hercules untuk sipil kemungkinan besar hanya akan tersedia sampai Jumat ini. Peralnya, mulai Ahad (24/9) semua pasukan TNI dilaporkan akan ditarik keluar Timtim.

Panglima Darurat Militer Timtim, Mayjen TNI Kiki Syahnakri kepada pers di Dili, kemarin, mengatakan kematian wartawan asing itu masih dalam penyidikan aparat TNI dan INTERFET, dan belum diketahui tersangka dan motif pembunuhan. Kini menyayangkan sikap pengamat asing yang begitu cepatnya menuding TNI sebagai pelakunya, padahal luka korban terlihat jelas berasal dari benda tajam, bukan dari peluru senjata organik.

"Tidak benar tuduhan pers asing bahwa terbunuhnya wartawan Financial Times karena peluru senjata organik TNI. Lukanya sangat jelas terlihat bahwa itu terjadi karena terkena benda tajam, bukan berasal dari tembakan senjata organik," papar Kiki.

Reaksi terus mengalir terhadap pasukan multinasional INTERFET yang gagal mengamankan wartawan. Kalangan pers Uni Eropa kemarin mengecam keras pihak keamanan di Timtim yang dinilai kurang mampu menjamin keamanan tugas jurnalistik wartawan. "Kami sangat menyesalkan tewasnya Thoenes di tengah-tengah kehadiran INTERFET," kata Ketua Asosiasi Pers Swiss, Guy Mettan.

Jaringan pers Uni Eropa yang berpusat di Brussel juga menyatakan memberikan dukungan terhadap kecaman keras Federasi Wartawan Internasional (IFJ/International Federation of Journalist) yang sangat menginginkan PBB -- melalui pasukan multinasional INTERFET -- agar lebih menjamin keamanan para wartawan yang melakukan tugas di wilayah itu.

Ketua Komisi I DPR, Aisyah Amini memprotes keras pernyataan Menteri Pertahanan Australia yang mendesak wartawan meninggalkan Timor Timur kecuali yang memperoleh akreditasi dari INTERFET dengan alasan pasukan multinasional tidak memberi jaminan keamanan.

"Tindakan ini harus kita protes keras," tegasnya di Jakarta tadi malam, menanggapi pernyataan Menhan Australia John Moore beberapa jam sebelumnya yang secara implisit menolak kehadiran wartawan Indonesia yang kebetulan jauh lebih awal berada di kawasan itu.

Menurut Aisyah, pemerintah, masyarakat, dan juga seluruh kekuatan wartawan Indonesia hendaknya bersatu-padu untuk membantah sikap tidak adil dari Menhan Australia itu. "Kalau demikian, selain tidak adil dalam hal pemberitaan, juga pihak Australia secara nyata berusaha untuk mendominasi opini publik internasional," kata Aisyah.

Ia menyarankan kepada Panglima Darurat Militer Mayjen TNI Kiki Sahnakri untuk membicarakan secara khusus mengenai kebijaksanaan sepihak itu, karena apa saja yang sedang terjadi di Timor Timur adalah bukan urusan Australia semata tetapi sudah menjadi tanggung jawab PBB.

Ikan Asin Terlezat

Pagi itu, saya termangu di depan Makorem. Suasana sepi dan rindu akan Jakarta begitu menyergap. Selain kangen dengan sanak saudara dan teman, saya pun rindu bisa menyantap sesuap nasi dengan ‘sopan’. Dalam arti, sambil duduk di meja makan menggunakan piring dan sendok. Selama dua bulan terakhir, ‘kemewahan’ seperti itu sudah tak pernah saya rasakan.

Hampir setiap hari, kami makan jatah tentara. Dari T2 yaitu nasi goreng dalam kaleng yang harus lebih dulu direbus sekaleng-kalengnya dengan air panas 100 derajat Celcius, hingga makanan yang benar-benar seadanya. Indomie pun sudah menjadi barang mewah waktu itu.

Lamunan saya buyar ketika melihat sebuah truk besar memasuki halaman Makorem. Secercah harapan pun muncul. Truk itu jelas saya kenal karena ia biasa mengambil jatah beras di Makorem untuk dibagikan kepada para pengungsi di wilayah Dare yang dikomandoi Romo Tan dan Romo Ageng. Secepat kilat saya lari menuju truk, minta izin untuk ikut ke Dare. Melihat saya akan ikut truk, Tatap Loebis memutuskan bergabung.

Di sepanjang jalan, sang supir tak henti bercerita tentang seluruh kejadian yang ia alami selama ini. Termasuk bagaimana ia harus sering berganti-ganti “wajah” dan haluan. Dalam arti, kadang pro-integrasi, dan tak jarang pula ia pro-kemerdekaan.

“Bagi saya yang penting hidup tenang, Nona,” katanya memberi alasan. Tanpa terasa, kami sudah berada di Dare.

“Halo Romo, apa kabar?” kata kami begitu bertemu Romo Tan di kediamannya.

“Lho, kalian *kok* masih di sini? Tidak ikut eksodus kemarin?” katanya.

“Tidak Romo.”

“Ayo masuk. Mau minum apa?”

Seperti biasa, Romo Tan menyambut kami dengan sangat ramah. Setelah obrolan sejenak, Romo menawarkan kami untuk makan siang. Ah... lega rasanya. Seolah Romo

tahu persis bahwa kami tidak lagi mengenal atau sudah lupa pada apa yang disebut nasi putih. Siang itu, Romo menyajikan hidangan nasi putih dengan sepotong ikan asin.

“My dreams come true..” begitu ucap saya kepada Tatap.

Perempuan tangguh dari Majalah Time ini hanya menanggapi dengan senyum dan pandangan tidak ‘mudeng’.

“Dari tadi saya ngelamun karena kangen makan nasi putih pakai piring dan di meja makan, eh, sekarang kejadian.” Meledaklah tawa kami.

“Terima kasih Romo, ini adalah makan siang terindah dan ikan asin terlezat yang pernah saya rasakan.”

Sampai di Makorem,.. “dor!!!” Sengaja saya mengagetkan seorang prajurit yang sedang berjaga di pintu depan. Di balik senjata laras panjang yang ia letakkan di atas meja dalam posisi siaga, si prajurit terlihat sedang tenggelam dalam lamunan yang sangat dalam.

“Wah, ngagetin saja. Dari mana, Mbak?” ujarinya.

“Dari Dare.. Berjaga *kok* sambil ngelamun, nanti kebobolan lho,” jawab saya setengah berseloroh.

“Iya, maaf, Mbak,” jawabnya sambil tersenyum.

“Dia lagi mikirin isteri *nih*, Mbak,” seloroh teman berjaganya.

“Wah, sudah kangen, ya.”

“Ah, enggak *kok* Mbak. Tapi, kalau saya itung-itung sepertinya hari ini isteri saya melahirkan, dari tadi saya deg-degan.”

“Mbok dipastikan dulu kondisinya.”

“Dia *kan* di Jawa, Mbak.”

“Lho, *kan* bisa ditelepon.”

“Ya sih, tapi sudah tidak ada telepon.”

“Lha, itu... di dalam *kan* ada telepon”

“Itu, khusus untuk Danki (Komandan Kompi). Kami tidak diizinkan menggunakan telepon.”

“Hah? Masak..” jawab saya setengah tidak percaya. Melihat kondisi si prajurit yang memang tampak sedang sangat kebingungan, tanpa sadar, saya mengulurkan telepon di genggamannya.

“Pakailah.. Pastikan kondisi isteri selamat dan sehat ya...”

“Bener, Mbak? Saya boleh menggunakannya...,” kata sang prajurit setengah tidak percaya.

“Ya.”

“Terima kasih, Mbak,” ujarnya dengan wajah sumringah dan sorot mata berbinar.

Sesaat kemudian, saya lalu “jalan-jalan”. Entah dari mana, tiba-tiba saya melihat Gino, fotografer kawakan dan tangguh melintas dengan sepeda motor. “Lho, masih di sini,” kata saya spontan ketika Gino menghentikan motornya. Lega rasanya melihat masih ada teman Indonesia di Dili.

“Mau ikut?” katanya. “Tidak takut, *kan?*” lanjutnya. Tanpa banyak kata saya langsung membonceng sepeda motor Gino dan berkeliling Dili. Sepertinya, tidak ada satu pun yang mampu mengecilkan nyali pria berbadan besar ini. Di depan stadion kota, kami berhenti dan melihat kesibukan anggota pasukan INTERFET.

Meski sedikit berdebat, namun saya minta izin Gino untuk turun sejenak dan menyapa para pasukan INTERFET tersebut. Sayang, komunikasi tidak berjalan baik. Ketegangan begitu tinggi menghiasi wajah hampir seluruh pasukan di lokasi tersebut. Karena itu, kami memutuskan meneruskan perjalanan. Baru beberapa meter, kami pun terhenti. Persis di perempatan yang tak jauh dari stadion itu, kami melihat rombongan pasukan INTERFET yang terdiri dari sekitar lima personel.

“Apa yang terjadi, Gino?” Ia hanya mengangkat bahu sambil matanya terus mengawasi kejadian “menyedihkan” yang sedang berlangsung di depan mata kami. Dengan mata kepala sendiri, kami melihat pasukan INTERFET sedang menggelandang lima orang pribumi.

Yang menyedihkan, kelima orang pribumi itu digelandang sambil diikat dengan tali sambung-menyambung satu sama lain ke belakang, bak penjahat besar yang tak terampuni. Tanpa mempedulikan permintaan maaf yang terus mereka ucapkan, pasukan INTERFET terus membawa mereka dengan kawalan senjata lengkap ke suatu tempat yang dirahasiakan.

Setelah kejadian itu, saya hanya bisa merenung. Haruskah cara itu yang digunakan untuk ‘menundukkan’ musuh yang sebenarnya tidak bersenjata? Hari itu pikiran saya benar-

benar gelap. Bingung. Jauh di lubuk hati di dalam sana, saya terus bertanya, siapa sebenarnya yang dihadapi pasukan INTERFET? Peralatan perang dan senjata super canggih itu sebenarnya untuk siapa? Untuk milisikah? Jika memang untuk mereka, bukankah “resminya” mereka hanya bersenjata rakitan?

Alangkah tidak adil dan tidak seimbang. Pertempuran ini jelas bukan a just war atau perang yang adil seperti selama ini dikampanyekan Menlu Ali Alatas. Pikiran pun semakin buntu, bukankah di saat INTERFET datang, para milisi sebagian besar sudah di Timor Barat. Jadi, siapa yang harus mereka perangi?

Saya semakin bingung ketika Pak Kiki memanggil kami yang tinggal tiga gelintir, Tatap Loebis (Time), Eddy Hidayat (Media Indonesia), dan saya ke ruangnya. Hari itu, Pak Kiki mendiskusikan kebenaran berita yang muncul dari Kupang tentang pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan INTERFET di Pelabuhan Dili. Kami bertiga saling berpandangan, karena tidak mengerti sama sekali apa yang dibicarakan Pak Kiki.

“Kalian mendengar berita itu?”

“Tidak, Pak?”

“Benar, kalian tidak tahu tentang pembunuhan itu,” kata Pak Kiki berusaha meyakinkan kami.

Dengan tegas kami pun menjawab tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya pembunuhan oleh INTERFET seperti yang dilansir berita dari Kupang tersebut. “Malah kalau dilihat dari hari dan jamnya, pada saat itu INTERFET baru mendarat satu sorti. Kami semua ada di bandara, jadi, kami bisa memastikan INTERFET belum keluar dari bandara Komoro, Dili,” jawab saya. Semakin kami tidak mengerti apa maksud dari pemberitaan tersebut.

Di sisi lain, saya juga menyaksikan kegagalan dalam operasi INTERFET ketika terjadi kebakaran di rumah di samping kiri bagian belakang Pangkalan TNI AL (Lanal). Untuk mengatasi kejadian itu, INTERFET melakukan hovering dengan Helikopternya tepat di atas rumah yang terbakar itu, sambil disaksikan seluruh wartawan yang dibawa dari Darwin.

Heli yang hovering di atas rumah yang terbakar tentu menjadi atraksi menarik bagi puluhan juru kamera yang ikut dari Darwin tersebut. Atraksi semakin menarik ketika INTERFET mengeluarkan dua tank yang ditempatkan di kedua ujung jalan Antonio de Carvalho sehingga menutup akses jalan tersebut. Entah apa istilah tempurnya, beberapa

anggota pasukan INTERFET lalu “merayap” di pinggir jalan sambil sesekali melongok ke beberapa rumah kosong di sepanjang jalan yang sudah ditutup dua tank itu.

Ketika menemukan bahwa rumah itu kosong, mereka mengacungkan ibu jari kepada kawan di belakangnya. Mungkin itu cara mereka mengatakan rumah itu ‘aman’. Padahal rumah-rumah itu memang sudah kosong dan sama sekali tidak berpenghuni.

Di sisi jalan yang lain, dua prajurit INTERFET mendekati dua anggota TNI yang berjaga di bagian belakang Lanal. Kedua anggota INTERFET itu langsung mengajak bicara dua anggota TNI tersebut.

“Mbak, tolong ya, kami tidak bisa berbahasa Inggris,” kata salah satu dari mereka.

“Baik...”

Kedua anggota pasukan INTERFET itu meminta saya menanyakan kepada dua anggota TNI itu apakah mereka melihat orang membawa obor. Menurut INTERFET, orang itulah yang membakar rumah di samping Lanal tersebut. Tentu, jawabannya tidak tahu. Kami telah berada di tempat itu jauh sebelum rumah tersebut terbakar.

Tanpa saya sadari, adegan ini direkam oleh seorang wartawan perempuan. Ia tidak mau mengaku untuk media apa dia bekerja. Saat saya tanya, ia hanya bilang, “free-lance”. Namun, belakangan baru saya tahu, adegan itu muncul berulang-ulang di CNN. Kebingungan dan kepedihan ini saya tuangkan dalam dua laporan di *Kompas*, “Menonton INTERFET Beroperasi” dan “Sekolah Di Tengah Pengungsian”.

MENONTON INTERFET BEROPERASI

INILAH pemandangan termutakhir bagi warga Dili, Timor Timur. Ribuan pasukan berseragam lengkap, plus berbagai perangkat peralatan tempur, memenuhi pelosok Dili. Menurut kalangan militer, berat beban yang harus dipikul seorang pasukan itu berkisar antara 18-25 kilogram, belum termasuk persenjataan yang harus dibawa.

Setidaknya telah hadir sekitar 3.500 Pasukan Multinasional PBB (INTERFET) sejak 20 September lalu yang ditempatkan di seluruh Timor Timur, bersama dengan berbagai peralatan berat mereka; kapal perang dari yang biasa hingga fregat, helikopter, dan puluhan panser serta tank.

Sepuluh hari terakhir, Kota Dili memang tak lagi sepi. Hampir setiap hari helikopter meraung-raung di udara, juga panser dan tank terus menerus lalu-lalang di ibu kota Timtim itu. Jumat (24/9) lalu, empat helikopter Black Hawk terus-terusan meraung-

raung dan terbang sangat rendah di atas Markas Komando Resor Militer Dili. Tak diketahui pasti apa maksudnya. Yang pasti, tepat hari itu di Makorem Dili sedang berlangsung jumpa pers bersama antara Panglima Penguasa Darurat Militer (PDM) Daerah Timtim, Mayjen Kiki Syahnakri dan Panglima INTERFET Mayjen Peter Cosgrove.

Tak hanya itu, salah satu helikopter loreng kehitaman itu melayang-layang (hovering) tepat di atas salah satu rumah di daerah Formosa. Di daerah itu sedang terjadi kebakaran. Alasannya, mereka sedang melakukan pencarian. INTERFET mendapat informasi ada milisi di sekitar tempat itu.

Sebelumnya, INTERFET telah menangkap lima orang yang diduga milisi. Mereka lalu diikat dengan tali sambung-menyambung, berurutan ke belakang. Tanpa mempedulikan permintaan maaf yang mereka ungkapkan, kelima milisi itu pun dibawa ke satu tempat dengan pengawalan penuh.

HARI Sabtu, sekitar pukul 17.00 waktu setempat, kembali INTERFET melakukan aksinya. Kali ini mereka pun beroperasi di tempat yang tak jauh dari wilayah Formosa. Kembali terjadi kebakaran di salah satu rumah di Jalan Antonio de Carvalho, tepat di sisi kiri halaman belakang Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal). Tak diketahui pasti asal api, dalam sekejap bangunan itu hangus. Lidah api pun menjilat-jilat.

Entah apa alasannya, untuk memadamkan api itu, INTERFET lalu mendatangkan dua panser yang langsung ditempatkan di kedua ujung jalan. Keduanya penuh pasukan dengan senjata lengkap. Seluruh pasukan yang berasal dari Australia itu lalu melakukan patroli keamanan kota. Seorang pasukan lari dan menempatkan diri di depan pintu sebuah rumah yang sudah terbakar dan tinggal puing.

Sesaat ia memeriksa situasi sambil menempatkan senapan dalam posisi siaga. Mungkin setelah dirasa kondisi aman, ia memberi tanda dengan mengacungkan ibu jari. Tentara lain menyusul dan langsung menempatkan diri beberapa meter ke depan. Bersamaan dengan itu, salah satu tank bersenjata lengkap itu langsung dipindah ke salah satu ujung jalan lain. Untuk sesaat, ia mengambil posisi sedikit melintang, sehingga memenuhi jalan yang tidak cukup lebar tersebut.

Dan seluruh adegan itu diabadikan oleh seluruh wartawan asing yang sudah tergabung dalam pool di Darwin. Dalam hal ini, INTERFET hanya bertanggung jawab pada seluruh wartawan yang terdaftar melalui pool di Darwin. Karena itu, untuk wartawan Indonesia, agak terlalu sulit mengharapkan bisa bergabung dengan INTERFET, apalagi mendapat pengawalan pasukan multinasional tersebut. Tak jarang pasukan INTERFET langsung menolak wartawan yang kelihatannya berkulit coklat atau

yang biasa diistilahkan "bukan bule", bila mereka terlihat akan memasuki Hotel Turismo, tempat seluruh wartawan bule itu menginap.

"Hei, ini latihan atau beneran?" teriak salah seorang penonton. "Kami hanya menjalankan tugas," jawab si tentara dari atas panser. Ia lalu mengenakan kembali perangkatnya dan berposisi di balik senapan.

Sementara itu, pasukan yang lain langsung berlari-lari, meski tak diketahui pasti apa yang mereka cari. Tepat di depan pasukan TNI yang sedang menjaga Lanal itu, mereka berhenti.

"Ada yang bisa bahasa Inggris?" tanya salah satu dari mereka. "Ya, ada," jawab anggota TNI itu.

"Apakah tadi ada yang melihat seseorang membawa tongkat berapi?" tanya pasukan Australia itu.

"Tidak. Tidak ada yang melihat," jawabnya.

"Kami mendapat informasi bahwa ada yang membawa tongkat berapi," kata anggota INTERFET itu lagi.

"Maaf, kami tidak melihatnya. Kami tidak tahu apa-apa, tahu-tahu api sudah menyala," jawab anggota TNI itu.

"OK, terima kasih," kata tentara dari negeri Kanguru itu lagi.

Penonton di sekitar itu lantas berkomentar, "Ini kayak adegan sinetron saja. Mereka latihan, tepat dengan latar belakang kebakaran. Jadi, ketika diabadikan oleh para wartawan itu, seolah-olah betul-betul terjadi." (rien kuntari, dari Dili, Timtim)

Laporan dari Dili

SEKOLAH DI TENGAH PENGUNGSIAN

DILI. Nama itu kini tak lagi membawa kenangan manis. Tak ada lagi angin semilir. Tak ada lagi canda, tawa, atau nyanyian bocah. Ibu kota Timor Timur itu kini tinggal menyisakan puing dan abu. Kota itu pun tampak murung, tua, dan suram.

Langitnya yang biru jernih kini bepercak asap hitam, bekas kebakaran. Harumnya percikan air gelombang telah berganti dengan bau yang tidak sedap. Bahkan suara desiran ombak, tak jarang harus berganti dengan suara desing peluru, meski tak diketahui pasti sasaran tembaknya.

Roda perekonomian sama sekali berhenti. Kegiatan harian pun mati. Rasanya terlalu ironis. Dili yang dikelilingi laut begitu indah, harus kekurangan air bersih. Tak hanya itu, tak ada lagi ibu-ibu tua penjual buah jeruk kisar yang berjualan sambil mengunyah sirih, di pinggiran pantai sepanjang Lecidere, Dili timur. Tidak ada lagi para penjaja jagung atau ikan bakar di Faroul.

Sebelumnya, di sepanjang pantai yang begitu indah itu, berdiri berbagai warung makan. Dari rujak cingur, ikan bakar, hingga TFC, kepanjangan dari Trenggalek atau Tulungagung Fried Chicken, yang buka hingga tengah malam dan hampir tidak pernah sepi pengunjung.

Janjikan menu makanan yang bisa menggugah selera, untuk sekadar mendapatkan sepiring nasi dengan lauk-pauk sehat, seperti sayur, ikan, daging, dan telur, dengan segelas air putih, secangkir teh atau kopi, kini benar-benar bagai sebuah mimpi di siang bolong.

Kekosongan Dili semakin lengkap dengan padamnya listrik di kota itu. Hanya tempat-tempat tertentu yang masih dialiri listrik. Begitu juga saluran telepon. Jaringan yang ada, hanya di kantor Telkom dan Korem. Itu pun sangat terbatas dan tidak bisa digunakan setiap saat.

Sedangkan di bidang transportasi dan akomodasi, tak bisa dipungkiri lagi, peran TNI. Tanpa bantuan mereka, sulit bergerak ke mana pun. Hampir setiap hari, TNI menyediakan sebuah truk khusus untuk mengangkut sekitar 80-an wartawan dalam dan luar negeri. Meski Dili kini dalam keadaan "diam", bukan berarti wartawan bebas berkeliraran ke mana-mana. Banyak hal yang tidak bisa dipastikan dan tak bisa diduga.

Markas Komando Resor Militer (Makorem) Dili adalah "hotel terbaik" untuk saat ini. Kenyataannya, tempat yang disediakan memang jauh lebih bagus dari sebuah barak militer. Untuk menampung wartawan yang puluhan jumlahnya itu, Makorem Dili merelakan beberapa ruangnya.

Kendati begitu, Kolonel Willem Rampangilei, Komandan Satuan Penerangan Darurat Militer Timtim, berulang kali meminta maaf atas kondisi yang seadanya itu. Namun, bagaimanapun bentuknya, mereka pulalah yang pada akhirnya tetap berusaha menampung dan melindungi para wartawan.

DI wilayah Dare, misalnya, kini masih tersisa sekitar 30.000 warga yang tak memiliki tempat tinggal. "Di sini, hampir di tiap pohon sekarang ada yang menghuni," kata Romo Tan yang mengurus para pengungsi di Dare. Romo Tan pula yang mengusahakan beras dan makanan bagi mereka. Saat ditemui *Kompas* di kediamannya, Senin (20/9), Romo baru saja mengambil jatah beras untuk pengungsi dari TNI. Dan untuk urusan ini, Romo

Tan sendiri mengaku baru pertama kalinya sepanjang hidup setiap hari harus bolak-balik ke Korem.

Hal itu dilakukan, karena saat ini warga asli wilayah Dare yang sebenarnya bukan pengungsi pun sudah tidak mempunyai bahan makanan. "Ladang dan kebun mereka semua hancur. Jadi mereka juga tidak punya bahan untuk dimakan," katanya. Untuk itu, ia meminta sedikit dari jatah pengungsi itu untuk disisakan bagi mereka yang sebenarnya bukan pengungsi.

Namun, di tengah kekosongan dan kematian Kota Dili, masih tersisa sebagian dari mereka yang tetap melanjutkan kegiatan. Tepatnya, di sebuah pinggiran Kota Dili timur, ada sekelompok siswa yang tetap melanjutkan pendidikan. Mereka seluruhnya berjumlah 20 orang dan seluruhnya siswa SMU: kelas I (7 orang), kelas II (7 orang), dan kelas III (6 orang).

Setelah sarapan seadanya di pagi hari, mereka memulai pendidikan. Menjelang makan siang, sekolah pun berhenti. Kurangnya bahan dan tenaga membuat para pendidik di sana hanya memberi waktu tiga jam sehari (08.00-11.00) untuk belajar. Umumnya mereka mendapatkan pelajaran Matematika, Fisika, Bahasa Inggris, musik, dan olahraga.

Selebihnya, diisi kegiatan ekstra-kurikuler yang berupa pelayanan langsung kepada para pengungsi, yang di lokasi itu berjumlah 55 kepala keluarga (KK), terdiri dari 259 orang. Meski tidak benar-benar kekurangan, mereka makan seadanya. Yosef Ageng Marwata SJ mengatakan, untuk mengurus para pengungsi, ia mendapat bantuan makanan dan obat-obatan dari berbagai pihak, seperti TNI, UNHCR, dan sisa-sisa stok lama.

KE-20 siswa itu kini resmi menjadi pengungsi, setelah kedua orangtua mereka harus menyelamatkan diri. "Mereka ini semua yang tersisa setelah pengumuman hasil penentuan pendapat tanggal 4 September 1999," kata Frater Bagus Laksono, guru Bahasa Inggris setempat. Untuk keperluan pendidikan, mereka diperkuat guru sejarah, seorang putra daerah, Joacim, lalu Eduard Ratu Dupo SJ (Inggris dan musik), Bagus Laksono (Inggris), dan Eustachia Prr (Fisika).

"Saya paling sering memberi pelajaran musik," kata Eduard Ratu Dupo SJ. Ia mengharapakan, pelajaran musik yang dibawakan lebih bisa membuat jiwa para siswa seimbang dalam menghadapi kenyataan hidup yang bisa dibilang cukup berat sekarang ini. Tak heran, bila di waktu senggang, para siswa terkadang mengisi waktu luang dengan bermain gitar bersama.

Walau begitu, harus diakui, di tengah lagu yang mereka dengarkan, tersirat musik keseduan. Keseduan akan masa depan yang penuh ketidakpastian dan keseduan akan hari esok yang belum tentu mereka dapatkan pula.

Menurut Eduard Ratu Dupo SJ, yang juga guru bahasa Inggris dan musik, rata-rata orangtua mereka sudah terpencar, sementara rumah mereka rata-rata sudah terbakar. Maka, tidak mengherankan bila para siswa itu tak banyak berucap tentang masa depan, kecuali senyuman basa-basi dengan pandangan jauh menerawang. (rien kuntari)

Semrawut, Darurat Militer Dicabut

Kamis (23/9/99), situasi Timtim masih semrawut. Asap tebal masih membumbung tinggi di beberapa tempat yang bahkan tampak jelas dari halaman belakang Makorem. Juga suara tembakan yang tak pernah berhenti. Kerja sama antara TNI dengan INTERFET pun belum terjalin dengan baik. Hari itu, terjadi salah paham antara kedua pihak.

Usai antre mandi pagi, kami sering bercanda dan berkumpul di halaman belakang Makorem. Selain melihat persiapan para pasukan yang akan ditarik kembali ke Indonesia, kami pun sering berdiskusi dengan sesama wartawan maupun para perwira PDM. Tiba-tiba, sekitar pukul 11.00 waktu setempat, terdengar letusan tembakan yang cukup keras dari arah Taibesi, Dili timur.

“Astaga, apa yang terjadi, Pak,” teriak saya.

Letkol CH Aziz, Asisten Operasi PDM yang ada di samping saya langsung mengernyitkan dahi. Dalam sekejap ia mengidentifikasi jenis senjata yang digunakan hanya dari suara letusan yang ia dengar. Menurut dia, suara tembakan pertama berasal dari senjata laras panjang jenis Styer dan diletuskan dari jarak sekitar 300 meter. “Jenis senjata ini tidak dimiliki TNI,” ujarnya.

Komandan Satgas Penerangan PDM Letkol Laut (P) Willem Rampangilei beberapa saat kemudian menjelaskan, tembakan itu terjadi karena ada salah paham antara TNI dengan INTERFET. Awalnya, pasukan INTERFET melihat sekelompok massa. Mereka kemudian memberi tembakan peringatan karena menduga sekelompok massa itu akan menjarah makanan.

Suara tembakan ini langsung ditanggapi pasukan TNI karena kebetulan tak jauh dari tempat itu terletak gudang peralatan milik TNI, tepatnya Detasemen Peralatan (Dental) TNI AD.

“Sebagai seorang prajurit, begitu mendengar tembakan, tentunya mereka langsung siaga. Tetapi setelah dikonfirmasi sekali lagi, tidak terjadi tembak-menembak antara

pasukan TNI dengan INTERFET,” jelasnya. Komandan Sektor Dili Kol (Inf) Geerhan Lantara memperkuat penjelasan itu. Dikatakan, tentara Gurkha dari INTERFET melihat sekitar 20 orang yang lari ke atas sambil membawa senjata.

Hari itu, salah pengertian TNI-INTERFET tidak hanya terjadi di Taibesi tetapi juga di Komando Distrik Militer (Kodim). Ceritanya, hari itu, markas Kodim sengaja dikosongkan, persiapan untuk Batalyon Teritorial 521 yang akan ditarik. Pada saat bersamaan, prajurit INTERFET mendapat laporan adanya milisi di tempat tersebut.

Dan, memang inilah ciri khas INTERFET, tanpa memeriksa kebenaran laporan tersebut, mereka langsung memasuki gerbang Kodim yang memang sudah tidak dijaga. Pasukan INTERFET memasuki Kodim dari belakang, langsung memeriksa ruangan, dan mengambil posisi siap tempur. “Tetapi tidak terjadi tembak menembak, *kok*,” kata Pak Willem.

Di saat yang hampir bersamaan, terjadi pula ketegangan TNI-INTERFET di pelabuhan Dili. Di tempat ini sempat terdengar satu kali tembakan. Sesuai standar prosedur operasi (SOP), INTERFET mengeluarkan tembakan satu kali. Salah paham sering terjadi akibat tidak adanya kesepahaman dalam komunikasi. Tidak ada pasukan INTERFET yang fasih berbahasa Indonesia, sebaliknya tidak satu pun prajurit TNI yang juga fasih berbahasa Inggris. Untuk mengatasi salah komunikasi ini, kedua pihak sepakat menempatkan seorang penghubung militer atau Liaison Officer (LO) pada tingkat perwira. Mungkin tingkat ini lebih bisa menjamin tidak terjadi lagi “*mis*”-komunikasi.

Di hari keempat di Timtim, katanya, INTERFET setidaknya telah menangkap 10 orang yang menurut mereka anggota milisi. Mereka juga menemukan tujuh mayat di reruntuhan puing. Ketujuh mayat itu kemudian diserahkan kepada TNI. Untuk mengecek ketujuh mayat, hari itu saya ikut operasi militer bersama Mayor Gane, salah satu LO. Kami memang menemukan ketujuh mayat itu yang antara lain tergeletak memilukan di reruntuhan puing yang tak jauh dari Mercado (pasar)lama.

Sore itu, sekitar pukul 15.30, asap tebal kembali membumbung tinggi. Beberapa bangunan seperti kantor Bupati Dili dan beberapa rumah di perbukitan Dili selatan terbakar. Sedang di gedung DPRD Dili, seseorang, entah siapa dan dari kubu mana, telah tega membakar bendera Merah Putih.

Kondisi itu membuat situasi semakin genting. Ketegangan di kalangan tentara INTERFET pun meningkat. Sehari itu, tank dan panser INTERFET terus berkeliling di

kota Dili. Sementara itu, helikopter tempur terus meraung-raung di udara. Sungguh kota Dili bagai sedang dilanda pertempuran besar. Hanya, tidak jelas antara siapa melawan siapa.

Walau begitu, hari Kamis (23/9/99) itu, Jakarta memutuskan mencabut masa Darurat Militer. Pencabutan dilakukan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 112 Tahun 1999 yang berisi tentang pencabutan Keputusan Presiden RI Nomor 107 Tahun 1999 tentang keadaan Darurat Militer di provinsi Timor Timur. Keputusan pencabutan diambil melalui sidang Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional di Bina Graha. Keppres berlaku sejak ditetapkan, yaitu tanggal 23 September 1999.

Anehnya, menurut Mensesneg/Menkeh Muladi, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi ketertiban dan keamanan Timtim yang sudah membaik. Karena itu, setelah berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah RI melalui Menhankam/Panglima TNI menetapkan tanggal penyerahan tanggung jawab ketertiban dan keamanan di Timtim kepada Pasukan Multinasional PBB. Presiden juga mengeluarkan Inpres No 12/1999 tentang pemulihan kehidupan masyarakat Timtim. Inpres ini lebih ditujukan kepada 11 menteri kabinet, Kepala Kepolisian RI, Gubernur dan para Bupati di Timtim.

Namun, sejujurnya saya tidak paham dengan jalan pemikiran Jakarta. Karena, pada saat keputusan itu diambil, kondisi keamanan dan ketertiban Timtim masih jauh dari baik. Ketegangan, pembakaran, dan suara tembakan hampir tak pernah berhenti. Selain rasa frustrasi, hal itu juga dipicu oleh sikap tentara INTERFET, khususnya tentara Australia yang begitu arogan. Sikap itu tidak hanya mereka tunjukkan di depan rakyat sipil yang bukan warga asli Timtim, melainkan di depan para LO militer Indonesia.

“Wah, *Londo siji iki njelehi banget,*” begitu komentar seorang LO militer Indonesia ketika harus berurusan dengan tentara Australia di wilayah Dili selatan. Perasaan sang LO bisa sangat dipahami karena meski sama-sama prajurit namun sikap merendahkan lawan bicara sangat nyata ada pada diri tentara Australia tersebut. Walau kesal, namun sang LO masih sempat membeli dua ikat kangkung yang baru dipanen seorang warga dari sawah di depan kantor INTERFET tersebut. “Lumayan buat makan nanti malam,” ujarnya.

Sikap Australia yang tinggi hati itu pun membangkitkan semangat para Pejuang Pro-Integrasi. Eurico Guterres setidaknya berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa tentara INTERFET tak sehebat seperti tampilan mereka di televisi. Ia pun selalu berhasil membantah omongan Cosgrove bahwa tentara INTERFET telah berhasil mengamankan

Timtim. Eurico membuktikan hal itu dengan keberhasilannya “bolak-balik” menembus perbatasan yang bisa ia lakukan dengan sangat mudah. Seluruh tindakan Eurico di perbatasan dalam rangka “melawan” Australia itu terekam dalam kamera seorang kameramen, Andy Riccardi.

Ketegangan hubungan TNI-INTERFET, khususnya pasukan dari Australia terbawa hingga menjelang akhir masa darurat militer. Tak bisa dihindari arogansi INTERFET tidak hanya memicu ketegangan di lapangan, tetapi juga dalam hubungan diplomatik Indonesia-Australia. Sikap kasar Australia tidak hanya tampak di lapangan, tetapi sekaligus melalui berbagai pernyataan para pejabat Australia dari Canberra.

Jumat (24/9/99), rencana penyerahan Komando Pengendalian (Kodal) secara resmi diumumkan di Dili dalam jumpa pers bersama Ketua INTERFET Mayjen Peter Cosgrove dan Panglima Darurat Militer Mayjen Kiki Syahnakri di Makorem, Dili. Secara terpisah, Komandan Satgas Penerangan PDM Letkol (Laut) Willem Rampangilei memperkuat penjelasan tersebut. Rencananya, Kodal akan diserahkan hari Senin (27/9/99).

Seiring dengan itu, seluruh anggota TNI akan ditarik, sehingga tinggal dua batalyon gabungan. Yaitu, satu batalyon TNI AD, dua kompi Brimob, satu kompi marinir, dan dua kompi Paskhas TNI AU. Penarikan akan dilakukan pada hari Minggu.

Sistem pengendalian Timtim pasca PDM, sepenuhnya akan dilakukan oleh Satgas Timtim pimpinan Brigjen J Sitorus bersama INTERFET untuk bidang keamanan. Di bidang pemerintahan, kerja sama dilakukan bersama Tim P4TT atau Tim Pelaksana Pasca-Penentuan Pendapat di Timor Timur. Untuk itu, mulai pekan depan seluruh staf pemerintahan akan kembali diaktifkan, termasuk gubernur dan bupati hingga masa transisi. Hari Jumat siang, Gubernur Timtim Abilio Jose Osorio Soares sudah mendarat di Dili dan bertemu Panglima PDM Mayjen Kiki Syahnakri.

Mengingat semakin tingginya sentimen terhadap Australia, pada kesempatan itu, Mayjen Cosgrove sekali lagi menegaskan, Australia hanyalah satu dari banyak bangsa lain yang ingin membantu Timtim. “Kami adalah negara terdekat yang siap dengan pasukan,” tegasnya.

Kalimat itu diucapkan Cosgrove menanggapi munculnya berita protes Wakil Komandan INTERFET Mayjen Songkitti Jaggabatra. Perwira dari Thailand itu menyoroti sikap kasar prajurit Australia. Songkitti mengkhawatirkan kemungkinan Timtim menjadi Vietnam kedua.

Hari Jumat itu, kantor berita asing, AFP, AP, maupun Reuters melansir adanya indikasi perpecahan di tubuh INTERFET. Berita yang muncul dari Bangkok itu dipicu adanya pengakuan seorang perwira militer Thailand bahwa Thailand tidak puas dengan sikap Australia. Thailand menyebut Australia bersikap kasar dan “mengerikan” terutama saat mengarahkan senjata ke seorang tersangka milisi. Bahkan Thailand prihatin dengan “sikap agresif” Cosgrove di Timtim.

Perwira yang menolak diungkap identitas itu mengatakan, Thailand akan menggunakan pendekatan yang lebih lunak. “Kami tidak akan mengarahkan senjata ke kepala orang seperti yang kami lihat dilakukan tentara Australia di televisi. Itu terlihat tidak baik, mengerikan,” ujarnya. (*Kompas*, 25/9/99). Hari itu pula, Wakil Komandan INTERFET Mayjen Songkitti Jaggabatra dan Panglima Tertinggi AB Thailand Jenderal Mongkol Amphonphisit menemui Panglima TNI Jenderal Wiranto di Jakarta.

Menanggapi desas-desus perpecahan di tubuh INTERFET Cosgrove mengatakan, “Saya sangat percaya terhadap Thailand. Saya tidak pernah meragukan mereka. Thailand sangat dekat dengan semua pihak. Saya sangat tertarik untuk berbicara dengan Mayjen Songkitti dan melihat apa yang muncul dari diskusi dengan Jenderal Wiranto. Saya menunggu laporannya.”

Cosgrove membenarkan di sekeliling Dili penuh orang Australia. “Tetapi, pada saatnya nanti akan berdatangan bangsa-bangsa lain untuk membantu masyarakat Timtim yang miskin kembali ke rumah masing-masing dan mendapatkan makanan. Australia tidak hanya menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan Timtim, tetapi sekaligus mengembangkan hubungan baik dengan Indonesia,” ujarnya.

Ketika muncul pertanyaan tentang kaitan TNI dengan milisi, Cosgrove mengatakan, “sangat sulit melihat hal itu hanya dari seragamnya. Saya harap kalian mengerti, bahkan dalam pembicaraan dengan Jenderal Syahnakri kami telah menemukan instansi lain yang mempunyai seragam sangat mirip. Jenderal Syahnakri dan saya sendiri memutuskan untuk menuntaskan masalah ini, tetapi tidak bisa diselesaikan dalam sekejap.” Usai jumpa pers, Cosgrove melanjutkan dengan pertemuan khusus bersama Mayjen Kiki Syahnakri.

Sementara itu, para wartawan kembali ke pos masing-masing. Puluhan wartawan asing yang ikut INTERFET sejak dari Darwin kembali ke Hotel Turismo. Sementara kami, tetap di Makorem. Jumat itu, suasana kota Dili masih jauh dari aman. Pembakaran tetap terjadi di mana-mana, terutama di Formosa dan Santa Cruz.

Suasana terasa semakin menyeramkan dengan helikopter INTERFET di antaranya Black Hawk, yang terus meraung-raung di seluruh angkasa Dili, dari pagi hingga tengah malam. Dengan alasan mencari milisi, salah satu heli melakukan hovering di atas puing-puing sebuah rumah yang sedang terbakar di Formosa (lihat laporan “Menonton INTERFET Beroperasi”).

Hari itu juga, satu regu kesehatan dari Perancis tiba di Dili. Dengan begitu, jumlah pasukan INTERFET menjadi 3.500 personel. Sebaliknya, pukul 22.00, pasukan TNI dikembalikan ke Sulawesi dan Jawa menggunakan kapal KM Lambelu.

Malam itu, usai mengirim berita, kami secara khusus diajak Kol (inf) Geerhan Lantara, berkeliling kota dan meninjau pelabuhan Dili. Komandan Sektor Dili itu ingin melihat persiapan terakhir pemberangkatan para prajurit. “Selamat malam, Komandan,” sapa mereka. “Malam, sudah siap semua?” kata Kol Geerhan dengan gayanya yang khas. Santai tetapi serius. “Syap!” Kegiatan ini terus berlangsung hingga seluruh pasukan TNI ditarik.

Detik Terakhir Pasukan TNI Di Timor Timur

MINGGU 26 September 1999 pagi. Ketika perut masih kosong dan keroncongan, sekitar pukul tujuh pagi, bus berwarna hijau itu sudah siap di halaman Makorem. Bus itu memang khusus menjemput kami di Makorem untuk dibawa ke rumah tinggal Panglima atau RT-Pang di kawasan Faroul.

Begitu mendengar tanda harus berangkat, Tatap Loebis, Eddy Hidayat, dan saya langsung lari menuju halaman Makorem dan segera meloncat ke dalam bus. Berhubung belum sedikit pun kemasukan bahan makanan, sambil naik bus menuju RT-Pang yang tidak begitu jauh, kami berkhayal diajak makan pagi oleh Panglima. Bayangan makanan lezat pun melintas di mata. “Ah,.. setidaknya bukan T-2”, pikir saya. Meski kuyu, namun bayangan itu membuat mata kami sedikit bersinar penuh harapan.

Sesampai di RT-Pang, harapan tinggallah harapan. Ternyata kami tetap ‘dibiarkan’ berada di dalam bus. “Wah *kok nggak* dipanggil-panggil ya,” kata Eddy Hidayat. Ia mulai gelisah. Karena itu, ia sibuk keluar-masuk bis atau pindah-pindah tempat duduk. Maklum satu bis cuma kami bertiga. Kegelisahan Eddy akhirnya menjalar ke kami, ketika samar-samar terdengar suara “pertempuran” antara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. “Hmmm...” Kami saling beradu pandang, tersenyum, lalu tenggelam dalam lamunan masing-masing. Sepiring nasi untuk sarapan, ahhh...

Lamunan seketika buyar. Para perwira itu sudah melangkah dengan cerah menuju bus kami. “Sudah siap? Ayo berangkat” kata mereka. Kami segera menuju lapangan udara dan melesat ke Baucau dengan helikopter.

Rp 15.000 untuk Isteri

Sementara itu, sehari semalam para prajurit sektor timur berjalan kaki menuju pelabuhan Laga, Baucau. Setelah sekian lama berjalan, para prajurit dari batalyon 432 dan 401 itu tiba di Laga sekitar pukul 24.00. Walau begitu, ketika kami tiba di Laga, mereka sudah siap dikembalikan ke barak masing-masing. Tak sedikit pun tampak tanda kelelahan di wajah mereka.

Begitu tiba, Pak Kiki Syahnakri langsung berbicara dengan Kol (Inf) Irwan Kusnadi. Seperti biasa, ketika Pak Kiki memberi pengarahan, saya “berkeliaran” ke tempat lain. Saya berjalan sendirian ke arah rerumputan dan pepohonan yang tak jauh dari pelabuhan Laga, Baucau.

Di balik rerumputan dan pepohonan yang cukup rimbun, seorang prajurit sedang bertransaksi dengan dua orang Ibu. “Ini lima belas ribu. Sudah pas, ya,” kata salah satu Ibu yang kelihatannya warga asli Timtim. Si Ibu sedang membayar sekarung beras sekitar 15 kilogram seharga Rp 15.000,00. Sekarung beras itu adalah sisa bekal prajurit yang akan dibawa pulang setelah masa tugasnya di Timtim berakhir.

“*Kok* dijual Mas,” tanya saya kepada prajurit tersebut.

“Iya, MbakMbak, mereka sudah tidak butuh rupiah, mereka lebih butuh beras. Di sini, rupiah tidak akan berlaku lagi. Sementara saya lebih butuh duitnya agar bisa sedikit memberi tambahan uang kepada isteri setelah bertugas enam bulan di Timtim,” jelasnya. Begitu menerima uang Rp 15.000, si prajurit langsung lari tunggang langgang menuju kapal yang akan segera membawanya kembali ke rumah.

Betapa trenyuh melihat kenyataan itu. Untuk masa enam bulan tugas di medan perang menjaga kedaulatan negara, mereka hanya mendapat tambahan Rp 15.000. Itu pun setelah menjual beras sisa bekal. Ah, betapa besar pengorbanan mereka.

Jika sudah begini, pantaskah mereka dinilai indisipliner? Bukankah sebenarnya sistem negara ini yang memberi peluang pada tindakan tidak disiplin? Jika saja mereka diperlakukan, dihargai, dan dimanusiakan dengan semestinya, akankah hal seperti ini terjadi?

Kembali saya terpekur. Apa yang harus saya lakukan jika menjadi isteri seorang prajurit? Setengah tahun ditinggal di medan perang dan hanya mendapat tambahan Rp 15.000? Tetapi, barangkali materi memang bukan segala-galanya. Suami pulang ke rumah dengan selamat dan utuh, itu adalah karunia tak terkira...

Sesaat kemudian, terdengar suara derap sepatu dengan langkah-langkah berat yang semakin mendekat. Ternyata Pak Kiki dan rombongan berjalan mendekati pelabuhan. Pak Kiki mengatakan, seluruh pasukan telah menunjukkan dedikasi ketaatan dan disiplin tinggi, khas profesionalisme TNI. Hal itu ditunjukkan dengan kenyataan Baucau menjadi kota pertama yang segera hidup kembali di Timtim. Hal senada dikatakan pula oleh Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento.

"Komandan, siap berangkat," kata Kolonel (Inf) Irwan Kusnadi, Komandan Brigade Infantri Lintas Udara (Dan Brigif Linud) 3, yang juga Komandan Sektor Timur Timtim, sambil memberi hormat kepada Panglima PDM Mayjen Kiki Syahnakri. Sesaat kemudian, ia berlari menuju kapal dan bergabung bersama pasukan lain.

Tepat pukul 09.13 waktu setempat, KRI Teluk Rate yang membawa pasukan dari batalyon 432 mulai meninggalkan pelabuhan Laga, menuju Ujung Pandang. Beberapa saat kemudian disusul KRI Teluk Kao yang mengantar pasukan Yon 401 ke barak mereka di Semarang. "Salam bagi keluarga kalian semua," kata Mayjen Kiki Syahnakri. Dari atas kapal, para pasukan itu lalu memberikan lambaian tangan terakhir, tanda perpisahan kepada masyarakat Timtim di bumi Timor Loro Sa'e ini.

"Kapan-kapan, kita bertemu lagi

Kapan-kapan, kita bersama lagi

Mungkin lusa, atau di lain hari..."

Minggu sore, ketika langit sudah menjadi jingga, petikan lagu "Kapan-kapan" milik Koes Plus itu bergema di salah satu sudut pelabuhan Dili. Sekelompok prajurit mendengarkan lagu itu dengan riang gembira. Hari itu, adalah saat-saat terakhir pasukan TNI berada di bumi Timor Timur (Timtim), setelah pemerintah memutuskan menarik seluruh pasukan dari Timtim.

Di sudut pelabuhan Dili itu, ribuan pasukan dari Batalyon 507, 521, marinir, peleton zeni tempur (tonzipur), dan Polisi Militer (POM), serta dua Batalyon 143 dan 321, gabungan dari sektor Dili dan barat itu sedang menunggu untuk diberangkatkan kembali ke barak masing-masing. Sebagian dari mereka sibuk memasukkan seluruh perbekalan ke kapal.

Sementara sebagian lain, menunggu sambil berteduh, bercanda, bernyanyi dan bermain gitar. Keceriaan itu seolah menutup seluruh kepedihan akibat cercaan, makian, umpatan, dan lemparan puluhan batu yang terus diarahkan kepada mereka ketika mengakhiri tugas dan meninggalkan bumi Timor Loro Sa'e.

"Pokoknya pulang, mbak," kata mereka ceria. Suara nyanyian itu semakin bergema, ketika Mayjen Kiki Syahnakri, Panglima Penguasa Darurat Militer daerah Timtim berkunjung, memberi salam perpisahan dan ucapan terima kasih.

Pelepasan pasukan untuk sektor Dili dan sektor barat, dilakukan di pelabuhan Dili, oleh Wakil Panglima PDM Brigjen TNI Amirullah Isnaeni, yang sehari-hari menjabat Wakil Asisten Pengamanan KSAD. Pemberangkatan pasukan itu baru selesai hari Senin (27/9).

Pada menit-menit terakhir itu, diberangkatkan Batalyon 507 dengan KRI Teluk Bayur. Bersamaan dengan itu, mereka pun mengirim balik 20 truk dengan KRI Teluk Jakarta, serta KRI Cirebon dan KRI Parigi yang masing-masing membawa tujuh truk. "Ya, ini yang terakhir," kata Mayjen Kiki Syahnakri.

Di tengah hiruk pikuk keberangkatan TNI kembali ke barak masing-masing di Indonesia, suasana Dili relatif lebih tenang. Dalam arti, tak ada lagi suara tembakan. Rakyat Timtim pun semakin berani keluar dari persembunyian untuk menyaksikan peristiwa penarikan para tentara tersebut. Sebagian hanya berdiri dan termangu, sebagian mengusir para tentara itu sambil berteriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata yang cukup memerahkan telinga.

Kota Dili pun belum sepi dari aksi pembakaran. Hari Minggu itu, gedung Bank Danamon dan sejumlah bangunan lain hangus dimakan api. Walau begitu, saya sangat gembira dengan kedatangan Eddy Hasby, fotografer *Kompas*. Ia datang dari Jakarta bersama sekitar 30 wartawan lain yang khusus di bawah pengawalan Kol Panggih dari Mabes TNI AD.

Dan, malam itu, Pak Geerhan secara khusus mengundang kami berempat, Eddy Hidayat (Media Indonesia), Tatap Loebis (Time), Eddy Hasby (*Kompas*), dan tentu saja saya untuk perjamuan makan malam di RT-Pang. Salah satu menu adalah sate kambing!

Kodal Diserahkan

Senin 27 September 1999. Pukul 09.00 waktu setempat, Panglima PDM Mayjen TNI Kiki Syahnakri secara formal menyerahkan komando dan pengendalian (Kodal) keamanan Timtim kepada Mayjen Peter Cosgrove, Panglima INTERFET. Acara berlangsung tertutup dan sangat singkat, hanya 30 menit.

Semula, acara itu direncanakan diadakan secara terbuka di Bandara Komoro, Dili. Karena itu, pihak Indonesia pun mendatangkan sekitar 30 wartawan dari Jakarta untuk meliput acara bersejarah bagi Indonesia ini. Seluruh wartawan berangkat dari Mabes Cilangkap, dengan pengawalan khusus dari Kol. Panggih.



Mayjen TNI Kiki Syahnakri, Panglima Darurat Militer menyerahkan tongkat Komando Pengendalian (Kodal) kepada Mayjen Peter Cosgrove, Komandan INTERFET di Dili, Senin 27 September 1999. - foto: Eddy Hasby

Sayang, ternyata Cosgrove menghendaki cara lain. Ia justru meminta acara penyerahan dilakukan secara tertutup dan singkat di aula Markas Komando Resor Militer (Makorem) Dili. Entah apa alasannya. Bisa dibayangkan, sekitar 30 wartawan yang baru datang dari Jakarta itu tidak mendapatkan apa yang diharapkan.

Konon kabarnya, Cosgrove dan pasukan INTERFET sesungguhnya belum benar-benar siap menerima tanggung jawab Kodal. Dengan kata lain, ia masih ingin didampingi

TNI. Menghadapi kenyataan itu, Indonesia kemudian mengajukan solusi membentuk ITFET. Setidaknya, masih ada 1.000 personel TNI yang akan mendampingi INTERFET. Selain itu, konon, Cosgrove pun sebenarnya enggan untuk bertemu dan meladeni puluhan wartawan dunia yang numpuk di Dili.

Karena itu, usai acara, Cosgrove langsung meninggalkan tempat. Tidak memberi penjelasan seperti biasanya. Ketika dicegat wartawan di halaman Makorem, Cosgrove hanya mengatakan, berterima kasih atas kerja sama TNI-INTERFET. Sekali lagi ia menekankan sangat terkesan dengan kerja sama tersebut.

Seolah telah ditunggu acara lain, Cosgrove pun langsung menghilang. Usai mengantar Cosgrove dan seluruh staf, Pak Kiki mengadakan jumpa pers. Ia didampingi Brigjen (Pol) JD Sitorus, Komandan Satgas Penerangan PDM Letkol Laut (P) Willem Rampangilei. Pak Kiki menegaskan, penyerahan itu hanyalah dalam bidang pengendalian keamanan, bukan kedaulatan.

Dikatakan, penyerahan secara lapangan, sudah terjadi sekitar empat hari lalu, tepatnya secara bottom-up. Hal itu diperkuat Cosgrove dalam wawancara dengan Radio Australia (ABC). “Wilayah ini, masih dalam teritori Indonesia. Dan sesuai resolusi PBB, Indonesia masih sebagai penanggung jawab keamanan di provinsi ini,” katanya.

“Keamanan wartawan di bawah tanggung jawab siapa, Pak?” Setengah tidak yakin saya ajukan pertanyaan itu kepada Pak Kiki. “Ya tentu saja INTERFET, Mayjen Cosgrove.. Jangan kuatirilah,” jawab Pak Kiki.

“Rien, kamu jangan tinggal di Makorem sendirian, nanti gabung di RT-Pang saja,” sambung Kol (Inf) Gerhaan Lantara.

“Kenapa, Pak?”

“Tanggung jawab keamanan bukan TNI lagi,” jawabnya.

Sejak hari itu, di Timtim tinggal tersisa satu batalyon AD, yang seluruhnya dari Batalyon 700, ditambah satu kompi marinir, satu kompi brimob, dan satu kompi paskhas TNI AU. Seluruhnya berjumlah sekitar 1.000 orang, dengan tugas utama menjaga keamanan internal. Yaitu mengamankan markas TNI di wilayah Faroul dan Makorem, serta menjaga tempat vital seperti, PLN, dan Dolog. Sedang tempat lain seperti Telkom, pelabuhan, dan bandara diamankan bersama INTERFET.

Panglima PDM Mayjen TNI Kiki Syahnakri sendiri kemudian menghabiskan menit-menit terakhir di Timtim dengan berkeliling. Ia ke pelabuhan untuk mengantar pasukan terakhir yang berangkat, sekaligus memberi bekal kepada pasukan yang harus ditinggal, yaitu Batalyon 700. Pak Kiki antara lain didampingi Ketua Satgas Indonesia untuk Timtim (ITFET/Indonesian Task Force for East Timor) Brigjen (Pol) JD Sitorus, Asisten Operasi PDM Letkol CH Aziz, dan Komandan Brigif Linud 17 Kostrad, yang juga Komandan Sektor Dili, Kolonel (Inf) Geerhan Lantara.

Sekitar pukul 14.00 waktu setempat, Mayjen Kiki Syahnakri bersama para perwira tinggi lain, meninggalkan Dili. Namun, sebelumnya ia berpamitan dengan Cosgrove yang secara khusus mengantar ke bandara, serta seluruh kerabat lain, seperti Romo Josef Ageng Marwoto SJ dan Romo Tan Soe Ie SJ. "Selamat jalan, Jenderal." Begitu kata para kerabat baik itu. Siang itu, di tengah teriknya matahari, perlahan tapi pasti, Mayjen Kiki Syahnakri melangkah ke pesawat TNI AU, dan meninggalkan Dili.

ADA perasaan duka dan sendu, terselubung di wajah para perwira itu. Bagaimana pun, ada ikatan tersendiri di antara mereka dengan tanah Timtim ini. Tidak sedikit dari mereka yang dulu ikut berjuang mempertahankan Timtim di tahun 1975.

"Sebagai Korem, saya sedih, karena kalau ditotal, saya berada 11 tahun di Timtim. Dan tentu saya pun berat. Waktu ke sini, saya berat melihat foto para mantan Danrem. Tahun 1994-1995 saya Danrem di sini. Jadi, minimal foto saya terpampang di dinding itu sejak tahun 1995," kenang Mayjen Kiki Syahnakri waktu itu di ruang kerjanya.

Lebih dari itu, ia pun menyimpan kenangan tersendiri. "Tahun 1975, ketika bunyi peluru pertama dari Fretilin, saya yang terima. Pengungsi pertama, juga saya yang terima. Sekarang (pengungsi dan bunyi tembakan terakhir), juga saya yang terima," katanya.

Ungkapan senada juga diucapkan Asisten Operasi PDM Letkol CH Aziz. "Kalau ingat itu sedih. Dulu kita ikut berjuang. Saya mendaki gunung itu sambil membawa beban berat, dan sekarang seperti ini," katanya.

Begitu juga Kolonel (Inf) Geerhan Lantara. Ikatannya dengan Timtim seolah lebih dari sebuah persaudaraan. Terutama karena Kolonel Geerhan Lantara adalah salah satu korban penusukan dalam Insiden Santa Cruz, 12 November 1991. Di balik gaya dan tawanya yang selalu riang, sejenak ia menarik nafas dan berucap, "lebih baik saya pulang dari pada menyaksikan bendera Merah Putih diturunkan di sini." Ada kegetiran dalam nada suara itu.***

Bab VI

Tahanan Kota

Hari itu, suasana begitu hiruk pikuk. Semua orang berjejal di bandara Komoro, Dili, untuk segera kembali ke Indonesia. Waktu berjalan sangat cepat. Timtim sudah bisa dikatakan cukup “bersih” dari barang berharga. Para prajurit mengadakan pembersihan total.

Hampir semua jenis barang ikut dibawa “pulang” bersama para prajurit tersebut. Sebut saja, dari penyejuk udara hingga burung-burung yang mereka sangkarkan. Tak mengherankan jika ada seorang prajurit yang bahkan sempat membawa puluhan burung yang terus berkicau. Walau begitu, ada satu yang tertinggal, yaitu seekor anjing herder yang cukup tinggi dan besar. Siang itu, ia terlihat memelas di balik jeruji kandang besi di pojok halaman bandara.

“Ini anjing siapa, Mas?”

“Dulu milik Gubernur Abilio.”

“Mau dibawa ke Jakarta juga?”

“*Nggak*, terlalu besar.”

“Lha, terus ditinggal begitu saja?”

“Nah itulah masalahnya, kami juga tidak tega meninggalkannya begitu saja. Mbak masih di sini *kan*, titip ya.”

Tak ada kata lain kecuali yang bisa saya ucapkan kecuali, ‘ya’. Dan seolah mendapat seorang kawan, anjing yang tampak stres berat itu langsung tunduk di kaki saya. Sambil menemani si anjing, saya memperhatikan orang yang lalu lalang di bandara tersebut.

Namun, kawan-kawan yang selama ini selalu bersama-sama justru tak satu pun terlihat. Akibatnya, saya tak sempat mengucapkan selama jalan kepada kawan-kawan setia itu. Bahkan Eddy Hidayat sama sekali tak pernah saya lihat di sepanjang hari itu. Begitu juga Eddy Hasby yang datang bersama rombongan. Mereka semua tertelan suasana hiruk pikuk penarikan.

Rasa sepi kembali menyelimuti. Kini saya benar-benar seorang diri. Hampir tidak ada lagi wartawan yang berkulit coklat sawo matang, kecuali wartawan Timtim dan saya. Senin adalah hari terakhir saya bersama teman-teman setia, Tatap Loebis dan Eddy Hidayat. Sayang, mereka berdua pun memutuskan untuk angkat kaki dari Timtim bersama para perwira dan pasukan TNI secara keseluruhan.

Hari itu, saya nebang Romo Ageng untuk kembali ke Makorem. Maklum tak satu pun kendaraan yang tersisa. Di luar pagar bandara, saya melihat Tatap Loebis berjalan menuju pesawat Hercules yang sudah disediakan dan tampaknya penuh sesak dengan barang bawaan. “Selamat jalan, kawan,” bisik saya dalam hati. Sesaat kemudian saya pun melihat Jason Tedjasukmana juga dari Time melangkah ke arah yang sama.

“Kamu nanti tinggal di Makorem sendirian, Rien,” kata Romo Ageng membuka pembicaraan.

“Harusnya sih begitu. Tapi Pak Geerhan tadi berpesan supaya saya gabung di RT-Pang.”

Suasana Dili yang begitu terik dan rasa sepi yang bergelayut begitu kuat membuat saya tak begitu banyak mengeluarkan kata. Mata saya nanar melihat kondisi Timtim yang rapuh, kotor, dan penuh debu. Wilayah itu benar-benar muram. Begitu tak ada lagi pasukan TNI, saya mengandalkan tebengan pada Romo Ageng.

Sejak hari itu, TNI tinggal satu batalyon, Yon 700, ditambah satu kompi Marinir TNI AL, Paskhas TNI AU, dan Brigade Mobil (Brimob) Polisi. Formasi inilah yang kemudian disebut sebagai ITFET atau Indonesian Task Force in East Timor dengan Komandan Brigjen JD Sitorus dan Wakil Komandan Kol (Czi) J Suryo Prabowo. Di atas kertas, jumlah mereka sekitar 1.000 personel. Namun, dalam prakteknya, ITFET hanya diperkuat 900 personel.

Selaras dengan Resolusi PBB No 1264, pasukan yang tertinggal itu merupakan wujud nyata pengakuan dunia internasional atas kedaulatan Indonesia di tanah Timor Timur. Setidaknya pengakuan itu dilakukan hingga fase III sesuai perundingan tripartit di PBB New York, tanggal 5 Mei 1999. Namun, secara keseluruhan, tugas pengamanan Timtim sepenuhnya berada di bawah komando INTERFET. Kedua pihak bersama PBB kemudian membentuk wadah kerja sama JSCG atau Joint Security Consultative Group.

Secepat membalik telapak tangan, wajah dan perangai Timtim pun segera berganti. Tiba-tiba ada rasa takut dan tidak aman membayang ketika kami tiba kembali di Makorem.

Wajah warga Timtim di sekitar Makorem sama sekali tidak bersahabat. Anti-Indonesia begitu tinggi. Rasa yang semula masih bisa saya atasi, sekarang ini sudah tak mampu lagi.

Posisi INTERFET yang mulai dirasakan di Timtim justru membuat rasa takut meningkat dengan cepat. Karena seolah mereka mendapatkan kawan untuk melawan Indonesia, termasuk orang-orangnya. “Teror” dari warga Timtim di sekitar Makorem mulai hari itu benar-benar saya rasakan. Bahkan, hanya untuk keluar dari gerbang Makorem pun sudah tidak memungkinkan.

Posisi saya semakin terjepit ketika ternyata INTERFET menolak saya bergabung di Hotel Turismo, markas besar mereka bersama para wartawan yang dibawa khusus dari Darwin. Kenyataan ini membuat saya secepatnya diajak pindah ke RT-Pang. Di RT-Pang, saya ditempatkan di sebuah kamar di belakang.

Untuk perama kalinya dalam hidup, saya tinggal seataap dengan para perwira TNI. Di tempat ini, saya tinggal bersama Brigjen (Pol) JD Sitorus, Kol (Czi) J Suryo Prabowo, Kol (Inf) Sahala Silalahi, Kol (Laut) Willem Rampangilei, Kol (Pol) I Made Mangku Pastika, Letkol Cam Ilham, dan Kapten (Inf) A Suryo. Karena ada dua Suryo, Kapten Suryo biasa kami panggil Suryo kecil. Setidaknya, ada dua perwira yang kemudian naik pangkat dari Letkol menjadi Kolonel, yaitu Pak Willem Rampangilei dan Pak Sahala Silalahi.

Walau begitu, rasa tidak kerasan semakin menyebar. Hidup saya benar-benar bagai burung dalam sangkar emas. Pernah saya mencoba keluar dari kompleks RT-Pang untuk sekedar melihat situasi. Baru sekitar lima meter berjalan, tiba-tiba.. “kamu orang Indonesia!”. Sebuah teriakan menghampiri. Langkah saya pun terhenti. Saya segera berbalik dan lari tunggang langgang kembali ke RT-Pang ketika melihat gelagat mereka semakin mendekat. Frasa “orang Indonesia” bagaikan sebuah ajakan untuk menyerang bersama-sama.

Akhirnya, saya hanya duduk-duduk di pinggir pantai yang terhampar luas di depan RT-Pang. Menikmati dengan bebas sederet keindahan alam yang murni nan suci. Deburan ombak, semilirnya angin, air laut yang membiru, serta senja di ufuk langit. Sayangnya, semua itu terasa hambar. Ada rasa sepi, geram, sedih, marah. Tetapi tak tahu kepada siapa.

Hidup bersama para panglima memang sangat nyaman. Bangun pagi, sarapan telah siap. Meski disiapkan oleh para prajurit yang pasti berbadan kekar dan berseragam loreng, namun bisa dipastikan, kelezatan makanan yang disajikan tetap terjamin, walau hanya mi instan sekalipun. Namun, tetap saja semua itu tak mampu mengusir rasa sepi, bosan, terpasung, dan marah yang terus bergelayut.

Sebagai wartawan, kondisi ini justru lebih tidak mengenakkan. Kaki dan langkah saya benar-benar terikat oleh situasi dan kondisi. Sesaat saya sempat merasa gagal karena tidak lagi dipandang netral dan diterima di semua pihak. Tetapi, kenyataannya, saya benar-benar tidak berani menghadapi pandangan tajam dan beringas warga Timtim itu sendirian. Namun, untuk kembali ke Jakarta? Tidak mungkin. Alat transportasi sudah tak ada lagi.

Satu-satunya hal yang terpikirkan hanyalah cara untuk bisa keluar dari RT-Pang dan nebeng di pastoran Taibesi. Bagi saya, RT-Pang benar-benar sangkar emas yang tidak memungkinkan saya bergerak. Tetapi, seandainya saya bisa pindah ke Taibesi atau Becora, ada sedikit harapan di sana untuk sedikit lebih bisa bergerak.

Tetapi caranya? Sungguh saya tidak tahu. Sempat terpikirkan satu jalan, yaitu melalui Romo Ageng. Sayang, saluran telepon sudah mati total. Mustahil bagi saya menemui Romo Ageng di Pastoran Taibesi. Hhhh... Saya pun kembali duduk sendirian di halaman RT-Pang yang begitu hijau dan tertata rapi.

Melihat hal itu, esok paginya, Pak Suryo meminta saya pindah ke rumah dinas Danrem di sebelah RT-Pang, dan bergabung dengan tim Satgas P4TT.

“Mungkin akan lebih nyambung kalau kamu bersama mereka, Rien,” kata Pak Suryo.

“Ya, Pak, karena selama ini saya memang ditugaskan bersama mereka.”

Living with Killers

“Selamat bergabung, Mbak. *Welcome!* Beginilah tempatnya.”

Sambutan ramah itu datang dari Mas Yuri O Thamrin, Juru Bicara Satgas P4TT. Mereka memberi saya kamar di bagian depan. Ketika berada di RT-Pang, saya sudah cukup heran dengan perbekalan para perwira itu. Tetapi di tempat ini, saya semakin heran.

Perbekalan para diplomat itu luar biasa lengkap dan banyak. Mereka membekali diri tidak hanya dengan makanan, tetapi hingga lampu senter, termos yang bisa sekaligus untuk memasak air, hingga handuk, sikat gigi, sabun, dan sebagainya. Jenis makanannya pun bermacam-macam. Segala jenis makanan kaleng, termasuk corned beef hingga mi instan.

Seharian itu, saya menghabiskan waktu berdiskusi dengan Mas Yuri sambil menonton pasukan INTERFET yang sedang latihan di jalanan depan rumah. Sayang, pertemuan ini tak lama. Keluarga Satgas P4TT hari itu memutuskan keluar dari Dili setelah mendengar pembunuhan yang cukup membabi buta. Dalam sekejap mereka mengemas barang yang ada dan langsung cabut ke Jakarta.

“Mbak, ayo kembali ke Jakarta saja, di sini tidak aman,” ajak Mas Yuri.

“Terima kasih, Mas, tugas saya belum selesai. Tidak aman adalah bagian dari tugas saya.”

Kepergian Mas Yuri dan rombongan Satgas P4TT lagi-lagi membuat saya terpuruk dalam kesendirian. Di rumah besar dengan banyak kamar itu saya tinggal seorang diri. Namun, kali ini, mereka meninggalkan bekal makanan yang berlimpah ruah. Untuk ukuran perut saya, seluruh bekal itu kira-kira baru akan habis sekitar dua tahun kemudian. Untuk mengatasi “kesulitan” itu, saya pun mengundang para personel batalyon 700 yang berada di rumah sebelah. Saya meminta mereka membawa seluruh bekal itu ke markas besarnya.

“Semua, Mbak?”

“Ya.”

“Nanti Mbak gimana?”

“Sisain sedikit saja, atau nanti saya nebeng ke sana, ya.”

“Beres, Mbak.”

Urusan makanan itu membuat saya akhirnya berteman baik dengan para personel Yon 700 tersebut. Hampir setiap saat mereka mencek kondisi saya.

Tiba-tiba Pak Ilham sudah berada di depan pintu.

“Pagi, Rien, kamu ditinggal sama mereka ya.”

“Iya *nih*, Pak. Percuma juga saya pindah ke sini, karena akhirnya mereka semua pergi. Tetapi saya ditinggalin stok komplet dan sangat banyak. Lihat deh, Pak, barangkali ada yang Bapak perlu...”

“Katanya begitu, ya,” ujar Pak Ilham sambil melihat perlengkapan dan stok makanan yang ditinggalkan oleh tim Satgas P4TT. Melihat semua itu, Pak Ilham tersenyum sambil geleng-geleng kepala.

“Luar biasa para diplomat itu... perlengkapannya luar biasa.” Selesai memilih perbekalan yang dibutuhkan, Pak Ilham pun pamit kembali ke RT-Pang.

“Mau ikut *nggak* Rien?”

“Belum, sebentar lagi. Terima kasih, Pak, nanti saya jalan saja.”

Tak lama kemudian, tiba-tiba Pak Ilham sudah kembali dan tergepoh-gepoh lari ke arah kami. Melihat wajahnya yang sedikit tegang, kami pun ikut was-was.

“Ada apa, Pak?”

Tanpa menjawab sepatah kata pun, Pak Ilham langsung menuju kamar perbekalan.

“Tadi sudah ada yang masuk ke kamar ini belum?”

“Belum, ada apa?”

“Lahh.. ini dia,” kata Pak Ilham. Wajahnya terlihat begitu lega.

Oh la la, ternyata Pak Ilham baru menemukan kembali senjata otomatis yang tanpa sadar tertinggal di kamar tersebut.

“Wah, aku kaget, *kek* tiba-tiba saya kehilangan senjata, eh ternyata tertinggal di sini. Ya, sudah, saya jalan dulu.”

“Silakan, Pak.”

Saya lalu duduk-duduk di beranda depan. Tetap dengan rasa gundah, sedih, dan bengong yang bercampur aduk.

“Mau ke mana hari ini, Mbak?” sapa salah satu personel Yon 700 ketika melihat saya duduk sendirian.

“Belum tahu *mih*. Bingung juga, karena sekarang tidak bisa ke mana-mana. Sebelum ini pernah tugas di mana?”

“Wah, kelihatannya saya mendapat tugas di sini terus. Mbak sudah berapa lama tugas di Timtim?”

“Kalau untuk urusan jajak pendapat ini sejak Juli lalu. Tetapi sebelumnya memang saya sering bertugas di Timtim, cuma *nggak* selama ini. Paling banter dua minggu terus kembali ke Jakarta.”

“Pernah ke markas Falintil?”

“Ya.”

“Gimana mereka, Mbak?”

“Baik-baik juga sih.”

“Markas yang di mana?”

“Ya yang di Uai Mori, Viqueque.”

“Wah, kalau saya dulu ketemunya bertempur..”

“Kalah atau menang?”

“Menang, Mbak, kami menewaskan empat orang,” kata prajurit yang murah senyum ini.

“Mbak lihat orang yang sedang menjemur pakaian di ujung sana? Wah itu kalau sama musuh sadis sekali dia, Mbak. Kelihatannya tenang dan kalem begitu, tetapi dia sudah membunuh empat orang. Orang itu kalau mbunuh *nggak* pakai senapan, tetapi dengan pisau. Dia tusuk-tusuk hingga mati.”

Mendengar itu, telinga saya memerah dan hati pun miris. Perut sontak mules. Sambil memperhatikan prajurit yang sedang menjemur pakaian itu, saya berpikir, mungkinkah orang sekalem dan setenang dia mampu melakukan semua yang diceritakan prajurit di depan saya ini. Tetapi kalau memang mampu, ya Tuhan, *I've spent these days with these smiling killers...* Bulu kuduk saya langsung berdiri. Merinding...

Rekanku Agus Mulyawan

Selepas perbincangan kecil itu, saya berpamitan menuju RT-Pang. Seperti biasa, di jalan saya berpapasan dengan para prajurit yang sedang berolah raga pagi dengan berlari-lari di sekitar Faroul, namun tanpa keluar dari batas wilayah yang sudah ditetapkan. Meski dalam kontrak kerja mereka bertugas menjaga peralatan vital di sekitar Dili, namun dalam prakteknya, para prajurit itu tidak pernah bebas bergerak lebih jauh dari batas Faroul.

“Rien, baru saja Pak Sjafrie telepon, beliau berpesan supaya kami menjaga penuh keamananmu. Karena itu, kamu tidak boleh lebih jauh lima langkah dari kami,” kata Pak Suryo sesaat setelah saya muncul di RT-Pang. Entah sedang membicarakan apa, meski sebagian masih bercelana pendek, termasuk Pak Suryo, namun pagi itu, para perwira sudah berkumpul di ruang tamu.

Bagaimanapun ucapan Pak Suryo yang disampaikan dengan ramah, penuh senyum dan dengan niat sangat baik itu tetap membuat saya tepekur. Saya benar-benar merasa terpenjara oleh keadaan. “Ya, baik, Pak. Saya dikejar-kejar Aitarak?”

Kembali Pak Suryo hanya menjawab dengan tersenyum. Perintah Pak Sjafrie Samsoddin itu disampaikan, setelah kami mengikuti berita di RCTI tentang pembunuhan wartawan Agus Mulyawan bersama dua biarawati, tiga frater, seorang sopir, dan dua remaja putri.

Agus Mulyawan adalah wartawan berkebangsaan Indonesia yang bekerja untuk Asia Press. Ia memang sangat dekat dengan Falintil dan Taur Matan Ruak. Agustus lalu, kami sama-sama berada di Uai Mori, markas besar Falintil, hingga peringatan HUT Falintil ke-24. Sejak itu, wartawan yang berada di Uai Mori memang menjadi target para milisi.

“Setelah Agus, sekarang giliran saya, Pak..?”

“Pokoknya kamu jangan jauh-jauh dari saya. Ini perintah..,” kata Pak Suryo.

Pembunuhan Agus jelas membuat saya miris. Apalagi muncul berita cukup santer bahwa Aitarak mulai kembali dan beredar di Dili. Sementara saya telah menjadi target mereka setelah Agus Mulyawan sejak Agustus lalu. Tepatnya ketika saya menembus “barikade” berupa larangan untuk menemui kelompok Falintil dan Taur Matan Ruak di Uai Mori, Viqueque. Tanggung jawab profesional telah memaksa saya mengabaikan seluruh hambatan yang bisa mencegah saya menemui Taur dan kelompoknya, seperti ancaman penculikan, pemerkosaan, hingga pembunuhan.

Prinsip saya, selama bendera Merah Putih berkibar di bumi Loro Sa’e, di mata saya, mereka tetaplah rakyat dan bangsa Indonesia. Sudah selayaknya jika mereka mendapat porsi pemberitaan yang seimbang. Selain itu, pilihan atau opsi “kemerdekaan” adalah murni datang dari pihak Indonesia. Karena itu, sudah selayaknya jika mereka diberi kesempatan dan peluang yang sama di media massa. Bagaimanapun, wartawan tidak mungkin bisa mengingkari hak masyarakat untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi atau *people’s right to know*.

Sebersit muncul penyesalan di hati saya karena telah menolak tawaran baik Mas Yuri untuk kembali ke Jakarta. Sayang, semua sudah terlambat... Di tengah kegalauan itu, tiba-tiba saya melihat Romo Ageng muncul di RT-Pang. Usai berbicara dengan Pak Suryo, tak lama kemudian Romo Ageng pamit pulang. Seperti takut kehilangan kesempatan, saya langsung ikut Romo ke Taibesi, lengkap dengan telepon satelit yang hampir selalu menempel di badan saya. Romo Ageng adalah satu-satunya peluang saya keluar dari RT-Pang.

Setelah mengetahui posisi dan kesulitan saya, Romo tidak ke pastoran Taibesi, melainkan ke SMA Santo Yosef, Balide. Dengan harapan, di tempat ini saya bisa lebih leluasa menghubungi Taur Matan Ruak. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada cara lain kecuali menghubungi Matan Ruak. Dibantu Romo Juvito, saya pun mengontak Komandan Falintil itu di Uai Mori, markas besar Falintil, melalui telepon satelit Inmarsat.

“Rien, kamu tidak aman jika terus di Dili. Terutama setelah peristiwa yang menimpa Agus. *Can you move to Uai Mori?*” kata Matan Ruak.

“*How, even I can’t leave RT-Pang.*”

“Ya, *that's the problem*. Tetapi kami tidak bisa melindungi kalau kamu ada di Dili. OK, begini deh, kamu usahakan bisa melewati Hera, kami akan menjemputmu dan membawamu aman sampai Uai Mori.” Hera di Dili timur merupakan salah satu basis milisi.

“*Obrigado*, Komandante. Saya akan melihat kemungkinan itu, tetapi kalau tidak bisa, saya mungkin memilih kembali ke Jakarta.”

“*How?*”

“*I don't know yet.*”

“OK, tetapi kalau ke Jakarta pun tidak bisa, usahakanlah keluar dari Dili, *keep in touch*. *I wish you could reach Baucau, so you can go to Uai Mori, it is safe for you, I guarantee..*”

Matan Ruak berpesan agar saya benar-benar ekstra hati-hati. Sepertinya ia tahu persis bahwa Aitarak memang sudah kembali menyusup dan berkeliaran bebas di Dili. Pesan itu pun ia sampaikan sekali lagi melalui Romo Juvito.

“Mbak, Anda benar-benar tidak aman kalau di Dili,” ujar Romo Juvito.

“Ya, saya tahu, tetapi harus bagaimana?”

“Gimana Rien,” tiba-tiba Romo Ageng nimbrung.

“Mbak Rien dalam posisi sangat tidak aman,” jawab Romo Juvito.

“Aitarak sudah kembali ke Dili?” tanya Romo Ageng

“Ya, dan saya menjadi target selanjutnya setelah Agus.”

“Matan Ruak menyarankan apa?”

“Dia minta saya pindah ke Uai Mori atau minimal keluar dari Dili. Falintil baru bisa menjemput di Baucau atau minimal jika saya bisa lolos di Hera..”

“Sabar ya, Rien,” kata Romo Ageng.

“Ya, terima kasih Romo.”

Kebuntuan itu membuat saya memutuskan kembali ke RT-Pang. Berita kematian Agus begitu terlambat saya terima. Dalam arti, berita itu muncul dan kami ketahui setelah Dili pun sudah telanjur tidak aman bagi saya serta warga negara Indonesia yang kebetulan sipil dan tetap berada di Timtim.

Di masa-masa itu, kami sudah benar-benar lumpuh. Tidak bisa bergerak dan sama sekali tidak bisa berkomunikasi karena jalur telepon sudah tidak berfungsi. Musibah besar itu baru saya ketahui Selasa (28/9/99). Bisa dibayangkan, betapa kami terkejut ketika menyaksikan berita itu di RCTI.

Tetapi, saya heran sekaligus senang karena berarti masih ada wartawan Indonesia yang berada di Timtim, selain saya. Persoalannya, siapa dan di mana dia, saya sama sekali tidak tahu. Romo Ageng sebenarnya sudah mendengar slentingan berita pembantaian itu, Senin (27/9/99), namun tidak bisa mengkonfirmasi. Romo baru mendapat konfirmasi dari Canosesan, Selasa (28/9/99).

Kematian Agus memang diawali dengan keinginannya keluar dari sarang Falintil di Uai Mori. Taur Matan Ruak bercerita, pihaknya telah berusaha melarang agar Agus tidak keluar dari Uai Mori waktu itu. Namun, karena Agus sudah merasa terlalu lama di Uai Mori, hari itu, ia pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta.

Hal itu dilakukan dengan pertimbangan, kebetulan ada rombongan misionaris yang akan ke Los Palos dari Baucau. Karena merasa lebih aman, Agus bergabung dengan mereka. Tetapi, sesampai di Baucau, rombongan yang membawa Agus seluruhnya dihabisi pihak milisi di pelabuhan Qom, Los Palos. Santer berita yang mengatakan, mereka dibunuh oleh tim Alfa, kelompok milisi yang bertugas di Los Palos.

Kesembilan orang itu tewas dengan sangat menyedihkan. Mereka adalah Sr Herminia FDDC (Italia), Sr Celeste FDDC, Fr Fernando Pr, Fr Jacinto Pr, Fr Falerio Pr (Portugal), Agus Mulyawan, serta dua pemuda dan seorang sopir. Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada hari Sabtu (25/9) siang atau sore. Seluruh korban pembantaian itu baru diketemukan hari Minggu (26/9) dan langsung dimakamkan di Los Palos. Hari itu pula diadakan Misa Requiem di Baucau.

Kematian Agus benar-benar menggugah kesadaran akan bahaya yang kini kembali di depan mata. Kekhawatiran pun merebak ketika berhadapan dengan kenyataan tentara Indonesia benar-benar terpasung. Mereka sama sekali tidak memiliki akses, termasuk untuk informasi. Bahkan dalam mengusut kematian Agus, yang jelas-jelas seorang warga negara Indonesia, ITFET sama sekali tidak memiliki kaki maupun tangan.

Maklum, ITFET tak diizinkan keluar dari batas wilayah mereka, yaitu Faroul. Jadi, ITFET bukan mengamankan Dili, melainkan hanya Faroul yang tak lain tak bukan adalah tempat tinggal mereka sehari-hari.

“Kami ini sebenarnya bukan keamanan, tetapi tahanan kota,” kata Pak Suryo. Ia terlihat gemas karena sama sekali tidak memiliki akses untuk memperoleh informasi tentang pembunuhan Agus Mulyawan dengan lebih akurat. Hal senada juga dikeluhkan Pak JD Sitorus, Ketua ITFET. Sejak Kodal diserahkan kepada INTERFET, Indonesia sama

sekali tidak memiliki akses keluar dari Dili, bahkan dari Faroul. Karena itu, Indonesia terpaksa mengandalkan informasi kasus ini kepada INTERFET maupun Unamet.

Sayangnya, kata Pak Sitorus, “mereka (INTERFET dan UNAMET) ternyata juga hanya mendapatkan informasi dan hanya mengatakan sudah ada tiga sumber berbeda yang membenarkan kejadian itu. Kita tadi bertanya kepada UNAMET melalui Civpol, mereka membenarkan kejadian itu dan sekarang anggotanya sedang menuju Baucau untuk menanyakan kepada Uskup Basilio.”

“Jadi kepastiannya bagaimana, berapa orang yang meninggal kita belum tahu, sampai sekarang kami masih menunggu. Saya sangat menyayangkan kejadian ini karena tidak bisa segera mendapatkan informasi secara langsung. Sekarang ini *kan* telepon sudah terputus, jadi kita tidak bisa komunikasi langsung ke sana,” lanjutnya. Bahkan menurut Pak Made Mangku Pastika, dalam dua kali pertemuan dengan INTERFET maupun Unamet, pihaknya sama sekali tidak diberi tahu tentang kejadian tersebut.

“Pak, kalau seperti ini, kita tidak bisa menuntut atau protes kepada INTERFET? Sembilan warga kita tewas, Pak. Bukankah ini tanggung jawab mereka?” Saya memberanikan diri untuk bertanya.

“Itulah masalahnya, kita sama sekali tidak punya akses, kami hanya bisa menunggu,” kata Pak Suryo. Ia terlihat sebel dengan keadaan itu. Walau begitu, Indonesia lalu mempertimbangkan kemungkinan melayangkan protes dan menyalahkan INTERFET maupun UNAMET. Terutama atas kelambatan langkah mereka dalam menangani kasus ini. Namun, di sisi lain, Indonesia pun berkeinginan menggunakan kesempatan ini untuk introspeksi dan lebih memperhatikan nasib bangsa sendiri.

Terlepas dari sebab dan akibat yang masih menyelimuti kejadian itu, pembunuhan Agus Mulyawan dan delapan orang lain termasuk para misionaris membuat saya kembali mempertanyakan kemampuan tempur INTERFET. Ada perasaan tidak terima ketika melihat peralatan tempur mereka yang serba canggih dan super lengkap, namun bisa kebobolan seperti ini. Di mata saya yang sangat awam dalam hal kemiliteran, kasus pembunuhan Agus menunjukkan ketidakpiawaian INTERFET dalam hal strategi dan antisipasi.

Apalagi kasus pembunuhan Agus ini menyisakan banyak kekecewaan. Misalnya, ketika Indonesia mengkonfirmasi kejadian tersebut, INTERFET mengatakan, mengetahui hal itu juga hanya dari informasi karena belum menempatkan personel di Los Palos. Bahkan,

tiga hari kemudian mereka baru mengirim anggota untuk mencari kepastian kepada Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento.

Keadaan semakin janggal ketika Pak Suryo Prabowo bercerita tentang orang-orang yang diduga terlibat dalam kejadian mengerikan tersebut. Pada hari pertama penugasannya, ITFET mendapat informasi bahwa INTERFET melakukan operasi tempur di wilayah Qom, Los Palos. Mereka menangkap 24 orang yang diduga milisi lengkap dengan senjata yang berjumlah 14 pucuk. Persoalannya, Juru Bicara INTERFET Kolonel Mark Kelly sempat tidak mengakui aksi itu ketika ITFET mengklarifikasikan persoalan tersebut dalam pertemuan pertama JSCG.

Tentu hal itu mengundang tanda tanya. Hari itu, Kol Kelly menggelar jumpa pers tentang penemuan sembilan mayat di Qom tersebut. Sayangnya, jumpa pers itu tidak bisa langsung saya liput karena saya pun senasib seperjuangan dengan TNI. Saya juga menjadi tahanan kota dan tidak memiliki akses ke mana pun. Apalagi mendekati Hotel Turismo, markas besar INTERFET.

Menurut Kelly, kesembilan jenazah itu ditemukan di Lautem, sekitar 25 kilometer dari Qom. Untuk itu, Komandan INTERFET Mayjen Peter Cosgrove mengembangkan sejumlah proposal yang akan diserahkan kepada PBB pada hari Kamis. “Ini berhubungan dengan tidak adanya Polisi Sipil dan kebutuhan akan sistem pengadilan di Timtim,” katanya.

Saat ini, lanjut Pak Kelly, INTERFET dan polisi militer sedang mengumpulkan bukti-bukti pembunuhan tersebut. Bukti-bukti itu nantinya akan diserahkan kepada tim penyelidikan yang akan ditetapkan oleh Sekjen PBB Kofi Annan. “Saya tidak bisa memberi rincian spesifik karena proposal ini masih harus dibicarakan dengan PBB dan pihak-pihak terkait, dan tentu saja termasuk pemerintah Indonesia,” jelasnya. Pada kesempatan itu, Kolonel Kelly sama sekali tidak menyebut pelaku pembunuhan maupun penangkapan yang dilakukan INTERFET.

Pengakuan itu baru dilakukan beberapa hari kemudian. INTERFET bahkan kemudian mengundang beberapa personel ITFET untuk menengok tawanan tersebut di salah satu ruang di Markas INTERFET, bekas pangkalan udara (Lanud), Komoro, Dili. Para perwira tersebut merasa lega, karena dari 24 orang yang tertangkap, ternyata sama sekali tidak ada anggota Kopassus atau semacamnya.

“Dari 24 nama itu, tidak ada satu pun yang menjadi anggota Kopassus. Yang ada hanyalah satu orang yang menggunakan baju loreng dengan badge Kopassus,” kata Pak

Suryo. Seperti diakui Cosgrove, pengenaaan seragam memang tidak selalu bisa diartikan sebagai anggota.

Ke-24 orang itu terdiri dari Jaka da Costa, Paulino Miranda, David Lopez, Gilberto Fernandez, Agustino Formanas, Lamberto Lumez, America de Olivera, Inasia dos Santos, Aldofo da Costa, Ziberto da Costa, Manuel dos Santos, Carlos Pereira, Juaquil Fernandes, Suse da Costa, Lamberto dos Santos, Ronald Lobe, Marianu Baros Ximenes, Nicolau dos Reis, Alarico da Costa, Alarico dos Santos, Aligusta da Costa, Pirio Victor, Joneo Fractus, dan Feliciano Fernandes.

Ke-24 orang ini sebenarnya termasuk sebagai Wanra (Perlawanan Rakyat). Seharusnya mereka ikut dievakuasi bersama TNI, tepatnya Yon 744 dan 745 atau bersama-sama dari Laga, Baucau. "Tetapi mereka *kok* ketinggalan," kata Pak Kiki Syahnakri.

Kembali ke Jakarta

Setelah INTERFET berkuasa penuh di Timtim, pembakaran masih terus terjadi. Gedung Makodim dan Satlantas (Satuan Lalu Lintas) dalam sekejap telah menjadi abu. Seiring dengan itu, situasi Timtim semakin tidak kondusif. Kondisi semakin mencekam bagi warga negara Indonesia. Sejak saat itu, jujur saya akui, saya benar-benar tidak berani bepergian sendirian. Setelah sekian lama berada di Timtim, inilah kali pertama saya merasa takut berada di wilayah itu.

Setelah berbicara panjang lebar dengan Pak Suryo, saya memutuskan pulang ke Jakarta. Toh tidak mungkin pula untuk pindah ke Uai Mori. Atas saran Romo Ageng, ikut pesawat ICRC menjadi satu-satunya jalan aman untuk pulang ke Jakarta. Persoalannya, ICRC bermarkas di wilayah Bekora yang letaknya cukup jauh dari RT-Pang. Bisa dipastikan, tidak mungkin saya bisa mencapai wilayah itu sendirian.

Dan, tak ada jalan lain kecuali kembali merepotkan Romo Ageng. Beliau adalah tokoh sentral yang jelas diterima oleh semua pihak. Melihat situasi dan kondisi yang memang tidak menguntungkan, hari itu, Romo Ageng menjemput saya di RT-Pang. Setelah berpamitan dengan seluruh perwira yang baik hati itu, saya langsung dibawa ke markas ICRC di Bekora, Dili timur.

Meski didampingi Romo Ageng, namun hati saya tetap berdegup kencang. Di sepanjang jalan itu, saya harus berpapasan pandang dengan warga Timtim yang sama sekali tidak ramah. Pada titik ini, saya tidak bisa lagi memahami alasan mereka membenci rakyat

Indonesia. Di sisi lain, saya pun tidak mampu lagi memahami latar belakang di balik pandangan yang penuh kebencian tersebut. Karena pada waktu itu, saya pun merasa sedang benar-benar dicari oleh kelompok milisi, khususnya Aitarak yang sudah menyusup kembali ke Dili.

“Romo, saya takut. Kali ini saya merasa takut.”

Rasa takut itu tidak hanya menyangkut nasib saya, tetapi lebih dari itu adalah menyangkut nasib Romo Ageng. Peristiwa pembunuhan di Qom benar-benar menghantui. Saya benar-benar khawatir apakah Romo seterusnya akan selamat setelah mengantar saya ke ICRC? Apakah Romo tidak menjadi incaran mereka juga?

Ada satu hal yang benar-benar mengganggu pikiran saya dalam kasus pembunuhan di Qom itu. Tim Alfa, kelompok milisi untuk Lautem yang disebut-sebut sebagai pelaku pembunuhan, tidak hanya menewaskan target, yang mungkin dalam hal ini hanyalah Agus Mulyawan, tetapi sekaligus juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Di mata mereka, Agus Mulyawan mungkin dinilai sebagai pengkhianat karena berada di sisi pro-kemerdekaan. Tetapi, delapan orang lain yang terdiri dari biarawati, frater, remaja putri, dan sopir apakah seperti itu?

Pikiran seperti itulah yang membuat saya benar-benar cemas akan nasib Romo Ageng nanti. Terlebih karena Romo tinggal jauh dari RT-Pang atau markas INTERFET di Turismo. Meski masih ada sekitar 1.000 personel TNI, tetapi kaki mereka telah benar-benar dipangkas. Mereka tidak mungkin mampu melindungi Romo Ageng hingga pastoran Taibesi. Karena itu, saya kemudian berharap lebih pada pasukan Falintil, anak buah Matan Ruak. Begitu posisi dan situasi aman, saya akan menghubungi Matan Ruak untuk menitipkan Romo Ageng.

Sesampai di Bekora, kami disambut dengan pandangan dingin ratusan mata warga Timtim yang ‘mengungsi’ di halaman markas ICRC.

“Kamu masih takut, Rien?”

“Ya, Romo. Jangan-jangan ICRC tidak bisa membantu lagi.”

“Ya, kita coba dulu. Melihat posisimu yang seperti itu, saya yakin mereka mau membantu.”

Di ruang tamu ICRC, saya hanya duduk dan terdiam. Bahkan saya begitu takut untuk ketahuan bahwa saya orang Indonesia. Apalagi di pojok ruangan itu saya melihat seorang lelaki berperawakan kekar dan berambut cepak. Ia pun hanya diam dan duduk di lantai

pojok ruangan. Hati saya berdetak lebih kencang. Saya terpaksa memalingkan wajah setiap kali pandangan kami bertumbukan.

Romo Agenglah yang kemudian menemui dan berbicara dengan Syméon Antoulas PhD, Kepala ICRC untuk Timtim. Entah apa yang dibicarakan Romo dengan Syméon, tiba-tiba pria ramah itu memanggil saya untuk ke ruangnya.

“Sebetulnya kami sudah tidak diizinkan lagi untuk membawa warga Timtim keluar..” ujarnya. Mendengar penuturan itu, kembali saya terdiam.

“*But, she’s Indonesian.* Dan saat ini nyawanya terancam,” kata Romo Ageng.

“*Can I see your passport? ... So, you are not East Timoreese, you are Indonesian. I think, it won’t be a problem to us,*” kata Syméon. Ia lalu melesat entah ke mana. Sesaat kemudian ia kembali. Ia menyerahkan paspor hijau yang telah dilengkapi dengan secarik kertas dengan kop ICRC DILI.

Di secarik kertas itu tertulis,

“*To: Bob MC KAY*”

This is to authorize the below mentioned person/s to take ICRC plane back to Surabaya on 30.9.99 subject to availability:..” Alenea selanjutnya diisi nama saya sesuai paspor dan ditandatangani Syméon Antoulas lengkap dengan cap tinta merah ICRC.

“*OK, so, you’re safe now.. don’t worry,*” kata Syméon Antoulas. Sesaat kemudian ia memanggil lelaki berambut cepak yang dari tadi duduk di pojok ruangan tersebut. Hati saya berdesir dan berdegup kencang! Tetapi sesaat kemudian saya lega ketika melihat paspor hijau yang ia bawa. Kami akhirnya berkenalan. Ternyata dia adalah German G Mintapradja. Belakangan baru saya sadari bahwa kami adalah senasib.

Sejak kasus pembunuhan Agus Mulyawan bersama delapan orang lain di Qom, Mas German adalah orang yang paling dicari-cari. Dia adalah satu-satu orang yang berhasil merekam prosesi pemakaman Agus Mulyawan dan kedelapan korban lain di Los Palos dan kemudian mengirimkannya ke RCTI.

“Lha, ternyata kita senasib. Sejak itu saya dikejar-kejar habis. Dari tadi saya pun mengamati Anda, karena saya juga khawatir dan bertanya-tanya orang ini siapa..” kata Mas German. Kami pun tertawa. Ini adalah tawa pertama kami sejak Kodal resmi diserahkan kepada INTERFET.

“Romo, terima kasih.”

Hanya kata itu yang bisa saya ungkapkan atas segala jasa dan kebaikan Romo Ageng. Saya tidak akan mampu membalas seluruh jasa dan kebaikan Romo Ageng. “Romo, mungkin ini lebih tepat jika Romo yang mengenakan. Meski ini bukan rompi antipeluru sesuai standar internasional, tetapi setidaknya ini bisa menahan bacokan.” Romo tersenyum menerima rompi antibacok yang saya kenakan selama bertugas di Timtim. “Terima kasih, Romo, sekali lagi terima kasih...” bisik saya dalam hati..

Sesampai di Jakarta, hubungan saya dengan Timtim tak pernah putus. Kontak telepon tetap saya lakukan, baik dengan Taur Matan Ruak maupun Pak Suryo Prabowo. Sabtu (2/10/99), saya menelepon Taur Matan Ruak, mengabarkan bahwa saya dan Mas German sudah selamat sampai Jakarta, sekaligus menitipkan Romo Ageng. Matan Ruak menyambut baik kabar gembira tersebut. Seperti tak ingin kehilangan kesempatan, saat itu saya gunakan pula untuk meminta sedikit komentar Matan Ruak tentang posisi TNI pasca-darurat militer.

“Selama ini Falintil tidak pernah menganggap TNI sebagai musuh, kenyataannya, kami selalu berusaha berdialog. Jika sebelumnya, hubungan kami buruk, karena pada dasarnya ada pihak yang tidak menepati kesepakatan yang telah dicapai dalam setiap dialog,” katanya.

“Itu yang merusak. Jika yang bersalah itu kemudian mengakui kesalahannya, saya yakin hubungan akan menjadi baik. Tetapi memang harus dengan satu syarat, semua penjahat perang, siapa saja yang menjadi penjahat perang dari pihak mana pun, harus diadili,” tegasnya.

Ia menyambut baik keputusan pemerintah menarik pasukan TNI dari Timtim. Bagi Matan Ruak, penarikan itu ditambah dengan kehadiran pasukan multinasional PBB (INTERFET), membuat kondisi Timtim menjadi lebih terkendali. Hal itu, lanjutnya, juga mengurangi kegiatan milisi yang memungkinkan INTERFET bertindak sesuai kewenangannya.

Ia mengakui, secara umum kondisi Timtim membaik. Namun, masih ada beberapa daerah yang tetap rawan, yaitu sekitar Qom (Los Palos), Betano dan Same (Manufahi), serta beberapa tempat di Dili, seperti kawasan Hera di Dili timur.

Dan, kekhawatiran saya tentang Romo Ageng ternyata memang beralasan. Sehari selepas mengantar saya ke kantor ICRC, malam harinya pastoran Taibesi didatangi empat orang tak dikenal. “Tapi mereka belum berhasil melakukan apa-apa, langsung ditangkap tentara INTERFET” kata Romo Ageng. Syukurlah, Romo selamat.

Terus 'Salah Lirik' dan Kontak Tembak

Selama di Jakarta, hampir tiap hari saya mendengar berita tentang 'perselisihan' TNI-INTERFET. Gesekan pertama yang nyaris membawa ke kontak tembak terjadi Senin (4/10/99) malam, sehari menjelang peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia, 5 Oktober 1999. Malam itu, menggunakan kendaraan lapis baja APC (Armored Personnel Carrier), pasukan INTERFET memaksa masuk kompleks ITFET.

Mereka menabrak barikade pos yang dijaga prajurit Yonif Linud 700. Dengan alasan mengejar milisi, mereka terus bergerak hingga menerobos kawasan yang dijaga oleh Brimob. Walau begitu, tak terjadi kontak tembak. Malam itu, para prajurit ITFET bisa menahan diri dengan baik. Menurut Pak Suryo, Komandan INTERFET Peter Cosgrove sangat malu dengan insiden tersebut. Karena itu, keesokan harinya, ia mengembalikan satuan 'teledor' itu ke Australia.

Kejadian 'salah lirik' tak berhenti sampai di sini. Seiring dengan bergulirnya hari, peristiwa semacam itu terus terjadi, bahkan semakin besar. Puncaknya terjadi di perbatasan, desa Mota'ain, Kecamatan Tasifeto Timur, Minggu (10/10/99). Di tempat ini TNI benar-benar bentrok dengan INTERFET. Akibatnya, anggota pasukan Brimob, Prada Ari Sudiby, gugur dengan tiga anggota lain terluka, yaitu Sertu Sudarto, Sertu Agus Susanto, dan seorang warga sipil Alcino Barros.

Tentu muncul cerita berbagai versi tentang kejadian tersebut. Kantor berita Antara menyebutkan, ketiga anggota Brimob asli Jawa Timur yang mendapat tugas BKO (Bawah Komando Operasional) Polres Belu itu sedang berjaga di Pos Perbatasan Mota'ain. Sedang Alcino tengah mengambil kayu untuk membangun rumah darurat di pengungsian perbatasan.

Tentang asal muasal kejadian itu, mengutip dua orang saksi mata, Amandus Simanjuntak (50) dan Lukas Moruk (80), Antara memberitakan, sekitar 120 personel INTERFET menembus sekitar 200 meter ke dalam wilayah NTT dari batas alam yaitu aliran sungai Mota'ain. Mereka kemudian menyerang pos tersebut.

Masih versi Antara, pasukan INTERFET menggunakan lima panser melewati jembatan Mota'ain, lalu berhenti beriringan di jalan itu sambil menurunkan pasukan. Pada saat menurunkan pasukan, moncong senjata mereka diarahkan ke pos perbatasan Mota'ain yang dijaga Brimob.

Pasukan INTERFET kemudian menyebar ke berbagai tempat di sekitar pos, hingga ke dekat pantai sambil terus menembak selama 15 menit tanpa henti. Tepatnya, dari pukul 12.30 hingga 12.45 Wita. Antara mengatakan, pada saat itu tidak ada tembakan balasan dari petugas Brimob yang menjaga pos tersebut. Sementara tenda milik aparat dan sejumlah tembok berlubang akibat tembakan pasukan INTERFET.

Sedang menurut kantor berita Reuters dan AFP, insiden terjadi ketika mobil militer INTERFET yang sedang berkonvoi di perbatasan, ditembaki oleh kelompok milisi. Dikatakan, seorang milisi tewas dan dua lain terluka. Di pihak INTERFET, dua tentara Australia luka serius. Pihak yang tewas menurut Reuter dan AFP adalah milisi. Namun, menurut Antara, korban tewas adalah anggota Brimob.

Mengutip Mayor Mark Kelly, Reuters mengatakan, setelah serangan dari kelompok milisi, INTERFET mengerahkan lebih banyak lagi tentara di perbatasan menggunakan Helikopter. Penambahan kekuatan itu, kata Reuters, membuat kelompok milisi mundur hingga melewati perbatasan Timor Barat.

Nah, mana yang benar? Entahlah. Yang pasti, dalam kasus seperti ini saya selalu ingat kata bijak Pak Suryo Prabowo bahwa “kebenaran itu tidak pernah ada, yang ada adalah versi.” Ketika kami membahas masalah ini, sebagai Wakil Komandan ITFET, Pak Suryo pun punya versi sendiri.

Kejadian itu diawali dengan informasi tentang dugaan adanya milisi yang menahan pengungsi di daerah permukiman di belakang pos pemeriksaan TNI/Polri di desa Mota'ain. Informasi ini diterima unsur INTERFET yang berkedudukan di desa Batugade, Minggu (10/10). Di dalam peta yang digunakan INTERFET, desa Mota'ain digambarkan berada di wilayah Timtim, atau sekitar 600 kilometer dari perbatasan ke arah Timtim.

Karena itu, INTERFET berusaha mengkonfirmasi masalah tersebut. Mereka lalu mengadakan patroli berjalan kaki terbuka dengan formasi banjar terputus. Persoalannya, mereka tidak menemukan desa Mota'ain seperti yang tergambar dalam peta, meskipun sebenarnya, mereka sudah sampai di desa tersebut.

Kenyataannya mereka tidak menemukan penduduk di desa tersebut melainkan hanya dua rumah. Kesalahpahaman pun muncul ketika INTERFET memutuskan melanjutkan patroli ke arah Barat. Mereka memang berhenti ketika melihat portal. Namun, saat melihat portal, INTERFET sudah melesak sekitar 297 meter dari jembatan dan tugu yang bertuliskan “Selamat Datang. Anda memasuki Desa Silawan, NTT”. Karena, perbatasan di wilayah barat tepatnya berada di jembatan sungai Malimeak.

“Padahal mereka itu dilengkapi GPS (Global Positioning System). Mestinya bisa mencek bener *nggak* peta itu. Kemudian dia mengatakan sering mengalami hal seperti itu, seharusnya dia ganti dong petanya. Salah *kok* dipakai terus,” ujar Pak Suryo.

Selain itu, INTERFET berharap menemukan tanda yang jelas-jelas membedakan batas wilayah teritorial dua negara berdaulat. Tentu saja hal itu mustahil karena Indonesia dan Timtim baru saja berpisah. Bahkan Timtim belum menjadi negara berdaulat. Karena itu, perbatasan yang ditemui INTERFET masih berupa perbatasan antarwilayah dan antarprovinsi.

Diperkirakan, informasi bahwa sudah tidak ada lagi TNI di Timtim kecuali di Dili tidak sampai ke bawah. Begitu juga tidak ada lagi milisi di Timtim. Ketika menerima informasi tentang adanya milisi yang menghalangi warga Timtim di Mota'ain, pasukan INTERFET tidak berkoordinasi dengan JSCG melainkan menindaklanjuti sendiri informasi tersebut.

Kenyatannya, INTERFET tidak pernah mengkomunikasikan atau mengkonfirmasi persoalan-persoalan seperti itu dalam forum JSCG atau kepada Satuan Tugas Indonesia (ITFET). Padahal melalui forum JSCG, mereka bertemu setiap hari pada pukul 14.00.

Karena itu ketika melihat kehadiran pasukan INTERFET, masyarakat setempat pun lari berhamburan. Sebagian melaporkan kejadian itu kepada TNI dan Polri yang berjaga di desa tersebut. Ketika menerima laporan itu sekitar pukul 12.15 Wita, Letda (Inf) Erwin Egy, Komandan Peleton II Kompi Senapan A Batalyon Infanteri 743 yang sejak Sabtu (9/10/99) diperbantukan untuk memperkuat perbatasan Mota'ain, segera berjalan ke arah timur.

Ia mendatangi pasukan INTERFET yang dianggap sudah melewati perbatasan, untuk menanyakan maksud dan tujuan mereka. Namun, sekitar pukul 12.20, tiba-tiba terdengar tembakan yang dilepaskan dari belakang posisi Letda Erwin. Menurut Pak Suryo Prabowo, kejadian itu lalu diikuti rentetan tembakan ke udara yang dilakukan oleh orang yang sama dan dari tempat yang sama pula.

Hampir pada waktu yang bersamaan, prajurit INTERFET yang akan bertemu Letda Erwin juga ditembaki. Kali ini tembakan berasal dari arah pantai (Utara). Karena itu, INTERFET merespons kejadian itu dengan mengeluarkan 15 kali tembakan dalam tiga rentetan. Terjadilah kontak tembak di antara kedua pasukan tersebut.

Letda Erwin tidak tinggal diam. Ia berusaha menghentikan tembakan dengan mendatangi arah tembakan yang berasal dari prajurit TNI/Brimob di pantai. Tembakan-

menembak memang berhenti. Tetapi hanya sebentar. Tanpa diketahui pasti sebabnya, tiba-tiba terjadi lagi kontak tembak selama sekitar delapan menit.

Dalam hal ini, Indonesia mengakui adanya kelemahan dalam koordinasi. Terutama dalam prosedur tetap (protap) dan kesatuan komando yang tidak jelas. Kesatuan komando diperlukan karena di perbatasan itu ada empat satuan yang berada di satu titik, yaitu polisi militer, kepolisian sektor (polsek), Brigade Mobil dari Jatim, dan satu peleton dari Batalyon Infanteri (Yonif) 743.

Tak urung kejadian ini mengundang protes keras dari Indonesia. Protes tidak hanya datang dari kalangan resmi pemerintah, namun dari segala penjuru masyarakat. Tetapi, seperti bisa diduga, versi INTERFET, mereka tetap mengatakan tidak bersalah.

"We are not wrong. We have accurate map and we also use the global positioning system (GPS). We knew that we were several meters inside East Timor ground," kata Cosgrove dalam wawancara dengan televisi ABC di Dili, Timtim. *"I have already protested strongly to the local Indonesian military leader because of this allegations, that our unit entered East Nusa Tenggara,"* lanjutnya.

Sikap seperti inilah yang mengundang protes lebih keras dari Indonesia. Menteri Luar Negeri (Menlu) Ali Alatas yang selalu santun dan hati-hati dalam berkata-kata pun kali ini mengeluarkan ungkapan yang cukup keras. "Kita tidak akan tinggal diam. Walaupun masih diselidiki apa yang sebenarnya terjadi, namun patut sangat disesalkan hal seperti ini bisa terjadi," kata Pak Alatas di Istana Merdeka, Senin (11/10).

"Andaikata pun hal ini terjadi karena *accident*, karena ada perbedaan dalam peta, itu pun saya kira agak aneh. Sebab, INTERFET yang dilengkapi dengan perlengkapan yang konon begitu canggih, *kok* bisa membuat kekeliruan semacam itu," lanjutnya.

Komentar cukup keras juga disampaikan Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sri Bintang Pamungkas. "TNI jangan hanya berani melawan sipil dan atau bangsa sendiri. Buktikan TNI sebagai alat negara," ujarinya. (*Kompas*, 12/10/99). Ia menyerukan agar pemerintah Indonesia segera menyampaikan protes kepada PBB yang memprakarsai hadirnya INTERFET. Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kehadiran INTERFET di Timtim. Dalam hal ini, Sri Bintang meragukan kemampuan Peter Cosgrove dalam memimpin INTERFET.

Luapan protes tak hanya melalui media massa, tetapi juga lewat telepon ke harian *Kompas*. Sejak hari Minggu malam, *Kompas* menerima belasan telepon dan faksimili yang bernada tidak dapat menerima sikap INTERFET, jika mereka benar-benar menyerbu pos

Indonesia dan menewaskan salah satu aparatnya. “Protes tidak cukup. Kalau perlu serbu saja mereka,” kata seorang penelepon yang mengaku bernama Lalu dan pernah bertugas di Baucau, Timtim, tahun 1986-1988.

Gelombang protes tidak hanya di Jakarta. Sesuai laporan *Kompas*, ratusan Pemuda Panca Marga (PPM) mendatangi gedung DPRD dan menggelar aksi mengutuk INTERFET. Mereka mendesak anggota MPR yang sedang bersidang untuk tidak mudah melepaskan Timtim sebagai provinsi ke-27. “Bila perlu adakan referendum bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Djatmiko Waloejono, Ketua Markas Daerah PPM Jateng.

Kejadian ini juga mengusik Mayjen TNI (Purn) Muchlis Anwar dari Yogyakarta. Ia tergerak mengirimkan faksimili yang menyesalkan insiden tersebut. “TNI, minimal sudah harus menempatkan satuan setingkat batalyon yang diperkuat minimal dengan meriam Artileri Medan dan atau senjata antitank di perbatasan NTT-Timtim,” katanya.

Menurut dia, menempatkan unsur Kepolisian RI/Brimob di daerah perbatasan tidak sesuai dengan ancaman yang dihadapi. Ia mengetuk hati nurani para perwira pimpinan TNI, bahwa sekarang ini adalah saat yang tepat untuk kembali ke jati diri TNI yang sebenarnya dan segera membentuk TNI yang profesional. Ia mengimbau TNI segera menjauhkan diri dari keterlibatan menghadapi mahasiswa atau massa dan menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada jajaran Polri.

Sedang menurut Kepala Pusat Penerangan Hankam/TNI Mayjen TNI Sudrajat, insiden Mota'ain adalah akibat sikap berlebihan INTERFET dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, Indonesia telah menyampaikan protes diplomatik ke PBB dan Australia melalui jalur Departemen Luar Negeri.

Di saat yang sama, Kedutaan Besar Australia di Jakarta melayangkan nota protes atas pemberitaan Kantor Berita Antara. Australia menilai Antara salah dalam merepresentasi secara terus menerus melalui pemberitaan mereka tentang aktivitas dan kebijakan Australia di Timtim.

Hal itu termasuk pemberitaan yang menyebutkan bahwa ada seorang tentara Australia yang mencuri uang dan kalung emas seorang warga Timtim. “Itu sama sekali tidak benar,” demikian siaran pers Kedubes Australia yang dikirim ke Harian *Kompas*, Senin petang, melalui faksimili.

Pada tahap ini hubungan Indonesia dengan Australia begitu buruk. Menlu Ali Alatas bahkan mengatakan, hubungan kedua negara saat ini mencapai titik terendah, akibat dari tingkah laku sebagian masyarakat dan pejabat Australia yang dinilai berlebihan.

Kembali ke Timtim

Petang itu, saya meninggalkan kantor dengan rasa lelah luar biasa. Memantau perkembangan Timtim dari Jakarta, ternyata lebih melelahkan dan menjengkelkan. Sebagai wartawan lapangan, setiap hari saya hanya bisa menulis berita dari sumber pertelepon atau paling banter menggunakan laporan media asing. Padahal, kondisi semakin genting seiring dengan memburuknya hubungan Indonesia-Australia.

Dengan sedikit gontai saya memasuki kamar kos yang semakin hari terasa semakin sempit. Tiba-tiba telepon genggam saya berdering. Pak Suryo Prabowo menghubungi dari Dili. Meski hampir tiap hari kami berkomunikasi sehubungan dengan perkembangan pemberitaan, namun, petang itu nada suara Pak Suryo sedikit berbeda. Petang itu, Pak Suryo meminta saya kembali ke Dili.

“Ini Cosgrove yang minta,” katanya.

“Lho, bukannya saya sudah ditolak untuk bergabung dengan INTERFET setelah penyerahan Kodal?”

“Iya, tetapi barangkali sekarang INTERFET pusing. Dan, dari sekian wartawan Indonesia, yang diingat Cosgrove ternyata hanya nama Rien Kuntari yang kecil-kecil itu.”

“O.. Ostrali akhirnya tahu juga ya rasanya dibombardir dengan berita, seperti ketika mereka memborbardir kita dulu dalam kasus Timtim..”

“Apa syaratnya kalau kami minta kamu kembali ke Dili?”

“Satu saja, Pak. Saya tidak minta syarat hidup.”

“Lalu?”

“Begini, Pak.. kalau memang di sana masih ada pasukan Aitarak, saya cuma minta satu, kalau Aitarak marah karena saya dipandang pro-kemerdekaan, tolong sampaikan kepada mereka agar hanya membunuh saya saja, jangan yang lain-lain seperti dalam peristiwa Agus Mulyawan di Qom. Yah.. maksudnya toh Aitarak marahnya sama saya, jadi ya saya saja yang dibunuh, jangan Romo Ageng, Romo Tan, atau siapa saja yang kebetulan sedang bersama saya.. Itu saja *kok* syaratnya, Pak.”

“Baiklah, yang penting kamu kembali ke Dili.”

“Caranya? Memang INTERFET benar-benar mau menerima wartawan Indonesia? Soalnya kalau seperti kemarin, aduh, Pak, saya benar-benar terpasung..”

“Ya, ini justru Cosgrove yang mengundang. Karena itu, Rien nanti harus mengurus akreditasi ke markas INTERFET di Darwin.”

“Baik, Pak.”

Ketika pembicaraan ini esok paginya saya sampaikan kepada Mas August Parengkuan, atasan saya, justru saya langsung disuruh berangkat. Kali ini Mas August meminta fotografer Eddy Hasby, ikut serta ke Timtim. Bisa dipastikan, keikutsertaan Eddy akan membuat dokumentasi foto pelepasan Timtim menjadi sangat lengkap dan indah.

Tanpa banyak membuang waktu, kami langsung berangkat ke Darwin. Namun, tanpa kami duga urusan akreditasi ini ternyata memerlukan waktu lebih dari dua hari. Sehingga kami terpaksa tinggal di Darwin selama tiga hari. Meski sudah ada informasi bahwa kami diundang Mayjen Peter Cosgrove untuk mengikuti operasi INTERFET di Timtim, masih saja urusan itu berbelit-belit dan lama.

“Ternyata lelet juga ya, Mbak,” komentar Eddy.

“Iya, *nib*, baru sekarang saya ketemu bule lelet.”

Sambil menunggu proses akreditasi, kami menghabiskan waktu dengan ‘menjelajah’ Darwin. Sesekali kami berbelanja kebutuhan bahan pokok untuk kami bawa ke Timtim, sambil mencari beberapa hal yang bisa kami bawa untuk oleh-oleh teman-teman di Dili.

“Kalian mau ke mana?” sapa ramah seorang ibu ketika melihat kami membawa barang-barang itu kembali ke penginapan.

“*To East Timor..*”

“.., berani sekali kalian. Semoga Tuhan memberkati,” ujar Ibu itu sambil terus memandangi kami seolah tidak percaya. Mungkin dia mengira kami orang Timtim. Saya sendiri memang terlahir mirip warga Timtim. Sedang Eddy, dengan rambut gondrong yang dikuncir ke belakang, menjadi mirip orang Portugal.

“*Which part of East Timor are you from?*” akhirnya keluar juga pertanyaan itu..

“Oh, kami bukan orang Timtim..”

“... *where are you from?*”

“*We’re from Indonesia and we’re Indones...*”

Sebelum kami menyelesaikan kalimat itu, si Ibu yang waktu itu didampingi suaminya langsung berbalik dan pergi meninggalkan kami. Kami berdua pun bengong. Kejadian seperti itu kerap kami alami selama tiga hari di Darwin.

Namun, ada pula yang menguntungkan. Usai sesi pemotretan untuk ID card di markas INTERFET, kami pun pulang ke penginapan berjalan kaki. Kami menemukan sebuah toko barang-barang keperluan kemah dan sebagainya. Mampirilah kami ke tempat itu.

“So, kalian mau ke Timor Timur?” tanya si penjaga kasir sambil menghitung belanjaan kami. Ia seorang pria tinggi kekar, berambut warna perak, dan berkumis. Seperti umumnya lelaki Darwin, kala itu ia mengenakan kemeja musim panas dengan kancing yang dibiarkan sebagian terbuka serta bercelana pendek. Dalam hati, saya menduga ia adalah si pemilik toko.

“Iya, *why?*”

“Dalam rangka apa?”

“Tugas. *We're journalists.*”

Entah apa yang ada di benak orang itu ketika dengan seksama mengamati kami. Khususnya saya yang memang berpenampilan persis orang Timtim. Tak disangka ia memberi potongan harga 50 persen.

Lunturnya Simpati kepada Australia

Hari itu, Kamis, 14 Oktober 1999, pagi-pagi kami bergegas ke pangkalan udara Australia, berbekal segores tulisan di buku catatan saya yang berbunyi, “*Meet Carmel at the front gate of the RAAF Base, tomorrow at D545*”. Tidak seperti orang Australia pada umumnya, Bu Carmel ternyata sangat ramah. “*Welcome*, maaf pakaian saya kelihatan dekil sekali ya, tetapi beginilah seragam lapangan kami,” ujarnya sambil tersenyum cerah.

Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan seperti umumnya di pangkalan militer, siang itu, akhirnya kami berangkat ke Dili. Kami menggunakan pesawat hercules INTERFET yang kebetulan milik regu Perancis. Ada beberapa wartawan bule yang terbang bersama kami. Darwin-Dili memakan waktu sekitar dua jam terbang.

Sesampai Dili, kami memang mendapat perlakuan luar biasa baik. Jauh berbeda dengan sebelumnya yang dengan tegas ditolak oleh INTERFET bahkan hanya untuk berkunjung ke Turismo. Masih jelas dalam ingatan betapa mereka langsung menyiapkan senapan di tangannya, begitu kami, wartawan Indonesia, mendekati gerbang Turismo.

Mungkin karena sekarang di jidat kami tertempel tulisan tak terlihat yang berbunyi, “undangan Cosgrove”, sehingga kami diperlakukan dengan sangat baik. Atau mungkin juga kini Australia ‘terjepit’ oleh pemberitaan, sehingga mereka mengundang kami untuk ikut serta dalam operasi INTERFET

Kami dibawa langsung ke Hotel Turismo, markas besar INTERFET. Saat kami tiba, Mayjen Peter Cosgrove sedang mengadakan jumpa pers dengan para wartawan INTERFET di halaman Hotel Turismo. Maklum kondisi waktu itu cukup genting. Kami tiba di Dili dalam kondisi hubungan Indonesia dengan Australia yang begitu buruk.

Tanpa bermaksud berpihak namun di mata saya, memburuknya hubungan kedua negara belakangan ini lebih dipicu oleh sikap Australia, dari wartawan, masyarakat umum, hingga pejabatnya. Banyak hal yang membuat saya jadi berpikiran seperti itu.

Waktu sama-sama tinggal di Makorem, untuk pertama kalinya saya melihat dengan jelas bagaimana cara seorang wartawan Australia mengolah data yang kami dapat dari lapangan dan sumber yang sama. Sungguh saya tidak tahu, sejak kapan kita boleh menyebut kerumunan yang tak lebih dari 10 orang sebagai “massa”?.

Setelah mendapat kepercayaan penuh dari CNRT, saya pun kadang mereka biarkan untuk hadir dalam rapat tertutup. Begitu juga hari itu. CNRT mengadakan pertemuan dengan Menlu Australia Alexander Downer yang sebetulnya tertutup untuk wartawan. Tapi entah mengapa, mereka tidak meminta saya keluar dari ruangan. Akibatnya saya bisa mengikuti dengan seksama setiap detil pembicaraan kedua pihak.

Kunjungan Downer waktu itu dilakukan dalam rangka “mampir” sekembali dari Jakarta. Pada prinsipnya, Downer menggarisbawahi pentingnya Timtim bagi strategi politik Australia. Dikatakan oleh Downer bagaimana pun Australia tidak akan pernah melupakan jasa rakyat Timtim dalam perjuangan bangsa Australia, dan seterusnya.

Pembicaraan dalam pertemuan itu sebenarnya biasa saja di mata saya. Atau setidaknya tidak layak untuk dijadikan *head-line Kompas*. Namun ada satu hal yang menarik perhatian saya. Di akhir pertemuan, tepatnya sebelum meninggalkan ruangan, Downer secara khusus memberi ucapan selamat kepada David Diaz Ximenes yang sejak awal berdiri di samping saya.

“Selamat, Anda pasti memenangkan referendum ini... Jangan khawatir kami berdiri di belakang Anda,” kata Downer tersenyum sambil menjabat erat tangan David. Ada kesungguhan dan optimisme sangat kuat terpancar dari mata Downer waktu itu. Refleks, saya terkejut dengan ucapan tersebut. Saat itu, tak sedetik pun mata saya berkedip atau

beralih dari pandangan kepada Downer. Beruntung, Downer tidak tahu pasti bahwa saya orang Indonesia tulen. Jujur, sejak itu simpati saya kepada Alexander Downer luntur.

Selain itu, selama bertugas di Timtim, entah berapa kali saya mendapat cerita tentang beroperasinya helikopter malam Australia. “Helikopter mata kucing”, begitu istilah yang digunakan teman-teman dari Angkatan Udara yang bertugas di Timtim. Tepatnya, sejak bulan Juli ketika saya bergabung bersama kelompok pro-integrasi di Same, Manufahi, dan menginap di wisma Kablaki, lokasi LO militer Indonesia, cerita seperti itu hampir setiap hari muncul.

Konon menurut mereka, ada beberapa kali mereka mendeteksi kegiatan tersebut, termasuk operasi rahasia ketika menembus wilayah Kisar, Maluku. Tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Bukan karena faktor human incapability, tetapi semata-mata karena minimnya sarana dan prasarana. Sayang mereka tidak mengizinkan saya memberitakan masalah tersebut.

Pada akhirnya seluruh kegiatan rahasia itu terkuak dan menjadi pemberitaan hangat di media massa. Harian *Sydney Morning Herald* (SMH), edisi Senin (11/10/1999) memberitakan, pasukan Komando (SAS/Special Air Services) dan penyelam Angkatan Laut Australia (CDT/Clearance Diving Team) telah melancarkan berbagai operasi rahasia di Timtim sejak April lalu, jauh sebelum PBB secara resmi menugaskan pasukan INTERFET ke Timtim. Dilengkapi dengan sumber lain, berita ini kemudian diturunkan pula oleh Harian *Kompas* pada hari Selasa, 12 Oktober 1999 di halaman 16.

Seperti dikutip *Kompas*, SMH menuturkan, berita itu mereka dapat dengan mengutip berbagai sumber dari kalangan pejabat pertahanan Australia. Namun Kantor Berita AFP mengatakan, berita itu telah dibantah oleh Juru Bicara Militer Australia. Sayang, AFP tidak mengungkap secara gamblang identitas Juru Bicara tersebut.

Masih menurut SMH, di Timtim SAS bertugas mengintai aktivitas pasukan TNI dan milisi. Mereka diterjunkan dari helikopter yang bisa terbang rendah untuk menghindari lacakan radar TNI. Sedang personel CDT diturunkan ke laut dengan kapal selam. Pasukan CDT bertugas mencari ranjau antikapal di perairan sekitar Dili. Mereka sekaligus bertugas mencari lokasi terbaik untuk pendaratan pasukan amfibi. SAS maupun CDT secara teratur dan kontinyu melaporkan hasil kegiatan rahasia mereka hanya kepada sekitar 20 pejabat, termasuk PM John Howard.

TNI mengetahui adanya operasi rahasia tersebut dan berkali-kali mengingatkan bahwa tindakan seperti itu merupakan provokasi. TNI pun secara gamblang mengetahui seluruh

operasi penerjunan tersebut. Mereka pun memantau adanya penyaluran senjata oleh SAS kepada kelompok pro-kemerdekaan.

Menurut SMH, pada bulan Mei dan Juni, TNI mendeteksi setidaknya ada lima kali intervensi helikopter Australia yang melanggar wilayah kedaulatan Indonesia di Timtim. TNI pun mengetahui adanya helikopter Seahawk yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Australia, yaitu RAN (Royal Australian Navy) dan pernah mendarat di dekat Viqueque.

Namun kembali TNI dihadapkan pada kenyataan tak bisa berbuat banyak. Bahkan Panglima TNI Jenderal Wiranto hanya mampu mengeluarkan perintah meningkatkan pengintaian laut dan udara untuk mengantisipasi operasi rahasia tersebut. Masih versi SMH, perintah itu dikeluarkan tanggal 9 Juni 1999.

Pada kesempatan itu, simpati internasional kepada Australia pun perlahan luntur. Hal itu dipicu oleh keputusan Australia menolak membeberkan hasil operasi rahasia mereka. Para tokoh Timtim, termasuk Jose Ramos Horta meminta Australia melaporkan hasil operasi militer rahasia mereka ke PBB. Horta berharap, melalui operasi rahasia itu, Australia bisa membantu mengungkap pelanggaran HAM yang selama ini dituduhkan kepada Indonesia atas Timtim.

Namun, Australia menolak permintaan tersebut. Tentu keputusan ini menyulut amarah berbagai pihak, termasuk AS. Beberapa instansi AS, termasuk dinas intelijen telah menyampaikan protes kepada Duta Besar Australia di Washington DC, Andrew Peacock, karena Australia menolak membagi informasi tersebut. AS pun melakukan hal senada, yaitu mengerahkan dinas Angkatan Laut dan CIA untuk melakukan operasi rahasia di Timtim (*Kompas*, 12/10/1999). Mereka antara lain mengirim kapal selam kelas Los Angeles.

Sesampai di Dili, kami langsung dibawa ke Hotel Turismo dan diantar ke kamar masing-masing. Saya mendapat tempat di lantai dua, sekamar dengan wartawan Australia, Heather Paterson. Heran saya melihat perlengkapan Heather. Di tempat itu, ia menggelar tempat tidur lipat militer, dibungkus dengan tenda anti nyamuk, serta selimut cukup tebal.

Hal itu masih ditambah dengan ransum tentara INTERFET dari sabun, sikat gigi, hingga serbet kertas yang lebih tebal dari tisu sehingga bisa dicuci. Kamar Heather masih lengkap dengan kamar mandi air panas maupun dingin serta ember untuk merendam pakaian. Melihat perlengkapan Heather, saya merasa sedikit minder. Karena saya hanya membawa satu ransel punggung, sebuah kantong tidur (sleeping bag) dan selempar sarung. Tentu dengan beberapa bungkus plastik makanan kecil, serta air minum yang tak seberapa.

Eddy Hasby mendapat kamar di lantai satu, pojok dalam yang sangat tidak nyaman. Namun, keesokan harinya ia pindah ke kamar di pojok timur, setelah bertemu Ramdani Sirait, wartawan Antara yang lebih dulu bergabung di Turismo. Dani tiba di Dili bersama rombongan Satgas P4TT.

Meski tidak menghadap ke pantai, namun Eddy mendapat satu-satunya kamar yang ternyata masih ber-AC. Pendingin yang masih berfungsi dengan baik ini mungkin lepas dari pengamatan INTERFET. Karena itu, dengan tenang dan penuh kerelaan mereka menyerahkan kamar di ujung itu kepada Eddy dan Dani.

Kami yang baru datang langsung diajak city tour, keliling kota Dili yang baru sekitar 10 hari lalu saya tinggalkan. Situasinya memang mulai berbeda. Wilayah Bairopite, Dili barat, mulai hidup. Kami sendiri awalnya memang agak khawatir. Saya hampir tidak berani turun dari mobil INTERFET.

Tetapi, pengawalan INTERFET memang membuat kami, khususnya saya, merasa lebih aman. Ada sedikit penerimaan dari warga Timtim kepada kami yang berkulit sawo matang dan dari Indonesia ini, setelah kami berada dalam kawalan INTERFET. Karena itu, saya pun memberanikan diri turun dari mobil dan mulai membuka komunikasi dengan beberapa di antara mereka. Perlahan tetapi pasti, hubungan dengan masyarakat Timtim kembali membaik.

Salah Lirik a la Mayjen Peter Cosgrove

Jumat (15/10/1999) pagi. Hari itu adalah pagi pertama yang saya lalui bersama seluruh pasukan INTERFET. Memang sangat terasa perbedaan perlakuan yang saya terima antara sebelum dan sesudah diundang INTERFET. Pagi itu, Kapten John Liston, Media Officer INTERFET, sudah menebar senyum dan sapaan ramah.

Dengan penuh keramahan, Kapten Liston menanyakan segala keperluan saya pagi itu. Ia dengan serius meminta saya untuk tidak enggan atau sungkan meminta apa saja yang dibutuhkan. Tidak hanya bahan pemberitaan, tetapi termasuk makanan. Sebagai undangan Cosgrove, keberadaan saya bersama INTERFET memang amat sangat terjamin.

Setelah pertemuan pagi, Liston kemudian mengelompokkan wartawan sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing. Yang pasti, Liston meminta saya kembali ke Turismo pada siang hari, karena akan ditemui Mayjen Peter Cosgrove. Untuk pertama kalinya saya melakukan wawancara yang bukan atas permintaan saya melainkan atas

permintaan narasumber. Tentu saja saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Meski berada di satu wilayah, tetapi bagaimana pun mencari Cosgrove termasuk tidak gampang, mengingat ia adalah Komandan INTERFET.

Selain itu, kali ini wawancara sebenarnya lebih atas kepentingan Australia. Terutama mengingat begitu banyak persoalan yang tersimpan dalam hubungan kedua negara. Dengan kata lain, banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan Cosgrove, terutama menyangkut pemberitaan miring yang menimpa Australia. Khususnya insiden Mota'ain di perbatasan dan tentang operasi intelijen Australia di wilayah kedaulatan Indonesia.

Jumat siang, Liston mengajak saya ke ruang khusus Mayjen Peter Cosgrove di Hotel Turismo. Mayjen Cosgrove sebenarnya sudah sering saya temui di era Darurat Militer. Untuk ukuran militer Australia waktu itu, Mayjen Cosgrove termasuk cukup ramah. Meski tidak berkenan memberi jumpa pers, kenyataannya Cosgrove tetap bersedia menjawab pertanyaan saya setiap kali selesai berbicara dengan Pak Kiki Syahnakri di Makorem.

Barangkali Cosgrove kasihan melihat saya setiap hari berada di tempat itu, bahkan kadang sendirian. Mungkin karena itu juga Cosgrove justru ingat dan mengundang saya ikut operasi INTERFET. Dan mungkin, alasan Pak Suryo pun benar, bahwa saya adalah satu-satunya wartawan Indonesia yang diingat oleh Cosgrove.

Setelah beberapa saat di Timtim, hari itu, kulit Cosgrove tampak lebih merah. Cosgrove menyambut kedatangan saya dengan senyum dan keramahannya yang khas. "Selamat datang, silakan duduk," kata Cosgrove. Ada banyak hal yang diceritakan Cosgrove siang itu. Tak lupa ia pun komplain tentang banyaknya pemberitaan yang menyudutkan Australia.

Cosgrove dengan gamblang menjelaskan kejadian salah lirik yang berbuntut baku tembak di perbatasan Mota'ain. Ia dengan tegas mengatakan, pasukannya tidak akan pernah memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Ditekankan, INTERFET sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak kedaulatan rakyat Indonesia.

Cosgrove dengan sangat khusus juga meminta kepada para pihak yang hingga saat ini (waktu itu) terus memperjuangkan integrasi, tidak perlu khawatir akan tertembak atau ditembak oleh INTERFET. Menurut Cosgrove, dalam hal ini INTERFET lebih ingin berbicara dan menghindari konflik bersenjata di antara kedua pihak.

Tentang baku tembak di perbatasan Mota'ain yang menewaskan dua anggota Brigade Mobil RI itu, kata Cosgrove, kejadian itu diawali dengan adanya informasi warga Timtim di

perbatasan. Karena itu, INTERFET kemudian mencoba menelusuri kebenaran informasi tersebut. Menurut Cosgrove, pasukan INTERFET berhenti ketika melihat portal.

"Ketika mencapai perbatasan, mereka berhenti karena mereka merasa mencapai perbatasan..," ujarnya. Cosgrove melanjutkan, ketika memasuki wilayah itu di depan mereka berdiri seorang perwira TNI. "Saya akui pada waktu itu ia sangat berani. Ia (perwira TNI itu) akan memberi tahu bahwa kami sudah mencapai perbatasan. Seorang pasukan TNI di belakangnya lalu memberi tembakan peringatan ke atas," lanjut Cosgrove.

Menurut Cosgrove, pasukan INTERFET sama sekali tidak membalas tembakan tersebut karena mereka sepenuhnya sadar bahwa tembakan itu adalah tembakan peringatan. Tetapi, lanjutnya, muncul tembakan senapan otomatis dari pasukan lain. Mengutip pasukannya di lapangan, Cosgrove mengidentifikasi para penembak dengan senapan otomatis itu sebagai kelompok milisi.

"Tetapi sekarang pasukan TNI mengatakan pada kami bahwa tembakan itu berasal dari pasukan TNI dan Polri. Tetapi sebenarnya tidaklah penting siapa yang lebih dulu menembak, karena pada akhirnya tembakan itu hanya akan melukasi kedua pasukan dan membahayakan kehidupan mereka. Dalam posisi seperti ini, mereka (pasukan INTERFET) lalu merunduk dan membalas menembak," kata Cosgrove panjang lebar.

Soal Peta

Cosgrove terlihat sangat menyesalkan kejadian tersebut. Apalagi hingga menewaskan seorang Anggota Brimob dan melukai banyak orang. Walau begitu, ia tetap pada prinsip bahwa INTERFET tidak bersalah. Arogansi khas Australia. Pada titik tertentu, sikap ini bisa dipahami. Sesuai dengan peta yang mereka gunakan, dalam pemahaman mereka, wilayah tersebut masih masuk Timtim. Karena itu, mereka pun berjalan terus melesak ke Desa Mota'ain.

Cosgrove bersikukuh bahwa mereka menggunakan peta yang akurat dan dilengkapi dengan peralatan yang super canggih. "Kami menggunakan peta Indonesia yang dikeluarkan tahun 1992. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah perbatasan ini. Kami ingin menekankan pasukan INTERFET tidak akan pernah memasuki wilayah Timor Barat. Kami sangat menjunjung tinggi prinsip kedaulatan. Sekali lagi saya tegaskan, pasukan saya masih di wilayah Timor Timur seperti yang tertera dalam peta Indonesia itu," tegasnya.

Ungkapan tegas Cosgrove ini justru membuat saya sepenuhnya memahami kekesalan Pak Suryo Prabowo maupun Pak Ali Alatas. Mereka berdua kompak mempertanyakan kecanggihan piranti INTERFET dan kemampuan para prajuritnya. INTERFET melengkapi diri dengan *Global Positioning System* atau GPS yang konon sangat akurat. Dengan seluruh kecanggihan peralatan mereka, seharusnya kesalahan seperti ini tidak perlu terjadi.

Tetapi di sinilah masalahnya. INTERFET menggunakan peta Indonesia yang dikeluarkan tahun 1992. Sementara tim TNI AD menggunakan peta keluaran tahun 1946 yang tentu sudah usang dan ketinggalan zaman. Karena itu, kedua pihak kemudian mengadakan pertemuan klarifikasi dalam forum JSCG.

Menurut cerita, sebelum pertemuan, Cosgrove sempat uring-uringan. Pasalnya, sesuai prosedur yang berlaku, pertemuan itu seharusnya dilakukan tanpa ada yang membawa senjata. Karena itu, Cosgrove diminta meninggalkan senjatanya di ruang tamu. Namun, ia malah merasa dilucuti.

Cosgrove lalu protes keras kepada Komandan ITFET Brigjen JD Sitorus. Alasannya, di era darurat militer, ia tidak perlu menanggalkan senjatanya setiap kali menemui Panglima Darurat Militer Mayjen TNI Kiki Syahnakri. Tentu, alasan ini sangat tidak masuk akal. Menurut Pak Kiki, di era darurat militer, justru Cosgrove memberi contoh untuk menanggalkan senjata kepada semua anak buahnya sebelum memasuki ruangan untuk bertemu Panglima PDM Mayjen Kiki Syahnakri.

Cosgrove sadar betul bahwa hal semacam itu adalah prosedur resmi untuk menghormati tuan rumah. “Beliaulah yang selalu memberi contoh, sehingga ketika anak buahnya tidak mau menanggalkan senjata, dia tetap berada di luar ruangan,” kata Pak Kiki. “Malah mungkin sudah di-brief bagaimana berhadapan dengan ‘orang Jawa’, jadi waktu datang tanggal 19 Oktober itu, Cosgrove berusaha menyesuaikan diri sebaik mungkin,” lanjut Pak Kiki.

Rupanya, forum JSCG belum cukup untuk membahas tuntas kasus tersebut. Kedua pihak sepakat membentuk tim investigasi gabungan yang terdiri dari unsur TNI-AD, TNI-AL, Polri, empat perwira INTERFET, dan dua perwira UNAMET yang berasal dari Pakistan dan Uruguay.

Observasi mereka selama sehari-hari di lapangan menghasilkan beberapa kesimpulan yang membuat semuanya menjadi jelas. Pertama, persoalan utama terletak pada soal komunikasi dan koordinasi. Dan sepanjang pengalaman saya, bahasa menjadi kendala

utama. Rata-rata prajurit RI di lapangan tidak bisa berbahsa Inggris, sebaliknya prajurit INTERFET tidak bisa berbahasa Indonesia.

Selain itu, tim gabungan mengakui ada kelemahan dalam koordinasi baik di pihak INTERFET maupun TNI/Polri. Dalam hal ini, INTERFET tidak paham bahwa mereka telah menembus wilayah kedaulatan Indonesia karena tanda atau tugu perbatasan masih berupa batas wilayah atau batas provinsi di satu wilayah kedaulatan negara, bukan tugu atau batas antarnegara.

Kedua, mereka tidak menggunakan peta yang sama. INTERFET atau Indonesia menggunakan peta keluaran tahun 1946 dengan skala 1:100.000. Hebatnya lagi, peta yang digunakan Indonesia adalah buatan Australia dan didasarkan pada data tahun 1936-1938. Sebaliknya, INTERFET menggunakan peta buatan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Indonesia tahun 1993 (meski Cosgrove mengatakan keluaran tahun 1992). Peta dibuat dengan skala 1:25.000 dan telah dimodifikasi menjadi 1:50.000.

Ketiga, INTERFET maupun TNI ternyata menggunakan prosedur buka tembakan yang sangat berbeda. Sayang tim tidak menjelaskan secara rinci letak perbedaan tersebut. Namun, perbedaan ini disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya insiden tersebut. Tim gabungan juga tidak mengungkapkan secara pasti pihak-pihak yang terlibat dalam baku tembak tersebut, termasuk personel yang pertama kali mengeluarkan tembakan pada saat Letda Edwin masih berbicara dengan INTERFET.

Melihat kondisi seperti itu, Pak Suryo kemudian berusaha mencari peta yang sepadan dengan milik INTERFET. Ia akhirnya mendapatkan peta keluaran Bakosurtanal tahun 1998. Memang, itu bukan peta resmi yang digunakan TNI AD, tetapi Pak Suryo merasa perlu menggunakan peta itu untuk mempermudah koordinasi dengan INTERFET. Persoalannya, peta itu baru didapat menjelang akhir Oktober. Artinya, mendekati hari-hari akhir tugas dan keberadaan TNI serta seluruh unsur Indonesia di Timtim. Jadi, bisa dikatakan, cukup telatlah.

Namun, terlepas dari persoalan itu, sepertinya Indonesia memang lemah dalam segala hal. Bahkan dalam persoalan seperti pemetaan wilayah teritorial kedaulatannya sendiri. Sulit menghapus dari ingatan, sejarah atau proses tentang hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari peta Indonesia.

Begitulah Cosgrove. Ada siang ada malam. Sepertinya ia menggunakan sepenuhnya wawancara eksklusif itu untuk mengembalikan citra INTERFET dan Australia yang telah goyah. Cosgrove pun berkali-kali membantah berbagai tuduhan tidak sedap yang diarahkan kepada Australia. Terutama operasi intelijen mereka di wilayah kedaulatan Indonesia, yaitu sebuah helikopter INTERFET yang memasuki wilayah Kisar, Maluku. Cosgrove dengan tegas mengatakan, helikopter itu bukan milik INTERFET. “Kami tidak mengoperasikan helikopter berwarna putih,” tegasnya.

Penjelasan gamblang yang sudah disampaikan kepada *Kompas* itu diulang lagi dalam jumpa pers di Markas INTERFET, Selasa (19/10/1999). Bukan oleh Cosgrove tetapi oleh Kolonel Mark Kelly, juru bicara INTERFET.

Sore itu kami ngumpul di kamar Eddy Hasby dan Ramdani Sirait, bersama beberapa wartawan Asia lain, dari Singapura dan Malaysia. Karena itu, pojok tersebut sering kami sebut sebagai *Asian Corner*. Tiba-tiba Susan dari *Channel 9* nimbrung. Sambil sedikit ngomel ia mendekati kami. “Saya perhatikan kalian *kok* mendapat perhatian begitu luar biasa dari INTERFET, sementara kami diperlakukan berbeda dengan mereka. Minimal kami tak diberi akses yang sama dengan mereka,” ujarnya.

Perempuan mungil nan gempal ini kesal karena merasa tidak diperlakukan sama dengan wartawan bule. Khususnya akses dan informasi. Meski berada di gedung yang sama, tetapi tetap ada perbedaan rasa dalam pelayanan antara wartawan putih dengan kulit berwarna. Saya sendiri tidak tahu persis di sektor apa Susan merasa dibedakan. Tetapi keluhan seperti ini tidak hanya datang dari Susan melainkan juga dari beberapa wartawan Asia lain.

Di sisi lain, Susan melihat bahwa kami, yaitu Eddy dan saya, mendapat perhatian yang luar biasa dari INTERFET. Hal itu terjadi karena setiap saat media officer INTERFET mendatangi kami untuk menanyakan apakah ada kekurangan atau ada yang kami perlukan. Bahkan hampir setiap hari saya selalu disapa dengan pertanyaan yang sama, “apakah kamu baik-baik saja, senangkah kamu di sini, atau jangan pernah sungkan untuk mengatakan pada kami apa pun yang kamu butuhkan.” Dalam hal ini, INTERFET sungguh-sungguh menjaga agar kami tidak kecewa atau kekurangan. Memang tampak sekali kekhawatiran INTERFET jika sampai muncul keluhan dari kami.

“Yah..., kami memang mendapat perhatian luar biasa, karena di jidat kami tertempel tulisan ‘undangan khusus Cosgrove’. Sudahlah tak usah mengeluh.. kita *kan* punya otoritas

untuk melaporkan apa saja lewat media masing-masing.. jadi apapun yang kita rasakan, kita bisa menyinggungnya dalam laporan kita,” jawab saya.

“*Yes, you are right. That’s good idea.*” Dan sejak itu Susan memang tidak pernah lagi berkeluh kesah atau mengungkapkan kekecewaannya pada sikap INTERFET. Sebetulnya masih ada dua wartawan lain dari Indonesia, yaitu Republika dan Jakarta Post, tetapi mereka masuk dalam rombongan pengunjung sementara bersama wartawan ASEAN lain. Karena itu mereka harus mengikuti jadwal cukup padat. Namun, mereka sempat mengeluh, dalam rombongan itu kedua wartawan Indonesia ini tidak pernah disebut pada saat LO INTERFET memperkenalkan rombongan wartawan ASEAN itu kepada narasumber. Entah apa maksudnya.

Ketika saya menoleh ke samping kiri, mata tertumbuk pada salah satu pintu kamar yang menghadap ke pantai. Di situ tertempel sebuah stiker berwarna kuning dengan tulisan yang cukup provokatif, “*where are the militias?*” Kamar itu ditempati Mariana Sanchez, wartawan dari Lima, Peru yang waktu itu bekerja untuk CNN.

“*I don’t know.., saya datang sudah ada tempelan seperti itu,*” kata Mariana. Sosok Amerika Latin Mariana memang banyak menarik perhatian kaum lelaki di sekitar Turismo. Lokasi kamar Mariana yang tak jauh dari “*Asian Corner*” akhirnya membuatnya cukup dekat dengan kami para wartawan Indonesia. “Sekarang saya baru benar-benar mengenal orang Indonesia. *You guys*, ternyata tidak seperti yang saya dengar selama ini. Kalian sangat baik, ramah, dan sangat bisa diajak bicara. Selama ini yang saya dengar tidak seperti itu. Karena itu, saya sempat khawatir juga..., dan Indonesia yang saya kenal juga tidak seperti apa yang saya dengar selama ini,” ujarnya. Senang sekaligus sedih saya mendengar ungkapan Mariana ini. Dalam benak dia sebelumnya, ia akan berhadapan dengan bangsa yang begitu sadis dan negara yang sama sekali tidak aman.

Setelah beberapa saat tinggal di Turismo dan bergaul dengan para wartawan “binaan” Australia atau yang sekarang disebut sebagai “*embedded journalist*”, pandangan mereka tentang Indonesia pun sedikit berubah. Saat mereka membahas tentang TNI, banyak yang terkejut ketika saya berani menjamin bahwa mereka akan diterima dengan sangat baik oleh para tentara Indonesia. Meski tinggal di Turismo namun kontak dengan Pak Suryo Prabowo, Pak Willem Rampagilei, Pak Made Mangku Pastika, dan seluruh jajaran ITFET tetap saya lakukan melalui telepon satelit Inmarsat.

“Lho, kamu tetap berhubungan baik dengan mereka (TNI)? Bukankah yang kami dengar kamu justru punya koneksi sangat kuat dengan pro-kemerdekaan dan Falintil?” kata seorang wartawan Belanda setengah tak percaya.

Pemahaman mereka tentang TNI pun tidak lengkap bahkan sedikit menyesatkan. Pandangan mereka masih terbawa pada peristiwa sebelumnya yang membuat TNI terkesan sebagai lembaga yang sangat tertutup, penuh rahasia, dan penuh kekerasan. Untuk memperkenalkan mereka pada sosok TNI, mulai hari itu secara rutin saya menjadi semacam *Liaison Officer* bagi para wartawan bule yang ingin bertemu dan wawancara dengan TNI.

“Kamu yakin mereka akan menerima kami?” ucap wartawan Belanda itu setengah tak percaya.

“Bukankah mereka sangat tertutup?” lanjutnya.

“Ya memang ada yang begitu, tetapi tidak semuanya seperti itu. Mereka juga manusia biasa seperti kita, jadi kalau kita datang baik-baik pasti mereka juga akan menerima kita dengan baik,” jawab saya.

Hari itu, saya mengajak sekitar lima wartawan asing yang sangat radikal dan anti-TNI. Mereka sungguh terkejut ketika menemukan sosok Kol (Laut) Willem Rampangilei yang begitu ramah, sopan, mau menerima kritikan, dan sangat terbuka. Sontak kesan mereka terhadap tentara pun berubah total. “Ya, ya, *I believe, he's very nice,*” ujar salah satu dari mereka.

Lebih dari itu, nama dan sosok Pak Willem yang putih bersih pun mengundang perhatian khusus. Terutama para wartawan yang berasal dari Belanda. “*Is he Dutch? Because his name is Willem...* Ya, ya, Willem, *he is very nice,*” begitu kata mereka sambil terus memperhatikan ejaan nama Willem di kartu namanya. Sejak itu, kesan angker TNI di kalangan wartawan asing di Turismo sedikit demi sedikit luntur.

Kami mendapat titipan tugas khusus dari Pak Suryo Prabowo untuk bertanya kepada INTERFET, khususnya Cosgrove. Menurut Pak Suryo, INTERFET masih punya “PR” (pekerjaan rumah) mempertanggungjawabkan 24 orang yang mereka kategorikan milisi dan ditangkap dalam pembunuhan di Qom, Los Palos. Hingga hari itu, nasib ke-24 orang tersebut belum diketahui. Saya mencoba meminta izin kepada Cosgrove untuk menjenguk mereka yang katanya ditawan di Pangkalan Udara (Lanud). Namun, izin itu tak jua turun.

Terlepas dari semua itu, INTERFET memang memberi fasilitas cukup bagi kami untuk melihat Timor Timur secara keseluruhan. Hari itu, mereka mengajak Eddy Hasby, saya serta Mariana Sanchez untuk melihat dari dekat operasi mereka di wilayah barat hingga Maliana. Tentu kami secara khusus mengunjungi Balibo dan berhenti sesaat di menara integrasi. Hasil kunjungan itu kemudian saya laporkan di harian *Kompas* sebagai berikut:

Catatan dari Timor Timur (3):

"Maaf, Mulai Hari Ini Kami Tak Terima Rupiah"

MEDIO Oktober-November 1999. Wajah Eusebio Soares menegang. Guratan-guratan ketuaan begitu jelas tergambar di wajah lelaki berusia sekitar 45 tahun itu. Hari itu, ia baru beberapa hari kembali dari persembunyian di hutan. "Kami belum tahu di mana keluarga kami," katanya perlahan. "Di sini kami semua lelaki, para wanita dan anak-anak, di mana, kami belum tahu," lanjutnya, tanpa ekspresi.

Balibo siang itu begitu lengang. Tak ada canda atau tawa ceria anak-anak. Tepat di samping Monumen Integrasi yang sangat bersejarah itu, berhiaskan panser dan tank milik pasukan multinasional INTERFET atau International Forces in East Timor, pasukan khusus yang ditunjuk untuk mengamankan Timtim. Monumen itu sendiri kini tampak buram dan tak terpelihara. Sebagian telah dicat dengan warna hitam.

Kota pencetus integrasi itu, kini hanya dihuni 37 lelaki. Mereka kemudian dibagi dalam tujuh kelompok. Mereka lalu tinggal di tempat-tempat seadanya, bekas rumah atau gubuk yang tak lagi beratap karena telah habis terbakar. Warga setempat sepakat mengangkat Eusebio sebagai Ketua keluarga kecil itu.

Eusebio sendiri menempati rumah yang berada tepat di samping Monumen Integrasi. Rumah itu kelihatan tak terlalu hancur. Dinding dan atapnya sudah rapi. Di tempat itu, ia tinggal bersama kelompoknya. "Kami mencari seng bekas untuk atap, sekadar tidak kena hujan," kata salah satu anggota kelompoknya.

"Setelah ada pasukan INTERFET, saya pulang ke Balibo. Tapi tak ada lagi sanak saudara, tak ada rumah, kami tak punya apa-apa," kata lelaki asli Balibo itu. Dua hari menjelang pengumuman hasil penentuan pendapat, tepatnya tanggal 2 September 1999, Eusebio melarikan diri dan menjadi pengungsi di gunung.

UNGKAPAN senada selalu keluar dari hampir setiap mulut di Timtim. Itu bisa dimengerti. Wajah wilayah itu tak lagi berseri. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat tanggal 4 September 1999, sebagian besar dari wilayah Timtim, seperti kota Dili, Maliana, Suai, dan Los Palos hancur. Bahkan kota Dili, hampir tak berbentuk lagi.

Ada rasa sedih, pilu, dan bercampur malu saat melihat puing-puing yang tersisa di tempat-tempat itu. Dan, ada rasa tak percaya bahwa semua itu dilakukan oleh seorang anak bangsa.

Sudah pasti kejadian ini membawa seluruh penghuni melarikan diri. Sanak-keluarga terpencar, tak diketahui di mana rimbanya. Ayah terpisah dari anak, dan anak-anak terpisah dari ibu atau ayahnya. "Ini ayahnya baru kami tahu, masih di Viqueque," kata Manuel Guterres sambil menunjuk bocah perempuan berumur sekitar tiga tahun, yang ia katakan sebagai sepupunya. Bersama sepupunya itu, Manuel kini tinggal di bekas sebuah rumah di Bekora, Dili timur.

Hal senada juga terjadi di Maliana, meskipun kondisi wilayah itu sedikit lebih baik dibanding Dili. Francisco dos Reis Magno, pengurus wilayah Maliana mengatakan, masih ada sekitar 10.000 warga di wilayah Bobonaro yang belum berani kembali ke kota. "Yang terdaftar resmi di sini baru 3.127 warga," jelasnya waktu itu. "Kami masih menunggu anggota keluarga kami," kata Antonio, suatu sore di Maliana.

Menunggu keluarga sempat menjadi satu-satunya kegiatan warga di Timtim. "Habis mau apa lagi, saya tidak punya pekerjaan. Setiap hari ya begini. Saya keluar, berdiri di depan stadion untuk menunggu barangkali ada keluarga saya yang pulang. Pokoknya yang penting sekarang, keluarga saya kumpul dulu, tidak tersebar-sebar," kata Manuel lagi.

Dan setiap hari, berbondong-bondong warga Timtim terpaksa menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di seluruh pelosok Dili. Sebagian besar dari mereka duduk-duduk atau lalu lalang di sekitar stadion Manucipal, Dili, menunggu kabar barangkali ada saudara yang datang. Seluruh pengungsi yang masuk ke Dili, dipusatkan di stadion tersebut.

Namun, kondisi itu diakui cukup pula mengkhawatirkan. "Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana kalau ke-10.000 orang itu turun semua ke kota. Mereka mau makan apa, kondisi masih seperti ini," kata Fransisco Magno di Bobonaro. Kekhawatiran itu juga bisa dimengerti. Kondisi sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan makanan. Tak ada cara lain kecuali mengandalkan bantuan makanan dari lembaga-lembaga kemanusiaan.

PERSOALANNYA, untuk memperoleh bantuan itupun harus dilalui dengan antrean panjang. Di stadion Dili itu, hampir setiap hari sekitar 6.000 sampai 8.000 orang berdesak-desak antre untuk mendapatkan beras. Kadang beras itu dibarengi dengan selimut, susu, kaos oblong, atau peralatan lain. Bisa dipastikan, kondisi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Timtim yang telah turun ke kota. Tak heran bila tak semuanya kebagian.

"Ya, saya makan seadanya," kata Francisco Magno pasrah. "Pokoknya makan apa saja yang bisa dimakan. Kalau ada mangga, ya mangga, kalau ada ketela ya ketela," sambung Eusebio. "Perut saya sakit, tadi pagi saya sarapan mangga," kata Suzana di Dili. Kondisi itu diperkuat dengan pengamatan *Kompas* di sekitar wilayah Aileu hingga kota Dili.

Hampir di sepanjang jalan itu, sambil bertelanjang dada dan kaki, anak-anak berlarian memberi ucapan kepada siapa saja yang lalu lalang. "Halo mister," kata mereka serempak sambil tertawa lebar, menampakkan giginya yang tak lagi tersikat, rambut yang tak lagi bersentuhan dengan air, serta badan hitam penuh debu. Sebagian besar dari mereka, menggenggam mangga untuk dimakan. Sebagian lagi melambai-lambaikan tangannya yang hitam, kurus, dan kotor.

Dalam sekejap, Timtim telah menjadi arena rawan pangan. Santina, dari kota Dili bercerita, untuk mendapatkan makanan yang agak layak, dalam arti ada daging dan sayur, ia harus mengeluarkan biaya antara Rp 200.000 hingga Rp 300.000. "Itu hanya untuk sekali makan," katanya.

"Wah, kita mau hidup dari mana. Padahal sekarang kami ini hanya ada pengeluaran saja, sama sekali tidak ada pemasukan. Saya tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan, karena sama sekali tidak ada pemasukan. Kalau sekarang misalnya saya bekerja, kerja apa, dan siapa yang mau menggaji," sambungnya. Ia memberi harga Rp 40.000 untuk sekali makan dengan menu sangat sederhana. Dalam arti hanya nasi dan sayur.

Kondisi itu bisa dimengerti, harga-harga di Timtim, khususnya di Dili, sempat melambung tinggi. Di pasar "kaget", pasar seadanya yang tiba-tiba ada, daging paling murah Rp 35.000 per kilo, ayam seekor Rp 40.000, bawang merah Rp 17.000 seikat dan bawang putih Rp 15.000 juga seikat. Padahal, seikat bawang di Dili, mungkin tak lebih dari 25 gram.

Sayur seikat yang dulu sekitar Rp 1.000 naik menjadi sekitar Rp 5.000 hingga Rp 10.000. Pisang seiris, misalnya hari ini masih Rp 7.000, esok hari sudah berubah Rp 10.000, dan gula pasir Rp 10.000 perkilo. Pasta gigi Rp 8.000 untuk tube kecil 25 gram, rokok sebungkus antara Rp 30.000 hingga Rp 40.000. Karena itu, di Dili, hampir tak ada yang bersedia membuka warung makan.

Belum lagi ongkos transportasi yang di luar dugaan. Saking langkanya kendaraan, ongkos bus umum yang dulu Rp 3.000 naik menjadi Rp 25.000. Ojek sekali jalan, rata-rata meminta Rp 20.000 bahkan untuk jarak dekat. Jangan heran, bila sewa motor ojek sehari ditawar Rp 100.000 pun, pemilik belum mau menerima. Mereka umumnya memasok harga Rp 200.000 perhari, dan mobil dengan harga minimal Rp 550.000 per hari untuk dalam kota.

Namun, di tengah kondisi yang tidak menentu itu, tiba-tiba, "Maaf, mulai hari ini kami tidak menerima rupiah." Kalimat itu diucapkan dengan santai dan tanpa beban oleh seorang petugas di Hotel Dili. Sesaat sempat mengejutkan. Namun, realita tak bisa dihindari.

Mengingat banyaknya warga asing di kota itu, wartawan, anggota LSM, petugas INTERFET, hingga Untaet, Hotel Dili kemudian dijadikan semacam tempat pertemuan yang menyediakan beraneka ragam minuman. Hampir bisa dipastikan, seluruhnya didatangkan dari Australia.

Karena itu, harga pun dipatok sesuai standar Australia. Sekaleng bir atau Coca-cola mencapai dua dollar. Bila transaksi dilakukan dengan rupiah, harga itu bisa mencapai Rp 20.000 untuk satu kaleng bir dan Rp 15.000 untuk sekaleng Coca-cola.

Dalam perkembangan selanjutnya, harga-harga itu memang cenderung menurun. Misalnya, bensin yang dulu sempat Rp 10.000 per liter, kini turun menjadi Rp 3.000 per liter. Juga harga rokok, sudah mulai bisa dibeli dengan harga Rp 15.000 per bungkus.

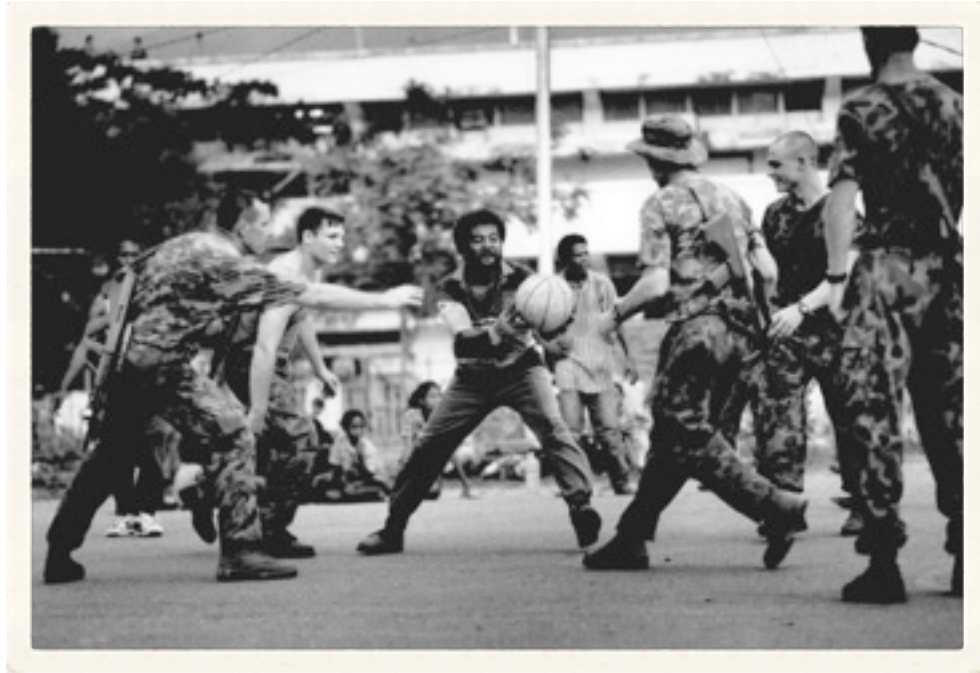
Begitu juga kehidupan di Timtim. Tampak mulai bersemi, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebagian besar masyarakat sudah mulai kembali ke ladang, menanam atau memetik sayur kangkung yang hampir terdapat di setiap sudut kota.

Wajah kota Dili sendiri tak lagi murung dan pucat. Di siang hari, orang mulai sibuk menjajakan dagangan, meski seadanya. Di malam hari, lampu-lampu hias mulai berkelap-kelip. Sebagian memperindah dan menyemarakkan suasana di sepanjang jalan menuju patung Kristus Raja. Namun, di balik gemerlapnya lampu itu, sejuta persoalan siap menghadang Republik Timor Loro Sa'e, negara matahariterbit itu. (Rien Kuntari)

Prajurit TNI vs INTERFET

"*Good day, mate?*" sapaan khas Australia yang diucapkan dengan penekanan pada vocal cord itu hampir setiap saat saya dengar. "*No worries.*" Jawaban seperti ini pun setiap saat pula muncul. Hidup di kalangan tentara INTERFET memang sangat berbeda. Di tempat ini, kesejahteraan tidak hanya terjamin melainkan melimpah ruah.

Tolong dibayangkan, di lokasi yang bisa dikategorikan sebagai medan pertempuran, tiap hari kami masih mendapatkan makanan steak daging yang luar biasa empuk dan dalam porsi sangat besar. Tiap personel di Turismo tidak cukup hanya mendapat satu potong, melainkan bisa tambah jika memang masih diperlukan. Karena masuk dalam kategori besar bagi perut Indonesia, kami lalu berbagi jatah makanan dengan teman wartawan setempat.



*Di sela-sela tugasnya, tentara INTERFET masih sempat bermain bola.
foto: Eddy Hasby*

Selain itu, untuk camilan, tentara INTERFET mampu menghabiskan seplastik daging giling siap santap. Sedang untuk bekal di perjalanan, kami mendapat sekantong Russian Pack yang super lengkap. Tiap paket terdiri dari lima menu dengan variasi dari nasi, *pasta*, hingga cemilan, minuman kesehatan, vitamin harian, hingga kompor parafin.

Untuk operasi INTERFET disediakan paket 98/99. Minimal tersedia dua paket, masing-masing mencakup lima jenis menu yang berbeda, yaitu A, B, C, D, dan E. Dengan begitu, mereka memiliki 10 jenis menu berbeda. ([lihat lampiran](#))

Paket itu sesuai porsi dan tata cara menu Eropa yang diawali dengan sup dan diakhiri dengan hidangan penutup. Untuk ukuran perut Asia, satu paket cukup untuk tiga hari. Dengan begitu, untuk satu orang kombatan, misalnya, personel INTERFET mendapatkan Menu A terdiri dari *beef minced with spaghetti; beef & vegetables; jam, peach; soya sauce; rice freeze dried; peaches; biscuits jam sandwich; beverage base pvd orange; dan beverage pvd lime*. Menu A tentu berbeda dengan sembilan menu lain.

Tiap menu dilengkapi dengan permen coklat, keju, *tabasco*, biskuit renyah, permen biasa, garam, gula, kopi instan, coklat, sari sayuran, merica, susu kental manis, minuman coklat instan, saus sambal, permen karet, teh celup, dan segala keperluan lain.

Perbekalan yang super komplet itu masih ditambah dengan perhatian yang lebih dari cukup di sisi kemanusiaan. Dalam arti, mereka tidak diperlakukan hanya sebagai prajurit

atau 'mesin' yang harus menjalankan perintah, tetapi tetap dianggap sebagai manusia. Dengan kata lain, mereka diperlakukan dengan sangat manusiawi.

Salah satu contoh, INTERFET sangat memperhatikan perkembangan mental dan kondisi psikologis para prajuritnya. Karena itu, INTERFET memberi fasilitas penuh untuk berbagai hal yang berhubungan langsung dengan kondisi mental dan psikologis pasukan. Misalnya, INTERFET tidak pernah memutuskan hubungan para prajurit yang sedang bertugas di Timtim dengan keluarga besar mereka di Australia. Tidak peduli, prajurit tersebut sedang bertugas di tempat yang sangat terpencil dan pelosok sekalipun.

INTERFET memiliki tenaga khusus guna mengurus persoalan tersebut. Secara berkala mereka membawa surat dari prajurit di Timtim ke Australia dan sebaliknya mereka pun membawa kiriman dari keluarga prajurit di Australia ke Timtim. Contoh yang saya lihat langsung adalah sewaktu rekan sekamar saya Heather Paterson mendapat kiriman dari keluarga besarnya di Australia.

Suatu saat saya kaget karena tiba-tiba kamar kami diketuk oleh tentara INTERFET. Ternyata ia mencari Heather. "Ada kiriman untuk Miss Paterson," kata tentara tersebut. Karena itu saya memanggil Heather yang masih ngetik di balkon.

Betapa girang wajah Heather ketika menerima paket dalam kotak plastik cukup besar yang berisi penuh bahan makanan. Ketika saya bertanya bagaimana dia dapat menerima paket tersebut, dengan ringan Heather bilang, "Ini semua dititipkan INTERFET, mereka memang punya fasilitas seperti ini." Tidak hanya surat, mereka pun memiliki fasilitas komunikasi yang bisa dikatakan cukup bebas.

Itu baru soal makanan yang tentu masih dalam kategori ringan di mata Australia. Di sektor kesejahteraan dan fasilitas, jelas tentara INTERFET berada di atas angin. Selama bertugas di Timtim, semua anggota pasukan Australia, termasuk Polisi dan Staf Intelijen mendapat fasilitas dan tunjangan yang cukup menggiurkan. Yaitu:

- Gaji yang tetap berjalan dan bebas pajak. Rata-rata gaji tamtama dan bintara sekitar 1.080 dollar Australia per dua minggu.
- tunjangan bebas pajak yang berkaitan dengan penggelaran dan operasi khusus sebesar 125 dollar Australia perhari
- tunjangan penegakan perdamaian Timtim 40 dollar Australia perhari
- bantuan pinjaman dana pemilikan rumah dengan lima tahun periode bebas pajak

- dana pensiun penuh sebagai anggota pasukan perdamaian sesuai dengan Veteran's Entitlements Act and the Military Compensation Scheme
- tambahan hari libur selama satu setengah hari perbulan
- cuti sebelum keberangkatan atau waktu berkumpul keluarga
- fasilitas pembicaraan jarak jauh dengan para prajurit INTERFET bagi keluarga atau pasangan

Tanpa fasilitas dan tunjangan, jika dihitung secara kasar, tiap personel INTERFET mendapatkan imbalan uang tunai rata-rata sebesar 243 dollar Australia perhari. Angka itu setara dengan Rp 1.081.087,50, mengingat kurs dollar Australia terhadap Rupiah pada bulan Juni 1999 adalah Rp 4.448,92. Paket itu memang dirancang sekomprensif mungkin untuk mendukung personel Pasukan Pertahanan Australia ketika menjalankan tugas berat dan sangat penting atau istilah mereka while performing an extremely demanding and significant task.

Karena itu, Australia mengakui, fasilitas dan tunjangan mereka menjadi lebih besar dari penggelaran pasukan atau operasi perdamaian lain. Seluruh fasilitas dan tunjangan itu sesuai penjelasan Menteri Pertahanan Australia John Moore yang disampaikan tanggal 19 September 1999. Moore menjelaskan hal itu menanggapi tuntutan keluarga serdadu yang ditinggalkan.

Kondisi prajurit INTERFET dengan TNI tentu bagaikan bumi dengan langit. Fasilitas yang diterima prajurit TNI tidak ada sepersepuluh dari yang diterima INTERFET. Jika tentara INTERFET mendapat imbalan sekitar Rp 1.081.087,50 atau 243 dollar Australia perhari, pada periode sebelum jajak pendapat, seorang prajurit TNI yang ditempatkan di Timtim mendapatkan dana harian Rp 17.500 atau setara dengan 3,93 dollar Australia. Jumlah itu terdiri dari uang lauk pauk sebesar Rp 12.500 dan Rp 5.000 untuk tunjangan pisah keluarga.

Bagi satuan organik, mereka mendapatkan tunjangan kemahalan sebesar 90 persen dari gaji pokok. Gaji pokok prajurit berpangkat terendah yaitu Prada atau Prajurit Dua, dengan masa kerja nol tahun waktu itu sebesar Rp 600.000. Tunjangan kemahalan ini diberikan mengingat keluarga harus ikut serta dan biaya hidup di Timtim jauh lebih mahal.

Sedang prajurit yang bertugas mengamankan perbatasan, mendapat tambahan uang saku Rp 4.000 perbulan. Tentu angka ini sangat tidak berarti karena harga sebungkus rokok

“Gudang Garam” adalah Rp 2.000. Dengan begitu, untuk menjaga perbatasan, mereka hanya mendapat tambahan uang saku senilai dua bungkus rokok kretek. Itu pun mengisapnya harus perlahan-lahan karena jatah satu bulan.

Di era darurat militer, imbalan terhadap prajurit TNI meningkat menjadi Rp 30.000 per hari. Namun tetap saja angka itu tidak berarti. Harga sebungkus rokok di era itu mencapai Rp 40.000. Ironisnya, meski telah dinaikkan, imbalan personel TNI perbulan masih jauh lebih kecil dibanding imbalan tentara INTERFET perhari.

Silakan menghitung sendiri, karena saya tidak sampai hati melakukannya. Satu catatan, nilai tukar rupiah untuk dollar AS pada bulan Juni 1999 adalah Rp 6.726 untuk tiap satu dollar AS. Sedang pada bulan September, nilai tukar rupiah menjadi Rp 8.205 untuk tiap satu dollar AS.

Itu baru dari segi keuangan. Di sektor fasilitas lain pun prajurit TNI begitu minim. Jika INTERFET mendapat paket makanan yang sangat memenuhi standar gizi dan bervariasi hingga 10 menu, sebaliknya prajurit TNI hanya mendapat jatah beras 18 kilogram. Boro-boro dipikirkan soal gizi, lauk-pauk pun sepenuhnya tergantung pada kreativitas diri sendiri.

Memang ada konservan atau bahan makanan siap olah, dan T2 berupa nasi goreng kaleng padat kalori. Persoalannya, T2 yang sebelum dimakan harus direbus dengan panas 100 derajat Celcius itu hanya disediakan untuk medan pertempuran bergerak yang membuat prajurit tidak sempat memasak sendiri.

Pak Suryo mengatakan, hanya itu yang diterima seorang prajurit TNI. Ia dengan cepat mengingatkan “*ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country,*” ketika saya bertanya lebih jauh tentang fasilitas seperti asuransi, kemudahan pinjaman rumah, jaminan hari tua, dan sebagainya. Ungkapan itu disampaikan karena semua fasilitas itu tidak pernah ada dan tidak pernah menjadi hak prajurit. “Wis ah diskusinya, nanti saya *nggak mentolo* (tega) mrintah prajurit saya,” lanjut Pak Suryo Prabowo.

Yah, pada prinsipnya memang harus seperti itu. Berbuatlah untuk negara jangan terus berharap negara berbuat untuk kita. Tetapi tidak bolehkah kita mempertanyakan apa yang diberikan negara setelah kita menyerahkan hidup dan mempertaruhkan nyawa untuk negara? Hmmm..., entahlah.

Pikiran saya justru melayang jauh ke Rwanda. Sebuah negeri kecil di Afrika tengah yang di tahun 1994 dilanda perang saudara. Kondisi prajurit TNI hanya beda segaris tipis dengan pasukan RPF atau Rwandese Patriotic Front, pimpinan Jenderal Paul Kagame.

Fasilitas yang mereka miliki nyaris sama dengan TNI. Terutama pada sektor makanan dan piranti yang seadanya. Walau begitu RPF menang.

Segi positif dari kondisi TNI adalah, entah bagaimana caranya, prajurit TNI terlihat lebih segar, sehat, langsing tetapi berotot, tidak berlemak, dan lebih gesit. Penampilan mereka setara dengan pasukan Gurkha (Inggris) atau serdadu Amerika Serikat yang jelas tampilan fisiknya begitu terjaga. Tentu penampilan ini jauh berbeda dengan tentara Australia yang rata-rata tebal dan gembur, sehingga seperti sulit bergerak.



*Pasukan TNI "menonton" tentara INTERFET yang sedang bercanda di depan markasnya.
foto: Eddy Hasby*

Bagaimana pun pemahaman ini membuat saya benar-benar mafhum akan ungkapan atau banyol yang sering terdengar di Timtim.

“Oh.. di sini sudah tak ada lagi monyet. Monyet sudah habis.”

“Lho, kemana? Sebegitu dahsyatkah pertempuran di sini sehingga monyet pun harus bermigrasi ke tempat lain?”

“Tidak..”

“Lha terus ke mana?”

“Dimakan tentara..”

Saya hanya bisa tersenyum kecut mendengar ungkapan itu. Bagaimana mungkin negeri yang luas, kaya, subur makmur, gemah ripah loh jinawi ini tega memperlakukan para

penjaga kedaulatan dengan demikian buruk. Jelas, tanggung jawab prajurit Indonesia lebih besar dan jauh lebih berat dibanding prajurit INTERFET. Sayang, penghargaan kepada mereka sama sekali tidak setimpal.

Saat menjabat Pangdam Udayana, kondisi itu pula yang membuat Pak Kiki Syahnakri memberikan sanksi tidak fatal kepada para prajurit yang terlibat dalam penyelundupan gula di perbatasan. “Kita harus melihat kasusnya dengan cermat.. Ya.. bagaimana, bahan itu tersedia di depan mata. Sekali pikul gula ia mendapat imbalan yang jauh lebih besar dari yang ia terima (sebagai prajurit). Jadi ketika diminta mencegah, saya hanya bisa mengatakan, perbaiki dulu uang bulanannya. Bagaimana tidak terlibat, (untuk tugas seberat itu) negara hanya menghargai dengan dua bungkus rokok perbulan,” kata Pak Kiki.

Lourenco, Metha dan Manuel Guterres

Meski sudah berada di Timtim selama berbulan-bulan sebelumnya, kembali ke wilayah yang sama namun dengan kondisi politik berbeda tidaklah mudah. Bagaimana pun penolakan terhadap warga Indonesia sangat terasa. Tak heran jika teman-teman wartawan Asia yang dari Malaysia maupun Singapura selalu mengenakan topi bertuliskan negara mereka. Satu-satunya alasan adalah rasa tidak aman ketika dikira orang Indonesia.

Seperti biasa, pagi itu kami semua, seluruh wartawan dunia yang bermukim di Hotel Turismo, diangkut dengan sebuah truk menuju tempat konferensi pers INTERFET di wilayah Balide, tak jauh dari bekas markas besar UNAMET. “Ah.. hari ini kita dijadikan kambing lagi.. *This is cattle truck, right,*” komentar seorang wartawan Malaysia sambil melompat ke truk INTERFET yang memang lebih mirip truk sapi. Meski mirip truk sapi, tetapi truk itulah yang selalu setia mengantar dan menjemput kami untuk urusan jumpa pers harian INTERFET.

Setelah dihuni INTERFET, wilayah itu memang berubah menjadi medan tempur. Di mana-mana berisi tumpukan karung pasir dan gulungan kawat berduri. Di beberapa sudut, termasuk di pohon-pohon tertempel tulisan, “*Sniper Zone*”. Tentu, tulisan itu membuat kami semua ngeri. Karena seolah masih berada di wilayah pertempuran maha dahsyat. Padahal, sebenarnya suasana sudah tidak segenting sebelumnya. Apa yang disebut sebagai milisi saat itu sudah berhasil dihalau keluar dari Timtim.

Tak banyak yang diberikan Kolonel Mark Kelly, Jubir INTERFET hari itu. Pada intinya, Kelly hanya mengonfirmasikan rencana kedatangan kembali Xanana ke Dili.

Namun, anehnya, ia enggan memastikan kedatangan tersebut, meski diakui INTERFET pun melakukan persiapan penyambutan.

Entah apa alasannya, kedatangan kembali Xanana *kok* sepertinya dirahasiakan. Sebagai orang awam, saya hanya menduga, INTERFET khawatir kedatangan Xanana akan membangkitkan kembali semangat tempur para milisi. Karena itu, rencana kedatangan Xanana hampir tiap hari dibicarakan, tetapi terus dan terus ditunda. Berita yang sedikit mempunyai kepastian baru muncul pada hari Jumat (22/10/199).

Tak lama kemudian kami kembali ke Turismo. Karena tak banyak yang harus dilaporkan, kami hanya berkeliaran sekitar Turismo. Maklum, waktu itu kami belum berani keluar tanpa pengawalan INTERFET. Kondisi itu membuat saya kembali terpasung. Meski kontak dengan Pak Suryo Prabowo dan ITFET tetap saya lakukan sejak hari pertama tiba kembali di Timtim, toh kami tidak berani datang dan menemui mereka secara bebas.

Situasi baru berubah setelah saya mengontak Keluarga Besar Guterres di Becora, Dili timur, melalui Inmarsat. Keluarga Guterres telah seperti keluarga sendiri. Mereka pun telah menganggap saya sebagai bagian dari keluarga besar tersebut.

Begitu tersambung kembali, tak lama kemudian Kak Manuel dan Metha Guterres datang menjemput kami. Kak Manuel dengan sepeda motor trail, sedang Metha menggunakan sepeda motor biasa. Ada kebahagiaan luar biasa yang terpancar dari wajah mereka. Begitu juga saya. Betapa senang bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarga besar ini.

Tanpa membuang banyak waktu, Eddy Hasby dan saya langsung membonceng dan ikut ke rumah mereka di Bekora. Ah.. lega rasanya. Seperti kembali ke rumah sendiri. Seperti umumnya keluarga Timtim, rumah keluarga Guterres pun sangat sederhana. Sebuah rumah dengan dinding batu yang telah terkoyak dan nyaris kosong. Tak ada lagi meja maupun kursi yang dulu memenuhi hampir setiap ruangan. Juga tanpa tempat tidur. Mereka semua tidur di lantai semen tanpa keramik. Kerusakan telah melenyapkan seluruh barang-barang itu. Beruntung mereka semua selamat.

Siang itu dengan suka cita keluarga besar Guterres langsung menyiapkan santapan siang untuk kami. Bahkan saking gembiranya, mereka memotong seekor ayam. Mama Guterres yang memang jago masak, mengolah daging ayam itu menjadi masakan Timor yang sangat sedap. Tak lupa mereka pun menyiapkan paung, roti khas Timtim.

Bisa dipastikan, siang itu adalah saat terindah bagi kami. Rasanya kami kembali menjadi “manusia” dalam arti bisa berhubungan normal antarsesama manusia. Tanpa

senjata, tanpa kecurigaan, dan tanpa rasa terancam sedikit pun. Makanan siang itu pun menjadi santapan lezat. Apalagi hari itu adalah hari istimewa bagi saya. Kamis, 21 Oktober, adalah tepat hari jadi saya. Dan ini adalah pesta ulang tahun terindah yang pernah saya rayakan.

Setelah kakak beradik ini kembali dalam kehidupan kami, teman-teman lama pun perlahan bermunculan. Luorenco Vicente Martins, mantan wartawan Suara Timor Timur, adalah salah satu di antara mereka. Bahkan Lourenco kadang tinggal bersama kami di Turismo. Keluarga Lorenzo termasuk kocar-kacir dan ia menjadi homeless.

Kehadiran Kak Manuel, Metha, dan Lourenco ke Turismo membawa dampak sangat besar bagi kami berdua. Setidaknya, kami tak lagi dipandang dengan penuh curiga oleh kawan-kawan ojek di depan Turismo. Karena itu, saya lalu menyewa motor trail Kak Manuel dan Metha sebagai kendaraan harian selain “truk sapi” INTERFET. Harus diakui, sejak kehadiran mereka, kami lebih bebas bepergian. Tak ada lagi curiga, tak ada lagi syak prasangka.

Mulai hari itu, kami bisa pergi ke RT-Pang, mengunjungi dan bertukar informasi dengan ITFET. Bahkan sejak kehadiran Lourenco, Metha dan Kak Manuel, keberadaan kami mulai bisa diterima lingkungan setempat. Kami tak lagi khawatir ketika harus pulang malam hari dari RT-Pang dengan berjalan kaki ke Turismo. Seperti malam itu, bersama Eddy saya melenggang dengan tenang tanpa rasa was-was sedikit pun.

Lebih dari itu, kondisi kesehatan kami pun menjadi lebih baik, karena tidak terus menerus mengonsumsi ransum tentara. Kerap kali kami numpang mengirim berita sambil bersantap malam bersama ITFET di RT-Pang yang jelas lebih sesuai selera. Hangat dan lezatnya ikan bakar dari Kupang pun kembali menyentuh lidah kami. Hmmm...

Kondisi itu tentu berlawanan dengan realita kehidupan Timtim. Kota Dili telah mulai penuh sesak, sejak para pengungsi berdatangan kembali ke Timtim. Rombongan pengungsi pertama tiba di Dili dengan kapal Lambelu milik pemerintah RI, Jumat 22 Oktober 1999. Diakui, repatriasi tidak berjalan semulus yang diperkirakan. Terutama di sekitar Timor Barat, khususnya antara Kupang dan Atambua. Setidaknya hal itu sesuai pantauan Ketua Organisasi Komite Bantuan Kemanusiaan (OCHA) Ross Mountain.

Secerach harapan yang dibawa kembali oleh para pengungsi terpaksa kandas di tengah jalan. Euforia kemenangan tak lagi terpekik ketika berhadapan dengan realita kehidupan sesungguhnya. Harapan menemukan kondisi kehidupan yang lebih baik, jelas sulit

terwujud. Timtim bahkan belum menjadi sebuah negeri. Bisa dibayangkan betapa sulit kehidupan nyata pada waktu itu.

Sesaat Timtim menjadi wilayah yang benar-benar hampa. Ketika pekerjaan dan bahan makanan pokok sebagai penopang utama kehidupan tak dijumpai di wilayah itu. Ketika kegembiraan kemenangan telah berlalu, mereka kini dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk mendapat bahan makanan pun harus berebut.

Memang di satu sisi, kehidupan kota Dili telah mengarah ke normal. Masyarakat mulai kembali membuka dagangan di pinggir-pinggir jalan protokol. Meski masih berkisar dagangan hasil bumi seperti dua ikat daun pepaya dan kopi khas Timtim. Namun, seluruh bahan makanan dijual dengan harga yang sangat tidak wajar.

Misalnya, satu tube pasta gigi kecil sekitar 25 gram, dijual seharga Rp 8.500, sebatang rokok Rp 2.500, atau Rp 30.000 untuk sebungkus rokok semua jenis, gula pasir Rp 25.000 perkilogram dan perlu lebih dari Rp 50.000 untuk sekadar mendapatkan 25 gram bubuk sabun cuci.

Tidak hanya kondisi ekonomi yang tidak menentu, melainkan hampir seluruh lini. Pada tahap ini, Timtim telah menjadi satu wilayah yang antah-berantah. Ia berada pada satu fase yang tidak jelas mau mengarah ke mana. Tak bisa dihindari, kenyataannya rakyat Timtim memang tidak semuanya siap menerima realita tersebut. Memang ada euforia kegembiraan, namun hanya sesaat. Luapan kegembiraan hanya karena terbebas dari “ancaman” terselubung seperti penculikan dan intimidasi yang sebelumnya dilakukan oleh saudara sendiri.

Fakta di lapangan menunjukkan Timtim dalam kondisi kocar-kacir. Tak jelas akan berjalan ke arah mana. Seluruh infrastruktur hancur. Roda ekonomi sama sekali mati. Kondisi itu diperparah dengan rencana kehadiran Kay Rala Xanana Gusmão yang tidak pernah pasti. Bagaimana pun kehadiran Xanana sangat diperlukan. Di tengah ketidakpastian itu, rakyat Timtim sepenuhnya sadar akan pentingnya seorang pemimpin. Dan pada tahap ini, hanya Xanana yang mampu menjalankan peran itu. Ia telah menjadi legenda hidup. Tak satu pun rakyat Timtim yang tidak jatuh hati kepadanya.

Angin Perdamaian

Seiring dengan itu, mulai terasa satu lembaran tipis perkembangan hubungan antarsaudara di Timtim yang melegakan. Falintil, sayap militer CNRT, mulai

mengembuskan angin perdamaian. Seperti disampaikan Komandan Region III Falur Rate Laec, di depan Stadion Municipal, Dili. Ia didampingi Manuaman, Sekretaris Region III dan Wakil Komandan Region II Maubuti yang mewakili Komandan Falintil.

“Saya, Falur Rate Laec. Tujuan saya datang ke sini, ingin memberitahukan bahwa kita telah merdeka. (Disambut teriakan meriah dan tepuk tangan). Namun, merdeka banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk membangun kembali rumah-rumah yang telah terbakar, juga membantu untuk pengungsi yang ada saat ini, yang terpencar-pencar.

Untuk memakamkan mereka yang telah meninggal. Untuk mengenang mereka yang telah meninggal di Santa Cruz, dan umumnya untuk menabur bunga kepada mereka yang telah meninggal. Kita telah merdeka, dan kita gembira.

Tapi, dalam hati kita sedih. Sedih karena banyak orang telah tiada di hadapan kita, sedih karena kita menemukan banyak bara api. Akan tetapi kita tertawa karena kita telah merdeka. Kita merdeka menunjukkan kepada semua orang, kepada dunia, bahwa kita mampu untuk merdeka sendiri.

Untuk itu tidak boleh melakukan provokasi terhadap para pengungsi yang datang. Jangan melakukan ancaman-ancaman terhadap mereka yang datang. Jangan berkelahi di sepanjang jalan. Karena merdeka milik kita semua. karena kelompok pro maupun anti bersatu untuk mendirikan kemerdekaan. Justru itu, semua orang akan mengasihani kita dan mencintai kita. Kita punya kemerdekaan merupakan suatu jalan. Oleh karena itu jalan terakhir bagi kita untuk mencari kedamaian bagi semua orang. (plok-plok-plok).

Bagi para pemuda pejuang kemerdekaan Timor Loro Sa'e yang telah berjuang dengan darah. Ke depan ini, Anda sekalian mendapat tugas berat. Di mana kalian telah percaya untuk lebih percaya lagi, di mana mendapatkan suatu kemerdekaan bagi rakyat Timor Loro Sa'e. Bagi para wanita yang telah berjuang, tidak diperhitungkan kecapaiannya, sebagai Mamak dari semua perjuangan, telah memberikan bunga kepada semua orang. Berjuang bersama kaum pria di mana-mana. Selama perjuangan tugas berat dan sekarang juga tugas berat. Untuk itu, telah membentuk suatu organisasi demi organisasi di mana berjuang untuk masa depan Timor Loro Sa'e. (plok-plok-plok)

Saya tidak mengharapkan kalian datang untuk melihat kami tapi kami juga ingin melihat situasi yang ada di kota Dili. Kita ingin bersatu, bergandengan tangan untuk membangun timor Loro Sa'e. (plok-plok-plok).

Oleh karena itu semua harus bekerja, bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, seperti yang lain juga menderita. Jangan

menganggap kemerdekaan seperti pisang goreng. Oleh karena itu kesempatan ini, diberikan kepada para pemuda, baik putera-puteri maupun yang tua-tua.

Perjuangan ini, tidak melihat dari pro maupun anti-integrasi, tetapi sekarang adalah merupakan Republik Timor Leste. Kita harus saling memaafkan kesalahan yang telah terjadi selama 24 tahun. Hingga sampai tanggal 30 Agustus, membawa masyarakat Timtim untuk mencapai suatu kemerdekaan. Saling memaafkan karena di mana perang telah banyak membuat orang melakukan kesalahan. Oleh karena itu kita semua harus saling memahami semua kesalahan yang kita lakukan itu, karena kita mengetahui bahwa itu adalah kesalahan kita semua.

Tanggal 30 mendatang, semua orang baik putera-puteri Timor Loro Sa'e, akan melakukan proses pengadilan, terhadap mereka-mereka yang telah melakukan kesalahan baik perorangan maupun kelompok, karena kita berperang demi suatu keadilan. Kita melakukan perang, jangan menyambung suatu peperangan, kita membuat masalah, jangan menyambung masalah. Kita melakukan peperangan, dan kita ingin menyelesaikan peperangan di Timtim. Dan kita ingin menyelesaikan masalah hingga masalah itu tuntas di Timor Loro Sa'e. Kesempatan ini diberikan oleh INTERFET."

Permintaan Falur tentu tidak mengada-ada. Uluran perdamaian seperti itu seolah telah menjadi garis kebijakan Falintil. Hal senada juga selalu ditekankan Wakil Panglima Falintil Taur Matan Ruak seperti saat ditemui di Markas Falintil yang baru, Remixio, Aileu, sekitar 12 kilometer dari Dili. Lokasi ini jelas lebih dekat dibanding Uai Mori. Karena itu, saya bisa ke sana setiap saat cukup dengan ojek.

Hari itu, segera saya "melesat" ke Remixio menemui Matan Ruak setelah mendengar cerita Pak Suryo bahwa Falintil kembali mengingkari janjinya untuk melepaskan Kapten IGK Artawan, Wakil Komandan Koramil Soibada, Manatuto. Cerita lengkap penahanan itu belum sepenuhnya saya ketahui. Sejauh ini, yang saya tahu, konon ia telah berada di markas Falintil sejak tanggal 7 September 1999.

Matan Ruak menjamin sepenuhnya keselamatan Kapten Artawan. "Jangan khawatir, dia baik-baik saja, kami bukan orang jahat. Pada waktunya nanti, dia pasti kami kembalikan," kata Matan Ruak sambil tersenyum. Saya percaya omongan itu. Pengalaman selama ini membuktikan hal itu.

Keyakinan pada jaminan Matan Ruak itu kemudian saya sampaikan kepada Pak Suryo Prabowo. Seperti biasa, Pak Suryo menanggapi hal itu dengan senyum. Dan saya pikir di

antara perwira TNI yang bertugas di Timtim waktu itu, hanya Pak Suryo yang selalu menyampaikan segala sesuatunya, berita baik maupun buruk, dengan tersenyum.

“Dia bisa dipercaya *kan*, Rien,” tukas Pak Suryo.

“Pastilah Pak, menurut pengalaman saya selama ini, omongan Matan Ruak selalu bisa dipegang,” jawab saya yakin.



*Markas resmi Falintil di Remixio, Aileu.
foto: Eddy Hasby*

Saat itu, kembali saya mendengar rencana kepulangan Xanana. Disebutkan, Xanana secara resmi akan tiba di Dili pada hari Jumat (22/10/99). Konon, Xanana akan terbang dari Darwin langsung ke Dili. Sesampai di bandara Komoro, Dili, ia akan diterbangkan dengan helikopter menuju markas Falintil di Remixio. Namun, benarkah rencana kali ini? Entahlah.. yang pasti benar-tidaknya baru bisa didapat esok pagi...***

Bab VII

Viva Timor Leste

Setelah cukup lama terombang-ambing dalam ketidakpastian, hari Jumat (22/10/1999), akhirnya masyarakat Timtim menemukan apa yang telah mereka nantikan. Hari itu, Kay Rala Xanana Gusmão, Presiden Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timor Timur (CNRT), benar-benar tiba di Dili.

Menurut Panglima INTERFET Mayjen Peter Cosgrove, Xanana berangkat dari Darwin dengan pesawat khusus INTERFET Kamis malam. “Keberangkatan ini atas permintaan Xanana,” kata Cosgrove. Entah apa alasannya, masih menurut Cosgrove, untuk sementara Xanana akan tinggal di Dili, bukan di markas Falintil di Remixio, Aeliu, yang hanya sekitar 12 kilometer dari Dili.

Pagi itu, Xanana hadir dalam pengawalan super ketat. Ia pun dibawa dengan kendaraan Armed Personel Carrier atau APC, jenis Piranha. Kendaraan ini akhirnya menjadi alat angkut harian Xanana dan seluruh stafnya. Setelah koordinasi dengan Falintil di Remixio, sekitar pukul 10.10 waktu setempat, ia tiba di kantor Gubernur Dili untuk menyapa sekitar 5.000 rakyat Timtim yang berdesakan di halaman.

Bagai pemimpin sebuah negara besar, Xanana diapit dan dijaga tentara INTERFET yang berkaca mata hitam dan bersenjata lengkap. Ia mengenakan seragam kebesaran militer Falintil. Selain Presiden CNRT, Xanana adalah Panglima Forcas Armadas de Libertacao Nacional de Timor Leste atau Falintil, sayap militer CNRT. Pada kesempatan itu, Xanana didampingi seluruh pemimpin Falintil, antara lain Wakil Panglima/Kepala Staf Falintil Taur Matan Ruak dan Komandan Region II Falintil Sabika, serta Koordinator CNRT Leandro Isaac.

Rakyat Timtim yang telah lama menantikannya langsung bersorak gembira ketika melihat Xanana berjalan menuju mimbar. Ia begitu gagah dan penuh percaya diri. Teriakan “Viva Xanana” pun menggema ketika Xanana mulai berdiri di mimbar, mempersiapkan diri untuk berbicara. “My people, rakyat Timor Timur,” suara berat Xanana mulai menggema.

“Terlalu berat penderitaan akibat peperangan ini. Terlalu lama sudah penderitaan kita,” katanya.

Begitu mendengar ucapan Xanana, rakyat yang semula gegap gempita dan bersorak gembira, mulai menitikkan air mata. Dalam sekejap, halaman kantor Gubernur Dili itu menjadi sunyi, penuh dengan isak tangis dan tetes air mata. Isak tangis pun terdengar semakin keras ketika tiba-tiba suara Xanana serak dan terpatah-patah. Ia ikut menangis. Di atas mimbar, Xanana larut dalam keharuan.

“Kita bertemu dalam situasi yang penuh penderitaan. Kita masih mencari saudara-saudara kita yang hilang. Kita akan memanggil saudara-saudara kita yang masih jauh untuk bersatu membangun sesuatu yang baru. Kemerdekaan sudah ada di depan kita,” kata Xanana. Masih dengan suara terbata-bata, Xanana menekankan bahwa penderitaan yang dialami adalah demi perjuangan. Dengan begitu, Timtim akan tetap memberi penghargaan kepada mereka yang gugur dan akan tetap menyimpan jasa mereka di dalam hati. “Justru kematian itu yang akan membawa seluruh rakyat dalam semangat membangun kembali bumi Timor Loro Sa’e,” tegasnya.

Di sini, muncul kesan tidak suka Xanana pada Indonesia. Bagaimana pun rasa dendam itu tetap terasa. Ia menegaskan, pentingnya Timtim membangun bumi Loro Sa’e secara mandiri. Dalam arti di atas kemampuan sendiri, tidak akan meminta bantuan negara lain termasuk Indonesia. “Dengan keberanian, kita akan memperbaiki tanah kita Timor Loro Sa’e. Kita tidak perlu meminjam atau meminta bantuan dari pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Begitu nama Indonesia disebut dalam konteks seperti itu, seluruh rakyat Timtim langsung menyambut dengan tepuk tangan riuh rendah. Sesaat, ungkapan itu membuat saya merinding. Seolah, titik tempat saya berdiri menjadi tidak aman, meski tak terlalu jauh dari mimbar Xanana.

Hal senada juga dirasakan Eddy Hasby. “Ketika saya menerobos kerumunan orang itu, ratusan pasang mata menatap tak suka. Seorang dari mereka mencoba menghadang dan berucap sinis, ‘kami tak suka wartawan Indonesia yang suka menulis bohong dan sekarang bangsa Indonesia sudah menghancurkan Timtim!’ Untunglah setelah saya beri penjelasan, mereka bisa menerima dan memberikan jalan sehingga saya bisa memotret peristiwa penting itu,” kata Eddy. Beruntung, mereka tidak serta merta menyerang kami.

Konsentrasi mereka terhadap saya perlahan hilang, tersedot ungkapan-ungkapan Xanana yang sungguh patriotik dan penuh pesona. “Untuk itu,” lanjut Xanana, “perlu

disiplin yang tinggi dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga perlu kesediaan setiap orang untuk saling mengerti, saling memahami, dan saling menerima. Jauhkan semua kebencian maka kita akan terhindar dari semua kejahatan. Kita juga harus saling mengasihi.”

Usai berpidato tanpa teks, Xanana kembali membuat “tontonan” yang mengharukan. Ia kemudian mengajak Taur Matan Ruak dan Leandro Isaac ke mimbar. Dari tempat ini, Xanana mengajak kedua pemimpin itu untuk bersama-sama meneriakkan yel khas Timtim, “Viva Timor Leste”. Tentu, ajakan itu disambut seluruh rakyat dengan gegap gempita. “Viva!!!!” jawab mereka serentak sambil mengacungkan dua jari lambang Victory atau kemenangan.

“Viva Timor Leste!!!”

“Viva!!!!”

“Viva Timor Leste!!!!”

“Viva!!!”

Dengan teriakan itu, masyarakat yang semula menitikkan air mata, terbawa pada ingatan kelam masa lalu, kini larut dalam kegembiraan. Dalam sekejap pula, suasana yang semula murung dan penuh duka, kembali menjadi riuh rendah. Kehadiran Xanana memang membawa suasana berbeda. Kepercayaan diri masyarakat setempat terasa semakin tebal. Sungguh mereka yakin akan kepemimpinan Xanana dan menggantungkan harapan besar pada sosok tersebut. Tentu hal seperti itu wajar. Xanana sangat identik dengan persoalan Timtim. Timor Timur adalah Xanana. Ketika berada di hutan atau di penjara Salemba, Jakarta, pesona Xanana tidak pernah pudar.

“Dia satu-satunya sosok yang bisa mempersatukan kami, semua unsur di Timor Timur,” kata Leandro Isaac. Leandro menempatkan Xanana begitu tinggi. Karena itu, selama Xanana masih eksis, ia sama sekali tidak bersedia mencalonkan diri dalam percaturan politik, kelak jika Timtim benar-benar telah menjadi negara berdaulat. “Tidak, saya tidak akan pernah mencalonkan apalagi melawan dia. Untuk Timor Timur, dialah satu-satunya,” ujar Leandro lagi.



*Pidato pertama Kay Rala Xanana Gusmão
foto: Eddy Hasby*

Pidato pertama Presiden CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão, didampingi Wakil Panglima Falintil Taur Matan Ruak, Jumat 22-10-1999

Rakyat Timor Timur,

Terlalu berat penderitaan dalam peperangan kita, lama sekali penderitaan kita, (mulai menangis...) namun, saya mengerti bahwa (menangis...). Terlalu berat penderitaan kita. Di mana pejuang kita banyak yang gugur. Kita memberikan penghargaan kita. Kita membawa mereka di dalam hati kita. Terlalu berat penderitaan kita masing-masing membawanya di atas bahu kita.

Namun rakyat Maubere menunjukkan bahwa karena kemauannya, dia akan berbuat sesuatu. Oleh karena itu, rakyat Maubere menunjukkan bagaimanapun juga beratnya penderitaan, apa yang dia inginkan telah tercapai. Kita akan menunjukkan kepada dunia, kepada pemerintah Indonesia, menunjukkan kepada diri kita sendiri, kita adalah rakyat yang menderita, rakyat yang berani perang selama 24 tahun, menerima semua tantangan, hingga saat ini, adalah hari yang berbahagia setelah menerima penderitaan, walaupun dia masih menangis, dia masih menggunakan kain hitam, namun sekarang kita ingin melihat ke depan, Tanah Timor Loro Sa'e milik kita. Kita tetap memimpin. Oleh karena itu

dengan penderitaan, dengan menangis, kita akan mendirikan negara baru, kita akan mendirikan rakyat yang baru, mendirikan Tanah Timor Loro Sa'e yang baru.

Oleh karena itu, mulai saat ini dan esok untuk memikirkan ke depan, maka dari itu hari ini kita berkumpul dan kita bertemu untuk memikirkan masa depan rakyat Timtim, esok dan seterusnya. Dan saya mengerti, rakyat yang menunjukkan kepada saya dan kepada dunia, kapan kita mau memperbaiki, Timor Loro Sa'e. Untuk itu, duduk dengan tenang, memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita bertemu dalam penderitaan, kita bertemu dalam situasi besok dan seterusnya.

Tidak ada sesuatu yang akan mengganggu kita. Bahwa esok ke depan, di mana kita semua telah mengikuti politik yang benar, kita akan memperbaiki tanah kita Timor Loro Sa'e.

Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian,

Kita bertemu dalam situasi yang menderita. Kita masih mencari saudara-saudara kita yang hilang. Kita akan panggil saudara-saudara kita yang masih jauh untuk kita bersatu untuk mendirikan sesuatu yang baru, kita punya kemerdekaan sudah berada di depan kita. Dalam kemerdekaan apa yang kita inginkan. Unamet yang Anda kenal selama ini, akan kembali menjadi Untaet. Kita akan merdeka di mana kita berjuang untuk mendapatkan. Kita semua akan berusaha keras, Biarkan apa yang mereka lakukan terhadap kita karena hari esok dan seterusnya adalah hari kita.

Saya mengerti bahwa seperti Dili, di mana orang membakar, di mana orang merusak, di seluruh Timor Loro Sa'e, orang merusak, membakar, membunuh. Kemauan untuk merdeka sudah berada di tangan kita. Orang ingin membongkar kebersamaan untuk merdeka, rakyat Timor Loro Sa'e menjadi korban, dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang kita mengetahui bahwa dari penderitaan akan membantu kita. Kita yang telah berada di sini, hari ini, untuk bersatu lebih erat lagi. Karena hari esok adalah hari kita semua. Karena hari esok adalah hari kemerdekaan, hari kemenangan.

Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, matahari terlalu panas, kita bertemu dalam terik matahari yang panas, sama halnya pengorbanan. Kita akan bertemu lagi karena kita telah berada di Tanah kita Timor Loro Sa'e, kita akan bertemu lebih banyak lagi, karena kita ingin tinggal bersama di tanah kita Timor Loro Sa'e. Saya minta agar untuk memberitahukan kepada semua lebih meningkatkan disiplin karena rakyat pemberani, rakyat disiplin, dengan ini kita berjuang sampai hari ini mendapatkan kemenangan. Kita akan memperbaharui hidup baru, bebas dari penderitaan, namun selama pembaharuan kita harus saling mendengar, saling memahami sesama, kita harus disiplin dalam tingkah laku kita sehari-hari.

Kita masih memperbaiki Dili, memperbaiki Timor Loro Sa'e (Viva Timor Loro Sa'e), karena kita rakyat timor loro Sa'e, rakyat yang pintar. Viva timor leste. Viva Falintil. viva Maubere. Dengan keberanian kita, kita akan memperbaiki tanah kita Timor Loro Sa'e. Kita tidak perlu meminjam sesuatu dari pemerintah Indonesia (plok-plok.. Viva ..)

Saya minta kepada semua, bagi mereka yang hari ini telah hilang dari hadapan kita, tetap berada bersama kita dan di dalam hati kita. Mereka membawa kita untuk memperbaiki tanah kita Timor Loro Sa'e. Darah yang mereka tumpahkan, ditumpahkan di atas tanah pusaka. Untuk itu kita harus saling mengerti dan memahami, jauhkan semua kebencian kita, maka kita akan terhindar dari semua kejahatan.

Ada hubungan baik dengan keluarga di mana mereka yang tidak ada hubungan baik dengan keluarga, akan tetapi semua adalah anak dan putera Timor Loro Sa'e. Kita akan memikirkan setiap hari, setiap tahun di dalam sejarah kita, di dalam nasib negara kita. Bahwa dengan penderitaan mereka, dengan pengorbanan mereka, kita rakyat Timor Loro Sa'e, semua bangun dan berdiri, percaya diri bahwa Timor Loro Sa'e menjadi suatu negara, di tengah negara-negara yang lain.

Saudara-saudara sekalian, untuk pertama kalinya kita bertemu, kita akan bertemu lebih lama, esok dan seterusnya. Karena banyak yang harus kita kerjakan, untuk memperbaiki diri kita sendiri, untuk memperbaiki organisasi-organisasi kita agar kita bisa bekerja demi Tanah Timor Loro Sa'e dan juga demi diri kita sendiri.

Oleh karena itu, walaupun terik matahari panas, hari ini kita punya pertemu sampai di sini. Pesan terakhir saya, bahwa kita harus berdisiplin, kita akan berjalan dengan baik, kalau kita saling memahami dan saling mengerti, karena kita sudah saling memahami dan saling mengerti selama 24 tahun. saling peluk, saling mengasihi, sesama kita. Viva Timor Leste. Viva Rakyat Timor Loro Sa'e, Viva Falintil, Viva CNRT, Viva... !!!!

Usai berpidato, Xanana dan seluruh stafnya langsung kembali ke kendaraan baja yang tertutup rapat itu. Akibatnya, saya tidak bisa menyapanya langsung. Xanana dan rombongan pun berlalu begitu saja. Tapi, untung memang tidak bisa diraih dan malang tidak bisa ditolak. Sebelum pintu kendaraan tempur itu tertutup, Leandro dan Taur Matan Ruak melihat saya. Leandro melambai dengan sangat ramah seolah ingin mengajak saya ikut serta ke dalam kendaraan tersebut. Sayang, pintu terlalu cepat tertutup.

Saya pun membiarkan semua berlalu begitu saja. Tentu waktu itu saya berpikir untuk menemui Xanana dan Taur Matan Ruak di Remixio. Tetapi di luar dugaan, lambaian Leandro tadi ternyata membawa makna luar biasa.

Siang itu, tanpa diduga, sebuah mobil berhenti di samping saya yang sedang berjalan di sekitar Lecidere, di depan kediaman Uskup Belo yang sudah hancur. Sesaat terbersit kemungkinan saya diculik. Tetapi betapa lega, ketika saya melihat wajah Leandro. Saat itu, Leandro meminta saya ke markas Falintil di Remixio. Tanpa berpikir panjang, bersama Eddy Hasby, saat itu juga saya melesat ke Remixio menggunakan ojek.

Betapa heran, hampir semua wartawan bule sudah ada di tempat tersebut. Mereka berkumpul di sana melalui jalur Kirsty Sword, yang belakangan resmi menjadi Nyonya Xanana dan Ibu Negara Pertama Timor Leste. Satu persatu mereka antre untuk wawancara khusus dengan Xanana.

Seperti biasa, mereka selalu melihat kami berdua yang dari Indonesia dengan pandangan sangat sinis. Tetapi, tak berapa lama kemudian pandangan sinis mereka perlahan memudar. Saya pun heran. Lebih heran lagi, wartawan Radio Televisao Portugal (RTP), Hernani Carvalho secara khusus datang dan mewawancarai saya yang saat itu masih bengong dan hanya duduk-duduk di pojok sambil memperhatikan tingkah polah para wartawan asing tersebut. Sedang Eddy Hasby entah berada di mana.

Dari Hernani kemudian saya paham apa yang terjadi. Setelah melihat saya, usai pidato pertama Xanana, Leandro kemudian menceritakan tentang saya kepada Xanana. Intinya, Leandro bercerita bahwa orang yang ia lambai tadi adalah wartawan Indonesia. Ia orang Indonesia asli bukan warga Timor Leste. Kepada Xanana, konon Leandro menekankan bahwa tanpa “peran” saya, ia seharusnya sudah tewas dalam pembunuhan massal September lalu.

Saya kaget mendengar cerita Hernani itu. Pikiran saya kembali ke era September 1999. Sehari setelah dievakuasi paksa untuk kembali ke Jakarta, saya mendapat kiriman daftar orang-orang yang dianggap berkhianat, berikut hari pelaksanaan pembunuhan terhadap mereka. Setidaknya ada 14 nama dalam daftar yang disampaikan hanya melalui telepon itu. Dari ke-14 nama itu, jelas tertera nama David Diaz Ximenes dan Leandro Isaac.

Namun sayang, sebelum sempat mengatakan yang sebenarnya, David Diaz Ximenes sudah menutup telepon. “Tolong jangan hubungi saya, saat ini saya sedang dalam kondisi sangat berbahaya,” kata David Ximenes dengan suara sangat pelan bahkan setengah berbisik, langsung mematikan telepon.

Akhirnya, hanya Leandro yang tersambung. Syukurlah, Leandro menerima telepon saya dengan baik. Bisa jadi, karena telepon itu Leandro dan seluruh keluarga merasa terselamatkan meski rumahnya luluh lantak dan hangus terbakar. Karena itu, ketika pada

akhirnya kembali ke Timtim, saya hanya tersenyum saat mendengar isu Leandro tewas dan mayatnya dipotong menjadi 13 bagian.

“Kenapa kau selamatkan Leandro? Bukankah dia orang Timtim dan negaramu sedang bermasalah dengan Timtim?” tanya Hernani Carvalho sambil menyorongkan pengeras suara untuk merekam suara saya. Tentu saya kikuk dengan kondisi itu karena biasanya sayalah yang mewawancarai orang.

Kepada Hernani saya hanya bisa menjelaskan bahwa pada intinya saya adalah pacifist total, anti-kekerasan dalam segala bentuk. Saya tidak percaya bahwa kekuatan senjata dan perang bisa menjadi jalan penyelesaian. Dalam hal ini, saya hanya percaya jalan penyelesaian damai. Sikap inilah yang mendasari pandangan saya pada soal Timtim termasuk orang-orangnya.

Selain itu, pada dasarnya, saya pun tidak pernah membedakan orang. Di mata saya mereka semua memiliki harkat dan martabat yang sama, yaitu sebagai manusia. Karena itu, ketika ada seseorang dalam bahaya, siapa pun dia, dan kebetulan saya tahu, tentu saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu orang tersebut. Saya sudah sangat bersyukur jika waktu itu bisa menyelamatkan satu nyawa.

“Jadi semua itu didasarkan pada alasan kemanusiaan?” lanjut Hernani.

“Yes! Semua itu demi alasan kemanusiaan. Bukankah sebagai manusia seharusnya kita tidak terkotak-kotak? Kita lahir sama-sama telanjang. Tuhan menciptakan kita dengan harkat dan martabat yang sama, karena itu sudah selayaknya jika kita saling mengasihi, bukan memusuhi.”

Konon, menurut Hernani pula, kisah itu kemudian diceritakan oleh Xanana kepada para wartawan asing yang mewawancarainya. Saya tidak pernah tahu benar atau tidaknya cerita Hernani hingga saat kami kembali ke Dili. Di jalan, tiba-tiba saya mendengar teriakan dari sebagian wartawan asing yang aneh tapi sekaligus menggelikan dan membanggakan.

Seolah ada yang mengomando, setiap berpapasan, mereka serentak berteriak, “*Viva Kompas. Viva Kompas!!!*”. Kadang pula “*Viva Kompas Leste!*” Entah apa maksudnya. Saya hanya tersenyum melihat kejadian itu. Tetapi spontan saya pun menjawab, “*Viva!!!*”, sambil mengacungkan dua jari, telunjuk dan tengah!

Berbahasa Indonesia

Sejak itu, perhatian wartawan asing kepada kami berubah total. Khususnya para wartawan Portugal. Entah apa yang ada di benak mereka selama ini, namun kenyataannya mereka heran ketika melihat kami berdua yang orang Indonesia, hingga saat itu masih berada di Timor Leste, bukan lagi Timor Timur sesuai terminologi Indonesia.

Pagi itu, saya bangun dengan wajah yang seluruhnya terasa sakit. Bibir, hidung, dan pipi semuanya terasa kaku. Dan betapa terkejut ketika melihat di kaca kamar mandi, wajah saya bengkak total. Bibir nyonyor dan hidung pun merah persis badut. Rupanya, semalam saya “dirajam” habis oleh para serangga. Dan tawa kami meledak ketika beberapa saat kemudian Heather terbangun dan melihat wajah saya.

“*Wom.. what happened?*” ujarinya sambil tertawa terbahak-bahak.

“*Rien, who kissed you last night?*,” teriak yang lain.

“*I wish I could be the mosquito..*” komentar yang lain pula.

Saya hanya bisa tertawa sambil meringis kesakitan mendengar celotehan kawan-kawan wartawan asing itu. Begitu melihat wajah saya yang “hancur”, Mariana Sanchez langsung menyodorkan krim anti-serangga. Sambil meringis, saya ceritakan kepada Mariana bahwa semalam sekujur tubuh sudah saya olesi minyak anti-serangga. “*But not my face, lips, and nose,*” kata saya. Mariana tertawa terbahak-bahak. “*Who are the mosquitos?*” katanya masih sambil tertawa.

Tanpa sengaja, cerita tentang “nasib” wajah saya sampai pula ke telinga para wartawan Portugal. Seluruh wartawan Portugal waktu itu menempati rumah di ujung jalan bekas kediaman Pak Johnny Lumintang, mantan Komandan Korem Timtim. Malam itu, tiba-tiba kamar saya diketuk dengan begitu keras. Ternyata Hernani. Ia sengaja datang untuk menjemput dan membawa saya ke seorang dokter Portugal kenalannya.

Semilirnya angin persahabatan mulai terasa nyata. Tidak hanya dengan Portugal, namun hampir dengan semua pihak, hubungan kami memang menjadi lebih baik. Kehadiran Xanana benar-benar menghapus seluruh syak prasangka dan curiga terhadap kami yang sebenarnya hanya warga sipil biasa namun berasal dari Indonesia.

Xanana pun tak pernah berhenti berkampanye menyadarkan semua pihak untuk tidak memusuhi rakyat Indonesia. Langsung atau tidak langsung, Xanana sering menyinggung keberadaan saya di Timtim untuk memperkuat argumen bahwa rakyat Indonesia tidak pernah bermusuhan dengan rakyat Timtim. Bahkan dalam salah satu kesempatan, ia

sengaja menggunakan saya sebagai contoh. “Keputusan dia untuk tetap berada di Timor Leste sampai saat ini adalah contoh nyata bahwa kita tidak pernah bermusuhan dengan rakyat Indonesia,” ujar Xanana.

Sabtu (23/10/1999) pagi, saya secepatnya menuju Markas Besar Pasukan Internasional PBB di Timtim atau INTERFET. Hari itu, ada pertemuan antara pihak Indonesia dengan Timor Leste. Dari Indonesia diwakili Komandan ITFET Brigjen (Pol) JD Sitorus, Komandan Satgas Pengamanan ITFET Kol (Inf) Sahala Silalahi dan Perwira Penghubung (LO) militer Kapten (Inf) A Suryo. Sementara pihak Timor Leste diwakili Kay Rala Xanana Gusmão, Taur Matan Ruak, dan Leandro Isaac.

Setelah ITFET, disusul pertemuan dengan Tim Pasca Penentuan Pendapat di Timor Timur (P4TT) yang antara lain diwakili Ketua P4TT Duta Besar Taufik R Soedarba. Setelah sempat kembali ke Jakarta, pemerintah Indonesia memutuskan mengirim kembali Satgas P4TT ke Dili pada tanggal 14 Oktober 1999. Satgas yang terdiri dari 28 personel ini dipimpin Duta Besar Taufik R Soedarbo dengan Wakil Dubes Hafid Abdulgani dan Juru Bicara Yuri O Thamrin.

Seperti biasa, awalnya kami tidak diizinkan masuk. Namun, begitu Xanana, Taur, dan Leandro melihat kami, Eddy Hasby dan saya, mereka meminta izin agar kami tidak diusir. Setelah Eddy mengabadikan pertemuan itu, akhirnya, kami disembunyikan di salah satu ruang. Entah ruang apa. Tetapi waktu itu saya melihat banyak peralatan komunikasi. Sepertinya, ruang itu dikendalikan oleh tentara Amerika Serikat. Di balik badannya yang benar-benar tegap, perangai tentara AS memang berbeda. Mereka seolah tak terganggu dengan kehadiran kami di tempat itu. Artinya, mereka tidak mengusir atau menghentikan kegiatan. Bahkan kadang mereka menyapa atau bercanda.

Ketika baru asyik memperhatikan para serdadu AS, kami dipanggil. Pertemuan telah selesai. Setelah berbicara sesaat, Xanana dan rombongan langsung menuju Markas PBB atau UNAMET di Balide. Karena itu, saya pun segera menuju Balide. Saya pikir, keterangan dari ITFET maupun P4TT bisa saya dapatkan nanti sore sekalian bermain ke RT-Pang.

Sesampai di Balide, tempat itu telah dipenuhi wartawan lokal maupun asing. Pada kesempatan itu, selain Taur dan Leandro, Xanana juga didampingi Sekretaris Umum Falintil/Komandan Region II Sabika dan penerjemah Apeu. Tak ada hal lebih penting yang disampaikan Xanana selain penegasan kembali tentang pentingnya menjalin hubungan baik dengan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Timtim akan menerima kembali para milisi

sebagai bagian dari rekonsiliasi, sejauh mereka bersedia mengakui kejahatannya dan bersedia berdialog dengan masyarakat Timtim.

“Satu-satunya syarat bagi mereka untuk bisa kembali adalah menerima sepenuh hati dan sejujurnya mengakui kejahatan mereka kepada masyarakat. Dan tentunya, pemerintah kita akan sebaik mungkin untuk tidak main hakim sendiri, tetapi bertindak secara lebih matang dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu,” kata Xanana.

Menyinggung tentang amnesti yang ditanyakan oleh salah satu wartawan, Xanana menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan amnesti. “Tetapi bila pemerintah Timtim memberikan amnesti kepada mereka, itu akan sangat melukai rakyat Timtim,” ujarnya. Untuk itu, Xanana berharap para milisi bersedia dengan jujur mengakui kejahatan mereka dan menghentikan kekerasan.

Waktu itu kembali saya menemukan bukti keseriusan Xanana untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Ketika melihat saya berdiri di pojok ruangan, Xanana dengan lantang mempersilakan saya bertanya. “Saya mohon Saudara-saudara memberi kesempatan kepada saudara saya dari Indonesia,” kata Xanana sambil mempersilakan saya untuk bertanya. Lebih dari itu, Xanana kemudian selalu berbicara dalam Bahasa Indonesia dengan saya, terutama di muka umum. Akhirnya, setiap kali melihat saya, Xanana selalu memanggil, bahkan ketika saya sedang tidak ingin bertanya.

Pada prinsipnya Xanana meminta pemerintah Indonesia lebih menciptakan stabilitas. Diharapkan, langkah ini lebih memungkinkan para pengungsi yang kini masih di Timor Barat atau di perbatasan, bisa kembali dengan aman ke Timtim. “Demi masa depan, tentunya tidak seharusnya kita menciptakan kekerasan antara Timor barat dengan Timor timur,” ujarnya. Xanana optimis hubungan Indonesia-Timtim bisa terjalin dengan baik. “Dalam pertemuan dengan P4TT, saya memperoleh tanda yang jelas, kedua pihak bersedia menciptakan iklim yang kondusif untuk bekerja sama,” katanya.

Hal itu diperkuat Juru Bicara P4TT Yuri O Thamrin. “Bahkan P4TT menawarkan untuk memberi fasilitas dengan pro-integrasi. Xanana menyambut baik tawaran itu,” ujar Mas Yuri. Xanana menganggap tawaran itu sangat membantu. Pada kesempatan itu, P4TT menjajagi kemungkinan tetap bisa menempatkan perwakilan Indonesia di Timtim. Menanggapi hal itu, Xanana menekankan pentingnya dialog dan kerja sama lebih lanjut dalam proses penyerahan kekuasaan nanti.

Duka Mauhudu, Suka Kapten Artawan

“Kak, Mauhudu mate dibunuh, Kak!!” Suara berat Rosa, mantan wartawan Suara Timor Timur yang kemudian bergabung dengan KontraS, memecah keheningan pagi itu. Rosa segera menyampaikan berita duka itu mengingat kedekatan saya dengan Mauhudu.

“Apa? Yang benerrr.... Kapan?”

“Persisnya belum tahu Kak. Yang kami didengar ia dibunuh ketika sampai di Kupang,” kata Rosa.

Bagaimana pun ada rasa tidak rela jika kabar itu benar terjadi. Meski beraliran kemerdekaan, tetapi Mauhudu telah banyak berbuat untuk bangsa Indonesia. Terutama beberapa bulan terakhir. Ia bersama Mauhudu, aktivis pro-kemerdekaan lain, tergabung dalam Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS). Karena itu, saya langsung mencari informasi lanjutan.

Sulit saya percaya bahwa Mauhudu tewas dibunuh oleh bangsa sendiri. Menurut saya, hal itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, orang yang telah banyak berperan dalam penyelesaian persoalan antara Timtim dengan Indonesia justru dibunuh di tanah Indonesia. Untuk memastikan nasib Mauhudu, saya berusaha menghubungi semua pihak. Dari ITFET, Satgas P4TT, UNAMET hingga INTERFET. Namun, hasilnya nihil.

Banyak kejadian yang tak lagi saya lihat dengan mata kepala sendiri begitu saya “dipulangkan” dengan paksa ke Jakarta, pada awal September lalu. Komunikasi dengan Timtim memang tetap saya lakukan. Namun, sangat terbatas. Kondisi Timtim di awal September cukup mengerikan. Pembakaran di mana-mana, begitu juga konon terjadi banyak pembunuhan.

Begitu juga kontak dengan Mauhudu. Tokoh satu ini seolah lepas dari jaringan saya. Terakhir saya ngobrol dengan Mauhudu, beberapa saat setelah pemakaman tokoh pro-integrasi, tepatnya salah satu Komandan Aitarak, Plasio Meneses, akhir Agustus lalu. Setelah itu, komunikasi terputus karena saya kemudian dipulangkan ke Jakarta dengan alasan keamanan.

Keterlibatan Mauhudu di KPS membuat saya berpikir ia cukup aman. Belakangan baru saya ketahui, bahwa posisi Mauhudu pun tidak aman. Tanggal 6 September 1999 ia diungsikan ke Kupang, menggunakan helikopter KPS. Konon, keputusan ke Kupang adalah permintaan Mauhudu sendiri. Sayang, waktu itu sama sekali kami tidak ada kontak. Karena, jika mendengar rencana itu, pasti saya akan melarang. Setelah peristiwa yang saya

alami di akhir Agustus dan awal September, saya yakin Atambua dan Kupang adalah tempat yang amat sangat tidak aman bagi orang seperti saya dan Mauhudu.

Dan selaras dengan cerita Rosa, Mauhudu “diambil” pada saat dia naik bus menuju salah satu hotel di Kupang. Sejak itu, kabar tentang dia tidak pernah lagi terdengar. Di tengah ketidakpastian itu, saya tetap berharap, informasi ini tidak benar, seperti yang sudah-sudah.

Selama di Timtim, sering kali saya mendengar kabar tentang pembunuhan beberapa tokoh Timtim, bahkan hingga ayah Xanana. Namun, beberapa saat kemudian terbukti bahwa berita itu tidak benar. Sering pula seorang kawan bercerita saudaranya empat orang mati dibunuh di Atambua saat repatriasi. Ketika informasi itu saya cek langsung ke UNHCR, ternyata repatriasi hari itu berjalan lancar. Empat orang yang diberitakan tewas ternyata juga selamat.

Hal-hal seperti itu membuat saya pun berharap nasib Mauhudu sebaik orang-orang tersebut. Tetapi sejujurnya, harapan Mauhudu selamat hanyalah semu. Sejatinya saya tidak berani menerima kenyataan bahwa dalam hitungan saya, sebenarnya Mauhudu tidak mungkin selamat di Kupang. Hati saya pun miris. Adanya harapan semu bahwa Mauhudu selamat, membuat saya tidak berani menyinggung masalah itu dalam pemberitaan.

Titik terang nasib Mauhudu mulai terkuak saat akan berangkat ke Remixio. Saya pun mendapat titipan pertanyaan tentang nasib Kapten (Inf) I Gusti Ketut (IGK) Artawan (47), putera Tabanan, Bali, yang ditawan Falintil. Seiring dengan lunturnya kecurigaan dan kebencian terhadap warga Indonesia atas upaya Xanana, cerita tentang pembelotan itu pun mulai bermunculan.

Tanpa saya cari, informasi dan para pelaku pembelotan itu berdatangan sendiri. Seperti di suatu siang, ketika sedang berteduh, tiba-tiba saya didatangi seseorang. Ia tinggi besar dan tegap. Dari postur tubuhnya, saya yakin ia pernah berada di salah satu angkatan. Tanpa saya minta, ia lalu bercerita panjang lebar alasannya mangkir dari kesatuan di bawah pimpinan Kapten Artawan.

“Saya tidak melihat peluang yang lebih baik. Ini satu-satunya peluang kami,” ujarnya waktu itu. Pria itu pun bercerita, ketika ditarik menjadi “milsas” yaitu program militerisasi, ia pun tidak punya pilihan lain. “Tetapi kemudian perkembangannya menjadi lain. Saya orang Timor Timur, Mbak, jadi saya tidak ingin merusak bangsa saya sendiri,” jelasnya. Pria

berkulit sawo matang itu ingin menekankan bahwa keputusan membelot bukan karena unsur Kapten Artawan, tetapi lebih disebabkan kondisi politik secara keseluruhan.

Seperti yang telah banyak diceritakan dan selaras dengan versi Kapten Artawan sendiri, tanggal 8 September 1999, sebanyak 42 dari 57 anak buah Kapten Artawan memutuskan membelot ke Falintil. Kapten Artawan yang waktu itu menjabat Komandan Koramil Soibada di wilayah Kodim Manatuto sebenarnya telah melihat gelagat tersebut. Dalam arti, ia melihat banyak anggota yang sepertinya mendapat tekanan batin.

Puncak dari semua itu terjadi pada tanggal 8 September 1999. Pukul 07.15 pagi, mereka menjadi beringas. Serma Felisberto tiba-tiba mengokang senjata dan langsung mengarahkan ke Kapten Artawan. Kapten Artawan kemudian lari menyelamatkan diri ke pastoran Soibada. Ia diterima oleh Pastor Julio Crispin Ximenes Belo.

“Saya terpaksa minta perlindungan pada Pastor,” kata Kapten Artawan. Sebagai rohaniwan, Pastor Julio pasti melindungi. Bahkan ia tidak mengizinkan sang Kapten keluar dari pastoran mengingat lokasi itu telah dikepung oleh para milas lain dan mudika yang pasti anti-TNI. Hal itu membuat Kapten Artawan terpaksa tinggal di pastoran hingga tanggal 26 September. Dan menurut pengakuannya, saat di pastoran ia diperlakukan dengan sangat baik.

Keinginan Kapten Artawan untuk keluar dari pastoran dan kembali ke kesatuannya tetap tidak pernah terkabul. Selain situasi yang tidak memungkinkan, pada periode itu mereka pun mengalami kesulitan komunikasi. Pastor lalu berinisiatif menitipkan Kapten Artawan ke markas Falintil di Uai Mori, Viqueque. Setelah dua hari perjalanan, tanggal 28 September, ia tiba di Uai Mori.

Meski juga diperlakukan dengan baik, namun tak urung ia dimintai keterangan seputar tindakan brutal yang terjadi di Timtim. Terutama karena banyak pihak menuduh TNI berada di balik tindakan brutal itu. Awal Oktober, Kapten Artawan ditemui Wakil Panglima Falintil Taur Matan Ruak dan sebagian wartawan. Di tempat ini pun, ia diperlakukan dengan baik.

Ternyata perjalanan Kapten Artawan belum berhenti di sini. Ketika akhirnya markas besar Falintil berpindah dari Uai Mori ke Remixio, ia pun ikut serta. Tanggal 13 Oktober, ia resmi dipindah ke Remixio. Di sini, Kapten Artawan mengaku diperlakukan sebagai kawan baik. Karena itu, saat saya ke Remixio, Matan Ruak hanya tertawa-tawa mendengar pertanyaan saya tentang Kapten Artawan. “Jangan khawatir, dia baik-baik saja,” ujarnya.

Seperti dituturkan pula oleh Matan Ruak, semula pihaknya benar-benar tulus ingin melindungi Kapten Artawan dari amukan anak buahnya sendiri. Namun, keinginan tulus itu akhirnya terkontaminasi oleh perkembangan yang ada. Berita hilangnya Mauhudu benar-benar menjadi titik balik. Pada akhirnya, Falintil terpaksa menahan Kapten Artawan sampai mendapat kepastian akan nasib Mauhudu. Walau begitu, Palang Merah Internasional atau ICRC tetap memantau dari dekat kondisi Kapten Artawan.

Seiring dengan simpang siurnya kabar tentang Mauhudu, rencana pembebasan Kapten Artawan pun semakin kabur. Karena itu Pak Suryo Prabowo selalu menitipkan pertanyaan tentang kondisi Kapten Artawan setiap kali saya ke Remixio. Maklum cara ini lebih praktis, tidak perlu birokrasi. Pak Suryo tinggal titip pesan dan secepat kilat saya bisa melesat ke Remixio dengan ojek.

Dan jujur, jantung saya berdetak sedikit lebih kencang ketika berita tewasnya Mauhudu mendekati kepastian. Ketika persoalan ini saya sampaikan ke Taur Matan Ruak, kembali ia memberikan ungkapan yang melegakan. Seperti biasa ia selalu menjawab dengan kalimat “Jangan khawatir. Kami bukan pembunuh.”

Hal senada disampaikan Xanana ketika Panglima Falintil itu telah bergabung dengan anak buahnya di Remixio. Xanana berjanji akan mengembalikan Kapten Artawan sebelum personel TNI kembali ke Indonesia. “Dalam waktu dua atau tiga hari lagi, pasti akan kami kembalikan,” kata Xanana di depan INTERFET.

Hari Minggu, 24 Oktober 1999 malam, Xanana mengundang Kapten Artawan untuk bersantap malam bersama. “Jangan takut, biasa-biasa saja,” kata Xanana seperti dituturkan Kapten Artawan. Tak lama kemudian, tepatnya hari Selasa (26/10/1999), Kapten Artawan resmi dikembalikan ke pihak Indonesia. Ia dibebaskan oleh Ketua LO Militer UNAMET Brigjen Rezaq Hayder. Pukul 10.20 waktu setempat ia diserahkan oleh Ketua UNAMET Ian Martin kepada ITFET di Kantor UNAMET, Balide, Dili.

Seiring dengan kebahagiaan itu, berdesing pula kabar menyedihkan. Pada akhirnya, kabar kematian Mauhudu menjadi kepastian. Sayang, kepastian itu baru saya dapat beberapa saat sebelum masa akhir tugas saya di Timor Leste. Tepatnya, sesaat sebelum saya meninggalkan Hotel Turismo menuju bandara Komoro, Dili, awal November 1999. “Selamat jalan, saudaraku. Semoga engkau diterima di sisi-Nya,” bisik saya dalam hati. Tak mampu rasanya membendung air mata dan penyesalan yang begitu dalam akan kepergian Mauhudu...

Menolak Pulang ke Indonesia

Minggu (24/10/1999) pagi. Seperti biasa saya pergi ke Gereja. Sengaja saya memilih Gereja Motael. Menurut saya, Gereja yang diberkati oleh Paus Yohannes Paulus II tahun 1989 itu lebih bernuansa tradisional Timtim dibanding Gereja Katedral di Villa Verde, Dili barat. Meski tak benar-benar paham, tetapi saya suka sekali mengikuti Misa dalam bahasa Tetun. Selain itu, bangunan Gereja Motael pun masih asli “rasa” Timor Portugis.

Lebih dari itu, Gereja Motael adalah saksi bisu serangkaian kejadian memilukan selama Timtim menjadi bagian dari Indonesia. Insiden Santa Cruz atau lebih dikenal dengan Insiden Dili, 12 November 1991 yang menjadi titik balik hubungan Timtim dengan Indonesia, adalah salah satu kejadian yang tak terpisahkan dari Gereja Motael.

Terus terang, awalnya saya takut ke Gereja Motael. Tanpa bermaksud mengaitkan posisi Gereja dengan situasi politik, namun, sudah seperti tergariskan, kenyataannya Gereja Motael lebih banyak dihadiri oleh kelompok pro-kemerdekaan.

Meski tidak sepenuhnya benar, namun pada akhirnya Gereja ini memberi kesan lebih lekat dengan kelompok anti-Indonesia. Di awal referendum, misalnya, umumnya korban kerusuhan dari pihak pro-kemerdekaan akan dibawa ke Gereja Motael. Sedang korban dari pihak pro-otonomi, biasanya dibawa ke wilayah Dili barat.

“Dari mana, Mbak?” sapa Eddy Hasby ketika saya kembali ke Hotel Turismo. Ia masih duduk-duduk di “Asian Corner” bersama Ramdani Sirait, wartawan Antara, dan beberapa wartawan Asia lain, khususnya Malaysia dan Singapura.

“Dari Gereja.”

Seperti biasa jika berkumpul, kami membayangkan makanan Asia yang begitu spicy dan sangat kami rindukan. Meski termasuk lezat, namun kami mulai bosan dengan menu-menu INTERFET yang hambar dan tanpa rasa tersebut. Kami mulai rindu masakan Asia yang pedas, manis, asin, dan berlemak. Hari itu kami pun kedatangan tamu, teman seperjuangan, Lourenco Martin, wartawan asli Timtim. Hari itu, akhirnya kami memutuskan berkeliling Dili. Sesampai di Kampung Alor, kami berhenti. Kampung Alor menjadi cukup spesifik karena di tempat itu berdiri Masjid An-Nur, satu-satunya masjid di Dili. Anehnya, Masjid itu dihuni warga negara Indonesia yang awalnya berjumlah sekitar 200 orang. Mereka berdagang dan berinteraksi di tempat itu. Bahkan anak-anak mereka mengenyam pendidikan di sekolah yang dibangun di sekitar Masjid.

Sayang kehidupan di tempat itu tak semulus yang diduga. Masjid yang seharusnya menjadi tempat ibadah yang aman dan sejuk, justru berkembang menjadi wilayah yang cukup panas. Setidaknya itu menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Entah seberapa jauh tingkat kebenaran dan validitasnya. Namun yang pasti, baru sekarang ini saya menemukan kelompok minoritas yang tidak kompak dan tidak bersatu. Aneh memang, tetapi seperti itulah adanya.

Seperti yang tertera di dinding luar, Masjid itu berada di bawah tanggung jawab Jauhari Al-Katiri, kerabat dekat Mari Al-Katiri. Kelak ketika Timtim menjadi negara berdaulat, Mari Al-Katiri diangkat menjadi Perdana Menteri dan menjadikan Presiden Xanana Gusmão sebagai simbol persatuan Timor Leste.

Repotnya, kelompok Jauhari Al-Katiri tidak segaris pandangan dengan para penghuni Masjid An-Nur yang kebetulan merupakan pendatang, bahkan sebagian besar dari Jakarta. Karena itu, cerita yang keluar dari ketidakcocokan ini adalah berbagai tindak kekerasan. Tak jarang, tindak kekerasan itu terjadi di dalam Masjid. Namun sekali lagi, saya tidak bisa memastikan tingkat kebenaran dan validitas cerita itu.

Ketika terjadi kerusuhan di awal September, warga di Masjid An-Nur memang sempat mengungsi di tempat lain. Namun, ketika suasana membaik, mereka ditolak untuk kembali ke Masjid tersebut. Bergulirnya angin politik baru membuat perselisihan di Masjid kecil dan satu-satunya di Dili itu menjadi semakin runcing. “Kami diusir dari rumah kami,” kata mereka.

Di satu sisi, ada keinginan menjadikan Masjid An-Nur sebagai salah satu simbol kebersamaan Timtim. Karena itu, mereka ingin menjadikan Masjid hanya sebagai tempat ibadah saja, bukan sekaligus tempat hunian apalagi tempat berdagang dan mencari nafkah. Karena itu, pemerintah Timtim berkeinginan memindahkan lokasi hunian warga di sekitar Masjid An-Nur ke tempat lain. Namun, upaya ini mereka tolak dengan alasan, merekalah yang mengembangkan dan menjaga eksistensi Masjid An-Nur.

Tentu, penolakan ini menjadi pangkal meruncingnya persoalan. Seperti bisa ditebak kemudian, perkembangan selanjutnya adalah anti-Indonesia semakin tinggi, khususnya kepada warga Indonesia yang tetap bertahan di Masjid An-Nur. Ketika, referendum Timtim telah resmi dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan, ada upaya menjadikan mereka sebagai pengungsi atau minimal Internal Displace Persons (IDP).

Namun, mereka tetap bertahan. Bahkan meski tercatat resmi sebagai warga negara Indonesia dan berpaspor hijau, mereka dengan tegas menolak dipulangkan ke Indonesia.

“Kami tidak akan kembali ke Indonesia. Apapun yang terjadi kami akan tetap di sini,” tegas mereka. Tak bisa dihindari, sikap ini semakin memperuncing keadaan. Penolakan terhadap keberadaan mereka di Timtim pun semakin tinggi. Bahkan sudah pada tingkat menolak kemungkinan mereka menjadi warga negara Timor Leste.

Untuk mengatasi kemelut itu, hari Minggu (24/10/1999), Xanana mengeluarkan surat edaran yang berisi jaminan keselamatan bagi seluruh warga negara Indonesia penghuni Masjid An-Nur. “Saya mohon dengan sangat agar saudara-saudara tetap tenang, dan percayalah pada kami bahwa segala sesuatu akan diupayakan untuk menjamin keselamatan saudara sekalian,” kata Xanana melalui surat berkop CNRT-Timor Leste, tertanggal 23 September 1999.

Dikatakan, setelah melakukan reorganisasi struktur politik, Pemerintah Timtim akan mengontrol segala gerak-gerik dan tingkah laku masyarakat, sesuai keperluan. Hal itu dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Secara khusus Xanana mengimbau warga negara Indonesia yang ia istilahkan “terpaksa” tinggal di Masjid An-Nur, tidak mudah terkena hasutan berbagai isu.

Xanana sekaligus mengungkapkan penyesalan yang setulus-tulusnya atas tindak kekerasan yang terjadi di Timtim.

“Segala perusakan, penjarahan, pembunuhan, dan terciptanya iklim ketakutan yang sempat menghantui Timtim beberapa waktu lalu, merupakan strategi pihak-pihak yang antidemokrasi dan tidak menghormati aspirasi sejati rakyat Timor Loro Sa’e,” tegas Xanana dalam suratnya.

Ia menegaskan, kekerasan yang terjadi bukanlah perbuatan spontan warga Dili, melainkan akibat perang selama 24 tahun yang dilawan dengan akal, tekad, dan cara-cara damai. Perdamaian, lanjut Xanana, adalah hal yang sangat didambakan untuk tanah air dan rakyat Timor Loro Sa’e. “Percayalah pada komitmen kami untuk menghormati hak asasi manusia semua warga negara Indonesia yang sedang berada di Timor Loro Sa’e. Teriring salam perdamaian,” begitu Xanana mengakhiri surat edaran tersebut.

Jumlah warga Alor yang tercatat resmi oleh ITFET sebanyak 147 jiwa. “Mereka memang sudah di daerah situ dan tidak mau meninggalkan kampung itu, dan mereka selama ini aman-aman saja,” kata Kol Sahala Silalahi, Komandan Satgas Penerangan ITFET. Namun menurut Jubir P4TT Yuri O Thamrin, jumlah mereka adalah 200 orang.

“Mereka memang pernah menghubungi P4TT melalui telepon. Pada prinsipnya mereka minta bantuan pangan, jumlahnya menurut mereka sekitar 200 orang dan

seluruhnya santri,” kata Mas Yuri. Setelah menerima telepon tersebut, P4T kemudian menghubungi UNHCR. Tetapi kata Mas Yuri, mereka tidak pernah menelepon kembali.

Dari sisi Indonesia, baik Kol Sahala maupun Mas Yuri menegaskan, bahwa Indonesia tetap akan memberi tawaran untuk menetap di Timtim atau kembali ke Indonesia. Persoalannya, status mereka hingga saat itu belum jelas, apakah sebagai pengungsi atau IDP. Mengingat pemerintahan Timtim yang belum berjalan, mereka tentu tidak bisa dengan sendirinya dinyatakan sebagai warga Timtim.

Karena itu, untuk sementara ada yang menyatakan mereka sebagai pengungsi, tetapi ada pula yang menyatakan sebagai IDP. “Jika mereka tergolong IDP, mereka harus memberikan voluntary choice. Dan jika mereka memilih kembali ke Indonesia, kita harus menyediakan safe passage bagi mereka,” kata Mas Yuri.

Sayang, masalah ini seolah tak berjalan mendekati akhir. Terutama setelah mereka menolak status pengungsi maupun IDP. “Masak kami disebut pengungsi. Ini *kan* rumah kami sendiri,” kata mereka.

Penolakan status pengungsi dilakukan karena mereka tidak ingin memberi peluang kepada pihak mana pun untuk memulangkan ke Indonesia. Sudah menjadi ketetapan hati bahwa sampai kapan pun mereka akan berada di Timtim dan menjadi warga negara Timtim. Rupanya kembali ke Indonesia sama sekali tidak menarik, meskipun mereka adalah asli rakyat dan warga negara Indonesia.

Untuk mengatasi persoalan seperti itu, Indonesia kembali menekankan pentingnya menempatkan sebuah lembaga perwakilan. Mungkin bukan resmi perwakilan, melainkan hanya sebuah kantor untuk kepentingan bersama, yang disebut sebagai Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia atau KUKRI. Tentu usulan ini disambut baik. ***

BAB VIII

Bendera Merah Putih Tak Lagi Berkibar

Tanpa terasa, babak baru kehidupan Timtim mulai memperlihatkan denyutnya. Jabang bayi sebuah negeri itu mulai berbenah diri. Perlahan tetapi pasti, lembaga PBB sedikit demi sedikit menggeser kedudukan Indonesia. Semakin hari keberadaan Indonesia semakin tertepikan.

Dalam jumpa pers yang diadakan hari Senin (25/10/1999), Juru Bicara INTERFET Kolonel Mark Kelly dengan tegas mengatakan, INTERFET telah menempatkan orang-orangnya di wilayah pinggiran yang selama ini dipandang lebih rawan. Karena itu, INTERFET tidak menempatkan pasukan Australia melainkan pasukan Gurkha (Inggris), Thailand, atau Asia lain.

Tidak hanya itu, mulai hari Senin, INTERFET mengawal penempatan unsur-unsur PBB di seantero Timtim. Hari itu, mereka memberangkatkan rombongan besar petugas menuju Suai, Kovalima. Tujuan utamanya masih seputar kegiatan kemanusiaan. Mereka akan bekerja sama dengan OCHA.

Selain merupakan batas paling barat, Suai merupakan tempat yang juga menyimpan sejarah kelam. Di tempat ini terjadi pembunuhan massal yang menewaskan puluhan orang yang berlindung di Gereja Nosaceniore de Rosario de Fatima, termasuk Pastor Hillario Madeira, Romo Tarcisius Dewanto SJ, dan Frater Fransisco Soares.

Pada periode itu, baik INTERFET ataupun UNAMET memusatkan perhatian pada program repatriasi. Langkah itu penting karena menurut Jubir UNHCR, Jacques Fanquin, hingga Senin kemarin, pengungsi Timtim yang berhasil direpatriasi baru sekitar 20.000 jiwa. Dari jumlah itu, 13.200 di antaranya dikembalikan dari kantong-kantong pengungsian di Nusa Tenggara, Surabaya, dan Jakarta. Sedang 3.400 pengungsi pulang secara spontan langsung ke daerah masing-masing.

Semua itu dilakukan sebagai bagian dari persiapan pemerintahan sementara Timtim oleh PBB yang akan disebut sebagai United Nations Transitional Administration in East Timor atau UNTAET. Keputusan membentuk UNTAET telah disahkan oleh Dewan

Keamanan PBB, Senin, dan ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, Selasa (26 Oktober 1999). UNTAET terdiri dari 9.150 tentara Baret Biru atau Pasukan Perdamaian PBB yang akan menggantikan INTERFET, 1.640 polisi internasional, 200 pengamat militer, dan ratusan pegawai sipil.

Sekjen PBB Kofi Annan mempercayakan UNTAET kepada diplomat senior dari Brazil, Sergio Vieira de Mello (51). De Mello adalah Wakil Sekjen PBB untuk urusan Kemanusiaan. Sebelumnya, ia ikut terlibat dalam menyusun pemerintahan sipil PBB di Kosovo. Kepemimpinannya di UNTAET dipastikan tidak akan lebih dari enam bulan. Walau begitu, PBB belum menentukan siapa atau negara mana yang akan memimpin Pasukan Perdamaian PBB.

Jumpa pers hari itu tidak begitu banyak menyedot perhatian wartawan. Usai jumpa pers harian INTERFET itu, saya langsung lari ke Remixio menemui Xanana. Hari itu adalah giliran saya diterima secara khusus. Setelah hampir setiap hari bertemu, Xanana menyediakan diri untuk membuat wawancara khusus.

Xanana yang ramah langsung berubah ketika mendengar kata “paradigma baru” yang berkonotasi dengan TNI. Beban di hatinya seolah meluncur dan menjalar ke seluruh nadi di wajahnya. Dahi Xanana mengernyit, menciptakan kerutan yang tegas dan dalam. Kedua bola matanya menyorot tajam.

Istilah paradigma baru itu muncul begitu saja di benak saya ketika berhadapan dengan Xanana. Sebuah terminologi yang datang dari Mayjen Zacky Anwar Makarim ketika kami bertemu dan ngobrol di Jakarta. Entah karena memang saya tolol atau sangat awam dalam hal kemiliteran, sehingga ketika Pak Zacky meyakinkan bahwa TNI telah menggunakan paradigma baru dalam memandang masalah Timtim, ungkapan itu tersimpan di benak begitu saja. Ketika melihat reaksi Xanana, saya yakin, bahwa saya memang tolol dan awam dalam soal kemiliteran. Beruntung, pembahasan itu masih dalam tahap obrolan awal, belum wawancara resmi.

“Ah, saya sudah mendengar istilah itu sejak beberapa tahun lalu. Selalu disebut adanya paradigma baru, tetapi kenyataannya masih terus terjadi pembunuhan, teror, dan intimidasi,” ucapnya. Nada suara Xanana yang berat dan lembut, kali ini menjadi tinggi. “Itu istilahnya Zacky Anwar Makarim. Yah.. mereka selalu bilang TNI telah memasuki new paradigm tetapi ‘baru’ yang seperti apa dan paradigm yang seperti apa?” lanjutnya. Kali ini nadanya agak sinis.

Xanana lalu bercerita panjang lebar betapa ia telah berkali-kali merasa tertipu dengan istilah “paradigma baru” TNI tersebut. Saya hanya terpaku di depannya. Tanpa komentar dan tanpa menyela. Pembeberan Xanana yang tanpa sensor itu akhirnya membuat saya paham akan nada sinis di balik suaranya setiap kali menyinggung kata “paradigma baru”.



*Xanana saat diwawancara oleh penulis di Markas Falintil, Remixio, Aileu.
foto: Eddy Hasby*

Wawancara itu akhirnya berubah menjadi sebuah obrolan panjang. Karena itu, tak banyak yang bisa saya laporkan untuk pemberitaan. Untuk *Kompas* terbitan Selasa (26/10/1999), pada akhirnya saya hanya mengambil bagian yang menguntungkan kedua pihak. Dalam arti, pandangan Xanana dalam melihat hubungan kedua negara ke depan. Tentu poin ini saya ambil setelah berbicara dengan berbagai pihak, termasuk TNI tentang pentingnya menjalin kerja sama ke depan.

Pada kesempatan itu, Xanana menekankan kesediaannya untuk “kembali” ke Jakarta guna menegosiasikan berbagai persoalan yang masih menjadi ganjalan kedua pihak. “Kami semua mengharapkan pemerintahan yang baru akan melihat kebutuhan-kebutuhan, akan melihat bahwa kepentingan Timor Timur dan Indonesia sekarang adalah hubungan yang baik. Kami tidak mau melihat lagi ke belakang,” tegas Xanana dalam bahasa Indonesia yang sangat lancar dan fasih.

Ia bercerita ketika berada di New York, AS, ia bertemu Menlu Ali Alatas dan berbicara banyak hal tentang Timtim. Di depan Menlu Alatas, Xanana menegaskan terjadinya

kekerasan, kerusakan, dan pembunuhan di Timtim bukan dilakukan oleh rakyat Timtim yang ia istilahkan sebagai “pihak kami”, melainkan oleh oknum.

Mendengar penjelasan Xanana ini, saya tersenyum di kulum. “Ternyata Anda juga sudah seperti kami.. Bahwa semua ini dilakukan oknum, bukan tentara atau milisi.” Sesaat Xanana terdiam, namun akhirnya ia pun tertawa. “Sayang sekali. Seluruh kejadian itu kemudian merusak citra Indonesia. Saya bilang kepada Pak Alatas, kami bersedia ke Jakarta untuk bernegosiasi tentang banyak isu,” lanjutnya.

“Kami mau membantu Indonesia untuk memperbaiki citranya, tetapi pemerintah Indonesia harus bantu juga. Dalam arti, berhenti (memberi) bantuan kepada milisi, supaya tidak ada lagi ancaman dalam rekonstruksi Timor Timur. Bahwa menciptakan hubungan baik dengan Indonesia menjadi program yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat. Dan sekarang juga kami mau menegaskan kembali bahwa kami bukan musuh,” tegas Xanana.

Diusir...???!!!

Selasa (26/10/1999) malam, Eddy dan saya seperti biasa bertandang ke RT-Pang. Karena terlalu sering merepotkan tidak hanya soal makanan tetapi juga dari segi fasilitas pengiriman berita dan foto, kami berinisiatif membawa sekerat bir yang memang sangat mudah didapatkan di Dili. Kami cukup membelinya di lobi Hotel Dili yang tak jauh dari Turismo.

Entah mengapa, berkomunikasi dengan para personel ITFET terasa begitu nyaman. Tak peduli Kapten atau Brigjen. Andai semua unsur TNI seperti mereka sekarang ini, mungkin Indonesia akan lebih damai dan tidak harus menjadi bulan-bulan dunia. Seperti biasa kami makan malam bersama a la “kadarnya”, maaf, maksudnya a la perwira.

“Besok saya mau ke Kupang, kalian mau nitip apa?” kata Pak Suryo

“Ikan bakar Kupang, Pak,” jawab kami sekenanya.

Ketika Timtim sudah lepas dari pangkuan Bumi Pertiwi, santapan ikan bakar menjadi barang sangat langka. Seluruh pedagang ikan bakar yang semula berderet di sepanjang pantai, semuanya hilang, seiring dengan perkembangan politik yang ada. Karena itu, untuk mendapatkan kelezatan ikan bakar “anging mamiri” di Dili, hanyalah mimpi. Santapan itu kini harus dibeli di Kupang. Berarti harus jalan darat atau udara. Lebih khusus lagi, berarti, santapan itu menjadi amat sangat mahal.

Selain ikan bakar, saya meminta tolong Pak Suryo untuk sekaligus membawakan buku bantuan sekolah titipan Romo Ageng Marwata SJ. Romo Ageng sempat meminta bantuan buku dan peralatan sekolah kepada *Kompas* untuk satu-satunya sekolah yang masih beroperasi, yaitu SMA Santo Yoseph di Balide yang dikelolanya. Kiriman itu dititipkan pesawat Hercules TNI yang akan ke Kupang. Hari itu saya mendapat informasi bahwa kiriman untuk Rm Ageng sudah ada di Kupang. Tinggal menunggu Helikopter atau Hercules yang akan ke Dili.

Ternyata itu adalah kesempatan terakhir kami bersantap malam di RT-Pang. Tepat ketika Pak Suryo kembali ke Dili, Jumat (29/10/1999), kami sudah dilarang mendekati RT-Pang. Petang itu, kompleks Faroul sudah dijaga ketat oleh INTERFET. Tak ada lagi kawan-kawan dari batalyon 700 yang biasa berjaga bersama mereka.

Satu hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya adalah terputusnya akses yang sangat tiba-tiba. Menemui bangsa sendiri, sesama Indonesia di Timtim menjadi hal yang sangat sulit. Perkembangan itu memang bagian tak terpisahkan dari perjalanan Timtim. PBB pada akhirnya memutuskan untuk mengelola Timtim mulai hari Selasa (26/10/1999) itu juga. Dengan begitu, UNAMET, ITFET, maupun Satgas P4TT tidak lagi berfungsi.

Peran administratif secara resmi akan dipegang oleh Pemerintahan Transisi PBB, yaitu UNTAET. Secara teori memang seperti itu. Sayangnya, teori dan praktek tak selalu sama. Kenyataan di lapangan, Pemerintahan Transisi PBB atau UNTAET sendiri belum bisa dipastikan kapan bisa beroperasi. Karena, Ketua UNTAET Sergio Vieira de Mello baru akan tiba di Dili pada tanggal 10 November 1999. Ia akan bertugas secara resmi di Timtim hingga 31 Januari 2001.

Hanya, meski semua masih di atas kertas, sejak hari Selasa itu, bangsa Indonesia telah diusir dari Bumi Timor Loro Sa'e. Jujur, kenyataan ini jauh dari bayangan saya. Semula saya berpikir, Indonesia diberi kesempatan untuk meninggalkan wilayah itu secara baik-baik. Dalam arti, berpamitan dengan baik-baik, terutama kepada seluruh unsur pokok Timor Loro Sa'e seperti Xanana Gusmão, Taur Matan Ruak, Leandro Isaac, dan sebagainya. Bagaimana pun mereka inilah yang nantinya akan meneruskan jalinan hubungan dengan Indonesia. Dan acara pamitan dengan baik-baik adalah dasar jalinan pertemanan ke depan.

Sayang, itu semua hanya mimpi di siang hari. Hari itu juga bangsa Indonesia telah diusir. Bahkan di saat penyerahan baru dilakukan secara simbolis di atas kertas, dan Ian Martin, Ketua UNAMET yang berperan sebagai pejabat sementara UNTAET, pun belum

bertemu ITFET maupun Satgas P4TT. Hari Selasa itu Ian Martin masih mengatakan baru berusaha menemui ITFET dan P4TT untuk membahas teknis serah terima.

Selain itu, di awal perjanjian Indonesia masih berhak untuk berada di Timor Leste hingga tanggal 31 Oktober 1999, pukul 18.00. Karena itu, sama sekali saya tidak berpikir bahwa sejak hari itu seluruh warga Indonesia sudah harus berkumpul di Faroul. Sejak itu, Faroul menjadi tempat tertutup untuk kami.

Kota Dili sendiri tetap tenang. Tidak ada gejolak yang berarti. Satu-satunya hal yang meningkat adalah cacian dan makian kepada tentara Indonesia. Begitu PBB memutuskan, saat itu juga seluruh personel TNI yang berada di beberapa tempat vital seperti Makorem, Telkom, PLN, Pelabuhan, dan gudang logistik harus segera meninggalkan tempat-tempat tersebut dan berkumpul di Faroul dengan kawalan ketat INTERFET.

Penjagaan oleh INTERFET untuk mencegah kemungkinan terjadinya bentrok antara TNI dan masyarakat setempat yang sudah berjajar rapi dan padat di tepian sepanjang jalan menuju pelabuhan Dili. Di sepanjang jalan yang dilewati, masyarakat secara serentak mengeluarkan segala teriakan dan caci maki yang intinya meminta mereka segera pulang karena Timtim sudah bukan bagian dari Indonesia lagi. Siang itu, para prajurit TNI menuju pelabuhan untuk memasukkan perangkat ke KRI Teluk Penyau.

Kemarahan dari warga Timtim tentu masih bisa kami terima. Tetapi, “pengusiran” langsung oleh sebuah lembaga internasional adalah hal yang tidak bisa diterima. Bukankah mereka seharusnya tetap netral dan impartial? Seburuk itulah bangsa kami sehingga layak diperlakukan seperti itu? Mungkin kami memang pecundang, tetapi sulit dimengerti ketika orang masih terus memukuli musuh yang sudah menyerah dan mengaku kalah.

Jumat siang itu seharian saya berada di Hotel Turismo. Kami mendapat kabar bahwa Bank Dunia akan mengadakan jumpa pers. Bank Dunia diwakili Klaus Rohland, Direktur Kawasan Papua Niugini dan Kepulauan Pasifik. Ia didampingi Mario Viegas Carrascalao, mantan Duta Besar RI untuk Rumania. Intinya, Bank Dunia berkomitmen untuk tidak memberi pinjaman kepada Timtim karena baru menjadi negara. “Kami yakin, tidak akan baik jika satu negara yang baru mulai membangun diberatkan dengan utang. Oleh karena itu yang akan dilakukan adalah memberikan sebagian uang dari pemasukan kami kepada masyarakat Timtim,” kata Rohland.

Bantuan itu merupakan gabungan dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan negara-negara donor seperti Eropa, Australia, dan Jepang yang terhimpun

dalam Joint Assessment Mission (JAM). Untuk membantu rehabilitasi Timtim, Bank Dunia berkomitmen memberikan dana antara lima hingga 10 juta dollar AS. Dana itu akan diberikan secara bertahap pada periode dua atau tiga tahun. Selain itu, Bank Dunia juga menyatakan sanggup membantu Misi PBB di masa peralihan atau Untaet.

Bank Dunia itu sendiri tidak menjadi masalah bagi telinga saya. Ia baru memerah setelah mendengar omongan Mario Carrascalao. Saya paham jika Mario marah. Siapa sih yang tidak marah melihat kondisi Timtim yang luluh lantak? Tetapi sungguh saya tidak menduga, Mario akan mengeluarkan pendapat seperti itu tentang Indonesia. Seolah tidak ada setitik pun nilai positif Indonesia di mata Mario.

Untuk menghindari telinga yang semakin merah, saya memilih mundur dan menjauh. Di dalam hati saya berpikir, bukankah ia pernah menjadi warga negara Indonesia. Ia pun pernah menjadi Gubernur Timtim ketika masih berada di bawah pemerintahan RI. Lebih dari itu, bukankah ia pernah mewakili Indonesia ketika menjadi Duta Besar. Kalau memang tidak ada satu pun yang benar di Indonesia, kenapa tidak dia tolak saja jabatan Duta Besar waktu itu? Ah.. saya semakin tidak mengerti cara berpikir para politisi ini. Masih adakah nurani di hati mereka? Entahlah...

Sore itu, kami segera menuju RT-Pang. Hangat dan harumnya ikan bakar terasa sudah di ujung hidung. Selain itu, kami juga berniat mengambil titipan Romo Ageng. Dengan perut yang mulai keroncongan kami melangkah ke kediaman para Panglima dan perwira tinggi RI tersebut. Tetapi, apa yang kami dapati? Di hadapan kami telah terhampar serangkaian tentara INTERFET lengkap dengan senjata berat maupun ringan.

“Apa yang terjadi, Pak?” Terpaksa saya menghubungi Pak Suryo Prabowo melalui Inmarsat tepat di depan pagar RT-Pang.

“Kami sudah diusir, Rien!”

“Lho *kok*?”

“Ya, begitulah. Sekarang ini kami sudah tidak bisa kemana-mana, karena harus izin dan harus dikawal. Ikan bakar dan titipan Romo Ageng sudah ada, kamu bisa ambil?”

“Pak, saya telepon dari pagar RT-Pang, saya dilarang masuk oleh londo Ostrali ini.”

“Lho, jadi kamu di depan pagar?.”

“Ya, Pak.”

Saya kemudian melongok sedikit ke arah RT-Pang, sambil sekali lagi mencoba bernegosiasi dengan para londo Ostrali tersebut. Seolah tidak punya kata lain yang lebih enak didengar, prajurit INTERFET itu hanya mengatakan, “ini sudah menjadi kawasan kami, INTERFET. Tidak seorang pun diizinkan masuk.”

Ia sama sekali tidak peduli dengan penjelasan kami. Bahwa kami adalah wartawan Indonesia yang diundang khusus oleh Panglima INTERFET Mayjen Peter Cosgrove, dan mereka yang ada di dalam rumah itu adalah warga negara Indonesia. Sudah selayaknya jika INTERFET mengizinkan kami menemui mereka. Ketika penjelasan itu disampaikan, tentara INTERFET itu justru mengangkat senjata dalam posisi siaga.

“Huh.. Tentara di mana-mana sama ya Ed, sulit diajak omong! Apa alasannya kita tidak diizinkan menemui mereka?”

“*Nggak* tahu juga Mbak. Aneh! Padahal jelas-jelas kita mengenakan badge INTERFET, bisa-bisanya mereka *nggak* izinkan kita ya Mbak.” Eddy Hasby yang kalem itu pun akhirnya marah juga.

“Iya! Ed, kalau kasus ini dialami wartawan bule dan kebetulan INTERFET itu adalah tentara kita, pasti kita sudah kena tuduhan pelanggaran HAM. Bahkan pelanggaran HAM berat karena menghalangi wartawan melakukan tugas jurnalistiknya.” Hari itu saya benar-benar kesal!

“Memang tidak adil, ya, Mbak!”

Setelah segala upaya negosiasi gagal, kami memutuskan kembali ke Turismo. Waktu seolah bergerak cepat. Matahari telah meninggalkan peraduannya. Hari mulai gelap. Kami pun berjalan kaki kembali ke Turismo, meninggalkan ikan bakar dan titipan Romo Ageng.

Sampai Turismo, saya kembali menghubungi Pak Suryo untuk menanyakan rencana “pelepasan diri” dan penurunan bendera Merah Putih di RT-Pang. Dijelaskan, upacara penurunan Bendera Merah Putih akan diadakan di RT-Pang dan Bandara Komoro, dengan upacara sangat sederhana pukul 09.00 waktu setempat.

“Xanana, Taur dan lainnya diundang, Pak?”

“Kami ingin mengundang.. Serius! Kami benar-benar ingin mengundang.., tetapi gimana caranya? Kami sudah tidak bisa ke mana-mana, belum lagi harus melalui birokrasi INTERFET yang ruwet, padahal tinggal besok pagi..”

“Gampang, Pak! Jangan khawatir, birokrasi INTERFET yang ruwet masih bisa diterobos...”

“...?”

Saya paham, kami adalah satu-satunya pihak dari Indonesia yang masih bebas menemui Xanana, tanpa melalui birokrasi INTERFET. Karena itu, saya usul untuk menyampaikan undangan resmi ITFET kepada Xanana. “Kalau semua itu sudah ada, biar saya yang mengurus. Dijamin tidak pake birokrasi yang ruwet. Besok pagi undangan resminya saya ambil.”

Terpaksa Tulis Tangan

Sabtu (30/10/1999). Pukul 06.00 pagi, saya sudah berdiri di depan pagar RT-Pang. Seperti biasa, komunikasi dengan Pak Suryo Prabowo saya lakukan melalui inmarsat. Kali ini tidak di depan pagar, melainkan di depan kendaraan berat INTERFET. Saya tidak tahu apakah itu panser atau tank, tetapi bentuknya seperti itulah.

Seluruh pagar sudah tertutup oleh kendaraan berat INTERFET seperti itu.

Karena sudah tidak memiliki piranti apa pun, undangan resmi ITFET kepada pemimpin Timor Leste terpaksa ditulis secara “manual”, alias tulis tangan. Beruntung, tulisan tangan Pak Suryo cukup bagus. Mudah dibaca, berseni pula.

Ketika semua sudah siap, sesaat kami bingung. Sebel sekaligus geli juga. Sepertinya nasib perwira maupun prajurit TNI kali ini jauh lebih buruk dibanding seorang narapidana di penjara Jakarta. Meski di balik jeruji besi, napi di lembaga pemasyarakatan di Jakarta masih bisa berkomunikasi dengan pihak luar dan secara berkala boleh dikunjungi.

Tetapi yang ini, untuk menyampaikan undangan dari jendela ke pagar pun Pak Suryo tidak mampu. Saya tidak boleh masuk, sementara Pak Suryo tidak bisa keluar. Sementara jarak kami mungkin tak lebih jauh dari selemparan kerikil. Entah negosiasi apa yang dilakukan, tiba-tiba salah satu prajurit bisa keluar dan mengantar undangan tersebut. Tetapi ia benar-benar tidak melampaui garis INTERFET dan sedetik kemudian kembali ke RT-Pang.

Saya pun segera pergi dan mencari Leandro Isaac. Begitu undangan saya sodorkan, Leandro kaget dan setengah marah. Bukan marah kepada kami, tetapi kepada birokrasi yang luar biasa ketat.

“Kapan upacaranya?” tanya Leandro.

“Nanti jam 09.00.”

Leandro semakin kaget. Ia lalu mengontak Pak Suryo melalui inmarsat. Jelas ia amat sangat kecewa dengan kondisi tersebut. Terutama birokrasi yang berlebihan dari INTERFET. Ia juga kecewa karena tidak bisa menemui Pak Suryo secara pribadi. Saya tidak tahu mengapa birokrasi menjadi sangat rumit jika menyangkut segala hal yang “berbau” Indonesia? Sungguh saya tidak tahu.



*Memasuki kekuasaan TNI, Pantai Faroul, Dili, 29 Oktober 1999
foto: Eddy Hasby*

Pagi itu, Leandro tidak mengizinkan saya naik ojek ke Remixio. Ia lalu mencari kendaraan roda empat. Sayang tidak ada satu pun yang nganggur. Leandro tidak kehilangan akal. Ia menghentikan sebuah truk berwarna merah bertuliskan “Bombeiro”. Naiklah kami ke truk merah itu. Tak lain tak bukan truk itu adalah mobil pemadam kebakaran milik Portugal. Itulah kali pertama saya naik mobil pemadam kebakaran. Ah, yang penting sampai Remixio.

Sesampai di Remixio, kami langsung ke “rumah besar” Xanana. Undangan itu ia sampaikan. Begitu membaca, Xanana memastikan akan hadir dalam upacara tersebut. Bahkan Xanana langsung berpakaian. Ia mengganti pakaian harian dengan pakaian

kebesaran militer. Dengan kata lain, sejak sekitar pukul 08.30 pagi Xanana sudah sangat siap. Tinggal menunggu kendaraan yang bisa membawanya ke RT-Pang. Karena itu, Leandro pun mencegah saya untuk pulang duluan agar bisa bersama-sama ke RT-Pang.

Namun, tunggu punya tunggu mobil INTERFET tak kunjung datang. Akhirnya saya pamit, karena takut kehilangan momentum. Sebelum ke RT-Pang, saya mampir ke Turismo. Sesaat kemudian baru ke RT-Pang bersama wartawan Utusan Malaysia yang ingin wawancara terakhir dengan para perwira dan duta besar Indonesia.

Rasis dan Diskriminatif

Pagi itu timbul amarah yang luar biasa. Kami, baik yang dari Indonesia maupun Malaysia, sama sekali tidak bisa mengabadikan detik-detik terakhir bendera Merah Putih berkibar di bumi Timor Loro Sa'e. Begitu juga upacara penurunan bendera yang sangat bersejarah itu. Saya benar-benar luar biasa kesal. Saking marahnya, kami berdua hanya duduk-duduk di kursi marmer yang kebetulan terletak di depan tank INTERFET.

Awalnya, mereka masih sempat meminta kami menunggu, karena sedang ada pertemuan dengan Panglima INTERFET Mayjen Peter Cosgrove. Karena itu, kami pun duduk manis menunggu izin dari INTERFET. Setelah sekian lama menunggu, salah satu dari mereka mendekati kami. "Maaf, ini peraturan, demi keamanan tidak ada wartawan yang diizinkan memasuki kawasan ini," kata prajurit tersebut. Kalimat itu diucapkan 1,5 jam kemudian.

Apa alasan mereka tak mengizinkan kami meliput acara yang begitu penting itu? Apakah semata-mata karena kami berkulit gelap? Kalau hanya karena orang Indonesia, toh sudah dijelaskan bahwa rekan saya dari Malaysia. Lebih dari itu, saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa saya ikut operasi INTERFET semata-mata karena memenuhi undangan Mayjen Peter Cosgrove. Saking kesalnya, saya terpaksa membuka rahasia bahwa meski diundang tetapi kami tetap membiayai diri sendiri. Namun, semua itu tak membawa hasil.

Kesal, sebel, dan sakit hati saya memuncak ketika tahu bahwa 10 menit sebelum kami tiba di Faroul, mereka mengizinkan wartawan RTP Portugal yang jelas berkulit putih, untuk meliput pertemuan TNI dengan Panglima INTERFET Mayjen Peter Cosgrove. Mereka bahkan mewawancarai Kolonel Willem Rampangilei di ruang tamu RT-Pang, bukan di pagar seperti halnya kami. "Yah, kita lihatlah warna kulit kita. Kita ini *kan* kulit coklat, bukan putih," kata wartawan Utusan Malaysia tersebut.

Seluruh kejadian itu semakin menguatkan dugaan bahwa INTERFET rasis dan diskriminatif. Hal yang dari awal sudah saya alami. Sejak Indonesia menyerahkan Kodal kepada INTERFET, semestinya secara otomatis saya masuk dalam perlindungan INTERFET. Saat itu, Panglima Darurat Militer Mayjen TNI Kiki Syahnakri pun langsung menyerahkan saya kepada Mayjen Peter Cosgrove.

Namun, kenyataannya saya ditolak mentah-mentah. Tidak hanya saya, melainkan hampir seluruh wartawan kulit berwarna. Bahkan untuk mendekati Hotel Turismo, sebelum tangan kami menyentuh gerbangnya, pasukan INTERFET langsung menyiapkan senjatanya. Perih memang jika mengingat semua itu. Tak pernah saya tahu alasan INTERFET menolak kami.

Apakah hanya karena keindonesiaan kami yang kemudian dikaitkan dengan TNI? Jika memang demikian, alangkah malangnya INTERFET. Jelas, pendidikan tinggi dan peralatan canggih tidak membuat jiwa mereka menjadi besar serta membuka mata dan hati mereka. Karena, Wakil Panglima Falintil Taur Matan Ruak justru dari awal menerima kehadiran saya dengan baik. Bahkan tak jarang muncul julukan “orang kita yang di TNI” atau cukup dengan “orang kita”.

Ada sejuta amarah yang tersimpan di hati. Kenapa hal seperti ini tidak dianggap pelanggaran HAM? Bukankah meliput merupakan satu-satunya hak wartawan? Apakah karena Australia berkulit putih sehingga boleh melanggar hak meliput wartawan kulit berwarna? Sungguh saya tidak tahu. Jika kami dianggap teroris atau milisi, bukankah kami menggunakan badge resmi yang dikeluarkan INTERFET? Lebih dari itu, bukankah kami undangan langsung Mayjen Peter Cosgrove?

Mereka tidak seperti misi PBB lain. Misi PBB di Irak, UNIIMOG (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group) dan UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission), misalnya, jelas memperlakukan semua wartawan dengan setara.

Yang mereka lihat hanyalah profesi bukan warna kulit. Ketika mereka memberlakukan istilah “secure” untuk satu wilayah, aturan itu berlaku bagi semua wartawan. Begitu juga ketika mereka harus mengosongkan satu tempat dan menyelamatkan wartawan sebelum bom dijatuhkan, hal itu juga berlaku bagi semua wartawan. Bukan hanya wartawan untuk kelompok, etnis, atau warna kulit tertentu.

Hal serupa juga terjadi ketika bergabung dengan UNAMIR (United Nations Assistance Mission for Rwanda) di Rwanda. UNAMIR mempercayakan urusan wartawan kepada Mayor Guy Plante dari Kanada. Meski lebih sering mengenakan seragam hijau

militer Kanada dibanding seragam biru PBB, netralitas dan imparialitas Mayor Plante tidak pernah luntur.

Ia justru memberi perlindungan sangat khusus dan privilege sangat besar kepada para wartawan dari Afrika. Dengan alasan, resiko dan tingkat bahaya mereka jauh lebih tinggi dibanding wartawan lain. Walau begitu, ketika memasuki wilayah rawan, Mayor Plante membagikan rompi anti-peluru (flak jacket) PBB yang juga berwarna biru kepada semua wartawan.

Lebih dari itu, Mayor Plante tanpa ragu menyerahkan rompi anti-peluru miliknya yang berwarna hijau untuk saya kenakan. Itu terjadi karena saya datang belakangan dan tiba di Kigali, ibu kota Rwanda, bersama pasukan RPF. Jadi, saya tidak kebagian rompi anti-peluru PBB yang setiap hari harus dikenakan. Meski Rwanda adalah perang paling sadis untuk abad 20, tetapi keamanan setiap wartawan jelas terjamin.

Di kedua tempat itu, semua aturan, baik larangan maupun izin, diberlakukan kepada semua wartawan secara sama. Dalam arti, tidak hanya kepada wartawan tertentu atau yang menurut istilah sekarang embedded journalist. Di masa itu, memang belum ada embedded journalist. Wartawan adalah makhluk dengan segala kemerdekaan untuk menggali informasi dari semua sisi. Dalam hal ini, PBB benar-benar memberi fasilitas dan perlindungan yang setara.

Tetapi, mengapa di Timtim seperti ini? Mungkinkah karena INTERFET tidak mengenakan seragam dan baret biru PBB seperti halnya mereka? Ah.. tentu ini pertanyaan bodoh. Mereka memang bukan UN Peace Keeping Operation melainkan International Force for East Timor. Artinya, ya.. tentara multinasional.

Ah.., tentu itu pun jawaban bodoh. Karena apa pun namanya toh mereka tetap harus berada di bawah payung PBB. Dan, seperti tindakan Mayor Plante terhadap wartawan Afrika di Rwanda, bukankah seharusnya INTERFET pun memberi perlindungan lebih khusus kepada para wartawan Asia di Timtim? Sejuta pertanyaan itu akhirnya membuat saya tepekur. Diam seribu bahasa.

Bendera itu Turun dalam Sunyi...

Setelah ditunggu tak juga datang, tepat pukul 09.00 waktu setempat, upacara penurunan Sang Saka Merah Putih dari bumi Timor Loro Sa'e dilaksanakan tanpa kehadiran Xanana. Dengan sedikit menyesal saya sampaikan kepada Pak Suryo bahwa

Xanana sebenarnya sudah siap dari tadi pagi, tetapi dia tidak bisa berangkat tanpa pengawalan INTERFET.

Apa boleh buat, liputan peristiwa bersejarah itu akhirnya hanya bisa saya dapatkan melalui cerita. Bukan melihat dengan mata kepala sendiri, meski berada di tempat yang sama. Upacara penurunan bendera dipimpin Ketua Indonesian Task Force in East Timor (ITFET) Brigjen (Pol) JD Sitorus, di Markas Batalyon Lintas Udara (Linud) 700, kawasan Faroul, Dili barat, hari Sabtu tanggal 30 Oktober 1999.

Bendera Merah Putih diturunkan dengan perlahan dan penuh khidmat oleh Praka Sahabuddin, Pratu Mansur, dan Pratu Burhanuddin. Bendera lalu dilipat dan disimpan rapi. Sederhana itulah upacara penurunan bendera Merah Putih dari bumi Timor Loro Sa'e.

Tak sedikit pun terasakan denyut atau getaran dari upacara penurunan bendera itu. Tak pula bisa kami nikmati kibaran terakhir Sang Saka Merah Putih saat masih berdiri dan terpancang tegak di depan Markas Yon 700 itu. Tak pula terdengar alunan lagu kebangsaan "Indonesia Raya".

Tak ada pula dentuman genderang atau terompet yang biasa dilakukan dalam upacara kemiliteran. Tak sedikit pun suara-suara itu terekam dalam organ pendengaran kami. Bersama wartawan Utusan Malaysia itu, kami mengikuti detik-detik terakhir kibaran dan penurunan bendera Merah Putih, dari depan pagar RT-Pang.

Bendera Merah Putih diturunkan dalam suasana sunyi nan sepi. Bahkan mungkin tak seorang pun mengabadikan peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia tersebut. Semua itu semata-mata karena birokrasi yang berlebihan dari INTERFET. Dan entah mengapa, rencana penurunan bendera Merah Putih itu tidak pernah disebut dalam jumpa pers harian INTERFET. Padahal waktu itu, ada puluhan wartawan di Timtim, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Pada saat yang bersamaan, upacara serupa juga diadakan di bandara Komoro, dipimpin Komandan Lanud Letkol Pnb John Dalas SE. Upacara bersejarah itu hanya berlangsung selama sekitar tiga puluh menit. Selebihnya adalah ramah tamah a la kadarnya di RT-Pang dengan para undangan yang juga hanya beberapa. Misalnya, Brigjen Dunne, Brigjen Rezag Hayder, dan beberapa personel UNAMET, namun bukan Mayjen Peter Cosgrove atau Ian Martin.

Usai upacara, hampir seluruh personel sipil maupun militer yang ada di tempat itu benar-benar meninggalkan tempat. Sebagian ke bandara Komoro, sebagian ke pelabuhan.

Para pejabat Satgas P4TT, seluruh staf, dan pejabat ITFET menuju bandara Komoro dalam konvoi kendaraan PBB yang dikawal lima unit APC INTERFET.

Sementara itu, sebagian personel Korem 164/Wiradharma menuju pelabuhan Dili, melakukan embarkasi di KRI Teluk Peny. Seperti halnya para personel lain, mereka pun mendapat pengawalan INTERFET yang sangat ketat. Hampir di sepanjang jalan yang dilalui, para prajurit tidak lepas dari cacian dan makian masyarakat yang memenuhi jalan-jalan tersebut. Tepat di depan Gereja Motael, mereka mulai dilempari batu. Beruntung para prajurit tidak terpancing.

Jujur saya trenyuh melihat kejadian ini. Umur mereka mungkin tak lebih dari 20 tahun. Satu masa pertumbuhan yang penuh gejolak perjuangan menemukan jati diri. Di masa seperti itu, mereka harus menghadapi tantangan psikis yang begitu besar. Dicaci-maki, dilempari batu. Di saat gejolak emosi dan adrenalin mereka memuncak, mereka terancam dengan klausul pelanggaran HAM, jika sampai menggunakan senjata yang terus melekat di badan itu.

Ada keyakinan di dalam sana, bahwa sebagian besar dari mereka hanyalah menjalankan perintah tanpa pernah tahu apa dan untuk apa semua itu. Selama bersama mereka di Timtim, baru terpampang nyata di depan mata bahwa prajurit tidaklah berhak bertanya. Hati semakin trenyuh ketika melihat imbalan yang mereka terima. Rp 30.000 perhari pada saat harga sebungkus rokok mencapai Rp 40.000. Satu pemandangan yang benar-benar memilukan.

Buffer Zone

Sejak RI menyerahkan Kodal kepada INTERFET, Indonesia mulai mengurangi jumlah personelnnya. Dengan begitu, warga Indonesia di Timtim terdiri dari 925 personel TNI dan sekitar 30 anggota Satgas P4TT. Pekan lalu TNI telah menarik sekitar 150 personel melalui pelabuhan Dili.

Siang itu, seluruh prajurit Yon 700 masih berada di kompleks Faroul. Mereka menunggu KRI Teluk Banten yang belum juga terlihat di perairan Dili. “Saya tidak akan pernah meninggalkan mereka,” tegas Pak Suryo Prabowo.

Siang itu, bersama Eddy Hasby, kami menuju bandara Komoro, Dili. Teman-teman wartawan Asia lain seperti wartawan Malaysia dan Ramdani Sirait dari Kantor Berita

Antara, hari itu memutuskan ikut pulang ke negara masing-masing. Namun, mereka tidak menggunakan pesawat Indonesia, melainkan Hercules INTERFET menuju Darwin.

Di bandara, terlihat Mayjen Peter Cosgrove dan Ian Martin. Ternyata mereka memilih mengantar kepergian TNI dan seluruh warga negara Indonesia di bandara. Kedua pejabat tinggi asing itu secara khusus menyampaikan ucapan perpisahan kepada seluruh personel dan perwira TNI, serta para pejabat Indonesia, sebelum mereka meninggalkan Timtim secara resmi.

Bahkan di sela-sela itu, Cosgrove masih sempat berbicara dan bertanya-jawab dengan para wartawan. Sekali lagi ia menekankan keinginannya untuk bertemu Pangdam IX/ Udayana Mayjen TNI Adam Damiri untuk menyelesaikan kasus perbatasan. “Saya masih sangat mengharapkan bisa bertemu Jenderal Damiri. Kami mempunyai laporan bersama yang sudah disetujui kedua pihak,” katanya.

“Dalam laporan itu disebutkan, kita perlu menyelesaikan beberapa masalah dan meningkatkan koordinasi. Saya sangat ingin menyelesaikan persoalan itu, tetapi salah satu cara menyelesaikan adalah mungkin memang saya harus bertemu dengan Jenderal Damiri, dan kita harus membicarakan masalah itu, dan segera mulai membentuk kelompok kerja untuk menyelesaikan hal-hal praktis yang bisa diselesaikan,” lanjut Cosgrove.

“Kenapa pertemuan dengan Damiri begitu penting, padahal dia bukan pihak yang bertanggung jawab?” tanya wartawan.

“Kalau kita tidak bertemu pada level yang sama, lalu pada level apa kita bisa mulai pertemuan pada tingkat pertama, bagaimana kita melakukannya. TNI harus setuju pada apa yang telah diamandemenkan dalam negosiasi. Itulah hal penting yang telah kita buat.”

Ketika keinginan Cosgrove saya sampaikan kepada Pak Suryo, dengan kalem ia menjawab, “masalah perbatasan satu negara bukan tanggung jawab Pangdam, melainkan Panglima TNI. Dan untuk semua yang berurusan dengan Timtim, pemerintah telah menugaskan ITFET. Jadi, mestinya urusannya bukan dengan Pangdam, tetapi ITFET.”

Beberapa saat sebelumnya, tepatnya ketika Cosgrove mengungkapkan keinginan itu untuk pertama kalinya, Pak Suryo sudah menjelaskan, bahwa untuk menemui Pangdam, INTERFET harus menempuh prosedur yang semestinya, yaitu meminta izin kepada Panglima TNI. “Tetapi hingga saat ini Mayjen Cosgrove belum mengajukan surat permintaan tersebut,” kata Pak Suryo.

Pada kesempatan itu, Pak Suryo sekaligus membeberkan hasil kesepakatan yang diwujudkan dalam pernyataan bersama TNI-INTERFET. Kedua pihak menekankan

perlunya membuat buffer zone atau zona penyangga di wilayah perbatasan. Berikut disampaikan hasil pertemuan lengkap TNI dengan INTERFET, sesuai yang diberikan Wakil Komandan ITFET Kol (Czi) J Suryo Prabowo.

KESIMPULAN KASUS MOTAAIN

Sebab-sebab:

- Kurang memadainya koordinasi antara INTERFET dengan TNI/Brimob di perbatasan kurang memanfaatkan lembaga Joint Security Consultative Group (JSCG)
- Adanya reaksi yang berlebihan atau tidak tepat dari beberapa anggota TNI/Brimob di perbatasan Motaain
- Pemakaian peta berbeda antara TNI dengan INTERFET.

Faktor lain:

- Patroli INTERFET tidak berhasil mengendalikan pasukan secara memadai untuk mencegah pasukan tidak terlalu dekat dengan perbatasan.
- Kurang akuratnya informasi intelijen INTERFET. Waktu itu disebutkan ada pengungsi dan TNI/Polri di Motaain yang masuk dalam wilayah Timtim
- Persiapan dan koordinasi antara TNI dan Polri di perbatasan yang kurang memadai. (Tim investigasi memutuskan, tidak ada anggota milisi yang terlibat)
- Keberhasilan Letkol Erwin untuk menghentikan tembakan dan penilaian situasi secara cepat oleh Kopral Teong.

Saran:

- INTERFET dan pasukan TNI/Polri perlu membuat aturan untuk mencegah terjadinya perjumpaan secara tidak sengaja.
- Mengkonfirmasi secepat mungkin lokasi pos TNI kepada INTERFET
- Perlu membuat zona bebas pasukan (buffer zone) di perbatasan.
- Perlu membuat jalur komunikasi langsung antara INTERFET dengan markas TNI, yang bertanggung jawab untuk memperlancar lintas perbatasan bila diperlukan koordinasi cepat.
- Anggota TNI/Polri/Brimob di pos pemeriksaan tidak lagi menerapkan prosedur lepas tembakan untuk gerakan mendekat INTERFET
- Menempatkan perwira penghubung di semua pos perbatasan dan personel Unamet yang tidak bersenjata di pos pemeriksaan.

- Semua persetujuan dan pengaturan yang melibatkan INTERFET bersifat sementara dan untuk selanjutnya perlu ratifikasi PBB, melalui UNTAET.
- RI-PBB harus mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan persengketaan tentang posisi di perbatasan Timtim dan NTT, termasuk Ambeno

Penandatanganan:

Dari ITFET:	INTERFET HQ:
Kol Laut (P) Willem Rampangilei	Letkol Grutzner
Letkol Liliek Koeshadianto	Letkol Flowers
Letkol (Pol) Oegroseno	Major Bouquest
Kapt A Suryo	SSGT Hall

Observer:

Letkol Rao (Unamet)

Major Ayala (Unamet)

Karena ada informasi Xanana akan hadir, tim Satgas P4TT yang sudah siap pada pukul 11.15, terpaksa menunda keberangkatan mereka. Namun, ternyata yang ditunggu tak datang juga. Akhirnya tim Satgas P4TT memutuskan berangkat ke Jakarta pada pukul 13.00, meninggalkan Ketua Satgas P4TT Duta Besar Taufik Soedarba di bandara untuk menunggu Xanana.

Sambil menunggu kehadiran Xanana, Dubes Taufik Soedarba menjelaskan tentang masalah aset negara. Dikatakan, sudah ada kesepakatan tentang masalah itu, tetapi masih harus dibicarakan di New York. "Jadi aset yang harus diperhatikan adalah Pertamina, Telkom, PLN, Merpati Air-lines, mereka sewaktu-waktu akan menjadi penanaman modal asing di Timtim," katanya.

"Kalau masalah pengendalian itu tunggu UNTAET, karena pihak Indonesia tidak mau memutuskan apa yang sudah diberikan selama ini kepada rakyat Timtim, sehingga kerja UNTAET hanya menindaklanjuti apa yang telah ada. Kerja UNTAET akan lebih lancar lagi. Apa semuanya dikelola oleh UNTAET, akan ditangani bersama, karena bagaimana pun juga aset-aset itu milik negara. Oleh karena itu, semuanya akan dikelola ahli-ahli UNTAET dan ahli-ahli dari pemilik aset," lanjut Dubes Taufik.

Tentang pengelolaan telepon, ia mengatakan, untuk sementara ini akan dikelola dengan sistem pindah tangan. Karena itu, komunikasi akan lebih lancar seiring dengan kejelasan eksistensi UNTAET. “Bagaimana misi mereka bisa berhasil tanpa alat komunikasi. Kita bukan masalah keuangan, akan tetapi bagaimana masalah hubungan negara ini yang akan datang,” jelasnya.

Pak Dubes sempat pula bercerita adanya penilaian terhadap Indonesia yang tidak membantu atau minimal tidak memberikan sikap yang tidak membantu. “Atau menilai Indonesia sebagai sabotase, kita tidak mau itu. Jadi sekarang kepulauan kita ini membuat mereka, ada sesuatu yang bisa ditindaklanjuti. Masalah gedung-gedung milik pemerintah Indonesia akan dibicarakan di New York. Maksud dibicarakan, apakah mau dijual, mau minta imbalan,” kata Pak Dubes.

Walau begitu, Pak Dubes mengatakan tidak tahu ketika wartawan melempar pertanyaan apakah semua peninggalan atau sisa-sisa gedung yang tidak terbakar akan merupakan rampasan perang. “Saya tidak tahu, itu baru akan dibicarakan dalam waktu dekat ini di New York. Yang kita bicarakan di New York hanya masalah aset negara, bukan dibicarakan juga masalah rumah-rumah penduduk non-pribumi. Jadi yang dibicarakan nanti adalah masalah BUMN. Di Jakarta sedang dikumpulkan data-data tentang aset-aset negara yang ada di Timtim.” ujarnya.

Sementara itu, Pertamina dikelola oleh karyawan Pertamina sendiri. Sedang Telkom dan PLN, karena para ahlinya belum datang, kedua tempat itu dijaga ketat oleh pasukan INTERFET. “Bila orang-orang Telkom sudah masuk, maka akan dikelola dengan baik oleh orang-orang Telkom bersama UNTAET. Seperti Pertamina, keamanan, logistik, transport-nya sudah terjamin. Demikian juga PLN di Timtim semuanya dikelola oleh INTERFET. Tapi mereka hanya sebagai petugas sementara. Namun apa bila ada jaminan keamanan maka para teknisi dari PLN sendiri sudah masuk ke Timtim, dan ada jaminan keamanan, sehingga akan kelolah sendiri orang-orang PLN sendiri,” kata Pak Dubes.

Akhirnya Datang Juga!

“Temenmu *kok nggak* datang-datang, Rien. Dia sebenarnya mau datang atau tidak, sih?” kata Pak Suryo ketika Xanana tak kunjung datang juga. Ia terlihat mulai kesal.

“Pak, ini bukan faktor Xanana-nya. Saya tahu persis, Xanana benar-benar berkeinginan datang. Dari tadi pagi dia sudah siap, tinggal menunggu kendaraan INTERFET. Saya tidak tahu kenapa ia tidak datang-datang juga,” jawab saya.

Setengah jam kemudian, Xanana baru muncul. Tepat pukul 13.30, Xanana tiba di bandara Komoro, dengan pengawalan luar biasa ketat dari INTERFET. Konon jenis senjata yang dipakai kali ini adalah MP-5. Menurut Pak Suryo, MP-5 adalah sejenis sub-machine gun atau pistol mitraliur kaliber 9mm buatan Jerman. Biasanya senjata ini digunakan pasukan khusus untuk pertempuran jarak dekat (close quarter battle/CQB).

Melihat pengawalan yang luar biasa dan ekstra ketat itu, membuat saya bertanya-tanya, sebenarnya mereka ini penuh antisipasi hingga pada tingkat presisi, sangat khawatir, atau ketakutan yang juga luar biasa? Hmm.. entahlah. Yang pasti, di mata saya, jelas terlihat INTERFET sama sekali tidak percaya adanya perubahan perangai dan karakter TNI yang telah terjadi di era darurat militer hingga ITFET.

Kembali ke soal Xanana, entah apa yang menyebabkannya begitu terlambat. Karena saya tahu persis, ia sudah siap dengan pakaian kebesaran militer, sejak pagi tadi. Tinggal menunggu kendaraan INTERFET. Mungkinkah mendatangkan kendaraan INTERFET ke Remixio dari Dili yang hanya berjarak sekitar 12 kilometer, perlu waktu lebih dari empat jam? Apalagi Xanana menggunakan helikopter, bukan APC. Masak iya sih, untuk jarak sedekat itu perlu waktu empat jam? Ah..sudahlah.

Begitu tiba di bandara, Xanana langsung terlibat dalam pembicaraan yang begitu mengasyikkan dengan para perwira Indonesia. Seiring dengan itu, kelompok wartawan langsung diusir keluar dari ruangan. Kami semua lalu menunggu di halaman bandara.

Xanana disambut Dubes Taufik Soedarba, Brigjen (Pol) JD Sitorus, Kol (Czi) J Suryo Prabowo, dan Kol (Inf) Sahala Silalahi. Selama satu jam Xanana terlibat pembicaraan dengan seluruh perwira itu dalam suasana yang sangat akrab, terbuka, dan penuh persahabatan.

Seperti sudah menjadi sebuah kewajiban, usai bersama para perwira, Xanana kemudian menemui para wartawan. Sebelum mulai menjawab pertanyaan, Xanana terlebih dulu mengucapkan selamat kepada Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais yang terpilih sebagai Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua MPR. Ia berharap, bisa menjalin hubungan dengan lebih baik ke depan.

Dikatakan, dengan Indonesia mengembalikan status Timtim kepada PBB, berarti kesalahan dan permusuhan dalam hubungan Indonesia-Timtim telah berakhir. "Kesalahan historis antara kedua negara ini sudah berakhir. Ini adalah hal yang sangat bagus untuk kedua negara, guna memperbaiki (hubungan) di masa depan," kata Xanana.



Xanana berfoto bersama Kol. Sahala Silalahi, Kol (Czi) J Suryo Prabowo, dan Letkol (Pnb) John Dallas SE, sesaat sebelum TNI meninggalkan bumi Timor Loro Sa'e, Minggu, 31 Oktober 1999 - foto: Eddy Hasby



Kol (Czi) J Suryo Prabowo, Wakil Komandan ITFET menjabat erat tangan Panglima Falintil Kay Rala Xanana Gusmão, saat berpamitan sebelum kembali ke Jakarta foto: Eddy Hasby



*Xanana memeluk Duta Besar Taufik Sudarba sebelum kembali ke Jakarta.
foto: Eddy Hasby*

Seperti biasa, ketika melihat saya, Xanana langsung berbahasa Indonesia. Ia mengungkapkan keinginannya ke Jakarta. Mendengar keinginan itu, Dubes Taufik Soedarba menyarankan agar Xanana ke Jakarta pertengahan bulan November. Tepatnya, sepulang kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke luar negeri.

“Saya tidak tahu persisnya kapan, tetapi kira-kira pertengahan November. Selain bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati, saya ingin bertemu Jenderal Wiranto. Kita mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan bersama-sama,” ujarnya.

Hal itu diperkuat Kol (Czi) J Suryo Prabowo. Saat berbicara dengannya, Xanana meminta melupakan masa lalu sekaligus menyampaikan keinginan bertemu Jenderal Wiranto dan Panglima TNI yang baru. “Itu untuk menunjukkan komitmen dia bahwa dia benar-benar bisa mengerti yang sudah terjadi dan yang sudah lewat, dan dia benar-benar ingin forward looking,” kata Pak Suryo.

Xanana menggunakan kesempatan itu juga untuk bernostalgia. “Dia banyak cerita yang lucu-lucu dan dia memang menunjukkan komitmen dengan melepaskan Artawan, bahwa memang tidak ada dendam. Dia juga minta maaf belum semua anak muda bisa dia

handle, sehingga masih ada yang mengeluarkan kata-kata tidak enak. Xanana juga mengungkapkan keinginannya membuka perwakilan Timtim di Indonesia,” ujarnya.

Selamat Jalan...!!

Usai pelepasan, seluruh personel TNI menuju pesawat Hercules yang sudah disiapkan. “Selamat jalan, semoga kita bisa bertemu lagi,” kata seorang tentara Australia kepada personel TNI. Mereka berdua pun berjabat erat. Meski tak ada rasa duka dalam perpisahan itu, tetapi mereka tetap mengaku sedih. “Kami ini sudah dekat, jadi sedih juga kami berpisah,” kata Kapten N Hariyanto.

Tanpa terasa, langit telah menjadi jingga. Waktu tinggal pun semakin sempit. Karena itu, seluruh personel TNI segera memasuki pesawat Hercules. Persoalannya, masih ada ratusan prajurit Yon 700 yang berada di pelabuhan Dili, menunggu KRI Teluk Banten yang hingga detik-detik itu belum berada di perairan Dili.

Pihak Indonesia terlihat benar-benar menjaga agar tidak terjadi persoalan baru dari kasus ini. Misalnya, tuduhan meninggalkan para prajurit begitu saja, atau justru menggunakan kondisi itu sebagai alasan meminta perpanjangan waktu tinggal di Dili.

“Kamu siap mati, Rien?” tiba-tiba Pak Suryo melemparkan pertanyaan yang menurut saya aneh. Saya langsung menoleh ke Eddy Hasby.

“Kenapa, Pak? Kalau jelas mati sih, setiap saat saya siap. Yang tidak siap, kalau cuma setengah mati.. Ed.., gimana?”

“Ya, apa boleh buat, Mbak,” jawab Eddy kalem.

“Jadi kalian siap?”

“Mati hak prerogatifnya Tuhan, Pak.”

Pak Suryo kemudian membeberkan rencana yang menurut saya juga sedikit nekat. Karena dikejar batas waktu, tidak ada pilihan lain bagi seluruh perwira kecuali meninggalkan Dili saat itu juga. Persoalannya, sebagai perwira, mereka pun tidak bisa meninggalkan prajurit Yon 700 begitu saja. Untuk itu, mereka akan meninggalkan bandara Komoro dengan helikopter sebagai simbol telah meninggalkan Timtim secara resmi.

Dengan heli itu, mereka akan mencari keberadaan KRI Teluk Banten. Kemudian, bersama-sama kembali ke pelabuhan Dili untuk membawa pulang seluruh putera terbaik bangsa yang masih tertinggal tersebut. “Kita harus landing di atas kapal yang sedang berjalan dan para Penerbad (Penerbang TNI-AD) ini sama sekali belum pernah punya

pengalaman landing di atas kapal yang sedang berlayar. Kesalahan sedikit saja, akibatnya cuma satu, terbakar dan habis. Kalian siap?” jelas Pak Suryo.

“Siap!”

Untuk memasukkan kami berdua, Pak Suryo terpaksa menggeser dua perwira dari helikopter tersebut. Tepat pukul 17.05, helikopter yang membawa Pak Suryo, Pak JD Sitorus, Pak Sahala Silalahi, Eddy Hasby dan saya, lepas landas. Kapten (Inf) Agus Yaman dan Letda Kandek Prayitno yang mengawaki heli tersebut, melakukan hovering cukup lama sebelum akhirnya benar-benar melesat, meninggalkan bumi Loro Sa'e dan menembus langit biru yang mulai bergaris jingga. Sesaat kemudian, Dubes Taufik Soedarba dan kompi Paskhas TNI-AU juga lepas landas bersama Hercules TNI AU terakhir yang diawaki Letkol Pnb John Dalas SE.

Setelah “menelusuri” perairan Dili, sekitar 15 menit kemudian kami menemukan KRI Teluk Banten 516 yang dikawal KRI Teluk Nala 363. Meski sama sekali belum pernah belajar, bahkan konon, teorinya pun belum pernah mereka dapatkan, tepat pukul 17.20, Kapten Agus dan Letda Kandek berhasil dengan mulus mendaratkan helikopter di geladak kapal yang sedang berjalan dengan kecepatan 8 knot.

Ada kelegaan luar biasa di wajah para perwira itu ketika kami turun dan bergabung di KRI Teluk Banten. Seluruh keberhasilan itu tidak lepas dari panduan yang sangat profesional dari Komandan KRI Teluk Banten. Dalam komunikasi awal, komandan KRI Teluk Banten sempat menawarkan mengurangi laju kecepatan kapal yang mencapai 8 knot.

Awak heli mengatakan tidak perlu. Mereka berpikir 8 knot sudah cukup pelan. Belakangan baru diketahui bahwa 8 knot adalah kecepatan tertinggi KRI Teluk Banten. Selain itu, baru belakangan pula terungkap bahwa teori mendaratkan heli di geladak kapal yang sedang berlayar, baru saja mereka dapatkan dari para personel INTERFET. Hmm..luar biasa!

“Ini untuk pertama kalinya Penerbad menerbangkan pesawat dan landing di atas kapal yang sedang berjalan. Segala resiko ini saya tempuh untuk menunjukkan tanggung jawab seorang atasan kepada para prajuritnya. Bahwa sebagai perwira, saya tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ini penting,” tegas Pak Suryo.

Malam itu kami mendapat jamuan santap malam istimewa di KRI Teluk Banten. Menurut saya, perjamuan di kapal adalah yang paling sopan dan paling tertib dibanding perjamuan manapun. Usai santap malam, kami menuju anjungan depan, ruang nakhoda. Saya terpaku pada lautan lepas yang terhampar luas.



Dari kiri ke kanan: Komandan KRI Teluk Banten Letkol (P) Widodo, Kapten (Inf) Agus Yaman, Brigjen (Pol) JD Sitorus, Kol (Czi) J Suryo Prbowo, Kol. Shala Silalahi, dan Letda Kandeck Prayitno sesaat setelah helikopter yang diawaki Kapten Agus Yaman dan Letda Kandeck mendarat dengan mulus di atas geladak KRI Teluk Banten di perairan Dili.

foto: Eddy Hasby

Sementara Eddy sibuk mengabadikan seluruh moment menarik selama di KRI Teluk Banten. Sedang Pak Suryo mencoba berkomunikasi menggunakan radio dengan Komandan Batalyon Infantri Lintas Udara 700, Letkol Lukito. Ia kembali meyakinkan para prajurit bahwa para pimpinan ITFET tidak akan pernah meninggalkan mereka di Dili begitu saja.

Saya pun iseng mencari tahu latar belakang Pak Suryo terus-menerus meyakinkan para prajurit bahwa mereka tidak akan ditinggalkan begitu saja. Bukankah sudah seharusnya seperti itu? Karena prajurit adalah orang-orang yang berada di ujung tombak. Namun, menurut cerita yang saya dengar, hal seperti itu ternyata sering terjadi. Perwira atau atasan meninggalkan anak buahnya begitu saja. Ups! Gile beneerrr!!!!

Sekitar pukul 20.00, KRI Teluk Banten mulai merapat di pelabuhan Dili. Setelah semua siap, sesaat kemudian, Komandan Batalyon Linud 700, Letkol Lukito, menyerahkan bendera Merah Putih yang baru diturunkan dari bumi Timor Loro Sa'e, kepada Wakil

Komandan ITFET Kol (Czi) J Suryo Prabowo. Penyerahan yang dilakukan di atas KRI Teluk Banten itu sebagai tanda bahwa Indonesia telah benar-benar meninggalkan Timtim.

“Sedih, Pak?”

“Yah, kalau soal rasa.., namanya pribadi, ya saya tetap saja cinta Timor Timur, meskipun sudah satu tahun lalu jabatan Wagub (Wakil Gubernur) Timtim saya tinggalkan. Dan sekarang, karena cinta, saya di sini. Tidak ada musuh yang abadi dan teman yang abadi juga tidak ada. Ini realita,” kata Pak Suryo berfilosofi. Sebaliknya, Komandan Satgas Pengamanan ITFET Kol (Inf) Sahala Silalahi justru merasa lega. “Jelas saya lega, karena kami dengan damai meninggalkan bumi Loro Sa’e dan secara terhormat,” katanya.

Usai menerima, Pak Suryo menyimpan bendera Merah Putih terakhir yang berkibar di bumi Timor Loro Sa’e. Entah di mana. Ia lalu berjalan ke buritan kapal untuk melihat para prajurit Yon 700. Tetapi begitu sampai di bibir buritan, ia berhenti. Pak Suryo menolak melangkah ke kakinya di jembatan kayu, penyambung antara kapal dengan daratan. “Saya tidak mungkin turun dari kapal, karena ini sudah bukan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia lagi,” katanya memberi alasan.

Prajurit yang sudah dari tadi siang menunggu seolah tak sabar ingin segera memasuki badan kapal tersebut. Maklum, mereka sebelumnya didera kecemasan yang cukup mencekam. Rata-rata mereka risau akan ditinggalkan begitu saja oleh para pimpinan ITFET.

Saking cemasnya, mereka konon sempat menahan KRI Teluk Penyau ketika kapal itu akan bergerak ke perairan Dili. Padahal kapal itu telah terisi personel Korem 164/Wiradharma, sebagian personel ITFET dari TNI-AL, dan Brimob. Karena itu, begitu muncul tanda-tanda bahwa KRI Teluk Banten sudah mengarah ke pelabuhan Dili, KRI Teluk Penyau pun berlabuh ke perairan Dili.

Dengan wajah lega, satu persatu prajurit Yon 700 itu mulai memasuki KRI Teluk Banten bersama seluruh peralatan. Bedanya, mereka tetap tertib dan tidak berdesakan. Pada akhirnya mereka benar-benar di bawa kembali ke Ujung Pandang. Untuk menjemput seluruh prajurit, Indonesia mengirim KRI Teluk Penyau dan KRI Teluk Banten. Kedua kapal itu untuk membawa sekitar 536 personel dari 689 personel yang tersisa.

Hari Sabtu tengah malam, tepatnya pukul 00.00, KRI Teluk Banten yang membawa laskar Indonesia terakhir, menyusul KRI Teluk Penyu yang menunggu di perairan Dili. Malam itu, mereka menginap di perairan tersebut. Keesokan harinya, mereka benar-benar meninggalkan perairan Dili dan kembali ke Indonesia.

“*Hey, where do you come from?*” Pertanyaan dengan nada terkejut itu datang dari dua tentara INTERFET yang berjaga di pelabuhan dan kebetulan sedang berada tak begitu jauh dari lokasi KRI Teluk Banten. Mereka tidak menyangka akan menemukan dua warga Indonesia yang sedang melenggang dengan santai di dalam pelabuhan Dili. Maklum tempat itu pun dijaga dengan super ketat. Saat itu kami baru turun dari kapal dan akan kembali ke Turismo.

“*From that ship,*” jawab saya sambil menunjuk KRI Teluk Banten yang sedang bersiap untuk berlabuh.

“*What?*” kata tentara tersebut. Saya yakin ia pasti bingung bagaimana kami yang mengenakan badge INTERFET, bisa keluar dari kapal yang jelas-jelas datang dari Indonesia.

“*Where are you going?*”

“*Turismo Hotel, we are journalists, and we stay there..*” Beruntung, tentara kali ini cukup baik. Begitu melihat badge INTERFET tergantung di leher kami, ia membiarkan kami pergi.

Kami lalu mencoba ke RT-Pang untuk mengambil titipan Romo Ageng yang katanya ditinggal di kawasan tersebut. Heran, begitu TNI tak ada lagi, penjagaan tak seketat dan seluar biasa sebelumnya. Dan alangkah terkejut, kami menemukan tempat itu sudah porak-poranda. Titipan buku-buku dari Jakarta milik Romo Ageng tak lagi kami temukan.

Padahal, sebelum meninggalkan Timtim, Pak Suryo dengan sungguh-sungguh meminta Yon 700 untuk menjaga keutuhan kawasan Faroul. Ada setitik harapan, bahwa kali ini bangsa Indonesia bisa meninggalkan Timtim dengan gagah dan jiwa besar. Eh, *la kook* jadinya seperti ini? “Sembilan jam lalu, tempat itu masih mulus,” kata Pak Suryo dengan nada prihatin. Kenyataan itu membuat Pak Suryo dan seluruh pejabat ITFET “batal” meninggalkan bumi Timor Loro Sa’e dengan perasaan lega dan gagah. ***

Bab IX

Xanana Saudaraku

ADA rasa sepi yang menggelayut di hati kala menemukan kenyataan bahwa kaki ini tak lagi berpijak di tanah sendiri. Dalam konteks dan posisi yang berbeda, Xanana membahasakan perasaan itu dengan ungkapan “seperti ada sensasi tersendiri”. Bagi Xanana, kepergian seluruh unsur militer Indonesia dari bumi Timor Loro Sa’e merupakan pengakuan akan kemerdekaan yang telah mereka dapatkan.

“Ada sensasi tersendiri melihat bahwa telah ada pengakuan pada hak kami untuk merdeka,” kata Xanana sesaat setelah seluruh unsur militer Indonesia meninggalkan bumi Timor Loro Sa’e. Dan sejak saat itu, Xanana benar-benar berkeinginan membuka lembaran baru ke depan. Yaitu, merenda jalinan hubungan yang lebih baik dengan bangsa Indonesia.

Siang itu, kami mulai melangkah ke gereja Motael, bersiap-siap mengikuti upacara devosi kepada Bunda Maria. Ada getaran tersendiri ketika mengikuti upacara tersebut. Karena mungkin inilah kali pertama saya mengikuti upacara devosi kepada Bunda Maria dalam perayaan yang begitu meriah dan luar biasa.

Kota Dili seharian telah mempercantik diri. Mereka menghias kanan dan kiri jalan dari Gereja Motael hingga taman Bunda Maria Lecidere, Dili timur dengan janur yang dilengkungkan dan dihiasi aneka bunga. Hari itu mereka akan merayakan penutupan bulan Oktober sebagai bulan devosi kepada Bunda Maria. Bunda Maria, Ibunda Yesus Kristus memiliki arti dan tempat tersendiri di hati umat Katolik.

Kota itu begitu hidup. Sayang, suasana damai penuh kebersamaan itu perlahan sirna. Bahkan sama sekali tak tersisa ketika Uskup Dili Mgr Carloz Filipe Ximenes Belo SDB menyampaikan homili atau khotbah dalam perayaan Misa tersebut. Dan, di sinilah terjadi titik balik dalam pandangan saya terhadap Uskup Belo.

Sebagai satu dari ribuan dombanya, bagaimanapun saya tetap menempatkan Uskup Belo pada posisi yang cukup tinggi di hati saya. Berbagai cerita miring yang mengikuti perjalanan Uskup, masih saya lihat sebagai hal yang biasa. Ibarat sebuah pohon, semakin tinggi, ia akan semakin banyak diterpa angin.



*Bersiap-siap mengikuti Misa Kudus Devosi kepada Bunda Maria.
foto: Eddy Hasby*

Namun, seluruhnya berubah justru ketika saya mengikuti dengan cermat homili Uskup pada Misa Penutupan bulan Oktober, atau bulan devosi kepada Bunda Maria itu. Uskup menyampaikan khotbah dalam empat bahasa, yaitu Tetun, Portugis, Indonesia, dan Inggris. Sayang dari empat bahasa itu, hanya dua yang saya pahami yaitu Indonesia dan Inggris.

Dan, di sinilah persoalannya. Ketika menyampaikan homili dalam Bahasa Indonesia, tak sedikit pun kata yang menyejukkan hati. Dari awal hingga akhir, tak ada hal lain yang diangkat Uskup kecuali kejelekan Indonesia. “Jika kita disebut sebangsa dan setanah air, bangsa yang mana dan tanah air yang mana? Jika kita disebut satu saudara, saudara dari mana?”

Khusus kepada para pemimpin FPKD, BRIT, dan komandan milisi, tanpa basa-basi, Uskup dengan tegas menyebutkan bahwa tangan mereka berlumuran darah. Karena itu, agar bisa diterima kembali ke Timor, mereka terlebih dulu harus “menebus dosa”. Dalam arti, mereka harus membersihkan tangannya, mengakui kesalahannya, kemudian bersedia melakukan penitensi untuk mendapatkan pengampunan dosa.

Uskup mengungkapkan hal itu dengan berapi-api. Seolah-olah tak ada satu kebaikan pun yang pernah dilakukan Indonesia. Mungkin dari segi pemerintah dan militer, memang tidak ada yang bisa disebut benar dan baik. Tetapi Uskup lupa bahwa mereka yang tidak

pernah lari meninggalkan umatnya dan tetap bertahan di Dili dengan menghadapi segala resiko adalah misionaris Indonesia. Selain Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento, saat itu ada sekitar 150 misionaris Indonesia yang tetap bertahan di Timtim.

Uskup lupa bahwa para misionaris yang berjejer di baris terdepan dalam Misa Kudus itu sebagian besar adalah misionaris Indonesia. Bagi saya, malam itu mereka ditempatkan di baris terdepan bukan untuk mendapatkan penghormatan, melainkan semacam “pengadilan”. Tak sedikit pun tersimpan di hati Uskup pengorbanan hidup Romo Albrecht Karim SJ dan Romo Tarcisius Dewanto yang wafat dalam kerusuhan di Timtim. Romo Albrecht ditembak langsung di pastoran Taibesi, sedang Romo Dewanto yang baru tiga bulan ditahbiskan, wafat dalam kerusuhan massal di Suai, Kovalima.

Tak heran jika beberapa warga setempat kemudian membesarkan hati para misionaris tersebut. “Padre, jangan ucapan Bapa Uskup itu dimasukkan ke hati. Kami semua tahu yang telah dilakukan Padre selama jajak pendapat,” bisik seorang Ibu yang duduk persis di belakang Romo Ageng Marwata SJ.

Sebagai pastor senior, Romo Ageng tidak pernah meninggalkan Timtim. Ia pula yang selalu dihubungi Uskup Belo saat Uskup berada dalam pelarian. Begitu juga ketika Uskup kembali ke Dili, Rabu (6/10/1999), Romo Agenglah yang menjemput di bandara. Dibantu Sr Rosa Sarmento dan seorang Suster senior yang biasa dipanggil Suster Nenek, Romo Ageng pula yang mempersiapkan kamarnya di bagian belakang kediaman Uskup, Lecidere. Uskup menempati bagian belakang, karena bagian depan telah hangus terbakar.

Namun, tak ada sepatah pun kata terima kasih dalam homili Uskup malam itu. Tak ada! Terima kasih, *obrigado*, *gracias*, atau *thank you*, tak ada satu pun dari kata-kata itu yang terucap untuk bangsa atau minimal kepada para misionaris Indonesia yang bertahan di sana. Ucapan terima kasih yang tercatat di benak saya hanya ada dalam homili Uskup yang berbahasa Inggris. Kata *thank you* itu pun ia sampaikan kepada lembaga dan pihak internasional.

Hati saya miris mendengar homili Uskup. Dalam hati saya berbisik, benarkah saya sedang mendengarkan khotbah dari seorang peneriman Nobel Perdamaian? Benarkah ini khotbahnya? Rasa tidak aman kembali menyelimuti. Kondisi itu akhirnya membuat kami langsung cabut dan kembali ke Hotel Turismo. Upacara devosi kepada Bunda Maria itu terpaksa saya ikuti tanpa penerimaan Komuni Suci.

Malam itu, di hotel Turismo, saya duduk termenung. Ada dilema begitu berat ketika harus menuliskan berita itu. Sebagai wartawan, tentu saya harus selalu jujur pada fakta yang

saya temukan di lapangan. Tentu saya pun tidak bisa mengingkari ucapan Uskup Belo yang begitu dalam melukai hati bangsa Indonesia. Hati mereka yang tidak bersalah dan justru mengorbankan diri dan keselamatannya untuk rakyat Timor Timur. Mereka yang tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kondisi segenting apa pun.

Tetapi ketika hati ini hendak jujur, terbayang pula wajah Xanana, Taur Matan Ruak, dan Falur Rate Laec. Tiga tokoh Timtim yang tak pernah lepas dari senjata dan baju loreng namun justru selalu meniupkan angin perdamaian, rekonsiliasi, dan saling memaafkan. Tuhan, tolonglah hambaMu ini, bisik saya dalam hati.

Setelah melalui pergulatan batin yang cukup lama, akhirnya saya berpihak kepada Xanana, Taur, dan Falur. Di kolom yang begitu sempit di halaman harian *Kompas* itu, saya memilih untuk membantu upaya rekonsiliasi ketiga tokoh itu. Ungkapan menyakitkan Uskup Belo cukup saya simpan di dalam hati. Akhirnya saya menuliskan berita untuk dimuat di Harian *Kompas* seperti ini:

Uskup Belo: Kami Sedih Atas Kehancuran Ini

Puluhan Ribu Umat Rayakan Devosi Kepada Bunda Maria

Dili, *Kompas*

Uskup Diosis Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo SDB menyatakan sedih atas kehancuran yang terjadi di Timor Timur (Timtim). Walau begitu, ia mengatakan, tetap ingin bersahabat dan bekerja sama dengan pihak Indonesia.

Penegasan Uskup itu disampaikan saat memberikan homili di depan puluhan ribu umat Katolik di Lecidera, Dili, Timtim, Minggu (31/10) petang, saat merayakan puncak upacara devosi kepada Bunda Maria yang sekaligus menutup bulan Oktober sebagai bulan Maria.

Sejak sekitar pukul 14.00 waktu setempat, ribuan umat telah berkumpul di depan gereja Motael, Dili. Untuk pertama kalinya, mereka merayakan penutupan bulan devosi kepada Bunda Maria, setelah Timtim secara resmi melepaskan diri dari Indonesia.

Puluhan ribu umat itu berbaris rapi, mengarak patung Bunda Maria dari gereja Motael hingga ke taman Bunda Maria Lecidere, tepat di depan kediaman Uskup Belo. Barisan diawali dengan lambang-lambang wilayah, lalu serombongan bocah-bocah kecil yang berpakaian serba putih serta mengenakan ikatan bunga putih di kepala, bagaikan malaikat kecil.

Keharuan masih jelas tergambar di wajah seluruh umat itu. Tak seperti sebelumnya, setelah jajak pendapat ini mereka tampil dalam kesederhanaan. Pakaian apa adanya, serta sepasang sepatu atau sandal butut. "Ini pakaian saya satu-satunya yang masih bagus, karena semua sudah terbakar," kata salah satu warga.

Acara yang seluruhnya dalam komando pasukan INTERFET itu pun berlangsung khidmat dan singkat. Tanpa upacara penyalaan lilin. Usai menerima pesan Uskup, seluruh warga lalu meninggalkan tempat, saat matahari telah hilang ke peraduan.

Sehari sebelumnya, warga Dili mulai membersihkan sepanjang jalan dari gereja Motael hingga taman Bunda Maria Lcidere. Mereka pun menghiasi sepanjang jalan itu dengan kerajinan dari daun kelapa muda, serta membuat rumah-rumahan kecil, yang menyerupai gua Bunda Maria, yang juga dari daun kelapa muda.

Hargai

"Saudara-saudara dari bangsa Indonesia, kami menghargai Anda, kami mencintai Anda di seluruh nusantara, kami bergembira bahwa Anda telah memilih seorang Presiden dan seorang Wakil Presiden, secara demokratis. Kami memuja Anda karena Anda telah memasuki era baru, demokratisasi di Indonesia. Proficiat," kata Uskup Belo. Kali ini, Uskup menyampaikan pesannya dalam empat bahasa, yaitu Tetum, Portugis, Indonesia, dan Inggris.

"Akan tetapi, kami juga harus menyatakan bahwa kami sedih atas kehancuran yang telah dibuat oleh oknum-oknum jenderal Anda. Walaupun pangkatnya jenderal, bagi kami itu harus diturunkan sampai kopral dan sersan, atas kerusakan-kerusakan ini," lanjutnya.

Lebih lanjut Uskup menekankan, selama 24 tahun ini, Indonesia tidak berhasil membangun Timtim. "Bapak Presiden baru pernah menyatakan, tanpa Timor Timur Indonesia bisa hidup, tanpa Indonesia, Timor Timur tidak akan hidup. Tanpa atau dengan, Timor Timur akan tetap hidup Bapak Presiden," tegas Uskup.

Walau begitu, ia tetap membuka keinginan untuk tetap bersahabat dan bekerja sama dengan Indonesia. "Tetapi, kita akan tetap sahabat. Dan kalian, orang-orang yang berbisnis dari Surabaya, silakan datang menanam modal Anda. Kalian yang biarawan atau biarawati, tetapi bekerja di Timor Timur, ini gereja Anda, silakan," ujarnya.

Khusus kepada rakyat Timtim, Uskup yang berpesan dalam bahasa Tetum menekankan perlunya rekonsiliasi untuk membicarakan dan menyelesaikan seluruh persoalan. "Di Timtim pada umumnya, tidak ada orang yang saling membenci, tidak ada orang yang saling memusuhi, berkelahi dengan benda-benda tajam, karena selama ini sudah banyak penderitaan rakyat," kata Uskup.

"Kita banyak yang meninggal, dan kita harus melepaskan semua itu menuju ke rekonsiliasi," tegasnya. Rekonsiliasi, lanjutnya, juga termasuk kesediaan untuk menerima dan bergandengan dengan saudara-saudara dari agama lain, terutama dalam membangun negara baru Timor Loro Sa'e.

Imbau untuk kembali

Ia juga mengimbau seluruh rakyat Timtim untuk kembali. "Timtim tanah kelahiran kalian. Di sini kalian punya keluarga, kalian punya rumah, kalian adat istiadat, dan kalian punya makam keluarga, kalian punya gereja, cepatlah kembali ke tanah kelahiran kalian, jangan menjadi pembantu di negeri orang," lanjut Uskup.

Khusus kepada para pemimpin FPDK, BRIT, dan para Komandan Milisi, Uskup Belo menegaskan, tanah Timtim adalah milik mereka. Uskup menegaskan, mereka bisa kembali sejauh bersedia memberi penjelasan kepada tanah Timor Loro Sa'e alasan mereka membakar rumah dan membunuh orang. "Kalian perlu kembali ke Timtim. Karena kami anggap, kalian adalah masyarakat Timtim dan kami melihat, kita rakyat Timtim hanyalah sedikit, karena itu kita saling membutuhkan untuk membangun Timor Loro Sa'e," tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya memelihara moral Katolik dan kembali mengikuti jejak Tuhan. Secara khusus ia berpesan untuk tidak menjarah sembarangan dan menghargai gedung perkantoran. Masalah moral itu juga ia tekankan kepada para pemimpin CNRT. Dikatakan, tanpa moral, para pemimpin CNRT itu ibarat ikan dengan kepala hancur.

Dalam pesan bahasa Inggrisnya, Uskup berterima kasih kepada seluruh komunitas internasional yang telah terlibat dalam upaya perdamaian dan pembangunan Timtim sekarang ini. (rie)

Setelah homili Uskup, secara pribadi saya merasa kembali berada pada situasi yang tidak aman. Karena itu, tak banyak kegiatan yang kemudian saya lakukan. Ini tentu berbeda dengan Eddy Hasby. Resiko apa pun harus dia tempuh. Sebagai fotografer profesional, ia tetap harus berada di lapangan untuk mengabadikan detik-detik bersejarah ini secara langsung.

Sementara saya hanya berani berjalan-jalan di seputar hotel Turismo. Dan alangkah terkejut, ketika kembali ke Hotel Turismo, di tempat itu saya bertemu dengan Duta Besar

AS untuk Indonesia, Dubes Robert Gelbard. Dubes Gelbard pun sama sekali tidak menduga masih akan menemukan wartawan Indonesia di tempat itu.

“Are you sure, you are from Indonesia?”

“Yes, Mr. Ambassador. I am a 100 percent Indonesian.”

Pertanyaan seperti itu mungkin perlu diajukan mengingat tampang dan penampilan saya yang lebih cocok menjadi orang Timtim daripada orang Yogya. Beruntung, Dubes Gelbard ditemani William Gary Gray, diplomat AS yang sangat fasih berbahasa Indonesia dan sudah saya kenal sejak tahun 1996. Tepatnya ketika saya menyempatkan diri melihat dari dekat cara AS mendidik dan mempersiapkan para diplomatnya.

Dan seperti bisa diduga, setelah dibantu diyakinkan oleh Pak Gray bahwa saya benar-benar orang Indonesia, kami akhirnya terlibat dalam obrolan yang mengasyikkan. Setelah cukup lama bersama Dubes Gelbard, kami meluncur ke Santa Cruz, untuk menghadiri misa arwah yang diadakan pada setiap tanggal 2 November. “Perjalanan” sehari itu akhirnya saya tuangkan ke dalam berita sebagai berikut:

DUBES AS YAKIN PEMERINTAH RI BISA HENTIKAN KEGIATAN MILISI

Dili, *Kompas*

Pemerintah Amerika Serikat (AS) merasa yakin, pemerintahan baru Indonesia, di bawah pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, akan segera mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kemungkinan keterlibatan elemen TNI di balik kegiatan para milisi. AS juga menekankan perlunya segera menghentikan kegiatan para milisi di Timor barat.

Penegasan itu disampaikan Dubes AS untuk Indonesia Robert S Gelbard kepada wartawan di Hotel Turismo, Dili, Timor Timur (Timtim), Selasa (2/11), seperti dilaporkan wartawan *Kompas* Rien Kuntari dari Dili. Gelbard berada di Timtim untuk lawatan sehari, setelah kunjungan ke Kupang dan Atambua. Di tempat itu, ia menemui seluruh unsur pemerintah, pengungsi, dan tiga pemimpin kelompok milisi, serta berbicara panjang lebar dengan UNHCR, LSM, Uskup Kupang Mgr Petrus Turang, dan Gubernur NTT Piet A Talo.

Dubes yang baru sebulan di Indonesia itu mengakui, adanya perbedaan lingkungan di Indonesia belakangan ini, karena terbentuknya pemerintahan baru yang terpilih secara

demokratis. Dalam hal ini, di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid, AS optimis, Indonesia akan menjadi salah satu negara demokratis terbesar.

Dikatakan, Presiden AS Bill Clinton, minggu lalu, menghubungi Presiden Abdurrahman Wahid. Menlu Madeline Albright juga menghubungi mitranya di Indonesia. "Kami sangat terkesan dengan antusiasme pemerintahan baru ini, dan kami sangat berharap bisa bekerja sama lebih erat di masa datang," ujarnya. Langkah itu penting karena menurut Gelbard masih banyak persoalan yang harus dibicarakan bersama, tidak hanya soal Timor, baik Timor barat maupun Timtim.

Menyinggung kondisi Timtim sekarang, Gelbard mengatakan, hal yang paling penting adalah melakukan rekonstruksi dan konstruksi Timtim, hingga terbentuk pemerintahan, ekonomi, dan kemerdekaan baru. Walau begitu, untuk jangka pendek ini, AS sangat menekankan pentingnya repatriasi pengungsi dari Timor barat ke Timtim.

AS sangat concern terhadap persoalan itu, terutama karena masih banyak pengungsi yang berada di Timor barat yang berhak untuk kembali ke Timtim, dan masih aktifnya kelompok milisi di sana. "Tidak diragukan lagi bahwa kelompok milisi itu masih aktif di kamp-kamp pengungsi dan masih terus melakukan intimidasi kepada orang-orang yang secara suka rela akan kembali ke Timtim," jelasnya.

Harus dihentikan

Ia juga memprihatinkan masih adanya unsur TNI yang terlibat di balik kegiatan para milisi tersebut. Ditegaskan, hal itu harus dihentikan. Menurut dia, banyak pengungsi yang tetap ingin kembali ke Timtim. Karena itu, perlu ada jaminan bagi mereka untuk tidak terkena intimidasi maupun tekanan dari pihak mana pun.

"Saya yakin, bahwa pemerintah baru di bawah pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melakukannya, dan terutama di bawah Menteri Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan," kata Gelbard.

"Saya yakin, pemerintahan baru ini sadar bahwa seluruh mata di dunia ini sedang memperhatikan, jadi pasti pemerintah baru ini akan punya komitmen kuat untuk menyelesaikannya. Tetapi kami sangat mengharapkan, seluruh kegiatan para milisi itu segera bisa dihentikan," tegasnya.

Menjawab pertanyaan tentang tiga pemimpin kelompok milisi yang ditemui, Gelbard mengatakan, hanya mengingat satu nama, yaitu Tito Batista. Ia mengakui, sangat ingin bertemu dengan Eurico Guterres dan Joao Tavares, namun mereka berdua tidak ada di tempat. "Pembicaraannya sangat menarik, ada ungkapan menarik tentang masa depan mereka, tetapi saya tidak bisa merinci karena pembicaraan ini bersifat rahasia," ujarnya.

Uskup Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo SDB melakukan tabur bunga di pemakaman Santa Cruz. Bagi umat Katolik tanggal 2 November merupakan hari untuk mendoakan arwah para saudara maupun kerabat yang sudah meninggal. Upacara itu diikuti oleh hampir seluruh rakyat Timtim.*

Tim Alfa, 'PR' INTERFET

Hari itu, kami mulai bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta. Relatif tugas sudah selesai. Karena itu, sekali lagi kami menanyakan kemungkinan mengunjungi dan menengok ke-24 anggota Tim Alfa yang masih dalam tahanan INTERFET dan belum ada tanda-tanda penyelesaian atau penanganan kepada mereka.

“Kami belum tahu,” kata Kapten Liston. Kalimat itu terus ia sampaikan setiap kali saya menanyakan kemungkinan tersebut. Bahkan hingga akhirnya kami pamit untuk kembali ke Jakarta, jawaban Liston tetap tidak berubah.

Kejelasan dari INTERFET perlu didapat karena bagaimana pun ke-24 orang itu tetaplah bangsa Indonesia. Selain itu, sesalah apa pun mereka toh tetap harus diproses. Persoalannya, sejak ditangkap, akhir September lalu, sama sekali tak ada kejelasan akan nasib mereka. Seiring dengan bergulirnya hari, teka-teki nasib ke-24 personel Alfa itu semakin besar.

“PR” ini sengaja dititipkan oleh Wakil Komandan ITFET Kol (Czi) J Suryo Prabowo. Sebelum resmi meninggalkan Timtim, Pak Suryo kembali mengingatkan kami untuk menanyakan nasib ke-24 anggota milisi Alfa tersebut. Sayang, tugas itu tidak bisa kami lakukan dengan baik.

Hingga kami benar-benar meninggalkan bumi Timor Loro Sa'e, tak sedetik pun INTERFET mengizinkan kami menengok mereka. Bahkan INTERFET tidak pernah bersedia memastikan tempat penahanan mereka. Mereka tidak menolak atau membenarkan informasi yang saya dengar bahwa mereka ditawan di lanud. Sekali lagi saya tidak tahu apa alasan di balik itu semua.

Teka-teki baru sedikit terkuak sekitar dua bulan kemudian, setelah kami berada di Jakarta. Saat itu, Pak Suryo bercerita betapa ia kaget dan merasa dibohongi oleh INTERFET. Pasalnya, di hari pertama penugasannya sebagai Wakil Komandan ITFET, diperoleh informasi bahwa INTERFET telah menggelar operasi di Qom, Los Palos.

Mereka kemudian menangkap 24 orang yang diduga milisi anggota Tim Alfa, dengan 14 pucuk senjata.

Ketika masalah itu diklarifikasikan dalam forum JSCG, awalnya, INTERFET tidak mengakui hal tersebut. Baru beberapa saat kemudian, masalah itu diakui oleh INTERFET. INTERFET kemudian mengizinkan ITFET melihat ke-24 orang yang ditawan tersebut. “Saya merasa lega karena 24 orang yang dikabarkan sebagai milisi bahkan anggota Kopassus itu ternyata sama sekali tidak benar,” kata Pak Suryo.

Dua bulan kemudian, pemberitaan tentang penangkapan itu baru muncul di media massa. “Dari pemberitaan itu saya baru tahu kalau saat itu saya dibohongi INTERFET,” kata Pak Suryo. Menurut pemberitaan itu, INTERFET telah menangkap Joni Marques, Komandan milisi Alfa, di daerah Qom, Los Palos, pada tanggal 27 September 1999. Johny Marques inilah yang kemudian memberi kesaksian di depan KPP HAM. Kesaksian Joni Marques dipandang telah merugikan TNI.

“Padahal saat saya meninjau tahanan INTERFET, orang itu tidak berada di sana dan tidak terdapat dalam daftar tahanan, atau disembunyikan? Sampai saat ini saya tidak bisa mengerti, mengapa organisasi INTERFET yang begitu dipercaya oleh PBB, masih juga ada penipunya. Tidak jelas, penipunya adalah oknum atau institusi INTERFET,” kata Pak Suryo.

Memang pada bulan September itu, ke-24 orang yang masuk dalam daftar tahanan INTERFET, terdiri dari Jaka da Costa, Paulino Miranda, David Lopez, Gilberto Fernandez, Agustino Formanas, Lamberto Lumez, America de Olivera, Inasia dos Santos, Aldofo da Costa, Ziberto da Costa, Manuel dos Santos, Carlos Pereira, Juaquil Fernandes, Suse da Costa, Lamberto dos Santos, Ronald Lobeze, Marianu Baros Ximenes, Nicolau dos Reis, Alarico da Costa, Alarico dos Santos, Aligusta da Costa, Pirio Victor, Joneo Fractus, dan Feliciano Fernandes. Tidak ada nama Joni Marques.

Xanana, Saudaraku

Entah mengapa, tiba-tiba ada rasa gundah dan resah yang menjalar di sekujur tubuh. Mungkin karena kami merasa tugas meliput pelepasan Timor Timur dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah selesai. Timtim, provinsi ke-27 RI itu kini tidak lagi menjadi salah satu bilik dalam rumah besar kami.

Meski kecil, ia menjelma menjadi sebuah rumah sendiri. Karena itu, kami pun harus segera kembali ke rumah kami, Indonesia. Di sisi lain, berat rasanya menerima kenyataan, kami telah “kehilangan” satu dari 27 anggota keluarga besar kami.

Segala kegundahan itu saya bawa ke mana pun saya pergi. Hari itu, sengaja saya meluangkan waktu untuk berpamitan kepada semua pihak di Timor Timur. Esok hari, Kamis, 4 November 1999, kami memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Kami menumpang pesawat Hercules INTERFET namun milik AS. Kami menuju Darwin, untuk selanjutnya ke Jakarta.

Betapa berat ketika harus mengucapkan salam perpisahan kepada seluruh kawan yang telah membantu memperlancar segala pekerjaan kami. Sungguh, sulit rasanya melihat kawan-kawan seperti Metha, Lourenco, Kak Manuel, Kak Fathi, David Diaz Ximenes, Leandro Isaac, hingga Falur Rate Laec dan Taur Matan Ruak yang tak lagi menjadi bagian dari jalinan keluarga besar kami.

Begitu juga ketika saya bertemu Xanana. Ada rasa sedih luar biasa ketika harus berpamitan dan berpisah darinya. Satu perpisahan yang bukan lagi antarsaudara, melainkan sebuah perpisahan yang menjadikannya sebagai tetangga. Hal senada pun dirasakan oleh pihak Xanana. Karena itu, Natacha Louise yang waktu itu menjabat sebagai support office to the CNRT President, secara khusus memberikan nomor telepon sekaligus alamat *e-mail*, agar kami bisa terus kontak dengan mereka.

“Xanana, saya menghormati hak rakyat Timtim untuk menentukan nasibnya sendiri, tetapi saya lebih senang jika kita bersaudara dalam satu rumah dan satu atap, bukan bertetangga.” Kalimat itu saya ucapkan sambil terbata-bata ketika berpamitan dengan Xanana yang telah resmi menjadi pemimpin negeri baru tersebut.

Mendengar itu, Xanana memeluk erat. Ia tak kuasa menahan air yang mengambang di ujung mata bulatnya. “Meski sekarang kita bertetangga, tetapi kita tetap bersaudara. Kamu tetap saudara saya,” ujarnya lirih. Air mata saya tak berhenti berlinang. Selamat tinggal, saudaraku...***

EPILOG

MEDIO 3 Januari 2000. Wajah Timor Timur (Tintim), bekas provinsi ke-27 Negara Kesatuan RI itu tak lagi murung. Ia mulai menggeliat. Diawali dengan tekad masyarakat Tintim yang kini memilih menyebut dirinya sebagai Bumi Loro Sa'e itu untuk mengembalikan tempat tinggalnya. Mereka mulai menempatkan kembali genting dan seng sebagai atap rumah yang sempat hilang dan terbakar dalam peristiwa September kelabu tahun 1999 lalu.

Di pinggir-pinggir jalan di sepanjang kota Dili, telah bermunculan beberapa restoran atau kafe. Sementara itu, anggota masyarakat lain sibuk menunggu dagangan yang terdiri dari barang keperluan sehari-hari. Dari gula pasir, hingga Coca-cola atau bir. Di salah satu jalan di wilayah Audian, dari balik sebuah toko besar yang berpintu besi dan dijaga pasukan INTERFET, tampak timbunan bersak-sak semen.

Suasana Natal pun masih jelas terasa. Hampir di setiap sudut jalan, mereka mendirikan tiruan palungan, tempat kelahiran Yesus Kristus. "Tapi Natalan kami di sini tetap sepi. Sepertinya tidak ada Tahun Baru atau abad baru," kata Jose yang sehari-hari mencari pemasukan dengan menjadi sopir ojek. Jose sendiri sudah mulai sedikit menarik nafas.

"Harga-harga sudah mulai turun," jelasnya. Memang harga tak lagi melambung tinggi. "Saya sementara ini ikut bantu-bantu proyek PBB ini. Yah, sekadar mencari pemasukan," kata Manuel Guterres. Walau begitu, tak berarti persoalan selesai. Kebutuhan primer di Tintim masih jauh dari tercukupi.

"Kapan ke sini lagi, titip sepatu, dong, celana, atau kaos," begitu rata-rata kata mereka. Kondisi ini sangat berbeda dengan medio November 1999, saat *Kompas* meninggalkan Tintim setelah mengikuti operasi INTERFET. Pada periode Oktober-November, Tintim bisa dikatakan mundur jauh ke belakang. Infrastruktur habis, roda ekonomi mati.

PEMANDANGAN seperti itu memang tidak lagi tampak di Dili, saat ini. Wajah Tintim mulai berseri. Meski amat sangat perlahan, namun roda ekonomi wilayah itu mulai dijalankan. Namun, tetap belum ada gambaran pasti tentang masa depan bekas provinsi termuda Indonesia itu.

Untuk membawa Timtim menghadapi masa depan, Ketua UNTAET (Misi PBB untuk masa pemerintahan transisi di Timtim), Sergio Viera de Melo membentuk Dewan Konsultasi Nasional, yang terdiri dari 11 putera Timor, lima anggota UNTAET. Tujuh putra Timor dari CNRT, tiga putera Timor lain dari kelompok pro-otonomi, yaitu BRTT, FPDK, dan PMD. Satu Timor mewakili gereja Katolik. Dewan yang dipimpin langsung Ketua UNTAET de Melo itu menjadi badan politik tertinggi di Timor Loro Sa'e.

Walau begitu, ia mengakui, mengembalikan Timtim seperti dalam kondisi semula memerlukan waktu cukup panjang. "Kita tidak bisa memulihkan perekonomian dalam semalam. Kita butuh upaya dan dana cukup besar untuk mendukung investasi, membangun kembali gedung-gedung. Sebenarnya, program rekonstruksi ini akan memulai pemulihan ekonomi lebih cepat karena bisa menampung tenaga kerja," ujarnya.

Pembangunan Timtim memerlukan total dana 523 juta dollar AS untuk masa tiga tahun. Sedang untuk keperluan administrasi di Timtim, UNTAET mematok pada angka 30 juta dollar AS untuk tahun 2000 saja. "Dengan itu, kita bisa menggaji tenaga lokal, kami berharap semua itu bisa menjadi awal pemulihan ekonomi. Tapi tentunya kita memerlukan waktu beberapa bulan," kata De Mello. Cukupkah?

Tentu tidak. Uang dalam jumlah berapa pun tidak akan pernah cukup. Timor Loro Sa'e yang berarti "negeri" matahari terbit, tak berkembang seindah namanya. Negeri itu telah luluh lantak, baik secara fisik maupun psikis. Intrik dan persaingan politik seolah telah menjadi bagian tak terpisahkan, bahkan jauh sebelum negeri itu 'dilahirkan'.

Sejak zaman Portugis hingga Indonesia, wilayah itu seperti dijadikan ajang latihan bagi para politikus. Setelah meletus Revolusi Bunga (Revolucao dos Cravos) di Portugal, 25 April 1974, banyak petinggi Portugal yang dibuang ke Timtim. Namun justru di tempat pembuangan inilah, para Portugal putih itu belajar berpolitik. Umumnya, pejabat Portugal lulusan Timtim mampu memupuk karir setinggi langit. Hal yang kurang lebih sama di era Indonesia. Seperti telah menjadi rahasia umum, banyak Jenderal berbintang di Indonesia yang juga "lulusan" dan "didikan" Timtim.

Dengan latar belakang sejarah seperti ini, rasanya akan sulit bagi Timtim untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri. Terutama ketika muncul fakta di lapangan tentang banyaknya konflik pribadi yang mencuat menjadi konflik organisasi. Terlalu jelas tergambar, setelah lepas dari Indonesia, bukan perdamaian yang mereka dapatkan, melainkan intrik dan persaingan baru.

Karena itu, sebelum Timtim bisa bersepakat untuk menjunjung langit yang sama di mana bumi dipijak, menepis dan meletakkan kepentingan pribadi jauh di bawah kepentingan bersama, siapa pun yang akan memimpin, ia takkan pernah mampu membuat Timor Loro Sa'e benar-benar menjadi tempat terbitnya matahari...***

Kronologi Lepasnya Timor Timur

1998

21 Mei

Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Ia menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Wakil Presiden BJ Habibie.

19 Desember

Perdana Menteri Australia John Howard mengirim surat kepada Presiden BJ Habibie, mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri atau *right to self-determination* bagi rakyat Timtim.

1999

25 Januari

Rapat Polkam membahas disposisi Presiden BJ Habibie tentang surat Howard. Dalam disposisinya, Habibie mengatakan, "Tolong dipelajari, apakah setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Timtim masih merasa belum cukup bersatu dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melalui Sidang Umum MPR."

27 Januari

Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan keputusan Sidang Kabinet di Bina Graha yang memakan waktu lebih dari lima jam, yaitu Indonesia akan *hands-off* dari Timtim jika Timtim menolak opsi I, yaitu tawaran otonomi khusus yang sangat diperluas. Sebelumnya sidang berjalan alot. Dua menteri, Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Akbar Tandjung menolak keputusan tersebut. Sebaliknya, Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) /Panglima TNI Jenderal Wiranto menerima keputusan tersebut.

10 Februari

Kay Rala Xanana Gusmão dipindahkan dari LP Cipinang ke tahanan rumah di Salemba.

8-10 Maret

Terjadi eksodus besar-besaran warga pendatang Timtim, bersama ribuan ton barang.

6 April 1999

Kekerasan di Gereja Liquica yang menyebabkan ratusan orang mengungsi.

17 April

Terjadi kerusuhan massal di Dili yang antara lain menewaskan putera aktivis pro-kemerdekaan Manuel Viegas Carrascalao dan perusakan kantor Harian Suara Timor Timur (STT).

21 April

Kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan menandatangani kesepakatan damai di kediaman Uskup Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo SDB, antara lain disaksikan Menhankam/Pangab TNI Jenderal Wiranto, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Djoko Soegianto, dan Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento.

27 April

Presiden Habibie membahas lebih dalam tentang Timtim dengan Perdana Menteri Australia John Howard. Habibie mengungkapkan akan melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan sebenarnya rakyat Timtim, tetap berintegrasi atau memisahkan diri dari Indonesia. Rencana awalnya, penentuan pendapat akan dilaksanakan tanggal 8 Agustus 1999.

5 Mei

Menteri Luar Negeri (Menlu) Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama, bersama Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat pada tanggal 8 Agustus 1999 di Timor Timur, di Markas PBB New York. Indonesia tetap bertanggung jawab pada keamanan pelaksanaan tersebut. Disepakati, tanggung jawab keamanan akan diserahkan kepada Polri yang dibantu TNI. Hal itu tertuang dalam dua kesepakatan, yaitu

- Kesepakatan tentang modalitas pelaksanaan penentuan pendapat melalui jajak pendapat
- Kesepakatan tentang Polisi (Polri) sebagai penanggung jawab keamanan

7 Mei

Sidang Umum PBB menerima dengan bulat kesepakatan 5 Mei 1999.

17 Mei

Presiden BJ Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 43/1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan RI-Portugal tentang Timtim. Keppres itu dimantapkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 5/1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal.

11 Mei

Presiden BJ Habibie membentuk tim pengamanan implementasi penentuan pendapat tentang status Timtim. Presiden menunjuk Menko Polkam Feisal Tanjung sebagai penanggung jawab, dengan anggota Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto, Menlu Ali Alatas, Mensesneg/Menkeh Muladi, Mendagri Syarwan Hamid, dan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) ZA Maulani.

21 Mei

Melalui Mensesneg/Menkeh Muladi, pemerintah Indonesia meminta PBB memajukan pelaksanaan penentuan pendapat, dari rencana awal tanggal 8 Agustus menjadi tanggal 7 Agustus 1999. "Tanggal 8 (Agustus), itu hari libur, hari Minggu, kita menghoramti umat

Katolik, jadi jajak pendapat 7 Agustus,” kata Muladi. Namun, keputusan itu mengherankan Menlu Ali Alatas. “Pemerintah belum membahas, apalagi menentukan tanggal,” katanya.

1 Juni

Bendera biru PBB mulai berkibar di bumi Timor Loro Sa'e

2 Juni

Pemerintah membentuk Satgas P3TT yang didasarkan pada Inpres No 5/1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal. Satgas diketuai Duta Besar (Dubes) Agus Tarmidzi dengan Sekretaris/Koordinator Sudjadnan Parnohadiningrat, dan Penasihat Keamanan Mayjen Zacky Anwar Makarim.

3 Juni

Peresmian Misi PBB di Timor Timur (UNAMET) dengan Ketua Ian Martin, di Dili yang diwarnai kerusuhan. Tiga hari kemudian, Wakil Panglima Pejuang Integrasi (PPI) Eurico Guterres memprotes Unamet.

4 Juni

Tim Satgas P3TT mulai memasuki Timtim.

11 Juni

UNAMET resmi membuka kantor di Dili.

16-18 Juni

Pertemuan kedua (second meeting) kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan di Jakarta. Dalam pertemuan ini, mereka sepakat menyerahkan senjata yang dimiliki kelompok senjata kedua pihak, kepada UNAMET atau pemerintah RI.

23 Juni

Indonesia mengirimkan 4.452 anggota Polri untuk mengamankan pelaksanaan jajak pendapat di Timtim.

26 Juni

Sekjen PBB Kofi Annan memutuskan menunda pelaksanaan jajak pendapat di Timtim, dua minggu dari tanggal yang sudah ditentukan, dari tanggal 8 Agustus menjadi 21 Agustus.

25-30 Juni

Dialog Dare II antara kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan diselenggarakan di Hotel Sheraton, Cengkareng, Jakarta. Kedua kelompok sepakat mengembangkan dan memperdalam asas saling pengertian. Dialog antara lain dihadiri tokoh PPI Joao Tavares, Eurico Guterres, Xanana Gusmão, Ramos Horta, Uskup Baucau Mgr. Basilio do Nascimento.

29 Juni

Kantor UNAMET di Maliana diserang.

9 Juli

Ketua DPD PDIP Megawati Soekarnoputri berkunjung ke Timtim.

16 Juli – 8 Agustus

Masa pendaftaran penentuan pendapat. Secara umum, hari pertama pendaftaran berlangsung aman, kecuali di kecamatan Zumalai, Kovalima, terjadi kerusuhan, dengan satu korban tewas dan lima luka-luka

26 Juli

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdurrahman Wahid berkunjung ke Timtim. Selain itu, dimulai kantonisasi yang untuk kelompok Falintil dilakukan di Uai Mori, Viqueque.

28 Juli

PBB memberi keputusan akhir pelaksanaan jajak pendapat, yaitu tanggal 30 Agustus 1999

3 Agustus

Sekjen PBB memutuskan memperpanjang mandat UNAMET sampai tanggal 30 September 1999.

13 Agustus

Komandan Korem (Danrem) 164/Wiradharma Kol (Inf) Tono Suratman digantikan Kol (Inf) M Noer Muis

14 – 26 Agustus

Masa kampanye dibuka dengan kampanye bersama kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan di auditorium UNAMET, Sabtu, 14 Agustus 1999. Kedua pihak sepakat menciptakan kampanye damai hingga putaran terakhir.

18 Agustus

Ramos Horta mengancam akan melumpuhkan sistem komputer dan memboikot pariwisata Indonesia.

25 Agustus

Putaran terakhir kampanye pro-kemerdekaan yang juga diwarnai kerusuhan. Setidaknya dua orang tewas.

26 Agustus

Putaran terakhir kampanye untuk pro-otonomi diwarnai dengan kerusuhan massal yang memuncak di Bekora dan Kuluhun. Setidaknya, empat tewas, yaitu Virgelio Martin Pinto, mantan anggota DPRD Tk II Viqueque dan Apolinario Pio, keduanya pendukung pro-otonomi, serta Bernadino Guterres dan Marcus Nunes, pendukung kemerdekaan. Dua

wartawan tertembak, yaitu Kornelis Kewa dari harian *Kompas* dan Bea Wiharta dari kantor berita Reuters.

27 Agustus

Sekjen PBB kembali memperpanjang masa tugas UNAMET hingga 30 November 1999.

27 dan 28 Agustus

Pertemuan kedua pihak, pro-otonomi dan pro-kemerdekaan di kantor UNAMET Dili dan di Baucau.

28-29 Agustus

Masa tenang, tetapi masih terjadi kerusuhan.

30 Agustus

Masa pelaksanaan jajak pendapat yang berlangsung dengan relatif aman dan diikuti hampir seluruh warga Timtim.

31 Agustus

Suasana Timtim kembali tidak menentu, terjadi kerusuhan di mana-mana. Kelompok milisi menghadang dan mengepung sekitar 150 staf UNAMET untuk wilayah Ermera yang akan menuju Dili, di Atsabe dan Gleno. Seiring dengan itu, Wakil Panglima PPI Eurico Guterres mulai memblokade seluruh akses keluar dari Timtim, baik darat, laut, maupun udara.

1 September

Terjadi eksodus besar-besaran warga Timtim. Meski berniat memblokade, namun, Eurico Guterres dan seluruh pasukan PPI tidak menghalang-halangi warga Timtim yang akan eksodus. Kota Dili semakin mencekam. Milisi menyerang markas Unamet di Balide. Tiga anggota milisi memukuli koresponden BBC News untuk Indonesia Jonathan Head yang terjebak di kantor UNAMET, dengan popor senjata laras panjang dan menendang kepalanya. Jonathan terselamatkan oleh rompi yang ia kenakan. Sementara, wartawan lain diberondong dengan peluru. Sekitar 15 menit sebelumnya, Pangdam IX/Udayana Mayjen

Adam Damiri secara lisan menjamin keselamatan seluruh wartawan. Sebagian staf PBB mulai evakuasi.

2 September

Rapat dengar pendapat antara Komisi Pemilu dengan pihak pro-otonomi tentang berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan jajak pendapat. Terjadi sweeping, wartawan mulai eksodus. Tim *Kompas* sempat mendapat ancaman mati, namun seluruhnya selamat. Kantor UNAMET Maliana terbakar, seluruh staf diungsikan ke Dili.

3 September

Sekjen PBB menyampaikan hasil jajak pendapat kepada Dewan Keamanan PBB, 344.580 suara menolak otonomi (78,5 persen), 94.388 suara menerima otonomi (21 persen), dan 7.985 suara dinyatakan invalid. Terjadi eksodus lagi di kalangan wartawan asing, nasional, maupun lokal. Muncul daftar dan rencana pembunuhan terhadap 14 tokoh elit politik Timtim.

4 September

Hasil jajak pendapat secara resmi diumumkan di Dili. Sesaat kemudian, terjadi kerusuhan yang bersifat massal di Dili. Salah satu pihak tidak bisa menerima kekalahan, mereka langsung menghamburkan tembakan. Front Bersama untuk Otonomi Timtim (UNIF) protes keras dan menolak hasil jajak pendapat. Mereka mengutuk keras gaya dan cara kerja Unamet yang tidak netral, memihak, bahkan manipulatif. Presiden BJ Habibie menyatakan menerima hasil jajak pendapat.

5 September

Kadispen Polda Timtim Kapten (Pol) Widodo DS mencatat, sekitar 10.000 warga Timtim "tertumpuk" di Mapolda. Dari jumlah itu, sebagian telah diberangkatkan dengan kendaraan seadanya, namun masih ada sekitar 7.317 orang yang menunggu tiga kapal AL. Kantor Bupati Aileu terbakar. Menhamkam/Panglima TNI Jenderal Wiranto secara khusus berkunjung ke Timtim, bersama Menko Polkam Feisal Tanjung, Menlu Ali Alatas, Mensesneg/Menkeh Muladi, dan Kapolri Jenderal (Pol) Roesmanhadi.

6 September

Kediaman Uskup Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo SDB dibakar. Uskup diselamatkan ke Mapolda tanpa luka sedikit pun, lalu dilarikan ke Keuskupan Baucau oleh seorang Perwira TNI, menggunakan helikopter Polri BO 105. Selanjutnya, ia ke Darwin dengan pesawat UNAMET dalam balutan rompi biru bertuliskan UN, menggunakan nama Luis Rouchette. Ia lalu ke Lisabon dan ke negara Eropa lain. Juga terjadi serangan kepada massa yang mengungsi di Gereja Nosaceniore de Rosario de Fatima, Suai, Kovalima. Diperkirakan 27 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Termasuk Romo Tarcisius Dewanto SJ, Pastor Hilario Mandeira Pr, dan Pastor Fransisco Tavares dos Reis Pr. Tokoh pro-kemerdekaan yang juga anggota KPS, Mauhudu, diungsikan ke Kupang, menggunakan helikopter KPS.

7 September

Timor Timur luluh lantak. Pemerintah Indonesia menerapkan Darurat Militer. Mayjen TNI Kiki Syahnakri diangkat sebagai Panglima Penguasa Darurat Militer dan Letkol Laut (P) Willem Rampangilei, Komandan Satgas Penerangan PDM.

8 September

Sebanyak 42 dari 57 anggota Koramil Soibada membelot ke Falintil. Pukul 07.15 mereka menjadi beringas. Serma Felisberto tiba-tiba mengokang senjata dan langsung mengarahkan kepada Kapten IGK Artawan, Komandan Koramil Soibada di wilayah Kodim Manatuto. Kapten Artawan lari menyelamatkan diri ke pastoran Soibada. Ia diterima oleh Pastor Julio Crispin Ximenes Belo. Selanjutnya, ia diamankan ke Markas Falintil Uai Mori. Seiring dengan ketidakjelasan nasib Mauhudu, Kapten Artawan akhirnya dijadikan semacam 'jaminan'.

11 September

Anggota milisi Besi Merah Putih menembak mati Romo Karl Albrecht Karim Arbie SJ (78) di pastoran Loyola, Taibesi, Dili Timur, sekitar pukul 21.15 waktu setempat. Menlu Ali Alatas ke New York menyampaikan persetujuan Indonesia pada pengiriman Pasukan Multinasional PBB.

14 September

Presiden BJ Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dilakukan pada malam hari.

15 September

Selaras dengan Piagam PBB Pasal VII, Sekjen PBB mengadopsi resolusi pembentukan dan pengiriman pasukan multinasional ke Timor yang kemudian disebut INTERFET atau International Force for East Timor. Komandan INTERFET Mayjen Peter Cosgrove dari Australia dengan Wakil Mayjen Songkitti Jaggabatra dari Thailand.

17 September

PDM memberi fasilitas helikopter untuk membuktikan kebenaran kabar tentang Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento. Ia selamat, tanpa luka sedikit pun. Tak seperti kabar yang beredar bahwa Uskup Baucau melarikan diri ke gunung setelah tangannya terbacok.

18 September

Pembakaran masih terus terjadi. Dimulai pengiriman bantuan pangan melalui udara karena kondisi yang memburuk.

19 September

Pukul 13.00 waktu setempat, rombongan Komandan INTERFET Mayjen Peter Cosgrove tiba di bandara Komoro, Dili, menggunakan pesawat Royal Australian Air Force, dari Darwin. Ia didampingi Wakil INTERFET Mayjen Songkitti Jaggabatra.

20 September

Pukul 06.42 pagi waktu setempat (pukul 07.42 WIB), pesawat Hercules milik Royal Australian Air Force, bernomor A97-011 mendarat di bandara Komoro, Dili. Pesawat pertama yang mengangkut tentara INTERFET dari Australia.

21 September

Sander Robert Thoenes (30), wartawan Financial Times biro Jakarta, dibunuh di Bekora, Dili timur. Wartawan eksodus lagi.

23 September

Jakarta memutuskan mencabut masa Darurat Militer melalui Keputusan Presiden RI Nomor 112 Tahun 1999 tentang pencabutan Keputusan Presiden RI Nomor 107 Tahun 1999 tentang keadaan Darurat Militer di provinsi Timor Timur. Keputusan pencabutan diambil melalui sidang Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional di Bina Graha. Keppres berlaku sejak ditetapkan, yaitu tanggal 23 September 1999. Penyerahan Kodal, 27 September 1999.

25 September

Wartawan Indonesia namun bekerja untuk Asia Press, Agus Mulyawan, dibunuh bersama Sr Herminia FDDC (Italia), Sr Celeste FDDC, Fr Fernando Pr, Fr Jacinto Pr, Fr Falerio Pr (Portugal), serta dua pemuda dan seorang sopir, di Qom, oleh Tim Alfa, milisi di Los Palos.

26 September

Tepat pukul 09.13 waktu setempat, KRI Teluk Rate meninggalkan pelabuhan Laga, Baucau membawa pasukan Yon 432 menuju Ujung Pandang. Sesaat kemudian, KRI Teluk Kao membawa pasukan Yon 401 ke Semarang.

27 September

Pukul 09.00 waktu setempat, Komando dan Pengendalian (Kodal) keamanan diserahkan oleh Panglima PDM Mayjen Kiki Syahnakri kepada Mayjen Peter Cosgrove, Panglima INTERFET. Acara berlangsung tertutup dan hanya 30 menit di Markas Komando Resor Militer (Makorem), Dili. Pukul 14.00 waktu setempat, seluruh unsur TNI meninggalkan Dili. Sejak hari itu, TNI tinggal satu batalyon. Yaitu, Yon 700, satu kompi Marinir TNI AL, Paskhas TNI AU, dan Brigade Mobil (Brimob) Polisi, yang disebut ITFET atau Indonesian Task Force in East Timor dengan Komandan Brigjen (Pol) JD Sitorus dan Wakil Komandan Kol (Czi) J Suryo Prabowo. Di atas kertas, jumlah mereka sekitar 1.000 personel, dalam prakteknya, hanya 900 personel. Selaras dengan Resolusi PBB No 1264,

ITFET merupakan wujud nyata pengakuan dunia internasional atas kedaulatan Indonesia di Timtim. Kedua pihak sepakat membentuk Joint Security Consultative Group (JSCG)

4 Oktober

“Salah lirik” antara INTERFET dengan TNI mulai terjadi. Malam itu, pasukan INTERFET memaksa masuk kompleks ITFET menggunakan kendaraan lapis baja APC (Armored Personnel Carrier). Mereka menabrak barikade pos yang dijaga prajurit Yonif Linud 700. Dengan alasan mengejar milisi, mereka terus bergerak hingga menerobos kawasan yang dijaga oleh Brimob. Keesokan harinya, Mayjen Peter Cosgrove mengembalikan satuan teledor ini ke Australia.

6 Oktober

Uskup Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo SDB tiba di Dili

10 Oktober

Puncak kejadian “salah lirik”. Terjadi kontak tembak antara TNI dengan INTERFET di perbatasan desa Mota’ain, Kecamatan Tasifeto Timur. Anggota pasukan Brimob, Prada Ari Sudiby, gugur dengan tiga anggota lain terluka, yaitu Sertu Sudarto, Sertu Agus Susanto, dan seorang warga sipil Alcino Barros. INTERFET memasuki wilayah kedaulatan RI dan melesak sekitar 297 meter dari jembatan dan tugu yang bertuliskan “Selamat Datang. Anda memasuki Desa Silawan, NTT” di jembatan sungai Malimeak.

14 Oktober

Satgas P4TT kembali ke Dili

21 Oktober

Angin perdamaian mulai ditiupkan oleh Falur Rate Laec, Komandan Region III Falintil

22 Oktober

Xanana tiba di Dili. Ia tak pernah berhenti berkampanye menyadarkan semua pihak untuk tidak memusuhi rakyat Indonesia.

23 Oktober

Pertemuan pertama RI-Timor Leste di Markas INTERFET, Dili. Dari Indonesia diwakili Komandan ITFET Brigjen (Pol) JD Sitorus, Komandan Satgas Pengamanan ITFET Kol (Inf) Sahala Silalahi dan Perwira Penghubung (LO) militer Kapten (Inf) A Suryo. Sementara pihak Timor Leste diwakili Kay Rala Xanana Gusmão, Taur Matan Ruak, dan Leandro Isaac. Setelah ITFET, disusul pertemuan dengan Tim Pasca Penentuan Pendapat di Timor Timur (P4TT) yang antara lain diwakili Ketua P4TT Duta Besar Taufik R Soedarba.

24 Oktober

Xanana mengeluarkan surat edaran yang berisi jaminan keselamatan bagi 200-an warga negara Indonesia penghuni Masjid An-Nur. “Saya mohon dengan sangat agar saudara-saudara tetap tenang, dan percayalah pada kami bahwa segala sesuatu akan diupayakan untuk menjamin keselamatan saudara sekalian,” kata Xanana melalui surat berkop CNRT-Timor Leste dan tertanggal 23 September 1999.

25 Oktober

Dewan Keamanan PBB mensahkan Misi PBB untuk pemerintahan transisi Timor Timur, United Nations Transitional Administration in East Timor atau UNTAET. Sekjen PBB Kofi Annan menunjuk diplomat senior dari Brazil, Sergio Viera de Mello (51) sebagai Ketua Untaet. UNTAET terdiri dari 9.150 tentara Pasukan Perdamaian PBB yang akan menggantikan INTERFET, 1.640 polisi internasional, 200 pengamat militer, dan ratusan pegawai sipil.

26 Oktober

Presiden RI Abdurrahman Wahid menandatangani surat keputusan pembentukan Misi PBB untuk pemerintahan transisi Timor Timur, United Nations Transitional Administration in East Timor atau UNTAET.

Pukul 10.20 waktu setempat, Kapten Artawan resmi dikembalikan ke pihak Indonesia oleh Ketua LO Militer UNAMET Brigjen Rezaq Hayder, diserahkan oleh Ketua UNAMET Ian Martin kepada ITFET di Kantor UNAMET, Balide, Dili. Seiring dengan itu, kabar kematian Mauhudu justru menjadi kepastian. Ia dihabisi di Kupang.

29 Oktober

Seluruh personel TNI yang berada di beberapa tempat vital seperti Makorem, Telkom, PLN, Pelabuhan, dan gudang logistik harus segera meninggalkan tempat-tempat tersebut dan berkumpul di Faroul dengan kawalan ketat INTERFET. Sejak itu, kompleks Faroul sudah dijaga ketat INTERFET.

30 Oktober

Pukul 09.00 waktu setempat, Bendera Merah Putih diturunkan dari bumi Timor Loro Sa'e dalam upacara yang sangat sederhana dan tanpa liputan. INTERFET melarang wartawan untuk meliput acara tersebut, kecuali RTP Portugal. Upacara dipimpin Ketua Indonesian Task Force in East Timor (ITFET) Brigjen (Pol) JD Sitorus, di Markas Batalyon Lintas Udara (Linud) 700, kawasan Faroul, Dili barat. Bendera Merah Putih diturunkan oleh Praka Sahabuddin, Pratu Mansur, dan Pratu Burhanuddin. Bendera lalu dilipat dan disimpan rapi. Upacara senada juga diadakan di bandara Komoro, dipimpin Komandan Lanud Letkol Pnb John Dalas SE.

Pukul 13.00 waktu setempat, tim Satgas P4TT memutuskan berangkat ke Jakarta.

Pukul 13.30, Xanana tiba di bandara Komoro, dengan pengawalan luar biasa ketat dari INTERFET bersenjata MP-5, sejenis sub-machine gun atau pistol mitraliur kaliber 9mm buatan Jerman, biasa digunakan pasukan khusus untuk pertempuran jarak dekat (close quarter battle/CQB). Ia disambut Dubes Taufik Soedarba, Brigjen (Pol) JD Sitorus, Kol (Czi) J Suryo Prabowo, dan Kol (inf) Sahala Silalahi. Mereka terlibat dalam pembicaraan akrab selama satu jam.

Pukul 17.05, Kol (Czi) J Suryo Prabowo, Brigjen (Pol) JD Sitorus, Kol (Inf) Sahala Silalahi lepas landas dari bandara Komoro, menggunakan helikopter dengan awak Kapten (Inf) Agus Yaman dan Letda Kandek Prayitno. Rombongan kemudian bergabung dengan KRI Teluk Banten 516 yang dikawal KRI Teluk Nala 363, untuk menjemput personel Yon 700 yang masih tertinggal di pelabuhan Dili. Sesaat kemudian, Dubes Taufik Soedarba dan

kompi Paskhas juga lepas landas dari bandara Komoro, dengan Hercules TNI AU terakhir yang diawaki Letkol Pnb John Dalas SE.

Pukul 17.20 untuk pertama kalinya Kapten Agus dan Letda Kandek mendaratkan helikopter di geladak kapal yang sedang berjalan dengan kecepatan 8 knot, dan berhasil dengan mulus.

Pukul 20.00, KRI Teluk Banten merapat di pelabuhan Dili. Komandan Batalyon Linud 700, Letkol Lukito, menyerahkan bendera Merah Putih yang baru diturunkan dari bumi Timor Loro Sa'e, kepada Wakil Komandan ITFET Kol (Czi) J Suryo Prabowo. Penyerahan yang dilakukan di atas KRI Teluk Banten itu sebagai tanda bahwa Indonesia telah benar-benar meninggalkan Timtim.

31 Oktober

Pukul 00.00 seluruh prajurit dan perwira TNI meninggalkan perairan Dili. Timor Timur, Timor Loro Sa'e, Timor Leste, atau apapun sebutannya telah lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Secara resmi, ia bukan lagi bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ***

LAMPIRAN I

Dokumen Rahasia yang Bocor

Contoh dokumen rahasia yang lolos ke tangan para wartawan asing; diambil dari buku Hernani Carvalho, *Os Dias da Unamet, Crônicas de uma Reportagem em Timor*, Hugin 2000, Lisboa.

NBC TV
Giam Phelan Aust. free
Sam King " Greendef
Herawan Iman Ind. Syon. Press A
Chris Wanner FOX RFE
Sho Fujimori " Seig
Tjitske Sijama ~~AP~~ freelec CNA
Pinka Wijkuis Helors of organ
Drene Slept " " " "
Robert Barroff " Tribune Press
Dane Calvin VOA Sunday Times
Allen Mark USA Freefall

A LISTA DOS JORNALISTAS QUE FICARAM EM TIMOR



UNAMET
Mission Headquarters
Information Report



Date of Submission: Wednesday, August 25, 1999

Region: DILI

Priority: ROUTINE

Master Ref. :
Local Ref. : DN74.99

Subject Title : PRO-AUTONOMY PLANS IN MALIANA TO DISTRIBUTE WEAPONS
27AUG99, SEAL OFF REGION FROM 28AUG99 AND TO COMMENCE KILLING

AUTHOR		
UN Identification e.g. CP500	Surname	Given Names
CP 074	SIEVERS	WAYNE
UN Section	Title	Location
CIVPOL	STN SGT	DILI REGIONAL OFFICE

SOURCE		
Source Type	Source Evaluation	
Informant	B - Usually Reliable	
Regional Source ID	Surname	Given Names
Age	Region	Sub-District Or Village
	MALIANA	
Address	Telephone	
Organisational Affiliations		
Languages Spoken: Bahasa Indonesian <input checked="" type="checkbox"/> English <input checked="" type="checkbox"/> Portugese <input type="checkbox"/> Tetum <input checked="" type="checkbox"/>		

TIMELINE OF EVENTS				
Event Type	Start Date	Start Time	Finish Date	Finish Time
General Information	27-Aug-99			

Information: (Identify Persons, Locations, Organisations and Vehicles as fully as possible e.g. TNI Group 143 etc.)
PRO-AUTONOMY MILITIA IN THE MALIANA AREA TO DISTRIBUTE WEAPONS 27AUG99
AND SEAL OFF REGION FROM 28AUG99 - KILLING OF INDEPENDENCE SUPPORTERS AND
UNAMET OFFICERS TO COMMENCE

Met with an informant in Dili last night 24AUG99. He had just returned from Maliana that afternoon. He stated that he had spoken to a contact who is a member of the pro-autonomy militia in the Maliana area. The pro-autonomy member said that weapons would be distributed to militia members on 27AUG99. From the 28AUG99 the region would be sealed off via road blocks etc. Killing of independence supporters would then commence. It was also stated that unnamed members of the Maliana UNAMET would also be killed. It was further alleged that Joao TAVARES, the overall head of the militia, has already moved his family over the border to Atambua, West Timor, in preparation for this campaign.

I would class the informant as reliable and I have no doubt the reported conversation took place. I can not, of course, offer any opinion as to the veracity of the information. This information does, however, mirror other information emanating from the region. I would therefore recommend this information be passed to the relevant areas as soon as possible for any action deemed appropriate.

Action Taken:
For the information of Political, CIVPOL and MLO's.

ALGUNS DOS DOCUMENTOS ENTREGUES POR UM OFICIAL
NO QUARTEL GENERAL DA UNAMET EM DILI

United Nations



Nations Unies

UNAMET

United Nations Mission in East Timor.

Commander
Dili Region
CIVPOL

**COPIES OF DOCUMENTS ALLEGING PLANS BY PRO-INDONESIAN
MILITIAS TO CONDUCT A TERRORIST CAMPAIGN**

I have today met with a reliable CI who provided me with copies of documents detailing alleged plans by pro-Indonesian forces to conduct a terrorism campaign supported by the Indonesian government. The contents of these documents are described below by way of notes made from an oral translation. The source's English is limited and these notes may therefore contain some inaccuracies. The words in italics are my comments. The four documents comprise the following:

1. A record of decisions taken during an alleged meeting on 24 July 1999 at the Dili military headquarters (*KOREM*). Present were supposed to have been the DANREM (*the military commander Suratman*) and the KAPOLDA (*the national police agency commander Silaen*), a representative of the Governor of East Timor, the head of the East Timor Parliament Armindo Mariano Soares, and other pro-integration leaders. The major decisions taken were done so in the recognition that the pro-integration side was unlikely to win the vote. The decisions taken included the DANREM and the KAPOLDA each supplying 5 intelligence officers to work with the Aitarak (*'Thorn'*) militia. Their role would be to initiate and monitor, on a date to be determined, terrorist attacks on pro-independence supporters in the period of the campaign prior to the vote. It was also decided that, should the pro-independence side lose the vote, the militias would immediately withdraw to the mountains and conduct a campaign of terrorism. The pro-integration side would refuse to recognise the authority of the United Nations, even if this should lead to the expulsion of Indonesia from the UN.

I have already been supplied with a copy of this document from another source. On that occasion the source's translation differed somewhat in that the DANREM and KAPOLDA 'would be supplied with' as opposed to this occasion where they 'would supply' 5 intelligence officers to work with the Aitarak militia. This earlier version forms the basis of a report submitted by me on 1 August 1999.

2. The second document purports to be a letter from the Halilintar (*'Thunderbolt'*) militia headquarters in the western sector to the leader of the BRTT (*East Timor Peoples Mobilization*). In this document the Halilintar are alleged to have 6000 persons and 2000 M16 assault rifles, and is supported by the TNI. This force is supposed to be training in West Timor and will commence operations before the vote takes place. Their area of operations will be from the western sector to Dili, West Timor. It also contained an appeal from the overall head of the militia to the western sectors of Maliana, Liquica, Ermera, Suai and Ambeno. The pro-integration population is asked to go as refugees to West Timor before the vote. The appeal concludes with an oath to be taken by the Halilintar, Dadorus, Merah Putih, Pemuda Benteng Batugade (PBB), Gubtur Merah Putih, and Armui groups that they 'are ready to die for integration by fighting from the western sector to Dili'.

3. This document is allegedly a secret TNI record of a meeting at military headquarters on 10 July 1999 between them and Apodeti, the oldest pro-Indonesian political party. The document begins with complaints from Apodeti leaders that the autonomy proposal effectively violates the 1945 Indonesian constitution and is against the principals of Pancasila, the national ideology. It then goes on to acknowledge that Fretilin and UDT leaders dominate the prospect of a resolution in East Timor. In response Apodeti's leaders, with the backing of the Indonesian government, had already begun arming its members to confront East Timorese nationalists. 10,000 members armed with M16's will be ready, with the weapons already distributed through East Timor. It is further claimed that these numbers could be increased to 50,000 within a short time. An observation is then made that the militia groups Makikit, Saka, Halilintar, Mahidi, Aitarak, BMP, Ablai, Laksaur together the Indonesian army battalions 744 & 745 are currently operating under command of the Raja Wali group of the SGI (Indonesian military intelligence). The total armed force under the command of the Raja Wali is put at 25,000. (*744 and 745 Battalions are mixed ethnic Indonesian and ethnic East Timorese units*).

The document next claims that anti-integration East Timorese will be liquidated in the period of transitional autonomous government prior to full independence. It is then stated that Apodeti will not isolate the political activities of the UDT, ethnic Indonesians and Portuguese who have taken an opportunistic position during the above period. It concludes with the assertion that should independence succeed then Apodeti will be the party trusted most by the Indonesian government.

4. The final document is information supposedly supplied by a pro-independence infiltrator within the pro-integration side. The information dated 17 July 1999 and was obtained from a female Aitarak member at Hudi Laran village, which is in Bairopite, western Dili. It states that Aitarak has established 41 posts in West

Timor, with 2100 members being trained in Kupang from last May to June. These posts are allegedly supported by the Indonesian defense minister General Wiranto. It further claims that these preparations are being supported by the TNI (*Indonesian Armed Forces*) and the Raja Wali group of the SGI (*Indonesian military intelligence*).

It is then stated that Aitarak has 17 posts in Dili, with each post having 40 male and 10 female members. They were reported to already be equipped with pistols and M16 assault rifles. Other weapons in the hands of the militia are Mausers and G3's. The total number of firearms in militia hands is put at 25,000, not including traditional guns. The document concludes with the statement that with these preparations, should the East Timorese people reject the great autonomy proposal by the Indonesian government, a war will occur similar to that in 1975 (*the civil war following the withdrawal of the Portuguese*).

As with the document submitted by me on 1 August 1999, I have no opinion on the veracity of these documents. I would class the source as a well connected figure in Dili. He is reliable but has strong pro-independence views. I would recommend a professional translation of the attached documents be made and the immediate distribution to the relevant Political Affairs and CIVPOL areas of UNAMET.

Submitted for your information.

VIS I

Mato II/10/7/1999

Rahasia Tokoh-Tokoh Apodete
dan
Perwira-perwira Republik Indonesia

Pada tanggal 10 Juli 1999, pukul 13.00, witeng telah berhasil pertemuan rahasia di Korem 164 Wira Dharma Jili antara Perwira-Perwira ABRI dengan Tokoh-Tokoh Tim-Tim untuk membahas konsep Otonomi Tim-Tim menurut Tokoh-Tokoh Apodete dalam hal ini Tokoh-Tokoh Apodete melalui pernyataan sikapnya telah mendesak Pemerintah Jakarta untuk meninformasikan bantuan Pemerintah Otonomi Khusus Timor-Timur sebagai berikut :

1. Bahwa semua kegiatan administratif Pemerintah Otonomi termasuk kegiatan pembangunan di segala bidang akan dilaksanakan oleh putera daerah Timor-Timur kecuali di bidang Pengadilan, Hankam, telah konsisten terhadap Pancasila dan UUD 1945 tetap berada dibawah Bendera Merah Putih serta tetap memegang mata uang rupiah Indonesia.
2. Untuk menklarifikasikan prospek penyelesaian masalah Tim - Tim yang sangat didominasi oleh Tokoh-Tokoh Pretelin dan UDT maka Tokoh Apodete sudah mulai menjalankan dan mempersiapkan kekuatan Militernya yang terdiri atas Organisasi orang-orang Apodete diseluruh Tim-Tim termasuk di Zona Timor Barat (?)... dimana kaderisasi tersebut telah dipersenjatai oleh Pemerintah Indonesia (ABRI) dengan dukungan finansial di segala bidang Militer untuk menhadapi kaum Nasionalis Kemerdekaan Tim-Tim, apa bila mencapai kemerdekaan di Timor Loro Sa'e. Jika Tim-Tim mencapai Kemerdekaan melalui Jajak pendapat nanti kekuatan tersebut kini telah mencapai 10.000 orang dengan bersenjata laras panjang merk M 16 dan telah beredar diseluruh Tim-Tim serta akan ditingkatkan menjadi 50.000 orang dalam waktu yang singkat jumlah kegiatan 25.000 orang bersenjata untuk sementara berada dibawah komando Grup Raja Wali, Makikit, Jaka, Halelintar, Mahidi, Jitarak, BMr, Ablai, Laksaur dan Batalyon 744 serta Batalyon 745 diseluruh Timor-Timur.
3. Selama masa Pemerintahan Otonomi hingga menuju Kemerdekaan maka semua orang-orang Tim-Tim yang anti Integrasi akan dihapus dulu dari bumi Timor Loro Sa'e.
4. Tokoh-Tokoh Apodete selama masa Pemerintahan Otonomi tidak mensolir semua kegiatan politik yang akan dijalankan oleh orang-orang UDT, Keturunan Indonesia, Portugis yang selama ini bersifat Oportunis.
5. Bahwa jika jajak pendapat berhasil maka harus melibatkan orang-orang Apodete sebagai satu-satunya partai yang terpercaya dari Pemerintah Indonesia.

Samoro Maliya In
Melaporkan dari Makorem
164 Wira Dharma

on 22 July/99

I n f o r m a s i

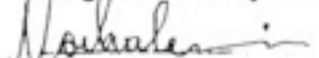
Pada tanggal 17 Juli 1999, kami menerima informasi dari seorang anggota Aitarak yang bernama Senia, di kampung Hudi Laran, Desa Bairopite Kecamatan Dili Barat, jam 07.30.waktu malam hari.

Informasi berupa pembentukan pos-pos Aitarak di Timor-Timur dan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

1. Aitarak telah membentuk 41 pos-pos penyerangan di Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan anggota-anggota milisi telah mengikuti latihan kemiliteran sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juni di Kupang Nusa Tenggara Timur. Pos-pos itu di dukung oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto.
2. Persiapan penyerangan didukung oleh pasukan dari Raja Wali dan SGI pasukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
3. Jumlah milisi-milisi dari kelompok Aitarak yang mengikuti pelatihan kemiliteran di Propinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai 2100 orang.
4. Menurut informasi yang kami terima dari anggota Aitarak, bahwa di dalam kota Dili juga Aitarak telah mendirikan 17 pos di sekitar kota Dili, dan satu pos terdapat 50 personel Aitarak personel-personel itu antara lain 10 perempuan dan 40 orang adalah laki-laki, personel-personel itu semua sudah memiliki senjata api merk pistol dan M 16.
5. Senjata-senjata yang ada di tangan milisi sekarang ini antara lain Maus G.3, Pistol, dan M 16. Jumlah senjata yang ada di tangan milisi 25000 pucuk senjata api belum termasuk tradisionalnya.
6. Persiapan itu apabila masyarakat Tim-Tim menolak Otonomi luas yang di tawarkan oleh Pemerintah Indonesia, maka akan menimbulkan suatu peperangan yang lebih besar di Bumi Tisur Loro Sae atau harus terjadi lagi seperti tahun 1975 yang telah kita lalui bersama.

Timor Leste, 18 Juli 1999

Yang membuat laporan


(OMBRA LEMO RAI)

Efec. do Int. Actividade do
Inisigo

Zebra Celso 22 de julho / 99
Rai Lemo

Perihal : Laporan

K e p a d a
Yth. Bapak Ketua Umum BRTT
Timor - Timur
di -

D i l i

Dengan hormat,

Berhubung dengan ini; dapat saya sampaikan kepada Bapak Ketua BRTT Pusat bahwa kami dari pasukan Halilintar yang berpangkalan di Sektor Barat (Kabupaten Bobonaro) yang berkekuatan 6000 orang dan memiliki 2000 pucuk senjata api merk M 16 dan didukung oleh Pemerintah Indonesia (ABRI).

Kekuatan tersebut kini telah mengikuti latihan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sebelum jajak pendapat kami dari pasukan Pro Integrasi akan melakukan Operasi sebelum jajak pendapat, mulai dari Sektor Barat menuju ibu kota Propinsi Timor-Timur.

Dari Panglima perang Pro Integrasi (PPPI) menghimbau kepada semua masyarakat Pro Otonomi yang berada di Sektor Barat yaitu :

1. Dari Kabupaten Maliana;
2. Dari Kabupaten Liquica;
3. Dari Kabupaten Ermera;
4. Dari Kabupaten Suai;
5. Dari Kabupaten Ambeno;

Dan masyarakat pro Otonomi yang berada diseluruh Timor-Timur agar mengungsi ke Propinsi (NTT) sebelum Jajak Pendapat dimulai.

Karena sebelum jajak pendapat dari kelompok : Halilintar, Dadorus, Merah Putih, Pemuda Benteng Batugade (PBB) Suntut Merah Putih, Armai (Aku rela mati untuk Integrasi akan beroperasi dari Sektor Barat menuju ibu kota Propinsi Timor-timur(Dili).

T e m b u s a n

1. Yth. Komandan Aitarak di tempat;
2. Yth. Komandan Makikit di tempat;
3. Yth. Komandan Jaka di tempat;
4. Yth. Komandan Alfa di tempat;
5. Yth. Komandan Jera di tempat;
6. Yth. Komandan Besi Merah Putih di tempat;
7. Yth. Komandan Ihi Merah Putih di tempat;
8. Yth. Komandan Laksaur Merah Putih di tempat;
9. Yth. Komandan Mahidi di tempat;

*Zelva Celina 22 @ jilla /
Da l... ..*

Maliana, 12 Juli 1999

LAPORAN UNTUK DIBEKARLUASKAN

PADA TGL. 24 JULI 1999, TELAH DIADAKAN RAPAT RAHASIA DI AULA MAKOREM DI DILI, MULAI JAM 16,00 S/D 22,000. DALAM RAPAT TERSEBUT DIRHADIRI OLEH DANREM, KAPOLDA, SEKWILDA-TK. I Mewakili Gubernur, Ketua DPRD TK. I DAN TOKO-TOKO PRO-INTEGRASI.

RAPAT TERSEBUT DIRAHAS ANTARA LAIN 6 (ENAM) POINT SBB :

- 1) TENTANG WAKTU KAMPANYA JAJAK PENDAPAT UNTUK MEMERAKAN PASUKAN MILISI, TETAPI - BELUM ADA KEPASTIAN WAKTU.
- 2) SUDAH DIBENCAKAN, NANTI PADA WAKTU KAMPANYA DARI PIHAK KOREM DAN POLDA MASING - MASING MEMERIKAN 5 (LIMA) ORANG ANGGOTA INTEL BERSAMA ANGGOTA MILISI AITABK & DENGAN PAKAIAN BERGOKEL-ROKEL SEPERTI ORANG KAMPUNG MENKIN UNTUK MEMONITOR DAN - MEMERAKAN PASUKAN PENGACAU KAMPANYA DAN MEMBUAT KERUSUHAN KAMPANYA.
- 3) ORANG-ORANG YANG BERTUJAS PENGACAU KAMPANYA TERSEBUT PADA POINT (2) DIATAS, ME - REKA INI DENGAN PERALATAN LENGKAP DAN KELUANGANYA DIJAMIN OLEH PEMERINTAH INDO - NESIA.
- 4) KUBU PRO-INTEGRASI SECARA UMUM MEREKA SUDAH TAU BAHWA MEREKA TIDAK AKAN MENDA - PAT SUARA, MAKA DENGAN CARA BAGAIMAPUN MEREKA HARUS MEMANFAATKAN KESEMPATAN - PADA WAKTU KAMPANYA UNTUK MENGHABISKAN ORANG-ORANG PRO-KEMERDEKAAN YANG ADA DI - KOTA-KOTA DALAM WILAYAH TIMOR TIMUR, SUPAYA PADA WAKTU JAJAK PENDAPAT, ORANG - ORANG PRO-KEMERDEKAAN SUDAH TIDAK ADA ARTINYA. INI TAKTIK INDONESIA SELAMA INI TERHADAP MASALAH TIMOR TIMUR.
- 5) SEBELAH MENGUNTAHUI HASIL JAJAK PENDAPAT NANTI, KUBU PRO-INTEGRASI ANDAIKATA & KALAH, MEREKA AUTOMATIK MAJIK KE GUNUNG UNTUK GERAKAN TERRORISTA. (AITABK DAN - LAIN-LAIN) SEPERTI DI-ANGOLA, DAN SEMUA PERALATAN DAN LOGISTIK DIDUKUN DAN DI - ATUR OLEH INDONESIA UNTUK MEMBANTU MEREKA.
- 6) AKHIRNYA MEREKA SEPAKAT SUPAYA INDONESIA TIDAK AKAN KELUAR/MENINGGALKAN TIMOR - TIMUR DAN TIDAK PERDULI DENGAN KEMADIRAN PBB DI TIMOR TIMUR, WALAUPUN DIANCAM DENGAN SEGALA CARA ATAU DIKLUARKAN DARI ANGGOTA PBB PUN TIDAK PERDULI, KARENA SUDAH PERNAH DIKLUARKAN DARI ANGGOTA PBB PRA WAKTU KEJADIAN DENGAN MALASIA.

*****000*****

ÍNDICE

Dedicatória	5
Em jeito de prefácio	7
Advertência	13
Resultados de um referendo	15
1. A Fé que move montanhas	15
2. Coronéis Tapioca	23
3. Na <i>Unamet</i>	29
4. Só Armando!	34
5. <i>Interfet</i>	38
Operação destruição total	41
1. A irrelevância de Timor	41
2. A <i>Unamet</i> sabia de tudo	47
3. Sua Eminência está a descansar	58
4. Um bispo indonésio para Timor	62
5. Milícias	66
6. Figurões	70
7. Nós	73

[kembali ke Milisi dan TNI](#)

LAMPIRAN II

Menu Ransum Tentara INTERFET

AUSTRALIAN DEFENCE FORCE					PACKED 1998/99
COMBAT RATION (ONE MAN)					
CONTENTS AND INSTRUCTION SHEET					
<p>This Ration Pack is available in five menus - A, B, C, D, and E. The contents of each menu differ to extent shown in the following list. You should try to have a different menu each day.</p>					
A	B	C	D	E	
Mixed Beef & Spaghetti 1 x 225g	Spaghetti & Meatballs 1 x 225g	Sausages, Tom & Onion 1 x 225g	Sausages & Veges 1 x 225g	Baked Beans 1 x 225g	
Jam, Peach 1 x 26g	Jam, Plum 1 x 26g	Jam, Raspberry 1 x 26g	Jam, Apricot 1 x 26g	Jam, Blackberry 1 x 26g	
Beef & Vegetables 1 x 225g	Beef Kai Si Ming 1 x 225g	Beef with Gravy 1 x 225g	Beef With Tortellini 1 x 225g	Chicken, Pasta & Vags 1 x 225g	
Soya Sauce 1 x 10g	Soya Sauce 1 x 10g	Mustard 1 x 3.5g	Mustard 1 x 3.5g	Chilli Sauce 1 x 10g	
Rice Freeze Dried 1 x 55g	Rice Freeze Dried 1 x 55g	Noodles, Chicken 1 x 37g	Noodles, Beef 1 x 37g	Potato & Onion Powder 1 x 50g	
Peaches 1 x 140g	Peaches 1 x 140g	Pears 1 x 140g	Two Fruits 1 x 140g	Two Fruits or Peaches 1 x 140g	
Biscuit-Jam Sandwich 2 x 45g	Biscuits- ANZAC 2 x 35g	Biscuit - Scotch Finger 2 x 35g	Biscuit - Shortbread 2 x 35g	Chocolate Ration 1 x 50g	
Beverage Base Powder -	Beverage Base Powder -	Beverage Base Powder -	Beverage Base Powder -	Biscuit - Gingernut 2 x 50g	
Orange 1 x 12g	Lemon 1 x 12g	Lime 1 x 12g	Orange 1 x 12g	Beverage Base Powder -	
Lime 1 x 12g	Tropical 1 x 12g	Orange 1 x 12g	Tropical 1 x 12g	Tropical 1 x 12g	
Soup Powder - French Onion 1 x 10g	Soup Powder - Pea and Ham 1 x 10g	Soup Powder - Beef 1 x 10g	Soup Powder - Chicken 1 x 10g	Lemon 1 x 12g	
Muesli Bar -	Muesli Bar -	Muesli Bar -	Muesli Bar -	Soup Powder - Tomato 1 x 10g	
Tropical Fruits 1 x 32g	Three Fruits 1 x 32g	Forest Fruits 1 x 32g	Tropical Fruits 1 x 32g	Muesli Bar -	
Apricot & Coconut 1 x 32g	Apricot & Coconut 1 x 32g	Apricot & Coconut 1 x 32g	Forest Fruits 1 x 32g	Three Fruits 1 x 32g	
				Forest Fruits 1 x 32g	
The following items are common to all menus :					
Biscuit Crispbread 1 x 30g		Vegetable Extract 1 x 15g	Curry Powder 1 x 3.5g		
Cheese 1 x 56g		Sugar 12 x 7g	Matches, Waterproof 1 x box		
Chocolate Ration 1 x 50g		Tea Bags 2 x Nos	Can Opener 1 x no.s		
Sweetened Condensed Milk 1 x 85g		Instant Coffee 2 x 3.5 g	Rubber Band 3 x no.s		
Chewing Gum 4 x Pellet		Chocolate, Drink Powder 1 x 20g	Toilet Paper 1 x 10 sheets		
Candy Chocolate 1 x 60g		Salt 1 x 2g	Pad Scouring with Soap 1 x no.s		
Candy Hard 2 x 30g		Pepper 1 x 2g	Bag Plastic, Inner Sundry 1 x no.s		
ANZAC Bar 1 x 32g		Tabasco Sauce 1 x 3g	Chilli Sauce 1 x 10g		

INFORMATION FOR USERS - CR1M

GENERAL

The CR1M consists of two main meals, a midday snack and a number of sundry items. It is suggested that the two main components be used for breakfast and evening meals, and that the muesli bar and sweet biscuits be used for the midday snack. The CR1M has been designed to ensure that you receive enough food and vitamins each day, therefore it is desirable that all food in the pack is eaten.

The vegetable extract may be used as a spread on biscuits, as a flavouring to some of the meat dishes or added to noodles.

After a few months in a tropical climate the condensed milk may become thicker and brownish in appearance, but it safe to eat and may be consumed without fear of any ill effects.

Chocolate may develop a light coloured film on the surface. It is still safe to eat. By dissolving the chocolate in sterilised hot water a chocolate drink can be made.

WATER STERILISATION

All water supplies must be regarded as contaminated unless medically cleared. If the water is dirty or cloudy, first filter using the Millbank Individual Filter. Once filtered, add the water sterilisation tablets and follow the directions on the tablets package. Wait 5 minutes and shake well, wait an additional 30 minutes so bacteria are killed before drinking or using to prepare food or beverage. Water may also be sterilised by boiling for a minimum of 5 minutes.

The beverage base powder, (Cottees Trek) has water sterilisation properties but should only be relied upon in the case of EMERGENCY. If used allow 90 minutes after addition before drinking.

AVOID FOOD POISONING

Do not open more containers of perishable food than are necessary for a meal. Any uneaten opened perishable food must not be consumed or must be chilled immediately to avoid food poisoning. If either of these requirements can not take place refer to the disposal of litter paragraph.

AVOID DEHYDRATION

It is essential that you drink plenty of water. Heat and exercise cause dehydration and loss of thirst. You should drink plenty of water if you are sweating heavily, even if you don't feel thirsty. Drink enough water to keep your urine clear.

SALT INTAKE

Salt supplementation is not recommended even if you are working hard in hot environments. There should be enough salt in your normal diet to fulfil your dietary requirements.

Do not take extra salt unless you drink plenty of water. It is harmful to take extra salt without extra water.

COLOURED TAGS

Different coloured paper tags are contained in all ration packs. The coloured paper tags have been included as a quality control measure during packaging. The tags are useful in the field as markers and model items. Please dispose of in a thoughtful manner.

DISPOSAL OF LITTER

There is packaging litter in each CR1M, which may give intelligence to the enemy if discarded. Dispose all litter in a thoughtful manner with consideration for the environment.

LABELLING INFORMATION

Nutritional and use-by information is available from the Senior Inspector Foodstuffs.

IMPROVEMENTS

Any suggestions regarding improvements to ration packs should be directed to:-

SENIOR INSPECTOR FOODSTUFFS, AMMA GPO BOX 519J,
MELBOURNE VIC 3001

INGREDIENT LIST – COMBAT RATION (ONE MAN)

MENU 'A'	MENU 'B'	MENU 'C'	MENU 'D'	MENU 'E'
Soup Pwd French Onion Flavour, Sugar, Toasted Onion Pieces, Maltodextrin, Wheat Starch, Vegetable Gum (412), Salt, Natural Flavour Enhancer, Colour (150), Spice, Vitamins (Vitamin C, Nicotinamide, Riboflavin, thiamin).	Soup Pwd Pea & Ham Maltodextrin, Pea Flour, Potato Flakes, Salt, Hydrolysed Plant Protein, Flavour Enhancer (621), Vegetable Gum (412), Flavour, Colour (160a), Vitamins (Vitamin C, Nicotinamide, Riboflavin, thiamin).	Soup Pwd Beef Maltodextrin, Beverage Whitener, Salt, Hydrolysed Plant Protein, Flavour Enhancer (621, 627, 631), Colour (150), Free Flowing Agent (551), Food Acids (262), Vegetable Gum (412), Milk Solids Non-Fat, Sugar, Flavour Enhancer (631), Onions Pieces, Vegetable Fats & Oils (antioxidant 320), Parsley Flakes, Vitamins (Vitamin C, Nicotinamide, Riboflavin, thiamin).	Soup Pwd Chicken Dehydrated Chicken Powder (chicken, wheat starch, corn starch, flavour enhancer 621), Sugar, Maltodextrin, Milk Solids Non-Fat, Salt, Wheat Starch, Vegetable Gum (412), Beverage Whitener, Flavour, Vegetable Fats & oils (antioxidant 320), Parsley Flakes, Vitamins (Vitamin C, Nicotinamide, Riboflavin, thiamin), Spice, Colour (100).	Soup Pwd Tomato Tomato Powder (free-flowing agent 551), Sugar, Salt, Maltodextrin, Wheat Starch, Vegetable Gum (412), Beverage Whitener, Flavour Enhancer (621), Colour (162), Flavour, Vegetable Fats & oils (antioxidant 320), Food Acids (330, 331), Parsley Flakes, Spice, Vitamin Premix (Vitamin C, Nicotinamide, Riboflavin, thiamin).
Muesli Bar - Tropical Fruits Oats, Glucose Syrup, Dried Tropical Fruit (paw paw, pineapple, banana, mango), Rolled Wheat, Sugar, Vegetable Oil, Puffed Cereal (rice, oats, corn), Desiccated Coconut, Humectant (sorbitol), Honey, Skim Milk Powder, Fruit Juice Concentrate (lemon, passionfruit), Emulsifier (lecithin), Food Acid (citric), Colours (caramel, beta carotene), Flavour.	Muesli Bar - Three Fruits Oats, Glucose Syrup, Dried Fruit (sultanas, apricot, apple), Rolled Wheat, Sugar, Vegetable Oil, Puffed Cereal (rice, oats, corn), Desiccated Coconut, Humectant (sorbitol), Honey, Skim Milk Powder, Fruit Juice Concentrate (lemon, passionfruit), Emulsifier (lecithin), Food Acid (citric), Colours (caramel, beta carotene), Vanilla Essence.	Muesli Bar - Forest Fruits Oats, Glucose Syrup, Fruit (blueberry, cherry), Rolled Wheat, Sugar, Vegetable Oil, Puffed Cereal (rice, oats, corn), Desiccated Coconut, Humectant (sorbitol), Honey, Skim Milk Powder, Emulsifier (lecithin), Food Acid (malic), Colours (caramel, beta carotene, carmine), Flavour, Roasted Almonds.	Muesli Bar - Tropical Fruits Oats, Glucose Syrup, Dried Tropical Fruit (paw paw, pineapple, banana, mango), Rolled Wheat, Sugar, Vegetable Oil, Puffed Cereal (rice, oats, corn), Desiccated Coconut, Humectant (sorbitol), Honey, Skim Milk Powder, Fruit Juice Concentrate (lemon, passionfruit), Emulsifier (lecithin), Food Acid (citric), Colours (caramel, beta carotene), Flavour.	Muesli Bar - Three Fruits Oats, Glucose Syrup, Dried Fruit (sultanas, apricot, apple), Rolled Wheat, Sugar, Vegetable Oil, Puffed Cereal (rice, oats, corn), Desiccated Coconut, Humectant (sorbitol), Honey, Skim Milk Powder, Fruit Juice Concentrate (lemon, passionfruit), Emulsifier (lecithin), Food Acid (citric), Colours (caramel, beta carotene), Vanilla Essence.
Muesli Bar - Apricot & Coconut Oats, Glucose Syrup, Dried Fruit (apricot, apple), Rolled Wheat, Sugar, Vegetable Oil, Puffed Cereal (rice, oats, corn), Desiccated Coconut, Humectant (sorbitol), Honey, Skim Milk Powder, Emulsifier (lecithin), Food Acid (citric), Colours (caramel, beta carotene), Flavour.	Muesli Bar - Apricot & Coconut Oats, Glucose Syrup, Dried Fruit (apricot, apple), Rolled Wheat, Sugar, Vegetable Oil, Puffed Cereal (rice, oats, corn), Desiccated Coconut, Humectant (sorbitol), Honey, Skim Milk Powder, Emulsifier (lecithin), Food Acid (citric), Colours (caramel, beta carotene), Flavour.	Muesli Bar - Apricot & Coconut Oats, Glucose Syrup, Dried Fruit (apricot, apple), Rolled Wheat, Sugar, Vegetable Oil, Puffed Cereal (rice, oats, corn), Desiccated Coconut, Humectant (sorbitol), Honey, Skim Milk Powder, Emulsifier (lecithin), Food Acid (citric), Colours (caramel, beta carotene), Flavour.	Muesli Bar - Forest Fruits Oats, Glucose Syrup, Fruit (blueberry, cherry), Rolled Wheat, Sugar, Vegetable Oil, Puffed Cereal (rice, oats, corn), Desiccated Coconut, Humectant (sorbitol), Honey, Skim Milk Powder, Emulsifier (lecithin), Food Acid (malic), Colours (caramel, beta carotene, carmine), Flavour, Roasted Almonds.	Muesli Bar - Forest Fruits Oats, Glucose Syrup, Fruit (blueberry, cherry), Rolled Wheat, Sugar, Vegetable Oil, Puffed Cereal (rice, oats, corn), Desiccated Coconut, Humectant (sorbitol), Honey, Skim Milk Powder, Emulsifier (lecithin), Food Acid (malic), Colours (caramel, beta carotene, carmine), Flavour, Roasted Almonds.

The following items are common to all menus:

Candy Chocolate Milk Chocolate (sugar, cocoa mass, full cream milk powder, cocoa fat, butter, emulsifier (lecithin), flavour), Sugar, Corn Starch, Water, Glucose Syrup, Vegetable Gum (414), Colours (102, 110, 124, 133, 171), Thickener (dextrin), Peanut.	Candy Hard Milk - Sugar, Glucose Syrup, Corn Starch, Thickener (1400), Flavours (musk), Colours (110, 122, 123, 124), and / or Spearmint - Sugar, Glucose Syrup, Corn Starch, Spearmint Oil, Thickener (1400), Colours (102, 130), and / or ESP - Sugar, Glucose Syrup, Corn Starch, Peppermint Oil, Thickener (1400).	Chocolate Cocoa Butter, Sugar, Dextrose, Skim Milk Powder, Cocoa Liquor, Oat Flour, Emulsifier (lecithin), Vitamins (Vitamin A, thiamin & Vitamin C).	Chocolate Drink Powder Sugar, Milk Solids, Cocoa Powder, Flavour.	Chewing Gum Sugar, Gum Base, Glucose Syrup, Modified Starches, Thickener (1404), Flavours, Humectant (422), Glazing Agent (903), Antioxidant (320).
Cheese Cheddar Cheese, Food Acid (331), Salt, Preservative (234), Mineral Salts (339, 450), Colour (160b), Water, Rennet.	Salt Sodium Chloride, Anti Caking Agent.	Vegetable Extract Yeast Extract, Sugar, Dextrose, Skim Milk Powder, Cocoa Liquor, Oat Flour, Emulsifier (lecithin), Vitamins (Vitamin A, thiamin & Vitamin C).	Chilli Sauce Water, Tomato Paste, Sugar, Glucose, Apple Paste, Jalapeno Flavour, White Vinegar, Salt, Citric Acid, Spices, Pectin (440a), Acetic Acid, Preservative 202, Calcium Chloride.	ANZAC Bar Oats, Desiccated Coconut, Rolled Wheat, Sugar, Vegetable Oil, Golden Syrup, Puffed Rice, Glucose, Salt, Sodium Bicarbonate, Emulsifier (lecithin), Flavour.
Tabasco Vinegar, Red Pepper, Salt.	Sugar Granulated Crystallised Sucrose.	Pepper Ground dried Piper Nigrum Berries.	Curry Powder Curry Powder.	Tea Bags Small Leaf Tea.
Biscuits Crispbread Wheat, Vegetable Oil, Invert Syrup.	Instant Coffee Coffee Powder.	Sweetened Condensed Milk Whole Milk Solids, Sugar, Water.		

INGREDIENT LIST - COMBAT RATION (ONE MAN)
PACKED 98/99

MENU 'A'	MENU 'B'	MENU 'C'	MENU 'D'	MENU 'E'
Beef Minced with Spaghetti	Spaghetti & Meatballs	Sausages, Tomato & Onions	Sausages & Vegetables	Baked Beans
Minced Beef & Broth Spaghetti, Tomato Paste, Herbs & Spices, Salt, Sugar, Vitamin (thiamin), Water.	Beef Meatballs (Beef, Seasoning & TVP) & Broth, Spaghetti, Tomato Paste, Modified Starch, Salt, Sugar, Spices, Vitamin (thiamin), Water.	Sausages (Lamb, Beef, Seasoning, Binder, Water) & Broth, Onion, Crushed Tomatoes, Tomato Paste, Celery, Modified Starch, Herbs & Spices, Salt, Sugar, Emulsifier (481), Vitamin (thiamin), Water.	Sausages (Lamb, Beef, Seasoning, Binder, Water) & Broth, Potatoes, Tomato Paste, Carrots, Onions, Peas, Modified Starch, Herbs & Spices, Salt, Emulsifier (481), Vitamin (thiamin), Water.	Haricot Beans, Tomato Paste, Sugar, Modified Starch, Salt, Spices, Vitamin (Vitamin C, Niacin, thiamin), Water.
Beef & Vegetables	Beef Kai Si Ming	Beef & Gravy	Beef, Minced with Tortellini	Chicken, Pasta & Veggies
Minced Beef & Broth, Carrots, Onions, Whole milk, Potato Flakes, Herbs & Spices, Tomato Paste, Colour (150), Salt, Vitamin (thiamin), Water.	Minced Beef & Broth, Carrots, Onions, Corn, Peas, Brown Rice, Modified Starch, Salt, Curry Powder, White Pepper, Garlic Powder, Mixed Herbs, Vitamin (thiamin), Water.	Diced Beef & Broth, Modified Starch, Tomato Paste, Salt, Spices, Emulsifier (481), Sugar, Colour (150), Vitamin (thiamin), Water.	Minced Beef & Broth, Tomato Paste, Tortellini, Crushed Tomatoes, Modified Starch, Herbs & Spices, Sugar, Salt, Emulsifier (481), Vitamins (Vitamin C, Niacin, Riboflavin, thiamin), Water.	Diced Chicken & Broth, Pasta Shells, Carrots, Corn, Celery, Modified Starch, Herbs & Spices, Onions, Salt, Sugar, Ascorbic Acid, Water.
Jam, Peach	Jam, Plum	Jam, Raspberry	Jam, Apricot	Jam, Blackberry
Peaches, Sugar, Glucose, Vegetable Gum (pectin), Food Acid (citric), Vitamin (Vitamin C).	Plums, Sugar, Glucose, Vegetable Gum (pectin), Food Acid (citric), Vitamin (Vitamin C).	Raspberries, Sugar, Glucose, Vegetable Gum (pectin), Food Acid (citric), Vitamin (Vitamin C).	Apricots, Sugar, Glucose, Vegetable Gum (pectin), Food Acid (citric), Vitamin (Vitamin C).	Blackberries, Sugar, Glucose, Vegetable Gum (pectin), Food Acid (citric), Vitamin (Vitamin C).
Soya Sauce	Soya Sauce	Mustard	Mustard	
Water, Soya Beans, Wheat, Salt, Sugar, Colour 150, Flavour Enhancer 621, Preservative 211.	Water, Soya Beans, Wheat, Salt, Sugar, Colour 150, Flavour Enhancer 621, Preservative 211.	Mustard Powder	Mustard Powder	
Rice Freeze Dried	Rice Freeze Dried	Noodles, Chicken	Noodles, Beef	Potato & Onion Powder
Rice, Salt	Rice, Salt	Noodles (wheat flour, vegetable oil, salt, sodium polyphosphate, potassium carbonate, sodium carbonate), Flavour Enhancer (621), Salt, Dehydrated Chicken Powder (chicken, corn starch, flavour enhancer (621), wheat starch), Maltodextrin, Flavour, Vegetable Fats & oils (Antioxidant (320), Colour (100), Parsley Flakes, Vitamins (Vitamin C, Nicotinamide, Riboflavin, thiamin).	Noodles (wheat flour, vegetable oil, salt, sodium polyphosphate, potassium carbonate, sodium carbonate), Maltodextrin, Beverage Whitener, Salt, Hydrolysed Plant Protein, Flavour, Vegetable Gum (412), Milk Solids Non-Fat, Sugar, Flavour Enhancer (621), Onion Pieces, Colour (150), Vegetable Fats & oils (antioxidant (320), Parsley Flakes, Vitamins (Vitamin C, Nicotinamide, Riboflavin, thiamin).	Potato Powder, Full Cream Milk, Hydrated Onion, Lecithin (322), Sulphur Dioxide preservative (220).
Peaches	Peaches	Pears	Two Fruits	Two Fruits or Peaches
Diced Peaches, Water, Sugar.	Diced Peaches, Water, Sugar.	Diced Pears, Water, Sugar.	Diced Peaches & Pears, Water, Sugar.	Diced Peaches & Pears, Water, Sugar or Diced Peaches, Water, Sugar.
Biscuits Jam Sandwich	Biscuits ANZAC	Biscuits Scotch Finger	Biscuits Short bread	Biscuits Gingernut
Flour, Raspberry Flavoured Filling (Raspberries, Apples, Sugar, Pectin, Food Acid 330), Vegetable Oil, Sugar, Desiccated Coconut, Golden Syrup, Invert Syrup, Salt, Baking Powder, Flavour, Colour (110, 129).	Flour, Sugar, Butter, Rolled Oats, Desiccated Coconut, Golden Syrup, Baking Powder, Salt, Emulsifiers (322)	Flour, Vegetable Oil, Sugar, Butter, Condensed Milk, Egg, Salt, Baking Powder.	Flour, Vegetable Oil, Icing Sugar, Butter, Condensed Milk, Egg, Full Cream Milk Powder, Salt, Baking Powder, Butter Flavour, Flour Treatment Agent (223), Emulsifiers (471, 322), Antioxidant (309).	Flour, Sugar, Golden Syrup, Vegetable Oil, Ginger, Salt, Baking Powder, Full Cream Milk Powder, Flavour.
Beverage Base Pwd Orange	Beverage Base Pwd Lemon	Beverage Base Pwd Lime	Beverage Base Pwd Orange	Beverage Base Pwd Tropical
Sugar, Food Acid (296), Artificial Sweetening Substances (952, 954), Preservative (211), Flavours, Vitamin (Vitamin C), Mineral Salt (341), Colour (110).	Sugar, Food Acid (296), Artificial Sweetening Substances (952, 954), Preservative (211), Flavours, Vitamin (Vitamin C), Mineral Salt (341), Colour (102).	Sugar, Food Acid (296), Artificial Sweetening Substances (952, 954), Preservative (211), Flavours, Vitamin (Vitamin C), Mineral Salt (341), Colour (102, 133).	Sugar, Food Acid (296), Artificial Sweetening Substances (952, 954), Preservative (211), Flavours, Vitamin (Vitamin C), Mineral Salt (341), Colour (110).	Sugar, Food Acid (296), Artificial Sweetening Substances (952, 954), Preservative (211), Flavours, Vitamin (Vitamin C), Mineral Salt (341), Colour (102, 133).
Beverage Base Pwd Lime	Beverage Base Pwd Tropical	Beverage Base Pwd Orange	Beverage Base Pwd Tropical	Beverage Base Pwd Lemon
Sugar, Food Acid (296), Artificial Sweetening Substances (952, 954), Preservative (211), Flavours, Vitamin (Vitamin C), Mineral Salt (341), Colour (102, 133).	Sugar, Food Acid (296), Artificial Sweetening Substances (952, 954), Preservative (211), Flavours, Vitamin (Vitamin C), Mineral Salt (341), Colour (102, 133).	Sugar, Food Acid (296), Artificial Sweetening Substances (952, 954), Preservative (211), Flavours, Vitamin (Vitamin C), Mineral Salt (341), Colour (110).	Sugar, Food Acid (296), Artificial Sweetening Substances (952, 954), Preservative (211), Flavours, Vitamin (Vitamin C), Mineral Salt (341), Colour (102, 133).	Sugar, Food Acid (296), Artificial Sweetening Substances (952, 954), Preservative (211), Flavours, Vitamin (Vitamin C), Mineral Salt (341), Colour (102).

[kembali ke Prajurit TNI vs INTERFET](#)

LAMPIRAN III

Ringkasan Kasus Tuntutan Fransisco Carvalho kepada CM Rien Kuntari, Penulis Buku “Timor Timur, Satu Menit Terakhir; Catatan Seorang Wartawan”

Latar belakang:

Setelah berintegrasi sebagai propinsi ke-27 NKRI, Timor Timur pada akhirnya terlepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Meski telah tergabung selama 24 tahun, masyarakat internasional tetap menganggap Timor Timur sebagai wilayah non-self governing territory. Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur telah membuat Indonesia menjadi bulan-bulanan dunia. Tak pelak lagi, persoalan Timor Timur menjadi noktah hitam perjuangan diplomasi Indonesia.

Setelah Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden BJ Habibie mendapat limpahan kekuasaan untuk menduduki kursi kepresidenan RI. Pada 27 Januari 1999, sebelum masa kepemimpinannya genap satu tahun, Habibie memutuskan melaksanakan jajak pendapat untuk memberi kesempatan rakyat Timor Timur menentukan nasibnya sendiri. Keputusan ini memicu ketegangan antara kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan yang memuncak pada pembumihangusan Timor Timur. Jajak pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 itu dimenangkan kelompok pro-kemerdekaan.

Persoalan:

Sejarah lepasnya Timor Timur dari pangkuan Bumi Pertiwi itu lalu dibukukan oleh wartawan senior Kompas CM Rien Kuntari yang mendapat tugas mekiput peristiwa tersebut. Buku setebal 483 halaman berjudul “Timor Timur, Satu Menit Terakhir; Catatan Seorang Wartawan”, diluncurkan 4 Desember 2008 di Jakarta oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Acara peluncuran antara lain dihadiri Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, para Duta Besar, diplomat, mahasiswa, dan aktivis. Februari 2009, buku itu naik cetak ke-II.

Buku itu merupakan catatan seorang wartawan yang mengungkap secara lengkap sejarah panjang hingga detik-detik terakhir sebelum Timor Timur benar-benar lepas dari NKRI. Perjuangan tiap kelompok dalam mempertahankan aspirasi, keinginan, dan ideologinya tersaji secara rinci dan faktual dalam buku ini.

Untuk mempertahankan keutuhan NKRI, kelompok pro-integrasi membentuk Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) serta kelompok bersenjata yang belakangan sering disebut sebagai kelompok milisi. Sedangkan pro-kemerdekaan mengandalkan kekuatan pada pasukan Falintil, sayap militer CNRT (Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timor Timur).

Nama Fransisco Carvalho dalam buku ini muncul sebagai salah satu tokoh Pejuang Integrasi. Namun, ia merasa berkeberatan dengan penyebutan namanya terutama dalam kalimat: “Di tempat ini, Wiranto mengadakan pertemuan tertutup yang antara lain dihadiri oleh Gubernur Abilio Jose Osorio Soares, Armindo Mariano, Tito Baptista, Herminio, Mateus Maia, Joao Tavares, Eurico Guterres, dan Fransisco Carvalho” (di hal. 177). Ia juga berkeberatan dengan pengungkapan tentang kehadirannya dalam pertemuan antara kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan di UNAMET, Dili (hal. 139).

Carvalho keberatan dengan penyebutan namanya di halaman 177 yang terjadi di bandara Komoro, Dili, justru menjadi pertemuan terpenting. Pertemuan inilah yang kemudian menjadi titik pangkal yang menentukan situasi politik Timor Timur kemudian.

Fransisco mengaku tidak menghadiri pertemuan tersebut karena saat itu ia telah berada di Jakarta. Menurut dia, pertemuan itu dihadiri oleh adiknya, Komandan Mahidi Cancio Lopes de Carvalho. Walau begitu, ia tidak menyangkal kehadirannya dalam pertemuan seperti tersebut di halaman 139. Karena itu, Carvalho menuduh penulis telah melakukan kebohongan publik dan mencelakakan diri, keluarga bahkan hingga keturunannya.

Sementara itu, sebagai seorang wartawan profesional, penulis hanya mendasarkan laporannya pada fakta lapangan baik yang ia lihat, dengar, dan rasakan sendiri atau yang ia dapat dari sumber tangan pertama (first-hand resources) baik berupa narasumber langsung maupun dokumen tertulis. Kaidah dan kode etik jurnalistik yang menjadi dasar utama profesinya, membuat penulis hanya mampu menyampaikan fakta yang telah terverifikasi dengan baik, dapat dipercaya, dan dipertanggungjawabkan.

Tuntutan:

Untuk membahas persoalan ini, Fransisco Lopes de Carvalho melakukan komunikasi langsung dengan Johnson Panjaitan SH, Kuasa Hukum CM Rien Kuntari. Dalam

pertemuan di Jakarta tanggal 20 Juni 2011, Fransisco Carvalho menuntut CM Rien Kuntari :

1. Meminta maaf secara tertulis kepada semua pihak yang ia tentukan
2. Menarik buku tersebut dari peredaran atau mengkoreksi buku tersebut dengan menghilangkan naman Fransisco Carvalho dari halaman 177.
3. Mengganti kerugian materi yang lebih besar dari biaya 2xke Kupang, 2xke Dili, dan 5xke Jakarta
4. Seluruh tuntutan itu harus diselesaikan pada Juli 2011. Jika tidak, Carvalho akan menempuh jalur hukum.

Namun, dalam suratnya tertanggal 23 Juni 2011, Carvalho mengusulkan 4 (empat) opsi yakni :

- a. Klarifikasi dulu dengan saya, supaya jelas : apa nama saya atau nama orang lain? Kalau nama orang lain : siapa orangnya?
- b. Kalau betul nama saya, “pilihan terburuk”, buku itu, ditarik dari peredarannya.
- c. Merehabilitir nama baik saya dengan cara – antara lain – membuat ralat dan disampaikan kepada publik dan institusi-institusi Hukum dan HAM internasional dan domestik melalui saya, dan, meminta maaf.
- d. Ganti kerugian yang wajar dan manusiawi.

Semua bentuk penyelesaian di atas, dapat ditempuh secara di bawah tangan atau melalui jalur pengadilan agar memperoleh kekuatan hukum dan tidak dapat diragukan. Sedang dalam suratnya tertanggal 24 Juli 2011, Fransisco Carvalho mengatakan, siap menggelindingkan persoalan ini hingga ke tingkat internasional.

CM Rien Kuntari yang kini bermukim di Amerika, secara khusus kembali ke Tanah Air untuk menemui Fransisco Lopes de Carvalho guna menuntaskan persoalan tersebut secara serius. Pertemuan dengan Carvalho akan dilaksanakan dalam acara makan siang di Hotel Sheraton, Yogyakarta, Jumat (29 Juli 2011). Rien Kuntari didampingi Johnson Panjaitan SH, Kuasa Hukumnya.

Jakarta, 29 Juli 2011

Johnson Panjaitan. SH

Hp. 081387666041

[kembali ke Fransisco Carvalho](#)

LAMPIRAN IV

Surat Tuntutan dari Fransisco Carvalho



JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS
ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - KURATOR

Jl. Tambak No.45 Jakarta Pusat – 10320 Telp/ Fax : (021) 3920233

Yogyakarta, 23 Juni 2011

Perihal : **Penulisan nama Francisco Carvalho di dalam buku Timor Timur Satu
Menit Terakhir**

Kepada Yth. Ibu Rien Kuntari
di Washinton DC – AS

Salah sejahtera

Sebagai respons atas klaim saya kepada Ibu via E-mail maupun secara langsung kepada PT Mizan Pustaka perihal nama FRANCISCO CARVALHO sebagai salah satu peserta pertemuan Jenderal WIRANTO dengan beberapa tokoh Timor Timur pro-otonomi, termasuk di dalamnya para Komandan PPI atau Milisi di Bandara Comoro, Dili, pada tanggal 5 September 1999, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 yang lalu, saya telah mengadakan tatap muka dengan Bapak Jhonson Panjaitan (Lawyer Ibu) di hotel Formula 1 atau F One.

Di dalam pertemuan face to face tersebut, saya sudah menyampaikan secara langsung penilaian, tanggapan ataupun sikap saya mengenai penulisan nama itu. Namun, Pak Jhonson meminta kepada saya, agar saya membuat satu catatan yang lebih lengkap dan disampaikan secara langsung kepada Ibu sebagai bahan penyelesaian berikutnya.

Sehubungan dengan itu maka, pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nama saya selengkapnya adalah **FRANCISCO LOPES DE CARVALHO**.
2. Di dalam buku karya Ibu berjudul 'TIMOR TIMUR SATU MENIT TERAKHIR, Catatan Seorang Wartawan, Ibu menulis sebagai berikut :
 - a. Pada hal 121, alinea ketiga: Kelompok pro-otonomi diwakili Domingos Soares, Salvador Ximenes Soares, Basilio Dias Aranja, dan **Francisco Lopes de Carvalho**.
 - b. Pada hal 139, alinea kelima : Minggu (29/8/99), kelompok pro-otonomi yang diwakili Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) bertemu sayap militer Pro-Kemerdekaan, Falintil, di Markas Besar UNAMET, Dili. PPI diwakili Wakil Panglima PPI Eurico Guterres dan **Francisco de Carvalho**.
 - c. Pada hal 171, alinea kedua : Protes keras itu mereka sampaikan melalui sebuah siaran pers yang ditandatangani Domingos Soares (FPDK), Armindo Soares Mariano, **Francisco Lopes de Carvalho (BRTT)**, dan Vitorino dos Santos (PPI).
 - d. Pada hal 177, alinea ketiga : Di tempat ini, Wiranto mengadakan pertemuan tertutup antara lain dihadiri Gubernur Abilio Jose Osorio Soares, Armindo Mariano, Tito Baptista, Herminio, Mateus Maia, Joao Tavares, Eurico Guterres dan **Francisco Carvalho**.
 - e. Pada hal 195, alinea keempat : Karena itu, Wiranto lalu hanya bertemu dengan para tokoh pro-integrasi yaitu, Gubernur Tim Tim Abilio Jose Osorio Soares, Armindo Mariano, Tito Baptista, Herminio, Mateus Maia, Joao Tavares, Eurico Guterres, Labut Mello, **Francisco Carvalho**, dan Nazario Corterreal.

Tulisan Ibu pada hal 121 itu, adalah faktual dan nama saya juga benar, meskipun marga Lopes salah ditulis Ibu. Salah, karena Lopes tidak bersufiks Z tapi S.

Catatan historis Ibu pada hal 139 itu 100% benar. Benar, karena peristiwa itu betul terjadi dan saya juga ikut ambil bagian di dalamnya. Hanya saja, sebagaimana Ibu ketahui, nama saya Ibu torehkan secara tidak lengkap, alias kurang istilah : Lopes.

Rekaman sejarah yang dibuat Ibu pada hal 171, sebagaimana saya kutip di atas, juga tidak bersifat mengada-ada atau dengan kata lain tidak salah, baik dilihat dari sudut kejadian maupun penulisan nama saya.

Yang menjadi problem substansial antara Ibu dan saya sekarang, adalah catatan pena Ibu pada hal 177 dan 195. Di kedua catatan tersebut, seperti Ibu ketahui, Ibu menulis nama : **Francisco Carvalho** sebagai salah satu dari sekian banyak leader Timor Timur pro-otonomi yang hadir dalam pertemuan dengan Jenderal Wiranto pada tanggal 5 September 1999, di Bandara Comoro, Dili, Timor Leste.

Berbicara tentang kedua catatan sejarah maupun nama tersebut perlu saya sampaikan sebagai berikut :

- a. Dari tanggal 2-6 September 1999, saya tidak lagi berada di Timor Leste. Saya berada di Jakarta sebagai utusan Ketua BRIT (Francisco Xavier Lopes de Cruz) dalam Delegasi pro-otonomi di bawah pimpinan Bapak Domingos Maria das Dores Soares (Mantan Bupati Dili terakhir) yang pada hal 121 dan 171 Ibu cukup sebut dengan nama Domingos Soares, yang melayangkan protes terhadap praktek-praktek kecurangan dalam jajak pendapat oleh UNAMET dan kubu pro-kemerdekaan, kepada Perwakilan PBB di Jakarta, Pimpinan MPR/DPR-RI (Pak Hari Sabarno cs) di Senayan, Pimpinan Depdagri dan Deplu-RI. Kecuali itu, saya juga bersama Ketua Delegasi (Pak Domingos Soares), Victorino dosSantos dan lain-lain, mengikuti konferensi pers Dubes Agus Tarmidzi, Ketua P3TT dengan wartawan luar dan dalam negeri di gedung Sekretariat Negara. Terakhir, sebelum delegasi bubar, saya dan Pak Domingos Soares diundang oleh salah satu stasion televisi ibukota dan diwawancarai secara eksklusif. Wawancara tersebut disiarkan secara luas dan langsung ke seluruh penjuru Tanah Air. Selama di Jakarta (2-6/9), para anggota delegasi, termasuk saya di dalamnya, tinggal di hotel Bintang. Setelah rampung semua kegiatan di atas, barulah pada tanggal 6 siang, para anggota delegasi berpisah, dimana, saya, Pak Domingos Soares, Victorino dos Santos dan salah seorang putra almarhum Bapak Arnaldo dos Reis Aranjo (mantan Gubernur Timor Timur pertama) pindah ke hotel Ibis. Perlu saya tegaskan di sini, bahwa selama di Jakarta, saya tidak pernah meninggalkan teman-teman anggota delegasi lainnya. Kami fokus pada amanah atau kepercayaan yang telah diberikan kepada kami.
- b. Setelah saya diingatkan oleh salah seorang teman seperjuangan dulu di Timor Leste pada tahun 2008 yang lalu, terutama setelah saya membeli buku Ibu di toko buku Gramedia Yogyakarta, secara intensif, saya mencari informasi dan data ke berbagai sumber yang hadir dalam pertemuan Wiranto dengan tokoh-tokoh pro-otonomi atau integrasi tersebut. Dari usaha tersebut, pada muaranya, saya memperoleh data/informasi konfirmatif, bahwa selain tokoh-tokoh yang ibu maksudkan di dalam

bukunya, turut hadir pula dalam pertemuan tersebut, adik saya yang nota bene Komandan Mahidi merangkap Komandan Sektor C PPI, Sdr. CANCIO LOPES DE CARVALHO. Bukan saya dan juga tidak ada diantara yang hadir yang bernama Francisco Carvalho. Tetapi, anehnya, nama Cancio tidak dimuat ibu di dalam bukunya. Yang dimuat, justru nama Francisco Carvalho, yang membuat orang kebanyakan menganggap benar, saya yang hadir dalam pertemuan tersebut.

- c. Pada pertemuan tokoh-tokoh Falintil dengan tokoh-tokoh PPI di Markas Besar UNAMET, disamping Eurico Guterres, benar, saya juga turut mengambil bagian atas nama adik saya, Cancio, yang waktu itu berada di Cassa dan enggan hadir dengan alasan sibuk. Tetapi, nama saya di dalam buku tersebut, oleh Ibu, hanya ditulis singkat yaitu, Francisco de Carvalho. Di dalam pertemuan tersebut, tidak hanya hadir saya dan Eurico, tetapi hadir pula Sdr. Joanico Belo, Komandan PPI Sektor A. Kemudian, pada tatap muka Jenderal Wiranto dengan para tokoh pro-otonomi / integrasi di Bandara Comoro, Dili, Ibu memuat juga nama Francisco Carvalho sebagai salah satu pesertanya. Secara logika, boleh dibilang, nama itu bukan nama saya, yang artinya pula, Ibu telah menunjukkan, bahwa yang hadir dalam event historis tersebut, bukan saya. Namun, yang menjadi tanda tanya ialah : Kalau bukan nama saya, nama siapa atau Francisco Carvalho yang mana? Jikalau, benar, ada Francisco Carvalho lain yang hadir dalam pertemuan tersebut, saya mohon Ibu harus menunjukkan orangnya kepada saya dan publik, bahwa inilah Francisco Carvalho yang saat itu hadir dalam pertemuan dengan Panglima Wiranto. Bilamana tidak, berarti, Francisco Carvalho yang ibu maksudkan di dalam bukunya, benar-benar adalah saya, hanya saja, nama saya sengaja ditulis sesingkat itu.

Saya hampir tidak ragu sedikitpun dengan asumsi itu, karena 2 (dua) hal sebagai berikut :

- 1) Di Timor Leste, saya juga biasa atau sering dipanggil/disapa dengan nama: Francisco Carvalho, Cico Carvalho, bahkan terkadang hanya cukup dengan istilah Carvalho.
- 2) Sepanjang pengetahuan dan kesadaran saya, dalam proses atau sejarah perjuangan integrasi Timor Leste dengan Indonesia dari tahun 1974 hingga saat ini, pada label aktivis atau kalangan – sebut saja – tokoh, selain saya, tidak ada lagi yang lain yang bernama Francisco Lopes de Carvalho, Francisco de Carvalho atau Francisco Carvalho. Boleh saja ada Francisco lain, tapi marganya : Xavier Lopes

da Cruz (mantan Dubes Keliling), Deodato Osorio Soares (adiknya mantan Gubernur Abilio) etc.

d. Di sini, perlu saya sampaikan juga kepada Ibu, hal yang paling merisaukan saya dan keluarga saya, terutama anak-anak saya sejauh ini, sebagai dampak atau konsekuensi logis dari tulisan Ibu tersebut yakni :

- 1) Masalah pelanggaran HAM Berat di Timor Leste pada tahun 1999 dan problematika lainnya yang ada korelasinya dengan Timor Leste, yang masih menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan tanggung jawab politik Pemerintah Indonesia, belum tuntas ditangani hingga detik-detik ini. Siapa tahu, masalah-masalah tersebut merupakan PR atau bom waktu yang bisa saja meledak setiap saat karena picu detonatornya disalah manage. Jikalau begitu adanya nanti, bagaimanakah dengan nasib saya dan keturunan saya ke depan akibat tulisan Ibu tersebut?
- 2) Colega-colega saya dan siapa saja orang Timor Leste dimanapun ia berada, yang pernah memiliki atau membaca buku Ibu tersebut, selalu beranggapan dan yakin bahwa **Francisco Carvalho** yang ibu maksudkan di dalam bukunya, adalah saya. Alasan mereka, meskipun saya pernah bertolak belakang dengan pemerintah dan aparat keamanan, mereka memandang saya sebagai pribadi yang cukup pandai dan dinamis bergaul dengan pimpinan ABRI. Di samping itu, karena hampir semua anggota keluarga Lopes Carvalho dan rakyat di daerah kelahiran saya, adalah anggota Mahidi / Milisi / PPI.
- 3) Sejauh ini, sudah beberapa kali saya ke Timor Leste, yaitu pada tahun 2001, 2007, 2008 dan 2010. Pada tahun 2001, saya diancam, bahkan hampir dibunuh di desa tempatkelahiran saya, Cassa, oleh keluarga martir sebelum, pada saat dan pasca jajak pendapat. Resikonya, saya yang tadinya sudah repatriasi, terpaksa balik lagi ke Indonesia menjadi pengungsi hingga saat ini. Selain kembali, saya juga kehilangan semua kesempatan emas di Timor Leste.

Pada tahun 2007, 2008 dan 2010, memang, saya tidak diperlakukan seperti pada tahun 2001, tetapi saya selalu menerima sanksi sosial yang menganggap saya bagian dari kejahatan kemanusiaan karena – antara lain – dianggap turut hadir dalam pertemuan dengan Jenderal Wiranto cs di Bandara, Comoro, Dili, Timor Leste.

Teman-teman saya di Yogyakarta juga, yang pernah menelaah atau memiliki buku Ibu tersebut, juga pernah menyatakan kepada saya, bahwa menurut Ibu, pada tanggal 5 September saya ikut pertemuan dengan Wiranto di Comoro, Dili. Oleh karena latar belakang sejarah, tekanan psychologys dan sanksi-sanksi sosial sebagaimana secara selintas telah saya uraikan benang merah nya di atas, saya dan keluarga saya senantiasa dihantui oleh perasaan khawatir untuk pulang ke Timor Leste. Kalau, toh, suatu ketika kami memutuskan pulang kampung, kami harus siap menerima resiko apapun, termasuk, tentu saja, resiko dari tulisan Ibu.

3. Lebih atau kurang, itu saja yang dapat saya haturkan kepada Ibu pada moment ini. Saya tidak tahu, Ibu merekam nama **Francisco Carvalho** di dalam buku itu, apakah, karena, memang, Ibu melihat dengan mata kepala sendiri dan tahu persis, saya atau ada **Francisco Carvalho** lain, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut? Ataukah, Ibu merekam nama itu karena menerima bahan info/data dari sumber lain (kedua, ketiga, dst)? Bertolak dari fakta ketidakhadiran saya dan info dari sumber-sumber terpercaya sebagaimana telah saya ungkapkan pada point 2 dan huruf b kedua di atas, hampir dapat dipastikan Ibu masukkan nama **Francisco Carvalho**, tidak karena Ibu melihat saya atau **Francisco Carvalho** lain hadir dalam pertemuan tersebut, melainkan karena Ibu melihat Cancio hadir, lalu Ibu tidak menulis namanya, tapi menulis nama saya, karena dianggap namanya, adalah **Francisco Carvalho**. Kemungkinan terakhir, boleh jadi, Ibu masukkan nama **Francisco Carvalho**, karena Ibu menerima info dari sumber lain. Hanya Ibu sendiri yang bisa menjawabnya. Pada akhirnya, apapun yang terbukti benar nanti, yang jelas dan pasti, bahwa kalau dengan nama **Francisco Carvalho** tersebut yang Ibu maksudkan, adalah saya, maka, itu, merupakan kebohongan kepada publik yang bersifat memfitnah, merusak nama baik, integritas dan kehormatan pribadi saya, dan, lebih dari itu semua, sudah barang tentu, mematikan akses saya dan keluarga saya ke depan.
4. Ibarat air sudah tumpah atau nasi sudah menjadi bubur, namun, saya tetap menyadari, bahwa toh saya adalah sebuah pribadi yang pernah dilahirkan oleh seorang Ibu, meski tidak oleh Ibu Rien. Dalam konstelasi kesadaran seperti itu, melalui Pak Jhonson, saya telah mengusulkan sebuah pendekatan penyelesaian yang jauh dari paradigma keegoan saya. Jelasnya saya mengusulkan 4 (empat) opsi yakni :
 - a. Klarifikasi dulu dengan saya, supaya jelas : apa nama saya atau nama orang lain?
Kalau nama orang lain : siapa orangnya?

- b. Kalau betul nama saya, “pilihan terburuk”, buku itu, ditarik dari peredarannya.
- c. Merehabilitir nama baik saya dengan cara – antara lain – membuat ralat dan disampaikan kepada publik dan institusi-institusi Hukum dan HAM internasional dan domestik melalui saya, dan, meminta maaf.
- d. Ganti kerugian yang wajar dan manusiawi.

Semua bentuk penyelesaian di atas, dapat ditempuh secara di bawah tangan atau melalui jalur pengadilan agar memperoleh kekuatan hukum dan tidak dapat diragukan.

Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan kepada Ibu dan terima kasih atas atensinya dan saya tunggu tanggapan Ibu secepatnya.

Drs. Francisco Lopes de Carvalho

Tembusan :

- 1. Bpk. Jhonson Panjaitan di Jakarta
- 2. Pertiinggal

DAFTAR SINGKATAN

ABLAI : Aku Berjuang Lestarikan Amanat Integrasi

AD : Angkatan Darat

Aditla : Associacao Democratica da Integracao de Timor Leste a Australian/Asosiasi Integrasi Demokratis Rakyat Timor Timur ke Australia

AFP : Agence France-Presse

AHI : Aileu Haburas Integrasi/Aileu Mengembangkan Integrasi

ATTI : Associacao para Integratio de Timor a Indonesia

AL : Angkatan Laut

ASEAN : Association of Southeast Asian Nations

APC : Armed Personel Carrier

Apodeti : Associacao Popular Democratica de Timorenses/Asosiasi Rakyat Timor Demokrat

Babinsa : Bintara Pembinaan Desa

Bakosurtanal : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

BKO : Bawah Komando Operasional

BMP : Besi Merah Putih

Brimob : Brigade Mobil

Brigjen : Brigadir Jenderal

BRTT : Barisan Rakyat Timor Timur

BTT : Batalyon Team Teritorial

BUMN : Badan Umum Milik Negara

CDT : Clearance Diving Team

CIA : Central Intelligence Agency

Civpol : civilian police (Polisi Sipil)

CNN : Cable News Network

CNRM : Conselho Nacional da Resistancia Maubere/Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Maubere

CNRT : Conselho Nacional da Resistancia Timorese/Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timor Timur

CPM : Conselho Politca Militar (Dewan Politik Militer)

CPN : Comissao Politca Nacional (Komisi Politik Nasional)

CQB :Close Quarter Battle

Danjen : Komandan Jenderal

Danki : Komandan Kompi

Danramil : Komandan Rayon Militer

Danrem : Komandan Korem

Depdagri : Departemen Dalam Negeri

DK PBB : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

DOK : Daerah Otonomi Khusus

Dolog : Depot Logistik

DPP : Dewan Pimpinan Pusat

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DSMTT : Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Timur

DSMPPTT : Dewan Solidaritas Mahasiswa Pelajar dan Pemuda Timor Timur

EBU : European Broadcasting Union

Falintil : Forcas Armadas de Libertacao Nacional de Timor Leste/Armada Pembebasan Nasional Rakyat Timor Timur

Fretilin : Frente Revolucionario de Timor Leste Independente / Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Rakyat Timor Timur

FPDK : Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan

FPI : Frente Politica Internal (Semacam Kementerian Dalam Negeri CNRT)

F-PP : Fraksi Persatuan Pembangunan

Gadapaksi : Garda Muda Penegak Integrasi

GPK : Gerakan Pengacau Keamanan

GPS : Global Positioning System

HAM : Hak Asasi Manusia

HUT : Hari Ulang Tahun

ICRC : International Committee of the Red Cross

IDP : Internal Displace Persons

IMF : International Monetary Fund

INTERFET : International Force for East Timor

ITFET : Indonesian Task Force to East Timor

JAM : Joint Assessment Mission

JSCG : Joint Security Consultative Group

Kadispen : Kepala Dinas Penerangan

Kapolda : Kepala Kepolisian Daerah

Kodal : Komando Pengendalian

KOTA : *Klibur Oan Timor Asua'in*/Liga Pejuang Timor Timur

KOTBD : *Klibur Oan Timor Ba Dame* atau Kelompok Orang Timor Menuju Perdamaian

Kopassandha : Komando Pasukan Sandhi Yudha

Kopassus : Komando Pasukan Khusus

Kopasgat : Komando Pasukan Gerak Cepat

Kodim : Komando Distrik Militer

Korem : Komando Resort Militer

KPS : Komite Perdamaian dan Stabilitas

KRI : Kapal Republik Indonesia

KSAD : Kepala Staf Angkatan Darat

KTP : Kartu Tanda Penduduk

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lanal : Pangkalan TNI-AL

Mabes : Markas Besar

Mahidi : Mati Hidup Integrasi dengan Indonesia

Makodim : Markas Kodim

Makorem : Markas Komando Resort Militer

Mayjen : Mayor Jenderal

Menhankam : Menteri Pertahanan dan Keamanan

Menko Polkam : Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan

Menko Ekuin : Menteri Koordinator bidang Ekonomi dan Industri

Menko Kesra/Taskin : Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan

Menkeh/Mensesneg : Menteri Kehakiman/Menteri Sekretaris Negara

Menlu : Menteri Luar Negeri

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

OCHA : United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Organisasi Komite Bantuan Kemanusiaan PBB)

Pamswakarsa : Pasukan Pengamanan Swakarsa

Pangdam : Panglima Komando Daerah Militer

Pansus : Panitia Khusus

Pemda : Pemerintah Daerah

PDI P : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PDM : Panglima Darurat Militer

PLN : Perusahaan Listrik Negara

PPI : Pasukan Pejuang Integrasi

Pangkowilhan : Panglima Komando Wilayah Pertahanan

PNS : Pegawai Negeri Sipil

PPM : Pemuda Panca Marga

PPP : Partai Persatuan Pembangunan

P4TT : Pasca Penentuan Pendapat di Timor Timur

PUDI : Partai Uni Demokrasi Indonesia

PUOD : Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

RAAF : Royal Australian Air Force

RAN : Royal Australian Navy

Ratih : Rakyat Terlatih

RCTI : Rajwali Citra Televisi Indonesia

RDTL : Republica Democratica Timor Leste

RPF : Rwandese Patriotic Front

RTP : Radio Televisao Portugal

RT-Pang : Rumah Tinggal Panglima

SAS : Special Air Services

Satgas P3TT : Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur

Satlantas : Satuan Lalu Lintas

SCTV : Surya Citra Televisi

Sekjen PBB : Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sertu : Sersan Satu

Sespri : Sekretaris Pribadi

SMH : Sydney Morning Herald

SU MPR : Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat

TAP MPR : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

TBO : Tenaga Bantuan Operasi

Telkom : Telekomunikasi

Timtim : Timor Timur

TNI : Tentara Nasional Indonesia

TVRI : Televisi Republik Indonesia

UDT : Uniao Democratica de Timorese/Uni Demokrasi Rakyat Timor

UGM : Universitas Gadjah Mada

UNAMET : United Nations Mission in East Timor

UNAMIR : United Nations Assistance Mission for Rwanda

UNIF : United Front for East Timor Autonomy atau Front Bersama untuk Otonomi Timtim

UN : United Nations

UNHCR : United Nation High Commissioner for Refugees

UNIKOM : United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission

UNIIMOG : United Nations Iran-Iraq Military Observer Group

UN PKO : United Nation Peace Keeping Operation

UNTAET : United Nations Transitional Administration in East Timor

UNTIM : Universitas Timor Timur

UPN : Universitasn Pembangunan Nasional

UUD : Undang-Undang Dasar

UU : Undang-Undang

Wadanramil : Wakil Komandan Rayon Militer

Wanra : Perlawanan Rakyat

Yonif : Batalyon Infantri

Catatan :

Kapten (Pol) : Ajun Komisaris Polisi (AKP)

Mayor (Pol) : Komisaris Polisi (Kompol)

Letkol (Pol) : Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)

Kolonel (Pol) : Komisaris Besar Polisi (Kombes)

Brigjen (Pol) : Brigadir Jenderal (Pol)

KEPUSTAKAAN

Alan Ryan, *Primary Responsibilities and Primary Risks, Australian Defence Force Participation in the International Force East Timor*, Study Paper No.304, Land Warfare Studies Centre, November 2000

Ali Alatas, *A Voice for a Just Peace, A Collection of Speeches*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta in cooperation with Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2001

Ali Alatas, *the Pebble in the Shoe: The Diplomatic Struggle for East Timor*, Aksara Karunia, Jakarta, 2006

Andrew Elek, *Lessons for East Timor, The Experience of PNG*, CSIS, Jakarta, 2002

Arnold S Kohen, *From the Place of the Dead, Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, Lion Publishing, Australia, 1999

Australia Department of Foreign Affairs and Trade, *East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge*, 2001

Bill Nicol, *Timor: A Nation Reborn*, Equinox Publishing, Jakarta, 2002

Bilver Singh, *Timor Timur: Indonesia dan Dunia, Mitos dan Kenyataan*, Edisi Revisi, Institute for Policy Studies, Jakarta, 1998

Daisy Taniredja, *Jejak-jejak Kecil Amo Boot, Peringatan 1000 Hari Romo Albrecht Karim Arbie SJ*, Yayasan Albrecht Karim Arbie, Jakarta, 2002

Damien Kingsbury, *Guns and Ballot: East Timor's Vote for Independence*, Monash Asia Institute, Clayton, Australia, 2000

David Scott, *Last Flight Out of Dili, Memoirs of an Accidental Activist in the Triumph of East Timor*, Pluto Press Australia, 2005

Don Greenlees and Robert Garran, *Deliverence: The Inside History of East Timor's Fight for Freedom*, Allen & Unwin, Australia, 2002

Eddy Hasby, *The Long and Winding Road, East Timor (in Photograph)*, Aliansi Jurnalis Indonesia, Jakarta, 2001

EM Tomodok, *Hari-Hari Akhir Timor Portugis*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 13

Gregory R Copley, *Defense and Foreign Affairs Handbook*, London.

James Dunn, *Timor, A People Betrayed*, ABC Books, Australia, 2001

Joao Mariano de Sousa Saldanha, *Ekonomi Politik: Pembangunan Timor Timur*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994

John Martinkus, *A Dirty Little War, An Eyewitness Account of East Timor's Decent Into Hell, 1997-2000*, Random House, Australia, 2001

John Pilger, *Distant Voices*, Vintage, London, 1992

John Pilger, *Hidden Agendas*, Vintage, London, 1998

Kerry B Collison, *The Timtim Man*, PenFolk Publishing, Australia, 1996

Kofi Annan, Secretary General for United Nations, *Preventing War and Disaster*, 1999 Annual Report on the Work of the Organization, UN New York

Lansell Taudevin, *East Timor: Too Little Too Late*, Duffy & Snellgrove, Australia, 1999

Lela E Madjiah, *Timor Timur: Perginya Si Anak Hilang*, Antara Pustaka Utama, Jakarta, Catakan I, Desember 2002

Matthew Jardine, *East Timor: Genocide in Paradise, the Real Story Series*, Odonian Press, Tucson, Arizona, 1995

Peter Carey and G Carter Bentley, *East Timor at the Crossroads: The Forging of A Nation*, London, 1995

Peter Tukan, Domingus de Sousa, *Demi Keadilan dan Perdamaian*, Dom Carlos Filipe Ximenes Belo SDB, Uskup Diosis Dili, Timor Timur, Komisi Keadilan dan Perdamaian Diosis Dili dan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian KWI, Jakarta, Cetakan 1, 1997

Rebecca Winters, *Voice of East Timorese Women*, Buibere, Vol. 1, East Timor International Support Center (ETICS), Australia, 1999

Tim Fischer, *Ballot and Bullets Seven Days in East Timor*, Allen & Unwin, Australia, 2000

The Encyclopedia Americana, Scholastic Library Publishing Inc, Danbury, Connecticut, Vol. 22

The New Encyclopædia Britannica, Vol.25

The Europa Year Book 1986, A World Survey, Vol II

Zacky Anwar Makarim cs, *Hari-Hari Terakhir Timor Timur, Sebuah Kesaksian*, Sportif Media Informasindo, Jakarta

PROFIL PENULIS



Cordula Maria Rien Kuntari yang lahir dan dibesarkan di kota Yogyakarta, mengawali karir jurnalistik tahun 1991, saat bergabung dengan Kompas, harian terbesar di Indonesia. Kepiawaiannya meliput masalah internasional, diplomasi, serta kebijakan politik luar negeri RI telah memberinya kesempatan melakukan perjalanan jurnalistik ke lebih dari 50 negara di Asia, Eropa, Amerika Serikat dan Amerika Latin, serta Timur Tengah.

Ia kemudian dikenal sebagai wartawan perang setelah dipercaya meliput berbagai perang internasional. Tahun 1991 saat baru dua bulan resmi bergabung dengan Harian Kompas, ia dipercaya meliput Perang Teluk di Irak. Tahun 1994, ia kembali dikirimkan untuk meliput perang saudara di Rwanda, Afrika Tengah yang merupakan perang tersadis di abad 20. Rien adalah satu-satunya wartawan asing yang memasuki Kigali, Ibu Kota Rwanda, bersama pasukan RPF atau Rwandese Patriotic Front. Ia kembali ke Irak tahun 1995 untuk meliput referendum pertama dan 2002 untuk referendum kedua. Ia terlibat dalam tim Perdamaian Kamboja dan permbersihan ranjau darat Kamboja tahun 1996, serta konflik di Timur Timor dari tahun 1992 hingga 2002.

CM Rien Kuntari juga dikenal sebagai wartawan Kepresidenan di era Presiden Soeharto hingga Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, sejak tahun 2004 hingga 2009, ia menekuni bidang yang berkaitan langsung dengan masalah kemanusiaan. Kemampuannya di bidang jurnalistik membuatnya dipercaya sebagai Pengajar Jurnalistik (Journalistic Trainer) untuk SEAPA (South East Asia Press Alliance), berbagai perusahaan baik asing maupun dalam negeri, serta universitas.

Tanggal 4 Desember 2008, Rien menerbitkan buku, “Timor Timur Satu Menit Terakhir; Catatan Seorang Wartawan” yang berisi pengalaman meliput lepasnya Timor Timur dari pangkuan Bumi Pertiwi. Kejujurannya pada fakta sejarah yang ia tuangkan secara apa adanya dalam buku itu telah menciptakan kontroversi yang berujung pada pemecatan Rien Kuntari dari Harian Kompas, Februari 2009 di saat buku itu naik cetak untuk kedua kalinya. Kini, ia bermukim di New York, AS, bergabung dengan New York Foundation for the Arts (NYFA) sambil menyelesaikan buku kedua dan ketiga yang akan menjadi trilogi lengkap tentang fakta sejarah lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CM Rien Kuntari; Writer, Journalist

rienkuntari@yahoo.com, cmrk@rienkuntari.com